

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 - 2026

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode tahun 2024-2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi untuk periode tahun 2023-2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan melaksanakan pembangunan pada tahun 2024-2026.

Pasal 3

Maksud penetapan RPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
b. Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun RKPD;
c. Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

ISI DAN URAIAN RPD

Pasal 4

(1) Isi dan uraian dokumen RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Gambaran Umum
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis
e. BAB V : Tujuan dan Sasaran
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
h. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
i. BAB IX : Penutup

(2) Isi dan uraian dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan/atau
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

(2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RPD dapat diubah tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 25

BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 25 Tahun 2023 Nomor 25

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024-2026

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 25 Tahun 2023
Tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKDA

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 APRIL 2023
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026.

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengamanatkan daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun 2023 atau Daerah Otonom Baru menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

Dokumen RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok tahap V RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Selain itu, penyusunan RPD juga memperhatikan keselarasan dengan indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, evaluasi hasil RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 agar melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, serta mendorong peran aktif masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 27 April 2023

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-9
1.3.1 Hubungan RPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat I-9
1.3.2 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMN I-10
1.3.3 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat I-10
1.3.4 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RKPD Provinsi Jawa Barat I-10
1.3.5 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kabupaten/Kota I-10
1.3.6 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Provinsi Jawa Barat I-11
1.3.7 Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-12
1.4 Maksud dan Tujuan I-12
1.5 Sistematika Penulisan I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-2
2.1.1 Karakteristik Wilayah II-2
2.1.2 Kondisi Pola Ruang Provinsi Jawa Barat II-14
2.1.3 Kondisi Demografi II-17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-20
2.2.1 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB II-21
2.2.2 PDRB Per Kapita II-32
2.2.3 Inflasi II-36
2.2.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) II-38
2.2.5 Indeks Williamson II-43
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-44
2.2.7 Kemiskinan II-61

2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran II-71
2.2.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) II-76
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-79
2.3.1 Layanan Urusan Wajib II-79
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan II-126
2.3.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah II-139
2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.. II-144
2.3.5 Unsur Pengawasan II-149
2.3.6 Pemerintahan Umum II-149
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-152
2.4.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan II-152
2.4.2 Nilai Tukar Petani (NTP) II-154
2.4.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) II-158
2.4.4 Indeks Reformasi Birokrasi II-159
2.4.5 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) II-160
2.4.6 Indeks Kerukunan Umat Beragama II-162
2.4.7 Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI) II-163
2.4.8 Indeks Kemandirian Fiskal II-165
2.4.9 Rasio Ketergantungan II-167
2.5 Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional II-169
2.6 Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 ..... II-174
2.7 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Deevelpoment Goals* (SDGs) II-188
2.8 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-201
2.8.1 Urusan Pendidikan II-201
2.8.2 Urusan Kesehatan II-203
2.8.3 Urusan Pekerjaan Umum II-204
2.8.4 Urusan Perumahan Rakyat II-208
2.8.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat II-212
2.8.6 Urusan Sosial II-213
2.9 Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) II-215
2.10 Kerja Sama Pembangunan II-220
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-1

3.1.2 Neraca Daerah III-11
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-18
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-27
3.2.2 Proporsi Pembiayaan Daerah III-32
3.3 Kerangka Pendanaan III-33
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-34
3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah III-41
3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-43
3.3.4 Alternatif Pendanaan Pembangunan III-49
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah IV-9
4.2 Isu Strategis IV-41
4.2.1 Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Internasional IV-41
4.2.2 Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Nasional IV-50
4.2.3 Telaahan Kebijakan Provinsi Jawa Barat IV-54
4.2.4 Telaahan RPJMD/RPD Daerah Sekitar IV-68
4.2.5 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... IV-70
BAB V TUJUAN DAN SASARAN V-1
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan VI-1
6.2 Arah Kebijakan Kewilayahan VI-12
6.3 Program Prioritas VI-92
6.4 Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Provinsi. VI-149
6.5 Program dan Kegiatan Strategis VI-159
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1
8.1 Indikator Makro VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VIII-3
8.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) VIII-6
8.4 Indikator Kinerja Makro Kabupaten/Kota VIII-51
BAB IX PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan II-2
Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Topografi II-4
Tabel 2.3 Jumlah Curah dan Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi II-5
Tabel 2.4 Luasan Curah Hujan Tahunan Provinsi Jawa Barat... II-6
Tabel 2.5 Batuan Geologi di Provinsi Jawa Barat II-7
Tabel 2.6 Nama DAS Lintas Provinsi Berdasarkan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Barat II-8
Tabel 2.7 Nama dan Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... II-9
Tabel 2.8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Jawa Barat Tahun 2018-2022..... II-17
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-18
Tabel 2.10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022..... II-20
Tabel 2.11 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)..... II-21
Tabel 2.12 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah) II-22
Tabel 2.13 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (persen)..... II-23
Tabel 2.14 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)..... II-24
Tabel 2.15 Pertumbuhan PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Persen)..... II-26
Tabel 2.16 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (persen)..... II-27
Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (persen)..... II-27
Tabel 2.18 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (persen)..... II-29
Tabel 2.19 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)..... II-31
Tabel 2.20 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)..... II-32
Tabel 2.21 Nilai PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah) II-32
Tabel 2.22 PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2021..... II-33

Tabel 2.23 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Antar dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi di Pulau Jawa II-34
Tabel 2.24 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (ribu rupiah) II-35
Tabel 2.25 Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 . II-41
Tabel 2.26 Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 ..... II-41
Tabel 2.27 Capaian IPM Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2018-2022.. II-46
Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2022..... II-47
Tabel 2.29 Indikator Kesehatan yang Terkait dengan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat 2018-2022 (persen) . II-49
Tabel 2.30 Umur Harapan Hidup Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Tahun)..... II-49
Tabel 2.31 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Tahun)..... II-50
Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jawa Barat Tahun 2018-2022..... II-52
Tabel 2.33 Harapan Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa..... II-53
Tabel 2.34 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Tahun)..... II-53
Tabel 2.35 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Tahun)..... II-56
Tabel 2.36 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Tahun)..... II-57
Tabel 2.37 Pengeluaran per Kapita Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Rp.000/kapita/tahun) II-59
Tabel 2.38 Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Rp.000/kapita/tahun) II-60
Tabel 2.39 Kondisi Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2018-2022 II-62
Tabel 2.40 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Persen) II-63
Tabel 2.41 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Persen) II-64
Tabel 2.42 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022..... II-67
Tabel 2.43 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022..... II-69
Tabel 2.44 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2022..... II-70
Tabel 2.45 Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Persen)..... II-74
Tabel 2.46 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Persen) II-74
Tabel 2.47 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022..... II-77
Tabel 2.48 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022..... II-78

Tabel 2.49 Kecamatan di Provinsi Jawa Barat yang Tidak Memiliki Sekolah (SMA/SMK) Negeri Maupun Swasta II-79
Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-80
Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-82
Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-87
Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 . II-88
Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-89
Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-92
Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-94
Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun II-94
Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-95
Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-99
Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-103
Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-106
Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-107
Tabel 2.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-108
Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-109
Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ... II-111
Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-112
Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-114
Tabel 2.69 Tren Lokasi PMDN Tahun 2018-2022 ..... II-115
Tabel 2.70 Tren Lokasi PMA Tahun 2018-2022 ..... II-115

Tabel 2.71 Tren Lokasi PMDN dan PMA Tahun 2018-2022 ..... II-115
Tabel 2.72 Realisasi Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022 ..... II-117
Tabel 2.73 Sektor Usaha Dengan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2021 ..... II-117
Tabel 2.74 Sektor Usaha Dengan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2022 ..... II-118
Tabel 2.75 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-120
Tabel 2.76 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-121
Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-122
Tabel 2.78 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-123
Tabel 2.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-124
Tabel 2.80 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-126
Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 .... II-127
Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-128
Tabel 2.83 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-129
Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-130
Tabel 2.85 Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-133
Tabel 2.86 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-135
Tabel 2.87 Capaian Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-137
Tabel 2.88 Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-138
Tabel 2.89 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-140
Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa II-142
Tabel 2.91 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah II-147
Tabel 2.92 Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-148
Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-148
Tabel 2.94 Capaian Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-149

Tabel 2.95 Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-152
Tabel 2.96 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten/Kota (Rupiah) Tahun 2018-2022 ..... II-154
Tabel 2.97 Nilai Tukar Petani (Petani) Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022..... II-156
Tabel 2.98 Nilai Tukar Petani (Nelayan) Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2022..... II-157
Tabel 2.99 Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Tahun 2018-2022..... II-158
Tabel 2.100 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2022..... II-163
Tabel 2.101 Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022..... II-164
Tabel 2.102 Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020..... II-166
Tabel 2.103 Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Persen) II-168
Tabel 2.104 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Tahun 2018-2022 (persen) II-170
Tabel 2.105 Gini Ratio Provinsi September 2022 (poin) II-172
Tabel 2.106 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 (poin)..... II-173
Tabel 2.107 Persandingan Capaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022 ..... II-177
Tabel 2.108 Perkembangan Indikator Makro Berdasarkan Provinsi Tahun 2019-2022 ..... II-179
Tabel 2.109 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022..... II-182
Tabel 2.110 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022..... II-185
Tabel 2.111 Capaian Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2020..... II-194
Tabel 2.112 Status Pencapaian Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ..... II-201
Tabel 2.113 Hasil Capaian Target SPM Pendidikan Penerima Layanan Dasar Tahun 2022 ..... II-202
Tabel 2.114 Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Urusan Pendidikan II-202
Tabel 2.115 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022..... II-203
Tabel 2.116 Hasil Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum II-206
Tabel 2.117 Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat II-209
Tabel 2.118 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat..... II-212
Tabel 2.119 Pencapaian SPM Sosial oleh Daerah Provinsi II-213
Tabel 2.120 Capaian Program dan Kegiatan SPM Sosial Tahun 2022..... II-215

Tabel 2.121 Jumlah BUMD Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021 ..... II-216
Tabel 2.122 Pendapatan, Biaya dan Laba/Rugi BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021 (Ribu Rupiah) II-219
Tabel 2.123 Rencana Kerja Sama Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... II-229
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi dan Target Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ... III-3
Tabel 3.2 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... III-5
Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... III-7
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... III-9
Tabel 3.5 Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... III-13
Tabel 3.6 Analisis Rasio Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... III-17
Tabel 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 ..... III-28
Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 ..... III-30
Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 ..... III-31
Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 ..... III-31
Tabel 3.11 Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 ..... III-32
Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 ..... III-33
Tabel 3.13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 ..... III-33
Tabel 3.14 Target dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026 ..... III-39
Tabel 3.15 Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 ..... III-42
Tabel 3.16 Proyeksi SiLPA Tahun 2022 dan Tahun 2026 ..... III-43
Tabel 3.17 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026 ..... III-44
Tabel 3.18 Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026 ..... III-46
Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... III-49
Tabel 3.20 Potensi Proyek yang Didanai dari Obligasi/Sukuk Daerah III-53

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat IV-10
Tabel 4.2 Identifikasi RPD Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten IV-69
Tabel 5.1 Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 dengan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026..... V-3
Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026..... V-10
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... VI-2
Tabel 6.2 Wilayah Pengembangan VI-16
Tabel 6.3 Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat VI-23
Tabel 6.4 Sinkronisasi Program Prioritas RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 Dengan Indikasi Program Perwujudan Struktur RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042..... VI-26
Tabel 6.5 Indikasi Program Perairan Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 ..... VI-63
Tabel 6.6 Sandingan Prioritas Pembangunan dengan Program Juara VI-99
Tabel 6.7 Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026..... VI-99
Tabel 6.8 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... VI-114
Tabel 6.9 Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... VI-152
Tabel 6.10 Proyek Strategis dengan Skema KPBU Tahun 2023.... VI-158
Tabel 6.11 Program dan Kegiatan Strategis Provinsi..... VI-159
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... VII-2
Tabel 8.1 Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026..... VIII-2
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... VIII-4
Tabel 8.3 Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026..... VIII-7
Tabel 8.4 Proyeksi Target Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... VIII-52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPD Jawa Barat Tahun 2024-2026 ..... I-4
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat II-4
Gambar 2.2 Peta Wilayah Ruang Laut Provinsi Jawa Barat II-12
Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan (*Landuse*) Provinsi Jawa Barat II-16
Gambar 2.4 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ... II-19
Gambar 2.5 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen) II-25
Gambar 2.6 Pola Spasial Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2022 (persen)..... II-28
Gambar 2.7 Pola Spasial Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 (persen)..... II-30
Gambar 2.8 Pola Spasial PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Tahun 2022..... II-36
Gambar 2.9 Inflasi *year on year* di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen) II-37
Gambar 2.10 Realisasi Gini Ratio di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-39
Gambar 2.11 Perkembangan Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2018-2022 ..... II-40
Gambar 2.12 Peta Capaian Gini Ratio Tahun 2022 ..... II-42
Gambar 2.13 Indeks Williamson Tahun 2018-2022..... II-44
Gambar 2.14 Capaian IPM Tahun 2018-2022 ..... II-45
Gambar 2.15 Pola Spasial Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2022..... II-47
Gambar 2.16 Capaian Umur Harapan Hidup Tahun 2018-2022 (Tahun) II-48
Gambar 2.17 Pola Spasial Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Tahun)..... II-51
Gambar 2.18 Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022 (Tahun) II-52
Gambar 2.19 Pola Spasial Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2022 (tahun) II-55
Gambar 2.20 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022 (Tahun) II-56
Gambar 2.21 Pola Spasial Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota 2022 (Tahun)..... II-58
Gambar 2.22 Capaian Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Tahun 2018-2022 (Rp.000)..... II-59
Gambar 2.23 Pola Spasial Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Rp.000/kapita/tahun) II-61
Gambar 2.24 Pola Spasial Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Persen)..... II-65
Gambar 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018-2022 ..... II-66

Gambar 2.26 Pola Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota September 2022 ..... II-68
Gambar 2.27 Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2018-2022..... II-69
Gambar 2.28 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022 ..... II-72
Gambar 2.29 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2022..... II-73
Gambar 2.30 Pola Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Persen)..... II-75
Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018-2022 .. II-76
Gambar 2.32 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2018-2022 ..... II-78
Gambar 2.33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..... II-100
Gambar 2.34 Capaian Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022 ..... II-104
Gambar 2.35 Capaian Total Penurunan Emisi dan Total Intensitas Emisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022 ..... II-104
Gambar 2.36 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022..... II-105
Gambar 2.37 Peta Sebaran Aksi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022 ..... II-105
Gambar 2.38 Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P Jawa Barat Tahun 2025-2050 ..... II-133
Gambar 2.39 Perdagangan Ekspor Jawa Barat ke Luar Negeri II-136
Gambar 2.40 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah).. II-153
Gambar 2.41 Nilai Tukar Petani (NTP) Petani Tahun 2018-2022 ..... II-156
Gambar 2.42 Nilai Tukar Petani (NTP) Nelayan Tahun 2019-2022... II-157
Gambar 2.43 Nilai dan *Share* Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) II-159
Gambar 2.44 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat..... II-162
Gambar 2.45 Indeks Kemandirian Fiskal 2018-2020 ..... II-166
Gambar 2.46 Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022 (Persen)..... II-168
Gambar 2.47 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2022 (persen) II-170
Gambar 2.48 Tingkat Kemiskinan Provinsi September 2022 (persen) II-172
Gambar 3.1 *SMART TAX* III-21
Gambar 3.2 Jenis Pajak yang Ditangani Provinsi Jawa Barat..... III-36
Gambar 3.3 Perubahan Tarif PKB dan BBNKB..... III-37
Gambar 6.1 Tema Pembangunan untuk Perwujudan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 VI-10
Gambar 6.2 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi Jawa Barat..... VI-22
Gambar 6.3 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya Provinsi Jawa Barat VI-22
Gambar 6.4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat VI-24
Gambar 6.5 *Crosscutting* Peran Perangkat Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* VI-105

Gambar 6.6 *Crosscutting* Penanggulangan Penyakit Menular AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM)..... VI-107
Gambar 6.7 *Crosscutting* Peran Perangkat Daerah dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Pemuda..... VI-108
Gambar 6.8 *CrossCutting* Indeks Pemberdayaan Gender VI-109
Gambar 6.9 *CrossCutting* Indeks Perlindungan Anak VI-109
Gambar 6.10 Strategi *Crosscutting* TPT di Jawa Barat..... VI-111
Gambar 6.11 Strategi *Crosscutting* Ketahanan Pangan di Jawa Barat..... VI-112

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki posisi strategis di Pulau Jawa dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta infrastruktur yang potensial. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota yang dibagi kedalam 6 (enam) wilayah pengembangan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah. Selain itu, pengembangan wilayah tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Pengembangan wilayah Jawa Barat sejalan dengan dilaksanakannya pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam rangka pembangunan daerah berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan amanat di atas, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sesuai dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018-2023. Pemilihan kepada daerah Provinsi Jawa Barat yang baru akan dilakukan pada tahun 2024 melalui pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru mengamanatkan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 atau DOB menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta menjadi bahan dalam rangka penyusunan visi dan misi untuk Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Serentak pada tahun 2024.

Sebagai salah satu daerah yang akan berakhir masa jabatan kepala daerah dan RPJMD pada tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 oleh setiap perangkat daerah.

Dalam penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. **Pendekatan teknokratis,** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif,** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
3. **Pendekatan Holistik-Tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan

sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

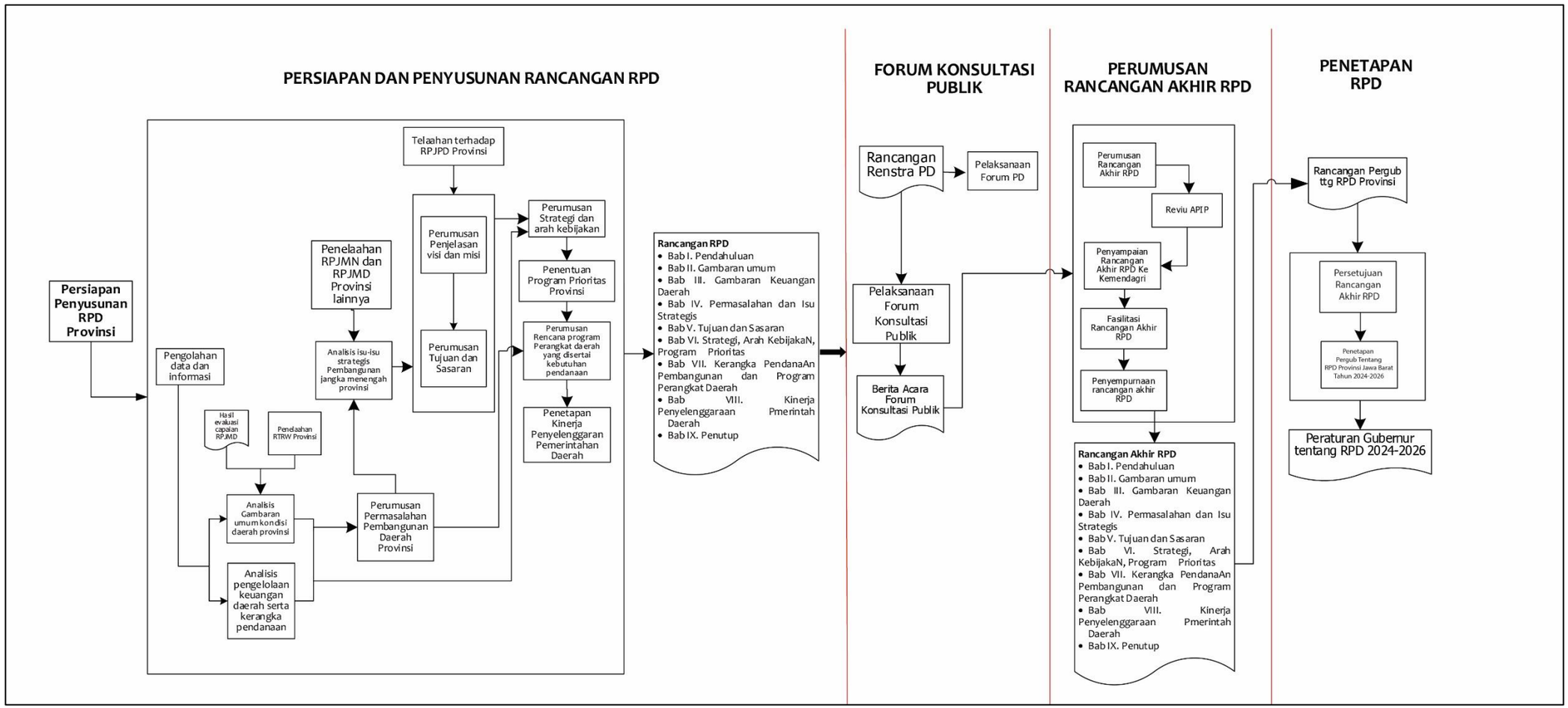
4. **Pendekatan Integratif,** dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
5. **Pendekatan Spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Mengingat pentingnya dokumen RPD sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penyusunan dokumen RPD Provinsi Jawa Barat sebagai pedoman pembangunan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. RPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, RPD yang ditetapkan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPD dengan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan periode 2024-2026, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

Alur penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada Gambar 1.1 di bawah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPD Jawa Barat Tahun 2024-2026



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252); dan
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan RPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat

Dokumen RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disusun dengan memedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Memedomani RPJPD dalam penyusunan RPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan RPD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD pada periode berkenaan.

1.3.2 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMN

Memedomani RPJMN dalam penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pada RPD dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional pada RPJMN dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.3 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Dokumen RPD Provinsi Jawa Barat akan menjadi pedoman dalam penetapan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program perangkat daerah dalam Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan berpedoman pada RPD guna mendukung pelaksanaan RPD.

1.3.4 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RKPD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RKPD tahun 2024 sampai dengan 2026 akan berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. RKPD merupakan pelaksanaan dari RPD setiap tahun, dan akan menjadi dasar dalam proses penganggaran daerah. RKPD yang berpedoman pada RPD, diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan RPD pada akhir periode.

1.3.5 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kabupaten/Kota

Dalam rangka mewujudkan keselarasan dan sinergi perencanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, maka RPD Provinsi Jawa Barat akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota yang akan menyusun RPD, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Dengan demikian, sasaran dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada periode 2024 sampai dengan 2026 dapat didukung oleh kabupaten/kota.

1.3.6 Hubungan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat memedomani RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPD yang disusun diharapkan selaras dan mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Dalam hal ini, penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Dasar pemikirannya adalah RPJMD/RPD menjadi bagian dari penyelenggaraan RTRW agar kesesuaian pola dan struktur ruang di setiap wilayah dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan daerah. Secara teknis, penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat memedomani RTRW melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPD yang disusun diharapkan selaras dan mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) baik secara vertikal maupun horizontal. SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW, dengan menyelaraskan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dalam kaitannya dengan penyelarasan Dokumen RPD dan RTRW, dokumen SPPR ini menjadi instrumen yang dapat dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi antara program dalam dokumen RPD agar selaras dengan program pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW. Dengan

demikian, program-program pembangunan yang bersifat aspasial dapat memiliki lokus yang jelas dan berbasis ruang.

1.3.7 Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RPD memiliki peran yang sangat strategis sebagai pedoman pembangunan jangka menengah periode 2024-2026. Dalam proses penyusunannya, RPD memperhatikan dokumen perencanaan lainnya sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang holistik. Setelah disusun, maka RPD menjadi pedoman bagi pembangunan sektoral maupun spasial.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah memberikan rancangan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah, dengan memedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Dokumen RPD akan menjadi pedoman bagi pembangunan tahunan Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 atau sampai dengan terpilih dan dilantiknya kepala daerah baru hasil pilkada serentak tahun 2024. Selain itu, RPD provinsi akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten/kota untuk mewujudkan sinergi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rancangan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yaitu:

a. Menelaah kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memberi gambaran kondisi riil daerah.
b. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan.
c. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan.
d. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat 3 (tiga) tahun kedepan.
e. Merumuskan program perangkat daerah untuk pembangunan Jawa Barat 3 (tiga) tahun kedepan.

f. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) beserta target indikator tahun 2024 sampai dengan 2026.
g. Memberikan pedoman penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mulai tahun 2024 sampai dengan 2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 memuat 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan RPD.

BAB II : **GAMBARAN UMUM**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, pada bab ini memuat juga Jawa Barat dalam konstelasi Nasional, capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, capaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB), Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan kerja sama pembangunan.

BAB III : **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan periode 2024-2026.

BAB IV : **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini memuat permasalahan pembangunan berdasarkan kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir. Selanjutnya dirumuskan isu strategis pembangunan dengan

memerhatikan isu internasional, nasional, dan regional Provinsi Jawa Barat.

BAB V : **TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat periode 2024-2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target per tahun.

BAB VI : **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS**

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dipilih untuk mencapai target sasaran pembangunan. Pada bab ini dimuat juga arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang berpedoman pada RTRW Provinsi Jawa Barat sehingga terwujud keterpaduan pembangunan sektoral dan spasial. Selanjutnya, ditetapkan program prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

BAB VII : **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun pembangunan Provinsi Jawa Barat, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target serta pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII : **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas indikator makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Pada setiap indikator dilengkapi dengan target setiap tahun. Selain itu dimuat juga proyeksi target indikator makro yaitu persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan laju

pertumbuhan ekonomi untuk arahan kabupaten/kota guna mendukung target nasional.

BAB IX : PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPD dan pedoman transisi untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Jawa Barat memiliki posisi geostrategis yang penting karena berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Dalam konstelasi nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis, diantaranya sebagai daerah yang mensuplai kebutuhan air baku bagi Ibukota Negara sebesar 82 persen; menjadi tulang punggung sistem ketenagalistrikan Jawa-Bali dengan menyumbang 25 persen kapasitas listrik (RUPTL PLN 2021-2030); dan sebagai pusat pendidikan tinggi yang memiliki perguruan tinggi terbanyak, yakni 392 perguruan tinggi, terdiri dari 12 perguruan tinggi negeri dan 380 perguruan tinggi swasta. Selain itu, Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam struktur perekonomian Indonesia sebagai basis industri manufaktur yang menyumbang sebesar 31,70 persen terhadap pembentukan PDB sektor Industri Pengolahan (data tahun 2022). Peran penting tersebut tidak terlepas dari keberadaaan 4 (empat) Kawasan Industri Besar Nasional di Jawa Barat, yakni Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Kawasan Industri KIIC Karawang, Kawasan Industri MM2100 Bekasi dan Kawasan Industri Delta Silicon Cikarang yang secara keseluruhan memiliki luas sekitar 12.600 hektar dan menampung 4.350 perusahaan. Dari aspek demografi, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hasil SP2020 mencatat 17,87 persen dari total penduduk Indonesia berdomisili di Jawa Barat.

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Jawa Barat secara lebih rinci disajikan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pencapaian keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat serta menjadi basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan ke depan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Adapun, gambaran kondisi demografi memberikan gambaran terkait struktur, komposisi dan persebaran penduduk di Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun tertentu.

2.1.1 Karakteristik Wilayah

a. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 106° 22' 13" BT-108° 50' 1,4" Bujur Timur, dan 5° 54' 49,58" LS–7° 49' 15,52" Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terbagi atas 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota yang meliputi 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Total luas 27 kabupaten/kota sebesar 5.359.188 hektar, dengan luas wilayah darat di Provinsi Jawa Barat seluas 3.704.067 hektar, dimana luasan tersebut termasuk daratan berupa pulau-pulau kecil sebanyak 19 (sembilan belas) pulau. Secara luasan, Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah paling besar sedangkan Kota Cirebon dan Kota Cimahi memiliki luas wilayah paling kecil.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km^2)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kabupaten Bogor	2.991,78	40	19	416
2	Kabupaten Sukabumi	4.164,15	47	5	381
3	Kabupaten Cianjur	3.631,92	32	6	354
4	Kabupaten Bandung	1.740,84	31	10	270
5	Kabupaten Garut	3.101,24	42	21	421
6	Kabupaten Tasikmalaya	2.705,86	39	-	351
7	Kabupaten Ciamis	1.595,94	27	7	258

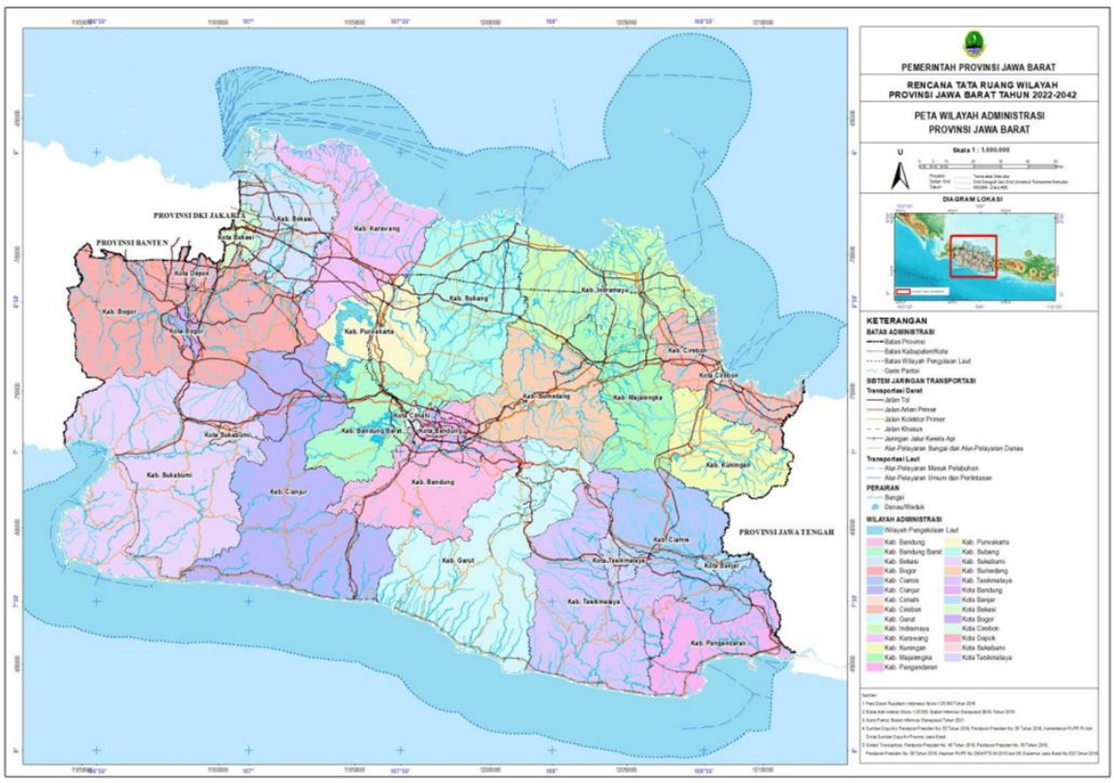
No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
8	Kabupaten Kuningan	1.192,90	32	15	361
9	Kabupaten Cirebon	1.071,95	40	12	412
10	Kabupaten Majalengka	1.330,17	26	13	330
11	Kabupaten Sumedang	1.566,20	26	7	270
12	Kabupaten Indramayu	2.076,06	31	8	309
13	Kabupaten Subang	2.165,55	30	8	245
14	Kabupaten Purwakarta	993,09	17	9	183
15	Kabupaten Karawang	1.913,71	30	12	297
16	Kabupaten Bekasi	1.251,02	23	7	180
17	Kabupaten Bandung Barat	1.283,44	16	-	165
18	Kabupaten Pangandaran	1.128,18	10	-	93
19	Kota Bogor	111,37	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,31	7	33	-
21	Kota Bandung	166,59	30	151	-
22	Kota Cirebon	39,44	5	22	-
23	Kota Bekasi	213,04	12	56	-
24	Kota Depok	199,91	11	63	-
25	Kota Cimahi	42,43	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	183,94	10	69	-
27	Kota Banjar	131,01	4	9	16
Jawa Barat		**37.040,04**	**627**	**645**	**5.312**

Sumber: Kepmen 050-145 Tahun 2022

Selain wilayah daratan, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah perairan laut berdasarkan kewenangan yaitu sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, adalah seluas 1.655.121 hektar. Wilayah perairan laut di Provinsi Jawa Barat berada di wilayah perairan Pantai Utara yang berada di Laut Jawa dan perairan Pantai Selatan yang berada di Laut Samudera Hindia.

Adapun secara administrasi, kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah pantai selatan terdiri atas Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. Sementara itu, wilayah pantai utara terdiri atas Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Pantura dan Pansela tersebut terdapat Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun Pulau-Pulau Kecil di Jawa Barat terletak di Wilayah Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sukabumi.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

b. Kondisi Topografi

Keadaan topografi Provinsi Jawa Barat sangat beragam, yaitu di sebelah utara terdiri dari dataran rendah, sebelah tengah dataran tinggi bergunung-gunung dan di sebelah selatan terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan sedikit landai. Berdasarkan ketinggiannya kondisi topografi Jawa Barat meliputi:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Topografi

No	Ketinggian (m dpl)	Luas (Ha)	Rasio terhadap Luas Wilayah (%)	Karakteristik
1	<200	2.006.213,98	54,01	Dataran rendah terletak di bagian Utara
2	200 – 500	729.032,77	19,63	
3	500 – 1500	643.162,00	17,32	Wilayah dataran berbukit terletak di bagian Utara dan Selatan
4	1500 – 3000	316.731,76	8,53	Wilayah dataran tinggi berbukit terletak di bagian Tengah
5	>3000	19.144,71	0,52	

Sumber: diolah dari Peta Kontur BIG dalam Album Peta Tematik Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Sementara untuk perairan laut Jawa Barat memiliki karakteristik yang berbeda antara wilayah Pantai Utara dan Pantai Selatan. Topografi

pantai selatan cenderung curam dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sementara topografi pantai Utara cenderung landai dan berhadapan dengan Laut Jawa. Karena berhadapan dengan Samudera Hindia, arus dan gelombang di pantai selatan lebih besar dibandingkan dengan pantai utara. Berdasarkan Peta Laut PUSHIDROSAL tahun 2015, batimetri pantai utara memiliki kedalaman maksimal 60 meter pada jarak 12 mil dari garis pantai. Sementara batimetri pantai selatan mencapai kedalaman maksimal 1.800 meter pada jarak 12 mil dari garis pantai.

c. Kondisi Klimatologi

Provinsi Jawa Barat termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16°-34° celsius dan curah hujan yang beragam. Curah hujan berada pada rentang 1.000-4.000 mm per tahun (Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Pada musim kemarau curah hujan kurang dari 150 mm sedangkan pada musim hujan curah hujan lebih dari 150 mm.

Menurut Klasifikasi Schmidt dan Ferguson, keadaan curah hujan di Jawa Barat termasuk pada iklim basah yaitu Tipe A dan Tipe B. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah hampir selalu basah dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1.000 – 6.000 mm, dengan pengecualian untuk daerah pesisir yang berubah menjadi kering pada musim kemarau, dan pada wilayah bagian selatan dan tengah, intensitas hujan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah utara. Pada tahun 2019, curah hujan rata-rata bulanan di Jawa Barat adalah 184-276 mm dengan jumlah hari hujan yakni 14-17 hari, seperti yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Curah dan Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi

Bulan	Jumlah Hari Hujan (hari)				Jumlah Curah Hujan (mm)			
	Stasiun Geofisika Bandung	Stasiun Klimatologi Bogor	Stasiun Meteorologi Citeko	Stasiun Meteorologi Jatiwangi	Stasiun Geofisika Bandung	Stasiun Klimatologi Bogor	Stasiun Meteorologi Citeko	Stasiun Meteorologi Jatiwangi
Januari	21	19	28	22	231	288	408	246
Februari	22	21	20	22	269	277	428	441
Maret	21	21	25	23	223	231	211	297
April	23	20	25	21	299	671	463	368
Mei	21	13	14	7	243	312	167	126
Juni	5	10	8	-	26	138	62	-
Juli	4	5	6	-	13	53	35	-
Agustus	1	6	5	-	-	170	19	-

Bulan	Jumlah Hari Hujan (hari)				Jumlah Curah Hujan (mm)			
	Stasiun Geofisika Bandung	Stasiun Klimatologi Bogor	Stasiun Meteorologi Citeko	Stasiun Meteorologi Jatiwangi	Stasiun Geofisika Bandung	Stasiun Klimatologi Bogor	Stasiun Meteorologi Citeko	Stasiun Meteorologi Jatiwangi
September	3	7	6	-	55	152	6	-
Oktober	8	13	9	-	84	382	180	-
November	21	14	13	6	271	330	144	68
Desember	21	24	24	17	315	553	321	384
Rata-Rata	**14**	**14**	**15**	**17**	**184**	**296**	**204**	**276**

Sumber: Stasiun Klimatologi Bogor, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Persebaran curah hujan terendah berada di wilayah Utara (Pantura, Bekasi sampai dengan Cirebon dan Kuningan) dan sebagian wilayah Tengah Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Garut, dan sekitarnya); sedangkan sebaran curah hujan tinggi melingkupi wilayah Barat-Selatan (Bogor dan Sukabumi), wilayah Tengah (Purwakarta, Subang, Sumedang, dan sekitarnya), serta wilayah Timur-Selatan (Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran).

Provinsi Jawa Barat memiliki curah hujan tahunan paling besar yaitu 2.000-3.500 mm per tahun total luas wilayah yang mempunyai curah hujan tersebut mencapai 54,41% dari luas Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.4
Luasan Curah Hujan Tahunan Provinsi Jawa Barat

No	Curah Hujan (Ha)	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Provinsi (%)
1	1000 – 1500 mm	188.069,32	5,07%
2	1500 – 2000 mm	405.607,88	10,94%
3	2000 – 2500 mm	445.236,86	12,01%
4	2500 – 3000 mm	796.788,80	21,49%
5	3000 – 3500 mm	775.370,82	20,91%
6	3500 – 4000 mm	630.921,08	17,02%
7	4000 – 4500 mm	354.290,58	9,56%
8	4500 – 5000 mm	71.196,02	1,92%
9	5000 – 5500 mm	18.410,66	0,50%
10	5500 – 6000 mm	2.243,33	0,06%

Sumber: Badan Informasi Geospasial, Peta Dasar Album Peta Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

d. Kondisi Geologi

Kondisi geologi suatu wilayah penting diketahui, karena kondisi struktur lapisan tanah dapat menentukan tingkat karawanan wilayah terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam secara ge ologis. Geologi

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki daya tarik tersendiri. Aktivitas geologi yang telah berlangsung selama berjuta-juta tahun di wilayah ini menghasilkan berbagai jenis batuan mulai dari batuan sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik dengan umur yang beragam. Akibat proses tektonik yang terus berlangsung hingga saat ini, seluruh batuan tersebut telah mengalami pengangkatan, pelipatan, dan pensesaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi geologi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.5
Batuan Geologi di Provinsi Jawa Barat

No	Geologi	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)
1	Aluvial dan Endapan Kuarter	641.953,93	17,31
2	Batu Gamping Kuarter	8.729,89	0,24
3	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	94.250,86	2,54
4	Batu Gamping Oligo - Miosen	99.967,90	2,69
5	Batu Gamping Plio - Plistosen	9.100,52	0,25
6	Batuan Gunungapi Kuarter	531.588,76	14,33
7	Batuan Gunungapi Neogen (Mio - Plio)	134.023,12	3,61
8	Batuan Gunungapi Oligo - Miosen	137.479,99	3,71
9	Batuan Gunungapi Plio - Plistosen	726.842,68	19,59
10	Batuan Pra - Tersier (Malihan, Gunungapi, Ultramafik	2.282,91	0,06
11	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	633.281,62	17,07
12	Batuan Sedimen Oligo - Miosen	162.660,65	4,38
13	Batuan Sedimen Plio - Plistosen	470.180,06	12,67
14	Batuan Terobosan Neogen	25.320,03	0,68
15	Danau/Waduk/Situ	18.703,82	0,5
16	Sedimen Paleogen	13.161,69	0,35

Sumber: Badan Geologi dan BIG, 2016

e. Kondisi Hidrologi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai. Wilayah Sungai merupakan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau pulau-pulau kecil yang terdiri atas WS Lintas Negara, WS Lintas Provinsi, WS Strategis Nasional, WS Lintas Kabupaten/Kota, dan WS dalam Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut, Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa Wilayah Sungai dan DAS yang merupakan lintas Provinsi dan wilayah sungai strategis nasional sebagai berikut:

- Wilayah Sungai Lintas Provinsi di Provinsi Jawa Barat meliputi:
- WS Cidanau- Ciujung- Cidurian yang melintasi Provinsi Banten – Jawa Barat
- WS Ciliwung – Cisadane yang melintasi Provinsi DKI Jakarta - Banten – Jawa Barat
- WS Cimanuk – Cisanggarung yang melintasi Provinsi Jawa Barat - Jawa Tengah
- WS Citanduy yang melintasi Provinsi Jawa Barat - Jawa Tengah
- Wilayah Sungai Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat adalah WS Citarum.

Provinsi Jawa Barat memiliki 6 (enam) Wilayah Sungai (WS) yang terdiri atas WS Ciliwung-Cisadane, WS Citarum, WS Cianuk-Cisanggarung, WS Citanduy, WS Cisadea-Cibareno, dan WS Ciwulan-Cilaki. Provinsi Jawa Barat memiliki 41 Daerah Aliran Sungai (DAS), terdiri atas 21 DAS bermuara ke Laut Jawa dan 20 (dua puluh) DAS bermuara ke Samudera Hindia. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Utara diantaranya Sungai Cimanuk, Cipunagara, Citarum, Kali Bekasi, Pagadungan, Cilamaya, Ciasem, Kali Beji, Cipanas, Cimanggis, Ciwaringin, Kali Bunder, Bangkaderes, dan Cisanggarung. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Selatan diantaranya Sungai Citepus, Cimandiri, Cikaso, Cibuni, Cisokan, Cisadea, Ciujung, Cipandak, Cilaki, Cikandang, Cipalebuh, Cikaengan, Cisanggiri, Cipatujah, Ciwulan, Cimedang, Cijulang, dan Citanduy.

Tabel 2.6
Nama DAS Lintas Provinsi Berdasarkan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Barat

WILAYAH SUNGAI	PROVINSI	NAMA DAS	LUAS (KM²)
CILIWUNG-CISADANE	Banten	Cimanceuri	216,3
	Jawa Barat	Cimanceuri	254,6
	Banten	Cisadane	256,7
	Jawa Barat	Cisadane	1.126
	Dki Jakarta	Angke	346,9
	Jawa Barat	Angke	154,4
	Dki Jakarta	Cakung	84,05
	Jawa Barat	Cakung	59,37
	Dki Jakarta	Ciliwung	141,4
	Jawa Barat	Ciliwung	298,7
	Dki Jakarta	Krukut	131,3
	Jawa Barat	Krukut	40,74
	Dki Jakarta	Sunter	130,7
	Jawa Barat	Sunter	48,32
	Jawa Barat	Cisanggarung	955,9

WILAYAH SUNGAI	PROVINSI	NAMA DAS	LUAS (KM²)
CIMANUK - CISANGGARUNG	Jawa Tengah	Cisanggarung	44,29
CISADEA - CIBARENO	Banten	Cibareno	135,8
	Jawa Barat	Cibareno	87,41
CITANDUY	Jawa Barat	Citanduy	2693
	Jawa Tengah	Citanduy	970,3

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018

DAS terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah DAS Citarum yang mencapai luas 18,21% dari luas Provinsi Jawa Barat. Sampai tahun 2017 di Jawa Barat terdapat DAS dengan kondisi kritis dan sangat kritis, 37 DAS dari 41 DAS di Provinsi Jawa Barat termasuk terkategori kritis dan sangat kritis. DAS dengan luas tingkat kekeritisan sangat besar adalah DAS Citarum mencapai 78.508,56 ha. Untuk lebih jelas mengenai kondisi DAS di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Nama dan Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)	Tingkat Kekritisan Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Total (ha)
1	DAS Bangkaderes	40.188,73	1,08	95,34	-	95,34
2	DAS Ciasem	75.197,12	2,03	2.726,73	320,03	3.046,76
3	DAS Cibareno	7.528,16	0,2	506,68	-	506,68
4	DAS Ciberang	9.239,89	0,25	1.076,76	-	1.076,76
5	DAS Cibuni	143.026,14	3,86	14.949,13	2.508,30	17.457,42
6	DAS Cidurian	31.577,26	0,85	3.922,56	-	3.922,56
7	DAS Cijulang	56.199,14	1,51	1.751,73	47,79	1.799,52
8	DAS Cikaengan	46.463,76	1,25	11.918,77	2.744,08	14.662,85
9	DAS Cikandang	66.950,58	1,8	8.228,13	451,99	8.680,12
10	DAS Cikaso	98.486,45	2,65	15.700,72	1.306,92	17.007,64
11	DAS Cilaki	88.829,44	2,39	27.228,20	9.356,11	36.584,30
12	DAS Cilamaya	60.782,65	1,64	2.090,88	198,97	2.289,84
13	DAS Ciletuh	67.830,48	1,83	4.336,51	68,68	4.405,20
14	DAS Ciliwung	47.457,74	1,28	56,34	-	56,34
15	DAS Cimanceuri	24.438,95	0,66	613,31	-	613,31
16	DAS Cimandiri	185.944,05	5,01	12.502,66	6.388,36	18.891,02
17	DAS Cimanggis	17.500,60	0,47	-	-	-
18	DAS Cimanuk	370.472,39	9,99	27.310,95	4.679,25	31.990,20
19	DAS Cimedang	79.858,94	2,15	7.338,53	1.888,22	9.226,75
20	DAS Cipalebuh	26.256,86	0,71	1.588,26	329,7	1.917,95
21	DAS Cipanas	75.458,74	2,03	1,36	-	1,36
22	DAS Cipandak	18.905,54	0,51	4.683,92	514,8	5.198,72
23	DAS Cipatujah	62.270,42	1,68	7.695,56	2.413,26	10.108,82
24	DAS Cipunagara	146.873,49	3,96	11.208,85	1.404,47	12.613,32
25	DAS Cisadane	112.393,39	3,03	1.923,45	-	1.923,45
26	DAS Cisadea	48.239,87	1,3	10.216,92	613,51	10.830,43
27	DAS Cisanggarung	111.832,35	3,01	1.301,60	277,25	1.578,85
28	DAS Cisanggiri	25.914,69	0,7	3.265,14	319,81	3.584,95
29	DAS Cisokan	27.220,98	0,73	8.309,31	25,37	8.334,68
30	DAS Citanduy	269.988,44	7,28	18.033,64	561,76	18.595,40
31	DAS Citarum	675.331,48	18,21	75.886,11	2.622,45	78.508,56
32	DAS Citepus	22.623,19	0,61	545,7	-	545,7
33	DAS Ciujung	17.702,17	0,48	5.024,86	139,1	5.163,96
34	DAS Ciwaringin	60.435,35	1,63	1.706,69	-	1.706,69
35	DAS Ciwulan	115.295,23	3,11	6.680,50	1.695,92	8.376,43
36	DAS Kali Beji	72.304,78	1,95	111,09	-	111,09
37	DAS Kali Bekasi	150.156,88	4,05	438,92	35,1	474,02

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Rasio Terhadap Luas Jabar (%)	Tingkat Kekritisan Kritis (ha)	Sangat Kritis (ha)	Total (ha)
38	DAS Kali Cakung	13.424,37	0,36	-	-	-
39	DAS Kali Pagadungan	89.212,21	2,4	-	-	-
40	DAS Kali Sunter	8.973,61	0,24	-	-	-
41	DAS Kalibunder	40.741,73	1,1	630,65	-	630,65
	Total	**3.707.582,76**	100	**301.606,45**	**40.911,19**	**342.517,63**

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 2016

f. Potensi Wilayah dan Daerah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi topografi, hidrologi, klimatologi, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana yang cukup tinggi. Beberapa jenis bencana yang sering terjadi di wilayah ini antara lain: 1) Gempa Bumi dan Tsunami, karena Jawa Barat terletak di daerah yang berada di zona pertemuan lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia. Sebagai hasilnya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Beberapa gempa besar pernah terjadi di Jawa Barat, seperti gempa Tasikmalaya tahun 2009, gempa Sukabumi tahun 2019, dan gempa Cianjur tahun 2022. Dan beberapa wilayah di Jawa Barat Selatan juga berpotensi mengalami tsunami; 2) Banjir, Jawa Barat memiliki banyak sungai besar dan wilayah dataran rendah yang rentan terhadap banjir. Banjir sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang kurang memadai, serta peningkatan urbanisasi yang tidak terkendali. Beberapa daerah yang sering terkena banjir di Jawa Barat antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, serta Kota Cirebon; 3) Tanah Longsor, topografi Jawa Barat yang berbukit-bukit meningkatkan risiko tanah longsor, terutama pada daerah perbukitan yang memiliki tingkat kerapatan penduduk yang tinggi. Penebangan hutan yang tidak terkontrol dan praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan juga dapat meningkatkan risiko tanah longsor. Daerah yang rentan terhadap tanah longsor di Jawa Barat antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat. 4) Gunung Api, Jawa Barat memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Gede. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan ancaman letusan, lahar, dan awan panas yang membahayakan penduduk di sekitarnya; 5) Kebakaran Hutan, Jawa Barat juga mengalami risiko kebakaran hutan, terutama pada musim kemarau

yang panjang dan kondisi cuaca yang kering. Kebakaran hutan dapat merusak ekosistem alami, mengancam kehidupan satwa liar, dan berdampak negatif pada kualitas udara.

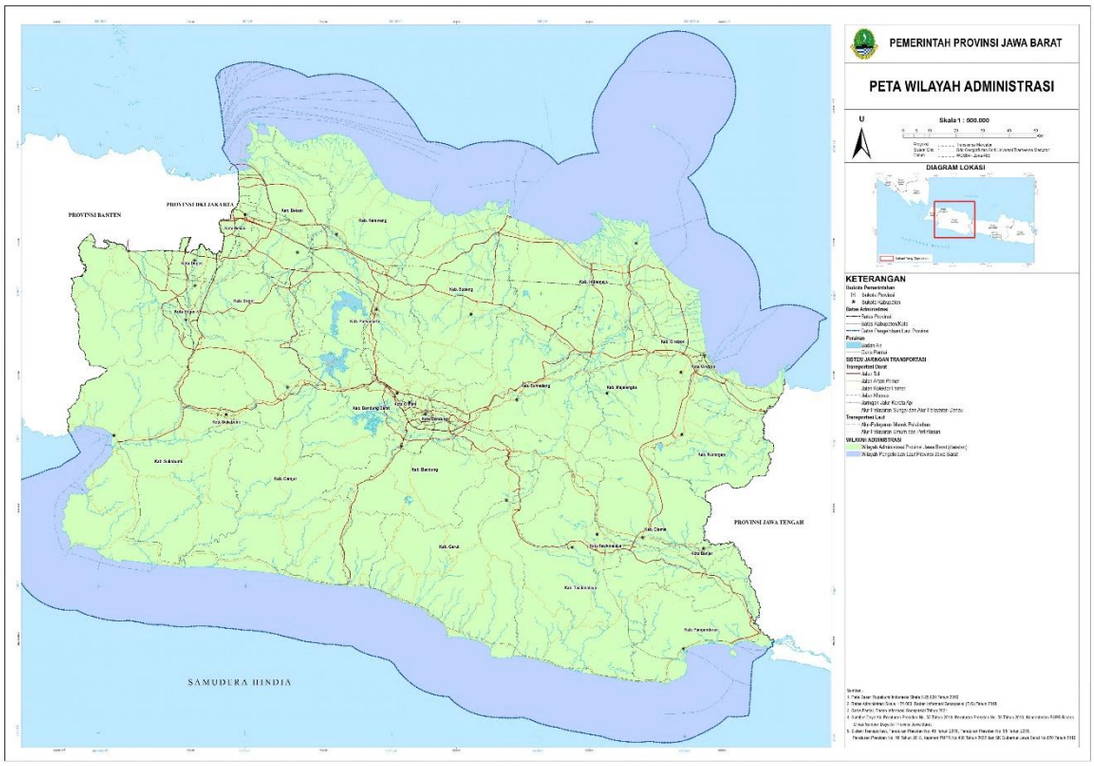
Nilai Indeks Risiko Bencana di Jawa Barat masih tinggi yaitu 131,62 (BPBD Provinsi Jawa Barat, 2022), ditandai dengan kondisi belum adanya kabupaten/kota dengan kategori IRB rendah, sehingga Jawa Barat sebagai wilayah yang rentan bencana. Pemerintah dan berbagai instansi terkait telah berupaya untuk mengurangi risiko bencana di Jawa Barat melalui program mitigasi bencana, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan infrastruktur. Namun, penting bagi penduduk setempat untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk evakuasi yang diberikan oleh otoritas terkait dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah mereka.

g. Potensi Wilayah Perairan 12 Mil Laut

Kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut Provinsi Jawa Barat memiliki luas 1.655.121 hektar, diukur dengan jarak 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Wilayah perairan laut Provinsi Jawa Barat berada di wilayah perairan Pantai Utara yang berada di Laut Jawa dan perairan Pantai Selatan yang berada di Laut Samudera Hindia dengan total garis pantai sepanjang 832,69 km dan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 19 (sembilan belas) pulau. Untuk kondisi topografi, berdasarkan Peta Laut PUSHIDROSAL tahun 2015, batimetri Pantai Utara memiliki kedalaman maksimal 60 meter pada jarak 12 mil dari garis pantai. Sementara batimetri pantai selatan mencapai kedalaman maksimal 1.800 meter pada jarak 12 mil dari garis pantai.

Secara administrasi, kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah pantai selatan terdiri atas Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. Sementara itu, wilayah pantai utara terdiri atas Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Pantura dan Pansela tersebut terdapat Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun Pulau-Pulau Kecil di Jawa Barat terletak di Wilayah Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sukabumi.

Gambar 2.2
Peta Wilayah Ruang Laut Provinsi Jawa Barat



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Kegiatan Pemanfaatan Eksisting dan Sumber Daya pada kawasan 12 mil laut, diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perikanan Tangkap

Kegiatan Perikanan tangkap di laut di Jawa Barat meliputi wilayah laut hingga 12 mil di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap laut yang berhasil ditangkap di perairan laut Provinsi Jawa Barat dan didaratkan di Pelabuhan perikanan mencapai 195.46 ton dengan nilai Produksi dari hasil tangkapan tersebut adalah sekitar Rp4.243,61 milyar. Kabupaten Indramayu memberikan kontribusi produksi terbesar, yakni mencapai 74,94 persen dari total produksi, diikuti oleh Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sukabumi.

2. Kegiatan Perikanan Budidaya Laut

Di Provinsi Jawa Barat, RTP budidaya laut terdapat di 5 (lima) kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon dengan jumlah total 478 RTP yang terdiri 987 pembudidaya meliputi budidaya laut, budidaya jaring apung, dan budidaya rumput laut.

3. Sumber Daya Non Hayati

Potensi sumber daya non hayati di perairan Jawa Barat di antaranya mineral tambang dan gas. Perairan Utara Jawa Barat memiliki 368 anjungan minyak dan gas bumi dan menjadi wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi untuk 7 (tujuh) blok migas. Sisa cadangan gas alam Jawa Barat saat ini sebesar 305,4 miliar kaki kubik yang tersimpan di koordinat 4-12 mil laut.

Selain minyak dan gas bumi, kawasan pesisir utara juga mengandung berbagai bahan galian berupa pasir sungai, endapan sirtu, pasir pantai, pasir besi dan lempung/tanah liat. Bahan galian yang sempat menjadi isu pembangunan di Jawa Barat adalah pasir besi yang umumnya terdapat di wilayah Pansela Jabar. Kawasan pertambangan pasir besi di Jawa Barat bagian selatan diduga kaya material titanium yang menjadi salah satu bahan pembuat kerangka pesawat terbang dan kapal laut.

4. Sumber Daya Buatan

Sumber Daya Buatan di wilayah perairan Jawa Barat di antaranya pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, berjumlah 41 pelabuhan dengan kelas yang bervariasi di tiap kabupaten/kota. Kemudian, pelabuhan laut yang berdasarkan data Dinas Perhubungan berjumlah 8 (delapan) unit. Pelabuhan tersebut meliputi Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Palabuhanratu, Pelabuhan Bojong Selawe, Pelabuhan Tarumajaya, Pelabuhan Teluk Palangpang, Pelabuhan Tirtamaya, dan Pelabuhan Majingklak. Selain pelabuhan tersebut, terdapat pula beberapa terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

Selain pelabuhan, terdapat sentra industri perikanan di Jawa Barat yang berada di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Sukabumi dan

Pangandaran. Potensi komoditi unggulan Industri Kabupaten Indramayu terutama di kawasan pesisir dan pantai meliputi industri penggaraman, industri kerupuk ikan dan udang yang termasuk kedalam kelompok industri besar sedang dan industri pengeringan ikan

5. Jasa Lingkungan

Jasa Lingkungan kawasan perairan Provinsi Jawa Barat di antaranya wisata bahari di Pantai Selatan Jawa Barat yang tersebar di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Untuk wilayah utara meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Kemudian, terdapat produksi garam dengan lokasi kegiatan Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang berada di wilayah pesisir Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Karawang. Rerata produksi garam Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017 mencapai 397.876,92 ton garam atau sekitar 20,4 persen dari rata-rata produksi garam nasional. Selain itu, ada 463 situs kapal tenggelam yang dapat menjadi museum dan titik menyelam serta jaringan kabel optik dasar laut.

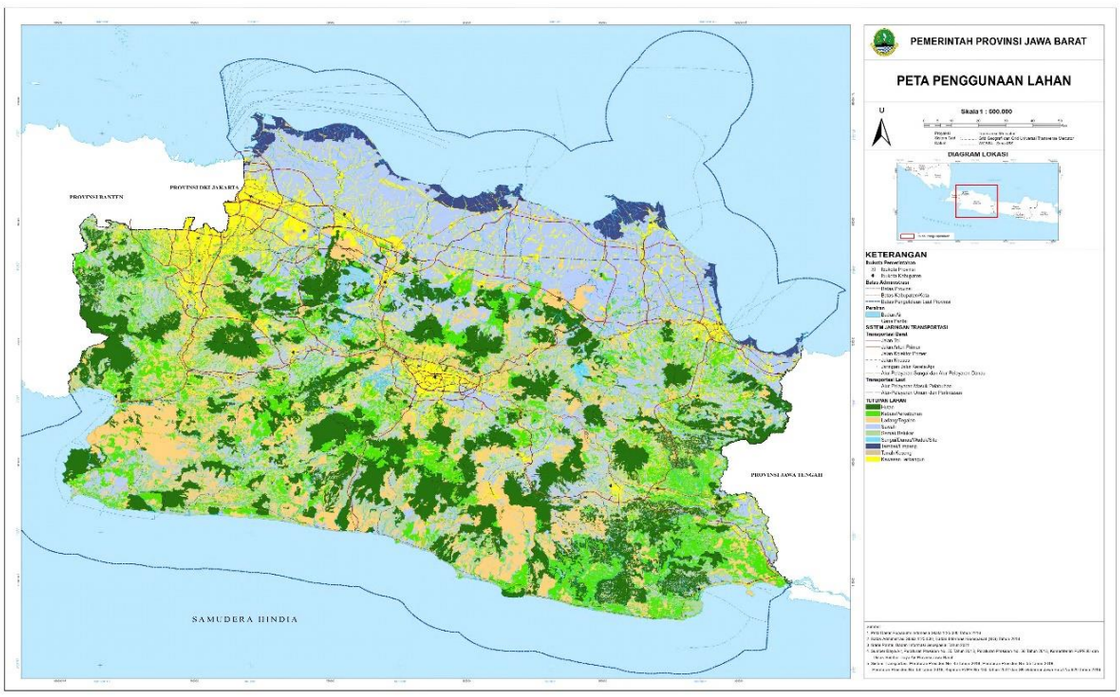
2.1.2 Kondisi Pola Ruang Provinsi Jawa Barat

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kondisi Kawasan lindung di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1) Kawasan hutan yang menjadi kawasan lindung yakni kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi bersumber dari Surat Keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 9404 Tahun 2019. Pada tahun 2021 Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kawasan Hutan yang digunakan sebagai dasar deleniasi Pola Ruang, menggunakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6603/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2020;
2) Kawasan hutan pangongan dengan luas 7.286,08 Ha dan kawasan hutan cadangan 29.075,13 Ha;

3) Kawasan Hutan adat Leuweng Gede yang sejatinya merupakan hutan larangan yang dijaga dengan aturan-aturan adat;
4) Kawasan resapan air merupakan kawasan imbuhan air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
5) Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 dengan luas 15.999 Ha;
6) Kawasan Lindung Geologi bersumber data dari Direktorat Geologi hasil penyelidikan sampai dengan, Badan Geologi tahun 2018;
7) Kawasan Perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan danau/waduk:
    a) Sempadan sungai tidak bertanggul bukan kawasan perkotaan;
    b) Sempadan danau/waduk sebesar 50 meter;
    c) Sempadan pantai sebesar 100 meter;
8) Kawasan rawan bencana alam berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG, 2016) dan BNPB Provinsi Jawa Barat tahun 2016 terdiri atas: Kawasan Bahaya Gunung api, Gerakan tanah, rawan tsunami, dan sesar aktif;
9) Kawasan cagar budaya;
10) Kawasan lindung berdasarkan RZWP3K Provinsi (Revisi Revisi Materi Teknis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 Tahun 2021, versi November 2021).

Gambar 2.3
Peta Penggunaan Lahan (*Landuse*) Provinsi Jawa Barat



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan budidaya yang dipandang sangat penting/strategis menurut peraturan perundang-undangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi, secara administrasi bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas Kawasan Hutan Produksi (Hp); Kawasan Pertanian (P); Kawasan Perikanan (IK); Kawasan Pergaraman (KEG); Kawasan Pertambangan Dan Energi (TE); Kawasan Peruntukan Industri (KPI); Kawasan Pariwisata (W); Kawasan Permukiman (PM); Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan Di Laut (DA); Kawasan Transportasi (TR); dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Kawasan peruntukan budidaya disesuaikan dengan perkembangan karakteristik struktur dan pola ruang yang terjadi. Selain itu pengaruh perubahan iklim dan karakteristik eksternal mewarnai pola ruang yang direncanakan. Perubahan karakteristik pola ruang yang terjadi antara lain berkaitan dengan persoalan, isu dan tantangan dalam mewujudkan pola ruang yang modern berbasis teknologi informasi, berkelanjutan, inklusif, adaftif terhadap perubahan iklim, mendorong terwujudnya ketahanan

energi, adaptif terhadap bencana, mendorong terwujudnya ketahanan pangan, serta kompetitif dan membuka ruang investasi namun tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

2.1.3 Kondisi Demografi

Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh BPS mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan sebesar 1,28 persen sehingga jumlah penduduknya meningkat menjadi 49,40 juta jiwa. Dengan luas daratan Jawa Barat sebesar 35,38 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Jawa Barat sebanyak 1.379 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2022.

Tabel 2.8
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Jawa Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km
2018	48.683.861	1,34	1.376
2019	49.316.712	1,30	1.394
2020	48.274.162	1,26	1.412
2021	48.782.402	1,54	1.379
2022	49.405.808	1,28	1.379

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2.8 menunjukan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat selama periode 2018-2022 masih relatif tinggi, dimana laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Salah satu yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat adalah beban migrasi yang cukup tinggi di kawasan Bodebek, dimana rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 4,5 persen per tahun.

Data tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki di Jawa Barat sebanyak 25,06 juta orang, atau 50,73 persen dari penduduk Jawa Barat. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Jawa Barat sebanyak 24,33 juta orang, atau 49,26 persen dari penduduk Jawa Barat. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Jawa Barat sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Jawa Barat pada tahun 2022.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat
Tahun 2018-2022

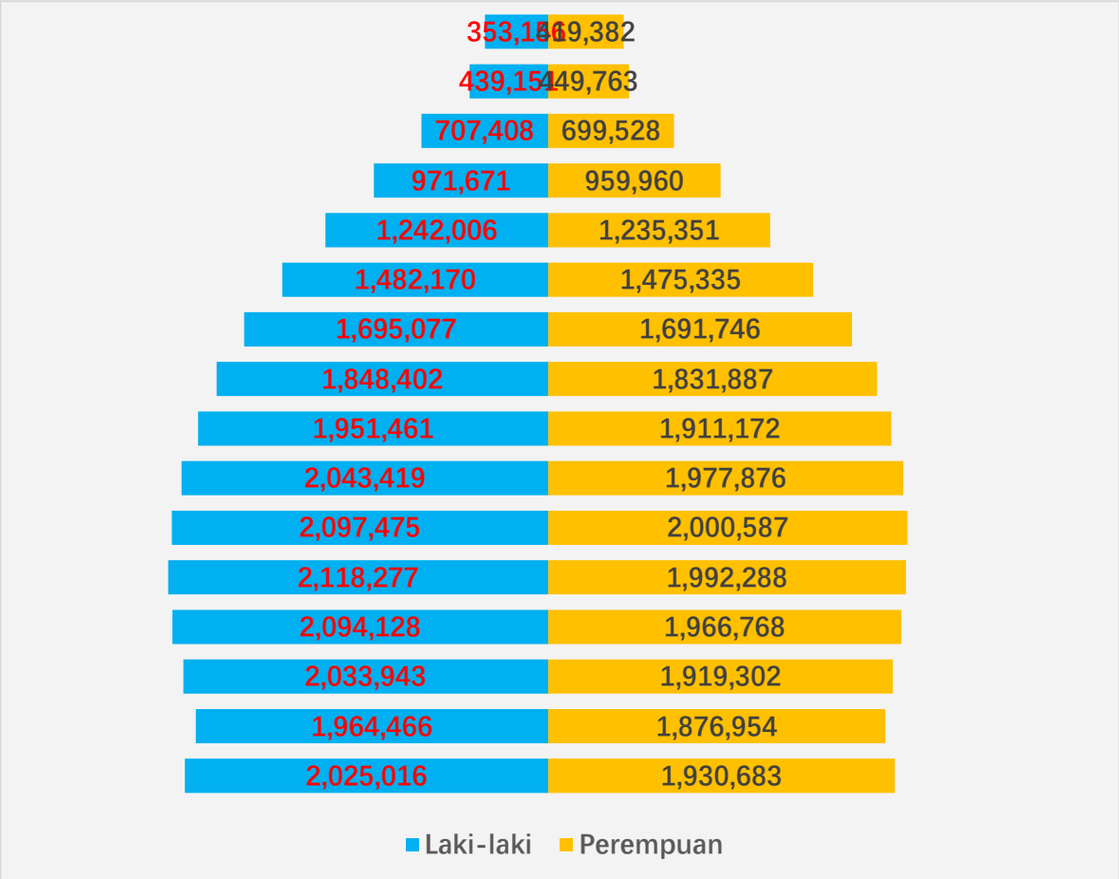
Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)		Jumlah Penduduk	Rasio
	Laki-laki	Perempuan		
2018	24.652.609	24.031.252	48.683.861	102,59
2019	24.962.701	24.354.011	49.316.712	102,50
2020	24.508.885	23.765.277	48.274.162	102,41
2021	24,768.980	24.023.422	48.782.402	103,10
2022	25.067.226	24.338.582	49.405.808	103,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Analisis Hasil Sensus Penduduk 2020 menyebutkan bahwa piramida penduduk Jawa Barat mengalami transisi dari piramida penduduk ekspansif menuju piramida penduduk stasioner, ditunjukkan dari jumlah penduduk usia 0-14 tahun yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk kelompok usia di atasnya. Usia produktif (15 – 64 tahun) di Jawa Barat mendominasi penduduk hingga 69,99 persen dari total populasi penduduknya. Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar.

Dengan struktur penduduk demikian, Jawa Barat masih berada pada periode “jendela kesempatan” (*window opportunity*) untuk menikmati bonus demografi. Jika dimanfaatkan secara optimal, maka Jawa Barat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Komposisi penduduk menunjukkan proporsi penduduk usia anak (kelompok penduduk usia 0-14 tahun) di Provinsi Jawa Barat masih cukup besar mencapai 24,60 persen dari total penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa pengarusutamaan anak masih menjadi isu utama. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada anak sebagai kelompok rentan dan "korban terbesar" akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Menyadari bahwa kualitas hidup manusia sangat ditentukan sejak

usia dini, maka pemenuhan hak dan perlindungan anak hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.10
Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk
Bogor	5.566.838	1,46	1.861
Sukabumi	2.806.664	1,69	674
Cianjur	2.542.793	1,50	700
Bandung	3.718.660	1,49	2.136
Garut	2.627.220	0,92	847
Tasikmalaya	1.906.288	1,25	705
Ciamis	1.247.768	0,87	782
Kuningan	1.196.017	1,38	1.003
Cirebon	2.315.417	1,12	2.160
Majalengka	1.335.460	1,31	1.004
Sumedang	1.167.033	0,72	745
Indramayu	1.871.832	1,16	902
Subang	1.624.386	1,04	750
Purwakarta	1.028.569	1,75	1.036
Karawang	2.505.247	1,54	1.309
Bekasi	3.214.791	1,86	2.570
Bandung Barat	1.846.969	1,86	1.439
Pangandaran	432.380	1,17	9.550
Kota Bogor	1.063.513	1,12	7.377
Kota Sukabumi	356.410	1,65	14.776
Kota Bandung	2.461.553	0,41	8.652
Kota Cirebon	341.235	1,35	12.652
Kota Bekasi	2.590.257	1,04	12.159
Kota Depok	2.123.349	1,85	10.622
Kota Cimahi	575.235	0,69	13.557
Kota Tasikmalaya	733.467	1,37	3.988
Kota Banjar	206.457	1,55	1.576
Provinsi Jawa Barat	**49.405.808**	**1,33**	**1.334**

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023

Berdasarkan Tabel 2.10 dapat disimpulkan bahwa distribusi penduduk di Jawa Barat cenderung tidak merata, penduduk terkonsentrasi di wilayah Metropolitan Bodebek dan Bandung Raya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kinerja

beberapa indikator pembangunan yang mewakili gambaran kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat dengan dukungan data beberapa tahun terakhir disajikan pada subbab ini.

2.2.1 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB

Gambaran perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Nilai nominal PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dikelola oleh suatu daerah atau dengan kata lain seberapa besar nilai tambah/jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 23,57 persen dan 12 persen. Hal ini, ekuivalen dengan peningkatan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp462.154,67 miliar (ADHB) dan Rp170.360,79 miliar (ADHK).

Tabel 2.11
Nilai Produk Domestik Regional Bruto
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB (ADHB)	1.960.627,65	2.123.153,71	2.082.107,26	2.204.660,23	2.422.782,32
PDRB (ADHK)	1.419.624,14	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589 984,93

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

Tiga lapangan usaha sebagai kontributor utama dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan nilai PDRB, yakni lapangan usaha Industri Pengolahan dari yang semula Rp921.577,02 miliar pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp1.023.400,77 miliar di tahun 2022, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari yang semula Rp319.585,97 miliar di tahun 2021 meningkat menjadi Rp 348.996,56 miliar pada tahun 2022, dan Konstruksi dari yang semula Rp191.608,09 miliar pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp202.276,62 miliar pada tahun 2022. Peningkatan nilai nominal PDRB yang cukup besar di 3 (tiga) sektor tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan strategis dalam rangka

pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Tabel 2.12
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	170.155,21	186.441,35	192.111,63	188.594,03	207.716,66
B	Pertambangan dan Penggalian	26.611,60	26.448,30	23.160,87	25.535,79	27.934,49
C	Industri Pengolahan	827.285,29	883.289,85	856.103,73	921.577,02	1.023.400,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10 924,69	10.966,98	10.069,94	11.242,25	12.161,54
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1 789,86	1.936,91	2.156,07	2.373,85	2.485,54
F	Konstruksi	165. 05,99	181.289,37	171.250,94	191.608,09	202.276,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	291.735,68	323.622,36	303.861,47	319.585,97	348.996,56
H	Transportasi dan Pergudangan	111.437,24	117.219,61	109.147,87	110.379,29	130.202,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.641,27	61.141,69	59.402,94	60.135,50	69.670,16
J	Informasi dan Komunikasi	56.270,70	60.943,95	81.729,95	87.369,88	92.644,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	54.705,40	57.490,59	58.383,96	64.759,36	69.885,94
L	Real Estate	20.753,97	22.955,76	23.561,25	26.392,45	28.413,16
M,N	Jasa Perusahaan	8.173,42	9.974,90	8.402,88	9.169,97	10.812,00
O	Administrasi Pemerintahan	45.563,55	49.060,74	46.031,12	45.441,76	44.535,07
P	Jasa Pendidikan	59.300,94	68.079,32	75.467,69	77.340,93	80.336,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.781,00	16.680,68	16.214,51	17.787,33	19.157,24
R,S,T, U	Jasa Lainnya	40.891,84	45.611,35	45.050,44	45.366,76	52.154,05
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**1.960.627,65**	**2.123.153,71**	**2.084.620,25**	**2.082.107,26**	**2.204.660,23**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa tergambarkan dari struktur ekonomi. Selama 3 (tiga) tahun terakhir struktur perekonomian didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi di atas 41 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diatas 14 persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi di atas 8 persen. Dominasi sektor Industri Pengolahan dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat mengindikasikan kegiatan ekonomi bertumpu pada kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan/atau barang yang nilainya kurang menjadi bernilai tinggi.

Tabel 2.13
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*)	2022**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,68	8,78	9,23	8,55	8,57
B	Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,25	1,11	1,16	1,15
C	Industri Pengolahan	42,19	41,60	41,12	41,80	42,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,56	0,52	0,48	0,51	0,50
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,11	0,10
F	Konstruksi	8,45	8,54	8,22	8,69	8,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,88	15,24	14,59	14,50	14,40
H	Transportasi dan Pergudangan	5,68	5,52	5,24	5,01	5,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,79	2,88	2,85	2,73	2,88
J	Informasi dan Komunikasi	2,87	2,87	3,93	3,96	3,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,71	2,80	2,94	2,88
L	Real Estat	1,06	1,08	1,13	1,20	1,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,42	0,47	0,40	0,42	0,45
O	Administrasi Pemerintahan	2,32	2,31	2,21	2,06	1,84
P	Jasa Pendidikan	3,03	3,21	3,62	3,51	3,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,79	0,78	0,81	0,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,09	2,15	2,16	2,06	2,15
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Karakteristik sektor Industri Pengolahan yang memiliki produktivitas relatif tinggi serta memiliki keterkaitan dan memasok kebutuhan bagi sektor lainnya menjadikan sektor ini tumbuh pesat. Selain itu, jenis industri yang berkembang mulai dari industri padat karya, padat modal hingga padat teknologi mempengaruhi serapan tenaga kerja yang menentukan produktivitas ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap, maka *output* produksi semakin tinggi. Sektor Industri Pengolahan memiliki prospek ke depan yang baik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi wilayah di Provinsi Jawa Barat melalui kombinasi pendekatan sektoral dengan mengembangkan klaster industri dan pendekatan regional atau kawasan yang berlandaskan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Ke depan, pangsa sektor Industri Pengolahan diperkirakan akan semakin menguat seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan.

Tabel 2.14
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	101.752,20	104.596,75	107.000,79	108.406,55	113.186,39
B	Pertambangan dan Penggalian	25.491,23	24.791,42	23.771,26	23.966,20	23.880,32
C	Industri Pengolahan	7.661,00	640.760,96	612.799,43	638.689,32	683.420,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.438,95	5.373,58	4.964,31	5.543,06	5.843,38
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.134,53	1.168,93	1.295,18	1.419,97	1.456,85
F	Konstruksi	119.305,16	126.612,45	119.062,01	126.767,90	126.184,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	216.611,15	232.878,84	214.374,85	221.203,99	230.532,56
H	Transportasi dan Pergudangan	67.702,02	71.064,36	68.097,41	67.981,50	75.521,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38.160,14	40.928,32	38.634,85	38.620,93	42.972,84
J	Informasi dan Komunikasi	58.420,75	63.861,23	85.632,78	91.882,97	97.480,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	35.727,39	36.498,69	36.914,80	39.014,44	38.743,11
L	Real Estate	17.658,39	19.344,12	19.716,06	22.033,68	22.993,05
M,N	Jasa Perusahaan	6.284,13	6.859,66	5.599,12	6.077,47	6.851,04
O	Administrasi Pemerintahan	27.360,56	28.704,06	26.716,83	26.178,25	25.710,27
P	Jasa Pendidikan	40.065,48	42.156,30	44.978,19	44.988,00	46.244,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.369,96	12.448,02	11.777,49	12.666,86	13.404,19
R,S,T, U	Jasa Lainnya	30.715,02	32.912,01	32.045,37	32.305,31	35.559,49
PDRB		**1.419.624,14**	**1.490.959,69**	**1.453.380,72**	**1.507.746,39**	**1.589.984,93**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan gambaran atas dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

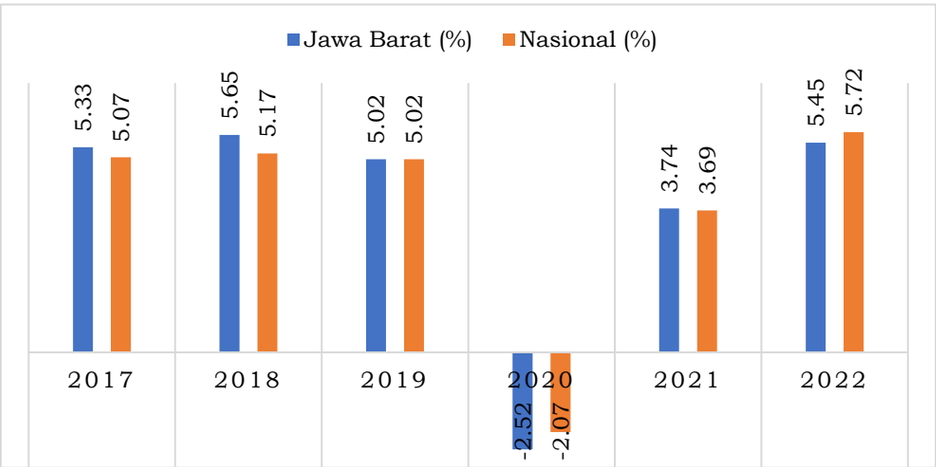
Kinerja ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kinerja yang positif ditandai dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh positif dibandingkan capaian tahun 2020 yang terkontraksi cukup dalam. Hal ini mengindikasikan menguatnya pemulihan ekonomi dampak dari keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, dan efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah. Perekonomian yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi tersebut merupakan cerminan dari kemajuan pemulihan ekonomi yang semakin membaik, khususnya pasca pelonggaran PPKM Jawa-Bali dan ditopang oleh meningkatnya permintaan global dan domestik pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dengan berbagai dinamika yang terjadi baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun perkembangan kasus COVID-19, serta kemajuan vaksinasi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2021 tercatat sebesar 3,74 persen (*y-o-y*), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,52 persen (*y-o-y*). Perekonomian Jawa Barat terus membaik dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,45 persen (*y-o-y*). Gambar 2.5 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan nasional.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditopang oleh lapangan usaha utama yang tumbuh cukup baik pada triwulan tersebut, seperti Industri Pengolahan tumbuh 7,00 persen, Perdagangan tumbuh 4,22 persen, dan Pertanian tumbuh 4,41 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Perusahaan sebesar 12,73 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,27 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,09 persen serta Jasa Lainnya sebesar 10,07 persen.

Gambar 2.5
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Indonesia
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Barat. 2023, diolah

Membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berdampak terhadap peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat

pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang mengingat goncangan ekonomi yang terjadi di tahun 2020 berdampak cukup parah terhadap kondisi sosial ekonomi di Provinsi Jawa Barat dimana pengangguran dan kemiskinan meningkat cukup signifikan.

Tabel 2.15
Pertumbuhan PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,09	2,80	2,30	1,31	4,41
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,13	-2,75	-4,11	0,82	-0,36
C	Industri Pengolahan	6,52	3,95	-4,36	4,22	7,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	-1,20	-7,62	11,66	5,42
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,96	3,03	10,80	9,63	2,60
F	Konstruksi	7,48	6,12	-5,96	6,47	-0,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,21	7,51	-7,95	3,19	4,22
H	Transportasi dan Pergudangan	5,36	4,97	-4,18	-0,17	11,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,15	7,25	-5,60	-0,04	11,27
J	Informasi dan Komunikasi	9,14	9,31	34,09	7,30	6,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	2,16	1,14	5,69	-0,70
L	Real Estat	9,61	9,55	1,92	11,75	4,35
M,N	Jasa Perusahaan	8,64	9,16	-18,38	8,54	12,73
O	Administrasi Pemerintahan	1,59	4,91	-6,92	-2,02	-1,79
P	Jasa Pendidikan	5,69	5,22	6,69	0,02	2,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,9	9,48	-5,39	7,55	5,82
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,68	7,15	-2,63	0,81	10,07
Pertumbuhan PDRB		**5,65**	**5,02**	**-2,52**	**3,74**	**5,45**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menunjukkan arah pemulihan ekonomi dialami oleh semua provinsi. Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan tertinggi hingga mencapai angka 5,45 persen, sementara terendah dialami oleh Provinsi Banten yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 berada diatas pertumbuhan nasional yang mencapai 5,31.

Tabel 2.16
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (persen)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	6,11	5,82	-2,39	3,56	5,25
Jawa Barat	5,65	5,02	-2,52	3,74	5,45
Jawa Tengah	5,3	5,36	-2,65	3,33	5,31
DI Yogyakarta	6,2	6,59	-2,67	5,58	5,15
Jawa Timur	5,47	5,53	-2,33	3,56	5,34
Banten	5,77	5,26	-3,39	4,49	5,03
Indonesia	**5,17**	**5,02**	**-2,07**	**3,70**	**5,31**

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2023

Gambaran keadaan ekonomi Provinsi Jawa Barat merupakan resultan dari semua perubahan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan kota. Pertumbuhan ekonomi 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2022 pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang dan Kota Cimahi. Sementara pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh Kabupaten Indramayu, Kota Banjar dan Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.17
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (persen)

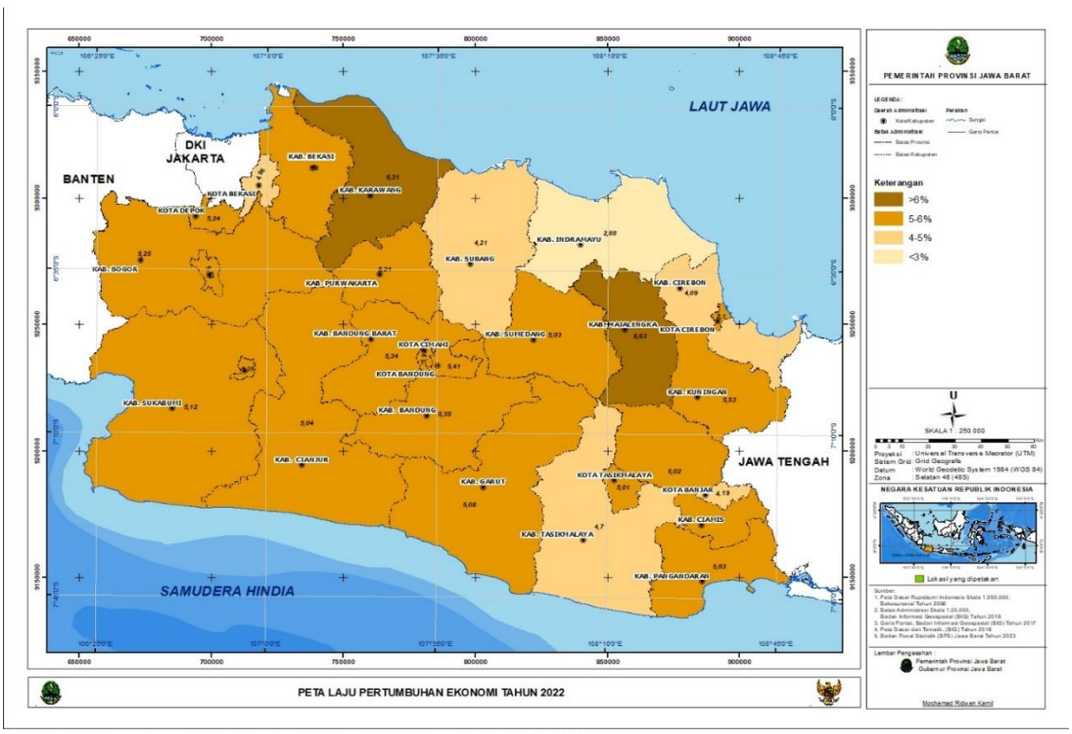
Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bogor	6,19	5,85	-1,76	3,55	5,25
Sukabumi	5,79	5,64	-0,91	3,74	5,12
Cianjur	6,23	5,67	-0,77	3,48	5,04
Bandung	6,26	6,36	-1,80	3,56	5,35
Garut	4,96	5,02	-1,26	3,58	5,08
Tasikmalaya	5,7	5,43	-0,98	3,43	4,70
Ciamis	5,44	5,38	-0,14	3,66	5,02
Kuningan	6,43	6,59	0,11	3,56	5,53
Cirebon	5,02	4,68	-1,08	2,47	4,09
Majalengka	6,1	7,77	0,89	4,75	6,63
Sumedang	5,83	6,33	-1,12	3,17	5,03
Indramayu	1,34	3,2	-1,58	0,58	2,88
Subang	4,38	4,61	-1,15	2,18	4,21
Purwakarta	4,98	4,37	-2,13	3,42	5,24
Karawang	6,07	4,21	-3,80	5,85	6,31
Bekasi	6,02	3,95	-3,39	3,62	5,30
Bandung Barat	5,5	5,05	-2,41	3,46	5,34
Pangandaran	5,41	5,94	-0,05	3,67	5,03
Kota Bogor	6,14	6,19	-0,41	3,76	5,65
Kota Sukabumi	5,51	5,53	-1,49	3,71	5,35
Kota Bandung	7,08	6,79	-2,28	3,76	5,41
Kota Cirebon	6,21	6,29	-0,98	3,05	5,10
Kota Bekasi	5,86	5,41	-2,58	3,22	4,96
Kota Depok	6,97	6,74	-1,92	3,76	5,24

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Cimahi	6,46	7,85	-2,26	4,19	5,92
Kota Tasikmalaya	5,93	5,97	-2,01	3,57	5,01
Kota Banjar	5,04	5,03	0,94	3,49	4,19
Jawa Barat	**5,65**	**5,02**	**-2,52**	**3,74**	**5,45**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pola spasial pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota mengalami pertumbuhan di atas 3 persen. Hanya Kabupaten Indramayu yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah 3 persen. Secara umum, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2022 sebesar 5,45 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut tidak terlepas dari adanya faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika ditilik dari capaian IPM dan indikator Rata-rata Lama Sekolah yang merupakan komponen pembentuk IPM menunjukkan kualitas SDM di kabupaten tersebut tergolong rendah. Hal ini disinyalir sebagai salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut.

Gambar 2.6
Pola Spasial Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Tahun 2022 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Diolah, 2023

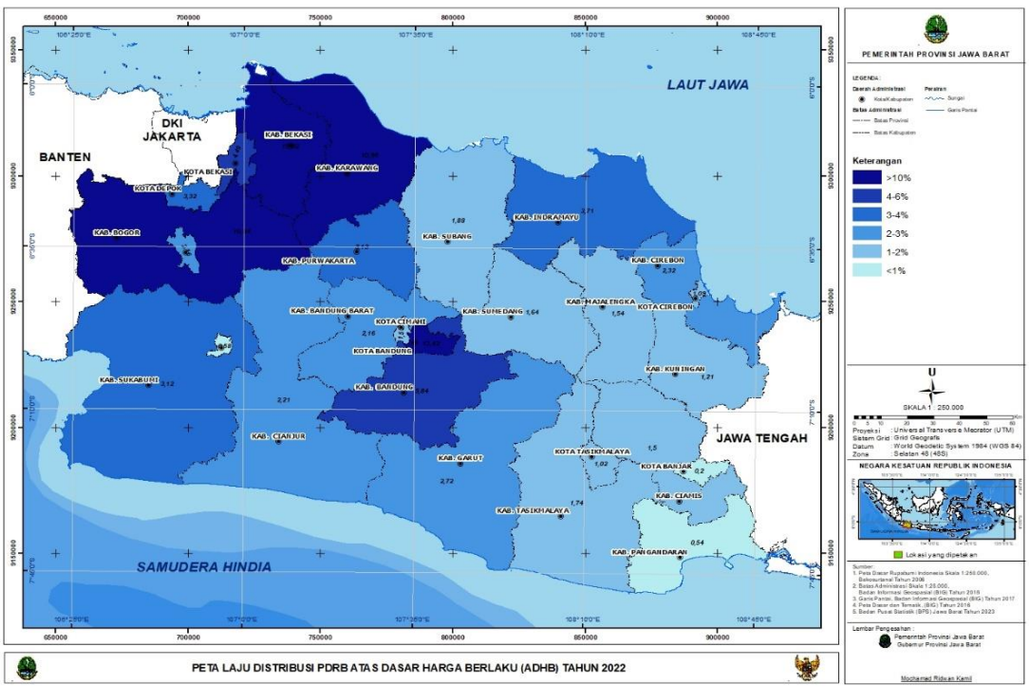
Perekonomian Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota. Tabel 2.15 dan Gambar 2.9 memperlihatkan distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/kota tahun 2022. Pola spasial memperlihatkan perekonomian Provinsi Jawa Barat didominasi oleh 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan kontribusi ≥ 10 persen. Tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang ditambah 1 (satu) kota yaitu Kota Bandung menyumbang sebesar 50,34 persen terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Berdasarkan struktur perekonomian, sektor Industri Pengolahan menjadi basis ekonomi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang dan sektor Perdagangan menjadi basis ekonomi di Kota Bandung.

Tabel 2.18
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (persen)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bogor	11,07	11,06	11,12	11,09	10,94
Sukabumi	3,11	3,14	3,18	3,15	3,12
Cianjur	2,17	2,19	2,24	2,23	2,21
Bandung	5,70	5,78	5,83	5,81	5,84
Garut	2,68	2,70	2,74	2,71	2,72
Tasikmalaya	1,72	1,74	1,77	1,75	1,74
Ciamis	1,47	1,47	1,51	1,50	1,50
Kuningan	1,15	1,17	1,21	1,20	1,21
Cirebon	2,30	2,29	2,34	2,33	2,32
Majalengka	1,42	1,46	1,52	1,52	1,54
Sumedang	1,64	1,65	1,67	1,66	1,64
Indramayu	3,78	3,75	3,74	3,63	3,71
Subang	1,89	1,90	1,89	1,88	1,88
Purwakarta	3,19	3,16	3,16	3,15	3,13
Karawang	10,88	10,73	10,54	10,86	10,96
Bekasi	15,42	15,20	14,98	15,16	15,02
Bandung Barat	2,21	2,20	2,19	2,17	2,16
Pangandaran	0,52	0,53	0,54	0,54	0,54
Kota Bogor	2,13	2,15	2,16	2,15	2,16
Kota Sukabumi	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Kota Bandung	13,35	13,45	13,37	13,24	13,42
Kota Cirebon	1,09	1,09	1,10	1,09	1,09
Kota Bekasi	4,59	4,57	4,55	4,52	4,49
Kota Depok	3,25	3,31	3,32	3,31	3,32
Kota Cimahi	1,48	1,52	1,52	1,53	1,53
Kota Tasikmalaya	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02
Kota Banjar	0,21	0,20	0,21	0,21	0,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.7
Pola Spasial Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 (persen)



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Pemanfaatan nilai tambah menjadikan setiap wilayah memiliki struktur komponen PDRB pengeluaran yang berbeda-beda. Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.

Nilai PDRB Jawa Barat (ADH berlaku) selama periode Tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Peningkatan nilai juga mengindikasikan perekonomian secara makro tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, serta penguatan daya saing produk barang dan jasa wilayah di pasar nasional dan internasional. Namun, pada tahun 2020 nilai PDRB Jawa Barat atas dasar berlaku berkurang sebesar Rp41.046,45 miliar. Seluruh komponen mengalami penurunan nilai, hanya Ekspor antar daerah yang bertambah secara total sebesar Rp57.054,35 miliar. Selanjutnya pada tahun 2021, sampai dengan tahun 2022 Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran

Atas Dasar Harga Berlaku, terus mengalami peningkatan hingga menjadi Rp2.204.660,23 miliar (2021) dan Rp2.422.782,32 (2022). Hal tersebut sebagaiman pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.278.278,90	1.387.762,27	1.378.904,38	1.424.594,08	1.570.458, 02
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12.753,65	13.629,89	13.340,95	13.760,94	14.720, 0
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	112.935,06	117.448,94	116.666,16	121.635,31	122.545, 78
Pembentukan Modal Tetap Bruto	495.827,14	531.364,62	489.180,23	545.297,64	576.895, 25
Perubahan Inventori	72.019,60	73.290,76	27.303,94	- 15.151, 20	2.492, 32
Net Ekspor Antar daerah	-11.186,68	-342,76	56.711,59	114.523,45	135.670,95
PDRB	**1.960.627,65**	**2.123.153,71**	**2.082.107,26**	**2.204.660, 23**	**2.422.782, 32**

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Selain dinilai Atas Dasar Harga (ADH) berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADH konstan 2010 atau ADH berbagai produk dengan harga pada tahun 2010. Selama kurun waktu 2018–2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Barat berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel di bawah. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode Tahun 2018-2019, kemudian menurun pada tahun 2020. Akibat pandemi, nilai PDRB ADHK pada tahun 2020 mengalami pengurangan yang cukup berarti. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik dan juga penurunan permintaan eksternal. Seiring pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, tahun 2021 PDRB ADHK menunjukkan kenaikan Rp54.365,67 miliar secara total, peningkatan nilai terjadi di seluruh komponen kecuali komponen perubahan inventori. Kemudian pada tahun 2022 PDRB ADHK kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp82.238,54 miliar, kenaikan terjadi pada seluruh komponen kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Tabel 2.20
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	878.991,27	920.742,90	894.114,73	905.974,62	948.326, 48
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.032,68	9.353,99	8.971,94	9.144,60	9.430, 85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	69.973,15	72.248,44	71.414,93	72.890,11	71.634, 01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	352.312,42	366.760,22	336.213,72	357.977,88	359.006, 10
Perubahan Inventori	43.588,21	43.599,93	16.198,45	- 8.456,84	1.390, 51
Net Ekspor Antar Daerah	65.726,40	78.254,21	126.466,95	170.216,03	200.196,98
PDRB	**1.419.624,14**	**1.490.959,69**	**1.453.380,72**	**1.507.746,39**	**1.589.984,93**

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

2.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin makmur.

PDRB per kapita tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Secara nominal, PDRB per kapita atas dasar berlaku meningkat sebesar Rp3,844 juta, sedangkan atas dasar harga konstan meningkat sebesar Rp1.74 Juta (lihat Tabel 2.21). Peningkatan ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya kegiatan ekonomi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pelonggaran kegiatan masyarakat dan meningkatnya nilai tambah *output* lapangan usaha utama, yakni lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi.

Tabel 2.21
Nilai PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)

	Jawa Barat	Indonesia
PDRB ADHB		
2018	40.272,64	55.992,07
2019	43.309,19	59.317,91
2020	43.237,00	57.269,80
2021	45.194,00	62.236,44
2022	49.038,00	71.030,85

	Jawa Barat	Indonesia
PDRB ADHK		
2018	29.160,06	39.340,56
2019	30.413,37	41.021,61
2020	30.181,00	39.778,89
2021	30.908,00	40.775,88
2022	32.182,00	42.463,78

Sumber: BPS Jawa Barat, 2023, diolah

Secara rata-rata, PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat masih di bawah atau lebih rendah dari capaian Nasional. Berdasarkan kategori Bank Dunia, Provinsi Jawa Barat termasuk daerah dengan kategori pendapatan per kapita menengah bawah. PDRB per kapita menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki nilai PDRB per kapita paling tinggi diikuti lapangan usaha Konstruksi dan Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (lihat Tabel 2.22). Artinya, penduduk yang bekerja di ketiga lapangan usaha tersebut terutama Industri Pengolahan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibanding penduduk yang bekerja di lapangan usaha lainnya. Tabel 2.22 menunjukkan 5 (lima) lapangan usaha dengan PDRB per kapita terbesar tahun 2021.

Tabel 2.22
PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2021

Lapangan Usaha	Jumlah Pekerja	Persentase Pekerja	PDRB ADHB Sektor	PDRB per Kapita
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.180.000	23,22%	319.585.970.000.000	61.696.133
Industri Pengolahan	4.320.000	19,37%	923.786.040.000.000	213.839.361
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.500.000	15,70%	188.617.980.000.000	53.890.851
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.010.000	9,01%	62.641.200.000.000	31.164.776
Konstruksi	1.590.000	7,13%	191.608.090.000.000	120.508.233

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

Tabel 2.23 menampilkan nilai PDRB Per Kapita provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2018-2022. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Di satu sisi, dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sementara di sisi lain diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah *output* dari setiap sektor ekonomi.

Tabel 2.23
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Antar dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)

Provinsi	PDRB per Kapita ADHB					PDRB per Kapita ADHK				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	247.678,49	268.052,25	262.702,12	274.709,59	298.359,97	165.768,99	174.812,51	170.099,68	174.962,98	182.908,69
Jawa Barat	**40.272,64**	**43.309,19**	**43.237,00**	**45.194,00**	**49.038,00**	**29.160,06**	**30.413,37**	**30.181,00**	**30.908,00**	**32.182,00**
Jawa Tengah	36.770,96	39.388,15	36.983,99	38.669,11	42.149,54	27.285,25	28.695,92	26.483,64	27.143,42	28.362,24
DI Yogyakarta	34.136,93	36.459,73	37.745,22	40.229,83	44.044,64	25.776,31	27.008,68	27.750,38	28.901,58	30.011,22
Jawa Timur	55.410,61	59.015,17	56.640,41	60.043,33	66.364,73	39.579,95	41.512,20	39.689,02	40.830,88	42.717,44
Banten	48.370,15	52.013,99	52.736,47	55.210,65	60.990,14	34.183,75	35.913,90	37.164,35	38.199,27	39.515,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam skala provinsi, PDRB per kapita kabupaten/kota (lihat Tabel 2.24 dan Gambar 2.8) menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kota Bandung memiliki rata-rata pendapatan per kapita sebesar >Rp100 juta per tahun jauh di atas rata-rata pendapatan provinsi. Dilihat dari peranannya, Kabupaten Bekasi dengan basis ekonomi sektor Industri Pengolahan dan Kota Bandung dengan basis ekonomi sektor Perdagangan memiliki peranan yang besar dan penting dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat.

PDRB per kapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah atau daerah. Namun demikian, PDRB per kapita tidak dapat mengukur secara riil pendapatan penduduk secara keseluruhan. Fenomena ini terjadi di Kabupaten Indramayu yang menunjukkan bahwa besarnya PDRB per kapita tidak menggambarkan tingkat pendapatan penduduk secara riil. Hal ini mengingat pembentukan PDRB Kabupaten Indramayu didominasi oleh sektor industri Minyak dan Gas (Migas) dengan keberadaan Objek Vital Negara (Kilang Pertamina Balongan dan eksplorasi migas ExxonMobil). Tanpa migas, nilai PDRB ADHB Kabupaten Indramayu hanya berada di kisaran 50 persen dari total nilai PDRB, sebagaimana ditunjukan pada tabel dan gambar di bawah ini:

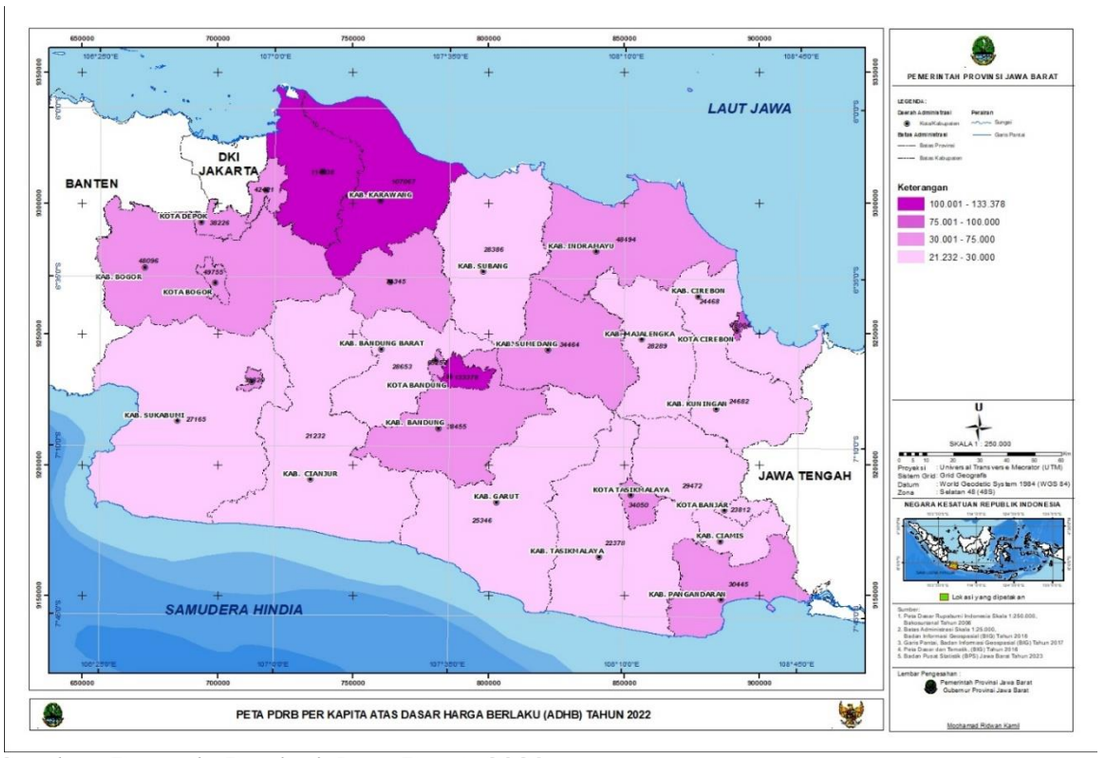
Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bogor	37,535	40,389	43,586	45,339	48,096
Sukabumi	25,040	26,968	24,836	25,616	27,165
Cianjur	19,009	20,373	19,241	20,002	21,232
Bandung	30,394	33,526	34,206	35,590	38,455
Garut	20,349	22,116	22,480	23,356	25,346
Tasikmalaya	19,428	20,925	20,120	20,855	22,378
Ciamis	24,474	26,273	26,048	27,218	29,472
Kuningan	21,186	23,152	21,996	22,805	24,682
Cirebon	20,908	22,506	21,869	22,833	24,468
Majalengka	23,429	25,812	24,708	25,930	28,289
Sumedang	28,292	30,341	30,821	32,130	34,464
Indramayu	43,579	46,279	43,308	44,072	48,494
Subang	23,762	25,983	25,209	26,292	28,386
Purwakarta	66,201	71,580	67,349	69,976	74,345
Karawang	92,272	98,626	91,873	98,726	107,067
Bekasi	84,155	88,370	102,419	107,788	114,338
Bandung Barat	26,019	28,209	26,088	26,879	28,653

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Pangandaran	26,064	28,206	27,195	28,366	30,445
Kota Bogor	38,530	42,403	44,100	45,921	49,755
Kota Sukabumi	35,163	37,928	35,926	37,209	39,820
Kota Bandung	105,601	113,177	116,056	121,126	133,378
Kota Cirebon	68,419	74,398	70,468	72,749	78,004
Kota Bekasi	31,031	33,330	37 999	39,527	42,421
Kota Depok	27,620	30,079	34,358	35,659	38,226
Kota Cimahi	48,107	54,268	56,715	59,906	65,257
Kota Tasikmalaya	30,145	32,213	30,223	31,556	34,050
Kota Banjar	22,463	23,508	22,184	22,892	23,812

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka. 2022

Gambar 2.8
Pola Spasial PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

2.2.3 Inflasi

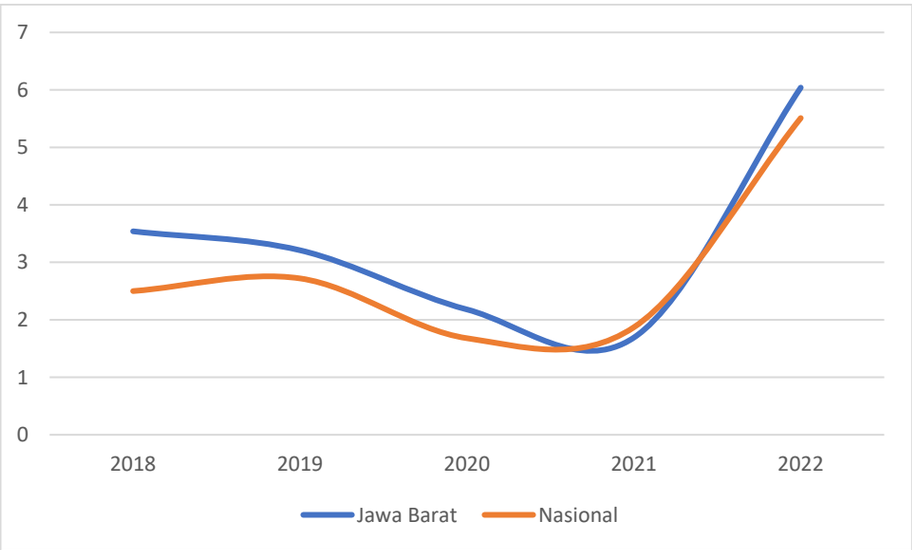
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berdampak terhadap capaian pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh stabilitas harga yang terjaga.

Pada Desember 2022, gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat terjadi inflasi (*y-o-y*) sebesar 6,04 persen. Inflasi *y-o-y* tertinggi terjadi di Kota Bandung sebesar 7,45 persen dengan IHK sebesar 115,43 dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 4,86 persen dengan IHK sebesar 110,32.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,80 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,65 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,90 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,64 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,39 persen; kelompok transportasi sebesar 12,59 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,51 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,07 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,17 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,80 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks atau deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen.

Sementara itu, perkembangan pada Desember 2022 menunjukkan inflasi nasional terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi nasional 2022 menjadi 5,51 persen (*y-o-y*), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87 persen (*y-o-y*) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0+1 persen, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022.

Gambar 2.9
Inflasi *year on year* di Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah, 2023

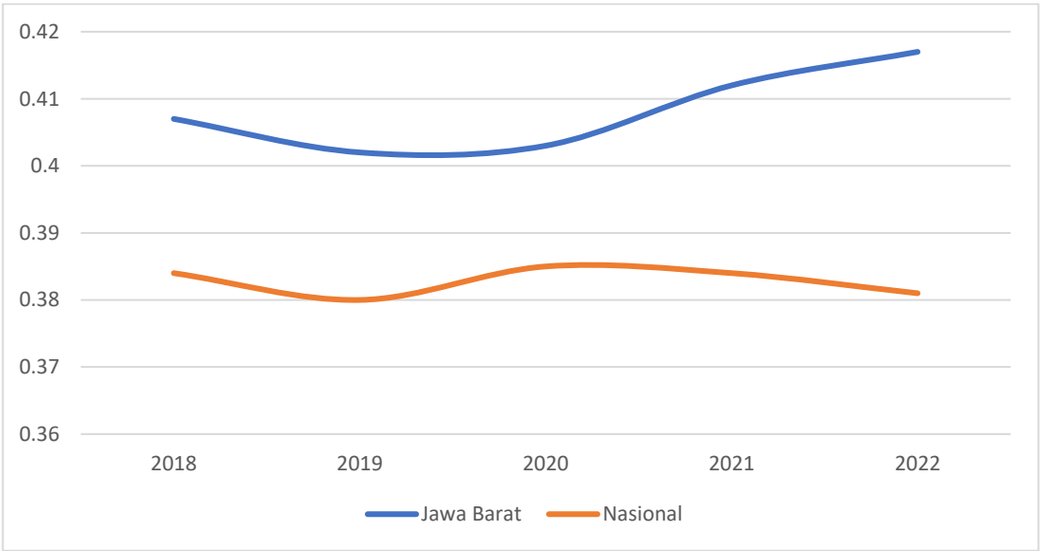
Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, realisasi inflasi cenderung meningkat dan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional. Salah satu faktor yang menyebabkan naiknya inflasi adalah kenaikan harga BBM dan kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang terjadi selama periode 2018-2022. Inflasi yang tinggi dan cenderung tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang disebabkan kontraksi ekonomi akibat kejadian luar biasa pandemi COVID-19 tahun 2020. Kondisi demikian berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan inflasi memicu meningkatnya tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

2.2.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Indikator gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Angka gini ratio selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung meningkat. Kondisi ini memiliki arti distribusi pendapatan antar golongan masyarakat semakin timpang meskipun masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan selama periode RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan melalui serangkaian strategi, diantaranya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha, mempercepat pembangunan desa, dan mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Gambar 2.10
Realisasi Gini Ratio di Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2018-2022

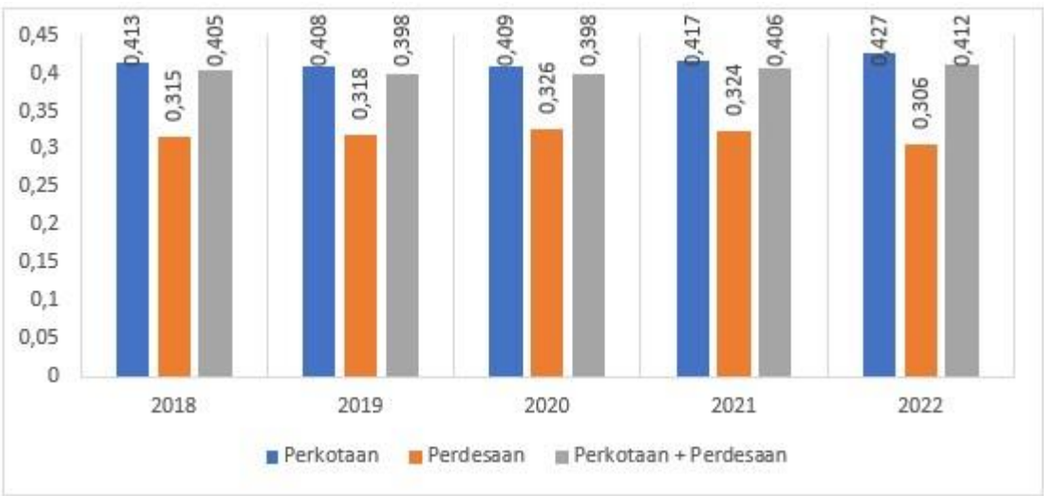


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah, 2023

Pada September 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Jawa Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,412. Angka ini meningkat 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,406. Tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan dan perdesaan memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi di perkotaan dibanding perdesaan. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana di perdesaan sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen yang mana mayoritas bekerja di sektor pertanian, sedangkan di perkotaan lebih bersifat heterogen yang mana pada umumnya penduduk di perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa.

Gini Ratio Provinsi Jawa Barat di daerah perkotaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,427, naik dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,417 namun sedikit turun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 (0,428). Sementara Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2022 tercatat sebesar 0,306, turun dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,324 namun sedikit meningkat jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,322.

Gambar 2.11
Perkembangan Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan
Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah, 2023

Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu: 1) ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka; 2) ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil; 3) konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti dan saham; dan 4) ketimpangan dalam menghadapi goncangan. Hal ini terlihat saat terjadi goncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak karena menurunnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Dalam konstelasi regional Jawa, tahun 2022 Jawa Barat termasuk provinsi dengan capaian angka gini ratio di atas capaian nasional dan rata-rata provinsi di Pulau Jawa. Artinya ketimpangan pendapatan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan rata-rata provinsi di Pulau Jawa. Tingginya ketimpangan pendapatan merupakan ancaman serius, tidak hanya berupa turunnya kesejahteraan sekelompok masyarakat, namun juga mendistorsi pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.25
Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	0,390	0,400	0,391	0,411	0,412
Jawa Barat	**0,405**	**0,398**	**0,398**	**0,406**	**0,412**
Jawa Tengah	0,357	0,359	0,358	0,368	0,366
DI Yogyakarta	0,422	0,437	0,420	0,436	0,459
Jawa Timur	0,371	0,364	0,384	0,364	0,365
Banten	0,367	0,365	0,361	0,363	0,377
Indonesia	**0,384**	**0,385**	**0,380**	**0,381**	**0,381**

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2023

Dalam skala provinsi, ketimpangan kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Terdapat 2 (dua) kelompok kabupaten/kota yang terbagi berdasarkan klasifikasi atau kategori ketimpangan menurut Michael Tadaro, yakni kelompok kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan kategori sedang (angka gini ratio berkisar 0,36-0,49) dan kelompok kabupaten/kota dengan pemerataan yang relatif tinggi (angka gini ratio berkisar 0,20-0,35). Kabupaten/kota yang termasuk kategori ketimpangan sedang, umumnya memiliki karakteristik perekonomian yang berbasis industri dan perdagangan. Adapun kelompok kabupaten/kota dengan distribusi pengeluaran yang merata memiliki karakteristik perekonomian yang berbasis pertanian. Hal ini disebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini pula yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan.

Dalam konteks Jawa Barat, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari angka gini ratio lebih disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini tergambarkan dari peranan PDRB kabupaten/kota terhadap pembentukan PDRB provinsi dimana 51 persennya disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten (Bogor, Bekasi, dan Karawang) dan 1 (satu) kota yaitu Kota Bandung.

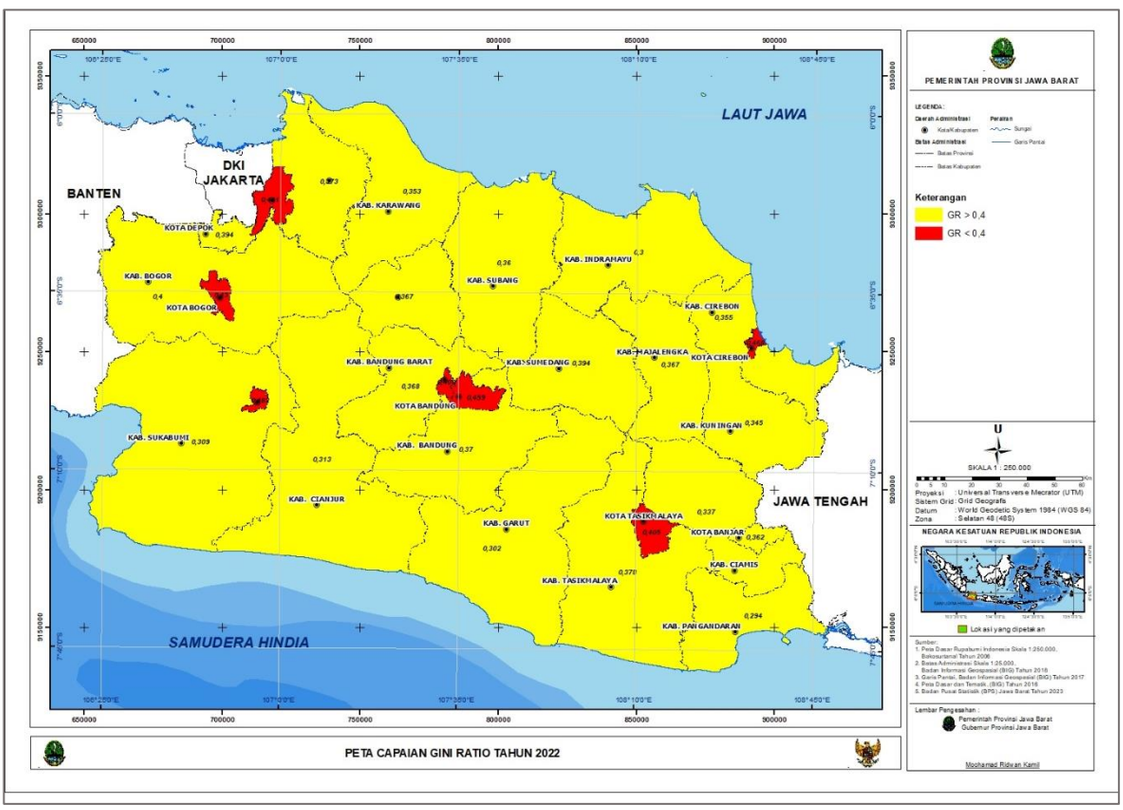
Tabel 2.26
Gini Ratio Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	**0,405**	**0,398**	**0,398**	**0,406**	**0,412**
Bogor	0,404	0,404	0,381	0,396	0,400
Sukabumi	0,347	0,347	0,334	0,343	0,309
Cianjur	0,363	0,363	0,350	0,372	0,313
Bandung	0,355	0,355	0,414	0,386	0,370
Garut	0,352	0,352	0,352	0,322	0,302

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tasikmalaya	0,322	0,322	0,343	0,378	0,378
Ciamis	0,354	0,354	0,336	0,342	0,337
Kuningan	0,435	0,435	0,361	0,349	0,345
Cirebon	0,344	0,344	0,338	0,339	0,355
Majalengka	0,347	0,347	0,336	0,354	0,367
Sumedang	0,344	0,344	0,384	0,359	0,394
Indramayu	0,284	0,284	0,319	0,321	0,300
Subang	0,333	0,333	0,350	0,329	0,360
Purwakarta	0,399	0,399	0,414	0,388	0,367
Karawang	0,357	0,357	0,327	0,374	0,353
Bekasi	0,354	0,354	0,372	0,340	0,373
Bandung Barat	0,362	0,362	0,376	0,356	0,368
Pangandaran	0,310	0,310	0,335	0,320	0,294
Kota Bogor	0,386	0,386	0,412	0,441	0,430
Kota Sukabumi	0,419	0,419	0,397	0,436	0,482
Kota Bandung	0,442	0,442	0,402	0,427	0,459
Kota Cirebon	0,408	0,408	0,421	0,489	0,468
Kota Bekasi	0,352	0,352	0,352	0,401	0,441
Kota Depok	0,344	0,344	0,344	0,367	0,394
Kota Cimahi	0,437	0,437	0,380	0,415	0,408
Kota Tasikmalaya	0,360	0,360	0,366	0,414	0,405
Kota Banjar	0,302	0,302	0,312	0,341	0,362

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

Gambar 2.12
Peta Capaian Gini Ratio Tahun 2022



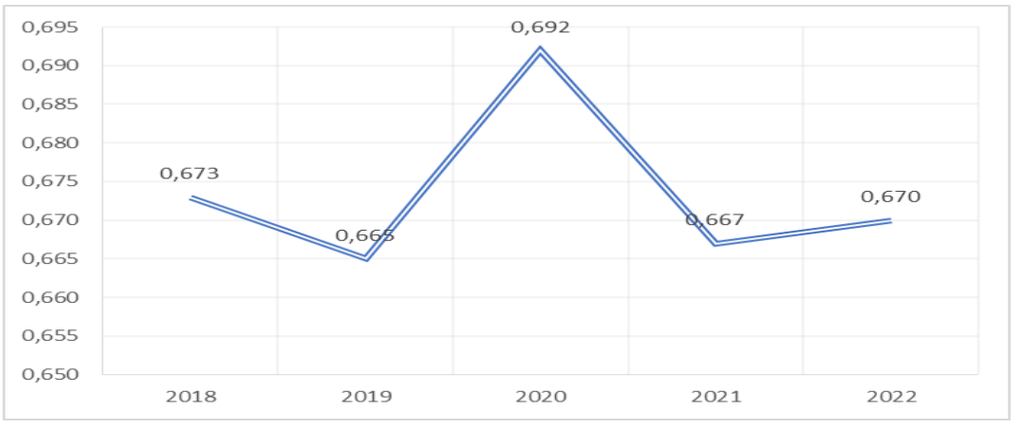
Sumber: Hasil analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

2.2.5 Indeks Williamson

Salah satu masalah kompleks yang dihadapi dalam proses pembangunan suatu wilayah adalah ketimpangan pendapatan antarwilayah. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah antardaerah, perbedaan sumber daya alam antarwilayah, perbedaan kondisi demografi antarwilayah dan kurang lancarnya perdagangan wilayah. Hal ini mengisyaratkan ketimpangan antarwilayah yang cukup tajam yang terkonfirmasi dari angka Indeks Williamson tahun 2022 sebesar 0,670. Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti SDM juga disebabkan faktor eksternal yaitu ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Perbedaan sumber daya alam, keterampilan tenaga kerja, teknologi, dan akumulasi modal lainnya yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota telah mengakibatkan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, heterogenitas karakteristik wilayah juga ditenggarai sebagai penyebab terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Perkembangan indeks williamson dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) yang ditunjukkan pada Gambar 2.13 memberikan pesan bahwa guncangan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 dampak kejadian luar biasa pandemi COVID-19 mengisyaratkan ketimpangan antarwilayah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terindikasi dari angka Indeks Williamson tahun 2020 yang meningkat cukup signifikan sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi cukup dalam akibat COVID-19. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan dampaknya dimana pertumbuhan ekonomi kembali ke zona positif, namun masih memerlukan upaya-upaya penormalan ekonomi mengingat terjadi peningkatan pada tahun 2022. Kedepan, ketimpangan wilayah masih menjadi isu strategis pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.13
Indeks Williamson Tahun 2018-2022



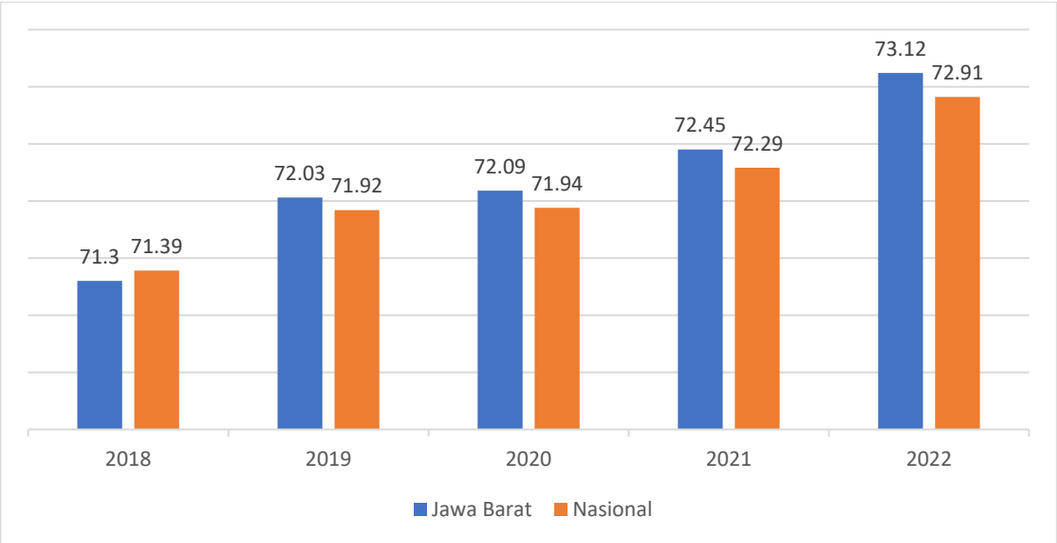
Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. 2023

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hakikat pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan semestinya berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020, telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Hampir seluruh indikator ekonomi makro dan sosial mengalami tekanan yang berat, tidak terkecuali IPM. Meskipun begitu, pembangunan manusia di Jawa Barat selama 2 (dua) tahun terakhir (2021-2022) menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun melambat dibanding tahun sebelumnya, dimana IPM 2021 tumbuh sebesar 0,50 persen atau meningkat sebesar 0,67 poin.

Gambar 2.14
Capaian IPM Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda. 2023

Perlambatan IPM di masa pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Sementara dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup (UHH) dan dimensi pengetahuan yang diwakili variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan IPM tidak dapat terjadi secara instan namun melalui sebuah proses yang bertahap yang memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya agar lebih terarah.

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, capaian IPM provinsi menunjukkan adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta lebih maju dibandingkan provinsi lain ditunjukkan dengan capaian IPM yang sudah ≥ 80 yang berarti pembangunan sumber daya manusia termasuk kategori "**Sangat Tinggi**". Sementara itu, capaian pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat bersama 3 (tiga) provinsi lainnya masih tergolong kategori "**Tinggi**". Faktor penyebab adanya disparitas

pembangunan manusia antardaerah adalah perbedaan kesempatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal ini masih menjadi kendala sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah di Jawa Barat.

Tabel 2.27
Capaian IPM Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2018-2022

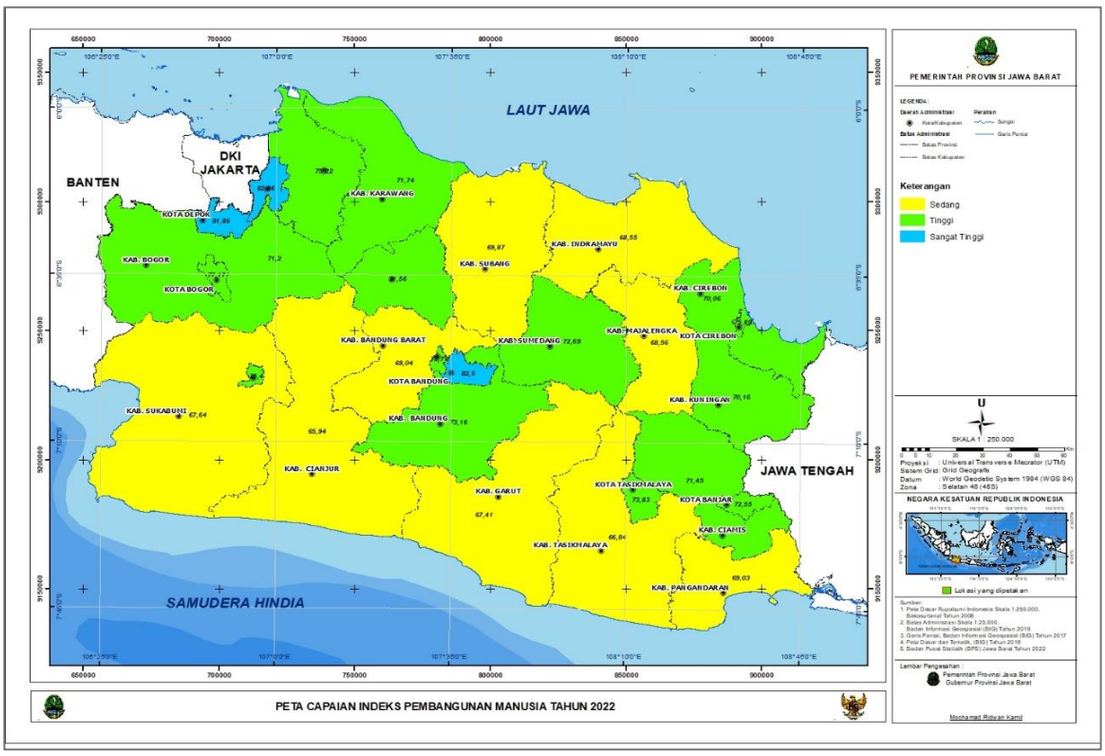
Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	80,47	80,76	80,77	81,11	81,65
Jawa Barat	**71,30**	**72,03**	**72,09**	**72,45**	**73,12**
Jawa Tengah	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
DI Yogyakarta	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64
Jawa Timur	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
Banten	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32
Indonesia	**71,39**	**71,92**	**71,94**	**72,29**	**72,91**

Sumber: BPS, 2023

Kualitas hidup manusia di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kemajuan ditandai dengan meningkatnya IPM pada tahun 2022 meskipun di tengah kondisi disrupsi pandemi. Peningkatan IPM Provinsi Jawa Barat merupakan resultan dari kemajuan pembangunan manusia di 27 kabupaten/kota. Pola spasial status pencapaian IPM kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar 2.15.

Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan permasalahan disparitas antarwilayah. Luasnya wilayah dan tidak meratanya pembangunan menjadi bagian dari faktor yang menyebabkan disparitas terjadi antar kabupaten/kota. Salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Adapun sasaran pembangunan kewilayahan yang menjadi prioritas antara lain pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya wilayah selatan dan wilayah utara melalui peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah. Dengan sasaran pembangunan tersebut, diharapkan kesenjangan pembangunan di segala aspek dapat teratasi, termasuk kesenjangan dalam pembangunan manusia.

Gambar 2.15
Pola Spasial Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Pertumbuhan IPM kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Pertumbuhan tertinggi dialami Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis, sedangkan terendah dialami oleh Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Purwakarta. Perbedaan level pertumbuhan menunjukkan kinerja pembangunan manusia tahun 2022, semakin cepat laju pertumbuhannya semakin cepat pula peningkatan IPM-nya.

Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM
1	Bogor	71,65	12,50	8,34	10.860	71,20
2	Sukabumi	71,54	12,25	7,11	9.210	67,64
3	Cianjur	70,58	12,01	7,20	8.244	65,94
4	Bandung	74,01	12,71	9,08	10.588	73,16
5	Garut	71,85	12,15	7,83	8.227	67,41
6	Tasikmalaya	69,95	12,59	7,73	8.177	66,84
7	Ciamis	72,30	14,28	8,00	9.428	71,45
8	Kuningan	74,03	12,24	7,88	9.620	70,16
9	Cirebon	72,47	12,28	7,40	10.791	70,06
10	Majalengka	70,76	12,24	7,49	9.950	68,56
11	Sumedang	72,91	12,99	8,72	10.776	72,69
12	Indramayu	72,15	12,27	6,83	10.166	68,55
13	Subang	72,92	11,78	7,20	11.294	69,87

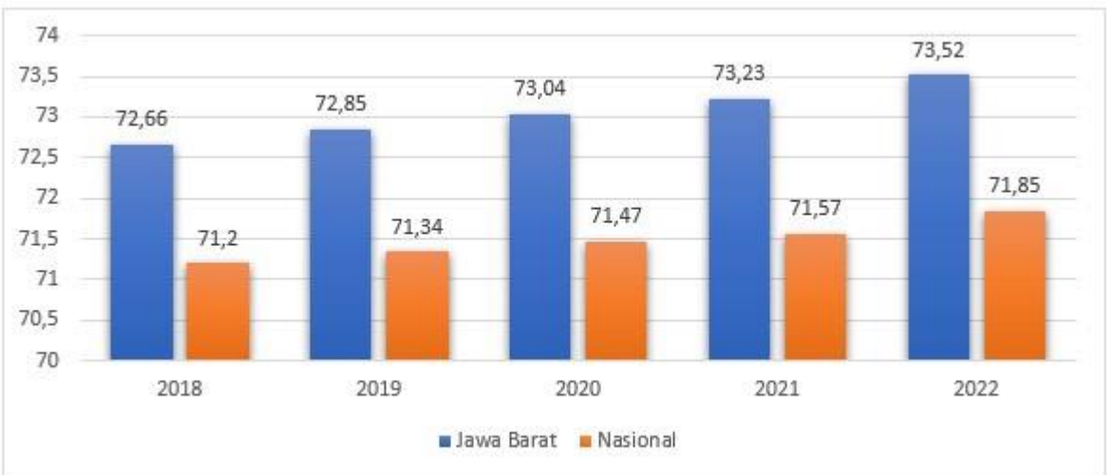
No	Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM
14	Purwakarta	71,47	12,13	8,11	12.193	71,56
15	Karawang	72,62	12,19	7,96	11.927	71,74
16	Bekasi	74,04	13,11	9,53	11.757	75,22
17	Bandung Barat	72,79	11,89	8,22	9.044	69,04
18	Pangandaran	71,89	12,11	8,03	9.389	69,03
19	Kota Bogor	74,13	13,43	10,63	12.058	77,17
20	Kota Sukabumi	72,85	13,59	10,14	11.229	75,40
21	Kota Bandung	74,75	14,23	11,00	17.639	82,50
22	Kota Cirebon	72,74	13,14	10,33	12.087	75,89
23	Kota Bekasi	75,48	14,11	11,44	16.239	82,46
24	Kota Depok	74,92	13,94	11,47	15.926	81,86
25	Kota Cimahi	74,50	13,82	11,21	12.500	78,77
26	Kota Tasikmalaya	72,63	13,47	9,53	10.578	73,83
27	Kota Banjar	71,49	13,25	8,78	10.967	72,55
Jawa Barat		**73,52**	**12,62**	**8,78**	**11.277**	**73,12**

Sumber: BPS, 2023

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur harapan hidup saat lahir yang diwakili dimensi umur panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

Gambar 2.16
Capaian Umur Harapan Hidup Tahun 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda. 2023

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar dan akses terhadap air minum layak. Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat adalah perilaku sehat dan pelayanan kesehatan. Salah satu indikator dari perilaku

sehat adalah perkawinan usia dini yang dapat berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, indikator pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan diantaranya adalah siapa dan dimana penolong proses kelahiran.

Secara umum dapat dikatakan bahwa indikator-indikator kesehatan yang bisa berdampak terhadap peningkatan umur harapan hidup di masa pandemi COVID-19 masih menunjukkan perbaikan, meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan umur harapan hidup turut memberikan peran yang positif pada peningkatan IPM di masa pandemi.

Tabel 2.29
Indikator Kesehatan yang Terkait dengan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat 2018-2022 (persen)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	67,61	69,64	71,40	71,66	74,02
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	62,37	91,02	92,13	91,83	93,04

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang mengalami peningkatan UHH yang cukup tinggi ditunjukkan dengan pertumbuhan UHH yang mencapai 0,26 persen (Tabel 2.30). Pertumbuhan UHH ini merupakan yang tertinggi diantara provinsi di regional Pulau Jawa. Artinya, ditengah kondisi pandemi COVID-19 pembangunan bidang kesehatan terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.30
Umur Harapan Hidup Provinsi Se-Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Tahun)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	72,67	72,79	72,91	73,01	73,32
Jawa Barat	**72,66**	**72,85**	**73,04**	**73,23**	**73,52**
Jawa Tengah	74,18	74,23	74,37	74,47	74,57
DI Yogyakarta	74,82	74,94	74,99	75,04	75,08
Jawa Timur	70,97	71,18	71,30	71,38	71,74
Banten	69,64	69,84	69,96	70,02	70,39
Indonesia	**71,20**	**71,34**	**71,47**	**71,57**	**71,85**

Sumber: BPS, 2023

Perkembangan UHH di kabupaten/kota selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif (Tabel 2.31). Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan UHH, kesenjangan antara daerah dengan capaian UHH tertinggi dengan yang terendah juga semakin mengecil. Tahun 2020, selisih antara Kota Bekasi yang memiliki UHH tertinggi dengan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki UHH terendah sebesar 5,54 tahun, lalu berkurang menjadi 5,53 tahun pada tahun 2022.

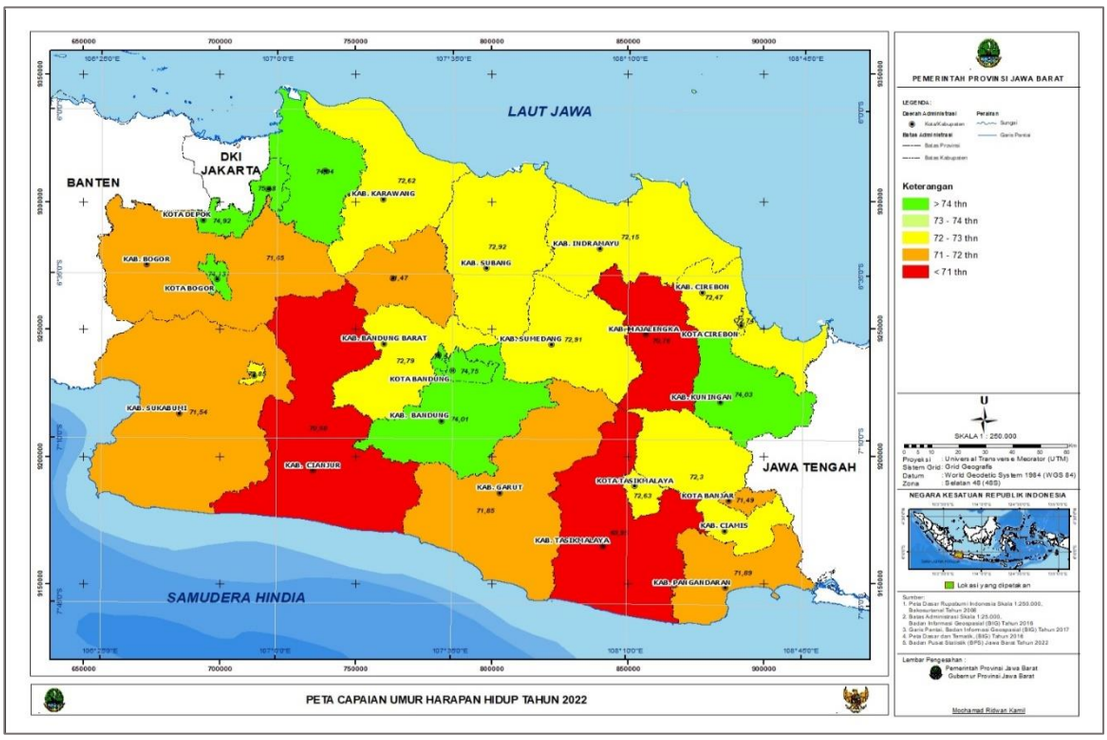
Tabel 2.31
Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	70,86	71,01	71,17	71,36	71,65
2	Sukabumi	70,49	70,73	70,97	71,21	71,54
3	Cianjur	69,70	69,91	70,13	70,32	70,58
4	Bandung	73,26	73,40	73,53	73,72	74,01
5	Garut	71,03	71,22	71,41	71,59	71,85
6	Tasikmalaya	68,96	69,21	69,47	69,67	69,95
7	Ciamis	71,32	71,57	71,83	72,02	72,30
8	Kuningan	73,11	73,35	73,59	73,78	74,03
9	Cirebon	71,66	71,82	71,99	72,18	72,47
10	Majalengka	69,68	69,97	70,27	70,46	70,76
11	Sumedang	72,14	72,29	72,43	72,62	72,91
12	Indramayu	71,11	71,37	71,63	71,84	72,15
13	Subang	71,92	72,13	72,35	72,58	72,92
14	Purwakarta	70,61	70,80	70,99	71,18	71,47
15	Karawang	71,81	71,98	72,15	72,33	72,62
16	Bekasi	73,43	73,56	73,68	73,81	74,04
17	Bandung Barat	72,03	72,18	72,34	72,52	72,79
18	Pangandaran	70,84	71,12	71,40	71,60	71,89
19	Kota Bogor	73,21	73,41	73,61	73,82	74,13
20	Kota Sukabumi	72,11	72,26	72,42	72,58	72,85
21	Kota Bandung	74,00	74,14	74,28	74,46	74,75
22	Kota Cirebon	71,99	72,13	72,26	72,44	72,74
23	Kota Bekasi	74,76	74,89	75,01	75,19	75,48
24	Kota Depok	74,17	74,31	74,44	74,62	74,92
25	Kota Cimahi	73,75	73,89	74,03	74,21	74,50
26	Kota Tasikmalaya	71,70	71,93	72,15	72,34	72,63
27	Kota Banjar	70,59	70,79	70,99	71,19	71,49
	Provinsi Jawa Barat	**72,66**	**72,85**	**73,04**	**73,23**	**73,52**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pola spasial capaian UHH kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tajam. Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Majalengka termasuk kabupaten dengan capaian UHH paling rendah di banding kabupaten/kota lain (<71 tahun). Hal ini mengindikasikan pembangunan bidang kesehatan di keempat kabupaten tersebut perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lainnya.

Gambar 2.17
Pola Spasial Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Tahun 2022 (Tahun)



Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

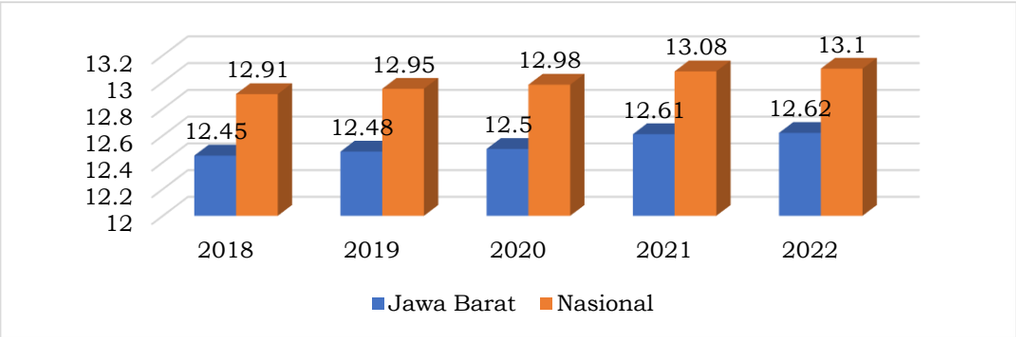
b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator *output* pembangunan dalam jangka panjang. HLS dan RLS dapat memberikan gambaran tentang penambahan (*flow*) dan capaian (*stock*) kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. HLS terus meningkat dari tahun ke tahun. selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022, HLS Jawa Barat mencapai 12,62 tahun, yang berarti anak umur 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma I.

Peningkatan HLS pada tahun 2022 dipengaruhi oleh peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kelompok umur pendidikan yaitu 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun. Tabel 2.32 menunjukkan peningkatan tertinggi terjadi pada APS 16-18 tahun diikuti APS 19-24 tahun. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya APS 19-24 tahun yang capaiannya masih di bawah 25 persen. Padahal kelompok umur ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal tersebut dimungkinkan karena ketersediaan dan jumlah daya tampung perguruan tinggi yang lebih

sedikit dibandingkan jumlah lulusan sekolah menengah atas. Selain itu, hal lain yang juga berpengaruh adalah tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya.

Gambar 2.18
Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda, 2023

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan di Bidang Pendidikan, selain HLS adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Tabel 2.32 menunjukkan capaian APS selama 5 (lima) tahun terakhir, data menunjukkan APS pada kelompok 16-18 tahun yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan masih perlu ditingkatkan. APS kelompok penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2022 mengindikasikan masih terdapat sekitar 31,34 persen kelompok penduduk di usia tersebut yang tidak mengakses fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau dengan kata lain tidak sedang bersekolah. Sementara angka APS penduduk usia 19-24 tahun yang masih rendah menjadi suatu ironi dibandingkan dengan banyaknya jumlah fasilitas pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,52	99,53	99,66	99,50	99,39
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	94,15	94,18	94,45	95,09	95,27
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun	67,17	67,29	67,74	67,80	68,66
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 tahun	21,96	22,71	22,84	23,51	23,99

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Dalam konstelasi regional Pulau Jawa, HLS Provinsi Jawa Barat merupakan yang terendah dibanding lima provinsi lainnya (Tabel 2.33). Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan di lima provinsi tersebut lebih lama dibandingkan di Jawa Barat.

Tabel 2.33
Harapan Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa
Tahun 2018-2022 (Tahun)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	12,95	12,97	12,98	13,07	13,08
Jawa Barat	**12,45**	**12,48**	**12,50**	**12,61**	**12,62**
Jawa Tengah	12,63	12,68	12,70	12,77	12,81
DI Yogyakarta	15,56	15,58	15,59	15,64	15,65
Jawa Timur	13,10	13,16	13,19	13,36	13,37
Banten	12,85	12,88	12,89	13,02	13,05
Indonesia	**12,91**	**12,95**	**12,98**	**13,08**	**13,10**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Capaian HLS kabupaten/kota menunjukkan angka yang bervariasi. Perbedaan HLS mengindikasikan adanya disparitas dalam mengakses fasilitas pendidikan antardaerah kabupaten/kota. Disparitas tersebut terlihat dari capaian HLS tertinggi sebesar 14,28 tahun di Kabupaten Ciamis dan terendah sebesar 11,78 tahun di Kabupaten Subang. Capaian terendah di Kabupaten Subang disebabkan sebaran SMA dan SMK belum merata, daya tampung sekolah negeri terbatas, dan belum meratanya distribusi guru. Selisih 2,50 tahun menandakan perbedaan jumlah tahun (kesempatan) untuk menempuh pendidikan bagi penduduk usia 7 (tujuh) tahun.

Tabel 2.34
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Tahun)

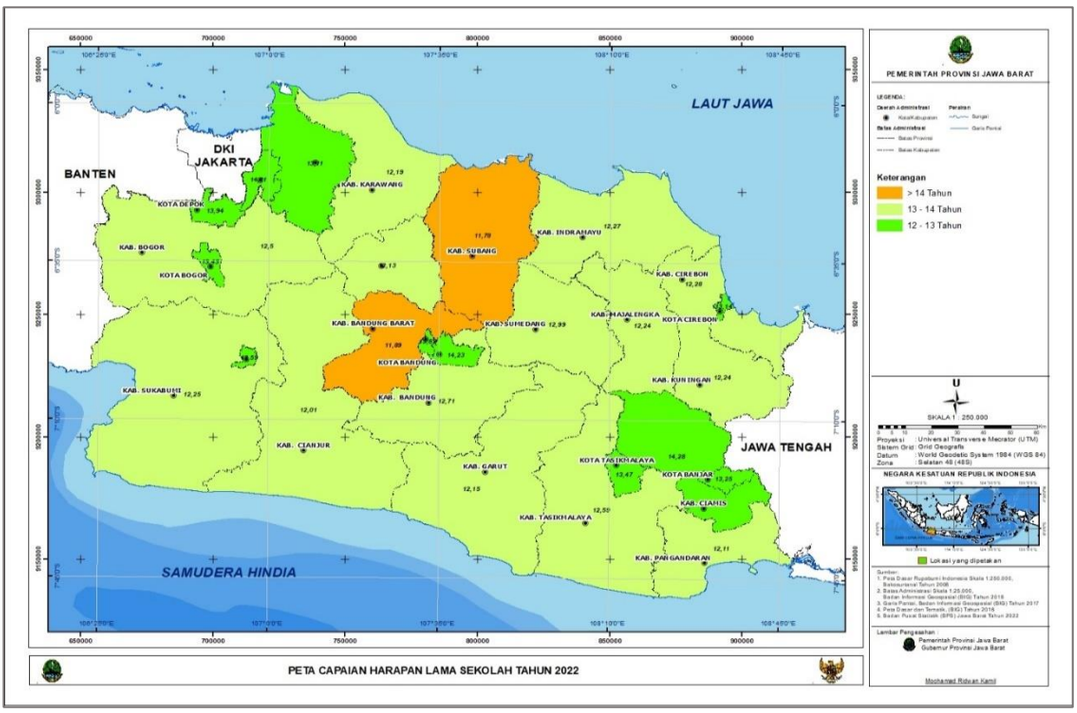
No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	12,44	12,47	12,48	12,49	12,50
2	Sukabumi	12,20	12,22	12,23	12,24	12,25
3	Cianjur	11,90	11,98	11,99	12,00	12,01
4	Bandung	12,64	12,68	12,69	12,70	12,71
5	Garut	11,80	11,82	11,91	12,03	12,15
6	Tasikmalaya	12,48	12,52	12,53	12,54	12,59
7	Ciamis	13,67	13,79	14,06	14,20	14,28
8	Kuningan	12,07	12,10	12,22	12,23	12,24
9	Cirebon	12,22	12,24	12,25	12,27	12,28
10	Majalengka	12,19	12,21	12,22	12,23	12,24
11	Sumedang	12,94	12,96	12,97	12,98	12,99

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
12	Indramayu	12,22	12,24	12,25	12,26	12,27
13	Subang	11,68	11,69	11,70	11,71	11,78
14	Purwakarta	12,09	12,10	12,11	12,12	12,13
15	Karawang	12,07	12,08	12,09	12,10	12,19
16	Bekasi	13,05	13,08	13,09	13,10	13,11
17	Bandung Barat	11,83	11,86	11,87	11,88	11,89
18	Pangandaran	12,04	12,06	12,07	12,08	12,11
19	Kota Bogor	13,38	13,40	13,41	13,42	13,43
20	Kota Sukabumi	13,40	13,46	13,47	13,58	13,59
21	Kota Bandung	14,18	14,19	14,20	14,21	14,23
22	Kota Cirebon	13,09	13,11	13,12	13,13	13,14
23	Kota Bekasi	13,76	13,99	14,00	14,10	14,11
24	Kota Depok	13,90	13,91	13,92	13,93	13,94
25	Kota Cimahi	13,77	13,79	13,80	13,81	13,82
26	Kota Tasikmalaya	13,42	13,44	13,45	13,46	13,47
27	Kota Banjar	13,20	13,22	13,23	13,24	13,25
	Provinsi Jawa Barat	**12,45**	**12,48**	**12,50**	**12,61**	**12,62**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pola spasial capaian HLS kabupaten/kota (Gambar 2.19) memperlihatkan disparitas yang cukup tajam. Terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota dengan HLS >13 tahun, 14 (empat belas) kabupaten/kota dengan capaian HLS antara 12-13 tahun, dan 2 (dua) kabupaten dengan capaian HLS < 12 tahun. Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah yang relatif tertinggal dibanding daerah lain dalam hal pembangunan bidang pendidikan. Sementara, Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan capaian HLS tertinggi melampaui capaian HLS Kota Bandung dan Kota Bekasi.

Gambar 2.19
Pola Spasial Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2022 (tahun)



Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

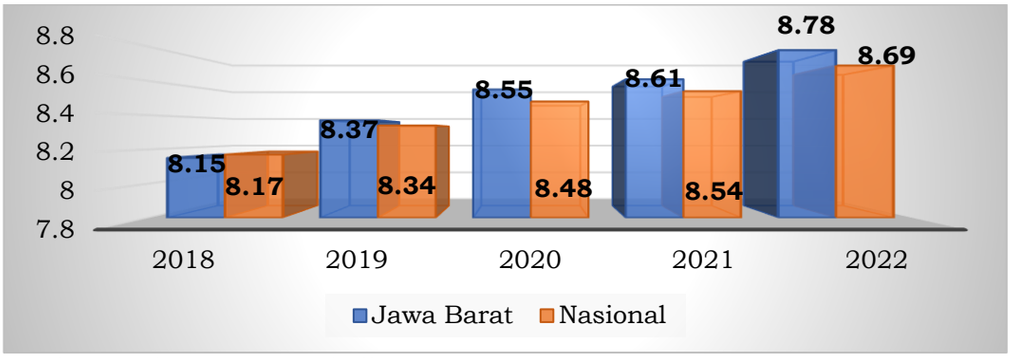
c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat tumbuh selama periode 2018 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Jawa Barat yang lebih baik. Pada tahun 2022, secara rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 8,78 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (atau setara SMP kelas II). Secara alamiah, peningkatan RLS sangat dipengaruhi oleh peningkatan APS kelompok umur 19-24 tahun, terutama APS umur 24 tahun.

Terkait dengan hal ini, upaya peningkatan dimensi pendidikan difokuskan pada peningkatan APS kelompok 19-24 tahun karena dapat sekaligus meningkatkan indikator HLS dan RLS secara bersamaan dan APS kelompok 16-18 tahun. Hal ini mengingat APS di kedua kelompok tersebut masih sangat rendah dibandingkan rata-rata APS nasional, dimana APS kelompok 16-18 tahun sudah diatas 73 persen dan kelompok 19-24 tahun diatas 25 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya kenaikan RLS terindikasi dari program/kegiatan untuk meningkatkan akses pendidikan

yang hanya mengarah kepada kelompok usia sekolah belum mengarah kepada kelompok usia 25 tahun keatas. Untuk itu, perlu digencarkan program Kejar Paket di daerah yang RLS-nya relatif tertinggal dibanding daerah lain.

Gambar 2.20
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan RLS meskipun melambat dibanding kondisi sebelum pandemi. Dibandingkan dengan dimensi lain penyusun IPM, RLS mengalami dampak pandemi yang lebih panjang. Hal ini ditandai dengan rata-rata pertumbuhan RLS yang hanya sebesar 1,97 persen atau meningkat sebesar 0,17 tahun. Pertumbuhan tertinggi dialami Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,32 persen atau ekuivalen dengan peningkatan RLS sebesar 0,18 tahun dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.35
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Se-Pulau Jawa
Tahun 2018-2022 (Tahun)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	11,05	11,06	11,13	11,17	11,31
Jawa Barat	**8,15**	**8,37**	**8,55**	**8,61**	**8,78**
Jawa Tengah	7,35	7,53	7,69	7,75	7,93
DI Yogyakarta	9,32	9,38	9,55	9,64	9,75
Jawa Timur	7,39	7,59	7,78	7,88	8,03
Banten	8,62	8,74	8,89	8,93	9,13
Indonesia	**8,17**	**8,34**	**8,48**	**8,54**	**8,69**

Sumber: BPS, 2023

Tabel 2.36 merefleksikan disparitas pembangunan manusia dalam skala kabupaten/kota. Disparitas komponen RLS jauh lebih tinggi dibandingkan HLS. Pada tahun 2022 adalah Kota Depok (11,47 tahun) dan terendah Kabupaten Indramayu (6,83 tahun). Capaian terendah di

Kabupaten Indramayu salah satunya disebabkan terbatasnya daya tampung sekolah. Tren ketimpangan RLS kedua wilayah ini berfluktuatif dan disparitas RLS di kedua wilayah tetap lebar, walaupun selisihnya menurun dari 4,94 poin di tahun 2021 menjadi 4,64 poin di tahun 2022.

Tabel 2.36
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Tahun)

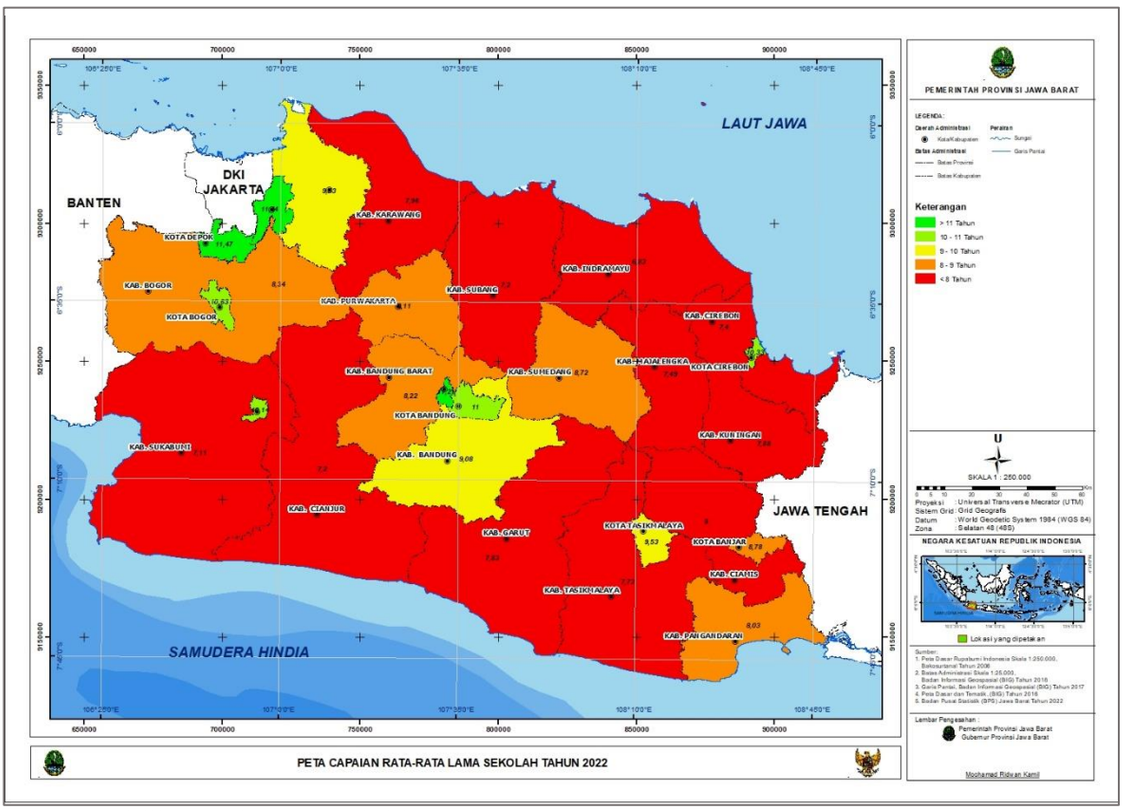
No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	7,88	8,29	8,30	8,31	8,34
2	Sukabumi	6,80	7,02	7,07	7,10	7,11
3	Cianjur	6,93	6,97	7,18	7,19	7,20
4	Bandung	8,58	8,79	8,96	9,07	9,08
5	Garut	7,50	7,51	7,52	7,53	7,83
6	Tasikmalaya	7,13	7,17	7,35	7,48	7,73
7	Ciamis	7,60	7,69	7,70	7,90	8,00
8	Kuningan	7,36	7,38	7,57	7,80	7,88
9	Cirebon	6,62	6,71	6,92	7,10	7,40
10	Majalengka	6,91	7,09	7,27	7,31	7,49
11	Sumedang	8,17	8,27	8,51	8,52	8,72
12	Indramayu	5,98	5,99	6,30	6,52	6,83
13	Subang	6,84	6,85	7,10	7,11	7,20
14	Purwakarta	7,75	7,92	8,09	8,10	8,11
15	Karawang	7,35	7,65	7,77	7,78	7,96
16	Bekasi	8,84	8,84	9,12	9,30	9,53
17	Bandung Barat	7,97	8,18	8,19	8,20	8,22
18	Pangandaran	7,58	7,67	7,74	7,85	8,03
19	Kota Bogor	10,30	10,32	10,33	10,53	10,63
20	Kota Sukabumi	9,53	9,58	9,59	9,81	10,14
21	Kota Bandung	10,63	10,74	10,75	10,99	11,00
22	Kota Cirebon	9,89	9,90	9,91	10,12	10,33
23	Kota Bekasi	11,09	11,10	11,16	11,31	11,44
24	Kota Depok	10,85	11,00	11,28	11,46	11,47
25	Kota Cimahi	10,94	10,95	10,96	11,08	11,21
26	Kota Tasikmalaya	9,04	9,13	9,33	9,52	9,53
27	Kota Banjar	8,60	8,62	8,63	8,77	8,78
	Provinsi Jawa Barat	**8,15**	**8,37**	**8,55**	**8,61**	**8,78**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2.21 memperlihatkan pola spasial capaian RLS kabupaten/kota pada tahun 2021. Terlihat jelas disparitas RLS antara wilayah Tengah dengan wilayah Utara dan Selatan serta wilayah Timur. Kabupaten/kota di wilayah Tengah pada umumnya memiliki capaian RLS diatas 8 (delapan) tahun, sedangkan wilayah kabupaten yang terletak di bagian Utara, Selatan dan Timur hampir seluruhnya memiliki capaian RLS dibawah 8 (delapan) tahun. Artinya secara rata-rata, penduduk usia 25

tahun ke atas di wilayah tersebut telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII.

Gambar 2.21
Pola Spasial Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota 2022 (Tahun)



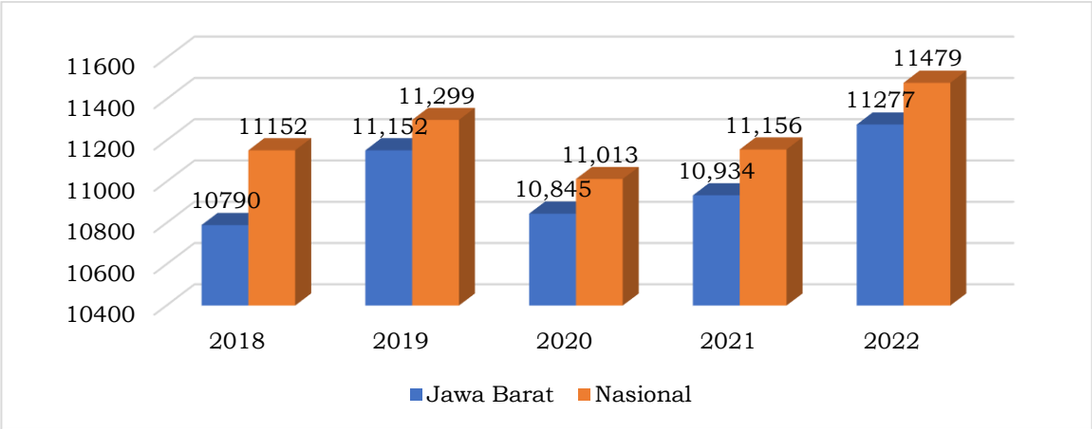
Sumber: BPS dan Bappeda. 2023

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Selama periode sebelum pandemi (Tahun 2010-2019), indikator ini selalu tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,02 persen per tahun. Akan tetapi pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi COVID-19. Pandemi mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup dalam. Penurunan aktivitas perekonomian mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan yang berimbas pada penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya memicu kenaikan tingkat kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan miskin akibat guncangan ekonomi sehingga perlu menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, selain terus mendorong

pembangunan ekonomi inklusif. Namun kondisi mulai tahun 2021 sudah mulai membaik dan dalam proses pemulihan. Mulai pulihnya perekonomian masyarakat ditandai dengan meningkatnya pengeluaran per kapita penduduk Jawa Barat mencapai Rp11.277 ribu. Capaian ini berarti lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebelum COVID-19.

Gambar 2.22
Capaian Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Tahun 2018-2022 (Rp.000)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2022, semua provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan pengeluaran per kapita meskipun laju pertumbuhannya belum setinggi kondisi sebelum pandemi COVID-19, seiring dengan perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan tertinggi dialami Provinsi Jawa Barat yang mencapai 3,14 persen dari tahun 2021. Walau mengalami pertumbuhan terbesar namun dibandingkan dengan 5 (lima) provinsi lainnya, pertumbuhan pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat memiliki nilai paling rendah. Hal ini mengingat besarnya populasi penduduk yang menjadi faktor pembagi angka perkapita.

Tabel 2.37
Pengeluaran per Kapita Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2018-2022 (Rp.000/kapita/tahun)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	18.128	18.527	18.227	18.520	18.927
Jawa Barat	**10.790**	**11.152**	**10.845**	**10.934**	**11.277**
Jawa Tengah	10.777	11.102	10.930	11.034	11.377
DI Yogyakarta	13.946	14.394	14.015	14.111	14.482
Jawa Timur	11.380	11.739	11.601	11.707	11.992
Banten	11.994	12.267	11.964	12.033	12.216
Indonesia	**11.059**	**11.299**	**11.013**	**11.156**	**11.479**

Sumber: BPS RI, 2023

Pengeluaran per kapita merupakan komponen IPM yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Semua kabupaten/kota mengalami penurunan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2020. Seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai menunjukkan pemulihan, 19 (sembilan belas) kabupaten/kota mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita dibanding tahun sebelumnya. Terkecuali, 8 (delapan) kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan nilai pengeluaran per kapita (Tabel 2.38). Capaian pengeluaran per kapita antara tahun 2021 dan 2022 yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi di Kota Bandung yaitu sebesar Rp643.000,-, sementara yang mengalami penurunan nilai pengeluaran per kapita antara tahun 2021 dan 2022 terjadi di Kabupaten Cianjur yaitu sebesar Rp192.000,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh mayoritas penduduk di wilayah Kabupaten Cianjur bekerja pada sektor pertanian.

Tabel 2.38
Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022
(Rp.000/kapita/tahun)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	10.323	10.683	10.317	10.410	10.860
2	Sukabumi	8.618	8.973	8.823	8.850	9.210
3	Cianjur	7.874	8.290	7.980	8.052	8.244
4	Bandung	10.203	10.502	10.201	10.307	10.588
5	Garut	7.597	8.099	7.876	7.961	8.227
6	Tasikmalaya	7.761	8.092	7.852	7.829	8.177
7	Ciamis	9.190	9.557	9.288	9.259	9.428
8	Kuningan	9.297	9.673	9.459	9.409	9.620
9	Cirebon	10.212	10.670	10.342	10.368	10.791
10	Majalengka	9.416	9.822	9.521	9.591	9.950
11	Sumedang	10.153	10.406	10.217	10.262	10.776
12	Indramayu	9.633	10.090	8.959	9.810	10.166
13	Subang	10.715	11.012	10.790	10.854	11.294
14	Purwakarta	11.372	11.819	11.614	11.669	12.193
15	Karawang	11.277	11.856	11.315	11.522	11.927
16	Bekasi	11.155	11.610	11.241	11.341	11.757
17	Bandung Barat	8.329	8.684	8.455	8.546	9.044
18	Pangandaran	8.968	9.423	9.084	9.065	9.389
19	Kota Bogor	11.348	11.825	11.564	11.716	12.058
20	Kota Sukabumi	10.609	11.204	10.999	10.942	11.229
21	Kota Bandung	16.630	17.254	16.887	16.996	17.639
22	Kota Cirebon	11.397	11.930	11.800	11.810	12.087
23	Kota Bekasi	15.755	16.157	15.776	15.903	16.239
24	Kota Depok	15.262	15.696	15.281	15.420	15.926
25	Kota Cimahi	11.921	12.448	12.025	12.019	12.500
26	Kota Tasikmalaya	9.855	10.414	10.263	10.213	10.578

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
27	Kota Banjar	10.329	10.705	10.535	10.476	10.967
	Provinsi Jawa Barat	**11.059**	**11.152**	**10.845**	**10.934**	**11.277**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Gambar 2.23
Pola Spasial Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota
Tahun 2022 (Rp.000/kapita/tahun)



Sumber: Analisis Bappeda, 2023

Gambar 2.23 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan untuk wilayah Jawa Barat bagian Selatan masih berada pada kisaran kurang dari Rp9 juta per tahun. Berbeda dengan Jawa Barat bagian Utara yang secara umum menunjukkan nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada kisaran Rp9 juta hingga Rp16 juta per tahun. Gambaran ini menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah Jawa Barat bagian utara dengan Jawa Barat bagian selatan dalam hal ekonomi.

2.2.7 Kemiskinan

a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kejadian luar biasa pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di awal tahun 2020 telah memberikan pesan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan ekonomi (kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,52 persen). Guncangan ekonomi yang

terjadi menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mengalami kemunduran, ditandai dengan jumlah penduduk miskin di masa pandemi hanya berselisih sedikit dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan.

Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Selama kurun waktu setahun dari Maret 2021–Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,89 persen dari Rp427.402 per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp452.580 per kapita per bulan pada Maret 2022. Apabila dilihat berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, Garis Kemiskinan perdesaan kenaikannya lebih tinggi yaitu sebesar 7,01 persen. Yaitu dari Rp421.757 per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp451.305 per kapita per bulan pada Maret 2022. Sedangkan Garis Kemiskinan perkotaan mengalami kenaikan sebesar 5,55 persen dari Rp428.832 per kapita per bulan di Maret 2021 menjadi Rp452.653 per kapita per bulan pada Maret 2022.

Tabel 2.39
Kondisi Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	367.755	386.198	410.988	433.041	477.969
2	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	3.539,40	3.375,89	4.188,52	4.004,86	4.053,62
3	Persentase penduduk Miskin (%)	7,25	6,82	8,43	7,97	7,98

Sumber: BPS, 2023

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibanding nasional. Pada Maret 2022 selisih persentase penduduk miskin dengan nasional cukup tinggi mencapai 1,48 persen poin. Namun demikian, data 2020 sampai 2022 secara kuantitas menunjukkan jumlah penduduk miskin Jawa Barat masih cukup besar (± 4 juta orang). Data 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum pandemi, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 146,4 ribu orang per tahun, sementara dalam 2 (dua) tahun masa pandemi, jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 620 ribu orang. Hal ini menyiratkan perlunya upaya keras dalam penanggulangan kemiskinan di masa pandemi.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan meningkat selama pandemi COVID-19 lebih disebabkan oleh terkontraksinya pertumbuhan ekonomi hingga -2,52 persen yang berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga (berdasarkan pengeluaran per kapita). Turunnya daya beli masyakarat tercermin dari indikator pengeluaran per kapita. Hal ini mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perkembangan tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Jawa pada periode Tahun 2021-2022 ditunjukkan pada Tabel 2.40. Dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat relatif rendah, meskipun belum kembali ke kondisi sebelum pandemi. Secara umum, kondisi kemiskinan di semua provinsi mengalami perbaikan meskipun masih di masa pandemi, ditunjukkan dengan turunnya persentase penduduk miskin pada tahun 2022 dibanding tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari upaya penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah, salah satunya dengan fokus pada kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Tabel 2.40
Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2018-2022 (Persen)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	3,55	3,42	4,69	4,67	4,61
Jawa Barat	**7,25**	**6,82**	**8,43**	**7,97**	**7,98**
Jawa Tengah	11,19	10,58	11,84	11,25	10,98
DI Yogyakarta	11,81	11,44	12,80	11,98	11,49
Jawa Timur	10,85	10,20	11,46	10,59	10,49
Banten	5,25	4,94	6,63	6,50	6,24
Indonesia	**9,66**	**9,22**	**10,19**	**9,71**	**9,57**

Sumber: BPS, 2023

Perkembangan tingkat kemiskinan di 27 kabupaten/kota pada periode2021-2022 menunjukkan pada tahun 2021, terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan menyentuh angka 2 (dua) digit (>10 persen), kemudian jumlahnya berkurang di tahun 2022 menjadi 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan >10 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Jawa Barat selama 2022 dibandingkan 2021.

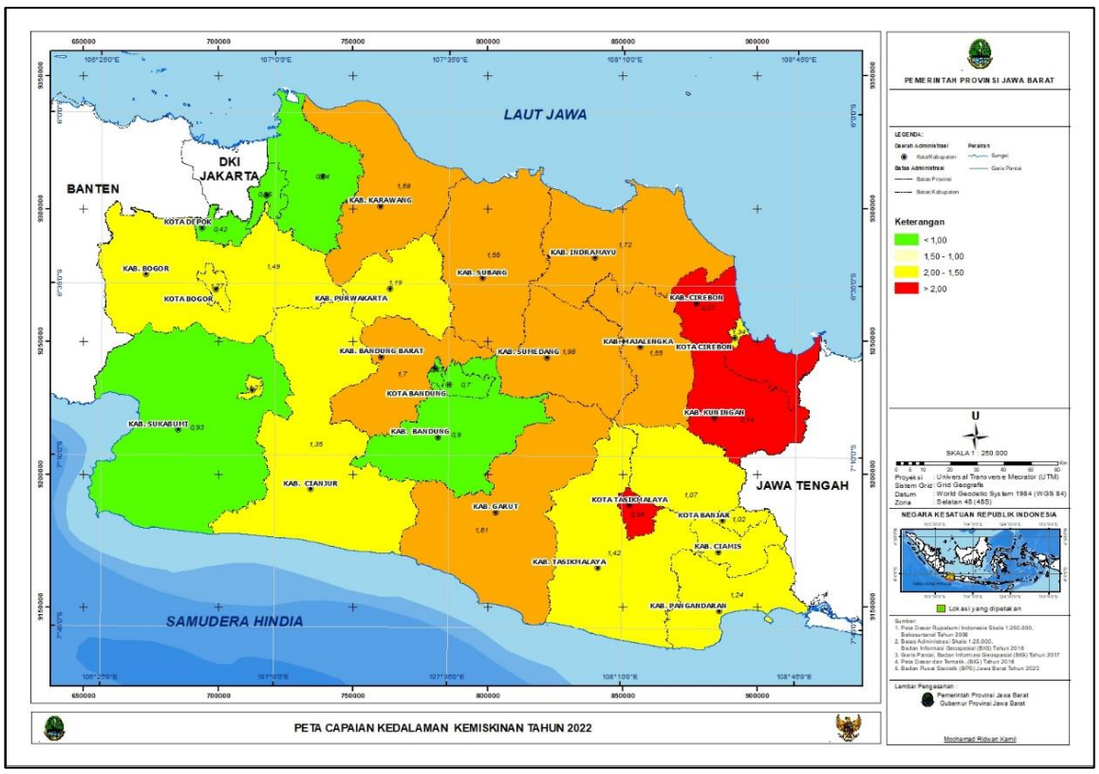
Tabel 2.41
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	7,14	6,66	7,69	8,13	7,73
2	Sukabumi	6,76	6,22	7,09	7,70	7,34
3	Cianjur	9,81	9,15	10,36	11,18	10,55
4	Bandung	6,65	5,94	6,91	7,15	6,80
5	Garut	9,27	8,98	9,98	10,65	10,42
6	Tasikmalaya	9,85	9,12	10,34	11,15	10,73
7	Ciamis	7,22	6,65	7,62	7,97	7,72
8	Kuningan	12,22	11,41	12,82	13,10	12,76
9	Cirebon	10,70	9,94	11,24	12,30	12,01
10	Majalengka	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94
11	Sumedang	9,76	9,05	10,26	10,71	10,14
12	Indramayu	11,89	11,11	12,70	13,04	12,77
13	Subang	8,67	8,12	9,31	10,03	9,75
14	Purwakarta	7,99	7,48	8,27	8,83	8,70
15	Karawang	8,06	7,39	8,26	8,95	8,44
16	Bekasi	4,37	4,01	4,82	5,21	5,01
17	Bandung Barat	10,06	9,38	10,49	11,30	10,82
18	Pangandaran	8,12	7,71	8,99	9,65	9,32
19	Kota Bogor	5,93	5,77	6,68	7,24	7,10
20	Kota Sukabumi	7,12	6,67	7,70	8,25	8,02
21	Kota Bandung	3,57	3,38	3,99	4,37	4,25
22	Kota Cirebon	8,88	8,41	9,52	10,03	9,82
23	Kota Bekasi	4,11	3,81	4,38	4,74	4,43
24	Kota Depok	2,14	2,07	2,45	2,58	2,53
25	Kota Cimahi	4,94	4,39	5,11	5,35	5,11
26	Kota Tasikmalaya	12,71	11,60	12,97	13,13	12,72
27	Kota Banjar	5,70	5,50	6,09	7,11	6,73
	Provinsi Jawa Barat	**7,45**	**6,91**	**7,88**	**8,40**	**8,06**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023
Ket: Data Maret mulai tahun 2017 s/d 2023

Secara spasial, Gambar 2.24 memperlihatkan pola tingkat kemiskinan di kabupaten/kota. Sebaran penduduk miskin terkonsentrasi di kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat bagian Selatan dan Utara (warna merah). Pola spasial memperlihatkan adanya diparitas tingkat kemiskinan yang cukup tajam antar kabupaten/kota. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya keterisolasian sebagai dampak dari kondisi topografi dan aksesibilitas; keterbatasan akses layanan dasar; ketidakberdayaan dari kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan; rendahnya kualitas sumber daya manusia; dan rendahnya investasi yang masuk.

Gambar 2.24
Pola Spasial Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Tahun 2022 (Persen)



Sumber: Analisis Bappeda. 2023

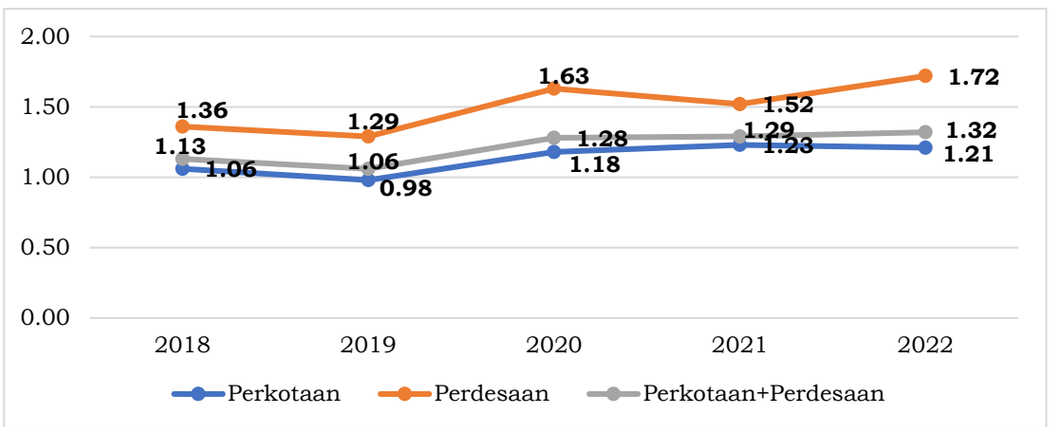
Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Gambar 2.25 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan pada periode 2017 hingga 2022 mengalami lonjakan kenaikan dampak pandemi. Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan memberikan gambaran bahwa pada periode tersebut rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, artinya kondisi kemiskinan semakin memburuk. Peningkatan

indeks kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan, meskipun secara persentase penduduk miskin lebih rendah dibanding perkotaan. Kondisi ini memberikan pesan bahwa kelompok penduduk miskin di wilayah perdesaan mengalami tekanan yang lebih berat akibat menurunnya atau bahkan hilangnya pendapatan imbas dari guncangan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 dengan fokus pada kelompok penduduk miskin menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari indeks kedalaman kemiskinan pada September 2021 menurun cukup signifikan dibanding kondisi Maret 2021. Program pelindungan sosial yang menyasar pada kelompok penduduk miskin ekstrem sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi kelompok penduduk miskin ektrem di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Gambar 2.25
Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

Dalam skala provinsi, indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota menunjukkan nilai yang bervariasi. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tertinggi dialami Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di 3 (tiga) kabupaten/kota tersebut yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berimplikasi pada semakin besarnya usaha yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, ketiga daerah tersebut semestinya menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

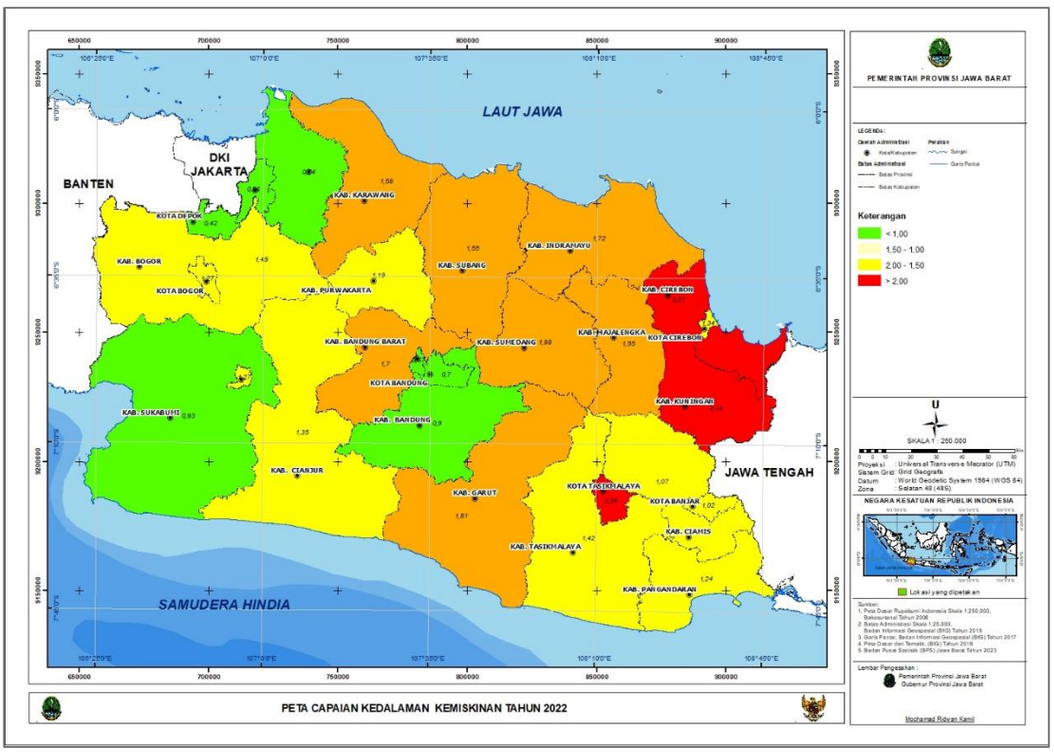
Tabel 2.42
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	1,12	0,83	0,83	1,36	1,49
2	Sukabumi	0,86	0,66	0,80	1,04	0,93
3	Cianjur	1,34	0,74	1,38	1,83	1,35
4	Bandung	0,87	1,04	0,92	1,23	0,90
5	Garut	1,49	0,87	0,97	1,40	1,81
6	Tasikmalaya	1,19	0,84	0,83	1,57	1,42
7	Ciamis	1,18	0,76	0,92	0,88	1,07
8	Kuningan	1,73	1,24	2,41	2,02	2,14
9	Cirebon	2,04	1,29	1,30	1,94	2,27
10	Majalengka	1,96	1,39	1,41	2,44	1,55
11	Sumedang	1,72	1,05	1,72	1,72	1,98
12	Indramayu	2,23	1,66	2,18	2,46	1,72
13	Subang	1,70	1,39	1,29	1,93	1,55
14	Purwakarta	0,87	1,24	1,04	1,31	1,19
15	Karawang	1,21	1,06	1,28	1,27	1,58
16	Bekasi	0,65	0,60	0,72	0,91	0,74
17	Bandung Barat	1,45	1,54	1,40	1,62	1,70
18	Pangandaran	1,24	0,90	1,32	1,25	1,24
19	Kota Bogor	0,77	0,72	1,08	1,10	1,27
20	Kota Sukabumi	1,09	1,39	1,17	1,08	1,27
21	Kota Bandung	0,48	0,78	0,61	0,53	0,70
22	Kota Cirebon	0,99	2,22	1,68	1,23	1,34
23	Kota Bekasi	0,72	0,66	0,60	0,47	0,96
24	Kota Depok	0,31	0,34	0,29	0,24	0,42
25	Kota Cimahi	0,84	0,93	0,75	0,60	0,67
26	Kota Tasikmalaya	1,52	2,42	1,75	1,98	2,34
27	Kota Banjar	0,79	1,19	0,70	0,57	1,02
	Provinsi Jawa Barat	**1.32**	**1,09**	**1,13**	**1,47**	**1,32**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022
Ket: Data Maret mulai tahun 2018 s/d 2023

Gambar 2.26 memperlihatkan pola spasial indeks kedalaman kemiskinan September 2021. Pola tersebut memberikan gambaran skala prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan warna merah dan kuning memerlukan upaya yang lebih keras untuk akselerasi penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan yang dimaknai dengan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan, tentu saja akan memudahkan intervensi terhadap kelompok penduduk miskin agar dapat keluar dari zona kemiskinan (pengeluaran diatas garis kemiskinan) melalui konvergensi program-program penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2.26
Pola Spasial Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota
September 2022

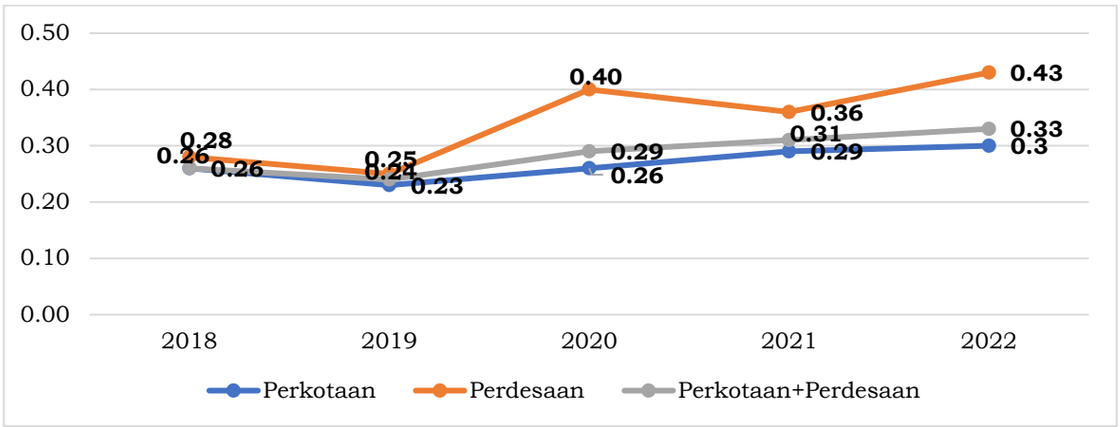


Sumber: Bappeda. 2023

Hasil Susenas Maret 2022, menunjukkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat mencapai 0,33. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dibandingkan P2 pada Maret 2021 yang mencapai 0,38. Hal ini mengindikasikan bahwa jika dilihat secara *year to year* (Maret 2021 – Maret 2022) kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

Pandemi COVID-19 yang berdampak cukup besar pada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Pemerintah meningkatkan besaran maupun jenis perlindungan sosial pada tahun 2021, yaitu dalam bentuk Bantuan Subsisi Upah (BSU), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa hingga stimulus listrik. Berbagai program bantuan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat golongan pengeluaran bawah harapannya mampu mempersempit sebaran pengeluaran masyarakat. Pada kurun waktu yang sama, P2 di wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan 0,05 poin pada Maret 2022 dari sebelumnya 0,35 menjadi 0,30 untuk perkotaan dan 0,43 di Maret 2022 dari sebelumnya 0,48 untuk daerah perdesaan.

Gambar 2.27
Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

Dalam skala provinsi, indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota menunjukkan nilai yang bervariasi. Nilai indeks keparahan kemiskinan tertinggi dialami Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang (lihat Tabel 2.43) . Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di 4 (empat) kabupaten tersebut yang semakin jauh di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.43
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	0,26	0,15	0,11	0,35	0,45
2	Sukabumi	0,19	0,11	0,12	0,23	0,19
3	Cianjur	0,27	0,11	0,27	0,46	0,27
4	Bandung	0,20	0,28	0,17	0,34	0,21
5	Garut	0,37	0,16	0,15	0,29	0,45
6	Tasikmalaya	0,23	0,12	0,11	0,35	0,28
7	Ciamis	0,26	0,14	0,16	0,15	0,24
8	Kuningan	0,40	0,18	0,62	0,46	0,53
9	Cirebon	0,55	0,26	0,24	0,47	0,59
10	Majalengka	0,51	0,28	0,25	0,77	0,36
11	Sumedang	0,47	0,21	0,42	0,46	0,53
12	Indramayu	0,60	0,40	0,56	0,66	0,48
13	Subang	0,51	0,34	0,25	0,50	0,41
14	Purwakarta	0,16	0,28	0,20	0,30	0,25
15	Karawang	0,30	0,24	0,25	0,29	0,41
16	Bekasi	0,15	0,15	0,18	0,26	0,18
17	Bandung Barat	0,35	0,33	0,25	0,32	0,41
18	Pangandaran	0,30	0,16	0,28	0,27	0,26
19	Kota Bogor	0,17	0,18	0,26	0,27	0,29
20	Kota Sukabumi	0,26	0,32	0,22	0,36	0,38
21	Kota Bandung	0,11	0,14	0,13	0,24	0,17
22	Kota Cirebon	0,19	0,26	0,40	0,68	0,30
23	Kota Bekasi	0,18	0,10	0,15	0,16	0,27

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
24	Kota Depok	0,06	0,04	0,06	0,07	0,10
25	Kota Cimahi	0,23	0,14	0,18	0,21	0,14
26	Kota Tasikmalaya	0,31	0,53	0,39	0,69	0,65
27	Kota Banjar	0,19	0,10	0,12	0,28	0,28
	Provinsi Jawa Barat	**0,33**	**0,24**	**0,23**	**0,38**	**0,33**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023
Ket: Data Maret mulai tahun 2018 s/d 2023

Profil kemiskinan di Jawa Barat sebagaimana diuraikan di atas memberikan gambaran kondisi terkini. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, maka perlu disajikan data kemiskinan ekstrem. Jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 895,64 ribu jiwa tahun 2021 menjadi 941,86 ribu jiwa di tahun 2022. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Bogor dengan jumlah 107,25 ribu jiwa di tahun 2021 dan meningkat menjadi 146,12 ribu jiwa di tahun 2022. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrim terendah berada di Kota Banjar dengan jumlah 2,08 ribu jiwa pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 2,49 ribu jiwa.

Tabel 2.44
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2022

No	Kabupaten/Kota	2021	2022
1	Bogor	107,25	146,12
2	Sukabumi	24,61	19,90
3	Cianjur	57,04	36,16
4	Bandung	66,96	56,43
5	Garut	30,32	82,17
6	Tasikmalaya	28,24	15,74
7	Ciamis	5,51	17,90
8	Kuningan	24,03	31,89
9	Cirebon	64,44	81,89
10	Majalengka	43,84	24,13
11	Sumedang	31,71	36,82
12	Indramayu	75,82	53,05
13	Subang	57,51	35,44
14	Purwakarta	18,58	16,93
15	Karawang	28,22	64,02
16	Bekasi	56,00	25,82
17	Bandung Barat	28,25	33,59
18	Pangandaran	5,61	5,93
19	Kota Bogor	13,59	14,45
20	Kota Sukabumi	9,98	4,49
21	Kota Bandung	24,79	25,37
22	Kota Cirebon	13,06	5,32
23	Kota Bekasi	33,25	61,75
24	Kota Depok	9,44	17,57
25	Kota Cimahi	8,34	2,63

No	Kabupaten/Kota	2021	2022
26	Kota Tasikmalaya	27,17	23,88
27	Kota Banjar	2,08	2,49
	Provinsi Jawa Barat	**895,64**	**941,86**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain.

Pada tahun 2021 dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Jawa Barat. Terdapat 4,63 juta orang (12,16 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,46 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,17 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,29 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,71 juta orang).

Pada tahun 2022, kondisi ketenagakerjaan semakin membaik, walaupun masih terasa dampak dari pandemi. Masih terdapat 1,02 juta orang (2,63 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,08 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,09 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,03 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (0,82 juta orang).

Gambar 2.30 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat dan Indonesia pada periode tahun sebelum pandemi dan di masa pandemi. Terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat selalu lebih tinggi dibanding nasional dengan selisih yang semakin membesar pada Agustus 2021 mencapai 3,33 persen poin. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja. Namun selama 3 (tiga) tahun terakhir sejak pandemi tahun 2020, terjadi penurunan tingkat pengangguran baik di nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.28
Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengangguran (juta orang)	1,88	1,90	2,53	2,43	2,13
TPT Jawa Barat (%)	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31
TPT Nasional (%)	5,30	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah, 2023

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 23,45 juta orang penduduk yang bekerja dan 2,13 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 0,84 juta orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 1,14 juta orang, sementara pengangguran turun sebanyak 0,30 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 8,31 persen, turun sebesar 1,51 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 9,82 persen.

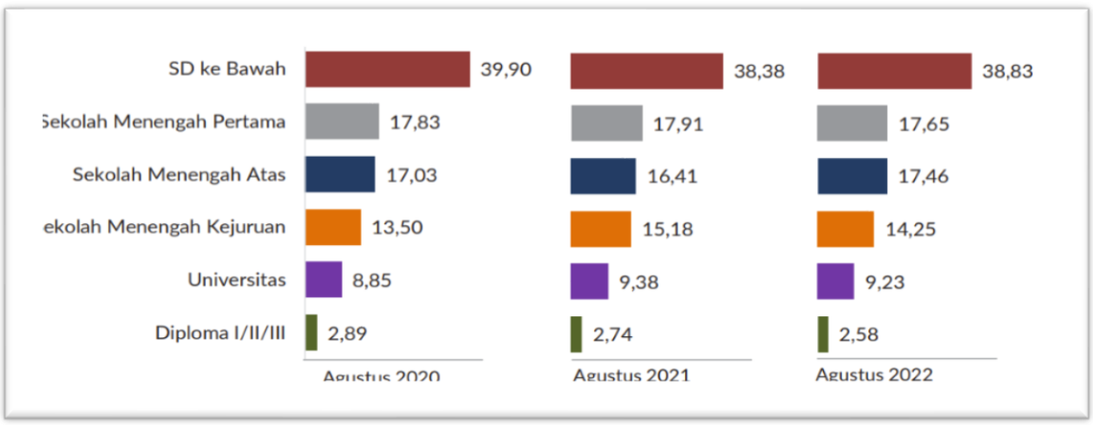
Tingginya angka pengangguran mengindikasikan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibanding penciptaan lapangan kerja, karakteristik sektor industri yang cenderung padat modal menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang semakin kecil, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta dunia kerja, ketidakstabilan perekonomian, dan rendahnya wirausaha.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, 3 (tiga) lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,19 persen; Industri Pengolahan sebesar 19,29 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 15,29 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2021. Dibandingkan Agustus 2021, hampir semua lapangan pekerjaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,26 juta orang); Industri Pengolahan (0,20 juta orang);

Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum (0,14 juta orang); dan Pengangkutan & Pergudangan (0,14 juta orang). Sementara lapangan pekerjaan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami penurunan sebesar 0,04 juta orang.

Profil ketenagakerjaan berdasarkan pendidikan yang ditamatkan menunjukkan pada Agustus 2022, penduduk bekerja di Jawa Barat masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 38,83 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 11,81 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2021. Dibandingkan dengan Agustus 2021, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 0,45 persen poin dan 1,05 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, diploma I/II/III, dan universitas mengalami penurunan persentase, dengan penurunan terbesar pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni sebesar 0,93 persen poin.

Gambar 2.29
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pada skala regional Pulau Jawa, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2022 merupakan yang tertinggi dibanding 5 (lima) provinsi lain. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah ketenagakerjaan masih menjadi tantangan pembangunan di Provinsi Jawa Barat ke depan. Dinamika ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Provinsi

Jawa Barat berbeda dengan provinsi lain, jumlah penduduk yang banyak tentu saja mempengaruhi laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tabel 2.45
Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2018-2022 (Persen)

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	6,65	6,54	10,95	8,50	7,18
Jawa Tengah	4,47	4,44	6,48	5,95	5,57
DI Yogyakarta	3,37	3,82	5,84	5,74	4,06
Jawa Timur	3,91	3,18	4,57	4,56	5,49
Banten	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09
Jawa Barat	**8,23**	**8,04**	**10,46**	**9,82**	**8,31**
Indonesia	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

Pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari keadaan ketenagakerjaan di 27 kabupaten/kota. Tabel 2.46 memperlihatkan dampak pandemi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota. Pada tahun 2021, terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang memiliki angka pengangguran lebih dari 2 (dua) digit (>10 persen) dan di tahun 2022 masih terdapat 4 (empat) kabupaten/kota. TPT tertinggi terjadi di Kota Cimahi sebesar 10,77 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Pangandaran sebesar 1,56 persen.

Tabel 2.46
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022 (Persen)

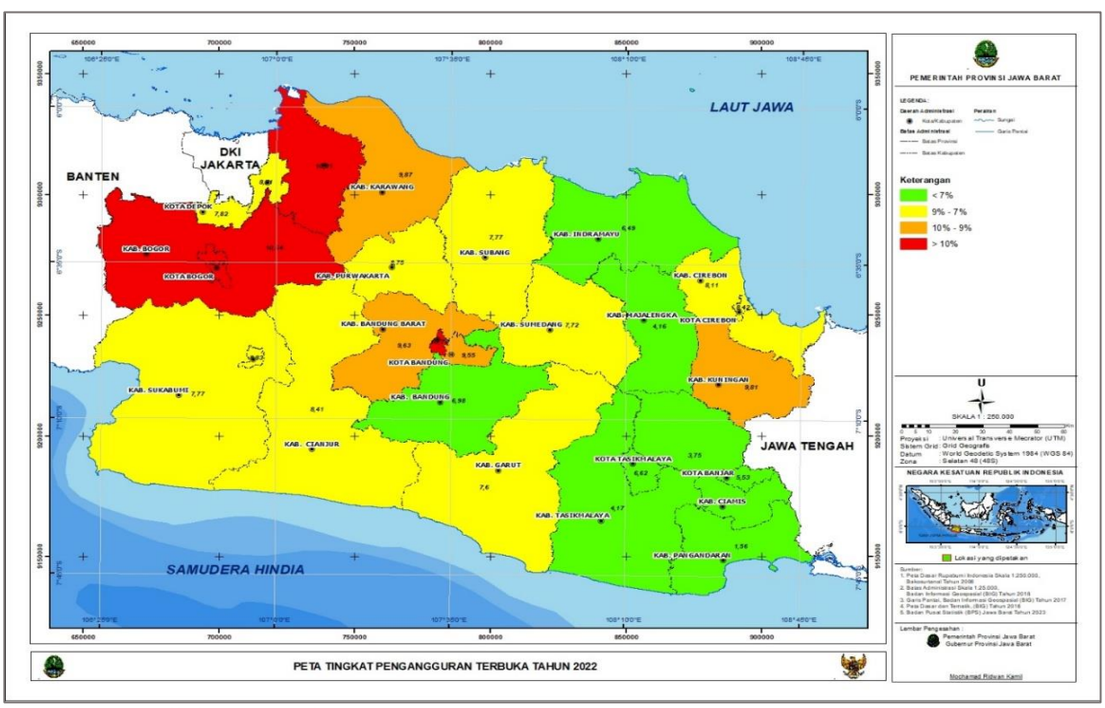
No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bogor	9,83	9,11	14,29	12,22	10,64
2	Sukabumi	7,84	8,05	9,60	9,51	7,77
3	Cianjur	10,23	9,81	11,05	9,32	8,41
4	Bandung	5,07	5,51	8,58	8,32	6,98
5	Garut	7,12	7,35	8,95	8,68	7,60
6	Tasikmalaya	6,92	6,31	7,12	6,16	4,17
7	Ciamis	4,64	5,16	5,66	5,06	3,75
8	Kuningan	9,10	9,68	11,22	11,68	9,81
9	Cirebon	10,64	10,35	11,52	10,38	8,11
10	Majalengka	5,00	4,37	5,84	5,71	4,16
11	Sumedang	7,54	7,70	9,89	9,18	7,72
12	Indramayu	8,46	8,35	9,21	8,30	6,49
13	Subang	8,71	8,68	9,48	9,77	7,77
14	Purwakarta	9,94	9,73	11,07	10,70	8,75
15	Karawang	9,12	9,68	11,52	11,83	9,87
16	Bekasi	9,74	9,00	11,54	10,09	10,31
17	Bandung Barat	8,55	8,24	12,25	11,65	9,63

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
18	Pangandaran	3,59	4,52	5,08	3,25	1,56
19	Kota Bogor	9,74	9,16	12,68	11,79	10,78
20	Kota Sukabumi	8,57	8,49	12,17	10,78	8,83
21	Kota Bandung	8,05	8,18	11,19	11,46	9,55
22	Kota Cirebon	9,07	9,04	10,97	10,53	8,42
23	Kota Bekasi	9,14	8,30	10,68	10,88	8,81
24	Kota Depok	6,66	6,12	9,87	9,76	7,82
25	Kota Cimahi	8,00	8,09	13,30	13,07	10,77
26	Kota Tasikmalaya	6,89	6,78	7,99	7,66	6,62
27	Kota Banjar	5,95	6,16	6,73	6,09	5,53
	Provinsi Jawa Barat	**8,23**	**8,04**	**10,46**	**9,82**	**8,31**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

Pola spasial tingkat pengangguran terbuka memperlihatkan kabupaten/kota dengan angka pengangguran yang tinggi (>10 persen) umunya adalah kabupaten/kota dengan basis perekonomian sektor industri pengolahan dan perdagangan (Gambar 2.30). Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang paling terdampak di masa pandemi COVID-19 dilihat dari banyaknya pegawai yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sementara dan permanen serta pengurangan jam kerja.

Gambar 2.30
Pola Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Tahun 2022 (Persen)



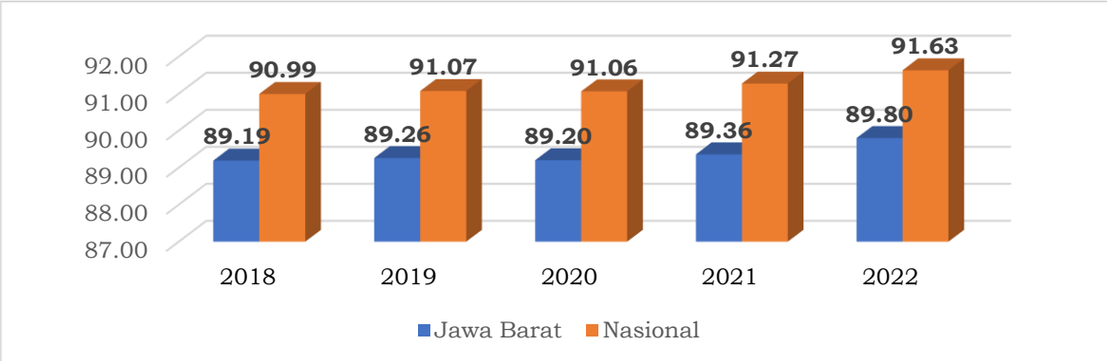
Sumber: Analisis Bappeda. 2023

2.2.9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Untuk mengetahui capaian pembangunan manusia secara gender digunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan membandingkan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Gambar 2.31 menunjukkan capaian IPG Jawa Barat lebih rendah dibanding Indonesia. Artinya pembangunan manusia secara gender di tingkat nasional lebih merata dibanding di Jawa Barat.

Gambar 2.31
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018-2022



Sumber: BPS RI, 2023

Capaian IPG di tingkat kabupaten/kota memperlihatkan angka yang bervariasi. Perbedaan capaian IPG menandakan adanya disparitas pembangunan kualitas sumber daya manusia antara laki-laki dan perempuan antar kabupaten/kota. Secara keseluruhan, pada tahun 2022

terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota dengan capaian IPG di bawah provinsi. Tiga kabupaten terendah yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cirebon. Sementara itu, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cirebon merupakan 3 (tiga) kabupaten/kota yang memiliki IPG tertinggi. Hal ini mengindikasikan pembangunan yang berkesetaraan gender semakin menunjukkan keberhasilannya.

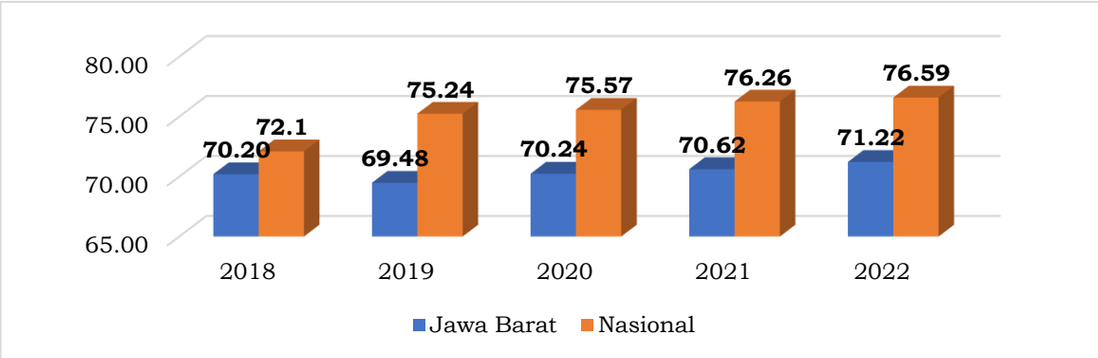
Tabel 2.47
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bogor	89.05	89,39	89,23	89,40	89,95
Sukabumi	86.95	87,43	87,37	87,44	87,64
Cianjur	83.72	84,36	84,14	84,30	84,90
Bandung	93.59	93,96	93,95	93,85	93,97
Garut	82.42	82,54	82,29	82,13	82,78
Tasikmalaya	85.98	86,05	86,02	86,36	86,64
Ciamis	86.00	86,49	86,61	86,55	87,04
Kuningan	86.62	86,92	86,81	86,97	87,17
Cirebon	82.92	83,50	83,47	83,49	84,01
Majalengka	85.93	85,76	85,91	86,24	86,69
Sumedang	94.88	95,01	95,18	95,18	95,09
Indramayu	87.97	88,35	88,15	87,92	88,17
Subang	90.57	90,58	90,53	90,51	90,95
Purwakarta	87.19	86,78	86,56	86,70	86,94
Karawang	90.45	90,33	90,12	90,29	90,50
Bekasi	88.28	88,68	88,58	88,88	89,37
Bandung Barat	79.18	79,29	79,06	79,07	79,69
Pangandaran	89.68	90,02	89,78	89,92	90,20
Kota Bogor	90.92	91,11	91,02	90,87	90,97
Kota Sukabumi	91.07	91,44	91,36	91,58	91,83
Kota Bandung	95.11	94,82	94,68	94,72	94,81
Kota Cirebon	93.94	94,35	94,39	94,46	94,91
Kota Bekasi	93.26	93,02	92,95	93,09	93,49
Kota Depok	93.06	92,78	93,01	92,96	93,47
Kota Cimahi	92.36	92,20	92,01	91,95	91,97
Kota Tasikmalaya	91.07	91,48	91,64	91,74	91,87
Kota Banjar	87.11	87,12	87,17	87,01	87,67
Provinsi Jawa Barat	**89,19**	**89,26**	**89,20**	**89,36**	**89,80**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Gambar 2.32 memperlihatkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) IDG Jawa Barat masih berada di bawah IDG nasional. Namun demikian, angka IDG menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Peningkatan IDG ini lebih disebabkan meningkatnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional disertai dengan meningkatnya persentase perempuan dalam hal sumbangan pendapatan dan keterlibatan di parlemen.

Gambar 2.32
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2018-2022



Sumber: BPS RI, diolah, 2023

Secara keseluruhan, capaian IDG kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih rendah. Pada tahun 2021, terdapat 15 (lima belas) kabupaten/kota dengan IDG lebih rendah dibanding provinsi. Hal ini menandakan peran perempuan dalam hal ekonomi dan politik masih rendah. Idealnya peningkatan IPG disertai dengan meningkatnya kesetaraan gender (IDG). Dalam periode Tahun 2018-2022, IDG di 27 kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang positif ditandai dengan meningkatnya capaian IDG di semua kabupaten/kota.

Tabel 2.48
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bogor	56,64	55,73	55,76	55,86	55,07
Sukabumi	53,07	60,70	55,86	57,45	61,52
Cianjur	60,36	60,32	58,59	59,70	59,74
Bandung	72,40	65,86	67,07	68,68	69,26
Garut	64,67	68,23	71,91	64,87	73,74
Tasikmalaya	63,15	64,30	64,13	63,79	65,40
Ciamis	64,54	65,35	66,43	63,65	65,79
Kuningan	73,05	70,58	70,54	73,04	73,67
Cirebon	72,39	75,61	72,07	72,52	73,15
Majalengka	61,67	58,90	60,06	60,04	59,82
Sumedang	70,57	70,94	70,78	70,13	72,23
Indramayu	61,12	70,10	70,45	70,93	68,62
Subang	68,81	68,83	68,75	70,77	73,14
Purwakarta	72,04	74,39	73,94	76,88	76,80
Karawang	68,52	74,80	74,42	74,83	73,28
Bekasi	57,02	60,83	62,46	65,24	63,62
Bandung Barat	62,71	64,53	65,40	65,83	65,32
Pangandaran	69,20	74,56	74,57	75,98	76,09

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bogor	62,04	68,91	69,03	72,33	72,56
Kota Sukabumi	59,55	66,82	66,93	66,81	66,24
Kota Bandung	63,63	70,38	70,49	70,81	72,36
Kota Cirebon	73,97	77,86	78,09	77,64	78,07
Kota Bekasi	65,96	66,10	65,75	66,57	68,30
Kota Depok	81,49	74,82	76,31	76,53	77,94
Kota Cimahi	77,21	74,14	75,13	74,07	74,26
Kota Tasikmalaya	62,92	59,32	59,51	59,59	59,99
Kota Banjar	53,80	49,53	50,56	54,32	55,08
Provinsi Jawa Barat	**70,20**	**69,48**	**70,24**	**70,62**	**71,22**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2022

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Bidang Pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada Perubahan RPJMD periode Tahun 2018-2023. Ukuran keberhasilan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun kondisi saat ini, menunjukkan bahwa sebaran jumlah sekolah di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat belum merata. Sampai bulan Mei 2022 masih Terdapat 18 (delapan belas) kecamatan yang tidak memiliki sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten dari total keseluruhan kecamatan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 627 kecamatan. Kecamatan yang tidak memiliki sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta tersebut, sebagian besar berada di Kabupaten Kuningan dengan jumlah kecamatan yang tidak memiliki sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

Tabel 2.49
Kecamatan di Provinsi Jawa Barat yang Tidak Memiliki Sekolah (SMA/SMK) Negeri Maupun Swasta

Kabupaten	Kecamatan
Kabupaten Sukabumi	Kecamatan Cimanggu
Kabupaten Sumedang	Kecamatan Ganeas
Kabupaten Sumedang	Kecamatan Jatigede
Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cisitu
Kabupaten Sumedang	Kecamatan Cisarua
Kabupaten Garut	Kecamatan Pangatikan

Kabupaten	Kecamatan
Kabupaten Ciamis	Kecamatan Tambaksari
Kabupaten Ciamis	Kecamatan Sukamantri
Kabupaten Ciamis	Kecamatan Banjaranyar
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cipicung
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Kalimanggis
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Karangkancana
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Nusaherang
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cilebak
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Hantara
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cimahi
Kabupaten Kuningan	Kecamatan Cibeureum
Kabupaten Purwakarta	Kecamatan Pondok Salam

Sumber: DAPODIK, Mei 2022

Sementara itu, beberapa indikator kinerja urusan pendidikan cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, diantaranya, APK SMA/SMK/MA, APM SMA/SMK/MA, APM SMA, SMK dan SLB, Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C, Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas, serta Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Data Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	Persen	57,33	57,53	66,77	83,58	83,68*
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	Persen	75,31	77,82	90,94	94,82	113,67*
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	67,17	67,29	67,74	67,80	68,66
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	Rasio	20	19	19	18	20
Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	0,28	0,3	SMA: 0,22 SMK: 0,38	SMA: 0,16 SMK: 0,15	SMA: 0,09 SMK: 0,14
Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	98,56	98,78	SMA: 99,27 SMK: 98,29	SMA: 99,96 SMK: 99,89	SMA: 99,98 SMK: 99,92
Kualifiaksi S2 Guru SMA	Persen	13,31	13,7	13.74	13,52	15,14
Kualifiaksi S2 Guru SMK	Persen	6,83	6,69	7.60	8,76	7,73

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Poin	N/A	3,20	3,22	3,61	4,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun, 2023

Dilihat dari tren capaian kinerja urusan pendidikan dari Tahun 2018-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan angka capaian. Namun pada indikator Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/SLB terjadi peningkatan capaian yang cukup signifikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, dimana terjadi peningkatan sebesar 16,81 persen.

Di sisi lain, capaian indikator Angka Putus Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) mengalami penurunan, yang menunjukkan kondisi yang baik dimana semakin banyaknya peserta didik yang menamatkan jenjang pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA). Hal ini disebabkan oleh berbagai program bantuan yang diberikan pada jenjang SMA/SMK/SLB, baik negeri maupun swasta, serta bantuan lainnya yang dikhususkan bagi keluarga tidak mampu.

2.3.1.2 Kesehatan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari Angka Harapan Hidup, Rasio Kematian Bayi, dan Rasio Kematian Ibu. Selain ketiga indikator tersebut, terdapat indikator lainnya yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat.

Indikator yang mengalami penurunan pada Tahun 2018-2022 adalah Prevalensi *Stunting*, Persentase Rumah tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota, dan Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju *Universal Health Coverage* (UHC). Sedangkan indikator yang mengalami kecenderungan peningkatan pada Tahun 2018-2022 adalah Angka Harapan Hidup, Rasio Kematian Ibu, Persentase Desa Siaga Aktif, Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar, Jumlah

Puskesmas yang sudah Terakreditasi, Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi, Persentase Keberhasilan Pengobatan TB *(Treatment Success Rate)*, dan Prevalensi Hipertensi.

Namun terdapat indikator kesehatan yang mengalami penurunan kinerja pada tahun 2022. Rasio Kematian Bayi menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2022 mencapai 3,54 persen yang berarti meningkat dari 3,39 persen pada tahun 2021. Kenaikan rasio kematian bayi dari masa neonatal sampai post neonatal disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan kongenital, infeksi COVID-19, tetanus neonatorium dan infeksi lainnya. Selain itu, Rasio Kematian Ibu juga mengalami penurunan menjadi 83,57 Per 100,000 KH pada tahun 2022 dari yang semula 149,33 per 100,000 KH di tahun 2021.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,76	72,85	73,04	73,23	73,52
Prevalensi *Stunting*	Persen	31,1	26,21	26,21	24,50	20,19
Rasio Kematian Bayi	Per 1000 KH	3,38	3,26	3,18	3,39	3,54
Rasio Kematian Ibu	Per 100,000 KH	79,68	78,30	85,77	149,33	83,57
Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	61,8	60,40	60,70	59,20	Data masih dalam proses
Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	99,00	99,90	99,30	100	Data masih dalam proses
Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	94,18	96,71	94,9	98,62	94,97
Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	38,64	66,64	73	80	Data menjadi indikator di bawahnya
Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskesmas	772	1,028	1,028	1,028	Diganti menjadi indikator diawahnya
Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	Persen	N/A	N/A	N/A	45,5	45,5
Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	229	320	322	322	Diganti menjadi indikator diawahnya
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persen	N/A	N/A	N/A	88,92	Data masih dalam proses

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas	Persen	94,18	94,33	92,12	91,77	95,34
Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage (UHC)	Persen	83,17	84,46	85,51	84,56	90,36
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate*)	Persen	87	67	73,16	82	80,3
Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI (Universal Child Immunitation) >90%	Persen	91,90	93,80	44,80	71	Data masih dalam proses
Prevalensi Hipertensi	Persen	34,50	39,60	39,60	39,60	39,60
Jumlah Warga Negara yang terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan*	Orang	N/A	N/A	N/A	100% terlayani (455.858 Jiwa)	135,611 (sementara)
Jumlah Warga Negara pada Kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan*	Orang	N/A	N/A	N/A	100%	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2023
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, diolah
Keterangan : * Indikator baru digunakan tahun 2021 (Perubahan RPJMD 2018-2023)

Dalam upaya menangani penyebaran pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir selama 3 (tiga) tahun dengan varian yang terus berkembang, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya pencegahan. Penanganan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Menginjak awal tahun 2022, jumlah kasus konfirmasi harian COVID-19 semakin turun, dimana 61,29 persen kasus konfirmasi berasal dari wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) dan 23,39 persen dari Bandung Raya. Untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada periode awal tahun 2022 yaitu 9 (sembilan) kabupaten/kota berada pada level 1 (satu) dan 18 (delapan belas) kabupaten/kota berada pada level 2 (dua). Artinya, secara keseluruhan penanganan COVID-19 di Jawa Barat dapat dikatakan baik.

Dalam mencapai kemandirian di sektor kesehatan, Reformasi Sistem Kesehatan Daerah dilaksanakan melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui kolaborasi dan kemitraan. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan masyarakat melalui puskesmas melalui penguatan kapasitas, kualitas SDM Kesehatan dan penguatan

melalui program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) sedangkan untuk penguatan layanan dasar di Rumah Sakit melalui kajian pengembangan Rumah Sakit Rujukan Pusat Infeksi Provinsi Jawa Barat sebagai upaya kesiapsiagaan serta mitigasi bencana non alam seperti COVID-19.

Dalam memenuhi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan keuangan berupa pemberian bantuan iuran kepada peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum tercakup oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional serta menganggarkan jaminan Kesehatan masyarakat pada UPTD Khusus Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan 1 (satu) dari 4 (empat) anak usia 0 (nol) sampai 59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi *stunting* balita di Jawa Barat yaitu sebesar 20,2 persen. Hal ini berarti berada di bawah rata-rata nasional sebesar 24,4 persen. Kondisi tersebut masih termasuk dalam kategori masalah kesehatan masyarakat tingkat tinggi menurut WHO (2010) karena menetapkan ambang batas untuk *stunting* adalah 20 persen. Dalam upaya penanganan *stunting* Provinsi Jawa Barat mempunyai program *"Jabar Zero New Stuting"* dengan target prevalensi *stunting* sebesar 19,2 persen di tahun 2023 dan menjadi pendorong untuk mencapai target nasional di angka 14 persen di tahun 2024 hal tersebut diupayakan melalui penguatan 8 (delapan) aksi konvergensi dan membuka peluang kemitraan dengan berbagai *stakeholder*. Disamping itu, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular juga masih menjadi hal yang harus dilakukan upaya pengendaliannya karena berpengaruh kepada capaian derajat kesehatan suatu masyarakat. Saat ini kasus penyakit menular diantaranya *tubercolosis* (TBC), diare dan penyakit paru obstruktif kronis masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Jawa Barat selain itu kasus AIDS yang masih terus bertambah. Penyakit tidak menular juga menjadi penyebab kematian di Jawa Barat diantaranya adalah diabetes melitus, *Cirrhosis*, kanker paru-paru, serta penyakit jantung hipertensif.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator, antara lain Tingkat Kemantapan Jalan, Kondisi Baik Jaringan Irigasi, Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Permukiman, dan lain-lain. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar.

Sistem jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 Tanggal 2 Desember 2022, panjang jaringan jalan nasional adalah 1.782,65 km dan panjang jaringan jalan provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek Tanggal 4 November 2016 adalah 2.360,580 km. Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tanggal 23 Desember 2016 panjang jaringan jalan kabupaten/kota adalah 43.570,184 km. Tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan penurunan dari tahun 2019 sebesar 91,90 persen menjadi 81,54 persen di tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 menjadi 82,15 persen. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda Negara Indonesia sehingga terjadi pengalihan anggaran untuk menanggulangi wabah tersebut, sehingga capaian terkoreksi sekitar 10 persen, namun pada tahun 2021 dengan adanya pendanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah sisi keungan berangsur membaik sehingga capaian kemantapan jalan meningkat. Pada Tahun 2022 dengan kondisi perekonomian semakin membaik berimbas kepada tingkat kemantapan jalan sehingga pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 82,79 persen.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi, yang menjadi kewenangan provinsi. Karena jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Program rehabilitasi dan

pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dalam upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi, tetapi karena banyaknya terjadi bencana alam yang tidak diimbangi dengan kecepatan penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi, umur bangunan jaringan irigasi sudah melewati umur kontruksi, sehingga menyebabkan kondisi baik jaringan irigasi mengalami penurunan-dari 69,53 persen di tahun 2019 menjadi 52,05 persen di tahun 2020, menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 53,11 persen dan tahun 2022 sebesar 48,21 persen.

Indeks Penggunaan Air menunjukkan kondisi yang terjaga dan pada tahun 2022 turun dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 1,1913 poin menjadi 1,1878 poin. Kondisi ini menunjukkan jumlah kebutuhan air lebih besar dibandingkan jumlah ketersediaan air di Jawa Barat pada tahun 2022 yang terus mengalami penurunan.

Infrastruktur dasar Permukiman yang terdiri dari Air Minum, Air Limbah Domestik (sanitasi), dan Persampahan tetap menjadi fokus pembangunan di Jawa Barat dan terus ditingkatkan kinerjanya yang tercermin dalam peningkatan angka capaian indikator Cakupan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman yang secara definisi merupakan rata-rata cakupan pelayanan air minum, air limbah dan persampahan. Capaian pada tahun 2018 sebesar 72 peren dan pada tahun 2019 sebesar 74,57 peren serta meningkat menjadi 75,36 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020 dilakukan proses penyesuaian indikator RPJMD Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dimana indikator Cakupan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman tidak digunakan lagi dan dipecah menjadi 3 indikator yakni Akses Air Minum Layak, Akses Sanitasi Layak dan Akses Penanganan Sampah di Perkotaan dimana capaian pada tahun 2021 cukup besar dengan rata-rata akses air minum, akses sanitasi dan akses persampahan cukup signifikan sebesar 80,30 persen. Namun capaian Akses Air Minum Layak, Akses Sanitasi Layak dan Akses Penanganan Sampah di Perkotaan tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2021 terutama karena minimnya intervensi pembangunan yang disebabkan adanya keterbatasan anggaran (pemerintah, swasta dan masyarakat) akibat Pandemi COVID-19 sehingga perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Indikator Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan catatan bahwa ada data

yang tidak tersedia di tahun tertentu sebab belum digunakan sebagai indikator kinerja pemerintah/perangkat daerah daerah.

Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	90,18	91,90	81,54	82,15	82,79
Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ ditingkatkan	Persen	N/A	1,35	7,44	15,83	19,34
Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Persen	N/A	79,25	72,40	N/A	N/A
Persentase Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)*	Persen	N/A	N/A	N/A	54,78	86,98
Persentase Luasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang*	Persen	N/A	N/A	N/A	34,45	48,48
Persentase Sumber Daya Kontruksi yang terlatih*	Persen	N/A	N/A	20,10	83,27	183,85
Indeks Penggunaan Air	Poin	N/A	1,1920	1,1927	1,1913	1,1878
Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Persen	N/A	0,29	0,02	0,34	0,27
Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	persen	N/A	52,31	52,20	54,50	55,52
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	N/A	69,53	52,05	53,11	48,21
Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	76,85	78,78	79,59	N/A	N/A
Cakupan Pelayanan Penanganan Persampahan	Persen	67,87	69,01	69,69	N/A	N/A
Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	70,74	72,44	73,31	N/A	N/A
Cakupan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman	Persen	72	74,57	75,36	N/A	N/A
Akses Sanitasi Layak*	Persen	N/A	N/A	N/A	77,08	83,78
Akses Air Minum Layak*	Persen	N/A	N/A	N/A	93,24	93,04
Akses Penanganan Sampah di Perkotaan*	Persen	N/A	N/A	N/A	70,70	77,02
Persentase Luas genangan yang tertangani*	Persen	N/A	29,20	36,93	50,31	65,77
Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib	Persen	100	100	63,5	78,54	83,50

Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang; Dinas Sumber Daya Air; dan Dinas Perumahan dan Permukiman, 2023

Keterangan: * Indikator baru digunakan tahun 2021 (Perubahan RPJMD 2018-2023)

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan pemukiman di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Hunian Layak yang merupakan Indikator Kinerja Daerah yang meningkat dari 52,28 persen pada tahun 2020 menjadi 53,37 persen pada tahun 2022. Selain itu, terdapat beberapa indikator kinerja yang menunjukkan peningkatan yakni Indikator kinerja rasio permukiman layak pada tahun 2019 mempunyai angka capaian yang sama pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,9952 poin, karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran di tahun 2020, serta pada tahun 2022 mencapai 0,9982 poin. Indikator tingkat kualitas kawasan permukiman juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 93,45 persen, dan indikator tingkat ketersediaan rumah layak dari yang semula 91,70 persen pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 93,89 persen pada tahun 2022.

Data Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel di bawah ini, dengan catatan bahwa ada data yang tidak tersedia pada tahun tertentu sebab belum digunakan sebagai indikator kinerja pemerintah/perangkat daerah.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Tangga Hunian Layak*	Persen	N/A	N/A	52,28	53,14	53,37
Tingkat kualitas kawasan permukiman*	persen	61	61,25	12,79	85,63	93,45
Tingkat ketersediaan rumah layak	persen	N/A	91,70	91,90	92,33	93,89
Rasio Permukiman Layak	Rasio	0,9948	0,9952	0,9952	0,9968	0,9982

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan: *) Indikator yang digunakan pada RPJMD dan Perubahan RPJMD 2018-2023)

Persentase Rumah Tinggal Hunian Layak memiliki 4 (empat) indikator penilaian yang merupakan adaptasi Indonesia terhadap indikator SDGs pada Tujuan 11.1, yaitu menjamin akses bagi semua terhadap hunian yang layak dan aman. Empat indikator yang dimaksud adalah

sebagai berikut: 1) Ketahanan Bangunan; 2) Luas Bangunan per kapita; 3) Akses Air Minum Layak; dan 4) Akses Sanitasi Layak.

Program dan Kegiatan yang mendukung capaian indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak berupa Kegiatan Perbaikan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) di 27 kabupaten/kota, kegiatan Perbaikan Rumah Relokasi terkena Dampak Bencana, kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 9 Lokasi dan kegiatan Supervisi Pembangunan SPAM di 27 kabupaten/kota, dan kegiatan Pembinaan Teknis serta Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di 27 kabupaten/kota.

2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman. Pada tahun 2022 capaian Laju Penegakan Perda dan Perkada di sektor urusan ketentraman dan ketertiban yaitu mencapai 1 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang berada pada 6,00 persen. Selanjutnya untuk Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat tahun 2022 mencapai 87,2 persen, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 74,00 persen. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat*	Poin	83,50	70,00	68,25	98,65	29,07
Laju Penegakan Perda dan Perkada	Persen	4,5	33,87	4,05	6,00	1,00
Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat*	persen	N/A	82,50	68,25	74,00	87,2
Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat*	persen	N/A	31,63	59,19	69,44	N/A

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten*	poin	N/A	60,00	68,25	100	N/A
Indeks Ketahanan Daerah	poin	N/A	0,4	0,4	0,67	0,69
Tingkat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab/ Kota	N/A	27	27	27	27
Persentase kab/kota di Jawa Barat yang meningkat Nilai Indeks Kapasitasnya	Persen	N/A	N/A*	N/A*	63	33,3

Sumber: BPBD; Satuan Polisi Pamong Praja, 2023
Keterangan: *) indikator baru dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Urusan Ketentraman dan Ketertiban (Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara fungsi dan kewenangan tidak mengurusi kebencanaan/damkar hal kewenangan tersebut hanya ada di kabupaten/kota) tanggungjawab Satpol Provinsi hanya dalam pemberdayaan perlindungan masyarakat yang berada di lintas wilayah baik kabupaten/kota maupun provinsi dan juga tidak ada tugas dalam damkar hanya kabupaten/kota.

Pengukuran kinerja sub urusan Bencana terdiri atas 3 (tiga) indikator. Pertama, Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan indikator untuk menunjukkan tingkat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Capaian Indeks Ketahanan Bencana Provinsi Jawa Barat cenderung terus mengalami kenaikan dengan capaian terakhir pada tahun 2022 sebesar 0,70 poin. Jika dilihat dari capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Kedua, Tingkat Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan satuan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang telah mendapatkan pembinaan dari Provinsi Jawa Barat dalam hal kesiapsiagaan bencana. Tiap tahun capaian Indikator Tingkat Kesiapsiagaan terhadap Bencana cenderung stabil di capaian 27 kabupaten/kota yang menandakan Provinsi Jawa Barat selalu memberikan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi mengenai kesiapsiagaan bencana ke kabupaten/kota.

Ketiga, Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Meningkat Nilai Indeks Kapasitasnya menunjukkan tingkat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain Indeks Ketahanan Daerah tingkat provinsi terdapat pula Indeks Ketahanan Daerah tingkat kabupaten/kota yang terus didorong, difasilitasi dan dilakukan pembinaan oleh Provinsi Jawa Barat kepada kabupaten/kota dengan target kabupaten/kota harus

memiliki tingkat Indeks Ketahanan Daerah yang terus meningkat tiap tahunnya. Indikator ini merupakan indikator yang baru dipakai mulai tahun 2021.

2.3.1.6 Sosial

Kondisi di Jawa Barat saat ini masih banyak permasalahan sosial masyarakat yang harus ditangani dan diselesaikan. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat yang menjadi kewenangan urusan sosial tingkat provinsi adalah yang ada di dalam panti, sementara SPM urusan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah yang di luar panti. SPM urusan Sosial yang harus dipenuhi oleh tingkat provinsi adalah : 1) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti; 2) Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di dalam Panti; 3) Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti; 4) Tuna sosial (Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti, dan 5). Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Korban Bencana Provinsi.

Akses masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan masih belum maksimal. Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan Jaminan Sosial bagi mayarakat di Jawa Barat perlu terus ditingkatkan, oleh karena itu perlu ada sistem reformasi perlindungan sosial bagi bagi masyarakat. Kualitas dan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar dalam pemberian penyaluran bantuan sosial sampai saat ini masih banyak permasalan dan belum akurat. Oleh karena itu pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) perlu ditingkatkan di tiap desa/kelurahan di seluruh kabupaten/Kota.

Program pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah, bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan sosial kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), yang anggotanya terdiri dari para Janda Pahlawan. Bantuan KUBE dilakukan melalui bantuan berupa uang bagi kelompok masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta DTKS yang diperuntukan bagi pengembangan usaha. Melalui bantuan KUBE ini diharapkan masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha ini nantinya memiliki mata pencaharian yang tetap, sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari kemiskinan. Selain memberikan bantuan sosial,

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga mengakomodir usulan bantuan hibah kompetitif kepada kelompok masyarakat dengan tema untuk penanggulangan dan pengurangan kemiskinan di Jawa Barat.

Nomenklatur Indikator kinerja bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dari periode 2018–2022 mengalami beberapa perubahan, baik nama indikator maupun secara perhitungan, seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat. Realisasi indikator-indikator urusan Dinas Sosial tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kesejahteraan Sosial*	Persen	41,9	42,7	42,5	42,92	49,92
Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Kesos*	persen	30,5	50,82	50,27	59,67	60,94
Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani*	persen	0,43	0,54	0	1,73	1,2
Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti*	persen	112,66	136,14	136,14	110	117
Persentase Fakir Miskin yang tertangani*	persen	53,81	53,81	69,7	69,7	40
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi*	persen	100	128	149	120	100
Tingkat pengelolaan makam pahlawan*	persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

Indikator utama penyelenggaraan urusan Sosial Provinsi Jawa Barat adalah Indeks Kesejahteraan Sosial, Pencapaian dan realisasi indikator tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan

dengan upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan soaial yang terus diperbaiki, meskipun hasilnya belum sesuai yang diharapkan, karena masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat terkait masih kurangnya jaminan perlindungan sosial masyarakat. Pencapaian indikator yang tahun 2022 hanya sebesar 42,92 persen, hal ini menunjukkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Barat masih rendah. Semakin tinggi ingkat indeks kesejahteraan sosial masyarakat maka semakin baik tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.7 Tenaga Kerja

Selama periode 2018-2022 terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan yaitu jumlah angkatan kerja yang semula 22,63 juta orang pada tahun 2018 meningkat menjadi 25,58 juta orang pada tahun 2022; persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan yang semula 85,93 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2022; persentase perusahaan yang diawasi yang semula 19,20 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 20 persen pada tahun 2022.

Sementara indikator yang fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan tahun 2019 adalah tingkat kesempatan kerja. Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2019 mencapai 65,07 persen mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 64,53 persen akibat COVID-19. Kondisi mulai membaik pada tahun 2021 yang meningkat menjadi 64,95 persen dan tahun 2022 mencapai 66,15 persen. TPAK Laki-Laki di Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir selalu lebih besar dibandingkan TPAK Perempuan. Tingginya TPAK Laki-Laki di Jawa Barat menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja laki-laki yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Tingkat Pengangguran Terbuka pun menunjukkan fluktuasi, yang terlihat pada tahun 2019 sebesar 7,99 persen, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 10,46 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat pada Agustus 2021 mencapai 9,82 persen dan menurun pada tahun 2022 sebesar 8,31 persen. Data capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja Provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.56 berikut ini.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Angkatan Kerja	Juta Orang	22,63	23,80	24,21	24,74	25,58
Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,83	92,02	89,55	90,18	91,69
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	62,92	65,07	64,53	64,95	66,15
– Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki*	persen	83,09	83,38	81,9	81,68	8,55
– Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*	persen	42,37	46,45	46,79	47,88	7,89
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,17	7,99	10,46	9,82	8,31
Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Persen	54,24	35,37	33,14	36,76	51,49
Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	Persen	85,93	N/A	N/A	91,93	100
Persentase perusahaan yang diawasi	Persen	N/A	19,20	20,52	22,92	20

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 2023
* opendata.jabarprov.go.id/id

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM Jawa Barat melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak maupun pencegahan terjadinya pornografi. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami beberapa kali penyesuaian sebab periode RPJMD yang berbeda (RPJMD Tahun 2013-2018 dan RPJMD Tahun 2018-2023) dan adanya perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Untuk indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender*	Persen	N/A	N/A	N/A	88,88	92,59
Persentase Perempuan di Parlemen Provinsi	Persen	N/A	N/A	N/A	21,67	22,5
Tingkat Keberhasilan penanganan kasus kekerasan,	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan						
Tingkat keberhasilan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan*	Persen	N/A	N/A	N/A	66,67	48,15
Tingkat penanganan kasus KED terhadap anak	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Persen	70,37	85,18	85,18	77,78	74,07
Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate)	Anak	2,49	2,52	2,55	2,30	2,1
Indeks Perlindungan Anak*	NILAI	N/A	N/A	N/A	63,5	N/A

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023
Keterangan: (*) indikator baru mulai tahun 2021 Sesuai dengan Permendagri 90/2019

Pada tahun 2022, Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) sebesar 6,004 persen dan Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak) sebesar 0,73 persen. Faktor yang berpengaruh terhadap Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah pandemi yang menyebabkan kasus kekerasan meningkat, timbulnya kesadaran masyarakat untuk berani menyampaikan kasus terhadap anak ke pihak berwajib, serta dibuatnya kanal pengaduan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Dalam meminimalisasi masalah pelanggaran hak anak dan perlindungan perempuan, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan 5 (lima) arahan khusus yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak.

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender *	Persen	N/A	N/A	N/A	22,22	44,4
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) *	Persen	N/A	N/A	N/A	3,6	5,23
Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA *	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kab Kota yang Sudah Membentuk Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Di Jawa Barat *	Kab/kota	N/A	N/A	N/A	16	23
Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat *	Persen	N/A	N/A	N/A	66	74
Peningkatan Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi *	Persen	N/A	N/A	N/A	25	50
Peningkatan Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Tingkat Provinsi *	Persen	N/A	N/A	N/A	25	50
Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak) *	Rasio	N/A	N/A	N/A	0,73	0,85
Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA *	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu **	Persen	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
Persentase Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional **	Persen	N/A	85,18	N/A	N/A	N/A
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum **	Persen	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A
Cakupan Organisasi Perempuan Yang Mendapat Pembinaan **	Persen	N/A	N/A	45,00	N/A	N/A
Cakupan Ketersediaan Data Terpilah Yang Up To Date Pada 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat **	Persen	N/A	N/A	44,00	66	74
Cakupan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Ke Kabupaten Kota **	Persen	N/A	N/A	45,00	N/A	N/A
Cakupan Kelompok Pekka Yang Mendapat Program Pembinaan Program Pekka **	Persen	N/A	N/A	45,00	N/A	N/A
Cakupan Kepala Keluarga Yang Mendapat Pembinaan Program P2WKSS **	Persen	N/A	N/A	45,00	N/A	N/A
Cakupan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu **	Persen	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A
Cakupan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu **	Persen	N/A	N/A	100,00	N/A	100
Cakupan Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Berhasil Dibina **	Persen	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023
Keterangan: * indikator baru mulai tahun 2021 (Perubahan RPJMD 2018-2023)
** indikator tahun 2019 dan/atau pada RPJMD 2018-2023 yang tidak digunakan lagi di Perubahan RPJMD 2018-2023

2.3.1.9 Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat tercermin dari besaran skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan

keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan Jawa Barat. Selain hal tersebut, skor PPH juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pembangunan bidang pangan di Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan aspek ketahanan pangan yang mencakup 3 (tiga) sub sistem utama yaitu Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi. Pembangunan ketahanan pangan di Jawa Barat pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penghasil utama komoditas pangan, khususnya padi, dan menjadi penyumbang 17,23 persen di tingkat nasional.

Dalam konteks ketahanan pangan, produksi pangan utama menjadi dasar untuk penentuan kecukupan rasio konsumsi normatif penduduk terhadap kebutuhan pangan. Berdasarkan data peta ketahanan pangan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tidak mengalami defisit dalam pemenuhan karbohidrat utama, hanya terdapat beberapa wilayah yang defisit terutama pada daerah perkotaan.

Skor PPH konsumsi di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019, namun pada tahun 2021 skor PPH konsumsi menurun sejalan dengan puncaknya pandemi COVID-9 di tahun 2021. Pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang merupakan salah satu kunci dalam pencapaian skor PPH ideal. Capaian SPPH tingkat konsumsi pada tahun 2022 sebesar 87 poin. Dengan skor ini artinya pola konsumsi pangan di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan kembali.

Pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Jawa Barat masih rendah. Kelompok padi-padian terutama beras mendominasi perkembangan pola konsumsi pangan selama periode 2018–2022, sedangkan kontribusi ubi, sayur dan buah-buahan masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan pangan belum optimal. Hasil dari beberapa penelitian di 3 (tiga) zona ekologi Jabar diketahui bahwa pada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, kebijakan pangan masih terfokus pada padi, jagung

dan kedelai. Di sisi lain, masih terjadi ketimpangan konsumsi beras dan konsumsi pangan alternatif.

Skor PPH Ketersediaan di Jawa Barat pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan sebesar 0,79 poin dari 93.67 point tahun 2020 menjadi 92,88 point pada tahun 2021, namun meningkat kembali sebesar 94,02 poin pada tahun 2022. Kelompok bahan pangan dengan tingkat ketersediaan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Jawa Barat surplus yaitu padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah.

Data menunjukkan bahwa indikator Persentase Desa Rawan Pangan yang diintervensi mengalami lonjakan yang tinggi dari 2020 ke 2021 yaitu dari 2,12% menjadi 30,16%. Hal ini disebabkan adanya penyerahan cadangan pangan kepada 104 desa rentan rawan pangan. Indikator terkait ketahanan pangan adalah Konsumsi Energi. Terdapat penurunan konsumsi dari 2,199 kkal/kap/hari pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,174 kkal/kap/hari pada tahun 2021 dan meningkat menjadi sebesar 2,214 kkal/kap/hari pada tahun 2022 (WPNPG 2012). Indikator konsumsi protein yang tercapai sebesar 64,9 gr/kap/hari pada tahun 2020 menurun menjadi 64,3 gr/kap/hari pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi sebesar 64,70 gr/kap/hari pada tahun 2022 (WPNPG 2012) sejalan dengan peningkatan SPPH Ketersediaan dan Konsumsi tahun 2022. Data indikator keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi	Poin	85,2	89,0	84,8	84,1	87,0
Skor PPH Tingkat Ketersediaan	poin	88,0	90,4	93,67	92,88	94,02
Tingkat Konsumsi Pangan:						
- energi	kkal/kap/hr	2161	2165	2199	2174	2214
- protein	gr/kap/hr	63,3	62,9	64,9	64,3	64,7
Konsumsi Beras per Kapita	Kg / kapita / tahun	83,93	82,4	79,4	79,60	82,78
Persentase Cadangan Pangan	persen	N/A	N/A	N/A	42,36	52,17

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan Pangan Utama	Kg /Jiwa / tahun	152,19	149,61	110,45	100,60	111,09
Persentase Desa Rawan Pangan yang Diintervensi	persen	1,85	1,06	2,12	30,16	4,0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

2.3.1.10 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Kemajuan dari tahun ke tahun terlihat dari capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Urusan Wajib Sesuai Konkuren yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 19,59 persen menjadi sebesar 48,48 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 indikator urusan pertanahan tersebut tidak digunakan lagi dan diganti dengan indikator kinerja Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan dengan capaian sebesar 54,24 persen serta meningkat menjadi 72,88 pada tahun 2022.

Tabel 2.60
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Urusan Wajib Sesuai Konkuren	Persen	N/A	19,59	48,84	N/A	N/A
Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan	Persen	N.A	N/A	N/A	54,24	72,88

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan: N/A pada tahun 2019 dan 2020 menjelaskan indikator belum di pergunakan
N/A pada tahun 2021 menjelaskan indikator tidak ada di Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

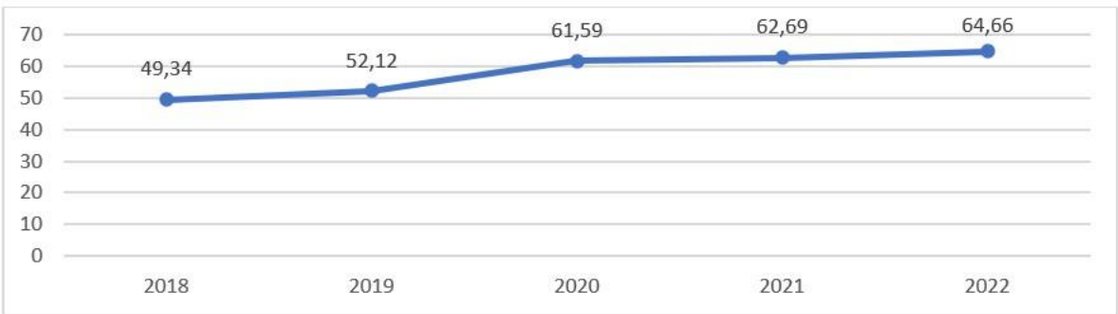
2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup direpresentasikan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Metode perhitungan IKLH sangat dinamis dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perkembangan berbagai hasil penelitian. Perhitungan IKLH terkini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan metode terbaru, IKLH provinsi terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas

Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pada metode sebelumnya, IKAL belum menjadi komponen perhitungan IKLH. Selain itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Selama periode tahun 2018-2022, IKLH Provinsi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian IKLH Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.33 dimana pada tahun 2018 sebesar 49,34, dimana nilai tersebut dihitung berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu IKA, IKU, IKAL, dan IKL. Peningkatan capaian IKLH didukung oleh meningkatnya capaian IKA dan IKL, serta masuknya IKAL dalam perhitungan IKLH.

Gambar 2.33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Kualitas air bersih menjadi sesuatu yang mempengaruhi pembangunan, melalui peningkatan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan energi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air, diantaranya penggunaan lahan, litologi, waktu, dan curah hujan. Selain itu, aktivitas manusia juga turut mempengaruhi kualitas air melalui pencemaran air sungai, baik fisik, kimia, maupun biologi. Kualitas air salah satunya dapat dinilai/digambarkan dengan Indeks Kualitas Air (IKA). IKA menggambarkan kondisi kualitas air berupa nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Semakin tinggi skor IKA menunjukkan kualitas air yang lebih baik. Secara umum, skor IKA Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2011-2021 mengalami penurunan secara fluktuatif, yaitu dari 46,27 menjadi 43,09. Skor IKA tertinggi Provinsi Jawa Barat adalah

46,27 pada tahun 2011 dan terendah mencapai 39 pada tahun 2014. Skor IKA relatif naik dari tahun 2014 hingga tahun 2021 (kecuali tahun 2018). Namun demikian, skor IKA tersebut masih tergolong dalam kategori "waspada". Pemantauan kualitas air dilakukan pada 11 (sebelas) sungai, terdiri dari 4 (empat) sungai utama kewenangan Pemerintah Pusat dan 7 (tujuh) sungai kewenangan provinsi dengan parameter yang diukur meliputi 11 (sebelas) parameter. Peningkatan capaian IKA terutama didukung oleh berbagai upaya penanganan DAS Prioritas, diantaranya pengendalian dan pencemaran DAS Citarum yang dilaksanakan secara pentahelix melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Permasalahan kualitas air di Provinsi Jawa Barat ditandai dengan banyaknya sungai yang tercemar berat, salah satunya Sungai Citarum, akibat belum terkendalinya pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan (Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, 2022). Selain melalui IKA, kualitas air juga dapat dimodelkan dari Potensi Beban Pencemar (PBP) pada air sungai. PBP pada air sungai dapat dilihat dari kadar jumlah zat pencemar: *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Total Suspende Solid* (TSS). PBP untuk setiap zat pencemar merupakan akumulasi dari pencemaran yang bersumber dari kegiatan domestik, pertanian, maupun penggunaan lahan. PBP yang bersumber dari domestik dipengaruhi oleh pola distribusi penduduk dan jaraknya terhadap sungai, beserta beberapa faktor lain seperti rasio ekuivalen kota dan faktor emisi masing-masing zat pencemar. PBP dari kegiatan pertanian dan penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan dan faktor emisi masing-masing zat pencemar.

Indeks Kualitas Air Laut pada tahun 2022 mencapai 87,83 poin, meningkat dari capaian tahun 2021 sebesar 87,42 poin. Pemantauan kualitas air laut dilakukan di 2 (dua) titik pantau yang mewakili pantai utara dan pantai selatan Jawa Barat, dengan parameter yang diukur meliputi padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), ammonia total (NH3-N), orto fosfat (PO4-P), serta minyak dan lemak. Jumlah titik lokasi pemantauan air laut perlu ditingkatkan agar lebih representatif menggambarkan kualitas air laut di Jawa Barat, meliputi muara sungai utama, lokasi yang berpotensi terdampak kegiatan daratan atau lautan, serta ekosistem penting seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuari, dan ekosistem lainnya. Sama seperti IKA, sumber pencemar yang dapat mempengaruhi nilai dari IKAL

adalah limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah pertambangan.

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutukan serta berpengaruh pada kesehatan makhluk hidup, sementara baku mutu udara ambien merupakan ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau shearusnya ada dan/atau unsur pencemar yang keberadaannya ditoleransi dalam udara ambien tersebut (PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemar Udara) (Presiden Republik Indonesia, 1999). Apabila udara tersebut melebihi baku mutu, maka lingkungan sekitarnya dapat rusak dan memiliki potensi mengganggu kesehatan. Penetapan baku mutu udara ambien nasional dilakukan untuk mencegah pencemaran udara, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien. Indeks kualitas udara (IKU) merupakan ukuran/indeks yang digunakan untuk menilai pencemaran udara serta kualitas udara ambien. Nilai IKU dapat menggambarkan kondisi dan perubahan kualitas udara di suatu daerah serta dapat menjadi nilai dasar yang menjadi sumber informasi untuk perencanaan terkait udara bersih.

Indeks Kualitas Udara pada tahun 2022 mencapai 80,31 poin, mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 79,34 poin. Pemantauan kualitas udara dilakukan di 27 kabupaten/kota dengan parameter yang diuji meliputi sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2). Pemantauan dilakukan pada 4 (empat) titik yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, permukiman padat penduduk, dan kawasan perkantoran. Adapun capaian untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) diuraikan lebih lanjut pada bagian Urusan Kehutanan dan menjadi indikator Dinas Kehutanan.

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup direpresentasikan melalui indikator Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2022, Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat mencapai 5,83 persen, meningkat dari capaian tahun 2021 sebesar 4,23 persen, yang diperoleh dari upaya penurunan emisi pada 5 (lima) sektor, yaitu kehutanan, pertanian, energi, transportasi dan limbah domestik (sampah dan air limbah domestik). Tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor limbah domestik khususnya, mencapai 3,55 persen pada tahun 2022, meningkat dari capaian tahun 2021 sebesar 0,81 persen. Upaya penurunan emisi pada sektor limbah masih terkendala TPPAS

Regional Lulut Nambo dan TPPAS Legoknangka yang belum beroperasi, serta operasional komposting di TPK Sarimukti, operasional TPA Kabupaten/Kota, bank sampah, dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang belum optimal dalam pengelolaan metan.

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	49,54 (metode baru)	52,12	61,59	62,69	64,66
Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	39.87	42,73	42,84	43,09	47,13
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	N/A	N/A	74,17	87,42	87,83
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	72.73	79,4	79,58	79,34	80,31
Indeks Kualits Tutupan Lahan (IKTL)*	Poin	38,89	38,7	42,48	40,78	41,88
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	12,91	3,85	3,87	4,23	5,83
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	0,70	0,78	0,8	0,81	3,55

Sumber: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, 2023
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2022
Keterangan: N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

Berkaitan dengan capaian tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca atau pembangunan rendah karbon, Provinsi Jawa Barat telah tepat waktu melaporkan, baik pada tahap perencanaan maupun pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pada setiap tahunnya melalui Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA). AKSARA merupakan wadah/*platform* yang dikembangkan oleh BAPPENAS untuk mendokumentasikan aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang transparan akurat, lengkap, konsisten, dan terintegrasi.

Capaian Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2022 yang terlaporkan dan tervalidasi pada AKSARA mencakup 3.596 total kegiatan aksi yang telah dilaksanakan, dengan total potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 22,8 juta ton CO2eq, dan intensitas emisi sebesar 3,2 ton CO2eq/milyar rupiah, terlihat terlihat pada Gambar 2.34.

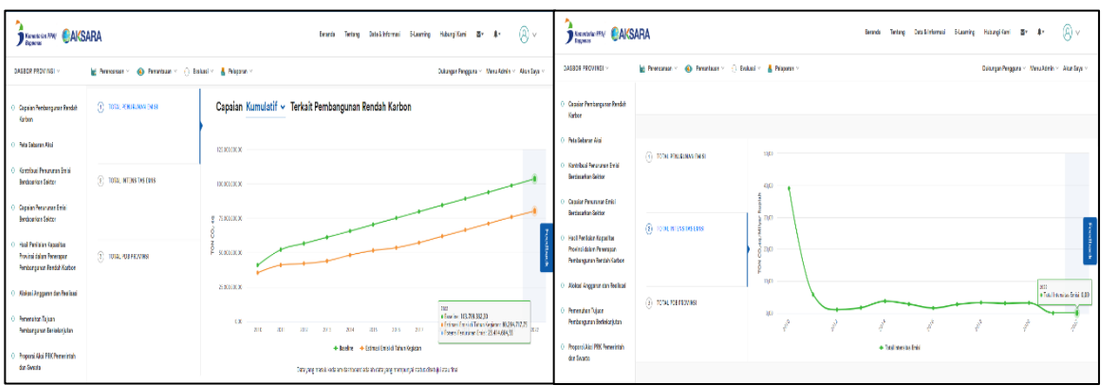
Gambar 2.34
Capaian Pembangunan Rendah Karbon
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022



Sumber: pprk.bappenas.go.id/aksara/

Adapun tren Capaian Total Penurunan Emisi dan Total Intensitas Emisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021 tersaji pada Gambar 2.35.

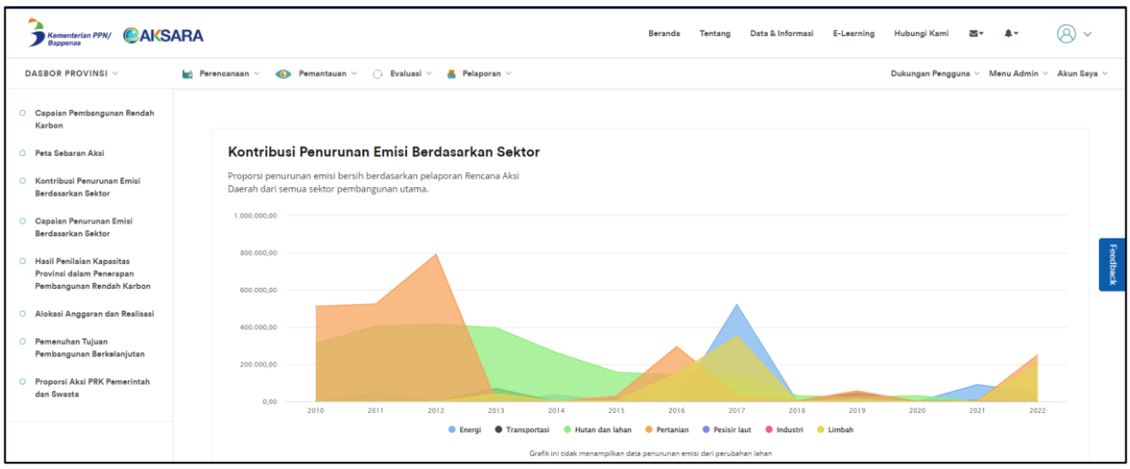
Gambar 2.35
Capaian Total Penurunan Emisi dan Total Intensitas Emisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022



(Sumber: pprk.bappenas.go.id/aksara/)

Tingkat keterlaporan pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat tergambarkan melalui Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021, meliputi sektor energi (91.466 juta ton CO2 eq), transportasi, hutan dan lahan (221.062 ton CO2eq), pertanian (3.041 juta ton CO2eq), limbah (air limbah domestik dan persampahan) (31.071 ton CO2eq), dan pesisir dan laut (baru mencakup kegiatan pendukung), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.36.

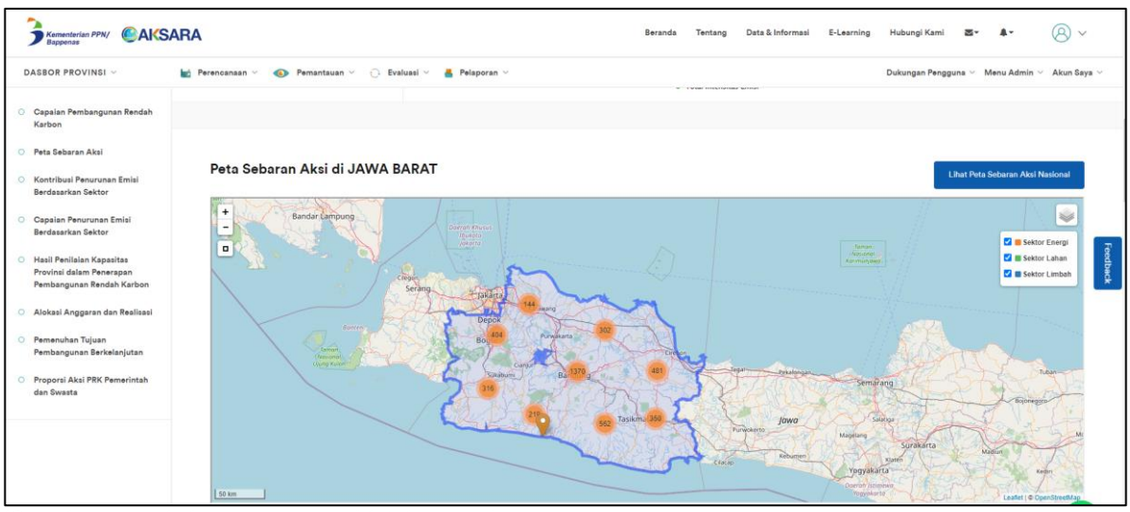
Gambar 2.36
Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022



Sumber: pprk.bappenas.go.id/aksara/

Adapun Peta Sebaran Aksi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022 pada sektor berbasis energi, lahan dan limbah, disajikan pada Gambar 2.37.

Gambar 2.37
Peta Sebaran Aksi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022



(Sumber: pprk.bappenas.go.id/aksara/)

2.3.1.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Terdapat beberapa indikator yang digunakan

dalam menilai kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Pertama adalah Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, indikator ini merupakan indikator yang capainannya dihitung oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berdasarkan 9 (sembilan) variabel yaitu Perekaman KTP Elektronik, Perekemanan Akta Kelahiran untuk usian 0-18 tahun, Fasilitasi Pelaksanaan Penerbitan kartu Indentitas Anak (KIA), Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk Pelayanan, Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021, Laporan Keluaran/*Output* Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya, Inovasi Fasilitasi Pelayanan Bidang Adminisrasi Kependudukan, Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Ketaatan terhadap regulasi. Capaian indikator tersebut cenderung baik dan mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Indikatr kedua yaitu Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari jumlah capaian perekaman *e*-KTP dan juga kepemilikan akta kelahiran. Secara umum wewenang untuk melakukan perekaman KTP elektronik dan akta kelahiran ada pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga data capaian ini indikator ini didapatkan dari akumulasi capaian perekaman kabupaten/kota, untuk meningkatkan capaian perekaman pemerintah provinsi memberikan pembinaan dan fasilitasi terkait blangko KTP elektronik dari pusat, capaian perekaman KTP Elektronik sempat mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Indikator ketiga adalah Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagi. Indikator ini merupakan persentase jumlah dokumen yang diterbitkan diantaranya Buku Agregat Semester I dan II Tahun 2022 serta Buku Profil tahun 2022, yang sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat*	persen	N/A	82,50	82,22	84,81	83,53
Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	N/A	91,48	82,22	83,92	4,31
Akurasi Data Kependuudkan	Persen	96,83	80,53	81,37	83,57	84,94

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Persen	N/A	N/A	N/A	90,45	95,11
Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagi	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2023

2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Persentase Desa Mandiri dari tahun 2020 sebesar 5,08 persen meningkat menjadi 1103 persen pada tahun 2021 dan 21,27 pada tahun 2022. Untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan indikator yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Desa Mandiri	persen	0,70	1,84	5,08	11,03	21,27
Persentase Desa Maju	Persen	13,08	23,19	30,70	39,5	47,27
Persentase Desa Berkembang	persen	67,86	68,82	61,93	49,06	31,46
Persentase Desa Tertinggal	persen	17,49	6,14	2,28	0,33	0,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 1,41 persen. Pada tahun 2021, pengukuran kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami perubahan indikator sehingga tidak dapat dinyatakan pada tahun 2019 dan 2020. Perubahan indikator ini menyesuaikan dengan kesepakatan dengan Pemerintah Pusat. Indikator tersebut adalah Persentase Peserta KB Aktif/mCPR, Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota, dan Persentase Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Jawa Barat di Kabupaten/Kota.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Peserta KB Aktif/mCPR*	Persen	N/A	N/A	N/A	58,9	62,96
Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota*	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Jawa Barat di Kabupaten/Kota*	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,34	1,30	1,26	1,54	1,42
Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera **	Keluarga	N/A	1.157.346	N/A	N/A	N/A
Cakupan Peserta KB Aktif **	Persen	6.245.099	56,97	N/A	N/A	N/A
Cakupan KB Pria **	Persen	N/A	2,46	N/A	N/A	N/A
Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun **	Persen	N/A	59,52	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2023
Keterangan: (*) indikator baru mulai tahun 2021 Sesuai dengan Permendagri 90/2019
(**) indikator lama tahun 2019

2.3.1.15 Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu urusan konkuren yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi bidang perhubungan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi sub

urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan, sub urusan Pelayaran dan sub urusan Perkeretaapian.

Seiring dengan perkembangan regulasi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub urusan Penerbangan yang diwadahi dalam bentuk Bidang harus dihapus. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Beberapa perubahan pada urusan pemerintah daerah, salah satunya pada urusan Penerbangan yang tidak lagi menjadi urusan provinsi, sehingga dalam perencanaan ke depan perlu ditindaklanjuti dari segi arah kebijakan hingga penentuan kinerja urusan Perhubungan di Provinsi Jawa Barat. Kinerja penyelenggaraan Perhubungan Darat dapat dilihat dari indikator Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi dan Persentase Terminal Tipe B yang Dibangun; Kinerja Perhubungan Laut dan ASDP dari Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Dukungan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP; serta Bidang Perkeretaapian dapat terlihat dari tingkat Ketersediaan Jaringan Transportasi Massal Berbasis Rel.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018-2022 mengalami beberapa kali perubahan sehingga indikator pada Bidang Perhubungan berbeda pada setiap tahunnya, ada indikator yang berakhir pada tahun 2019 tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja pada bidang perhubungan tahun 2022, serta beberapa indikator yang digunakan mulai pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Presentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	persen	28,67	33,85	34,04	35,83	38,04

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Presentase Terminal Tipe B yang dibangun*	Persen	N/A	N/A	N/A	1,04	31,91
Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Dukungan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	Persen	32,03	36,16	38,35	43,33	86,98
Tingkat Ketersediaan Jaringan Transportasi Massal Berbasis Rel	Persen	3,00	20,40	30,51	34,15	77,10

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

Keterangan: N/A pada tahun 2018-2021 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

Berdasarkan tabel di atas untuk presentase fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 yaitu dari 28,67 persen di tahun 2018 menjadi 38,04 persen, sehingga tingkat Ketercapaiannya sebesar 100,11 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa untuk perlengkapan jalan secara target di tahun 2022 sudah terpenuhi dalam rangka menjamin kinerja lalu lintas yang berkeselamatan, mengurangi risiko kecelakaan dan mengurai kemacetan jalan di ruas Provinsi Jawa Barat.

Untuk presentase terminal tipe B yang dibagun di tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 31,91 persen, hal tersebut dikarenakan di tahun 2022 terealisasinya pembangunan terminal tipe B Ciledug di Kabupaten Cirebon dan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan terminal tipe B Cikarang. Beberapa capaan indikator lainnya juga turut mengalami peningkatan yaitu tingkat ketersediaa trasnportasi massal berbasis rel dari 34,15 persen pada tahun 2021 menjadi 77,10 persen pada tahun 2022 dan tingkat ketersediaan prasarana dan dukungan fasilitas keselamatan perhubugan laut dan ASDP dari 43,33 persen menjadi 86,98 persen pada tahun 2022. Hal tersebut di karenakan adanya kolaborasi pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat.

2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik merupakan bentuk komitmen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal

pengelolaan dan akses informasi. Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri dilaksanakan sejak tahun 2010 melalui Keputusan Gubernur Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dimiliki. Beberapa kanal yang digunakan yaitu *website* (dengan situs www.jabarprov.go.id, www.humas.jabarprov.go.id, www.ppid.jabarprov.go.id, dan *website* masing-masing Perangkat Daerah), media sosial (www.instagram.com/humas_jabar, www.twitter.com/humasjabar, www.twitter.com/ppidprovjabar), dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah, majalah (Majalah Gedung Sate, Warta Bappeda, Info SDA, dan lain sebagainya), media luar ruang hingga distribusi informasi/berita *(press release)* kepada media massa.

Dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, terdapat indikator kinerja urusan yang mengalami peningkatan yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mana realisasi pada tahun 2020 sebesar 3,58 poin menjadi 3,28 poin pada tahun 2021. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan capaian pada evaluasi SPBE untuk tahun 2021 menggunakan instrument penilaian baru yang menambahkan 22 indikator baru ke dalam 4 (empat) domain dan 8 (delapan) aspek. Selain itu, indikator urusan yang mengalami penurunan adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang mana realisasi pada tahun 2020 mencapai 98,15 persen dan pada tahun 2021 menurun menjadi 88 persen. Meski demikian, pada tahun 2022 Jawa Barat berhasil menaikkan angka Indeks Keterbukaan Informasi Publik menjadi 98,95 persen yang sekaligus menempatkan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Informatif ke-2 di Indonesia. Secara keseluruhan indikator lainnya mengalami kenaikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,9	3,12	3,58	3,28	3,37
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	90,32	90,40	98,15	88	98,95
Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui	Persen	N/A	N/A	N/A	91	N/A

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi*						
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo*	Persen	N/A	100	100	100	100
Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan*	Persen	N/A	N/A	N/A	36	66,67
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi*	Persen	N/A	N/A	N/A	84	85,71

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023
Keterangan: (*)Indikator Baru di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selama periode Tahun 2018-2022 memperlihatkan tren positif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil berjalan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit dari semula pada tahun 2021 sebesar 27,27 persen menjadi 31,33 persen pada tahun 2022. Persentase UMKM yang naik kelas meningkat dari semula 6,9 persen pada tahun 2021, menjadi 8,38 persen pada tahun 2022 dan Tingkat Koperasi yang berkualitas yang pada tahun 2021 berada pada angka 27,52 persen meningkat menjadi 36,98 persen pada tahun 2022.

Indikator kinerja pada bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada periode 2018-2022 mengalami beberapa perubahan menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan di setiap tahunnya. Terdapat indikator yang dilaksanakan pada tahun 2019 serta indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2020. Secara lebih lengkap untuk indikator yang lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi yang mengakses kredit*	Persen	N/A	N/A	27,97	27,27	31,33
Persentase UMKM yang Naik Kelas	Persen	N/A	18,00	5,3	6,90	8,38
Persentase Koperasi Aktif	Persen	43,19	46,82	58,90	64,18	49,62
Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	11.021	12.631	14.657	15.654	14.672
Tingkat Koperasi yang Berkualitas	Persen	N/A	29,84	27,97	27,52	36,98
Persentase Wirausaha Menjadi Usaha Mikro	Persen	N/A	N/A	N/A	44,92	76,82

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat kepatuhan koperasi	Persen	N/A	N/A	15,17	77,52	28,02
Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	N/A	N/A	-6,24	11	6,75
Laju pertumbuhan omzet UMKM binaan	Persen	N/A	N/A	8,25	50	11,22
Persentase Kelembagaan Usaha UMKM	Persen	N/A	N/A	30	75,9	77,8

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan: N/A: indikator yang mulai digunakan tahun 2021 di Perubahan RPJMD 2018-2023

2.3.1.18 Penanaman Modal

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peran investasi dalam Pemulihan Ekonomi setelah pasca pandemi antara lain yaitu:

1. Penyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran;
2. Meningkatkan produktivitas melalui transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan SDM dan daya saing;
3. Meningkatkan kinerja ekspor; dan
4. Memberikan *multiplier effect* terhadap ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dampak dari strategi promosi investasi melalui Program Kegiatan di Dinas PMPTSP yang terintegrasi pada Program Investasi Juara.

Kinerja investasi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2019 akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 dan 2022 investasi mengalami pertumbuhan karena mobilitas masyarakat yang mulai meningkat kembali. Realisasi PMA dan PMDN Jawa Barat meningkat pada tahun 2022 sebesar 28,25 persen apabila dibandingkan dengan realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2021 dan menjadi peringkat pertama realisasi investasi Nasional pada tahun 2022.

Peningkatan ini dipicu oleh realisasi PMA sebesar Rp93,77 triliun (meningkat 20,09 persen) dan realisasi PMDN sebesar Rp80,81 triliun (meningkat 34,80 persen) pada tahun 2022. Peningkatan nilai realisasi terutama kenaikan PMA, merupakan dampak dari gencarnya promosi

investasi, selain itu juga faktor letak geografis, infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, SDM Jawa Barat lebih unggul, serta banyaknya kawasan industri. Lebih lanjut, peningkatan realisasi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan kualitas pelayanan perizinan investasi dirasakan semakin baik sehingga mendorong minat investasi semakin besar.

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Total Investasi	Rp. Triliun	162,8	137,5	120,43	136,13	174,58
a. PMA	Rp. Triiun	74,69	88,21	69,03	76,18	93,77
b. PMDN	Rp. Triiun	88,19	49,28	51,40	59,95	80,81
Jumlah Total Proyek	Buah	39.749	15.370	20.020	31.804	36.490
a. PMA	Buah	7.893	10.455	11.031	12.614	12.419
b. PMDN	Buah	31.865	4.915	8.989	19.180	24.071
Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	242.151	130.704	113.426	109.331	183.383
a. PMA	Orang	70.709	94.644	85.928	72.554	107.819
b. PMDN	Orang	171.442	36.06	27.498	36.777	75.564
Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perikinan)	Poin	79,56	81,62	85,36	85,84	90,84
Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	Persen	N/A	N/A	N/A	10	10
Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Persen	N/A	N/A	N/A	73,58	75
Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya	Persen	N/A	N/A	N/A	40,77	51,00
Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	N/A	N/A	N/A	81	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 2023

Selain data yang disajikan pada tabel di atas, PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya dapat diurutkan berdasarkan besaran realisasinya. Terlihat bahwa berdasarkan lokasi, nilai PMDN di Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di posisi 1 atau 2. Sementara untuk PMA, Provinsi Jawa Barat sejak tahn 2018

sampai dengan 2021 selalu berada pada posisi pertama, dan tahun 2022 pada posisi kedua.

Tabel 2.69
Tren Lokasi PMDN Tahun 2018-2022

No	2018	2019	2020	2021	2022
1	DKI Jakarta Rp 49,1 T (14,9%)	DKI Jakarta Rp 62,1 T (16,0%)	Jawa Timur Rp 55,7 T (13,5%)	Jawa Barat Rp 59,9 T (26,2%)	DKI Jakarta Rp 89,2 T (16,1%)
2	Jawa Barat Rp 42,3T (12,9%)	Jawa Barat Rp 49,3 T (12,8%)	Jawa Barat Rp 51,4 T (12,4%)	DKI Jakarta Rp 54,7 T (23,9%)	Jawa Barat Rp 80,8 T (14,6%)
3	Jawa Timur Rp 33,3 T (10,1%)	Jawa Timur Rp 45,5 T (11,8%)	DKI Jakarta Rp 43,0 T (10,4 %)	Jawa Timur Rp 52,6 T (23,0%)	Jawa Timur Rp 65,4 T (11,8%)
4	Jawa Tengah Rp 27,5 T (8,4%)	Riau Rp 26,3 T (6,8%)	Riau Rp 34,1 T (8,3%)	Jawa Tengah Rp 31,3 T (13,7%)	Riau Rp 43,1 T (7,8%)
5	Kalimantan Timur Rp 25,9 T (7,9%)	Kalimantan Timur Rp 22,0 T (5,7%)	Banten Rp 31,1 T (7,5%)	Kalimantan Timur Rp 30,3 T (13,2%)	Kalimantan Timur Rp 39,6 T (7,2%)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2023

Tabel 2.70
Tren Lokasi PMA Tahun 2018-2022

No	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jawa Barat US$ 5,6 M (19,1%)	Jawa Barat US$ 5,9 M (20,8%)	Jawa Barat US$ 4,8 M (16,7%)	Jawa Barat US$ 5,2 M (32,1%)	Sulawesi Tengah US$ 7,5 M (16,4%)
2	DKI Jakarta US$ 4,9 M (16,7%)	DKI Jakarta US$ 4,1 M (14,6%)	DKI Jakarta US$ 3,6 M (12,6%)	DKI Jakarta US$ 3,3 M (20,5%)	Jawa Barat US$ 6,5M (14,3%)
3	Banten US$ 2,8 M (9,6%)	Jawa Tengah US$ 2,7 M (9,7%)	Maluku Utara US$ 2,4 M (8,4%)	Maluku Utara US$ 2,8 M (17,3%)	Maluku Utara US$ 4,5 M (9,8%)
4	Jawa Tengah US$ 2,4 M (8,2%)	Banten US$ 1,9 M (6,6%)	Banten US$ 2,1 M (7,5%)	Sulawesi Tengah US$ 2,7 M (16,7%)	DKI Jakarta US$ 3,7 M (8,2%)
5	Jawa Timur US$ 1,3 M (4,4%)	Sulawesi Tengah US$ 1,8 M (6,4%)	Sulawesi Tengah US$ 1,8 M (6,2%)	Banten US$ 2,2 M (13,5%)	Banten US$ 3,4 M (7,5%)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2023

Tabel 2.71
Tren Lokasi PMDN dan PMA Tahun 2018-2022

No	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jawa Barat Rp 116,9 T (16,2%)	Jawa Barat Rp 137,5 T (17,0%)	Jawa Barat Rp 120,4 T (14,6	Jawa Barat Rp 136,1T (15,1%)	Jawa Barat Rp 174,6 T (14,5%)

No	2018	2019	2020	2021	2022
2	DKI Jakarta Rp 114,2 T (15,8%)	DKI Jakarta Rp 123,9 T (15,3%)	DKI Jakarta Rp 95,0 T (11,5%)	DKI Jakarta Rp 103,3T (11,5%)	DKI Jakarta Rp 143,0 T (11,8%)
3	Jawa Tengah Rp 59,3 T (8,2%)	Jawa Tengah Rp 59,5 T (7,4%)	Jawa Timur Rp 78,3 T (9,5%)	Jawa Timur Rp 79,6 T (8,8%)	Sulawesi Tengah Rp 111,2 T (9,2%)
4	Banten Rp 56,5 T (7,8%)	Jawa Timur Rp 58,5 T (7,2%)	Banten Rp 62,0 T (7,5%)	Banten Rp 58,0 T (6,4%)	Jawa Timur Rp 110,3 T (9,1%)
5	Jawa Timur Rp 51,2 T (7,1%)	Banten Rp 48,7 T (6,0%)	Jawa Tengah Rp 50,2 T (6,1%)	Riau Rp 53,1 T (5,9%)	Riau Rp 82,5 T (6,8%)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2023

Indikator lain yang menggambarkan kinerja bidang penanaman modal yakni Realisasi Investasi terhadap serapan Tenaga Kerja. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serapan tenaga kerja pada tahun 2022 merupakan paling tinggi yaitu 183.383 orang dengan realisasi investasi sebesar 174,58 T, hal ini mengambarkan setiap 1 Triliun realisasi investasi menyerap tenaga kerja 1.050 orang. Pada tahun 2022 realisasi investasi sudah melampaui tahun 2018 (sebelum pandemi COVID-19), akan tetapi untuk penyerapan tenaga kerjanya turun 2 persen. Kondisi ini merupakan sinyal ada ketidaksesuaian di lapangan antara tenaga kerja yang dibutuhkan dengan tenaga kerja yang tersedia, sebab investasinya merupakan padat modal dan pada teknologi.

Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2021, terdapat 3 (tiga) sector usaha penyumbang realisasi investasi terbesar adalah Sektor Industri Kimia Farmasi, Sektor Industri Logam, Mesin & Elektronik, dan Sektor perdagangan & Reparasi. Namun sektor tersebut tidak termasuk kedalam sektor usaha dengan rasio penyerapan tenaga kerja tinggi. Penyerapan tenaga kerja tinggi 3 (tiga) sektor teratas yaitu sektor Industri Kayu, Sektor Tanaman Pangan & Perkebunan, dan Sektor Industri Tekstil. Dari data tersebut seperti yang tercantum pada tabel di bawah, mengambarkan bahwa sektor usaha yang penyerapan tenaga kerja tertinggi malah secara realisasi investasinya rendah. Sedangkan yang realisasi investasi tinggi, maka tenaga kerjanya harus yang mempunyai kompetensi tertentu.

Ada perubahan yang signifikan setelah pandemi COVID-19 berdasarkan data realisasi investasi tahun 2022, terdapat 3 (tiga) usaha sektor penyumbang realisasi investasi terbesar adalah Sektor Industri Tekstil, Sektor Perdagangan & Reparasi, dan Sektor Industri Karet & Plastik. Sektor Industri

Tekstil berbadingan lurus antara tinggi realisasi investasi dengan penyeran tenaga kerja namun untuk Penyerapan Tenaga Kerja per Rp.1 T yang paling tinggi, sedangkan Sektor Perdagangan & Reparasi, dan Sektor Industri Karet & Plastik tidak termasuk kedalam sektor usaha dengan rasio penyerapan tenaga kerja tinggi. Sektor Kehutanan adalah realisasi investasi paling rendah diantara 10 sektor usaha.

Data capaian yang dijelaskan di atas dapat di lihat pada Tabel 2.72 dan Tabel 2.73 sebagai berikut.

Tabel 2.72
Realisasi Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Investasi (Triliun)	116,96	137,50	120,43	136,13	174,58
Tenaga Kerja	125.187	130.704	113.426	109.331	183.383
Penyerapan TK per 1 Triliun (Rp)	1.070	951	942	803	1.050

Sumber: DPMPTSP, diolah, 2023

Tabel 2.73
Sektor Usaha Dengan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2021

No	Sektor Usaha	Realisasi Investasi (Rp.T)	Tenaga Kerja (orang)	Penyerapan TK per Rp.1T (orang)
1	Industri Kimia & Farmasi	5,630	6.352	1.128
2	Industri Logam, Mesin & elektronik	3,000	10.115	3.372
3	Perdagangan & Reparasi	2,790	6.321	2.266
4	Industri Lainnya	1,620	5.504	3.398
5	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	1,570	17.864	11.378
6	Industri Tekstil	1,280	18.469	14.429
7	Tanaman Pangan & Perkebunan	0,088	1.717	19.511
8	Pertambangan	0,050	265	5.300
9	Perikanan	0,003	9	3.000
10	Industri Kayu	0,002	423	211.500

Sumber: DPMPTSP, diolah, 2022

Tabel 2.74
Sektor Usaha Dengan Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2022

No	Sektor Usaha	Realisasi Investasi (Rp.T)	Tenaga Kerja (orang)	Penyerapan TK per Rp.1T (orang)
1	Industri Tekstil	5,5245	51.671	9.353
2	Perdagangan & Reparasi	4,0269	10.821	2.687
3	Industri Karet & Plastik	3,0213	7.769	2.571
4	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	2,7571	19.209	6.967
5	Industri Lainnya	2,3609	6.535	2.768
6	Pertambangan	0,5950	1.973	3.316
7	Industri Kayu	0,0535	254	4.747
8	Tanaman Pangan & Perkebunan	0,0414	145	3.506
9	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, & Jam	0,0025	20	8.054
10	Kehutanan	0,0006	8	12.916

Sumber: DPMPTSP, diolah, 2023

Pencapaian nilai realiasai investasi dan IKM didukung dengan 4 (empat) indikator kinerja Program Dinas PMPTSP, yaitu:

1. Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi

   Jumlah pelaku usaha diperoleh dengan Nomor Induk Berusaha dapat dipersentasekan yang sudah memperoleh informasi. Faktor pendorong yaitu kegiatan formalisasi NIB, sosialisasi untuk memperoleh NIB untuk pelaku usaha di Jawa Barat, gencarnya promosi investasi melalui Program Kegiatan di Dinas PMPTSP, (648.629 pelaku usaha)
2. Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu

   Realisasi Tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur sub kegiatan Permendagri 90 tahun 2019. Faktor pendorong yaitu adanya fitur penandatangan secara elektronik (TTE), proses pelayanan perizinan secara elektronik, adanya UU Cipta kerja di aplikasi OSS mengamanatkan fiktif positif sehingga proses perijinan bila sudah melebihi proses perizinan akan dapat secara otomatis diizinkan. Nilai ini masih 71,49 persen karena baru dimulai pada Agustus 2021. Implementasi fiktif positif (izin terbit secara otomatis apabila melebihi durasi) ini baru dilaksanakan pada Mei 2022. (5.340 naskah izin)

3. Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya:

   Realisasi Tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur sub kegiatan Permendagri 90 tahun 2019 (sebelumnya Peningkatan Laju Realisasi Proyek Penanaman Modal). (8.717 perusahaan) Faktor pendukung yaitu program Gedoran (gerakan dorong realisasi dalam negeri) masuk kedalam pemantauan dan pengawasan, dikhususkan untuk PMDN dalam melaporkan LKPMnya secara berkala; *helpdesk* pengisian LKPM melalui LKPM *online* permasalahan dibagi menjadi kategori bila OSS (diarahkan langsung ke OSS melalui *email*) dan bantuan informasi akan ditangani langsung ke dinas, bantuan berbentuk sosialisasi dan pembinaan pengisian LKPM. Selain itu terdapat faktor penghambat yaitu kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, menyebabkan terjadinya *refocusing* anggaran, sehingga kegiatan pembinaan pelaku usaha yang melaporkan realisasi investasi melalui LKPM tidak maksimal.
4. Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal

   Realisasi Tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur sub kegiatan Permendagri 90 tahun 2019. Nama indikator tahun 2020 adalah persentase data dan informasi yang valid. (Data yang dimanfaatkan sebanyak 9 data set, data yang dikelola sebanyak 11 data set). Faktor pendorong yaitu kanal teknologi informasi berupa media komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan data dan informasi dinas melalui *website*, kontak center (WA), aplikasi perizinan jelita dimana sudah ada rekapan data sehingga bisa diunduh secara mandiri, adanya media komunikasi dengan dinas PMTPSP kabupaten/kota dalam rangka mengumpulkan dan melaporkan data secara elektronik, portal satu data jabar.

2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di 5 (lima) domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat kembali mengalami penurunan dari angka 48,83 menjadi 47,00 pada tahun 2021. Penurunan IPP pada tahun 2021 disebabkan oleh

masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka pemuda di Jawa Barat yakni sebesar 20,79 persen, terjadi peningkatan angka kesakitan pemuda sebesar 2,22 persen, dan penurunan pada semua indikator dari domain Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda terdiri dari 3 (tiga) indikator yang dihitung melalui Survey MSBP setiap 3 (tiga) tahun sekali. Pada tahun 2021 dilakukan penghitungan untuk ketiga indikator dengan hasil sebagai berikut:

1. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir pada tahun 2020 sebesar 80,06 persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 68,92 persen;
2. Persentase pemuda yang aktif terdaftar organisasi dalam setahun terakhir pada tahun 2020 adalah sebesar 4,75 persen yang menurun pada tahun 2021 menjadi 3,69 persen; dan
3. Persentase pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat pada tahun 2020 sebesar 5,72 persen juga mengalami penurunan menjadi 5,49 persen pada tahun 2021.

Selain indikator IPP sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat indikator lain yang dapat menggambarkan kinerja bidang kepemudaan yaitu jumlah pemuda yang berwirausaha. Jumlah pemuda yang berwirausaha pada tahun 2019 adalah 1.082.664 orang, meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.167.169 orang. Namun jumlah pemuda yang berwirausaha mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2.150.209 orang dikarenakan pandemi COVID-19 menyebabkan wirausaha muda sulit berkembang terutama pada segi pemasaran dan modal. Pada tahun 2022 jumlah wirausaha muda kembali mengalami peningkatan menjadi 2.345.673 orang.

Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49,00	50,00	48,83	47,00	48,00*
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda*	poin	46,70	45,33	46,7	36,67	36,67
Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	persen	50,00	52	47,40	49,7	61,02
Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	Orang	302	342	115	634	285

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha	Orang	2.460	1.082.664	2.167.169	2.150.209	2.345.673

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023
*) Hasil *exercise* Kemenpora

Selain capaian kinerja bidang Kepemudaan, pada tabel di atas juga menyajikan kinerja bidang Olah Raga. Pada tahun 2020 capaian indikator jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional sempat mengalami penurunan sebab pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah pada tahun 2020 memiliki cabang olahraga yang lebih sedikit daripada Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang diselenggarakan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional meningkat menjadi 634 orang. Sama halnya dengan tahun 2019, jumlah atlet berprestasi menurun menjadi 285 pada tahun 2022.

2.3.1.20 Kebudayaan

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat diketahui bahwa indikator persentase objek pemajuan kebudayaan Jawa Barat yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi. Persentase objek pemajuan kebudayaan Jawa Barat pada tahun 2019 mencapai 58,21 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 17,86 persen. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan interakhir dan pergerakan orang. Namun capaian indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 24,78 persen dan kembali meningkat pada tahun berikutnya menjadi 29,73 persen. Selain itu, terdapat juga indikator Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan capaian sebesar 30 obyek pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 44 obyek mulai tahun 2020 sampai 2022.

Tabel 2.76
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat yang dilindungi,	Persen	N/A	58,21	17,86	24,78	29,73

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan						
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	N/A	30	44	44	44

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

2.3.1.21 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Capaian indikator urusan pemerintahan daerah bidang statistik secara umum terus bertahan 100 persen, sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah*	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah*	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100
Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah*	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023
Keterangan: (*) Indikator Baru di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
(**) Indikator sudah tidak digunakan di tahun 2021.

2.3.1.22 Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini

merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting.

Seluruh indikator urusan persandian dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan. Hal ini didorong dengan adanya percepatan di beberapa indikator Indeks Keamanan Informasi, diantaranya dengan pembentukan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT).

Tabel 2.78
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	*Score*	512	571	610	623	634
Persentase aplikasi di Pemda yang telah dilakukan *penetration test***	Aplikasi	10	22	22**	N/A	N/A
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	19,38	88,53	94,57	96,59	98,29

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan: (*) Indikator sudah tidak digunakan di tahun 2021
(**) Nilai Indikator menggunakan capaian tahun 2019

2.3.1.23 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Layanan yang diberikan kepada pemustaka antara lain inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat membaca dengan menggunakan *gadget* yang disebut dengan CANDIL (Maca Dina *Digital Library*), ekstentifikasi melalui Mobil Perpustakaan Keliling, Motor Baca, meningkatkan kegemaran membaca masyarakat melalui safari/*road show* kegemaran membaca, serta melalui pengembangan KOLECER (Kotak Literasi Cerdas), Bunda Literasi,

perlombaan, pengangkatan Duta Baca, iklan layanan masyarakat di berbagai media, kerja sama dengan berbagai Dunia Usaha/PT, diantaranya kolaborasi dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang transportasi yaitu PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) melalui kegiatan Makan Jengkol (Mari Kita Antar Jemput Buku dengan Kolaborasi), bantuan buku kepada komunitas, pondok pesantren, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Selain itu, perpustakaan juga berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Trasnformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di berbagai lapisan masyarakat dan komunitas di desa. Namun perkembangan literasi dalam upaya membangun kualitas manusia ini, sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat.

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Poin	N/A	68,50	61,49	65,34	70,1
Indeks Membaca Masyarakat	Poin	N/A	69	61,49	61,49	61,49
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	596.229	676.609	69.256	59.509	106.100
Tingkat Kepuasan Pemustaka	Persen	90,00	87	82,86	85,15	90
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Poin	N/A	0,3178	N/A	0,0006	0,00013

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

Dilihat dari tren capaian kinerja urusan perpustakaan pada tabel di atas, pada umumnya capaian menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2020 sempat turun akibat tejadinya pendemi COVID-19. Adanya kebijakan pengendalian pandemi COVID-19 antara lain yaitu *refocusing* Anggaran Tahun 2020 dan 2021 menyebabkan beberapa program/kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga menjadi salah satu faktor penyebab keterbatasan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas membaca.

2.3.1.24 Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui *workshop*, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada Perangkat Daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala Provinsi Jawa Barat, alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana.

Namun, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Dilihat dari tren capaian kinerja urusan kearsipan dari Tahun 2018-2022 menunjukkan kecendrungan peningkatan angka capaian. Salah satunya ditunjukkan oleh capaian kinerja pengelolaan arsip secara baku pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 28,95 persen menjadi 57,89 persen di tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 73,68 persen di tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip secara tertib hingga mencapai Kategori B. Hal ini sejalan dengan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Selain itu, sebagai implikasi dari kejadian Pandemi COVID-19 telah memunculkan dokumen-dokumen yang bekaitan dengan awal mula terjadinya pandemi COVID-19 yang diawali dengan terindetifikasinya *suspect* pertama, perkembangan kasus baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk itu, dokumen-dokumen tersebut

akan diarsipkan dalam *Gallery* COVID yang akan dibangun pada tahun 2023, sebagai memori dan pembelajaran untuk gererasi selanjutnya.

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	N/A	11	11	57,89	73,68
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	N/A	11	28,95	57,89	73,68
Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	Persen	N/A	31	66	48	68
Persentase Arsip yang Digitalisasi/Dialih-Mediakan	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Penyusutan Arsip	Persen	N/A	12	4	2,6	15,79
Persentase Simpul SIKN yang Terintegrasi Se-Jawa Barat	Persen	N/A	4	4	5	25,93

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Capaian indikator jumlah produksi perikanan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, kecuali pada tahun 2020. Penurunan produksi perikanan pada tahun 2020 dikarenakan munculnya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan sosial. Hal ini berdampak pada aspek pemasaran sektor perikanan, sehingga produsen membatasi produksi perikanan yang dilakukan karena terhambat oleh pemasarannya. Faktor yang berpengaruh dalam ketercapaian kinerja jumlah produksi perikanan diantaranya karena telah diterapkannya teknologi produksi perikanan baik

perikanan tangkap maupun budidaya yang efektif dalam meningkatkan produksi perikanan. Kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja jumlah produksi perikanan diantaranya pemberian *smart fishing* kepada nelayan, pembudidaya ikan millenial, pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan, peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, revitalisasi tambak pantura, dan penebaran benih di perairan umum.

Tingkat produksi perikanan tangkap di Jawa Barat cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian halnya dengan tingkat kesejahteraan pelaku sektor perikanan juga menunjukkan angka cukup baik yang tercermin dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Perikanan mengalami peningkatan, dari 109,12 poin pada tahun 2021 menjadi 111,31 poin di tahun 2022.

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	1.438.204,31	1.518.255,58	1.435.835,45	1.513.594,01*	1.535.781,14 ***
Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	263.846,66	249.745,87	250.919,50	280.030.06	283.713,72 ***
Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	1.174.357,65	1.268.509,71	1.184.915,96	1.233.563,96	1.252.067,42
Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Jawa Barat	persen	3,51	28,98	2,96	1,7	3,92
Konsumsi Ikan per Kapita	Kg/kap / tahun	29,64	38,23	37,1	37,73	39,21***
Persentase Kawasan konservasi perairan yang dikelola	persen	N/A	14,03	19,04	22,38	27,02
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	persen	N/A	51,18	51,85	64,16	60,14
Nilai Tukar Usaha Pertanian Sektor Perikanan	Poin	122,95	102,95	104,76	109,12	111,31

Sumber:- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023
- Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Tahun 2023
Keterangan: N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

2.3.2.2 Pariwisata

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pariwisata yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Barat melalui pintu masuk Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung,

Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka dan Pelabuhan Muarajati Kota Cirebon secara keseluruhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 1.120 orang atau 3,73 persen dari target 30.000, penurunan kunjungan wisatawan mancanegara dihadapkan pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan *lockdown* di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia dan penutupan sementara Bandara di Jawa Barat untuk penerbangan internasional.

Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Jawa Barat sebanyak 67.628.459 orang pada tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan kunjungan pada tahun 2021 sebanyak 47.132.138. Peningkatan jumlah kunjungan/perjalanan wisatawan nusantara ke akomodasi dan obyek wisata selama tahun 2022 dan pada masa libur akhir tahun 2022 mulai membaik pasca pandemi COVID-19, dengan okupansi kamar hotel dan penginapan di akhir tahun 2022 meningkat signifikan.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	2597445	1.830.000	31.610	1.120	494.578
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	63.298.608	49.000.000	35.513.885	47.132.138	69.200.575

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dan Buku Parbud dalam Angka Tahun 2023

2.3.2.3 Pertanian

Capaian Kinerja urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian yang mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir yaitu indikator Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura, Produksi komoditas peternakan (telur). Sedangkan indikator lainnya mengalami fluktuasi antara lain Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB, Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan, Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura, Produksi Padi, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sektor Perkebunan, Nilai Tukar Usaha

Pertanian (NTUP) Sektor Peternakan. Capaian data indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	8,68	8,78	9,22	8,54*	N/A
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan	Persen	N/A	-0,07	0,01	-0,03	0,08
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura	Persen	0,03	0,04	0,01	0,11	-0,51
Produksi Padi	Ton	9.647.359	9.084.957	9.016.773	9.113.573	9.881.222
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	N/A	-6,94	0,88	-3,25	8,25
Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	2,81	4,21	1,36	10,74	-50,75
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sektor Perkebunan	Poin	112,81	108,18	93,59	96,31	97,93
Laju Peningkatan Produktivitas Komodits Unggulan Utama Perkebunan	Persen	N/A	N/A	N/A	5,59	5,68
Laju Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Persen	N/A	N/A	0,14	0,12	0,18
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sektor Peternakan	Poin	127,09	125,01	94,22	95,25	100,48
Produksi komoditas peternakan (ton):						
- Daging	Ton	871.429	1.080.776	974.384	879.188	965.113*
- Telur	Ton	236.419	593.129	710.655	786.262	866.863*
- Susu	Ton	319.003	300.337	281.199	290.472	300.198*
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	persen	N/A	N/A	N/A	64	91,72

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, 2023; Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2023; Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2023

Keterangan : * Data Sementara
N/A:Indikator tidak bisa dihitung karena adanya perbedaan metode pengumpulan data, serta merupakan indikator baru.

2.3.2.4 Kehutanan

Kewenangan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan kehutanan adalah rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, sehingga sektor kehutanan memiliki peran penting dari segi lingkungan/ekologi yaitu dalam upaya menurunkan luas lahan kritis dan emisi gas rumah kaca. Selain memberikan peran dalam lingkungan sektor kehutanan juga mempunyai peran dari segi ekonomi melalui hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Indikator kinerja urusan kehutanan ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Tutupan Lahan dan Nilai Produksi Hasil Hutan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Pencapaian Target Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan peningkatan presentase tutupan hutan dilakukan melalui rehabilitasi pada lahan kritis, baik secara vegetatif maupun sipil teknis. Selain itu, dilakukan juga pencanangkan Gerakan Tanam dan Pelihar Pohon (GTPP) oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 522.4/17/Rek tanggal 19 Februari 2020, dengan target penanaman sebanyak 50 juta pohon pada tahun 2021. Realisasi sampai akhir bulan Desember 2021 sebanyak 53 juta pohon yang tersebar di kabupaten/kota. Kegiatan ini dibarengi dengan peluncuran aplikasi *E*-Tanam berupa SiMantri Bibit dan SiMantap untuk memetakan lahan kritis yang ada di Jawa Barat serta dilengkapi dengan peta digital yang berfungsi menginformasikan lokasi-lokasi lahan kritis dan lokasi-lokasi yang sudah dilaksanakan penanaman.

Peningkatan peran sektor kehutanan dari segi ekonomi dilakukan dengan memacu produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Peningkatan hasil hutan kayu diarahkan pada hutan rakyat, sementara hasil hutan bukan kayu dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan sentra budidaya lebah madu, jamur kayu, pemanfaatan jasa kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sebagai objek wisata.

Berikut ini indikator yang dapat menggambarkan pembangunan di sektor kehutanan selama periode Tahun 2018-2022, sebagaimana ditunjukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	38,89	38,7	42,48	40,78	40,81
Persentase Tutupan Hutan	Persen	18,73	33,67	45,43	43,17	41,19
Nilai Produksi Hasil Hutan	RPp Milyar	N/A	N/A	N/A	1.944,51	1.948,36
Persentase Penanganan Lahan Kritis	Persen	N/A	N/A	N/A	6,7	4,99
Tingkat Kerusakan Hutan	Persen	N/A	0	0,78	0.1	0,19

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	N/A	108,15	12,45	31.46	31,45
Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	N/A	37.894,44	31.461,39	61.473,94	45.541,95
Luas kawasan hutan yang diberikan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial	Ha	N/A	N/A	N/A	34.468,78	34.761,78

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan : N/A : indikator baru dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Persentase tutupan hutan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena perhitungan tutupan hutan menggunakan citra landsat Resolusi Sedang. Sementara itu realisasi tahun 2020 lebih tinggi daripada realisasi tahun 2021 karena adanya perbedaan penggunaan resolusi citra landsat dalam analisanya dan adanya kegiatan penebangan pada Kawasan Hutan Produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani dan belum dilaksanakan Reboisasi.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan target penanganan lahan kritis tercapai melalui:

a. Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP) yang melibatkan semua *stakeholder* di Jawa Barat baik dari Instansi Pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat.
b. Aplikasi Simantri bibit dan SiMantap untuk mengetahui lokasi penanganan lahan kritis sampai tingkat tapak derngan titik koordinat lapangan.
c. Pembangunan Hutan Rakyat dari sumber dana APBD dan DAK (APBN), Penghijauan Lingkungan di luar Hutan Negara melalui rehabilitasi *Mangrove* dan Hutan Pantai.

Tingkat Kerusakan Hutan mengalami penurunan yang cukup signifikan karena menurunnya Kejadian Bencana Alam, menurunnya Perambahan Kawasan Hutan dan Perusakan Kawasan Hutan. Peningakatan Produksi Hasil Hutan diperoleh dari meningkatnya produksi hasil hutan Kayu dan Bukan Kayu berupa Jamur kayu, madu, bambu, getah pinus, daun kayu putih baik yang berasal di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan.

Indikator kinerja Urusan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 yaitu luas lahan kritis yang direhabilitasi dengan realisasi pada tahun 2021 mencapai 61.473,94 Ha dan tahun 2022 seluas 45.541,95 Ha. Sedangkan kawasan hutan yang diberikan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial pada tahun 2021 terealisasi seluas 34.468,78 Ha dan tahun 2022 seluas 34.761,78 Ha.

2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

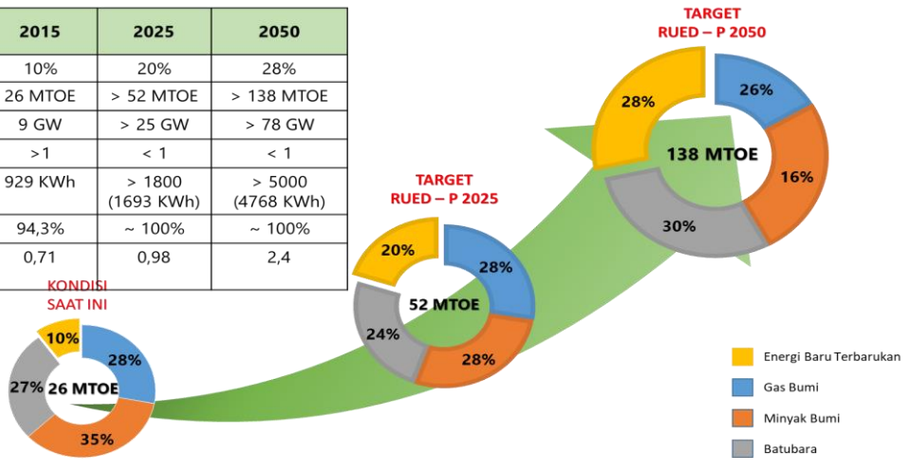
Ditengah keterbatasan kewenangan akan pengelolaan sektor energi dan sumber mineral, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk melakukan pemerataan akses listrik ke seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat. Hal ini terlihat dari capaian jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat. Nilai capaian jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 57.257 Gwh. Nilai capaian ini lebih kecil dibandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 63.381 GWh. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan penggunaan listrik khususnya pada sektor industri akibat pandemi, sehingga dilakukan penyesuaian target mengingat adanya ketidakpastian menghadapi pandemi COVID-19. Akan tetapi, pada tahun 2021 nilai capaian jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat meningkat menjadi 61.816 GWh dan terus meningkat di tahun 2022 sebesar 65,230 GWh. Faktor pendukung peningkatan tersebut karena adanya peningkatan konsumsi listrik baik dari pelanggan PLN dan non PLN.

Kemandirian dan ketahanan energi di Jawa Barat masih menghadapi permasalahan. Hal ini diakibatkan oleh konsumsi energi yang masih didominasi oleh energi fosil, yakni sebesar 76,5 persen yang berdampak terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca Jawa Barat pada sektor energi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan atau biasa disebut dengan Energi Baru Terbarukan (EBT). Jawa Barat diberikan sumber daya dan potensi EBT yang melimpah. Potensi EBT di Jawa Barat diperkirakan sekitar 170,4 GW yang bersumber dari angin (12.727 Mw), hidro (3.508 Mw), biomassa dari limbah industri (167,5 MWe), biomassa dari limbah kota (470,82 MWe), surya (156,63 GWp), dan panas bumi (5.956,80 MW). Porsi EBT di dalam bauran energi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 telah mencapai 23,41 persen. Pencapaian ini telah melebihi dari yang ditargetkan dalam Rencana Umum Daerah (RUED) Provinsi Jawa Barat,

yaitu target bauran energi primer pada tahun 2025 sebesar paling sedikit 20% dan 28% dari total bauran energi primer pada tahun 2050.

Gambar 2.38
Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P Jawa Barat
Tahun 2025-2050

TARGET RUED – P JAWA BARAT	2015	2025	2050
Bauran EBT	10%	20%	28%
Penyediaan Energi	26 MTOE	> 52 MTOE	> 138 MTOE
Pembangkit Listrik	9 GW	> 25 GW	> 78 GW
Elastisitas Energi	>1	< 1	< 1
Listrik/Kapita/Thn	929 KWh	> 1800 (1693 KWh)	> 5000 (4768 KWh)
Rasio Elektrifikasi	94,3%	~ 100%	~ 100%
Konsumsi Energi (BOE)/Kapita	0,71	0,98	2,4



Sumber: Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050

Aksi yang dilakukan dalam mentransisi energi fosil ke energi baru terbarukan, yaitu dengan melakukan pengembangan dan pemanfaatan PLTS Atap baik di gedung pemerintahan maupun sekolah, pengembangan ekosistem dan implementasi kendaraan listrik (KBLBB&SPKLU), inovasi pembiayaan/pendanaaan alternatif untuk pembangkit EBT setempat, dan lain-lain. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan penurunan gas rumah kaca pada sektor energi dapat terus meningkat. Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang energi dan sumber daya mineral dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, sebagaimana ditunjukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85
Capaian Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	GWh	N/A	63.381	57.257	61.816	65.230
Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	N/A	1.302	1.146,6	1.280,53	1.337,16
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Persen	1,07	1,84	1,84	1,90	2,46
Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	N/A	40,87	46,65	48,33	48,33

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Persen	N/A	2,06	2,37	10,46	9,76

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan: N/A pada tahun 2018 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

Indikator kinerja sektor energi dan sumber daya mineral juga direpsentasikan dengan persentase usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis. Masih minimnya tingkat kesadaran pengusaha pertambangan dalam menerapkan *good mining practices* menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan. Dengan keterbatasan kewenangan sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan tata kelola kegiatan usaha pertambangan yang tertib secara administrasi dan teknis melalui strategi yang dilakukan yakni meningkatkan pengelolaan pengusahaan sumber daya pertambangan, melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaku usaha pertambangan dan inventarisasi data dan pengembangan usaha pertambangan.

Selain itu, pengelolaan air tanah di Jawa Barat didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT). Eksploitasi air tanah yang tak terkendali dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar (turunnya muka air tanah, penurunan kualitas air, intrusi air air laut, *land subsidence*). Salah satu upaya untuk menjaga kondisi kualitas dan kuantitas air tanah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya konservasi kepada pengguna air tanah.

2.3.2.6 Perdagangan

Data BPS menunjukkan Nilai PDRB Sektor Perdagangan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Penurunan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 lapangan usaha perdagangan mencetak kinerja yang positif seiring dengan penurunan COVID-19 diiringi dengan menguatnya permintaan domestik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Selama 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang 349,00 triliun rupiah atau sekitar 14,41 persen, memiliki peranan terbesar kedua setelah Industri Pengolahan. Secara umum, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,22 persen di tahun 2022, naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,19 persen. Hal ini disebabkan karena adanya relaksasi mobilitas akibat menurunnya kasus COVID-19 dan adanya peraturan pemerintah terkait diskon PPnBM untuk mendorong penjualan mobil untuk perbaikan perekonomian. Meski kebiijakan PPnBM hanya berlaku hingga September 2022, akan tetapi penjualan mobil masih tumbuh sebesar 11,61 persen (*yoy*) pada triwulan IV tahun 2022 yang mengindikasikan masih kuatnya daya beli masyarakat.

Di tahun 2022, komponen perdagangan luar negeri dan luar wilayah meningkat signifikan. Realisasi nilai ekspor non migas Jawa Barat dari Januari-Desember tahun 2022 mencapai 38,28 Miliar USD naik sebesar 13,75 persen dibanding nilai ekspor tahun 2021. Jawa barat merupakan provinsi dengan tumpuan perekonomian industri pengolahan dan peranan investasi asing terbesar di Indonesia, sehingga perekonomian Jawa Barat sangat terpengaruh oleh kondisi perekonomian global. Industri besar sebagian besar berorientasi ekspor, dan mengandalkan bahan baku serta barang modal impor.

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,21	7,51	-7,95	3,19	4,22
Laju Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	Persen	3,99	-1,38	-11.18	27,51	13,75
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Rp Triliun	291,74	323,62	303,86	319,59	349,00

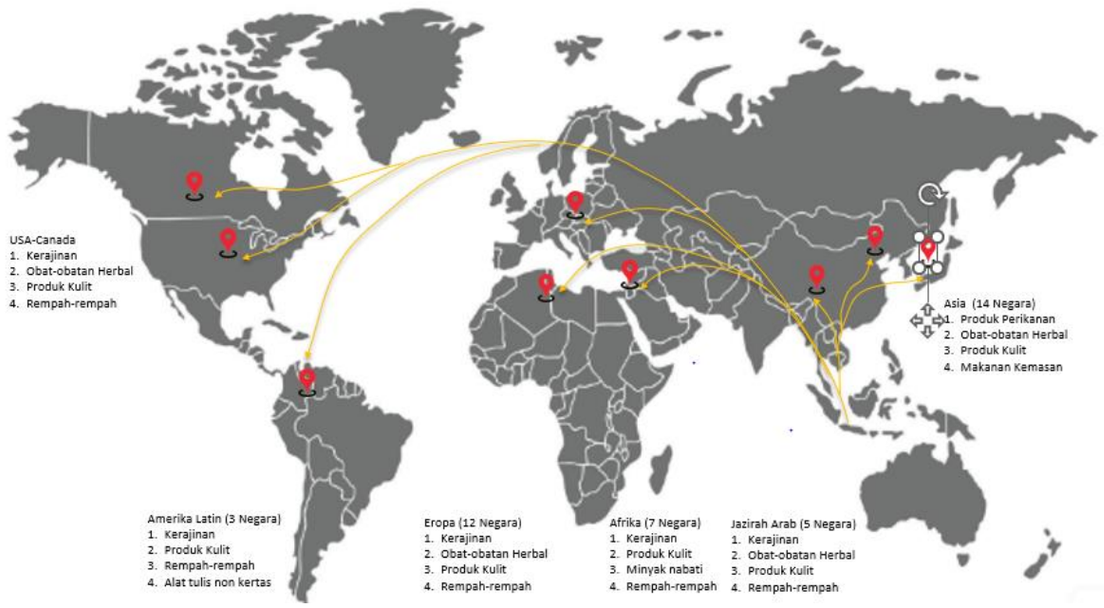
Sumber: Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan: N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

Kinerja perdagangan ekspor Jawa Barat ke luar negeri serta antar daerah masih potensial untuk dikembangkan untuk mendorong sisi

permintaan produksi sektor industri dan UMKM serta pertanian, perikanan dan kelautan yang dihasilkan Jawa Barat. Produk ekspor dari Jawa Barat saat ini terutama mencakup kendaraan otomotif, produk elektronika, TPT, alas kaki, kopi, udang. Produk dan komoditas lainnya yang potensial untuk dikembangkan melalui perdagangan luar negeri meliputi kerajinan, produk kulit, makanan kemasan, produk perikanan, rempah-rempah dan obat-obatan herbal, dengan negara tujuan sebagaimana Gambar 2.39.

Pengembangan pemasaran dan perdagangan luar negeri memanfaatkan jejaring kerja sama luar negeri Provinsi Jawa Barat yang telah terbangun antara lain seperti *sister province*. Sementara untuk meningkatkan perdagangan antar daerah provinsi dikembangkan melalui optimalisasi *West Java Trade, Tourism, and investment Partnership* yang telah diinisasi pada tahun 2022.

Gambar 2.39
Perdagangan Ekspor Jawa Barat ke Luar Negeri



2.3.2.7 Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah

dari setiap *input* atau bahan dasar yang diolah. Dengan didukung oleh pemulihan ekonomi dunia, ekspor industri pengolahan meningkat seiring dengan regulasinya yang semakin mudah. Kinerja sektor industri pengolahan dapat dilihat dari besarnya PDRB Industri Non Migas di Jawa Barat.

Selama 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Jawa Barat didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi di atas 8 persen, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Konstruksi. Pada kategori Industri Pengolahan, kontribusi kategori ini mengalami kenaikan dari periode 2018-2022, yaitu dari 42,19 persen di tahun 2018 menjadi 42,24 persen di tahun 2022. Kategori Industri Pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir.

Pertumbuhan Industri Pengolahan di Jawa Barat pada tahun 2022 mengalami akselerasi mencapai sebesar 7,00 persen (*yoy*) dengan total nilai 1.023,40 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,22 persen dengan total nilai 921,58 triliun rupiah. Kenaikan industri pengolahan tahun 2022 merupakan konsekuensi relaksasi PPKM akibat menurunnya kasus pandemi, sehingga mendorong kenaikan permintaan global. Perbaikan perekonomian Jawa Barat didukung pula ekspor luar negeri. Diskon PPnBM menjadi salah satu pengungkit alat angkut di Jawa Barat.

Tabel 2.87
Capaian Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	6,52	3,95	-4,36	4,22	7,00
PDRB Industri Non Migas	Rp Triliun	827,29	883,29	856,10	921,58	1.023,40

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

2.3.2.8 Transmigrasi

Dalam upaya mempersiapkan transmigran agar mampu mengembangkan berbagai program kegiatan produktif di lahan transmigrasi, maka para calon transmigran memerlukan beberapa pelatihan guna membekali dirinya dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi yang kuat dalam menjalankan program transmigrasi di daerah penempatan

nantinya. Selama periode Tahun 2018-2022, telah dilakukan pelatihan calon transmigran sebagaimana data di bawah ini.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase transmigran yang ditempatkan	Persen	95,71	97,50	N/A	100	84,09

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023
Keterangan: N/A Tidak ada penempatan transmigran

Alokasi target penempatan calon transmigran ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Setiap tahun alokasi target pengiriman berkurang. Pada tahun 2018 target pengiriman yang diterima oleh Jawa Barat sebanyak 67 Kepala Keluarga (KK), kemudian menjadi 39 KK pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak ada target penempatan calon transmigrasi karena dampak dari pandemi COVID-19, pada tahun 2021 hanya 19 KK dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 37 KK.

Kurangnya informasi antara pusat dengan daerah menyebabkan calon transmigran menghadapi kondisi yang sulit. Kesulitan calon transmigran dalam menghadapi perbedaan karakteristik fisik daerah penempatan dengan daerah asal calon transmigran, sehingga calon transmigran harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan karakter daerah penempatan. Daerah penempatan transmigran saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI., sedangkan pelatihan calon transmigran dapat diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi ketransmigrasian.

Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dimaksudkan untuk sinkronisasi pelaksanaan ketransmigrasian antara daerah pengirim dengan daerah penempatan. Pada kenyataannya KSAD ini sulit untuk ditindaklajuti pasca-penempatan transmigran. Hal ini disebabkan oleh penetapan target penempatan masih menjadi kewenangan Kementerian terkait. Dikarenakan semua alokasi target dari Kemendes sudah terpenuhi realisasinya.

2.3.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1 Sekretariat Daerah

1) Nilai SAKIP

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan pada periode 2018 sampai 2022 selalu mendapat kategori A. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semakin baik, akuntabel dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa kategori A mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah dapat memimpin perubahan, memiliki kinerja yang tinggi, dan sangat akuntabel. Secara nasional, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari empat Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Kategori A. Selain daripada itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melihat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah dapat menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan manajemen kinerja dengan baik.

2) Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Dari hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Capaian LPPD Jawa Barat selama periode 2018 sampai

dengan 2022 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun walaupun masih tetap pada status sangat tinggi. Nilai LPPD Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mencapai 3,329. Skoring 3,329 memperlihatkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan sangat tinggi. Kondisi ini didorong oleh kinerja Perangkat Daerah yang sangat baik dalam menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan. Selain itu, didukung pula oleh pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh 6 (enam) perangkat daerah.

Tabel 2.89
Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Skor: 3,497 /Status: sangat tinggi	Peringkat 2/ Skor: 3,34 /Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,31 /Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,329/Status: sangat tinggi	Belum rilis

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2022

Ketercapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan didorong oleh adanya beberapa upaya yaitu:

a) Menginternalisasikan hasil LPPD ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan renja melalui harmonisasi target capaian kinerja sebagai dasar prioritas pengalokasian anggaran;
b) Mengidentifikasi urusan pemerintahan dan indikator capaian kinerja yang masih rendah sebagai bahan untuk kebijakan pengalokasian anggaran yang lebih baik;
c) Menyelenggarakan bimbingan teknis bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara intensif dalam rangka mengoptimalkan pemahaman terhadap metode dan cara penghitungan capaian kinerja serta menyusun data dukung akurat yang dapat dipertanggungjawabkan; serta
d) Menyusun manual tata cara perhitungan dan penyajian data dukung yang disepakati bersama oleh pusat, provinsi dan kabupaten kota.

3) Level Kematangan/Maturitas Pengandaan Barang dan Jasa (PBJ)

Salah satu indikator peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah bidang perekonomian pembangunan adalah melalui

pengukuran level kematangan/maturitas PBJ. Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Tingkat Maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi.

Dalam penjabarannya, Level Maturitas dibagi menjadi 4 (empat) Domain (Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi) yang dibagi lagi kedalam 9 (sembilan) Variabel (Manajemen Risiko, Manajemen Kinerja, Manajemen Penyedia, Manajemen Pengadaan, Pengorganisasian Kelembagaan, Tupoksi Kelembagaan, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, dan Sistem Informasi). Realisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Level Kematangan/Maturitas PBJ mencapai tingkat kematangan pada level 3 (tiga) proaktif. Adapun yang menjadi faktor pendorong tercapainya target diatas antara lain:

a) Terbentuknya kelembagaan UKPBJ melalui terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2019 yang memiliki tugas, fungsi serta organisasi kelembagaan yang jelas dan terdokumentasi sesuai peraturan perundangan.
b) Terselenggaranya layanan pengadaan secara elektronik (SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing, SIKAP) secara terpadu.
c) Terselenggaranya proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak.

Pencapaian Tingkat Kematangan/Maturitas PBJ pada Level 3 atau Proaktif bermakna bahwa beberapa hal perlu diperhatikan diantaranya indikator tersebut mengalami perubahan yang sebelumnya yaitu Level Kematangan/Maturitas PBJ pada daftar IKU Tahun 2018-2023. Perubahan indikator didasari pada terbitnya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tabel 2.90
Capaian Indikator Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Level Maturitas Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	N/A	Level 2 /Status: Berkembang	Level 3 /Status: Proaktif	Level 3 /Status: Proaktif	Level 3 /Status: Proaktif
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	68,0 (Cukup)	62,57 (Cukup)	80,2 (Baik)

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan : N/A Indikator baru pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023

4) Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Lainnya

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat juga dinilai dengan beberapa indikator, sebagai berikut:

a) Berdasarkan hasil pengukuran atas pencapaian IKU Biro BUMD dan Investasi, Sekretariat Daerah diketahui bahwa Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 terealisasi sebesar 81,78 persen, meningkat pada tahun 2020 menjadi 90 persen, dan pada tahun 2021 mencapai 95,25 persen, sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 dapat dinyatakan Memuaskan.

b) Indeks Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah pada tahun 2021 mencapai nilai B dengan kualifikasi Baik. Hal ini didukung pula antara lain dengan terselenggaranya berbagai kegiatan sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan lancar serta pelayanan dapat terlaksana optimal dari 3 (tiga) aspek pelayanan yaitu aspek layanan umum dan kepegawaian, aspek adminsitrasi keuangan, serta aspek pengelolaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah.

c) Indikator Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti tercapai 105,15% yang berarti meningkat 34,99% dari capaian tahun lalu dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tercapai 88,54%. Ketercapaian target kinerja terjadi melalui penyelenggaraan Program

Kerja Sama Daerah dengan realisasi penandatanganan kerjasama sebanyak 143 dokumen serta dukungan lain diantaranya:

1) Pengajuan usulan kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
2) Pengintegrasian perencanaan kerja sama antar daerah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
3) Peningkatan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan dan pelayanan publik;
4) Meningkatkan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah melalui optimalisasi kelembagaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat; dan
5) Merevitalisasi badan kerjasama daerah dan meningkatkan peran kelembagaan kerjasama antar daerah.

d) Kinerja terhadap analisis dokumen persyaratan kelayakan pemekaran daerah tercapai 133%. Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, menunjukkan kinerja yang cukup optimis yaitu 133%. Hal ini memperlihatkan gambaran akan dapat dipertahankannya tingkat kinerja hingga tahun Kepemimpinan Kepala daerah berakhir.

   Ketercapaian kinerja yang sangat memuaskan ini didukung oleh adanya ajuan pemekaran di tiga daerah yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Sukabumi Utara. Ketiga ajuan ini, dinilai telah memenuhi syarat dan layak menjadi calon pengembangan daerah otonom baru. Faktor pendorong lain adalah bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus mendorong Pemerintah Pusat untuk mencabut kebijakan moratorium yang menangguhkan penetapan daerah otonom baru.

e) Peningkatan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum terwujud. Hal ini diperlihatkan dari capaian indikator kinerja tahun 2021 sebesar 125% yang meningkat 25% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan

dengan target jangka menengah, memperlihatkan kinerja yang optimis dengan capaian 100%.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja terjadi melalui penyelenggaraan program-program terutama pada program Bantuan Hukum dan HAM serta program Dokumentasi Hukum, Pembinaan, Pengawasan Produk Hukum. Pada program Bantuan Hukum dan HAM terjadi perolehan kinerja yang melampaui target yaitu pada kegiatan litigasi penanganan perkara yang semula penanganan direncanakan pada 16 perkara, dilakukan pada 25 perkara. Sementara pada program Dokumentasi Hukum, Pembinaan, pengawasan produk hukum, dilakukan fasilitasi pada 157 produk hukum kabupaten/kota dan evaluasi terhadap 26 produk hukum kabupaten/Kota terhadap kesesuaiannya dengan kebijakan pusat. Selain daripada itu, peningkatan pengunjung *website* menjadi salah satu pendorong yang semula ditargetkan 22.000 pengunjung terealisasi 125.028 pengunjung yang mayoritas mengakses peraturan gubernur.

2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.4.1 Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat telah tersedia atau ada, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat telah tersedia atau ada. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut: (a) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013; (b) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; (c) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015; (d) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; (e) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; (f) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; (g) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, (h) Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, (i) Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, (j) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dan (l) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

4) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen. Adapun untuk tahun 2020 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 98,43 persen. Hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100 persen.

5) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai menggunakan sistem informasi yang dinamakan *RKPD Online* 2101, dan pada tahun 2019 sistem ini mengalami pengembangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dinamakan "Si Rampak Sekar", singkatan dari Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Sistem ini merupakan salah satu media agar proses perencanaan pembangunan dapat selaras, sinkron, sinergis, dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Sistem ini digunakan untuk proses perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2020-2021.

Seiring dengan pemberlakuan Si Rampak Sekar, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan: 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; 2) menghasilkan

layanan informasi berbasis elektronik; serta 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

2.3.4.2 Keuangan

Salah satu bentuk prestasi dari kinerja pengelolaan keuangan yang juga merupakan indikator keberhasilan pengelolaan keuangan adalah tercapainya opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berhasil memperoleh dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah selama periode 2018-2022. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah 1) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan Pengungkapan (*Adequate disclosures*) pada Laporan Keuangan, 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta 4) efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Tabel 2.91
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: www.sakip.jabarprov.go.id dan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2023

2.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun terkahir dapat dilihat dari indikator pada tabel di bawah. Ketiga indikator Indeks Sistem Merit; Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL; dan Persentase pegawai yang mendapat nilai SKP >76% memiliki perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa faktor pendorong pencapaian indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, yaitu: 1) Membuat dan/atau menyempurnakan peraturan tentang kepegawaian di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 2) Penyempurnaan data pegawai dan aplikasi kepegawaian; 3) Mengembangkan sistem digital

assessment secara *online*; 4) Sudah mengimplementasikan *Corporate University* dan dilaksanakannya pengembangan kompetensi secara *hybrid* (daring dan tatap muka) sehingga dapat menampung peserta lebih banyak; 5) Adanya *early warning* pada aplikasi KMOB terkait kedisiplinan pegawai; dan 6) Adanya SKP *online* pada aplikasi TRK.

Tabel 2.92
Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Sistem Merit	Poin	268	277	375,50	375,50	396,50
Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL	Persen	N/A	78,8	92,16	104	116
Persentase pegawai yang mendapat nilai SKP >76%	Persen	80	87,89	99,52	99,81	99,91
Persentase Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	Persen	100	100	100	100	200

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, 2023

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja unsur penelitian dan pengembangan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan adanya indikator yang capaiannya mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan Indeks Inovasi Daerah mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, hal tersebut disebabkan oleh kebaharuan sistem aplikasi dan metode yang digunakan dalam pengukuran (skoring) Indeks Inovasi Daerah (IID). Namun, Jawa Barat dari tahun ke tahun memiliki predikat sangat inovatif/terinovatif pada Indeks Inovasi Daerah kategori provinsi. Di sisi lain, capaian jumlah karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat Kekayaan Intelektual (KI) cenderung fluktuatif. Hal tersebut terjadi karena dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual terdapat beberapa tahapan dimana dalam proses tersebut tidak semua permohonan fasilitasi pendaftaran memenuhi persyaratan. Capaian indikator kinerja unsur Penelitian dan Pengembangan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.93
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Daerah dan Biro Pemprov Jabar/Pemerintah Kab/Kota di Jabar/Masyarakat/Dunia Usaha/Pihak Lainnya						
Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	Persen	N/A	20	10,5	20	Belum rilis
Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk Mendapat Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah	N/A	20	26	4	18
Indeks Inovasi Daerah	Poin	50650	59350 (sangat Inovatif)	6879 (sangat Inovatif)	62,82 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023
Keterangan : (N/A) Indikator Baru di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

2.3.5 Unsur Pengawasan

Fungsi pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari: jumlah temuan (R), tindak lanjut yang selesai (S), tindak lanjut dalam proses (DP), dan belum ditindaklanjuti (B). Berdasarkan tabel di bawah, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja urusan pengawasan mengalami kenaikan dan terdapat pula yang tetap. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, indikator kinerja urusan pengawasan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Persen	87	92	91,80	91,80	98,85
3.	Tingkat kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3
4.	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern	Level	N/A	III	III	III	III

Sumber: Inspektorat, 2023
Keterangan : (N/A) Indikator Baru di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

2.3.6 Pemerintahan Umum

Target Indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa sebesar 100 persen dengan diperhitungkan perkiraan dari jumlah yang mendapatkan pembinaan tentang Kesatuan Bangsa yaitu sebanyak 5.894 orang

sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun 2021, capaian target Indikator untuk Tingkat Bina Kesatuan Bangsa sebesar 135 persen, diperhitungkan perkiraan dari jumlah yang mendapatkan pembinaan tentang Kesatuan Bangsa yaitu sebanyak 7.962 orang. Hal ini menunjukan bahwa program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat telah cukup efektif untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan ditengah adaptasi kebiasaan baru dimana dicegahnya kegiatan yang mengumpulkan massa serta himbauan untuk menjaga jarak sehingga diperlukan metode baru dalam rangka upaya pembinaan tentang kesatuan bangsa.

Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pertama yang telah dilaksanakan adalah penyelenggarakan pendidikan bela negara, pemilihan Duta Bela Negara, peningkatan wawasan kebangsaan, dan pemantapan ideologi bangsa, tujuan dari kegiatan ini adalah menguatkan nilai–nilai Bela Negara di Masyarakat, mensosialisasikan Bela Negara, dan menanamkan nasionalisme di kalangan generasi muda. Selain itu Bakesbangpol bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka memberikan pemahaman kepada ASN berupa peningkatan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan kontra Radikalisme terhadap ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui *link zoom* dan *youtube* yang hampir diikuti oleh seluruh ASN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terhadap kalangan milenial diwakili oleh siswa SMA, SMK dan SLB se Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan lainnya adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang ideologi bangsa, selain itu juga terlaksananya kegiatan *Ormas Day* dalam rangka meningkatkan toleransi dan hubungan harmonis diantara organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan kondusifitas dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat, Kegiatan Penguatan Ekonomi Nasional berbasis era digital di Jawa Barat dengan tujuan memantau keberadaan daerah rawan ketahanan ekonomi di Jawa Barat dan membuat peta daerah kerawanan ketahanan ekonomi, kegiatan Optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam moderasi beragama untuk mewujudkan toleransi dalam menjaga kondusifitas di wilayah Jawa Barat, serta kegiatan pengawasan orang asing, monitoring dan evaluasi situasi dan

kondisi daerah untuk menjaga kondusifitas daerah serta kegiatan rencana aksi penanganan konflik sosial di Jawa Barat telah terlaksana dengan baik.

Selain itu, upaya peningkatan cakupan masyarakat yang terbina dilakukan melalui kanal media sosial (*instagram*), berbagai konten terkait pemahaman nilai-nilai Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan terus digaungkan berupa interaksi-interaksi *stories*, *quizz*, dan edukasi lainnya untuk para netizen *instagram* bangkit.jabar. Hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik, terlihat dari *report Instagram Insight* bangkit.jabar yang dalam pemantauan 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober, November, Desember 2021) menunjukkan hasil cukup signifikan yang terlihat dari jumlah *follower* dan aktifitas *netizen* dalam merespon konten tersebut. Data dimaksud dapat diklaim sebagai proses pembinaan yang secara tidak langsung berjalan efektif, dan metode seperti ini terus dikembangkan menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah ditujukan untuk seluruh elemen masyarakat, namun lebih dominan bagi kalangan generasi muda di Jawa Barat, selebihnya sasaran ditujukan untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota dan pengurus ormas/LSM, pelaku budaya. Hal ini ditujukan untuk memfokuskan sasaran pada kelompok masyarakat/penduduk usia produktif di Jawa Barat.

Target Indikator Tingkat Bina Demokratisasi sebesar 100 persen dengan diperhitungkan perkiraan dari jumlah yang mendapatkan pembinaan tentang Demokratisasi yaitu sebanyak 1.600 orang sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun 2021, capaian target Indikator untuk Tingkat Bina Demokratisasi sebesar 103 persen, diperhitungkan perkiraan dari jumlah yang mendapatkan pembinaan tentang Demokratisasi yaitu sebanyak 1.652 orang, hal ini menunjukan bahwa tingkat capaian indikator kinerja kedua telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Ketercapaian ini berkaitan dengan upaya Bakesbangpol dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi pendidikan politik bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota parpol serta kegiatan penguatan aspek IDI dalam rangka memberikan pemahaman tentang pendidikan politik di Jawa Barat. Kegiatan tersebut khususnya adalah Diseminasi Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila, Jambore Infrastruktur Politik Jawa Barat, Pendidikan Politik bagi Masyarakat,

Penguatan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat, Penguatan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, Bimbingan Teknis Keuangan bagi Pengurus Partai Politik, Model Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila, Pemantauan Perkembangan Politik di Jawa Barat, dan Rapat Koordinasi Tim Pokja IDI.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung indikator Tingkat Bina Demokratisasi ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan Jawa Barat, *stakeholder* di Jawa Barat, serta para pelaku politik dan demokrasi di Jawa Barat, dan seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat dalam rangka membina kehidupan berdemokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan demokrasi di Jawa Barat.

Tabel 2.95
Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Persen	N/A	70,78	0,0111	135	106
2.	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	Persen	N/A	70,78	99	103	N/A

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023
Keterangan : (N/A) Indikator Baru di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Salah satu aspek penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah adalah daya saing daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

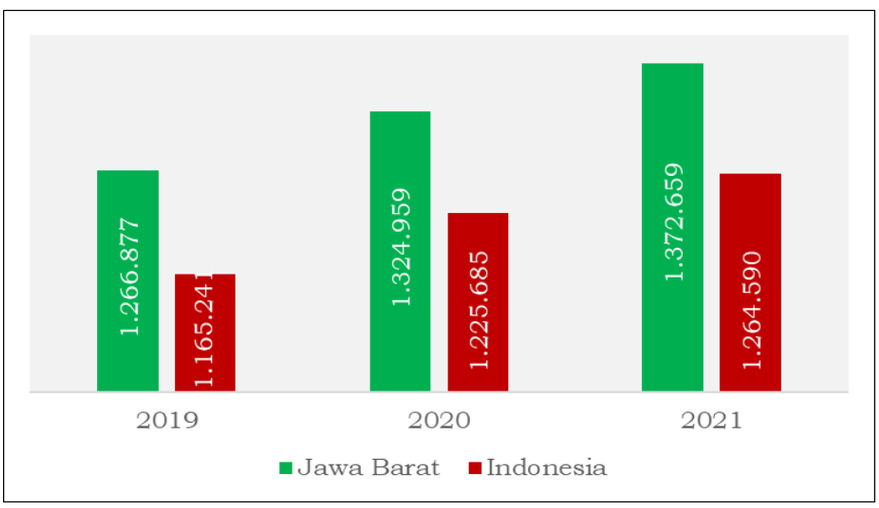
2.4.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Salah satu indikator daya saing ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah indikator rata-rata pengeluaran per kapita. Indikator ini menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Data

pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga Jawa Barat maupun rata-rata nasional mengalami peningkatan selama periode 3 (tiga) tahun (2019-2021), lihat gambar dibawah Data menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita Jawa Barat sebesar Rp1.437.394, artinya secara rata-rata pengeluaran penduduk Jawa Barat selama setahun adalah 1.437.394.

Gambar 2.40
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)



Sumber: BPS, 2022

Di tingkat kabupaten/kota, nilai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menunjukkan angka yang bervariasi. Terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita sebulan diatas provinsi, sedangkan 19 (sembilan belas) kabupaten/kota lainnya memiliki nilai pengeluaran per kapita sebulan dibawah provinsi. Tiga kota dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan paling tinggi adalah Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung, sedangkan Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur merupakan 3 (tiga) kabupaten dengan nilai rata-rata pengeluaran per kapita penduduk paling rendah. Selisih nilai

pengeluaran per kapita antara yang tertinggi dengan yang terendah sebesar Rp1.711.116 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup tajam. Hal ini disebabkan penduduk yang berdomisili di kota dengan karakteristik wilayah perkotaan memiliki peluang yang lebih terbuka untuk meningkatkan pendapatannya disebabkan lapangan pekerjaan yang bersifat heterogen (industri, perdagangan, dan jasa) dibanding penduduk yang berdomisili di kabupaten dengan karakteristik wilayah perdesaan dimana lapangan pekerjaan bersifat homogen (pertanian).

Tabel 2.96
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten/Kota (Rupiah)
Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bogor	1.270.506	1.216.394	1.111.823	1.220.669	1.377.576
Sukabumi	901.049	983.841	918.757	1.018.782	1.034.412
Cianjur	812.821	815.802	927.198	959.446	867.547
Bandung	1.126.162	1.098.748	1.184.544	1.210.944	1.169.603
Garut	894.372	838.489	940.065	831.102	858.077
Tasikmalaya	742.152	836.214	849.655	884.302	985.340
Ciamis	944.298	1.001.390	1.010.334	1.021.570	1.201.396
Kuningan	942.329	977.930	1.157.538	1.211.684	1.100.726
Cirebon	871.065	858.977	985.858	1.016.766	1.135.006
Majalengka	982.723	997.249	1.123.213	1.095.738	1.029.656
Sumedang	985.682	971.996	1.271.292	1.144.317	1.333.296
Indramayu	963.495	1.036.106	1.159.453	1.248.638	1.254.515
Subang	1.057.047	1.065.185	1.060.201	1.154.420	1.230.677
Purwakarta	1.112.260	1.228.740	1.216.436	1.400.486	1.240.484
Karawang	1.227.161	1.224.815	1.155.109	1.242.403	1.276.826
Bekasi	1.440.190	1.519.651	1.708.114	1.588.581	1.754.664
Bandung Barat	889.334	1.015.303	1.007.906	952.620	1.158.398
Pangandaran	1.056.001	1.067.368	1.131.678	1.179.731	1.197.041
Kota Bogor	1.482.069	1.747.986	1.720.694	1.960.499	1.791.592
Kota Sukabumi	1.276.009	1.557.065	1.445.759	1.483.147	1.479.933
Kota Bandung	1.934.774	1.974.339	1.958.841	2.082.374	2.078.106
Kota Cirebon	1.171.884	1.495.050	1.474.218	1.629.707	1.559.130
Kota Bekasi	1.947.327	2.147.104	2.347.086	2.488.463	2.569.193
Kota Depok	1.937.176	2.027.984	2.169.732	2.304.941	2.538.382
Kota Cimahi	1.500.443	1.755.952	1.808.790	1.827.071	1.909.733
Kota Tasikmalaya	1.043.654	1.212.982	1.255.704	1.310.775	1.292.484
Kota Banjar	1.033.228	976.593	1.144.797	1.088.976	1.268.890
Provinsi Jawa Barat	**1.218.079**	**1.266.877**	**1.324.959**	**1.372.659**	**1.437.394**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

2.4.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

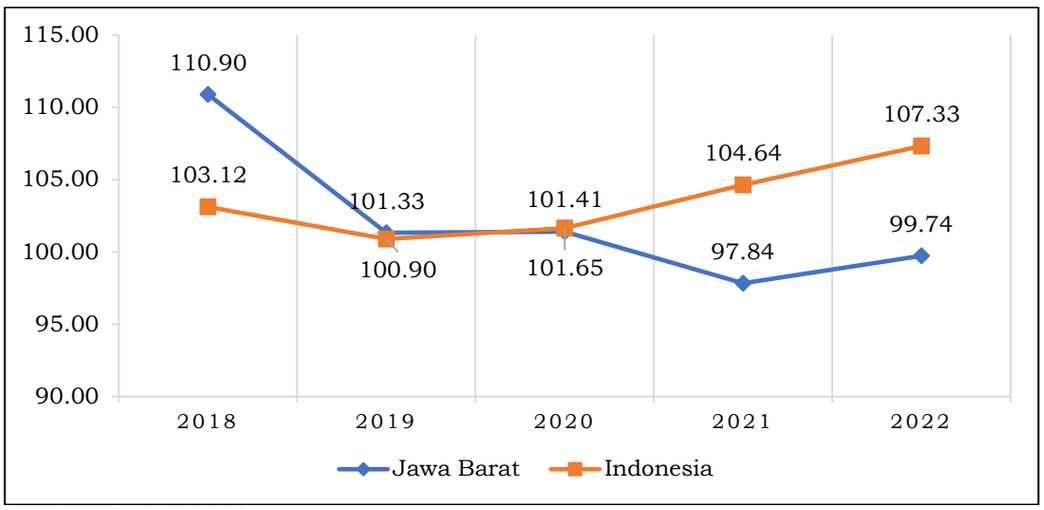
Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani

dari waktu ke waktu yang dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. Selain itu menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Dari sisi pendapatan petani, perkembangan dalam kurun waktu 2018-2022 memperlihatkan adanya peningkatan. Peningkatan pendapatan ini akibat kenaikan harga komoditas yang dihasilkan petani, dengan asumsi jumlah produksinya tetap sebagaimana jumlah produksi pada tahun dasar. Fluktuatifnya NTP menunjukkan harga-harga komoditas pertanian yang sangat dipengaruhi faktor musiman, harga meningkat apabila jumlah produksi sedang mengalami penurunan seperti pada musim kemarau, musim angin barat saat gelombang lautan meningkat produksi ikan menurun, sebaliknya harga akan menurun apabila persediaan komoditas di sentra-sentra pertanian melimpah karena musim panen. Hal ini mengakibatkan *take home pay* petani tidak tetap untuk jumlah produksi yang diasumsikan sama seperti produksi pada tahun dasar 2018.

Pada kurun Tahun 2019-2020, kenaikan indeks yang dibayar petani lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks yang diterima petani. Hal ini menunjukkan adanya surplus pendapatan petani akibat kenaikan harga komoditas pertanian yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang/jasa yang dibayar petani. Adapun pada kurun Tahun 2020-2021, indeks yang dibayar petani mengalami kenaikan sementara indeks yang diterima petani mengalami penurunan. Akibatnya, terjadi penurunan pendapatan petani akibat menurunnya harga komoditas pertanian dibandingkan dengan kenaikan harga barang/jasa yang dibayar petani. Hal ini yang menyebabkan NTP tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup dalam (lihat Gambar 2.42). Namun pada tahun 2022, NTP meningkat cukup siginfikan menjadi 99,74 poin.

Gambar 2.41
Nilai Tukar Petani (NTP) Petani Tahun 2018-2022



Sumber: BPS. 2023

Dalam lingkup regional Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang mengalami penurunan NTP Petani yang cukup besar pada periode Tahun 2018-2022 (Tabel 2.97). Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan petani pada periode tersebut mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Secara umum, turunnya NTP di beberapa provinsi dipicu oleh kenaikan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) di perdesaan dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

Tabel 2.97
Nilai Tukar Petani (Petani) Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022

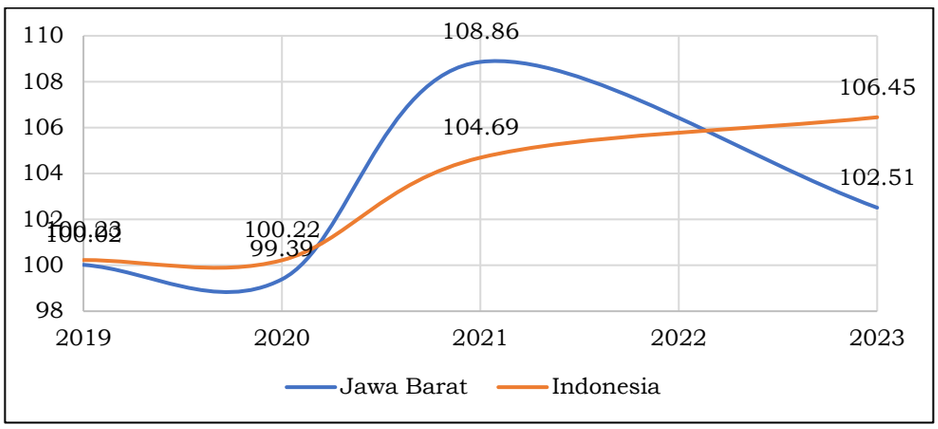
Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	Perubahan (2020-2021)
DKI Jakarta	100,44	99,86	99,55	100,97	103,13	3,16
Jawa Barat	**110,9**	**101,33**	**101,41**	**97,84**	**99,74**	**-1,9**
Jawa Tengah	102,25	101,85	101,79	100,37	107,27	-6,9
DI Yogyakarta	101,26	102,57	101,12	97,38	98,14	-0,76
Jawa Timur	108,02	101,17	100,77	100,02	102,51	-2,49
Banten	100,52	101,71	102,27	98,44	101,37	-2,93
Indonesia	**103,12**	**100,90**	**101,65**	**104,64**	**107,33**	**-2,69**

Sumber: BPS. 2023

Nilai Tukar Petani (NTP) Nelayan menunjukkan perkembangan yang berbanding terbalik dengan NTP Petani, jika pada periode Tahun 2020-2021, NTP Petani mengalami penurunan, sebaliknya NTP Nelayan mengalami peningkatan (lihat Gambar 2.42). Secara umum, hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan nelayan mengalami peningkatan

yang disebabkan oleh meningkatnya indeks harga yang diterima nelayan. Peningkatan indeks ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya harga produk perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya seiring dengan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat.

Gambar 2.42
Nilai Tukar Petani (NTP) Nelayan Tahun 2019-2022



Sumber: BPS, 2023

Secara umum, tingkat kesejahteraan nelayan di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding 4 (empat) provinsi lain (lihat Tabel 2.98). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, NTP nelayan di Provinsi Jawa Barat meningkat cukup signifikan. DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan NTP nelayan paling tinggi sehingga dapat diartikan bahwa tingkat pendapatan nelayan di provinsi tersebut lebih tinggi dibanding provinsi lainnya.

Tabel 2.98
Nilai Tukar Petani (Nelayan) Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2022

Provinsi	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	98,21	95,19	97,83	101,43
Jawa Barat	**100,02**	**99,39**	**108,86**	**112,09**
Jawa Tengah	99,89	102,71	108,45	109,94
DI Yogyakarta	101,99	106,66	115,83	115,70
Jawa Timur	98,44	95,77	101,11	103,73
Banten	101,28	98,73	100,99	102,23
Indonesia	**100,23**	**100,22**	**104,69**	**106,45**

Sumber: BPS, 2023

NTP sub sektor memperlihatkan perbedaan tingkat pendapatan petani. Petani yang berkecimpung di subsektor hortikultura, pembudidayaan ikan, dan nelayan dan pembudidayaan ikan memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi yang ditandai dengan nilai NTP >100.

Sementara itu, petani yang berkecimpung di subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan peternakan mengalami defisit dimana NTP <100, atau dengan kata lain mengalami kerugian karena indeks yang dibayar lebih besar dibanding indeks yang diterima.

Rendahnya tingkat kesejahteraan petani yang berkecimpung di subsektor tanaman pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya luas tanam, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, dan kelembagaan petani. Sementara di subsektor peternakan rendahnya NTP dipengaruhi oleh regulasi yang terkait peternakan, kualitas dan kuantitas bibit yang sesuai standar mutu, penerapan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, pemanfaatan pakan lokal dan limbah pertanian. Adapun, untuk subsektor tanaman perkebunan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan NTP diantaranya melalui peningkatan luas tanam atau ekstensifikasi, optimalisasi lahan, peremajaan tanaman tua dan rusak/sakit, peningkatan produktivitas dan kualitas, penguatan kelembagaan petani/koperasi, dan peningkatan nilai tambah produk perkebunan.

Tabel 2.99
Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Tahun 2018-2022

Sub Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
Tanaman Pangan	106,06	102,14	103,28	96,94	97,50
Hortikultura	116,03	101,28	100,41	102,28	109,19
Tanaman Perkebunan	100,58	98,19	92,72	95,19	96,45
Peternakan	114,53	98,07	95,36	96,78	101,02
Pembudidayaan Ikan	105,81	102,04	103,49	107,63	108,61
Nelayan dan Pembudidayaan Ikan	109,00	101,48	102,35	107,97	109,58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

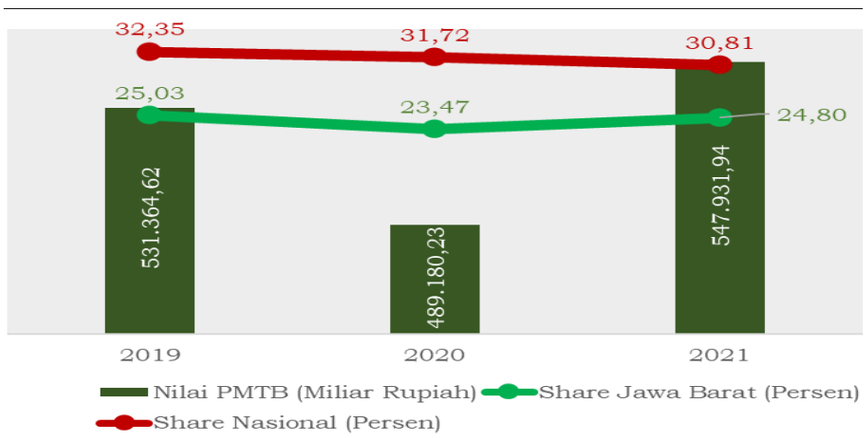
2.4.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang merepresentasikan besaran investasi. PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak merupakan barang konsumsi yang mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Peningkatan *share* PMTB terhadap PDRB suatu daerah dari waktu ke waktu adalah gejala yang diharapkan. Sebab, kenaikan

investasi akan menyerap banyak tenaga kerja, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi.

Gambar 2.43 dibawah memperlihatkan perkembangan nilai dan share PMTB terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat dan nasional. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, nilai PMTB berfluktuatif disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ditengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, PMTB Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan nilai dan *share*. Seiring dengan arah pemulihan ekonomi pada tahun 2021, nilai PMTB pun bergerak naik cukup signifikan dibarengi dengan peningkatan share yaitu mencapai 547,91 triliun. Pada tahun 2022, nilai PMTB di Jawa Barat mencapai sebesar Rp576,90 triliun. Dengan nilai sebesar Rp 576,90 triliun, PMTB berkontribusi sebanyak 23,81% terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat, menjadikannya sebagai penopang perekonomian di bawah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor (Sumber: LKPJ DPMPTSP, 2022).

Gambar 2.43
Nilai dan *Share* Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Tahun 2019-2021



Sumber: BPS. 2022

2.4.4 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan *good governance* menuju *clean governance*. Penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), serta ekonomis (hemat dan optimal). Tujuan penataan yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang

profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2019-2021 mempunyai predikat BB. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Provinsi Jawa Barat untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 2018 – 2022 telah melebihi target di angka 78,68. Kabupaten kota di Jawa Barat yang masih berada di atas 60 sebanyak 16 (enam belas) kabupaten/kota dan 11 (sebelas) kabupaten/kota dengan Indeks RB di bawah 60. Pada akhir Kepemimpinan Kepala Daerah target Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang diamanatkan oleh RPJMD adalah A.

Pada akhir tahun 2022 Kementerian PAN dan RB dalam Penganugrahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Provinsi Jawa Barat mendapatkan Nilai RB yang lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu Nilai A. Pencapaian ini juga tidak terlepas dari Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, maka beberapa yang menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah strategi penguatan sistem evaluasi, khususnya untuk perangkat daerah termasuk perangkat daerah di kabupaten/kota, serta penguatan zona integritas.

2.4.5 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel, dan 28 indikator demokrasi. Namun demikian, dalam perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terdapat penyempurnaan hasil kajian revisi IDI (Indikator) dan penajaman indikator revisi dan identifikasi sumber data; dan Simulasi pernghitungan IDI dengan Indikator Revisi. Oleh karena itu, pada tahun 2021 telah dilakukan Finalisasi Indikator Revisi dan Metode Pengukuran yang menjadi 3 (tiga) aspek dan 22 Indikator Demokrasi. Ringkasan Indikator metode baru tersebut meliputi: 1). Aspek Kebebasan terdapat 7 (tujuh) Indikator; 2). Aspek Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator; dan 3). Aspek Lembaga Demokrasi terdapat 8 (delapan) Indikator,

dengan sumber data diperoleh dari Surat Kabar yaitu 5 (lima) Indikator; Dokumen/Sekunder yaitu 18 (delapan belas) indikator; FGD yaitu 5 (lima) indikator dan wawancara mendalam.

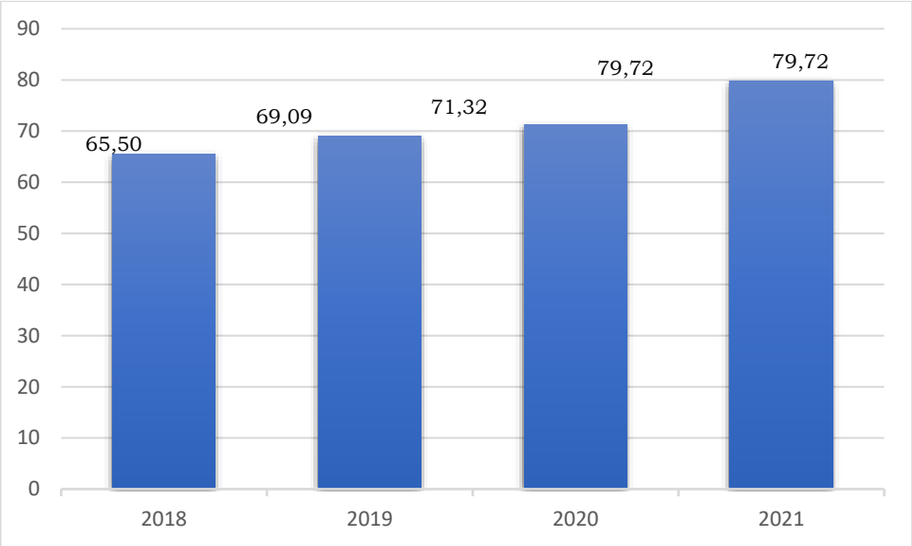
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penguatan aspek IDI di Jawa Barat, bersama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai perangkat daerah yang mendukung terlaksananya fungsi dan kinerja DPRD. Koordinasi terkait pencapaian target IDI di Jawa Barat mencakup 3 (tiga) indikator yaitu persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD; jumlah persentase Perda yang disahkan terhadap target propemperda; dan jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif serta penerimaan aspirasi dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil survei BPS Provinsi Jawa Barat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 nilai IDI Jawa Barat sebesar 65,50 dan tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan. IDI Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai 79,72.

Tingkat demokrasi di Jawa Barat secara umum masih dalam kategori sedang. Aspek Kebebasan memiliki nilai indeks yang paling besar di antara ketiga aspek penyusun IDI Provinsi Jawa Barat tahun 2021 yaitu sebesar 89,71. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi menempati urutan kedua dengan nilai indeks sebesar 77,93. Sedangkan aspek Kesetaraan memiliki nilai indeks yang paling rendah yaitu sebesar 72,99.

Secara nasional, kondisi demokrasi di Jawa Barat berada pada urutan ke 9 (sembilan) dari 34 provinsi di Indonesia. Posisi pertama ditempati oleh DKI Jakarta dan posisi terakhir ditempati oleh Papua. Dalam rangka mempercepat capaian IDI Provinsi Jawa Barat tahun 2023, Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Kelompok Kerja yang terdiri dari beberapa perangkat daerah dan instansi vertikal lain yang berhubungan dengan capaian IDI di Provinsi Jawa Barat. Disamping itu telah ditetapkan Rencana Aksi Daerah yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) indikator. Adapun perkembangan IDI Jawa Barat tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel di bawah.

Gambar 2.44
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat diolah, Tahun 2023

2.4.6 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, alat ukur Indeks kerukunan umat beragama terdiri dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu (1) Toleransi, (2) Kesetaraan, dan (3) Kerjasama. Indek Kerukunan Umat Beragama dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan persoalan kerukunan umat beragama yang dapat menangkal intoleransi dan radikalisme.

Indeks Toleransi menggambarkan kondisi yang berhubungan dengan sikap atau sifat menenggang yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Sedangkan Indeks Kesetaraan menggambarkan kondisi masyarakat akan sikap tingkatan yang sama kepada sesama manusia, memiliki kesempatan yang sama dan perlindungan perbedaan agama. Adapun Indeks Kerjasama menggambarkan kondisi berkenaan tindakan saling bahu membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerja sama. Sehingga menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan.

Berdasarkan hasil survei Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, Indek Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sebesar 68,5 poin. Posisi di tahun 2019 ini masuk dalam kategori rukun. Dalam pencapaian realisasi indeks kerukunan umat beragama Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat mendapatkan skor sebesar 64,41 poin. Capaian ini didorong oleh adanya peningkatan toleransi beragama, kesetaraan dalam kehidupan beragama, dan kerjasama antar umat beragama. Bentuk-bentuk dari upaya tersebut antara lain dialog kerukunan di 6 (enam) kabupaten/kota dan pencanangan 2 (dua) desa sadar kerukunan. Meski demikian, capaian tersebut masih menempatkan Jawa Barat pada urutan 3 (tiga) terbawah secara Nasional. Pada tahun 2021, nilai Indeks KUB masuk pada kategori tinggi dengan nilai 72,7 poin atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya. Skor tersebut diatas rata rata nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional yaitu 72,39 poin dan berada pada posisi 23 dari 34 provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2022 nilai indeks KUB Jawa Barat masuk pada kategori tinggi dengan nilai 72,21 poin.

2.4.7 Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai *grid* yang dapat dipergunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2022, Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Sedang. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Tabel 2.100
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2022

No	Provinsi	Skor	Kelas Rasio
1.	Sulawesi Barat	165,23	TINGGI
2.	Bengkulu	155,35	TINGGI
3.	Kepulauan Bangka Belitung	158,52	TINGGI
4.	Maluku	162,47	TINGGI

No	Provinsi	Skor	Kelas Rasio
5.	Sulawesi Selatan	150,07	TINGGI
6.	Sulawesi Tenggara	155,79	TINGGI
7.	Banten	144,51	TINGGI
8.	Kalimantan Timur	146,67	TINGGI
9.	Kalimantan Utara	157,47	TINGGI
10.	Aceh	149,10	TINGGI
11.	Sumatera Barat	144,39	TINGGI
12.	Riau	141,26	TINGGI
13.	Lampung	142,55	TINGGI
14.	Jawa Barat	131,62	TINGGI
15.	Maluku Utara	149,22	TINGGI
16.	Sumatera Utara	142,51	SEDANG
17.	Sulawesi Tengah	143,44	SEDANG
18.	Kalimantan Selatan	128,81	SEDANG
19.	Papua Barat	146,77	SEDANG
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	119,56	SEDANG
21.	Nusa Tenggara Timur	139,23	SEDANG
22.	Sulawesi Utara	129,62	SEDANG
23.	Sumatera Selatan	132,99	SEDANG
24.	Jambi	133,49	SEDANG
25.	Kalimantan Barat	136,72	SEDANG
26.	Jawa Timur	121,70	SEDANG
27.	Jawa Tengah	115,38	SEDANG
28.	Kalimantan Tengah	123,56	SEDANG
29.	Bali	123,98	SEDANG
30.	Nusa Tenggara Barat	119,83	SEDANG
31.	Gorontalo	120,61	SEDANG
32.	Papua	122,15	SEDANG
33.	Kepulauan Riau	110,93	SEDANG
34.	DKI Jakarta	62,58	SEDANG

Sumber: IRBI Tahun 2023, BNPB

Potret penurunan indeks risiko bencana di beberapa kabupaten/kota Jawa Barat yang rawan bencana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101
Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2021
1	Cianjur	207.13	207.13	215.08	197.08	207,62	TINGGI
2	Garut	190.75	190.75	190.75	192.40	186,61	TINGGI
3	Tasikmalaya	203.01	203.01	203.01	186.51	174,11	TINGGI
4	Sukabumi	208.63	208.63	205.52	185.00	164,91	TINGGI
5	Karawang	175.20	175.20	174.43	165.58	157,81	TINGGI
6	Bandung	175.20	175.20	171.91	168.78	157,25	TINGGI
7	Kota Cirebon	170.79	160.63	160.63	147.51	156,28	TINGGI
8	Subang	174.00	174.00	174.00	161.89	145,94	TINGGI

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2021
9	Cirebon	152.80	152.80	152.80	152.80	145,04	TINGGI
10	Kota Banjar	172.76	172.76	172.76	157.19	141,07	SEDANG
11	Pangandaran	168.52	145.44	145.44	129.21	137,36	SEDANG
12	Majalengka	166.00	166.00	143.43	124.74	136,35	SEDANG
13	Sumedang	163.29	156.23	141.57	122.22	133,52	SEDANG
14	Ciamis	162.00	162.00	142.15	124.39	129,87	SEDANG
15	Purwakarta	138.00	138.00	137.31	124.53	128,98	SEDANG
16	Bogor	131.60	131.60	131.60	123.18	124,95	SEDANG
17	Indramayu	133.03	133.03	132.89	130.11	124,10	SEDANG
18	Bekasi	167.22	167.22	136.79	114.59	122,49	SEDANG
19	Kota Bekasi	136.88	136.88	136.88	125.31	116,54	SEDANG
20	Kuningan	119.20	119.20	119.20	117.37	114,69	SEDANG
21	Kota Bandung	154.00	154.00	131.13	131.13	113,58	SEDANG
22	Kota Tasikmalaya	115.01	110.22	110.22	108.18	108,89	SEDANG
23	Kota Sukabumi	122.32	122.32	122.32	111.32	103,05	SEDANG
24	Bandung Barat	114.40	114.40	114.40	102.67	92,91	SEDANG
25	Kota Cimahi	120.40	120.40	105.41	91.71	82,01	SEDANG
26	Kota Depok	89.63	89.63	89.63	82.56	76,53	SEDANG
27	Kota Bogor	75.75	75.75	75.75	65.38	71,01	SEDANG

Sumber: IRBI Tahun 2023, BNPB
*Catatan: nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

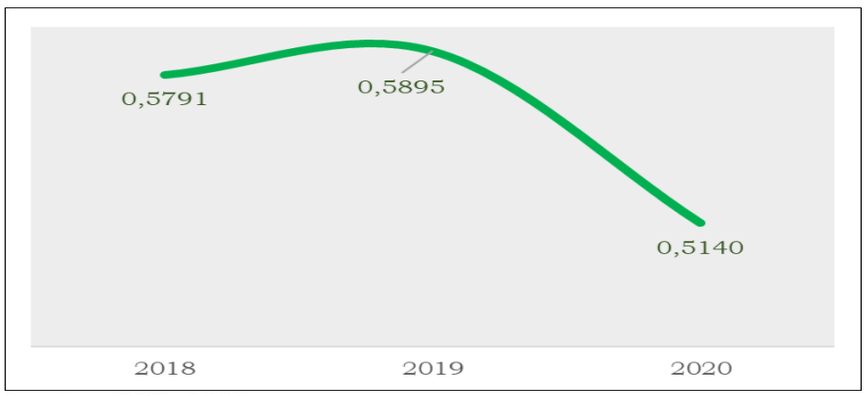
2.4.8 Indeks Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ketidakseimbangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Esensi kemandirian fiskal daerah yaitu pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran).

Perkembangan IKF dari Tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kondisi kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Barat termasuk kategori “Mandiri” (angka indeks berada direntang 0,50≤IKF<0,75). Namun demikian terjadi penurunan angka IKF pada tahun 2020. Hal ini dapat dimaknai dana transfer dari pusat bertambah sementara penerimaan dari PAD berkurang. Kondisi ini merupakan transmisi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian yang terkontraksi cukup dalam yang kemudian berakibat

menurunnya penerimaan pajak daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB).

Gambar 2.45
Indeks Kemandirian Fiskal 2018-2020



Sumber: BPK, 2021

Dalam lingkup kabupaten/kota, angka IKF menunjukkan bahwa berdasarkan kategori kemandirian fiskal daerah terdapat 2 (dua) kelompok kabupaten/kota, yakni kelompok kabupaten/kota dengan kategori IKF "Menuju Kemandirian" (angka indeks direntang 0,25 ≤ IKF < 0,50) dan kelompok kabupaten/kota dengan kategori "Belum Mandiri" (angka indeks direntang 0,00 ≤ IKF < 0,25). Hal ini menandakan semua kabupaten/kota di Jawa Barat belum memiliki kemampuan secara mandiri dalam membiayai belanja pembangunan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai IKF maka semakin mandiri suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.102
Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Bandung	0,1763	0,1789	0,1907
Bandung Barat	0,1623	0,1819	0,1837
Bekasi	0,4032	0,4300	0,4289
Bogor	0,3828	0,3884	0,3656
Ciamis	0,0903	0,0896	0,0968
Cianjur	0,1418	0,1527	0,1466
Cirebon	0,1588	0,1585	0,1635
Garut	0,0979	0,1015	0,1055
Indramayu	0,1258	0,1161	0,1461
Karawang	0,2792	0,2899	0,2980
Kuningan	0,1199	0,1091	0,1076
Majalengka	0,1597	0,1484	0,1515

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Pangandaran	0,0978	0,0779	0,0630
Purwakarta	0,1790	0,1937	0,1948
Subang	0,1411	0,1510	0,1537
Sukabumi	0,1503	0,1525	0,1683
Sumedang	0,1560	0,1495	0,1504
Tasikmalaya	0,0698	0,0752	0,0851
Kota Bandung	0,4329	0,3993	0,3656
Kota Banjar	0,1452	0,1264	0,1500
Kota Bekasi	0,4138	0,4095	0,4024
Kota Bogor	0,3861	0,3763	0,3544
Kota Cimahi	0,2545	0,2518	0,2562
Kota Cirebon	0,3095	0,2814	0,2676
Kota Depok	0,3604	0,3995	0,3971
Kota Sukabumi	0,2961	0,2676	0,2880
Kota Tasikmalaya	0,1520	0,1460	0,1743

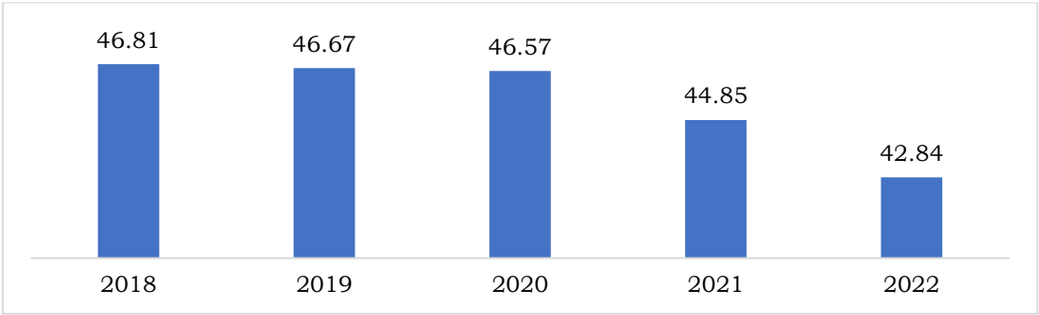
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2022

2.4.9 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Perkembangan rasio ketergantungan selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang positif dimana persentase rasio ketergantungan semakin turun. Hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2022, persentase rasio ketergantungan sebesar 42,84 persen, setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

Gambar 2.46
Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2023

Rasio ketergantungan kabupaten/kota sebagaimana data pada tabel 2.103 memberikan informasi tingkat ketergantungan di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2020, terdapat 6 (enam) kabupaten dengan persentase rasio ketergantungan > 50 persen. Kabupaten Garut menjadi daerah dengan persentase rasio ketergantungan paling tinggi, artinya, penduduk usia produktif di kabupaten Garut beban tanggungannya terhadap penduduk usia belum dan tidak produktif lagi lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Sementara persentase rasio ketergantungan paling rendah terjadi di Kota Bekasi, artinya penduduk usia produktifnya menanggung beban yang lebih kecil. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi produktivitas penduduk dalam kegiatan ekonomi. Semantara untuk tahun 2022, rasio ketergantungan paling rendah yaitu Kota Bekasi dengan rasio ketergantungan hanya sebesar 38,63 persen dan Rasio Ketergantungan yang paling tinggi untuk tahun 2022 yaitu Kabupaten Garut dengan rasio sebesar 47,16 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.103
Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bogor	49,14	48,96	48,83	41,38	41,25
Sukabumi	52,11	51,97	51,90	44,27	44,28
Cianjur	52,13	51,97	51,88	45,83	45,80
Bandung	49,53	49,38	49,27	45,41	45,31
Garut	57,75	57,59	57,50	47,23	47,16
Tasikmalaya	52,55	52,48	52,49	45,56	45,72
Ciamis	49,27	49,26	49,34	46,20	46,53
Kuningan	50,83	50,82	50,89	46,40	46,55
Cirebon	47,16	47,07	47,04	40,81	40,78
Majalengka	48,21	48,19	48,24	42,94	43,10
Sumedang	47,76	47,78	47,87	44,68	46,26

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Indramayu	44,62	44,51	44,48	39,55	39,54
Subang	46,40	46,37	46,41	40,97	41,08
Purwakarta	49,05	48,93	48,86	43,98	43,95
Karawang	44,72	44,61	44,55	41,01	40,95
Bekasi	43,04	42,88	42,75	39,82	39,64
Bandung Barat	51,60	51,49	51,44	44,53	44,52
Pangandaran	46,93	46,91	46,97	44,34	44,60
Kota Bogor	42,11	41,99	41,91	42,65	42,62
Kota Sukabumi	46,86	46,76	46,72	45,37	45,38
Kota Bandung	38,32	38,27	38,25	41,81	41,87
Kota Cirebon	42,72	42,59	42,51	43,46	43,48
Kota Bekasi	36,93	36,74	36,58	38,75	38,63
Kota Depok	40,07	39,91	39,78	41,06	40,94
Kota Cimahi	40,39	40,29	40,22	39,87	39,84
Kota Tasikmalaya	46,72	46,61	46,55	45,54	45,57
Kota Banjar	48,07	48,02	48,05	44,47	44,64
Provinsi Jawa Barat	**46,81**	**46,67**	**46,57**	**42,87**	**42,84**

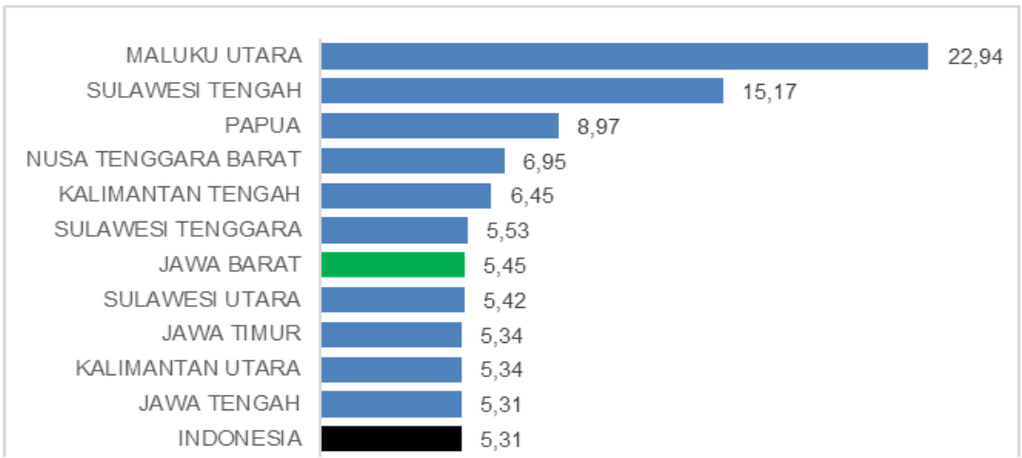
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Kabu/Kota di Jawa Barat Tahun 2023

2.5 Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional

Dalam konstelasi nasional, Jawa Barat turut berperan penting dalam kemajuan pembangunan nasional. Kemajuan pembangunan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator makro pembangunan. Kinerja ekonomi Jawa Barat tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif pasca terkontraksi dampak pandemi COVID-19 pada kuartal I 2020. Kinerja positif ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen. Membaiknya kinerja ekonomi Jawa Barat didorong oleh kinerja positif sektor Industri Pengolahan yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Jawa Barat.

Dibandingkan dengan provinsi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tertinggi ke-7 secara nasional. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua (lihat Gambar 2.46). Dampak kebijakan hilirisasi industri di sektor non migas menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di ketiga provinsi tersebut yang berdampak meningkatnya nilai tambah ekspor.

Gambar 2.47
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2022 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2023

Namun, membaiknya kinerja ekonomi pasca pandemi tidak berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika ketenagakerjaan yang cukup kompleks di Jawa Barat. Selain sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, Jawa Barat dihadapkan pada beban migrasi masuk dari luar daerah yang cukup tinggi. Banyaknya kawasan industri menjadi faktor penarik tingginya migrasi masuk, khususnya ke kabupaten/kota di wilayah Bodebek yang masih menjadi daya tarik bagi para pencari kerja. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi secara nasional.

Tabel 2.104
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Tahun 2018-2022 (persen)

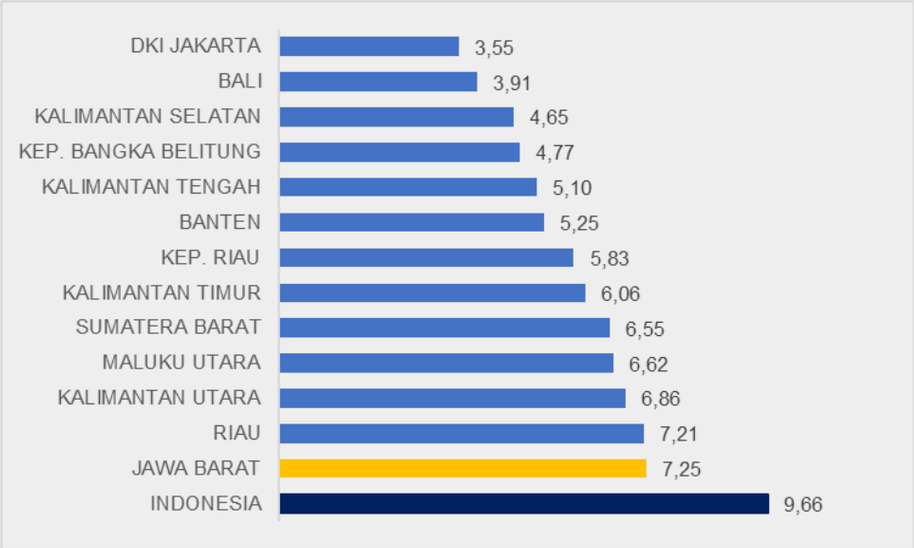
POSISI	PROVINSI	2018	2019	2020	2021	2022
1	SULAWESI BARAT	3,01	2,98	3,32	3,13	2,34
2	GORONTALO	3,70	3,76	4,28	3,01	2,58
3	PAPUA	3,00	3,51	4,28	3,33	2,83
4	NUSA TENGGARA BARAT	3,58	3,28	4,22	3,01	2,89
5	SULAWESI TENGAH	3,37	3,11	3,77	3,75	3,00
6	SULAWESI TENGGARA	3,19	3,52	4,58	3,92	3,36
7	NUSA TENGGARA TIMUR	2,85	3,14	4,28	3,77	3,54
8	BENGKULU	3,35	3,26	4,07	3,65	3,59
9	MALUKU UTARA	4,63	4,81	5,15	4,71	3,98
10	DI YOGYAKARTA	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06
11	KALIMANTAN TENGAH	3,91	4,04	4,58	4,53	4,26

POSISI	PROVINSI	2018	2019	2020	2021	2022
12	KALIMANTAN UTARA	5,11	4,49	4,97	4,58	4,33
13	RIAU	5,98	5,76	6,32	4,42	4,37
14	SULAWESI SELATAN	4,94	4,62	6,31	5,72	4,51
15	LAMPUNG	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52
16	JAMBI	3,73	4,06	5,13	5,09	4,59
17	SUMATERA SELATAN	4,27	4,53	5,51	4,98	4,63
18	KALIMANTAN SELATAN	4,35	4,18	4,74	4,95	4,74
19	KEP. BANGKA BELITUNG	3,61	3,58	5,25	5,03	4,77
20	BALI	1,40	1,57	5,63	5,37	4,80
21	KALIMANTAN BARAT	4,18	4,35	5,81	5,82	5,11
22	PAPUA BARAT	6,45	6,43	6,80	5,84	5,37
23	JAWA TIMUR	3,91	3,82	5,84	5,74	5,49
24	JAWA TENGAH	4,47	4,44	6,48	5,95	5,57
25	KALIMANTAN TIMUR	6,41	5,94	6,87	6,83	5,71
	INDONESIA	**5,30**	**5,23**	**7,07**	**6,49**	**5,86**
26	SUMATERA UTARA	5,55	5,39	6,91	6,33	6,16
27	ACEH	6,34	6,17	6,59	6,30	6,17
28	SUMATERA BARAT	5,66	5,38	6,88	6,52	6,28
29	SULAWESI UTARA	6,61	6,01	7,37	7,06	6,61
30	MALUKU	6,95	6,69	7,57	6,93	6,88
31	DKI JAKARTA	6,65	6,54	10,95	8,50	7,18
32	BANTEN	8,47	8,11	10,64	8,98	8,09
33	KEP. RIAU	8,04	7,50	10,34	9,91	8,23
34	**JAWA BARAT**	**8,23**	**8,04**	**10,46**	**9,82**	**8,31**

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2023

Pada September 2022, perkembangan persentase penduduk miskin masih menunjukkan disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi yang cukup tinggi. Tingkat kemiskinan terendah dialami oleh Provinsi DKI Jakarta diikuti Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Provinsi Papua yang mencapai 27,43 persen disusul oleh Provinsi Papua Barat 22,66 persen dan Nusa Tenggara Timur sebesar 21,03 persen. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat tergolong rendah, jika peringkat mulai dari yang terendah, posisi Jawa Barat berada di peringkat ketiga belas lebih rendah dibanding rata-rata tingkat kemiskinan secara nasional sebesar 9,66 persen.

Gambar 2.48
Tingkat Kemiskinan Provinsi September 2022 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2023

Dua masalah yang umum dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini ratio di Jawa Barat relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain dan capaian nasional. Beberapa faktor yang menjadi determinan ketimpangan distribusi pendapatan antara lain adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, ketimpangan pembangunan antarwilayah dam banyaknya investasi pada proyek padat modal.

Tabel 2.105
Gini Ratio Provinsi September 2022 (poin)

POSISI	PROVINSI	GINI RATIO
1	KEP. BANGKA BELITUNG	0,255
2	KALIMANTAN UTARA	0,270
3	ACEH	0,291
4	SUMATERA BARAT	0,292
5	SULAWEWSI TENGAH	0,305
6	MALUKU	0,306
7	KALIMANTAN TENGAH	0,309
8	KALIMANTAN SELATAN	0,309
9	MALUKU UTARA	0,309

POSISI	PROVINSI	GINI RATIO
10	KALIMANTAN BARAT	0,311
11	LAMPUNG	0,313
12	BENGKULU	0,315
13	KALIMANTAN TIMUR	0,317
14	RIAU	0,323
15	KEP. RIAU	0,325
16	SUMATERA UTARA	0,326
17	SUMATERA SELATAN	0,330
18	JAMBI	0,335
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0,340
20	SULAWESI UTARA	0,359
21	BALI	0,362
22	JAWA TIMUR	0,365
23	SULAWESI SELATAN	0,365
24	JAWA TENGAH	0,366
25	SULAWESI TENGGARA	0,366
26	SULAWESI BARAT	0,371
27	NUSA TENGGARA BARAT	0,374
28	BANTEN	0,377
	INDONESIA	**0,381**
29	PAPUA BARAT	0,384
30	PAPUA	0,393
31	DKI JAKARTA	0,412
32	**JAWA BARAT**	**0,412**
33	GORONTALO	0,423
34	DI YOGYAKARTA	0,459

Dari sisi capaian indeks pembangunan manusia (IPM), kualitas pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat relatif lebih baik jika dibandingkan capaian IPM provinsi tahun 2022. Secara peringkat, Jawa Barat berada di peringkat kesepuluh secara nasional dan lebih tinggi dibanding capaian IPM nasional. Artinya penduduk di Jawa Barat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya lebih baik dibanding provinsi lain. Berdasarkan standar *United Nations Development Programme* (UNDP), capaian IPM tertinggi di Indonesia dialami oleh Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, dimana capaian IPM di kedua provinsi tersebut termasuk dalam kategori “sangat tinggi”.

Tabel 2.106
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 (poin)

PERINGKAT	PROVINSI	2022
1	DKI JAKARTA	81,65
2	DI YOGYAKARTA	80,64
3	KALIMANTAN TIMUR	77,44
4	KEP. RIAU	76,46

PERINGKAT	PROVINSI	2022
5	BALI	76,44
6	SULAWESI UTARA	73,81
7	RIAU	73,52
8	BANTEN	73,32
9	SUMATERA BARAT	72,26
10	**JAWA BARAT**	**73,12**
	INDONESIA	**72,91**

2.6 Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

Capaian indikator makro menjadi tolok ukur pembangunan yang perlu dievaluasi secara periodik untuk mengetahui kinerja sekaligus menjadi masukan bagi perencanaan periode berikutnya. Pada subbab ini disajikan persandingan capaian indikator makro Provinsi Jawa Barat dengan indikator makro nasional mulai tahun 2019 sampai dengan 2022.

Berdasarkan data pada tabel 2.107, diperoleh informasi bahwa:

a. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat selama 4 (empat) tahun terakhir (2019-2022) umumnya mencapai target bahkan lebih tinggi dari yang ditetapkan di RPJMD, kecuali pada tahun 2019. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ditargetkan 5,40-5,80 persen namun terealisasi sebesar 5,07 persen. Sementara itu, perekonomian nasional pada periode yang sama tidak mencapai target kecuali pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan posisi diatas pertumbuhan ekonomi nasional kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, baik di tingkat nasional maupun Jawa Barat mengalami kontraksi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak sangat buruk terhadap perekonomian, yang menyebabkan merosotnya perekonomian Jawa Barat sampai ke minus 2,52 persen dan perekonomian nasional menjadi minus 2,07 persen. Selanjutnya, pada tahun 2022 LPE Jawa Barat jauh diatas target yakni mencapai 5,45 persen. Bahkan angka ini lebih tinggi di bandingkan LPE Nasional yang mencapai 5,31 persen. Nilai LPE nasional tahun 2022 belum mencapai target RKP sebesar 5,4 persen.
b. Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu 2019-2022 di Jawa Barat berfluktuasi, namun tetap berada di bawah tingkat kemiskinan nasional. Akibat pandemi COVID-19, tingkat kemikinan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 10,19 persen dan kemiskinan di Jawa Barat mencapai 8,43 persen. Namun dengan semakin membaiknya

pencegahan dan penanganan COVID-19 serta berbagai upaya pemulihan perekonomian dan dampak pandemi COVID-19 lainnya, menyebabkan menurunnya tingkat kemiskinan Indonesia ke 9,57 persen dan kemiskinan Jawa Barat menjadi 7,98 persen pada tahun 2022. Angka kemiskinan Jawa Barat tahun 2022 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,97 persen.

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dan 2020 lebih rendah dibandingkan angka yang ditargetkan di RPJMD. Namun pada tahun 2021 dan 2022, tingkat kemiskinan berada diatas target RPJMD. Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia pada periode 2019-2021 masih berada pada kondisi yang memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah dalam RPJMN. Namun pada tahun 2022 tingkat kemiskinan nasional berada diatas target yakni mencapai 9,57 persen, walaupun tetap lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat pada Agustus 2021 mencapai 9,82 persen, mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2020 (10,46 persen). Namun TPT tahun 2021 belum dapat kembali ke posisi yang sama sebelum terjadi pandemi yakni 8,04 persen pada tahun 2019. TPT tahun 2019 sampai dengan 2021 di Jawa Barat masih tidak melampaui target yang ditetapkan di RPJMD. Pada tingkat nasional, TPT Indonesia selama kurun waktu 2017 sampai 2021 menunjukkan fluktuasi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun demikian, TPT Indonesia selalu berada di bawah target RPJMN, dan kondisi pada 2021 mencapai 6,49 persen yang berarti lebih rendah dari TPT Jawa Barat.

   Berdasarkan data BPS, TPT Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar 8,38 persen jauh di bawah target di RPJMD (10,16 persen). Hal ini tentu menjadi berita menggembirakan sebab dengan upaya bersama maka TPT tahun 2022 dapat turun dari tahun sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan TPT nasional yang mencapai 5,86 persen, maka TPT Jawa Barat masih lebih tinggi.

d. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Jawa Barat. Dilihat dari trennya, IPM mengalami kenaikan selama periode 2017 sampai 2021 yakni dari 72,03 menjadi 72,45. Pencapaian IPM ini selalu melampaui target yang ditetapkan di RPJMD Jawa Barat. Sementara itu

tren IPM Indonesia juga meningkat walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan di RPJMN untuk tahun 2020 dan 2021.

Capaian IPM Jawa Barat tahun 2022 sebesar 73,12 melampaui target di RPJMD yang ditentukan sebesar 72,57. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan IPM nasional yang mencapai 72,91. IPM nasional melampaui target yang ditetapkan dalam pemuktahiran RKP 2023 yakni 72,73.

e. Rasio Gini Provinsi Jawa Barat periode 2019-2021 mengalami kenaikan pada 2021. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan penduduk Jawa Barat cenderung meningkat. Pada September 2020, nilai Gini Ratio Provinsi Jawa Barat sebesar 0,398 dan naik menjadi 0,406 pada September 2021. Rasio Gini Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dan 2021 lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan di RPJMD, sementara untuk tahun 2020 menunjukkan angka realisasi lebih rendah dibandingkan target. Selanjutnya pada tahun 2022, rasio gini Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 0,412 dan ini berarti target RPJMD tidak tercapai. Gini rasio Jawa Barat memiliki posisi lebih tinggi di bandingkan rasio gini nasional

   Perkembangan Rasio Gini Indonesia selama tiga tahun terakhir selalu berada di bawah 0,4, dengan posisi terakhir tahun 2021 mencapai 0,381. Rasio Gini selama kurun waktu 2017-2021 selalu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN, kecuali pada tahun 2020. Namun data tahun 2022 mencatat rasio gini nasional sebesar 0,381, berarti lebih tinggi dari yang ditargetkan.

f. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik yaitu selalu mencapai atau melampaui target yang ditetapkan di RPJMD. Hal ini menunjukkan semakin baiknya upaya dan komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat Jawa Barat dalam mendukung upaya penuurunan emisi GRK. Sementara indikator Penurunan Emisi GRK di tingkat nasional pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan 2019 yaitu dari 23,46 menjadi 25,51. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 23,55.

Secara rinci target dan realisasi masing-masing indikator makro Indonesia dan Jawa Barat tahun 2019 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.107
Persandingan Capaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022

Nasional									Provinsi Jawa Barat								
Indikator	2019		2020		2021		2022		Indikator	2019		2020		2021		2022	
	Target[1)]	Realisasi	Target[1)]	Realisasi	Target[2)]	Realisasi	Target[3)]	Realisasi		Target[4)]	Realisasi	Target[4)]	Realisasi	Target[5)]	Realisasi	Target[5)]	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,0	5,02	-2,0	-2,07	3,8	3,69	5,4	5,31	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,40-5,80	5,07	-2,63	-2,52	3,15	3,74	3,92	5,45
Tingkat kemiskinan (%)	9,2	9,22	9,7 – 10,2	10,19	9,5–10,1	9,71	8,5–9,0	9,57	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,66-6,90	6,82	8,48	8,43	7,77	7,97	7,67	7,98
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3	5,28	7,07	7,07	6,49	6,49	5,86	5,86	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,00-7,90	8,04	10,58	10,46	10,45	9,82	10,16	8,31
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,92	71,92	71,99	71,94	72,60–72,65	72,29	72,73	72,91	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,42-71,9	72,03	71,82	72,09	72,19	72,45	72,57	73,12
Rasio Gini	0,380	0,380	0,379 – 0,381	0,385	0,377–0,382	0,381	0,376–0,378	0,381	Rasio Gini	0,38-0,39	0,398	0,404	0,398	0,402	0,406	0,400	0,412
Penurunan Emisi GRK (%)	23,46	23,46	25,36	25,51	23,55	23,55	26,87	N/A	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	2,8	3,85	3,82	3,87	4,29	4,29	4,75	5,86

Sumber: - Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
- RPJMN 2020-2024
- Pemuktahiran RKP Tahun 2021, 2022, dan 2023
- BPS RI, 2022

1) Pemuktahiran RKP Tahun 2021, Bappenas
2) Pemuktahiran RKP Tahun 2022, Bappenas
3) Pemuktahiran RKP Tahun 2023, Bappenas
4) RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
5) Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Indikator makro pembangunan di Jawa Barat pada periode 2019-2022 dibandingkan dengan provinsi lain se Indonesia, disajikan berikut ini:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 5,45 persen yang berada pada posisi 7 tertinggi se Indonesia. Ini berarti terjadi peningkatan LPE Jawa Barat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 3,74 persen.
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 berada pada posisi tertinggi se Indonesia. TPT Jawa Barat tahun 2022 mencapai 8,31 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9,82 persen.
c. Posisi relatif angka kemiskinan Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya pada September 2022 berada pada posisi ke-16 persentase kemiskinan terendah. Persentase penduduk miskin yang terendah di Indonesia ditempati Provinsi Bali dengan nilai 4,53 persen dan yang tertinggi Provinsi Papua sebesar 26,8 persen. Jika dilihat dari provinsi yang ada di Pulau Jawa, Jawa Barat menempati posisi ketiga terkecil setelah DKI Jakarta dan Banten.
d. Rasio Gini Jawa Barat berada pada posisi ketiga tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, yakni mencapai 0,412. Dua provinsi dengan rasio gini tertinggi yaitu DI Yogyakarta dengan nilai 0,459 dan Gorontalo sebesar 0,423.
e. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar 73,26. Capaian ini menyebabkan Jawa Barat masuk 10 besar provinsi dengan IPM tertinggi. Sementara IPM Indonesia sebesar 72,91 tepat berada di bawah posisi Jawa Barat.

Capaian beberapa indikator makro diatas menginformasikan bahwa pembangunan Jawa Barat masih perlu memberikan perhatian yang besar terkait masalah pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Berbagai lapangan usaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan dan penghidupan yang layak. Pengendalian tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta kemiskinan diharapkan dapat mendorong pembangunan manusia yang diindikasikan dengan IPM di Jawa Barat.

Tabel 2.108
Perkembangan Indikator Makro Berdasarkan Provinsi Tahun 2019-2022

NO.	PROVINSI	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)				TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)				PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)				RASIO GINI				INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	ACEH	4,14	-0,37	2,79	4,21	6,17	6,20	6,3	6,17	15,01	15,43	15,53	14,75	0,321	0,319	0,323	0,291	71,9	71,99	72,18	72,8
2	SUMATERA UTARA	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,39	5,41	6,33	6,16	8,63	9,14	8,49	8,33	0,315	0,314	0,313	0,326	71,74	71,77	72	72,71
3	SUMATERA BARAT	5,01	-1,62	3,29	4,36	5,38	5,33	6,52	6,28	6,29	6,56	6,04	6,04	0,307	0,301	0,3	0,292	72,39	72,38	72,65	73,26
4	RIAU	2,81	-1,13	3,36	4,55	5,76	5,97	4,42	4,37	6,9	7,04	7	6,84	0,331	0,321	0,327	0,323	73	72,71	72,94	73,52
5	JAMBI	4,35	-0,44	3,66	5,13	4,06	4,19	5,09	4,59	7,51	7,97	7,67	7,7	0,324	0,316	0,315	0,335	71,26	71,29	71,63	72,14
6	SUMATERA SELATAN	5,69	-0,11	3,58	5,23	4,53	4,48	4,98	4,63	12,56	12,98	12,79	11,95	0,339	0,338	0,34	0,33	70,02	70,01	70,24	70,9
7	BENGKULU	4,94	-0,02	3,24	4,31	3,26	3,39	3,65	3,59	14,91	15,3	14,43	14,34	0,329	0,323	0,321	0,315	71,21	71,4	71,64	72,16
8	LAMPUNG	5,26	-1,67	2,79	4,28	4,03	4,03	4,69	4,52	12,3	12,76	11,67	11,44	0,331	0,32	0,314	0,313	69,57	69,69	69,9	70,45
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3,32	-2,3	5,05	4,4	3,58	3,62	5,03	4,77	4,5	4,89	4,67	4,61	0,262	0,257	0,247	0,255	71,3	71,47	71,69	72,24
10	KEP. RIAU	4,83	-3,8	3,43	5,09	7,5	6,91	9,91	8,23	5,8	6,13	5,75	6,03	0,337	0,334	0,339	0,325	75,48	75,59	75,79	76,46
11	DKI JAKARTA	5,82	-2,39	3,56	5,25	6,54	6,22	8,5	7,18	3,42	4,69	4,67	4,61	0,391	0,4	0,411	0,412	80,76	80,77	81,11	81,65
12	**JAWA BARAT**	**5,02**	**-2,52**	**3,74**	**5,45**	**8,04**	**7,99**	**9,82**	**8,31**	**6,82**	**8,43**	**7,97**	**7,98**	**0,398**	**0,398**	**0,406**	**0,412**	**72,03**	**72,09**	**72,45**	**73,12**
13	JAWA TENGAH	5,36	-2,65	3,32	5,31	4,44	4,49	5,95	5,57	10,58	11,84	11,25	10,98	0,358	0,359	0,368	0,366	71,73	71,87	72,16	72,79
14	DI YOGYAKARTA	6,59	-2,68	5,53	5,15	3,18	3,14	4,56	4,06	11,44	12,8	11,91	11,49	0,428	0,437	0,436	0,459	79,99	79,97	80,22	80,64
15	JAWA TIMUR	5,53	-2,33	3,57	5,34	3,82	3,92	5,74	5,49	10,2	11,46	10,59	10,49	0,364	0,364	0,364	0,365	71,5	71,71	72,14	72,75
16	BANTEN	5,26	-3,39	4,44	5,03	8,11	8,11	8,98	8,09	4,94	6,63	6,5	6,24	0,361	0,365	0,363	0,377	72,44	72,45	72,72	73,32
17	BALI	5,6	-9,33	-2,47	4,84	1,57	1,52	5,37	4,8	3,61	4,45	4,72	4,53	0,37	0,369	0,375	0,362	75,38	75,5	75,69	76,44
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,9	-0,62	2,3	6,95	3,28	3,42	3,01	2,89	13,88	14,23	13,83	13,82	0,374	0,386	0,384	0,374	68,14	68,25	68,65	69,46
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5,25	-0,84	2,51	3,05	3,14	3,35	3,77	3,54	20,62	21,21	20,44	20,23	0,355	0,356	0,339	0,34	65,23	65,19	65,28	65,9
20	KALIMANTAN BARAT	5,09	-1,82	4,78	5,07	4,35	4,45	5,82	5,11	7,28	7,24	6,84	6,81	0,318	0,325	0,315	0,311	67,65	67,66	67,9	68,63
21	KALIMANTAN TENGAH	6,12	-1,41	3,4	6,45	4,04	4,10	4,53	4,26	4,81	5,26	5,16	5,22	0,335	0,32	0,32	0,309	70,91	71,05	71,25	71,63
22	KALIMANTAN SELATAN	4,09	-1,82	3,48	5,11	4,18	4,31	4,95	4,74	4,47	4,83	4,56	4,61	0,334	0,351	0,325	0,309	70,72	70,91	71,28	71,84
23	KALIMANTAN TIMUR	4,7	-2,87	2,48	4,48	5,94	6,09	6,83	5,71	5,91	6,64	6,27	6,44	0,335	0,335	0,331	0,317	76,61	76,24	76,88	77,44
24	KALIMANTAN UTARA	6,89	-1,09	3,98	5,34	4,49	6,25	4,58	4,33	6,49	7,41	6,83	6,86	0,292	0,3	0,285	0,27	71,15	70,63	71,19	71,83
25	SULAWESI UTARA	5,65	-0,99	4,16	5,42	6,01	3,15	7,06	6,61	7,51	7,78	7,36	7,34	0,376	0,368	0,359	0,359	72,99	72,93	73,3	73,81

NO.	PROVINSI	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)				TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)				PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)				RASIO GINI				INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
26	SULAWESI TENGAH	8,83	4,86	11,7	15,17	3,11	4,97	3,75	3	13,18	13,06	12,18	12,3	0,33	0,321	0,326	0,305	69,5	69,55	69,79	70,28
27	SULAWESI SELATAN	6,91	-0,71	4,65	5,09	4,62	3,59	5,72	4,51	8,56	8,99	8,53	8,66	0,391	0,382	0,377	0,365	71,66	71,93	72,24	72,82
28	SULAWESI TENGGARA	6,5	-0,65	4,1	5,53	3,52	4,06	3,92	3,36	11,04	11,69	11,74	11,27	0,393	0,388	0,394	0,366	71,2	71,45	71,66	72,23
29	GORONTALO	6,4	-0,02	2,41	4,04	3,76	3,18	3,01	2,58	15,31	15,59	15,41	15,51	0,41	0,406	0,409	0,423	68,49	68,68	69	69,81
30	SULAWESI BARAT	5,56	-2,4	2,56	2,3	2,98	7,08	3,13	2,34	10,95	11,5	11,85	11,92	0,365	0,356	0,366	0,371	65,73	66,11	66,36	66,92
31	MALUKU	5,41	-0,92	3,04	5,11	6,69	4,97	6,93	6,88	17,65	17,99	16,3	16,23	0,32	0,326	0,316	0,306	69,45	69,49	69,71	70,22
32	MALUKU UTARA	6,25	5,35	16,4	22,94	4,81	6,24	4,71	3,98	6,91	6,97	6,38	6,37	0,31	0,29	0,278	0,309	68,7	68,49	68,76	69,47
33	PAPUA BARAT	2,66	-0,76	-0,51	2,01	6,43	3,65	5,84	5,37	21,51	21,7	21,82	21,43	0,381	0,376	0,374	0,384	64,7	65,09	65,26	65,89
34	PAPUA	-15,74	2,39	15,11	8,97	3,51	5,28	3,33	2,83	26,55	26,8	27,38	26,8	0,391	0,395	0,396	0,393	60,84	60,44	60,62	61,39
	INDONESIA	**5,02**	**-2,07**	**3,69**	**5,31**	**5,23**	**6,25**	**6,49**	**5,86**	**9,22**	**10,19**	**9,71**	**9,57**	**0,38**	**0,385**	**0,381**	**0,381**	**71,92**	**71,94**	**72,29**	**72,91**

Sumber: BPS RI, 2023, diolah

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah memasuki tahun terakhir. Pembangunan tahun pertama pada 2019 sampai dengan tahun keempat 2021 telah dilaksanakan. Berdasarkan capaian IKU tahun 2022, diketahui bahwa seluruh indikator memiliki predikat Sangat Tinggi. Predikat Sangat Tinggi memiliki tingkat capaian kinerja 91% ≤ 100%, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Indikator Kinerja Utama yang mencapai target sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi. IKU yang mencapai target tahun 2019 sebanyak 72 persen, lalu meningkat pada tahun 2020 menjadi 100 persen. Indikator yang tercapai sebanyak 100% disebabkan pada tahun 2021 dilakukan perubahan RPJMD yang memuat realisasi sebagai kinerja IKU tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dari 30 IKU sebanyak 28 indikator atau 93,3 persen yang mencapai target sebagaimana dimuat dalam RPJMD. Selanjutnya, pada tahun 2022 hampir seluruh indikator memiliki realisasi yang mencapai target atau bahkan melampaui target. Dari 30 IKU terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target, yaitu Persentase Penduduk Miskin dengan tingkat capaian sebesar 95,96 persen, Indeks Pembangunan Pemuda dengan tingkat capaian 90,38 persen, dan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat capaian sebesar 96,48 persen. Walau demikian, persentasenya sudah cukup tinggi dan mendekati 100 persen.

Informasi lebih rinci mengenai capaian IKU selama periode 2019 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.109
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		
		2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,7	68,60 – 69,00	68,5	68,1	68,50	68,6	70,52	69,10	72,21	104,50
2	Indeks Demokrasi (poin)	65,5	68,79 - 70,78	69,09	70,70	71,32	70,79	79,72	71,79	N/A	N/A
3	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,25	6,66-6,90	6,82	8,48	8,43	7,77	7,97	7,67	7,98	95,96
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	8,23	8,00-7,90	8,04	10,58	10,46	10,45	9,82	10,16	8,31	118,21
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,76	73,67 – 74,87	72,85	72,82	73,04	73,06	73,23	73,09	73,52	100,59
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	70,2	70,34	69,48	69,48	70,24	69,6	70,24	69,80	70,62	101,17
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	89,19	89,32	89,26	89,26	89,2	89,3	89,36	89,42	89,80	100,42
8	Rata–Rata Lama Sekolah (tahun)	8,18	8,28	8,37	8,35	8,55	8,58	8,61	8,60	8,78	102,09
9	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,45	13,15	12,48	12,2	12,5	12,52	12,61	12,	12,62	105,17
10	Indeks Pembangunan Pemuda (poin)	49	53,63	50,00	49,00	48,83	50	47,00	52,00	47	90,38
11	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	N/A*	16,63	17,43	8,07	17,86	19,56	19,56	24,89	30,36	121,98
12	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	69,61	70,00-71,00	77,5	70	88,4	72	87,50	74,00	87,50	118,24
13	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.231	1.300	1.302	1.000	1.146,60	1.050	1280,53	1.100	1.337,16	121,56
14	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	41	41,00 – 43,00	46,13	38	39,06	41	43,51	44,00	53,20	120,91
15	Indeks Desa Membangun (poin)	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,7	0,72	0,71	0,7529	106,04
16	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan)	0	0	0	1	3	0	0	1	3	300,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		
		2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	49,54 (metode baru)	49,76	52,12	60,57	61,59	60,78	60,78	61,19	64,66	105,67
18	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	2,38	2,8	3,85	3,82	3,87	4,29	4,29	4,75	5,86	123,37
19	Indeks Penggunaan Air (poin)	N/A*	1,1923	1,1920	1,1927	1,1927	1,1922	1,1913	1,1912	1,1878	100,29
20	Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	166	165	152,13	150,45	145,81	149	134,94	147	131,62	110,46
21	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (poin)	89,0	82,4	84,8	83,2	84,1	84	87	84,80	87,00	102,59
22	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak*	N/A	-	-	50,6	52,28	51,7	53,14	52,80	53,37	101,08
23	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	110,9	113,11	112,36	101,12	101,41	102,25	97,93	103,39	99,75	96,48
24	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen)	2,85	2,30-3,00	6,84	2,65	2,85	2,91	2,91	2,99	3,01	100,67
25	Laju pertumbuhan Sektor Industri (persen)	6,49	2,63	4,04	(-4,49)	-4,22	2,78	2,78	3,40	7,00	205,88
26	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen)	4,19	3	7,51	-7,96	-7,94	3,23	3,19	4,01	4,22	105,24
27	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	473	495,4	535,72	490,16	493,96	501,52	501,52	515,31	576,90	111,95
28	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (persen)	20,1	21	21,1	19	19,41	19,9	21,67	20,50	21,62	105,46
29	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB	BB	BB	BB (78,01)	BB**	BB (78,01)	BB (78,01)	A	A	100
30	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen)	N/A*	50	61,22	54	73,43	56	56	58	86,50	149,14

Sumber: - Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

- BPS Provinsi Jawa Barat, 2022
- Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2021
- Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari misi RPJMD. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator dan target per tahun untuk mengukur kinerja pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh target indikator tujuan RPJMD dapat tercapai, dan hanya 2 indikator yang belum tercapai yaitu Indeks Demokrasi dengan tingkat capaian 97,72 persen dan Indeks Williamson dengan tingkat capaian 95,78 persen. Sementara tingkat capaian indikator sasaran RPJMD yang juga menjadi IKU, hampir seluruhnya tercapai. Hanya 3 (tiga) indikator sasaran yang tidak tercapai. Target dan realisasi serta tingkat capaian dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran RPJMD mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.110
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL		2019			2020			2021			2022		
				2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI																	
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban																	
1.1.	**Terwujudnya manusia yang ber-Ketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial**		**Indeks Demokrasi (poin)**	**68,78**	**73,91**	**68,79 - 70,78**	**69,09**	**100,44**	**70,7**	**69,09**	**97,72**	**70,79**	**79,72**	**112,61**	**71,79**	**N/A**	**N/A**
1.1.1.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,5	68,7	68,60 – 69,00	68,5	99,85	68,1	68,5	100,59	68,6	72,7	**105,98**	69,1	72,21	104,50
		b.	Indeks Demokrasi (poin)	68,78	65,5	68,79 - 70,78	69,09	100,44	70,7	71,32	100,88	70,79	79,72	112,61	71,79	N/A	112,16
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif																	
2.1.	**Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat**	**a.**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)**	**70,69**	**71,3**	**71,42-71,91**	**72,03**	100,85	**71,82**	**72,09**	**100,38**	**72,19**	**72,45**	100,36	**72,57**	**73,12**	100,76
2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,83	7,25	6,66-6,90	6,82	101,16	8,48	7,88	107,08	7,77	8,4	92,50	7,67	8,06	95,16
		b	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	8,22	8,17	8,00-7,90	8,04	99,5	10,58	10,46	101,13	10,45	9,82	106,42	10,16	8,31	122,26
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,47	72,76	73,67 – 74,87	72,85	98,89	72,82	73,04	100,3	73,06	73,23	100,23	73,09	73,52	100,59
2.1.3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	70,04	70,2	70,34	69,48	98,78	69,48	70,24	101,09	69,6	70,62	101,47	69,8	71,22	102,03
		b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	89,18	89,19	89,32	89,26	99,93	89,26	89,2	99,93	89,3	89,36	100,07	89,42	89,8	100,42
2.1.4.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a.	Rata–Rata lama sekolah (tahun)	8,14	8,18	8,28	8,37	101,09	8,35	8,55	102,4	8,58	8,61	100,35	8,6	8,78	102,09
		b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	12,88	13,15	12,48	94,9	12,2	12,5	102,46	12,52	12,61	100,72	12,54	12,62	100,64
2.1.5.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga, dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (poin)	46,33	49	53,63	50	93,23	49	48,83	99,65	50	49	98,00	52	48	92,31
2.2.	**Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasiskan kearifan dan nilai budaya lokal**	**a.**	**Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)**	**N/A**	**N/A**	**16,63**	**17,43**	**104,81**	**8,07**	**17,86**	**221,31**	**19,56**	**24,78**	126,69	**24,89**	**30,36**	121,98

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL		2019			2020			2021			2022		
				2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.1.	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	N/A	N/A	16,63	17,43	104,81	8,07	17,86	221,31	19,56	24,78	126,69	24,89	30,36	121,98
2.2.2.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (poin)	69,58	69,61	70,00-71,00	77,5	110,71	70	88,4	126,29	72	87,5	121,53	74	87,5	118,24
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah																	
3.1.	**Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan**		**Indeks Williamson (poin)**	**0,678**	**0,673**	**-**	**0,665**	**-**	**0,664**	**0,692**	**95,78**	**0,659**	**0,667**	**98,80**	**0,655**	**0,670**	**97,76**
3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.155	1.231	1.300	1.302	100,15	1.000	1.146,60	114,66	1.050	1.280,53	121,96	1.100	1.337,16	121,56
3.1.2.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (persen)	40,9	41	41,00 – 43,00	46,13	112,51	38	39,06	102,79	41	43,51	106,12	44	53,2	120,91
3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun (poin)	0,64	0,64	0,65	0,67	103,08	0,68	0,69	101,47	0,7	0,72	102,86	0,71	0,7529	106,04
3.1.4.	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a.	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan)	0	0	0	0	100	1	3	300	0	2	200,00	1	3	300,00
3.2.	**Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**a.**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)**	**51,85 (metode lama)**	**49,54 (metode baru)**	**49,76**	**52,12**	**104,74**	**60,57**	**61,59**	**101,68**	**60,78**	**62,69**	**103,14**	**61,19**	**64,66**	**105,67**
3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	52,12	104,74	60,57	61,59	101,68	60,78	62,69	103,14	61,19	64,66	105,67
		b.	Tingkat upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	2,02	2,38	2,8	3,85	137,5	3,82	3,87	101,31	4,29	4,23	101,42	4,75	5,86	81,06
		c.	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (persen)	n/a	n/a	-	-		50,6	52,28	103,32	51,7	53,14	102,79	52,8	53,14	100,64
3.2.2.	Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air (poin)	N/A	N/A	1,192	1,192	99,97	1,1927	1,1927	100	1,1922	1,1913	99,92	1,1912	1,1878	99,71
3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	166	166	165	152,13	92,2	150,45	145,82	96,92	149	134,94	110,42	147	131,69	111,63

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		KONDISI AWAL		2019			2020			2021			2022		
				2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan																	
4.1.	**Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi**	**a.**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (persen)**	**5,33**	**5,66**	**5,40-5,80**	**5,07**	**93,89**	**-2,63**	**-2,52**	**104,18**	**3,15**	**3,74**	118,73	**3,92**	**5,45**	139,03
4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang mandiri	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (poin)	85,2	89	82,4	84,8	102,91	83,2	84,1	101,08	84	84,1	100,12	84,80	92,30	108,84
		b.	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	108,39	110,9	113,11	112,36	99,34	101,12	101,41	100,29	102,25	97,84	95,69	103,39	99,75	96,48
4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen)	2,71	2,85	2,30-3,00	6,84	297,39	2,65	2,85	107,55	2,91	2,84	97,59	2,99	3,01	100,67
4.1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri (persen)	5,35	6,49	2,63	4,04	153,61	-4,49	-4,22	106,01	2,78	4,22	151,80	3,4	7	205,88
		b.	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen)	4,55	4,19	3	7,51	250,33	-7,96	-7,94	99,75	3,23	3,19	98,76	4,01	4,22	105,24
4.1.4.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	449,37	473	495,4	535,72	108,14	490,16	493,96	100,78	501,52	547,93	109,25	515,31	576,9	111,95
		b.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (persen)	18,06	20,1	21	21,1	100,48	19	19,41	102,16	19,9	21,67	108,89	20,5	21,62	105,46
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota																	
5.1.	**Terwujudnya *good governance* dan *whole of government***	**a.**	**Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**100**	**BB -78,01**	**BB**	**100**	**BB 78,01**	**BB 78,68**	**100,86**	**A 82,01**	**A**	**100**
5.1.1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	b.	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB	BB	BB	BB	100	BB -78,01	BB	100	BB 78,01	BB 78,68	100,86	A 82,01	**A**	100
5.1.2.	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	a.	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen)	N/A	N/A	50	61,22	122,44	54	73,43	135,98	56	80,24	143,29	58	86,5	149,14

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; LKPJ Provinsi Jawa Barat Tahun 2021; Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; dan BPS RI, diolah

2.7 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Deevelpoment Goals* (SDGs)

Amanat pelaksanaan TPB di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No one Left Behind*". TPB terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan TPB/SDGs, meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Laporan Evaluasi dan Monitoring SDGs Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diperoleh gambaran pelaksanaan SDGs, sebagai berikut:

Pada Tujuan 1, Tanpa Kemiskinan. Upaya mengakhiri kemiskinan menghadapi tantangan berupa kenaikan tingkat kemiskinan selama masa pandemi COVID-19 dari sebesar 6,91 persen pada Tahun 2019 meningkat menjadi 7,88 persen pada Tahun 2020. Selain itu, usaha untuk menekan tingkat kemiskinan juga telah dilakukan dengan mendorong proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan yang telah mencapai 79,86 persen atau melebihi target 71,52 persen pada tahun 2020.

Pada Tujuan 2, Tanpa Kelaparan. Upaya menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan menjaga gizi yang baik di tengah pandemi masih mencatatkan pencapaian yang positif. Meski pandemi COVID-19 dikhawatirkan memengaruhi capaian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tetap berupaya melakukan percepatan penurunan *stunting*.

Penurunan prevalensi *stunting* di Jawa Barat dari 2013-2019 kurang lebih 9,1 persen dan rata-rata penurunan sebesar 1,51 persen per tahun.

Pada Tujuan 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Adanya pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang cukup berat untuk ketercapaian pada tujuan ini. Selain tingkat penularan yang tinggi, jumlah tenaga kesehatan yang mampu menangani masyarakat juga tidak seimbang. Pada tahun 2020 hanya terdapat 21 dokter umum per 100.000 penduduk. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan sangat diperlukan untuk menekan laju penularan. Masalah lainnya yaitu adanya pembatasan sosial yang menyebabkan sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Untuk itu, diperlukan kesadaran bersama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M selama pandemi COVID-19 agar tujuan ketiga dapat tercapai pada tahun 2030.

Pada Tujuan 4, Pendidikan Berkualitas. Upaya mewujudkan pendidikan bahwa pada tahun 2020 dari 5 (lima) target dan 11 (sebelas) indikator yang ada pada Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) telah dilakukan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, seperti melalui program Pendidikan Menengah dan Khusus, Program Peningkatan Mutu Pendidikan, dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Disamping itu pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan peningkatan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, bantuan BOS serta bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

Pada Tujuan 5, Kesetaraan Gender. Upaya mewujudkan kesetaraan gender menunjukkan tren positif bahwa pada tahun 2020, masih saja terjadi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan yang dilakukan oleh orang lain selain pasangan. Sebagian besar dialami oleh perempuan dewasa/anak yang belum kawin/belum pernah punya pasangan. Dan Selama kurun waktu 2016- 2020 di Jawa Barat terjadi tren penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertamanya sebelum umur 15 tahun. Hal ini menunjukkan semakin rendah terjadinya perkawinan dini pada anak.

Pada Tujuan 6, Air Bersih dan Sanitasi Layak. pada tahun 2020 dari 4 (empat) target dan 10 (sepuluh) indikator yang ada pada Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak. Persentase rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih banyak yang tidak memiliki akses terhadap layanan

sumber air minum layak daripada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki pada tahun 2020.

Pada Tujuan 7, Energi Bersih dan Terjangkau. Upaya mewujudkan energi bersih dan terjangkau mengalami tantangan berupa penurunan konsumsi listrik per kapita, Pada tahun 2020, hampir seluruh rumah tangga di Jawa Barat telah memilik akses listrik, baik listrik PLN maupun Non-PLN. Terdapat 99 dari tiap 100 rumah tangga di Jawa Barat telah berlistrik. Konsumsi listrik per kapita terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita mencapai 1,146.60 KWh, turun 155 KWh dari tahun sebelumnya. Namun angka ini belum mencapai target konsumsi listrik sebesar 1,553 KWh.

Pada Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. pada tahun 2020 dari 6 target dan 13 indikator yang ada pada Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, untuk Laju pertumbuhan PDB per kapita menunjukkan tren yang fluktuatif sejak 2018. Nilai negatif pada 2020 sebesar -3,65 persen berarti standar hidup ratarata penduduk menurun. Hal ini dipengaruhi adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Begitu pula PDRB per kapita menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Namun pada 2020, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan angka PDB per kapita menurun menjadi 41.81 juta rupiah dibawah nasional.

Pada Tujuan 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Upaya mewujudkan industri, infrastruktur, dan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan turut terdampak dari ekses kontraksi ekonomi. tahun 2020 dari 4 target dan 7 indikator yang ada pada Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, dengan mobilitas penumpang rute antar daerah di Jawa Barat yang datang dan berangkat lebih banyak yang menggunakan moda transportasi penyebrangan laut, danau maupun sungai.

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB memiliki cenderung menurun selama 2016- 2020 akan tetapi di tahun 2020 memiliki kenaikan Hal ini menunjukkan kontribusi *output* industri terhadap perekonomian melemah. Dan laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur pada 2020 menunjukkan nilai negatif sebesar minus 4,22 persen. Hal ini salah satunya dipengaruhi adanya pandemi COVID-19 sehingga terjadi penurunan *output* manufaktur.

Pada Tujuan 10, Berkurangnya Kesenjangan. Pada tahun 2020 dari 3 target dan 7 indikator yang ada pada Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan, secara umum, rasio gini di Jawa Barat cenderung menurun dari tahun 2015 hingga 2020. Sedangkan jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan lebih tinggi daripada rasio gini di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tinggal di perdesaan lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Pada September 2020, ada 13 dari 100 penduduk yang tinggal di perdesaan serta 7 dari 100 penduduk yang tinggal di perkotaan yang hidup di bawah garis kemiskinan Jawa Barat Pada Tujuan 11, Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Pembatasan aktifitas masyarakat selama Pandemi COVID-19 mempengaruhi indikator persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan dari 4 target dan 4 indikator yang ada pada Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Pada tahun 2020 di Jawa Barat rumah tangga telah memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau sebesar 52,28 persen. Namun demikian masih terdapat kesenjangan akses terhadap hunian layak dan terjangkau untuk di Jawa Barat.

Dari total sampah yang dihasilkan telah terkelola pada tahun 2020 sebesar 35,58 jauh dari target. Akses terhadap pengelolaan sampah terus diupayakan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kualitas lingkungan.

Pada Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Di saat sebagian orang mengalami kelaparan, di sisi lain beberapa orang membuang sisa makanannya. Kondisi ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam hal produksi dan konsumsi. Dan dengan banyak industry di area Jawa Barat untuk limbah berbahaya sangat berdampak buruk baik bagi makhluk hidup maupun lingkungan. Oleh sebab itu, limbah berbahaya yang dihasilkan harus diminimalisir dan ditangani/diolah sesuai aturan. Di Jawa Barat daur ulang sampah atau pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan sangat berarti bagi lingkungan sekitar. Pada tahun 2020, sebanyak 8,5 juta ton sampah didaur ulang. Angka tersebut mengalami kenaikan dari 2019 yang tercatat sebesar 8,08 juta ton. Selain peningkatan

daur ulang, substitusi ramah lingkungan seperti penggunaan kantong belanja untuk menggantikan plastik juga perlu ditingkatkan.

Pada Tujuan 13, Penangangan Perubahan Iklim. Penanganan perubahan iklim, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari 2 target dan 5 indikator yang ada pada Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim. Pada tahun 2020, pemerintah daerah telah mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak pemerintah daerah yang telah memiliki kebijakan, strategi, dan rencana aksi penanggulangan bencana yang sejalan dengan strategi nasional.

Pada Tujuan 14, Ekosistem Lautan, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari 3 target dan 4 indikator yang ada pada Tujuan 14 Ekosistem Lautan. Dari Indikator yang menjadi target belum memiliki informasi terkait data tersebut, padahal ditinjau dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat 3 Program yang tertuang dalam RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2018 telah dilaksanakan 2 (dua) program yang mencakup 6 (enam) kegiatan. Program tersebut adalah: 1). Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan 2). Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Pada Tujuan 15, Ekosistem Daratan, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari 6 (enam) target dan 9 (sembilan) indikator yang ada pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan, perlu perhatian khusus. Indikator yang sudah tercapai adalah tutupan Hutan. Ditinjau dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dari Program-program yang tertuang dalam RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2018 telah dilaksanakan programnya belum mendapatkan informasi terkait capaiannya. Antara lain Program tersebut adalah: 1). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta 2). Program Pengembangan, Pemanfaatan, Rehabilitasi dan Pengamanan Kawasan Hutan.

Pada Tujuan 16, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, bahwa pada tahun 2020 dari 4 target dan 11 indikator yang ada pada Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota semakin banyak instansi pemerintah mendapat opini WTP yang dibarengi dengan skor SAKIP instansi pemerintah pada level provinsi dan kabupaten sekarang lebih baik.

Instansi pemerintah pada level provinsi memiliki indeks RB yang jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang didukung dengan instansi pemerintah pada kabupaten.

Namun berdasarkan hasil pemilu 2019, sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) dari setiap 10 (sepuluh) anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah perempuan, walaupun syarat keterwakilan perempuan sudah terpenuhi namun target keterwakilan perempuan di parlemen untuk Provinsi Jawa Barat belum memenuhi target yang diharapkan.

Tidak terdapat perbedaan cakupan pencatatan kelahiran anak perempuan dan anak laki-laki pada kelompok penduduk 40 persen pendapatan terendah dengan proporsi anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan.

Pada Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari 1 target dengan 2 indikator yang ada pada Tujuan 17 Kemitraan Global Untuk Mencapai Tujuan, Pandemi COVID-19 di tahun 2020 membawa dampak terhadap penurunan proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDRB yang menyentuh titik terendah selama 6 (enam) tahun terakhir. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2015 walupun telah memenuhi target di Tahun 2020, dimana pandemi membuat penerimaan pajak mengalami penurunan yang lebih dalam di tahun 2020. Lebih rinci mengenai pencapaian setiap indikator SDGs pada tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.111
Capaian Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

KODE	TPB/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	**TANPA KEMISKINAN**			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,27	7,88
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	71,52	79,86
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	40,84	50,12
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Jiwa	392.904,00	1.632.037,00
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	84,01	82,09
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase	95,30	54,36
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada	Persentase	79,80	69,19

KODE	TPB/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
	Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.			
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase	79,14	94,37
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase	66,23	60,14
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase	0,00	11,08
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Persentase	98,79	98,37
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Persentase	91,58	82,06
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Persentase	73,82	57,90
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahundengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase	89,00	79,54
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persentase	99,88	99,99
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	NA	NA	NA
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	NA	NA	NA
2	**TANPA KELAPARAN**			
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%) (Gizi Kurang)	Persentase	11,64	10,80
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%) (Gizi Buruk)		2,62	3,60
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%) (Kekurangan Gizi)		14,25	12,37
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Presentase desa	9,50	5,79
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Persentase	11,93	7,51
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persentase	34,49	30,80
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persentase	12,63	NA
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	21,40	NA
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persentase	27,10	NA
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase	61,89	44,67
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persentase	86,00	NA
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	rupiah per tenaga kerja	65.810,26	524.186,72
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	komoditas ternak	30,00	NA
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Persentase	12,00	NA
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko	Persentase	4,00	NA

KODE	TPB/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
	kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.			
3	**Kehidupan Sehat dan Sejahtera**			
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	100.000/kelahiran hidup	85,00	85,77
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persentase	90,00	93,00
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persentase	84,01	86,88
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Persentase	32,00	3 per 1.000 kelahiran hidup
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1000/ kelahiran hidup	12,00	2953/ 3,4 per 1.000 kelahiran hidup
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1000/ kelahiran hidup	5,00	2760/ 3,18 per 1.000 kelahiran hidup
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada	Persentase	90.5	NA
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Persentase	0,45	0,01
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yangmencapai eliminasi malaria	Kabupaten / Kota	24,00	25,00
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	Persentase	5.95	NA
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persentase	32,00	NA
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persentase	6.33	NA
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannyayang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Persentase	59,50	58,55
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persentase	79.8	80,89 (128,66%)
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern		21,16	21,97
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)		35,00	36,00
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Persentase	2,16	2,21
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Persentase	5,12	5,87
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Persentase	90,00	NA
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persentase	90,00	75,91
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase	41,87	32,55
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase	82,83	96,83
4	**Pendidikan Berkualitas**			
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase	82,30	97,24
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase	85,60	88,18

KODE	TPB/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persentase	83,20	94,04
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persentase	106,20	104,72
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Persentase	102,87	91,75
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	Persentase	90,51	78,26
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase	9,04	8,96
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak	Persentase	77,55	35,46
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Persentase	27,20	25,75
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	Persentase	98,38	99,44
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat;	Persentase	80,60	98,30
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/sederajat;	Persentase	57,68	98,59
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persentase	26,07	102,11
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase	99,62	98,63
5	**Kesetaraan Gender**			
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Persentase	0,00	NA
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persentase	0.01%	NA
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persentase	100.00	NA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persentase	12,33	11,96
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Persentase	95,14	78,26
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persentase	19,32	20,83
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persentase	45,12	31,44
6	**Air Bersih dan Sanitasi Layak**			
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase	80,00	93,42
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Persentase	38.42	NA
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase	72,56	71,40
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	desa/kelurahan	5.962,00	NA
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	desa/kelurahan	1.769,00	5.248,00
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Kabupaten / Kota	27,00	27,00

KODE	TPB/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Persentase	176.90	NA
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Kabupaten / Kota	27,00	27,00
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Persentase	19.84	NA
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Titik Pengambilan Air tanah	1.760,00	NA
7	**Energi Bersih dan Terjangkau**			
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	persentase	100,00	99,99
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	kWh	1.553,00	1.146,60
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Sambungan	2.022,00	88,92 (Persen)
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	persentase	88,77	89,05
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	persentase	14,37	41,00
7.3.1*	Intensitas energi primer.	TOE/Milyar Rp	24,30	NA
8	**Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**			
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	Persentase	>5	-3,65
8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	Juta Rupiah	44,08	41,81
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persentase	44,26	48,82
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase	53,64	44,41
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persentase	88,95	85,80
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Orang	22.096,00	NA
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rupiah	20.942,00	19.078,00
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase	8,55	10,46
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Persentase	6,30	10,31
8.6.1*	Persentase usia muda (15- 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persentase	25,52	29,33
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	orang per tahun	6.633.751,00	1.212.589
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	orang per tahun	79.386.257,00	48.147.221,00
8.10.1*	Jumlah kantor bank		5.147,00	
9	**INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASRUKTUR**			
9,1,2,(b)	Jumlah dermaga penyeberangan,	Unit	3	3
9,1,2,(c)	Jumlah pelabuhan strategis,	Lokasi	10	10
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Persentase	43	42,21
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persentase	18,44	-4,22
9.4.1(a)	Persentase Perubahan EmisiCO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Persentase	1,84	1,84
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayanimobile broadband.	Persentase	66,95	67,72
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persentase	41,80	62,64
10	**BERKURANGNYA KESENJANGAN**			
10.1.1*	Koefisien Gini.	Persentase	0,379	0,40
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase	6,27	7,88

KODE	TPB/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	680	121
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Persentase	23,92	27
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Pengaduan	100	69,57
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Kasus	25	n.a
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persentase	40,84	50,12
11	**KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN**			
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persentase	95,70	52,28
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	kota/kawasan	1	4
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	35.000 (71,0)	n.a
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase	74	69,69
12	**KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN**			
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Kegiatan / Usaha	410	n.a
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Perusahaan	n.a	n.a
12.5.1	Jumlah TPS3R yang dibangun	Unit	168	203
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		8.084.703,63	8.558.445,92
2.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Persentase	100	100
13	**PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM**			
13.1.1*	Dokumen strategi penguranganrisiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	7	8,34
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	35.000 (71,0)	n.a
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	Dokumen	9	n.a
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunanemisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	9	n.a
13.2.2.	Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK	Kab/Kota	8	n.a
14	**EKOSISTEM LAUTAN**			
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Dokumen	0	n.a
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Ribu Hektar	34,96	n.a
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dokumen	1	n.a
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Orang	8000	n.a
15	**EKOSISTEM DARATAN**			
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase	22,02	14
15.1.2.	Luas taman kehati	Ha	154	n.a
15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase	5,85	n.a
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase	6,9	n.a
15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase	5,85	n.a

KODE	TPB/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase	6,9	n.a
15.4.1.	Persentase Tutupan Hutan	Persentase	33,56	40,52
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dokumen	1	n.a
15.a.1.	Anggaran pemerintah daerah untuk konservasi dan keanekaragaman hayati	Rupiah	Rp.12,000 ,00	n.a
16	**PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH**			
16.3.1.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki mudaumur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Persentase	29,15	n.a
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Perkara	70	n.a
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini WajarTanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Predikat	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan SistemAkuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai (Predikat)	86,7 (A)	A
16.6.1.(d)	Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Nilai (Kategori)	83,7	BB (<80)
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persentase	30	21,37
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase	35	n.a
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	Indeks	55,78	73,01
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks	70,67	69,57
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	Indeks	80,37	71,64
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persentase	89,4	85,72
17	**KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN**			
17.1.1*	Total pendapatan pemerintahsebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Persentase	0,88	0,85
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persentase	0,82	0,92

Sumber: Laporan Evaluasi dan Monitoring SDGs Tahun 2020

Berdasarkan rekapitulasi tabel di atas, dapat diperoleh informasi pencapaian indikator SDGs setiap tujuan. Pada tahun 2020, sebanyak 57 indikator yang sudah tercapai, 5 (lima) indikator yang akan tercapai, dan 48 indikator yang perlu perhatian khusus. Secara rinci disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.112
Status Pencapaian Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah Indikator		
		Sudah Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Perhatian Khusus
1	Tanpa Kemiskinan	6	1	8
2	Tanpa Kelaparan	1	0	7
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13	1	3
4	Pendidikan Berkualitas	7	2	5
5	Kesetaraan Gender	1	1	2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	0	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	3
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1	0	10
9	Industri, Inovasi Dan Infrasruktur	5		2
10	Berkurangnya Kesenjangan	3		3
11	Kota Dan Permukiman Berkelanjutan	1		2
12	Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan	3		
13	Penanganan Perubahan Iklim	1		
14	Ekosistem Lautan			
15	Ekosistem Daratan	1		1
16	Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh	6		1
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	2		
	JUMLAH	**57**	**5**	**48**

Sumber: Laporan Evaluasi dan Monitoring SDGs Tahun 2020

2.8 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Perubahan dasar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, telah dilakukan penyempurnaan pada beberapa aspek, yaitu 1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, dan 2) Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Ngara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian dalam penyajian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal yang harus diampu oleh Pemerintah Provinsi.

2.8.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas Pendidikan menengah; dan Pendidikan khusus. SPM bidang Pendidikan di Provinsi

Jawa Barat diselenggarakan oleh 1 (satu) perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yakni Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; dan
2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus.

Capaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.113
Hasil Capaian Target SPM Pendidikan Penerima Layanan Dasar
Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH /TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK / Paket C /MA/MAK)	2,054,146	1,881,305	91.59	100.00	91.59	91.59	91.59	Sangat Tinggi
2	Pendidikan Khusus	30,251	26,987	89.21	100.00	89.21	89.21	89.21	Sangat Tinggi

Untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat alokasi anggaran untuk urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.114
Alokasi Anggaran untuk SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	9.567.692.259.995
2	Belanja Modal	1.121.618.694.286

Sumber: DPPA Dinas Pendidikan Tahun 2022

2.8.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi; dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi. SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yakni Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, seluruhnya tercapai 100% yakni sebagai berikut:

Tabel 2.115
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2022 (%)	Target Realisasi 2022 (%)
1	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan /atau berpotensi bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 % (135.147 Jiwa)	100 % terlayani (135.147 Jiwa)
2	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Jumlah Warga Negara pada Kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%
		Difteri	100% Difteri = 29 Kasus	100% Difteri = 29 Kasus
		Keracunan makanan	Terjadi 7 kali keracunan Makan di Kab. Tasikmalaya 1 kali, Kab. Cianjur 1 kali, Kab. Cirebon 1 kali, Kab. Garut 1 kali, Kab. Indramayu 1 kali dan Kab. Sukabumi 2 kali dengan	Terjadi 7 kali keracunan Makan di Kab. Tasikmalaya 1 kali, Kab. Cianjur 1 kali, Kab. Cirebon 1 kali, Kab. Garut 1 kali, Kab. Indramayu 1 kali dan Kab. Sukabumi 2 kali dengan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian 2022 (%)	Target Realisasi 2022 (%)
			jumlah korban 259 orang	jumlah korban 259 orang
		Campak	100% 82 Kasus	100% 82 Kasus
		Pertusis	100% Pertusis = 8	100% Pertusis = 8
		Covid-19	Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif : 523.715 Tertangani 100%	Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif : 523.715 Tertangani 100%

Sumber Data: LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Anggaran tahun 2022 dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat, berasal dari :

a. APBD sebesar :
   - KLB Pagu : Rp. 16.235.912.255
     Realisasi : Rp. 13.911.301.487
   - Krisis Kesehatan Pagu : Rp. 608.910.090
     Realisasi : Rp.

b. APBN Sebesar :
   - KLB Pagu : Rp. 585.645.000.
     Realisasi : Rp. 260.854.000
   - Krisis Kesehatan, Pagu : Rp. 231.365.000

2.8.3 Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah provinsi terdiri atas: Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota. SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 telah terlaksana dan tertuang dalam Web E-SPM Kemendagri, dimana pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan pada Tahun 2022 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman

sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan wajib bagi masyarakat Jawa Barat terhadap kebutuhan dasar.

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota, dengan pencapaian 100%.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, dilaksanakan melalui Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional, dengan pencapaian 100%.

Tabel 2.116
Hasil Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Provinsi	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Anggaran	Realisasi
	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota			Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota				
	Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota			Layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota				
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)		
Provinsi Jawa Barat	350	350	100%	145.906	145.906	100%	Rp 2.930.432.200	Rp 2.900.165.914

Sumber:

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					
1.	**PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)**	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	350 L/D	350 L/D	0	100%	
	A. **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)**					
	B. **JUMLAH MUTU BARANG / JASA / SDM**	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	60 L/O/h	60 L/O/h	0	100%	
	2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100	100	0	100%	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	145906	145906	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. **JUMLAH MUTU BARANG / JASA / SDM**	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia		
	1. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	100	100	0	100%	
	2. Kualitas pelayanan air limbah domestik	100	100	0	100%	

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2022/capaian_pemda/provinsi

2.8.4 Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas: 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 telah terlaksana dan tertuang dalam Web E-SPM Kemendagri, dimana pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan pada Tahun 2022 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai perangkat paerah yang memberikan pelayanan wajib bagi masyarakat Jawa Barat terhadap kebutuhan dasar.

Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui jenis dan mutu pelayanan:

1) Indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, jenis dan jumlah mutu pelayanan adalah Rehabilitasi rumah bagi korban dengan pencapaian 100%.
2) Indikator Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi jenis dan jumlah mutu pelayanan adalah Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dengan pencapaian 100%.

Tabel 2.117
Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Provinsi	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Anggaran	Realisasi
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi			Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi				
	Warna Negara yang korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total terlayani	Capaian (%)		
Provinsi Jawa Barat	59	59	100%	200	200	100%	Rp209.453.017.080	Rp209.452.717.837

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	*(2)*	*(3)*			*(4)*	*(5)*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	59	59	0	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. **JUMLAH MUTU BARANG / JASA / SDM**	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia		
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-	
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	58	58	0	100%	
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100%	
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	-	-	-	-	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	200	200	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. **JUMLAH MUTU BARANG / JASA / SDM**	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia		
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	200	200	0	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	2. Subsidi uang sewa	-	-	-	-	
	3. Penyediaan rumah layak huni	-	-	-	-	

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2022/capaian_pemda/provinsi

2.8.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Daerah Provinsi adalah pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi. SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, tidak tersedia anggaran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemberian layanan bagi warga yang terdampak penegakan Perda dan Perkada, namun giat Penegakan Perda dan Perkada tetap dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan tidak ada warga masyarakat yang terdampak atas pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada tersebut:

Tabel 2.118
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jens Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%	· Penegakan Perda dan Perkada yang mengandung sanksi (6 Perda). · Pelayanan Ganti Rugi dampak penegakan Perkada (1 kasus)

Sumber: LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Dalam pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat memiliki 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.624.432.574,-. Dalam pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan SPM, Satpol PP Jawa Barat melaksanakan

Penanganan Gangguan Trantibum serta Penegakan Perda dan Perkada dengan total anggaran sebesar Rp500.000.000,- dengan anggaran untuk Uang pengganti layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi sebesar Rp7.500.000,-.

2.8.6 Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.

Tabel 2.119
Pencapaian SPM Sosial oleh Daerah Provinsi

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100%	(121 orang/105) x 100% = 115,24%%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100%	(737 orang/600) x 100% = 122,83%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100%	(453 orang/350) x 100% = 129,43%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemnis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100%	(140 orang/140) x 100% = 100%	Setiap Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian	Batas Waktu Capaian
5.	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	(345.246 orang/345.246) x 100% = 100%	Setiap Tahun

Sumber: LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari kelima jenis pelayanan, secara rata-rata sudah melampaui 100% yaitu 113,50%.

Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti melebihi 100% dikarenakan ada klien yang berhasil reunifikasi sehingga diganti oleh klien yang ada dalam antrian dan menyebabkan jumlah klien yang dilayani melebihi target. Hal ini terjadi pula pada rehabilitasi anak terlantar dalam panti. Namun berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal capaian tidak hanya dilihat dari segi pelayanan saja tetapi dengan mutu pelayanan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial. Hal ini menyebabkan secara mutu layanan bidang sosial tidak memungkinkan untuk mendapatkan mutu 100%. Capaian Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebesar 96.09%, capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti sebesar 98,08, capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti sebesar 96,42 %, dan capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti sebesar 97,70. Capaian Program dan Kegiatan SPM Sosial Tahun 2022 sebesar 97,66% dengan memperhitungkan mutu pelayanan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.120
Capaian Program dan Kegiatan SPM Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Target (%)	Capaian (%)	
					Pemenuhan	Mutu
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100	100	96,09
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantardi Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	100	100	98,08
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	100	100	96,42
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	100	100	97,7
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100	100	100
Rata-Rata					100	97,66

2.9 Profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Perkembangan BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021

Dari sisi jumlah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Barat yang melaporkan kegiatannya dan merespon Survei BUMD sebanyak 93 unit BUMD tersebar di 27 kabupaten/kota atau dengan kata lain tingkat respon *rate* sebesar 100 persen. Dari total 93 unit BUMD terbanyak berlokasi di Kota Bandung yaitu sebanyak 12 (dua belas) unit, kemudian Kabupaten Indramayu sebanyak 7 (tujuh) unit, berikutnya Kabupaten Bogor dan Kabupaten Majalengka sebanyak 6 (enam) unit.

Jumlah BUMD di Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Cirebon masing-masing 5 (lima) unit. Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi masing-masing 4 (empat) unit. Kabupaten Cianjur,

Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi masing-masing 3 (tiga) unit. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar masing-masing 2 (dua) unit. Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, dan Kota Depok masing-masing 1 (satu) unit. Sementara itu, Kota Cimahi tidak memiliki BUMD. Pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi lokal diharapkan terus berkembang sejalan dengan fungsi BUMD memenuhi hajat hidup orang banyak, melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Teori lokasi yang menyatakan bahwa perusahaan akan memaksimumkan keuntungan dengan meminimalkan biaya usaha/produksi dengan mencari lokasi yang dekat dengan bahan baku dan pasar.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, karakteristik BUMD di Jawa Barat 45,16 persen BUMD bergerak dalam usaha perbankan atau sebanyak 42 unit. Pada urutan kedua sekitar 26,88 persen atau 25 unit BUMD di Jawa Barat mengelola sektor air minum tepatnya berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum. BUMD di sektor perdagangan merupakan urutan ketiga untuk lapangan usaha terbanyak dengan total 10 unit atau sekitar 10,75 persen.

Selanjutnya BUMD dengan kegiatan utama sektor jasa-jasa memiliki persentase sebesar 8,60 persen atau 8 (delapan) unit. BUMD sektor pertambangan & penggalian memiliki persentase 4,30 persen atau memiliki 4 (empat) unit usaha. Sisanya BUMD Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Bangunan/konstruksi yang memiliki persentase yang sama yaitu 2,15 persen atau masing-masing terdiri dari 2 (dua) unit. Secara lengkap BUMD pada tahun 2021 menurut lapangan usaha terlihat pada tabel di atas.

Tabel 2.121
Jumlah BUMD Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2021

No.	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Pertambangan	4	4,30
2	Industri Pengolahan	2	2,15
3	Air Minum	25	26,88
4	Bangunan/Konstruksi	2	2,15
5	Perdagangan	10	10,75
6	Perbankan	41	45,16
7	Jasa-Jasa	8	8,60
	Jumlah	**93**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Profil lain BUMD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat berdasarkan kepemilikan saham terbesar. Mayoritas BUMD di Jawa Barat dimiliki oleh Pemda Kabupaten/Kota ada sebanyak 86,02 persen atau 80 dari 93 unit dan 13,98 persen atau 13 (tiga belas) unit dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan lokasi BUMD terbesar di Kota Bandung. Tiga belas BUMD yang dimiliki oleh Pemda Provinsi Jawa Barat tersebar di beberapa kabupaten/kota. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Migrasi tenaga kerja, baik dari kategori tenaga kerja berpendidikan tinggi maupun rendah terus mengalir. Tenaga kerja sebagai faktor produksi sangat berperan dalam menciptakan nilai tambah baik dari produk primer yang diproses terlebih dahulu atau mengubah struktur ekonomi dari yang berbasis pertanian atau pertambangan ke industri memerlukan tenaga-tenaga terampil bahkan dewasa ini sektor jasa tumbuh pesat memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin berkembang. Akan tetapi pada tahun 2020 pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat telah menahan laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021 pemerintah mulai memperlunak aturan pelaksanaan *lockdown*, dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini memberikan pengaruh yang sangat kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penyerapan tenaga di BUMD baik tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap dari sisi jumlah mengalami kenaikan 0,58 persen dari 24.112 menjadi 24.252 orang sepanjang Tahun 2020-2021. Tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap jumlahnya bertambah di tahun 2021. Tenaga kerja tetap jumlahnya bertambah 74 orang pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 dan tenaga kerja tidak tetap jumlahnya bertambah 66 orang pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Gambar 2.2 memperlihatkan komposisi tenaga kerja BUMD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020-2021.

b. Aktiva BUMD Provinsi Jawa Barat 2020-2021

Aktiva merupakan kekayaan (sumber dana) yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai uang. Gambaran yang terjadi di tahun 2021 aktiva BUMD mengalami kenaikan 4,09 persen dibandingkan 2020 dari total aktiva Rp22.908,64 miliar naik menjadi Rp23.846,67 miliar. Bila dirinci per jenis, Aset Tetap mengalami peningkatan tertinggi 2,81 persen dari Rp9.194,53 miliar menjadi Rp9.452,77 miliar. Menurut lapangan usaha, ternyata aktiva

lancar sektor perbankan mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 62,69 persen dari BUMD keseluruhan.

c. Pasiva BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021

Total pasiva BUMD 2021 naik 4,19 persen dari Rp22.584,79 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp23.531,16 miliar. Persentase pasiva BUMD 2020 menurut jenisnya yang terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang dan ekuitas/modal masing-masing memiliki persentase sebesar 23,87 persen, 13,41 persen dan 62,73 persen. Persentase pasiva BUMD 2021 menurut jenisnya yang terdiri dari utang jangka pendek, utang jangka panjang dan ekuitas/modal masing-masing memiliki persentase sebesar 24,75 persen, 13,31 persen dan 61,94 persen.

Bila dilihat gambar 2.5, secara persentase *passive* utang jangka pendek mengalami kenaikan dari 23,87 persen di tahun 2020 menjadi 24,75 persen di tahun 2021. Passiva ekuitas/modal mengalami penurunan dari 62,73 persen menjadi 61,94 persen. Utang jangka panjang juga mengalami penurunan dari 13,41 persen menjadi 13,31 persen. Secara kumulatif total utang jangka pendek BUMD di Provinsi Jawa Barat 2021 naik 8,23 persen dibandingkan 2020. Pasiva ekuitas/modal naik 3,04 persen dibandingkan modal 2020. Porsi terkecil pasiva BUMD Jawa Barat 2021 pada total utang jangka panjang naik 3,58 persen dibandingkan 2020.

d. Laba BUMD Provinsi Jawa Barat 2020-2021

Berdasarkan publikasi BPS, dapat diketahui profil BUMD menurut jumlah Laba/Rugi, pada tahun 2020 BUMD secara total mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pendemi COVID-19. Seiring dengan perbaikan kondisi pandemi, BUMD mengalami kenaikan laba (sebelum pajak) dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 442,38 persen, dari kerugian sebesar Rp94,18 milyar menjadi laba sebesar Rp. 322,46 miliar. Laba ini dihitung dari pendapatan dikurangi biaya usaha dan ditambahkan dengan pendapatan/biaya lainnya.

Pendapatan usaha BUMD 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,31 persen dari Rp5.732,89 miliar menjadi Rp5.750,41 milyar. Selanjutnya, biaya usaha mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 6,96 persen dari Rp5.856,17 miliar menjadi Rp. 5.448,86 miliar. Dari total 93 sampel yang masuk, di tahun 2020 laba terbesar diperoleh dari lapangan

usaha pertambangan sebesar 182,41 miliar, sedangkan kerugian terbesar diperoleh oleh lapangan usaha di sektor jasa-jasa sebesar -293,82 miliar.

Tabel 2.122
Pendapatan, Biaya dan Laba/Rugi BUMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021 (Ribu Rupiah)

No.	Uraian	2020	2021	% Perubahan
1	Pendapatan Usaha	5.732.888.461,83	5.750.407.432,52	0,31
	a. Pendapatan Usaha Utama	5.341.878.605,42	5.387.402.021,36	0,85
	b. Pendapatan Usaha Lainnya	391.009.856,41	363.005.411,16	-7,16
2	Biaya Usaha	5.856.167.702,49	5.448.859.155,86	-6,96
3	Laba (Rugi) Usaha (1-2)	-123.279.240,66	301.548.276,65	344,61
4	Pendapatan (Biaya) Lainnya	29.096.776,13	20.910.914,30	-28,13
5	Laba Sebelum Pajak	-94.182.464,53	322.459.190,95	442,38
6	Laba Bersih	-165.732.719,39	98.186.590,26	159,24

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pada tahun 2021 laba terbesar diperoleh di lapangan usaha pertambangan sebesar 447,60 miliar dan rugi terbesar diperoleh pada lapangan usaha jasa-jasa sebesar -232,01 miliar. Penciptaan laba BUMD ditujukan sebagai sumber penerimaan daerah yang diarahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tantangan bagi pengusaha di daerah adalah bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja usaha sehingga *competition capability* setara dengan kinerja pengusaha dari luar daerah.

e. Peran BUMD Dalam Mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendukung kinerja perangkat daerah, yaitu: 1) Meningkatkan Pendapatan Daerah: Salah satu peran utama BUMD adalah meningkatkan pendapatan daerah. BUMD dapat menghasilkan pendapatan melalui kegiatan usahanya, seperti penyediaan layanan publik, perdagangan, investasi, dan sektor-sektor lain yang relevan. Pendapatan yang dihasilkan oleh BUMD dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan oleh perangkat daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sebagai contoh Bank BJB; 2) Pengelolaan Aset Daerah: BUMD bertanggung jawab atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mereka dapat mengelola dan memanfaatkan aset-aset

tersebut secara efektif dan efisien untuk kepentingan daerah. Contohnya, BUMD dapat mengelola infrastruktur seperti bandara (PT. BIJB), yang akan meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, air minum (PT. Tirta Gemah Ripah), jalan tol (PT. Jasa Sarana), persampahan (PT. Migas Utama Jabar); 3) Pemberdayaan Ekonomi Lokal: BUMD dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberdayakan sektor-sektor usaha. BUMD dapat memberikan dukungan dan fasilitas kepada pelaku usaha lokal, seperti melalui penyediaan modal, pengembangan infrastruktur pendukung, atau pelatihan kewirausahaan. Hal ini akan meningkatkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya: pertanian dan lingkungan (PT. Agro Jabar); 4) Penyediaan Layanan Publik: Beberapa BUMD memiliki peran dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Contohnya: layanan kesehatan (RS Al- Ihsan).

Dengan peran-peran yang dimiliki oleh BUMD, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

2.10 Kerja Sama Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan melibatkan dan bekerjasama dengan berbagai pihak. Kolaborasi dan kerjasama yang baik diharapkan dapat memberikan dukungan positif bagi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik sesama pemerintah daerah, maupun dengan masyarakat dan dunia usaha serta akademisi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Sementara itu, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2022 berjumlah 37 kerjasama, yaitu:

1. Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan PT. Mahkota Permata Perdana Tentang Dukungan Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Bandung Timur;
2. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Islam Nusantara Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Perpustakaan Di Jawa Barat;
3. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Jenderal Achmad Yani Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Perpustakaan Di Jawa Barat;
4. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Yayasan Darul Hikam Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Perpustakaan Di Jawa Barat;
5. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Universitas Pasundan Tentang Penelitian, Pengembangan, Diseminasi Dan Penerapan Hasil-Hasil Penelitian;
6. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Tokopedia Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Misi “Ekonomi Kreatif Juara” Di Jawa Barat;
7. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Telekomunikasi Selular Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
8. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Eden Pangan Indonesia Tentang Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Komoditas Tanaman Pangan Dan Kortikultura Melalui Program Petani Milenial Di Jawa Barat;
9. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Tentang Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan Melalui Kegiatan Jasa Dan Fasilitasi Layanan Logistik;

10. Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Taekwang Global Indonesia Tentang Sewa-Menyewa Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Blok Priuk, Desa Pabedilan Kulon, Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;
11. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten, Tbk Tentang Pemanfaatan Fasilitas Kartu Atm Dan Debet Co-Branding Untuk Peserta Program Petani Milenial Di Jawa Barat;
12. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Universitas Pasundan Tentang Penyelenggaraan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Magang;
13. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Yayasan *Edu Farmers International* Tentang Penyelenggaraan Program Bertani Untuk Negeri;
14. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Kelompok Tani Hutan *Agroforesty* Dalam Rangka Optimalisasi Program Petani Milenial Di Jawa Barat;
15. Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Yayasan Winaya Mukti Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Di Jalan Turangga Nomor 25 Kota Bandung;
16. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Agro Jabar Tentang Pendistribusian Minyak Goreng Curah Bersubsidi Melalui Aplikasi Sapawarga;
17. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Agro Jabar Tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Bersubsidi Di Jawa Barat;
18. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Kota Bekasi Dan Asosiasi Perguruan Tinggi (Aptisi) Jabar Komisariat-Iv A Tentang Penyelenggaraan Program Pendayagunaan Alumni Balai Latihan Kerja Kompetensi;
19. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Trainers Management Indonesia (TMI) Tentang Pendayagunaan Alumni Pelatihan Berbasis Komptensi Dalam Pelatihan *Soft Skill People Excellent Development* (Ped), dan Pembinaan Sertifikasi

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Alumni Balai Latihan Kerja Kompetensi;

20. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Muhammadiyah Bandung Tentang Kerja Sama Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, Diseminasi Dan Penerapannya Di Jawa Barat;
21. Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Tentang Sewa-Menyewa Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Di Jalan Windu Nomor 26 Kota Bandung;
22. Addendum Perjanjian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Pembangkit Jawa-Bali Tentang Pinjam Pakai Tanah Milik PT. Pembangkitan Jawa-Bali Untuk Sarana Dan Prasarana Perhubungan Di Kawasan Waduk Cirata;
23. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Tentang Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat;
24. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung Tentang Kegiatan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Barat;
25. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Yayasan Wanadri Tentang Kegiatan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Barat;
26. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Jenderal Achmad Yani Tentang Kegiatan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Barat;
27. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Yayasan *Mercy Corps* Indonesia Tentang Pemberdayaan Petani Dan Pelaku Usaha Kopi Perempuan Di Jawa Barat;
28. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Jaya Ekspress Transindo Tentang Pelatihan, Pendampingan Serta Peningkatan Produktivitas Pelaku Koperasi, Usaha Kecil, Dan Pesantren Berbasis Teknologi Inovasi Di Jawa Barat;
29. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Yayasan Pusat Inisiatif Strategis Untuk Pembangunan Indonesia (CISDI) Tentang Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 Di Jawa

Barat Melalui Pendampingan Dan Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat;

30. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Novo Nordisk Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pencegahan Dan Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2 Secara Komprehensif Melalui Program *Affordabiility Project*;
31. Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tentang Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Untuk Menunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;
32. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Udara Untuk Semua Dan Yayasan Baitul Hidayah Nurul Khalish Tentang Pengelolaan Agroforesty Dan Lahan Rendah Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
33. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Universitas Telkom Tentang Penelitian, Pengembangan, Diseminasi, Dan Penerapan Hasil Penelitian Di Jawa Barat;
34. Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Di Koridor Halaman Belakang Gedung Sate Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung;
35. Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tentang Sewa-Menyewa Sebagian Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Di Jalan Ternate Nomor 2 Kota Bandung;
36. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Tentang Peningkatan Indeks Desa Membangun Melalui Optimalisasi Peran Desa;
37. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan PT. Inti Konten Indonesia (Intens) Tentang Pemanfaatan Platform Belanja Daring Untuk Komoditas Tanaman Pangan Dan Kortikultura.

Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangi pada tahun 2022 berjumlah 34 kesepakatan, yaitu:

1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Tentang Kerja Sama Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat;
2. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Binaniaga Indonesia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
3. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Institut Agama Islam Tasikmalaya Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
4. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Institut Agama Islam Darussalam Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
5. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia Purwakarta Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
6. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama Tasikmalaya Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
8. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Galuh Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;

9. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Islam 45 Bekasi Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
10. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Cipasung Tasikmalaya Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
11. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Amin Indramayu Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
12. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Jenderal Achmad Yani Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
13. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Majalengka Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
14. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Suryakencana Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
15. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Sebelas April Sumedang Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
16. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Ibn Khaldun Bogor Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
17. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Ishlah Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;

18. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Nusa Bangsa Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
19. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
20. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Kuningan Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
21. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Islam Nusantara Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
22. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Widyatama Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
23. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Telkom Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
24. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
25. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sebelas April Sumedang Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
26. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;

27. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musaddadiyah Garut Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
28. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam Garut Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
29. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Al-Ghifari Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
30. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Winaya Mukti Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
31. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Kharisma Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
32. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat Dan Pembangunan Jawa Barat;
33. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia (*World Resources Institute Foundation*) Tentang Pengembangan Kawasan Industri Hijau Melalui Program Pembangunan Rendah Emisi Dan Energi Bersih Di Jawa Barat
34. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik Dari Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka.

Untuk periode Tahun 2024-2026 terdapat Rencana Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Rencana Kerja Sama Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

No.	Nama Perjanjian Kerjasama	Nomor	Para Pihak	Summary	Jangka Waktu	OPD Pemrakarsa	Keterangan
1.	ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN PT MAHKOTA PERMATA PERDANA TENTANG DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN BANDUNG TIMUR	01/PUR.03.04/BPKAD 001/PKS/SBDG/MGMT/01/2022	1. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL (Gubernur Jawa Barat) 2. HINDARKO HASAN (Direktur PT Mahkota Permata Perdana)	Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Nomor 640/01/SPIBUMD dan 003/PKS/MJ-SBD/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Bandung Timur, dikarenakan adanya kendala pembebasan lahan yang berakibat tertundanya pembangunan keseluruhan infrastruktur di Kawasan Bandung Timur.	➢ Perjanjian kerja sama ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dareah Provinsi Jawa Barat	➢ Ditandatangani pada tanggal 06 Januari 2022 ➢ **Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada 30 Maret 2022**

No.	Nama Perjanjian Kerjasama	Nomor	Para Pihak	Summary	Jangka Waktu	OPD Pemrakarsa	Keterangan
2.	PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PT TAEKWANG GLOBAL INDONESIA TENTANG SEWA-MENYEWA TANAH MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI BLOK PRIUK, DESA PABEDILAN KULON, KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON	19/PE,/04.04.04.01/BPKAD	1. SETIAWAN WANGSAATMAJA (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) 2. LEE YOUNG SUK (Direktur PT Taekwang Global Indonesia)	Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah mendayagunakan aset PIHAK KESATU untuk Kolam Retensi dan Bangunan Pelengkap Pabrik milik PIHAK KEDUA utnuk kegiatan usahanya, meliputi Pemanfaatan Barang Milik Daerah PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui mekanisme sewa, untuk dipergunakan sebagai Kolam Retensi dan Bangunan Pelengkap Pabrik PT Taekwang Global Indonesia oleh PIHAK KEDUA.	➢ Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 032//Kep.45-BPKAD/2022 tanggal 4 Februari 2022 .	Dinas Sumber Daya Air	➢ Ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2022 ➢ **Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada 4 Februari 2025**
3.	PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN YAYASAN WINAYA MUKTI TENTANG SEWA-MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI JALAN TURANGGA NOMOR 25 KOTA BANDUNG	26/PEM.04.04/BPKAD 020/14/ASSET/SK/YWM-RUS/2022	1. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL (Gubernur Jawa Barat selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah) 2. H. ENDJAY SEDJAYA (Ketua Yayasan Winaya Mukti)	Maksud dan Tujuan Perjanjian ini adalah mendayagunakan aset PIHAK KESATU untuk sarana pendidikan Universitas Winaya Mukti yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.	➢ Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 1 Februari 2026.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	➢ Ditandatangani pada tanggal 7 April 2022 ➢ **Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada 1 Februari 2026**

No.	Nama Perjanjian Kerjasama	Nomor	Para Pihak	Summary	Jangka Waktu	OPD Pemrakarsa	Keterangan
4.	PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk TENTANG SEWA-MENYEWA TANAH MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI JALAN WINDU NOMOR 26 KOTA BANDUNG	29/PEM.04.04.01/BPKAD 0344/UBA-ASU/2022	1. SETIAWAN WANGSAATMAJA (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) 2. JADI KUSMARYADI (Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk)	Maksud Perjanjian ini adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai, dengan tujuan adalah mendayagunakan aset milik/dikuasai PIHAK KESATU untuk dipergunakan sebagai tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BJB milik PIHAK KEDUA, meliputi Pemanfaatan Barang Milik Daerah PIHAK KESATU melalui mekanisme sewa, untuk dipergunakan sebagai tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BJB milik PIHAK KEDUA.	➢ Perjanjian Sewa ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.	DPMPTSP	➢ Ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2022 ➢ **Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada 31 Desember 2025**

No.	Nama Perjanjian Kerjasama	Nomor	Para Pihak	Summary	Jangka Waktu	OPD Pemrakarsa	Keterangan
5.	PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PINJAM PAKAI KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK MENUNJANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT	37/DG.02.02.01/PEMOTDA 001/PL.01/KIJABAR	1. SETIAWAN WANGSAATMAJA (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat) 2. IJANG FAISAL (Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat)	Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan PIHAK KESATU, dengan tujuan mendayagunakan Barang Milik Daerah PIHAK KESATU unukt mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, meliputi Pinjam Pakai Barang MIlik Daerah PIHAK KESATU berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Keputusan Gubernur NOmor 028/Kep.677-BPKAD/2020 tentang Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Milik/Dikuasai PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.	➢ Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani. ➢ Dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	➢ Ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2022 ➢ **Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada 27 Juli 2025**

No.	Nama Perjanjian Kerjasama	Nomor	Para Pihak	Summary	Jangka Waktu	OPD Pemrakarsa	Keterangan
6.	PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DA N BANTEN, Tbk TENTANG SEWA-MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI KORIDOR HALAMAN BELAKANG GEDUNG SATE JALAN DIPONEGORO NOMOR 22 BANDUNG	52/PEM.04.04.01/BPKAD 0616/UBA-ASU/2022	1. SETIAWAN WANGSAATMAJA (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengelola Barang Milik Daerah) 2. BETTY RAHMAWATI (Pemimpin PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk)	Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sewa-menyewa sebagian tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Koridor Belakang Halaman Gedung Sate Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, digunakan untuk tujuan mendayagunakan aset milik/dikuasai PIHAK KESATU untuk dipergunakan sebagai Kantor Kas milik PIHAK KEDUA.	➢ Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2026.	Biro Umum	➢ Ditandatangani pada tanggal 9 September 2022 ➢ Perjanjian **Kerja Sama ini berakhir pada 25 Oktober 2026**
7.	PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DA N BANTEN, Tbk TENTANG SEWA-MENYEWA SEBAGIAN TANAH MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI JALAN TERNATE NOMOR 2 KOTA BANDUNG	53/PEM.04.04.01/BPKAD 0617/UBA-ASU/2022	1. SETIAWAN WANGSAATMAJA (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengelola Barang Milik Daerah) 2. BETTY RAHMAWATI (Pemimpin PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk)	Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sewa-menyewa sebagian tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Ternate Nomor 2 Kota Bandung, digunakan untuk tujuan mendayagunakan aset milik/dikuasai PIHAK KESATU untuk dipergunakan sebagai kantor Kas dan tempat Anjungan Tunai Mandiri Bank BJB milik PIHAK KEDUA.	➢ Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan 23 November 2026.	BKD	➢ Ditandatangani pada tanggal 9 September 2022 ➢ **Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada 23 November 2026**

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Diperlukan analisa untuk mengetahui pertumbuhan keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada periode selanjutnya. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keuangan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu tersebut dilakukan dari pos pendapatan daerah serta belanja daerah dan baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dianalisa dengan menghitung dari tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya diantaranya dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dapat disajikan berikut ini:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang disajikan setiap tahunnya menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018–2022. Realisasi pendapatan pada periode 2018-2022, terjadi pertumbuhan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,90 persen. Rendahnya angka rata-rata pertumbuhan dalam 5 (lima) tahun terakhir disebabkan adanya penuruan yang signifikan pada komponen dana perimabangan dari pemerintah pusat sebesar 6,71 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan

berupa hibah BOS yang sebelumnya menjadi pendapatan dalam APBD Provinsi untuk kemudian dilakukan transfer kepada Kabupaten/Kota menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan berupa hibah BOS yang disalurkan secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,62 persen, dimana tingkat pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 6,00 persen, Pendapatan Retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 4,27 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 6,43 persen serta dari Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 0,51 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi dan Target Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022 (Unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	**PENDAPATAN**	**33.919.022.032.348**	**36.037.894.762.461**	**34.504.275.705.318**	**36.991.873.224.931**	**33.236.110.512.395**	0,90%
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**19.642.915.448.764**	**21.244.266.598.018**	**18.521.882.178.042**	**20.333.679.966.126**	**23.249.622.253.957**	5,62%
4.1.1	Pajak daerah	18.153.616.036.193	19.626.352.311.765	17.035.963.236.918	18.847.183.713.165	21.542.602.963.635	6,00%
4.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	49.176.487.699	56.222.370.756	40.220.203.478	43.262.322.502	44.837.616.240	-4,27%
4.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	348.537.989.633	386.442.976.038	401.703.315.844	414.780.606.267	468.989.416.325	6,43%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1.091.584.935.239	1.175.248.939.459	1.043.995.421.802	1.028.453.324.192	1.193.192.257.757	0,51%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**14.220.312.583.584**	**14.727.859.896.649**	**15.916.521.189.271**	**16.606.086.315.554**	**9.889.116.424.368**	-4,66%
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**14.208.000.403.584**	**14.715.372.046.649**	**15.881.415.189.271**	**16.577.293.915.554**	**9.860.664.924.368**	-4,60%
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**14.208.000.403.584**	**14.715.372.046.649**	**15.881.415.189.271**	**16.489.128.153.554**	**9.821.049.167.368**	-4,70%
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.804.540.601.861	1.483.785.231.865	2.063.105.718.266	2.594.482.992.137	2.107.890.742.700	5,15%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	3.023.552.986.000	3.212.647.404.000	2.964.612.155.000	3.007.926.119.000	2.981.692.750.817	-0,09%
4.02.01.02	Dana Alokasi Khusus	9.379.906.815.723	10.018.939.410.784	10.853.697.316.005	10.886.719.042.417	4.731.465.673.851	-7,65%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	88.165.762.000	39.615.757.000	-
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**12.312.180.000**	**12.487.850.000**	**35.106.000.000**	**28.792.400.000**	**28.451.500.000**	16,19%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	0	0	0	0	0	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	12.312.180.000	12.487.850.000	35.106.000.000	28.792.400.000	28.451.500.000	16,19%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**55.794.000.000**	**65.768.267.794**	**65.872.338.005**	**52.106.943.251**	**97.371.834.070**	32,45%
4.3.01	Pendapatan Hibah	22.044.000.000	23.188.473.794	36.459.066.005	33.163.983.828	43.604.779.909	15,50%
4.3.02	Dana Darurat	33.750.000.000	42.579.794.000	29.413.272.000	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	18.942.959.423	53.767.054.161	-

Sumber: LRA Tahun 2018-2022, diolah

2. Belanja Daerah

Kemampuan Keuangan daerah jika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara bahwa Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dikelompokkan sebagai berikut: a) di atas Rp4.500.000.000.000,00 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; b) Rp1.400.000.000.000,00 sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan c) di bawah Rp1.400.000.000.000,00 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan tersebut, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp20.826.940.912.931 nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp18.957.355.199.829 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, serta pada tahun 2018 dan 2022 termasuk kedalam kemampuan keuangan daerah yang tinggi.

Tabel 3.2
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022 (Unaudited)
A	**Pendapatan Umum Daerah**					
1	Pendapatan Asli Daerah	19.642.915.448.764	21.244.266.598.018	18.521.882.178.042	20.333.679.966.126	23.249.622.253.957
2	Dana Bagi Hasil	1.804.540.601.861	1.483.785.231.865	2.063.105.718.266	2.594.482.992.137	2.107.890.742.700
3	Dana Alokasi Umum	3.023.552.986.000	3.212.647.404.000	2.964.612.155.000	3.007.926.119.000	2.981.692.750.817
	Jumlah A	**24.471.009.036.625**	**25.940.699.233.883**	**23.549.600.051.308**	**25.936.089.077.263**	**28.339.205.747.474**
B	**Belanja Pegawai**					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan		3.641.345.847.077	2.532.857.992.683	2.561.466.904.432	2.826.673.324.768
2	Tambahan Penghasilan PNS		1.472.412.473.875	2.059.386.858.796	2.097.023.615.370	2.343.233.902.364
	Jumlah B		**5.113.758.320.952**	**4.592.244.851.479**	**4.658.490.519.802**	**5.169.907.227.132**
	Kemampuan Keuangan Daerah		**20.826.940.912.931**	**18.957.355.199.829**	**21.277.598.557.461**	**23.169.298.520.342**

Sumber: LRA Tahun 2018-2021 (audited), LRA 2022 (*unaudited*) (diolah Kembali)

Pada sisi realiasi belanja periode Tahun 2018-2022 belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata–rata sebesar 0,31 persen. Angka pertumbuhan yang rendah tersebut ditunjang belanja operasi mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 1,32 persen. Komponen belanja modal terjadi kenaikan yaitu rata-rata pertumbuhan sebesar 4,62 persen. Komponen Belanja transfer juga terjadi kenaikan dengan rata-rata sebesar 3,89 persen, hal ini berkaitan dengan meningkatnya proyeksi pendapatan sehingga berimplikasi terhadap bagi hasil kepada kabupaten/kota.

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018–2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Kode	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022 (unaudited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
5	**BELANJA**	**33.333.824.961.824**	**35.833.086.126.517**	**38.127.531.749.249**	**37.470.910.437.064**	**32.772.894.100.912**	0,31
5.1	**Belanja operasi**	**18.981.038.246.976**	**19.907.453.301.109**	**21.066.529.850.169**	**23.385.024.872.111**	**17.173.841.212.703**	-1,32
5.1.01	Belanja pegawai	5.783.333.525.995	5.888.754.472.771	6.097.572.592.290	6.179.742.118.217	6.671.258.864.365	4,22
5.1.02	Belanja barang dan jasa	4.327.807.662.454	4.985.841.862.221	4.796.352.354.090	6.688.760.948.583	6.978.233.442.923	11,13
5.1.03	Belanja bunga	-	-	18.123.947.774	-	-	-
5.1.04	Belanja subsidi	19.359.366.500	19.384.264.000	-	-	22.171.174.200	-
5.1.05	Belanja hibah	8.572.522.302.027	8.736.051.702.117	9.948.395.206.015	9.774.239.405.311	3.305.292.221.215	-12,43
5.1.06	Belanja bantuan sosial	278.015.390.000	277.421.000.000	206.085.750.000	742.282.400.000	196.885.510.000	162,04
5.2	**Belanja modal**	**3.145.847.260.323**	**2.530.347.542.361**	**1.672.906.514.876**	**2.045.428.563.538**	**2.417.809.739.850**	4,62
5.2.1	Belanja Modal	3.145.847.260.323	2.530.347.542.361	1.672.906.514.876	2.045.428.563.538	2.417.809.739.850	4,62
5.3	**Belanja tidak terduga**	**184.163.280**	**-**	**3.154.919.548.515**	**261.344.249.524**	**93.700.984.191**	-
5.3.1	Belanja tidak terduga	184.163.280	-	3.154.919.548.515	261.344.249.524	93.700.984.191	-
5.4	**Belanja transfer**	**11.206.755.291.245**	**13.395.285.283.047**	**12.233.175.835.689**	**11.779.112.751.891**	**13.087.542.164.168**	3,89
5.4.01	Belanja bagi Hasil	7.450.622.081.732	7.901.869.013.400	7.212.501.291.449	7.608.373.465.011	9.221.944.994.686	6,40
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	3.756.133.209.513	5.493.416.269.647	5.020.674.544.240	4.170.739.286.880	3.865.597.169.482	0,69

Sumber: LRA Tahun 2018-2021 (auditer), LRA 2022 (*unaudited*) (diolah Kembali)

3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi pembiayaan netto dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 2,53 persen. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,64 persen, serta realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 28,82 persen, kenaikan tersebut terjadi pada komponen penyertaan modal pada tahun 2021 sebesar Rp.100.000.000.000, dan pada Perubahan APBD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp562.105.478.367 serta adanya Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp200.000.000.000 sebagai cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada tahun 2024.

Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2022 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
6	**PEMBIAYAAN**	**2.475.492.824.312**	**3.084.492.272.379**	**4.819.021.978.913**	**3.054.053.591.932**	**1.873.440.805.771**	**-9,36%**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**2.563.692.823.112**	**3.161.292.271.179**	**4.872.039.978.913**	**3.154.053.591.932**	**2.635.546.283.321**	**-5,24%**
6.1.01	SiLPA	2.493.457.111.839	3.060.677.232.835	3.289.300.908.323	1.272.234.413.783	2.575.016.379.799	5,77%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan						
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	1.532.607.660.148	1.881.560.755.969	60.529.903.522	
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah						
6.1.08	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	70.235.711.273	100.615.038.344	50.131.410.442	258.422.180	-	
6.2	**Pengeluaran pembiayaan**	**88.199.998.800**	**76.799.998.800**	**53.018.000.000**	**100.000.000.000**	**762.105.477.550**	**162,01%**
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	88.199.998.800	76.799.998.800	53.018.000.000	100.000.000.000	562.105.477.550	112,01%
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	200.000.000.000	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah						
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya						

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	Biaya Operasional Pinjaman Daerah						
	Pembayaran Cicilan Utang						

Sumber: LRA Tahun 2018-2021 (auditer), LRA 2022 (unaudited) (diolah Kembali)

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat adalah data yang menyajikan posisi keuangan Provinsi Jawa Barat serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

A. Aset

Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,15 persen. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara Aset lancar yang pertumbuhannya cukup signifikan yaitu sebesar 8,01 persen, Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,09 persen, dan Aset lainnya sebesar 3,76 persen. Dan Investasi jangka panjang mengalami pertumbuhan rata-rata 2,37 persen.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 115,36 persen. Peningkatan kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka panjang, yaitu dari Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.374.647.022.657,00, sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.532.607.660.148,00. Hal ini berarti Kewajiban Jangka Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp1.842.039.362.509,00 atau 120,19 persen dibandingkan dengan nilai Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2020.

Utang Dalam Negeri tersebut merupakan pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dan Pinjaman Dukungan Program PEN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi dampak pandemi Virus COVID-19.

C. Ekuitas Dana

Ekuitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Berdasarkan dari Laporan posisi Keuangan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pada periode tersebut ekuitas mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 1,05 persen.

Gambaran neraca daerah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2018–2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	2.995.658.149.272	3.145.941.829.515	1.131.847.061.555	2.310.512.110.990	2.032.351.282.087	8,27
Kas Di Bendahara Penerimaan	15.000	48.547.500		89.213	1.510.511	
Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.839.118.932	46.573.408.799	20.000	530.671.383	1.393.932.861	663.937,99
Kas Di BLUD	61.206.204.462	96.737.122.509	136.415.669.478	263.800.322.223	267.782.857.032	48,49
Kas Dana BOS					190.807.369	
Kas Lainnya	-	76.799.998.800	4.303.182.750	173.185.990,00	0	
Investasi Jangka Pendek (Deposito)					35.000.000.000	
Piutang Pajak Dan Retribusi						
Piutang Pajak	227.782.482.180	231.207.921.261	204.060.195.852	247.781.377.283,00	318.785.952.012	9,96
Piutang Retribusi	516.873.640	526.027.940	524.774.840	508.577.040	519.950.240	0,17
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			2.506.785.118	4.300.000.000	6.300.000.000	
Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah	116.756.792.026	65.460.440.000	22.490.299.519	49.570.035.179	22.977.074.607	-10,70
Piutang BLUD					0	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	437.937.145	404.635.369	399.409.300	399.409.300	399.409.300	-2,22
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	25.070.700.886	18.647.662.551	16.617.963.114	16.564.949.950	16.564.949.950	-9,21
Bagian Lancar Piutang Sewa	629.423.452	593.826.915	787.369.000	787.369.000	562.369.000	-0,46
Bagian Lancar Piutang Kerjasama	4.645.226.000	4.660.452.000	9.758.589.000	9.758.589.000	9.978.053.800	23,04
Piutang Bantuan Keuangan			12.526.511.538	0	0	
Piutang Lainnya	1.821.451.714	4.641.583.735	731.921.244,32	731.921.244	715.521.245	8,22
Penyisihan Piutang	-38.207.338.451	-18.204.712.271	-16.258.074.110	-16.258.074.110	-17.193.378.532	-14,29
Penyisihan Piutang BLUD	-	1.463.906.123				
Beban Dibayar Dimuka	6.048.339.977	7.704.641.825	6.089.031.346	6.089.031.346	3.078.312.603	-8,78
Persediaan	260.228.798.542	232.043.778.941	570.433.701.789	570.433.701.789	463.821.254.221	21,23

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan
Persediaan BLUD	31.659.097.307	31.067.736.562	35.088.593.281			
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	1.934.995.945					
Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan		257.799.774.614				
JUMLAH ASET LANCAR	**3.698.028.268.029**	**4.204.118.582.687**	**1.906.928.884.414**	**3.465.683.266.821**	**3.163.229.858.306**	8,01
INVESTASI JANGKA PANJANG						
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN						
Dana Bergulir	195.080.775.297	94.465.736.953	44.334.326.511	44.075.904.331	44.010.323.114	-26,34
Dana Penjaminan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Penyisihan Dana Bergulir	-50.830.775.297	-49.715.736.953	-49.334.326.511	-49.075.904.331	-49.010.323.114	-0,90
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	**149.250.000.000**	**49.750.000.000**	**0**	**0**	**0**	
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.351.502.853.070	10.230.840.801.347	9.882.194.508.151	10.418.305.549.717	11.464.073.639.533	2,72
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	**10.351.502.853.070**	**10.230.840.801.347**	**9.882.194.508.151**	**10.418.305.549.717**	**11.464.073.639.533**	2,72
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**10.500.752.853.070**	**10.280.590.801.347**	**9.882.194.508.151**	**10.418.305.549.717**	**11.464.073.639.533**	2,37
ASET TETAP						
Tanah	11.755.360.838.224	12.029.703.019.503	12.232.960.957.707	12.333.331.817.481	12.709.989.585.917	1,97
Peralatan dan Mesin	5.097.590.400.898	5.912.399.795.185	6.605.616.572.814	7.441.717.938.457	8.354.189.441.819	13,16
Gedung dan Bangunan	7.182.916.038.810	8.291.802.529.752	8.938.773.352.285	9.237.601.362.252	11.155.818.316.702	11,84
Jalan, Jaringan dan Instalasi	8.478.755.549.176	9.065.518.230.664	9.280.959.559.657	9.649.411.456.068	10.890.004.096.547	6,53
Aset Tetap Lainnya	682.825.734.417	874.523.864.956	1.077.308.808.301	1.241.659.469.130	1.395.046.543.371	19,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.432.169.457.044	1.581.810.135.362	1.436.601.951.364	1.799.700.759.153	376.470.138.528	-13,13
Akumulasi Penyusutan	-10.866.545.619.576	-13.115.949.140.151	-14.343.219.873.158	-15.144.809.773.359	-16.991.900.908.828	11,96

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan
JUMLAH ASET TETAP	**23.763.072.398.992**	**24.639.808.435.271**	**25.229.001.328.970**	**26.558.613.029.183**	**27.889.617.214.056**	4,09
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan					200.000.000.000	
JUMLAH DANA CADANGAN					**200.000.000.000**	
ASET LAINNYA						
Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-					
Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	1.151.447.915	629.996.000	314.998.000			
Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama	157.484.269.655	152.823.817.655	147.898.063.655	142.175.680.655	152.727.926.370	-0,66
Bagian Jangka Panjang Piutang Lainnya			10.131.485.325	6.901.276.369	3.901.276.369	
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	514.917.649.916	514.917.649.916	519.696.049.916	522.852.449.648	522.649.649.648	0,37
Aset Tak Berwujud	145.500.000	145.500.000	734.268.000	807.268.800	1.081.739.610	112,15
Aset Lain - Lain	1.550.935.324.950	1.858.083.037.126	1.838.836.210.798	1.829.997.109.584	1.828.314.133.411	4,55
Akumulasi Amortisasi	-91.625.000	-118.875.000	-153.641.000	-300.839.883	-470.588.237	52,80
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-828.275.489.302	-902.378.989.705	-901.171.362.628	-908.716.794.022	-907.044.295.377	2,37
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-23.617.558.587	-24.179.243.558	-24.732.050.905	-25.265.170.906,55	-25.510.722.414	1,95
JUMLAH ASET LAINNYA	**1.372.649.519.547**	**1.624.102.135.991**	**1.591.554.021.162**	**1.568.450.980.245**	**1.575.649.119.380**	3,76
JUMLAH ASET	**39.334.503.039.639**	**40.748.619.955.297**	**38.609.678.742.697**	**42.011.052.825.965**	**44.292.569.831.275**	3,15
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	113.494.896	-			0	
Pendapatan Diterima Dimuka	5.130.207.112	5.168.426.025	5.364.149.165	18.810.077.628	3.416.802.114	43,34
Utang Belanja	407.152.016.363	440.333.819.394	482.275.025.675	676.329.793.283	603.341.869.077	11,78
Utang Jangka Pendek Lainnya					285.439.035	

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Bagi Hasil Pajak Retribusi kepada Pemkab/Pemkot					0	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**412.395.718.371**	**445.502.245.419**	**487.639.174.841**	**695.139.870.910,74**	**607.044.110.226**	11,84
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja - BLUD						
Utang Dalam Negeri			1.532.607.660.148,00	3.374.647.022.657,00	3.400.836.099.846	
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	-					
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**-**	**1.532.607.660.148,00**	**3.374.647.022.657,00**	**3.400.836.099.846**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**412.395.718.371**	**445.502.245.419**	**2.020.246.834.989**	**4.069.786.893.568**	**4.007.880.210.072**	**115,36**
EKUITAS						
EKUITAS	38.922.107.321.267	40.278.938.466.319	36.589.431.907.709	37.941.265.932.397	40.284.689.621.203	1,05
JUMLAH EKUITAS	**38.922.107.321.267**	**40.278.938.466.319**	**36.589.431.907.709**	**37.941.265.932.397**	**40.284.689.621.203**	1,05
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**39.334.503.039.639**	**40.724.440.711.738**	**38.609.678.742.697**	**42.011.052.825.965**	**44.292.569.831.275**	**3,15**

Sumber: Neraca Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2022

Berdasarkan penyajian laporan keuangan yang dijelaskan di atas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode tahun 2018 sampai tahun 2021 disajikan sebagaimana Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Lancar (*current ratio*)	8,97	9,44	3,91	4,99	5,21
2	Rasio Cepat (*quick ratio*)	8,25	8,22	3,08	4,14	4,42
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Asset	0,010	0,011	0,052	0,097	0,090
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,011	0,011	0,055	0,107	0,099

Sumber: Hasil perhitungan, Tahun 2022

Hasil perhitungan rasio keuanganyang disajikan pada tabel diatas menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Secara rinci Analisis tersebut disajikan sebagai berikut.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu:

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar guna mengevaluasi kemampuan organisasi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar pada tahun 2018 adalah sebesar 8,97 dan dampai dengan periode tahun 2022 mencapai sebesar 5,21.

2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat berguna untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Quick ratio pada tahun 2018 sebesar 8,25 dan pada tahun 2022 *quick ratio* sebesar 4,42. Dengan hasil

tersebut menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas yaitu rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu organisasi dalam melunasi semua kewajiban. Termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan atau rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas secara rinci sebagai berikut:

1) Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio Total Utang Terhadap Total Aset menggambarkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, yaitu semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2018 sebesar 0,010 dan pada tahun 2022 sebesar 0,090 Hal ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

2) Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio Utang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2018 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,011 serta periode tahun 2022 sebesar 0,099. Dari perhitugan tersebut bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan

daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Kebijakan pengelolaan APBD Provinsi Jawa Barat periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian, serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Balai Penghasil.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
10. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui pemberian NPWP pada perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

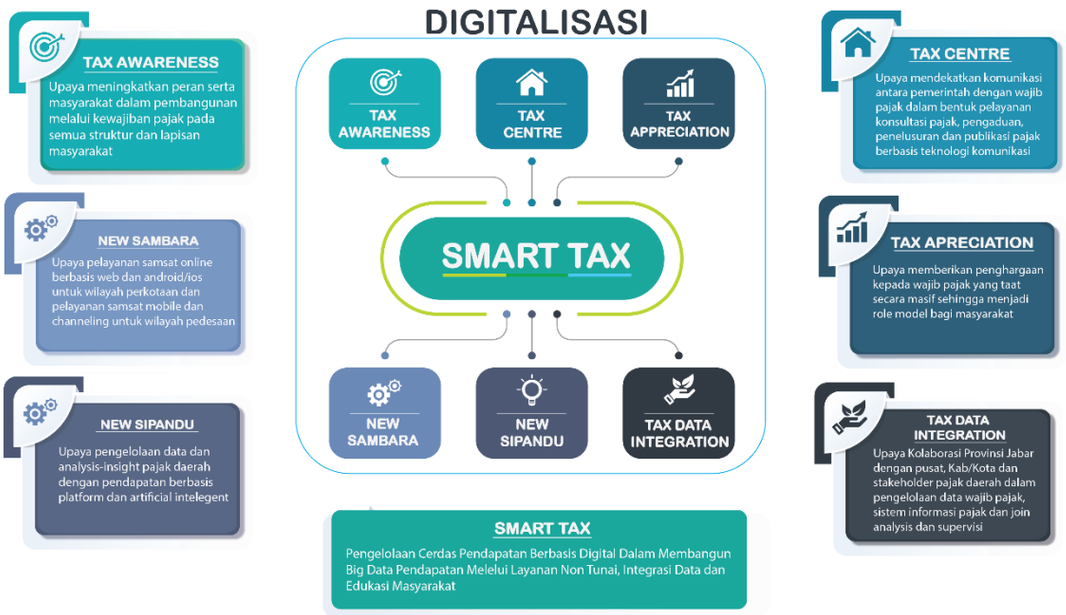
Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:

   Digitalisasi layanan pemerintah melalui platform digital dan elektronik sudah menjadi keharusan, khususnya dalam proses transaksi keuangan agar lebih efisien dan transparan. Hal tersebut yang kemudian mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upayanya meningkatkan pendapatan daerah dengan berbasis kepada digitalisasi layanan dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan secara digital, pengembangan infrastruktur digital serta kecakapan dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi.

   Digitalisasi tersebut kemudian diimplementasikan dengan strategi dan arah kebijakan yang disebut dengan *SMART TAX,* seperti tercantum dalam gambar berikut ini :

Gambar 3.1
SMART TAX



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

SMART *TAX* dimaksud kemudian diimplementasikan kedalam strategi dan kebijakan pendapatan berbasis digitalisasi sebagai berikut:

A. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dilaksanakan melalui:

1) *TAX AWARENESS*, Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kewajiban pajak pada semua struktur dan lapisan masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan, fokus kepada:
   a. Penguatan dan penyusunan regulasi pajak dan retribusi, baik berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, khususnya harmonisasi dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
   b. Sosialisasi kebijakan pendapatan di tingkat pusat maupun daerah, dengan optimalisasi berbagai media sosialisasi yang paling efektif dilapangan, diantaranya sosial media, videotron, push notifikasi serta sosialisasi langsung berbasis kolaborasi aktivitas dengan seluruh lapisan masyarakat.
2) NEW SAMBARA, Upaya pelayanan samsat *online* berbasis web dan android/ios untuk wilayah perkotaan dan pelayanan samsat *mobile* dan *channeling* untuk wilayah pedesaan. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada :

a. Implementasi *New* Sambara dengan elektronik Pengesahan;
b. Digitalisasi Layanan kesamsatan, khususnya dalam perluasan channeling transaksi pembayaran.

3) NEW SIPANDU, Upaya pengelolaan data dan *analysis-insight* pajak daerah dengan pendapatan berbasis platform dan *artificial intellegence.* Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada:
a. Implementasi *Virtual Account* dalam Sistem Layanan Pembayaran Setoran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. New SSOS (Sistem Layanan Samsat) terintegrasi penuh dengan Elektronik Regident dan Identification (ERI), aplikasi registrasi dari Kepolisian RI;

B. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik, dilaksanakan melalui:
1) *TAX CENTER*, Upaya mendekatkan komunikasi antara pemerintah dengan wajib pajak dalam bentuk pelayanan konsultasi pajak, pengaduan, penelusuran dan publikasi pajak berbasis teknologi komunikasi. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada:
a. Operasionalisasi Sim-C (*Samsat Information Centre*) dengan aktivasi layanan 24 jam pada nomor 150410, dan layanan berbasis *chatbot* pada nomor 081122301818;
b. Pengembangan kompetensi SDM Layanan dan Jafung Perpajakan seiring dengan upaya Reformasi Birokrasi di daerah.
2) *TAX APPRECIATION*, Upaya memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat secara masif sehingga menjadi *role model* bagi masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada :
a. Relaksasi pajak yang dilaksanakan secara selektif untuk mendorong kebijakan peningkatan pendapatan di tingkat pusat dan daerah;
b. Pelaksanaan *event exhibition* bekerjasama dengan seluruh *stakeholders* pendapatan daerah;
c. Pemberian Anugrah Philotra dari Gubernur Jawa Barat kepada para wajib pajak teladan di Jawa Barat.

3) *TAX DATA INTEGRATION*, Upaya kolaborasi Provinsi Jawa Barat dengan pusat, kab/kota dan *stakeholder* pajak daerah dalam pengelolaan data wajib pajak, sistem informasi pajak dan *join analysis* dan supervisi. Aktivitas yang dilaksanakan fokus kepada:

Integrasi data, diantaranya: data Kendaraan Bermotor dengan Korlantas Mabes Polri, data kependudukan dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, data wajib pajak dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, data pemilik seluler wajib pajak dengan operator, dan sebagainya;

Selain itu, secara umum, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tetap melakukan upaya-upaya lain yang efektif untuk peningkatan pendapatan, yaitu :

1) Optimalisasi deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2) Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara profesional.
3) Optimalisasi penerimaan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
4) Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar Perhitungan Bagi Hasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
   b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar Perhitungan Bagi Hasil.
   c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
   d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
   c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

2. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet; Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, diantaranya
   a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
   b. Pemenuhan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
   c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 (sembilan belas) jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan

ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
7. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
8. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
9. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan

kapasitas APIP.

10. Pengalokasian untuk pendanaan Bantuan Keuangan dan Hibah bersifat kompetitif dan menstimulus munculnya karya-karya inovatif yang memberikan efek akseleratif pencapaian target-target pembangunan strategis pembangunan daerah yang makin dirasakan masyarakat daerah.
11. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah.
12. Penyediaan alokasi Gaji dan Tunjangan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pemenuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara serentak.
14. Revitalisasi Kantor Cabang Dinas, Balai dan Satuan Pelayanan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.
15. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
16. Pendukungan penyelenggaraan PON Tahun 2024 di Aceh;
17. Pendukungan event olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Khusus untuk investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila APBD diperkirakan surplus serta pemerintah daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani

masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Sedangkan kebijakan pengeluaran diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah;
c. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;
d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; dan
e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja Provinsi Jawa Barat pada periode 2019-2021 dengan menyajikan analisis proporsi realisasi terhadap anggaran diuraikan pada subbab ini.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Realisasi rata–rata pertumbuhan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2019–2020 sebesar 91,78 persen, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja operasi sebesar 95,06 persen dan Belanja modal sebesar 80,91 persen. Belanja Tidak Terduga sebesar 48,65 serta Belanja Transfer sebesar 91,27 persen. Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, secara rinci disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Kode	Uraian	2019			2020		
		Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
5	**BELANJA**	**39.111.008.407.298**	**35.833.086.126.516**	**91,6**	**43.263.671.357.326**	**38.127.531.749.249**	**88,13**
5.1	**Belanja operasi**	**21.426.943.561.089**	**19.907.453.301.108**	**92,9**	**22.539.337.866.668**	**21.066.529.850.169**	**93,47**
5.1.01	Belanja pegawai	5.976.569.983.926	5.888.754.472.771	98,5	6.829.576.254.322	6.097.572.592.290	89,28
5.1.02	Belanja barang dan jasa	5.913.474.603.451	4.919.083.456.094	83,2	4.971.072.042.816	4.796.352.354.090	96,49
5.1.03	Belanja bunga				18.123.947.774	18.123.947.774	100,00
5.1.04	Belanja subsidi	20.000.000.000	19.384.264.000	96,9		-	
5.1.05	Belanja hibah	9.218.746.973.712	8.802.612.033.243	95,5	10.506.797.571.756	9.948.395.206.015	94,69
5.1.06	Belanja bantuan sosial	298.152.000.000	277.619.075.000	93,1	213.768.050.000	206.085.750.000	96,41
5.2	**Belanja modal**	**3.262.927.171.376**	**2.530.347.542.361**	**77,5**	**1.800.874.189.805**	**1.672.906.514.876**	**92,89**
5.2.1	Belanja Modal	3.262.927.171.376	2.530.347.542.361	77,5	1.800.874.189.805	1.672.906.514.876	92,89
5.3	**Belanja tidak terduga**	**31.258.487.180**	**-**		**4.659.456.084.240**	**3.154.919.548.515**	**67,71**
5.3.1	Belanja tidak terduga	31.258.487.180	-		4.659.456.084.240	3.154.919.548.515	67,71
5.4	**Belanja transfer**	**14.389.879.187.653**	**13.395.285.283.047**	**93,1**	**14.264.003.216.613**	**12.233.175.835.689**	**85,76**
5.4.01	Belanja bagi Hasil	8.184.719.740.938	7.901.869.013.400	96,5	8.770.891.955.109	7.212.501.291.449	82,23
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	6.205.159.446.715	5.493.416.269.647	88,5	5.493.111.261.504	5.020.674.544.240	91,40

Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2021, diolah

Lanjutan Tabel 3.7

Kode	Uraian	2021			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		APBD	Realisasi	(%)	
5	**BELANJA**	**39.398.010.292.994**	**37.660.599.775.404**	**95,59**	**91,78**
5.1	**Belanja operasi**	**23.912.893.585.699**	**23.628.811.208.051**	**98,81**	**95,06**
5.1.01	Belanja pegawai	6.341.916.140.318	6.185.782.232.700	97,54	95,12
5.1.02	Belanja barang dan jasa	7.078.884.886.395	6.879.212.783.098	97,18	92,28
5.1.03	Belanja bunga		-		33,33
5.1.04	Belanja subsidi		-		32,31
5.1.05	Belanja hibah	9.814.461.558.986	9.819.461.792.253	100,05	96,74
5.1.06	Belanja bantuan sosial	677.631.000.000	744.354.400.000	109,85	99,79
5.2	**Belanja modal**	**2.607.035.849.589**	**1.884.374.543.133**	**72,28**	**80,91**
5.2.1	Belanja Modal	2.607.035.849.589	1.884.374.543.133	72,28	80,91
5.3	**Belanja tidak terduga**	**481.045.722.364**	**376.415.565.853**	**78,25**	**48,65**
5.3.1	Belanja tidak terduga	481.045.722.364	376.415.565.853	78,25	48,65
5.4	**Belanja transfer**	**12.397.035.135.342**	**11.770.998.458.367**	**94,95**	**91,27**
5.4.01	Belanja bagi Hasil	7.845.680.998.429	7.608.373.465.011	96,98	91,92
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	4.551.354.136.913	4.162.624.993.356	91,46	90,46

Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2021, diolah

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur guna menyajikan kelompok belanja yang dialokasikan untuk kebutuhan aparatur. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur periode Tahun 2019-2021 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.641.345.847.077	2.532.857.992.683	2.561.466.904.432
2	Belanja Tambahan Penghasilan	1.472.412.473.875	2.059.386.858.796	2.097.023.615.370
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		236.666.381.523	1.144.794.053.299
3	Biaya Pemungutan Pajak			
4	Insentif Pemungutan Pajak	360.119.904.625	235.739.354.700	64.008.893.450
5	Insentif Pemungutan Retribusi	1.156.913.258	938.678.823	311.065.093
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	26.859.000.000	33.424.775.000	29.604.419.000,00
	Beban Pegawai BLUD			189.837.948.819,00
7	Belanja Honorarium PNS Provinsi	33.094.793.660	0	0
8	Honorarium PNS Non Provinsi	102.814.135.418	0	0
9	Belanja Uang Lembur		0	0
10	Uang Jahit Pakaian	-		
11	Belanja Premi Asuransi	2.487.061.135	1.778.632.540,92	484.025.767.378,58
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.027.448.480		
13	Belanja Pakaian Kerja	13.249.724.319		
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	26.735.230.836		
15	Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi	484.184.341.191	338.522.737.311,00	393.749.593.758,00
16	Belanja Perjalanan Dinas PNS Non Provinsi	11.820.164.675		
17	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-		
18	Belanja Pemulangan Pegawai	-		
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.299.103.178	1.931.792.000,00	1.907.442.000,00
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	33.354.202.657	7.736.968.180,00	11.495.786.247,00
21	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)**	442.735.902.658	374.306.561.490,00	436.581.045.646,00
TOTAL		**6.666.696.247.042**	**5.823.290.733.047**	**7.414.806.534.493**

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2021, diolah

Realisasi alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Provinsi Jawa Barat selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1	2019	6.666.696.247.042	35.909.886.124.516	18,57
2	2020	5.823.290.733.047	38.180.549.749.249	15,25
3	2021	7.414.806.534.493	37.760.599.775.404	19,64

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat 2019–2021, diolah

c. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran, yaitu dengan menghitung realisasi pengeluaran wajib dan mengikat, pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pengeluaran wajib dan mengikat terjadi kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,9 persen, peningkatan tersebut diantaranya komponen belanja sebesar 12,3 persen dan pengeluaran pembiayaan sebesar 10,9 persen . Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja**	**13.530.021.850.418**	**17.239.402.097.723**	**16.770.355.921.890**	**12,3**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.641.345.847.077	2.532.857.992.683	2.561.466.904.432	-14,7
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.472.412.473.875	2.059.386.858.796	2.097.023.615.370	20,8
3	Biaya Pemungutan Pajak	-			
4	Insentif Pemungutan Pajak	360.119.904.625	235.739.354.700	64.008.893.450	-53,7
5	Insentif Pemungutan Retribusi	1.156.913.258	938.678.823	311.065.093	-42,9
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	26.859.000.000	676.800.000	619.200.000	-53,0
7	Gaji dan Tunjangan DPRD	69.567.758.517	117.238.180.298	159.832.890.311	52,4
8	Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur	232.024.866	199.919.334	2.214.742.504	497,0
9	Belanja Penerimaan Lainnya Gubernur/Wakil Gubernur	31.400.715.000	32.747.975.000	28.985.219.000	-3,6

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	7.901.869.013.400	12.233.175.835.689	11.779.112.751.891	25,6
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada kepada Kabupaten/Kota	-			
12	Belanja Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga	-			
13	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	25.058.199.800	26.440.502.400	76.780.639.839	98,0
B	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**386.442.976.038**	**53.018.000.000**	**100.000.000.000**	**1,2**
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	386.442.976.038	53.018.000.000	100.000.000.000	1,2
	TOTAL A+B	**13.916.464.826.456**	**17.292.420.097.723**	**16.870.355.921.890**	**10,9**

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat 2019–2021, diolah

3.2.2 Proporsi Pembiayaan Daerah

Proporsi pembiayaan daerah disajikan guna memperkirakan defisit, serta untuk menghitung penutup defisit. Penutup defisit antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)		
		2019	2020	2021
1	Pendapatan Daerah	36.037.894.762.461	34.504.275.705.318	36.872.083.506.433
2	Belanja Daerah	35.833.086.126.516	38.127.531.749.249	37.660.599.775.404
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	76.799.998.800	53.018.000.000	100.000.000.000
A.	Defisit Riil	128.008.637.145	-3.676.274.043.931	-888.516.268.971
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	3.060.677.232.835	3.289.300.908.323	1.195.434.414.983
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-		
3	Koreksi	-		
B.	Total Realisasi Penerimaan	3.060.677.232.835	3.289.300.908.323	1.195.434.414.983
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**3.188.685.869.980**	**-386.973.135.608**	**306.918.146.012**

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2021

Selama kurun waktu 2019 sampai 2021, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertinggi pada tahun 2021 yaitu Rp306.918.146.012. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada periode Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata–Rata Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	3.060.677.232.835	3.289.300.908.323	1.195.434.414.983	-28,09
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-	-
3	Kegiatan lanjutan		-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya		3.060.677.232.835	3.289.300.908.323	1.195.434.414.983	-28

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2021, diolah

Gambaran realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Uraian	2019		2020		2021		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	**3.289.300.908.323**		**1.195.765.934.983**		**2.575.016.379.799**		
Bersumber Dari:							
Pelampauan Pendapatan	-89.224.126.002,34	-2,71	-3.710.717.966.298,63	-310,32	868.841.564.937,39	33,74	56,2
Sisa Pelaksanaan Belanja Daerah			3.105.312.227.153,00	259,69	1.342.927.472.479,00	52,15	
Sisa Pelaksanaan Transfer			2.030.827.380.924,00	169,83	617.922.383.451,00	24,00	
Penghematan Belanja	3.277.922.286.781	99,65					
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	100.602.376.344	3,06	-229.655.706.796	-19,21	-254.675.041.068	-9,89	-3,9
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	1.200						
Penghematan Pembiayaan Netto							

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2021, diolah

3.3 Kerangka Pendanaan

Kapasitas total keuangan daerah disajikan dengan melakukan analisis kerangka pendanaan, kapasitas keuangan tersebut dialokasikan untuk mendanai program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan mulai tahun 2024 sampai dengan 2026.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ("UU HKPD") pengaturan pendapatan daerah diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi diatur di dalam Undang-undang Nomor Tahun 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU PDRD") sementara dana perimbangan yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ("UU Perimbangan Keuangan"). Namun dalam UU HKPD, sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD.

UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentraslisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 (empat) pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

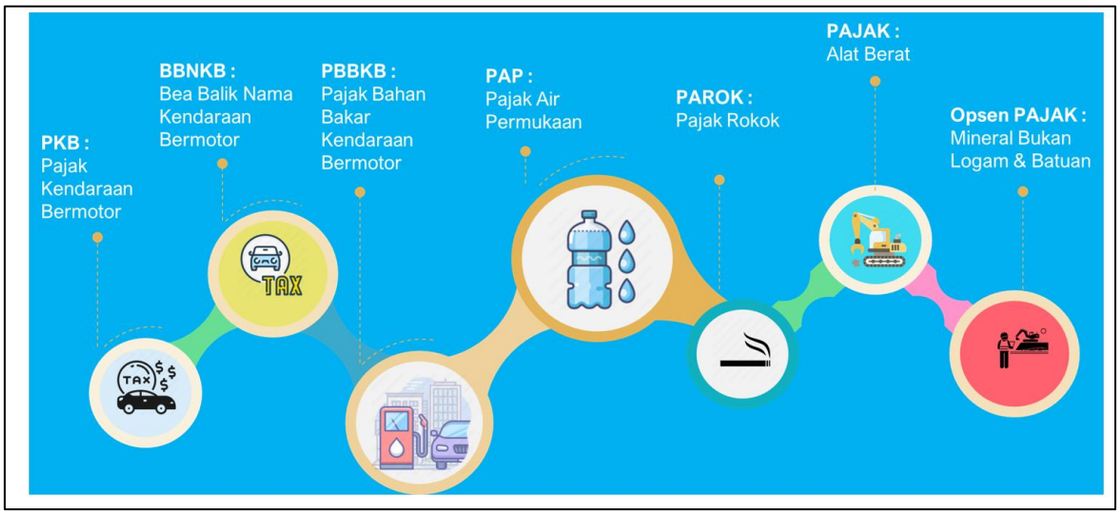
Dalam upaya menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, UU HKPD merancang ulang pengelolaan transfer ke daerah dengan mereformulasi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Istimewa dan Dana Desa dengan mengedepankan kinerja Daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan layanan publik. Alokasi DBH akan disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan 1 (satu) tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Oleh karena itu, kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara akan diperhitungkan begitu pula perbaikan lingkungan yang terdampak kegiatan eksploitasi. Reformulasi DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan

Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah untuk mencapai prioritas nasional sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.

Terkait pilar kedua, yaitu penguatan *local taxing power* dalam kaitan dengan kewenangan Provinsi, diberlakukannya skema pemungutan Opsen Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota tanpa menambah beban wajib pajak dan berlaku efektif pada tahun 2025. Opsen Pajak juga diharapkan mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Opsen atas PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB sekaligus mempercepat penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota. Opsen Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan sumber penerimaan baru yang dapat digunakan untuk mendanai kewenangan Provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB dengan kata lain memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Pemungutan Opsen Pajak ini menuntut sinergi yang baik antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah juga memperluas basis pajak melalui sinergi pajak Pusat dan Daerah seperti valet parkir, objek rekreasi dan sebagainya. Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi retribusi dilakukan agar retribusi yang akan dipungut Daerah dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Dengan berlakunya UU HKPD ini, maka pada tahun 2025, terdapat penambahan 2 (dua) jenis pajak yang menjadi kewenangan Provinsi, dari yang semula hanya 5 (lima) jenis pajak menjadi 7 (tujuh) jenis pajak yaitu semula PKB, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, bertambah 2 (dua), yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen MBLB.

Gambar 3.2
Jenis Pajak yang Ditangani Provinsi Jawa Barat



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

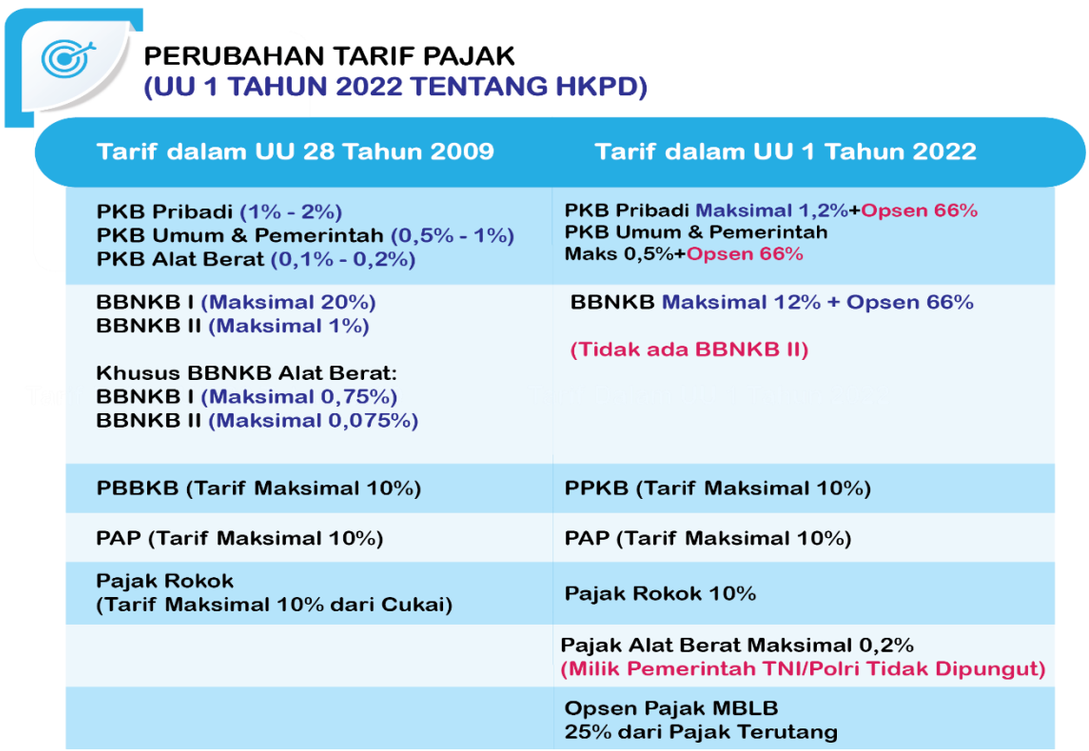
Bagi Provinsi Jawa Barat, PKB dan BBNKB saat ini masih menjadi tumpuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang dimiliki bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, jumlah Pendapatan Asli Daerah berada di angka Rp19.6 Triliun pada tahun 2018, meningkat di angka Rp21,2 Triliun pada tahun 2019, namun saat terjadi pandemi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi penurunan jumlah PAD ke angka sebesar Rp18,5 Triliun pada tahun 2020 dan Rp20,33 Triliun pada tahun 2021. Dari angka tersebut, PKB dan BBNKB sangat terpengaruhi sekali sehingga memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian PAD pada setiap tahunnya. Dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2023, rata-rata kontribusi PKB mencapai sebesar 39,38 persen dan rata-rata kontribusi BBNKB sebesar 26,08 persen.

Atas dasar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, yang diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi kontribusi terbesar dalam menyokong terselenggaranya pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Terkait kondisi diatas, setidaknya ada 3 (tiga) hal terkait pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB, diantaranya yaitu:

1. Beban Terhadap Wajib Pajak : *"Opsen"* (PKB & BBNKB) dalam penjelasan UU nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa pungutan Opsen ***TANPA*** menambah beban WP, sehingga hasil simulasi akan mengurangi kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi

2. Tarif Eksisting PKB & BBNKB : Perbedaan tarif PKB & BBNKB yang berlaku saat ini, antar Provinsi (Bahkan Dengan Provinsi Tetangga) khususnya PKB pribadi (1,5 persen; 1,75 persen & 2 persen) & BBNKB (10 persen & 12,5 persen)
3. Pengelolaan Pembayaran : Pengelolaan Opsen (PKB & BBNKB), terkait kesiapan teknis (SDM, Sarana dan Prasarana, serta sistem/aplikasi kesamsatannya Khusus untuk perubahan besaran tarif PKB dan BBNKB dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.3
Perubahan Tarif PKB dan BBNKB



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2023

Dari hasil perubahan besaran tarif PKB dan BBNKB ini akan menjadikan perubahan yang sangat penting mengingat akan terjadi secara nyata berkurangnya besaran pendapatan daerah yang pada gilirannya akan mengurangi kapasitas fiskal daerah, artinya bahwa besaran volume APBD Provinsi Jawa Barat akan berkurang ketika besaran tarif tersebut harus diberlakukan. Adapun pemberlakukan tarif tersebut akan dilaksanakan setelah ada kesepakatan antar pemerintah daerah dengan pihak legislatif melalui proses penyusunan Peraturan Daerah tentang

Pajak dan Retribusi Daerah yang didalamnya mengatur terkait besaran tarif baru PKB dan BBNKB.

Dampak secara langsung apabila diterapkannya tarif maksimal PKB di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,2 persen adalah akan adanya beban tambahan kepada Wajib Pajak. Adapun beban tambahan bagi wajib pajak PKB sebesar 13,83 persen. Hal ini tentunya akan berdampak kepada adanya potensi pengurangan tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan mengacu kepada data pada tahun 2021, tingkat ketaatan PKB di Jawa Barat mencapai 48 persen saja, dan akan menurun apabila ada kenaikan tarif pajak, yang pada gilirannya akan menurunkan PAD yang bersumber dari PKB. Selain itu apabila diterapkan tarif maksimal BBNKB di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 12 persen, maka akan adanya beban tambahan beban wajib pajak PKB sebesar 59,36 persen dari tarif eksisting saat ini.

Sementara itu, terkait implementasi PKB menggunakan tarif proporsional sebesar 1,05 persen, apabila kemudian dibandingkan dengan tarif eksisting saat ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada beban tambahan untuk wajib pajak, bahkan ada penurunan sebesar 0,39 persen. Namun disisi lain, Dampak secara langsung apabila diterapkannya tarif proporsional PKB di Provinsi Jawa Barat adalah akan adanya pengurangan kepada PAD Provinsi Jawa Barat sebesar 14,28 persen. Pun hal yang sama berlaku buat BBNKB, jika diberlakukan tarif proporsional sebesar 7,5 persen, akan membuat perolehan pajak BBNKB menurun sebesar 14,28 persen setiap tahunnya.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sehingga proyeksi pendapatan tahun 2024-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan proyeksi belanja mempertimbangkan dampak yang muncul dari diberlakukannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tersebut terhadap kapasitas fiskal daerah. Adapun target dan proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.14
Target dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026

No	Uraian	Realisasi & Target		Rata-rata pertumbuhan (%)	Proyeksi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2022 (unaudited)	Target 2023		2024	2025	2026	
4	**PENDAPATAN**	**33.236.110.512.395**	**34.145.929.529.980**	2,74	**35,507,798,068,534**	**30,139,548,525,621**	**31,069,337,991,759**	-2,68
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**23.249.622.253.957**	**23.688.886.923.717**	1,89	**24,877,856,360,126**	**19,367,979,017,912**	**20,151,850,943,759**	-4,36
4.1.01	Pajak Daerah	21.542.602.963.635	21.928.395.580.782	1,79	22,990,203,335,926	17,349,644,918,341	18,035,136,337,048	-5,25
4.1.02	Retribusi Daerah	44.837.616.240	55.800.551.443	24,45	56,079,554,200	56,359,951,971	56,641,751,731	0,50
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	468.989.416.325	527.524.000.000	12,48	536,690,000,000	563,500,000,000	591,675,000,000	3,91
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.193.192.257.757	1.177.166.791.492	-1,34	1,294,883,470,000	1,398,474,147,600.00	1,468,397,854,980.00	7,67
4.2	**Pendapatan Transfer**	**9.889.116.424.368**	**10.428.245.888.665**	5,45	**10,600,713,040,047**	**10,741,902,409,322**	**10,887,374,943,137**	1,45
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	9.860.664.924.368	10.428.245.888.665	5,76	10,600,713,040,047	10,741,902,409,322	10,887,374,943,137	1,45
4.2.01.01	Dana Perimbangan	9.821.049.167.368	10.428.245.888.665	6,18	10,551,193,343,797	10,680,002,789,010	10,810,000,417,747	1,21
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.107.890.742.700	2.095.558.173.665	-0,59	2,137,469,337,138	2,180,218,723,881	2,223,823,098,358	2,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.981.692.750.817	3.298.968.208.000	10,64	3,331,957,890,080	3,365,277,468,980	3,398,930,243,670	1,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	4.731.465.673.851	5.033.719.507.000	6,39	5,081,766,116,579	5,134,506,596,149	5,187,247,075,719	1,01
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	39.615.757.000	-	-100,00	49,519,696,250	61,899,620,312	77,374,525,390	-
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**0**	-	-100,00				-
4.2.02.01	Dana Penyesuaian	0	-	-				-
4.2.03	Transfer Antar Daerah	28.451.500.000	-	-100,00				-
4.2.03.01	Pendapatan bagi hasil	0	0	-70,43				1,50
4.2.03.02	Bantuan Keuangan	28.451.500.000	-	-33,96				1,50
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**97.371.834.070**	**28.796.717.598**	-	**29,228,668,361**	**29,667,098,387**	**30,112,104,863**	-
4.3.01	Hibah	43.604.779.909	28.796.717.598	-100,00	29,228,668,361	29,667,098,387	30,112,104,863	-
4.3.02	Dana darurat	-	-	2,74				-2,68
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	53.767.054.161	-	1,89				-4,36

No	Uraian	Realisasi & Target		Rata-rata pertumbuhan (%)	Proyeksi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2022 (unaudited)	Target 2023		2024	2025	2026	
5	**Belanja**	**32.772.894.100.912**	**33.931.471.129.658**	3,54	**35.783.536.342.173**	**29.415.286.799.260**	**30.345.076.265.398**	-0,74
5.01.00	**Belanja Operasi**	**17.173.841.212.703**	**18.144.745.934.282**	5,65	**19.352.094.785.990**	**18.521.237.709.748**	**18.795.021.258.187**	3,82
5.01.01	Belanja pegawai	6.671.258.864.365	7.243.901.941.481	8,58	7.424.999.490.018	7.610.624.477.268	7.800.890.089.200	2,50
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	6.978.233.442.923	6.987.907.168.411	0,14	7.206.721.037.381	7.157.103.062.237	7.107.485.087.092	5,09
5.01.03	Belanja Bunga	-	-	-				-
5.01.04	Belanja Subsidi	22.171.174.200	10.000.000.000	-54,90	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	16,67
5.01.05	Belanja Hibah	3.305.292.221.215	3.656.302.582.390	10,62	4.455.147.825.228	3.473.045.880.499	3.590.943.935.770	4,04
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	196.885.510.000	246.634.242.000	25,27	250.226.433.363	265.464.289.744	280.702.146.124	4,43
5.02.00	**Belanja Modal**	**2.417.809.739.850**	**2.546.020.486.341**	5,30	**2.758.444.496.581**	**2.619.186.697.449**	**2.857.189.783.689**	5,50
5.02.01	Belanja Modal	2.417.809.739.850	2.546.020.486.341	5,30	2.758.444.496.581	2.619.186.697.449	2.857.189.783.689	5,50
5.03.00	**Belanja Tidak Terduga**	**93.700.984.191**	**248.276.894.239**	164,97	**200.000.000.000**	**150.000.000.000**	**150.000.000.000**	-14,81
5.03.01	Belanja tidak terduga	93.700.984.191	248.276.894.239	164,97	200.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	-14,81
5.04.00	**Belanja Transfer**	**13.087.542.164.168**	**12.992.427.814.796**	-0,73	**13.472.997.059.603**	**8.124.862.392.063**	**8.542.865.223.523**	-8,00
5.04.01	Transfer Bagi Hasil Pajak	9.221.944.994.686	9.279.558.801.499	0,62	9.831.547.498.721	5.346.777.545.712	5.628.145.091.703	-11,47
5.04.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemeritah Daerah Lainnya	3.865.597.169.482	3.712.869.013.297	-3,95	3.641.449.560.882	2.778.084.846.351	2.914.720.131.820	1,82
5.04.03	Transer Bantuan Keuangan Ke Desa							

Sumber: - LRA 2022 (unaudited)
- Perda APBD 2023
- Hasil Proyeksi, 2023

3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.15
Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	Realisasi & Target		Rata-rata pertumbuhan (%)	Proyeksi			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi 2022 (unaudited)	2023		2024	2025	2026	
6	**Pembiayaan**	**1.873.440.805.771**	**(214.458.400.322)**	5291,91%	**275.738.273.639**	**(724.261.726.361)**	**(724.261.726.361)**	-181,33%
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**2.635.546.283.321**	**873.283.244.970**	-59,59%	1.000.000.000.000	-	-	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.575.016.379.799	873.283.244.970	-54,16%				
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-		1.000.000.000.000	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	60.529.903.522						
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-						
6.1	Penerimaan Piutang Daerah							
6.1.08	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-					
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**762.105.477.550**	**1.087.741.645.292**	47,55%	724.261.726.361	724.261.726.361	724.261.726.361	
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	356.741.645.292	39,66%	624.261.726.361	624.261.726.361	624.261.726.361	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	562.105.477.550	231.000.000.000	-35,09%	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000.000	500.000.000.000	400,00%				
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah							
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan							

Sumber: - LRA 2022 (unaudited)
- Perda APBD 2023
- Hasil Proyeksi 2023

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2022. Selanjutnya untuk tahun 2024 sampai tahun 2026 diproyeksikan nol. Proyeksi nol ini dengan asumsi pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Tabel 3.16
Proyeksi SiLPA Tahun 2022 dan Tahun 2026

Tahun	SiLPA (Rp)
2022	2.575.016.379.799
2023	873.283.244.970
2024	-
2025	-
2026	-

Sumber: Perda APBD, 2022

2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan 2023 memiliki nilai yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana telah disajikan pada halaman-halaman sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pengertian belanja wajib dan belanja mengikat yang berbeda pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Rincian proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.17
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026

No	Uraian	Realisasi & Target				Proyeksi					
		Realisasi 2022 (unaudited)	%	Target 2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
A	**Belanja Mengikat**	6.568.021.090.570	20,34	7.126.401.200.824	21,414	7.527.576.724.530	21,22	7.715.766.142.643	21,82	7.908.660.296.209	21,52
1	Belanja Pegawai	6.568.021.090.570	20,34	7.126.401.200.824	21,414	7.527.576.724.530	21,22	7.715.766.142.643	21,82	7.908.660.296.209	21,52
2	Belanja Bunga	0		0		0		0		0	
B	**Belanja Wajib**	13.165.966.554.915	40,78	13.454.301.222.468	40,428	11.164.133.695.553	31,46	11.716.758.313.483	33,13	12.296.737.850.000	33,47
1	Pendidikan	6.317.291.799.280	19,57	6.417.291.799.280	19,283	6.734.947.743.344	18,98	7.068.327.656.640	19,99	7.418.209.875.644	20,19
2	Kesehatan	1.084.322.844.592	3,36	1.218.012.597.539	3,66	1.278.304.221.117	3,60	1.341.580.280.062	3,79	1.407.988.503.926	3,83
3	Infrastruktur	1.252.909.709.225	3,88	2.729.662.124.881	8,2023	2.864.780.400.063	8,07	3.006.587.029.866	8,50	3.155.413.087.844	8,59
4	Peningkatan Kapasitas SDM	205.587.166.356	0,64	210.089.525.299	0,6313	220.488.956.801	0,62	231.403.160.163	0,65	242.857.616.591	0,66
5	Penguatan APIP	60.133.079.904	0,19	62.517.745.810	0,1879	65.612.374.228	0,18	68.860.186.752	0,19	72.268.765.996	0,20
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	702.105.478.367	2,17	1.261.000.000.000	3,7891	724.261.726.361	2,04	724.261.726.361	2,05	724.261.726.361	1,97
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	100.000.000.000	0,31	500.000.000.000	1,5024	624.261.726.361	1,76	624.261.726.361	1,77	624.261.726.361	1,70
2	Penyertaan Modal Daerah	402.105.478.367	1,25	261.000.000.000	0,7843	100.000.000.000	0,28	100.000.000.000	0,28	100.000.000.000	0,27
3	Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000.000	0,62	500.000.000.000	1,5024						
4	Pemberian Pinjaman Daerah										
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.										
	Total Belanja Wajib Mengikat	20.436.093.123.852	63,30	21.841.702.423.292	67,912	19.415.972.146.444	54,72	20.156.786.182.487		20.929.659.872.570	56,96

Sumber: - LRA 2022 (unaudited)
- Perda APBD 2023
- Hasil proyeksi, 2023

3. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan sebagai penerimaan, serta pengeluaran yang terdiri atas Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk periode RPD Tahun 2024-2026 Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.18
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026

No	Uraian	Realisasi & Target		Proyeksi		
		Realisasi 2022 (unaudited)	Target 2023	2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN**	**33.236.110.512.395**	**34.145.929.529.980**	**35.507.798.068.534**	**30.139.548.525.621**	**31.069.337.991.759**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**23.249.622.253.957**	**23.688.886.923.717**	**24.877.856.360.126**	**19.367.979.017.912**	**20.151.850.943.759**
4.1.01	Pajak Daerah	21.542.602.963.635	21.928.395.580.782	22.990.203.335.926	17.349.644.918.341	18.035.136.337.048
4.1.02	Retribusi Daerah	44.837.616.240	55.800.551.443	56.079.554.200	56.359.951.971	56.641.751.731
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	468.989.416.325	527.524.000.000	536.690.000.000	563.500.000.000	591.675.000.000
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.193.192.257.757	1.177.166.791.492	1.294.883.470.000	1.398.474.147.600	1.468.397.854.980
4.2	**Pendapatan Transfer**	**9.889.116.424.368**	**10.428.245.888.665**	**10.600.713.040.047**	**10.741.902.409.322**	**10.887.374.943.137**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	9.860.664.924.368	10.428.245.888.665	10.600.713.040.047	10.741.902.409.322	10.887.374.943.137
4.2.01.01	Dana Perimbangan	9.821.049.167.368	10.428.245.888.665	10.551.193.343.797	10.680.002.789.010	10.810.000.417.747
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.107.890.742.700	2.095.558.173.665	2.137.469.337.138	2.180.218.723.881	2.223.823.098.358
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.981.692.750.817	3.298.968.208.000	3.331.957.890.080	3.365.277.468.980	3.398.930.243.670
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	4.731.465.673.851	5.033.719.507.000	5.081.766.116.579	5.134.506.596.149	5.187.247.075.719
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	39.615.757.000	-	49.519.696.250	61.899.620.312	77.374.525.390
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		-			
4.2.02.01	Dana Penyesuaian		0			
4.2.03	Transfer Antar Daerah	28.451.500.000	-	-	-	-
4.2.03.01	Pendapatan bagi hasil		-			
4.2.03.02	Bantuan Keuangan	28.451.500.000	-			
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**97.371.834.070**	**28.796.717.598**	**29.228.668.361**	**29.667.098.387**	**30.112.104.863**
4.3.01	Hibah	43.604.779.909	28.796.717.598	29.228.668.361	29.667.098.387	30.112.104.863
4.3.02	Dana darurat		-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi & Target		Proyeksi		
		Realisasi 2022 (unaudited)	Target 2023	2024	2025	2026
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	53.767.054.161	-			
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**2.635.546.283.321**	**873.283.244.970**	**1.000.000.000.000**	**0**	**0**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.575.016.379.799	873.283.244.970	-	-	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	1.000.000.000.000	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	60.529.903.522	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	-	-	-
6.1	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	-	-	-
6.1.08	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-	-	-
Total Penerimaan		**35.871.656.795.716**	**35.019.212.774.950**	**36.507.798.068.534**	**30.139.548.525.621**	**31.069.337.991.759**
5	**Belanja**	**32.772.894.100.912**	**33.931.471.129.658**	**35.783.536.342.173**	**29.415.286.799.260**	**30.345.076.265.398**
5.01.00	**Belanja Operasi**	**17.173.841.212.703**	**18.144.745.934.282**	**19.352.094.785.990**	**18.521.237.709.748**	**18.795.021.258.187**
5.01.01	Belanja Pegawai	6.671.258.864.365	7.243.901.941.481	7.424.999.490.018	7.610.624.477.268	7.800.890.089.200
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	6.978.233.442.923	6.987.907.168.411	7.206.721.037.381	7.157.103.062.237	7.107.485.087.092
5.01.03	Belanja Bunga		-			
5.01.04	Belanja Subsidi	22.171.174.200	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
5.01.05	Belanja Hibah	3.305.292.221.215	3.656.302.582.390	4.455.147.825.228	3.473.045.880.499	3.590.943.935.770
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	196.885.510.000	246.634.242.000	250.226.433.363	265.464.289.744	280.702.146.124
5.02.00	**Belanja Modal**	**2.417.809.739.850**	**2.546.020.486.341**	**2.758.444.496.581**	**2.619.186.697.449**	**2.857.189.783.689**
5.02.01	Belanja Modal	2.417.809.739.850	2.546.020.486.341	2.758.444.496.581	2.619.186.697.449	2.857.189.783.689
5.03.00	**Belanja Tidak Terduga**	**93.700.984.191**	**248.276.894.239**	**200.000.000.000**	**150.000.000.000**	**150.000.000.000**
5.03.01	Belanja tidak terduga	93.700.984.191	248.276.894.239	200.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
5.04.00	**Belanja Transfer**	**13.087.542.164.168**	**12.992.427.814.796**	**13.472.997.059.603**	**8.124.862.392.063**	**8.542.865.223.523**
5.04.01	Transfer Bagi Hasil Pajak	9.221.944.994.686	9.279.558.801.499	9.831.547.498.721	5.346.777.545.712	5.628.145.091.703

No	Uraian	Realisasi & Target		Proyeksi		
		Realisasi 2022 (unaudited)	Target 2023	2024	2025	2026
5.04.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemeritah Daerah Lainnya	3.865.597.169.482	3.712.869.013.297	3.641.449.560.882	2.778.084.846.351	2.914.720.131.820
5.04.03	Transer Bantuan Keuangan Ke Desa	0	0	0	0	0
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**762.105.477.550**	**1.087.741.645.292**	**724.261.726.361**	**724.261.726.361**	**724.261.726.361**
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	356.741.645.292	624.261.726.361	624.261.726.361	624.261.726.361
6.2.02	Penyertaan modal daerah	562.105.477.550	231.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000.000	500.000.000.000	0	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0
Total Pengeluaran		**33.534.999.578.462**	**35.019.212.774.950**	**36.507.798.068.534**	**30.139.548.525.621**	**31.069.337.991.759**

Sumber: - LRA 2022 (unaudited)
- Perda APBD 2023
- Hasil Proyeksi, 2023

4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan kebijakan sebagai upaya dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian sasaran RPD. Rencana penggunaan kapasitas keuangan akan dialokasikan berdasarkan prioritas, yaitu:

a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
b. **Prioritas II,** dialokasikan membiayai program perangkat daerah dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Lebih rinci mengenai alokasi masing-masing prioritas disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Uraian	Proyeksi		
	2024	2025	2026
Kapasitas riil keuangan daerah:	**35.481.822.506.674**	**35.362.753.770.176**	**36.744.259.907.364**
Prioritas I	19.244.735.277.237	19.977.073.088.254	20.741.050.980.173
Prioritas II	16.237.087.229.437	15.385.680.681.922	16.003.208.927.191

Sumber: Hasil proyeksi, 2023

3.3.4 Alternatif Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD provinsi. Walau demikian, peluang untuk sumber-sumber pendanaan lainnya berkontribusi dalam membiayai pembangunan daerah sangat terbuka lebar. Sehubungan dengan potensi tersebut, maka pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2024-2026 telah mengindentifikasi beberapa sumber pendanaan non APBD provinsi, antara lain:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi Jawa Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

serta urusan bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

b. APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

c. *Corporate Social Responbility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif terhadap masyarakat. Sampai dengan tahun 20212, telah terdaftar sebanyak 260 mitra PKBL dan TJSL Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya terbagi menjadi 189 perusahaan swasta, 50 BUMN dan 21 BUMD. Realisasi program pembangunan melalui CSR di Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar Rp.181.885.282.142, atau meningkatkan sebesar 96,10 persen dibandingkan pelaporan pada Tahun 20201 Rp92,75 Milyar). Tiga sektor terbesar yang menyumbang capaian realisasi CSR ini berasal dari sektor Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan, Lingkungan, dan Pendidikan. Capaian pelaporan realisasi CSR Jawa Barat di 2022 ini dilaporkan oleh 91 perusahaan mitra CSR dari 260 perusahaan yang telah bergabung.

Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Jawa Barat ditempuh melalui:

1. Perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Jawa Barat.
2. Penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2024.

d. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dari aspek pembiyaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bersama-sama membiayai pengakselerasian pembangunan.

Sampai dengan tahun 2022, dari seluruh proyek strategis yang direncanakan dibiayai melalui skema KPBU, sebanyak 1 (satu) proyek telah mencapai tahap konstruksi, 1 (satu) proyek telah dalam tahap transaksi (already tendered), dan sisanya masih dalam tahap penyiapan dan perencanaan. TPPAS Lulut Nambo, yang telah memasuki fase konstruksi,

saat ini dalam tahap pemenuhan keuangan (*Financial Close*), yang mana diharapkan akan operasional penuh pada Februari 2024. Selanjutnya, proyek TPPAS Regional Legok Nangka, telah memasuki fase Transaksi (*already tendered*). Saat ini sedang dalam proses menunggu persetujuan VGF dari Kementerian keuangan untuk dapat melaksanakan proses Request for Proposal (RfP).

Selanjutnya, terdapat 4 (empat) proyek yang saat ini masih dalam proses penyiapan, yaitu SPAM Jatigede, SPAM Sinumbra (*unsolicited*), LRT Bandung Raya dan Penerangan Jalan Umum (*unsolicited*). Selain itu juga terdapat beberapa proyek yang masih berada dalam tahap perencanaan, yaitu proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya; Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Gedung-Gedung Sekolah dan Pemerintahan; Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Padjadjaran (UNPAD); dan Proyek Konektivitas Digital (*Digital Connectivity*) di Jawa Barat. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan proses pembangunan proyek strategis melalui skema KPBU dapat dilanjutkan.

e. Dana Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

f. Pendanaan Obligasi Daerah dan Sukuk

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal. Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko yang ada. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan (*revenue bond*). Selain Obligasi Daerah, potensi sumber pembiayaan daerah lainnya adalah Obligasi Syariah atau Sukuk.

Sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2023, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Penyiapan pranata regulasi dan kelembagaan antara lain melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Barat serta pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Adapun proyek potensial yang dapat didanai dari Obligasi/Sukuk Daerah di Jawa Barat, disajikan tabel di bawah.

Tabel 3.20
Potensi Proyek yang Didanai dari Obligasi/Sukuk Daerah

No.	Proyek
1	Pengembangan RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat
2	Pengembangan RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat
3	Pengembangan RSUD Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat
4	Pembangunan Aksesibilitas BIJB melalui *Aerocity*

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Biro BIA Setda Jabar, 2023, diolah

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran umum pada Bab II dan hasil evaluasi RPJMD 2018-2023. Permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 berdasarkan aspek geografi dan demografi, Aspek kesejakteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah disajikan sebagai berikut:

1. **Aspek Geografi dan Demografi**

   Pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi (sebagaimana tercantum pada 2.1.3 Kondisi Demografi) yang disebabkan oleh Tingkat kelahiran tergolong masih tinggi dan Tingkat urbanisasi masih tinggi. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 sebanyak 49.405.808 jiwa, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,28 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, beban migrasi yang cukup tinggi di kawasan Bodebek dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 4,5 persen per tahun.

2. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

   a. **Pertumbuhan ekonomi belum berada pada level yang semestinya**

      Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,45 persen. Capaian ekonomi Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Namun, pada sisi lain masih terdapat faktor pendukung pertumbuhan ekonomi yang capaiannya masih rendah dibandingkan nasional yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Penduduk Miskin (sebagaimana tercantum pada subab 2.2.1 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB). Hal ini disebabkan oleh daya saing tenaga kerja masih rendah dan serapan tenaga kerja menurun; terdapat cukup banyak kelompok masyarakat yang rentan miskin; dan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia Belum optimal

Kualitas sumber daya manusia sebuah daerah dapat diindikasikan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak. Berdasarkan data BPS, nilai IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mencapai 73,12 poin dengan kategori Tinggi, yang berarti IPM Provinsi Jawa Barat berada diatas IPM nasional yang mencapai 72,91 poin. Namun, dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, capaian IPM Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Provinsi Banten.

Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di Jawa Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pada saat pandemi COVID-19. Walau demikian, capaiannya masih berada di bawah nasional. Pada tahun 2022, HLS nasional berada pada posisi 13,10 tahun sementara Jawa Barat mencapai 12,62 tahun. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, HLS Provinsi Jawa Barat merupakan yang terendah dibandingkan 5 (lima) provinsi lainnya.

Dibandingkan dengan dimensi lain pembentuk IPM, RLS Provinsi di Pulau Jawa mengalami perlambatan peningkatan akibat terkena dampak pandemi yang lebih panjang. Bila ditinjau kondisi RLS di kabupaten/kota di Jawa Barat, maka masih ditemui kesenjangan capaian RLS antardaerah. Pada umumnya, kabupaten/kota di wilayah tengah memiliki capaian RLS diatas 8 (delapan) tahun, sedangkan wilayah kabupaten yang terletak di bagian Utara, Selatan dan Timur Provinsi Jawa Barat hampir seluruhnya memiliki capaian RLS dibawah 8 (delapan) tahun. Data tahun 2022 menunjukkan RLS tertinggi di Kota Depok sebesar 11,47 tahun dan terendah di Kabupaten Indramayu yakni 6,83 tahun.

Lebih lanjut, dimensi kesehatan dalam IPM ditunjukkan dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Capaian UHH Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 73,52 tahun, angka ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir diperkirakan dapat menjalani hidup hingga usia 73 tahun. Meskipun capaian UHH secara akumulatif mengalami peningkatan, namun masih terjadi

ketimpangan capaian UHH di 27 kabupaten/kota. Dari 27 kabupaten/kota hanya 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki capaian UHH diatas nilai provinsi.

Salah satu prioritas dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah peningkatan penurunan angka *stunting*. Selama beberapa tahun terakhir, prevalensi *stunting* di Jawa Barat menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2022 prevalensi *stunting* mencapai 20,19 persen, yang berarti turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 24,50 persen. Walaupun menunjukkan penurunan, upaya untuk menekan prevalensi *stunting* harus terus diupayakan dengan tidak hanya melibatkan pemerintah daerah provinsi, namun juga dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Pusat dan seluruh masyarakat serta berbagai pihak terkait.

Sementara pada dimensi standar hidup layak, mengingat besarnya populasi penduduk yang menjadi faktor pembagi angka perkapita, nilai pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat di lingkup regional Pulau Jawa pada tahun 2022 relatif kecil. Selain itu, data Pengeluaran per kapita tahun 2022 di kabupaten/kota menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah di Provinsi Jawa Barat bagian Utara dengan Jawa Barat bagian Selatan. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan untuk wilayah Jawa Barat bagian Selatan masih kurang dari Rp9,3 juta per tahun, sementara kabupaten/kota di Jawa Barat bagian Utara secara umum menunjukkan nilai pengeluaran per kapita disesuaikan pada kisaran Rp9 juta hingga Rp17,6 juta per tahun.

c. Daya saing tenaga kerja masih rendah

Tahun 2022 yang merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD 2018-2023, Jawa Barat masih dihadapkan pada permasalahan tingkat pengangguran terbuka yang relatif lebih tinggi. Meskipun capaian TPT pada tahun 2022 sebesar 8,31 persen, dimana mengalami penurunan sebesar 1,51 persen poin dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 9,82 persen. Namun, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang mencapai 5,86 persen provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini perlu

menjadi fokus kebijakan mengingat tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat pembangunan daerah dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Akar masalah yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat adalah rendahnya daya saing tenaga kerja muda dengan indikasi ini tercermin dari tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan, dimana TPT Jawa Barat didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu, tingginya angka pengangguran mengindikasikan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja, karakteristik sektor industri yang cenderung padat modal menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang semakin kecil, angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta dunia kerja, ketidakstabilan perekonomian, dan rendahnya wirausaha.

d. Masih adanya kelompok masyarakat yang rentan miskin

Pandemi COVID-19 yang mulai menginfeksi pada Maret 2020 memberikan pesan penting, yakni terdapat kelompok masyarakat yang rentan miskin akibat guncangan ekonomi. Hal ini tercermin dari jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat signifikan dibanding kondisi sebelum pandemi. Kondisi demikian menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat mengalami kemunduran 6 (enam) tahun ke belakang (jumlah penduduk miskin pada 2022 selisih sedikit dibanding jumlah penduduk miskin di tahun 2017).

Dalam 6 (enam) tahun terakhir, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibanding Nasional. Pada Maret 2022 selisih persentase penduduk miskin dengan nasional cukup tinggi mencapai 1,48 persen poin. Namun demikian, data 2020 sampai 2022 secara kuantitas menunjukkan jumlah penduduk miskin Jawa Barat masih cukup besar (± 4 juta orang). Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 membutuhkan penanganan yang serius. Upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran masih sangat diperlukan untuk menekan dan menurunkan angka kemiskinan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sampai dengan tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagian pendapatan masyarakat masih relatif rendah, pengangguran masih cukup tinggi sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, beberapa kawasan masih belum mendapatkan layanan infrastruktur yang memadai, dan masih belum optimalnya layanan kebutuhan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial.

Permasalahan lain terkait dengan kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin ekstrem yang mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan semakin besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk program perlindungan sosial (bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dll) yang tentu saja membebani APBD provinsi. Kondisi kemiskinan ekstrem dapat dilihat dari semakin melebarnya ketimpangan pendapatan diantara kelompok penduduk miskin yang diukur melalui indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Data beberapa tahun terakhir menunjukkan Indeks Keparahan Kemiskinan di Jawa Barat cenderung meningkat yakni mencapai 0,33 di tahun 2022 yang berarti meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,10 poin, walaupun bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami sedikit penurunan.

e. Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang masih dihadapi dalam menjalankan roda pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan (gini ratio) yang cukup tinggi, bahkan cenderung meningkat di tahun 2022. Pada September 2022, Gini Ratio Jawa Barat sebesar 0,412 poin, berarti meningkat 0,011 poin jika dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar 0,406 poin. Tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan dan perdesaan memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi di perkotaan dibanding perdesaan. Hal ini dipengaruhi oleh sumber

mata pencaharian, dimana di perdesaan sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen yang mana mayoritas bekerja di sektor pertanian, sedangkan di perkotaan lebih bersifat heterogen yang mana pada umumnya penduduk di perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa.

Meskipun perekonomian Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, akan tetapi adanya persoalan distribusi pendapatan yang belum merata dapat menimbulkan masalah pada saat ini maupun di masa datang. Ketimpangan pendapatan di Jawa Barat disebabkan oleh disparitas dan inklusivitas pembangunan ekonomi wilayah. Masalah disparitas pengembangan ekonomi terlihat dari peranan atau konstribusi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi. Sampai dengan tahun 2021, data menunjukkan secara spasial perekonomian Provinsi Jawa Barat disumbang oleh 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota, masing-masing adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Bandung yang memberikan kontribusi paling besar (> 10 persen). Sumbangan PDRB kabupaten/kota tersebut mencapai 50,34 persen terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat di tahun 2021. Sementara kabupaten/kota yang lain rata-rata hanya menyumbang sebesar 2,16 persen.

Dominasi peranan 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota tersebut sangat mempengaruhi kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini tercermin dari kinerja ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami guncangan dampak dari kejadian luar biasa pandemi COVID-19, dimana kabupaten/kota tersebut terdampak cukup parah yang tergambarkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi cukup dalam (pertumbuhan negatif). Perbedaan peranan atau kontribusi PDRB kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas pengembangan ekonomi wilayah, yang salah satu faktor penyebabnya adalah belum meratanya investasi.

Dalam konstelasi regional Jawa, tahun 2022 Jawa Barat termasuk provinsi dengan capaian angka gini ratio di atas capaian nasional dan rata-rata provinsi di Pulau Jawa. Artinya ketimpangan pendapatan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan rata-rata provinsi di Pulau Jawa. Tingginya ketimpangan pendapatan merupakan ancaman serius, tidak hanya berupa turunnya kesejahteraan

sekelompok masyarakat, namun juga mendistorsi pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi.

Disparitas pengembangan ekonomi wilayah juga tercermin dari capaian indikator Indeks Williamson, dimana pada tahun 2022 nilai indeks sebesar 0,670 poin. Artinya distribusi perekonomian antar kabupaten/kota menunjukkan ketidakmerataan.

Masalah lain yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan terhadap satu sektor ekonomi. Data BPS menunjukkan dominasi peranan sektor Industri Pengolahan dalam perekonomian Jawa Barat. Pandemi COVID-19 memberikan pesan bahwa ketergantungan terhadap sektor tersebut memberikan dampak buruk bagi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Terdapat daerah dengan basis ekonomi sektor Industri Pengolahan yang mengalami tekanan besar, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup dalam diantaranya yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang. Hal ini mempengaruhi kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan pada tahun 2020.

f. Pendapatan Per Kapita masyarakat relatif masih rendah

Pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat berdasarkan data terakhir masih di bawah atau lebih rendah dari capaian Nasional. Berdasarkan kategori Bank Dunia dengan nilai *range* US$ 996 – US$ 3.895, Provinsi Jawa Barat termasuk daerah dengan kategori pendapatan per kapita menengah bawah. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif besar dan produktivitas masyarakat rendah. Jumlah penduduk yang relatif besar disebabkan oleh tingkat kelahiran relatif tinggi. Produktivitas masyarakat rendah disebabkan oleh kualitas SDM yang relatif masih rendah.

3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Penyelenggaraan Tatakelola pemerintahan Belum berjalan Efektif dan Optimal

Tata kelola pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Konsep akuntabilitas menunjukkan pemerintah memiliki kewajiban untuk

bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik dalam mengelola berbagai urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara konsisten terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2022 masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Meskipun data menunjukkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dibanding tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Masalah tersebut terefleksikan dari capaian komponen ASN profesional dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Permasalahan lain terkait kinerja tata kelola pemerintah dapat dilihat dari capaian SAKIP yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Nilai SAKIP Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya dengan kategori A. Namun, kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat masih jauh dari perwujudan *good governance* yang menandakan seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform)* dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

b. Belum optimalnya Kehidupan berdemokrasi

Perkembangan tingkat demokrasi suatu wilayah dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan oleh indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Demokrasi inklusif berarti setiap anggota masyarakat dalam suatu negara harus memiliki pengaruh yang setara dan efektif atas debat dan pembuatan keputusan (Young 1990).

Nilai IDI Jawa Barat tahun 2022 sebesar 79,72 yang berarti capaian kinerja demokrasi di Jawa Barat berada pada kategori sedang. Jika

dilihat menurut aspek yang membentuk IDI Jawa Barat tahun 2022, terlihat bahwa adanya kesenjangan di antara ketiga aspek IDI. Namun dari kinerja ketiga aspek tersebut, aspek kebebasan berada pada kinerja tinggi dan aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi berada pada kinerja sedang. Jika kita lihat nilai aspek-aspek tersebut dapat dikatakan aspek Kebebasan dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kondisi Demokrasi di Jawa Barat tahun 2022. Sementara aspek kesetaraan masih perlu ditingkatkan lagi.

Aspek kesetaraan dipengaruhi oleh 7 (tujuh) indikator, yaitu Kesetaraan Gender, Partisipasi Masyarakat dalam Memengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan, Anti Monopoli Kelompok Tertentu dalam Sumber Daya Ekonomi, Akses Warga Miskin pada Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah, Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik, Kesetaraan dalam Pelayanan Dasar. Hasil publikasi BPS untuk IDI Jawa Barat Tahun 2022 menunjukkan bahwa indikator Partisipasi Masyarakat dalam Memengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan memiliki capaian yang paling rendah yaitu 30 persen.

Untuk peningkatan kehidupan demokrasi yang lebih baik di Jawa Barat, maka diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Aspek dan indikator yang masih rendah atau sedang menjadi prioritas untuk ditingkat. Pada indikator yang sudah menunjukkan kinerja baik, perlu upaya bersama untuk mempertahankannya.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan urusan, evaluasi hasil RPJMD periode 2018-2023 dan didukung informasi dari perangkat daerah. Penyajian permasalahan pembangunan pada subbab ini meliputi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah Pokok menggambarkan masalah utama dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab yang dimuat pada kolom masalah, dan selanjutnya akar masalah merupakan penyebab lebih rinci dari munculnya masalah.

Penyajian permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
Pendidikan				
Aksesibilitas, Mutu serta Tata Kelola Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) masih rendah	1	Pengelolaan satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan pendidikan khusus dan layanan khusus yang belum optimal	1	Masih belum optimalnya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian pendidikan belum dilaksanakan secara optimal
	2	Masih belum memadainya jumlah, kompetensi, dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	1	Masih terbatasnya jumlah guru yang mengajar sesuai kompetensi khususnya untuk pendidikan kejuruan
			2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai standar kompetensi masih terbatas
			3	Belum meratanya distribusi guru antardaerah
	3	Nilai mutu pendidikan masih rendah	1	Masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai standar nasional pendidikan, terutama pendidikan khusus
			2	Kurikulum kewirausahaan di jenjang SMA/SMK/SLB belum diterapkan secara baik dan merata
			3	Belum optimal dan memadainya utilisasi dan modernisasi TIK untuk mendukung penguatan sistem dan proses pembelajaran jarak jauh disetiap satuan pendidikan serta pengembangan fitur-fitur pembelajaran daring yang menarik minat dan mudah dicerna oleh para siswa dari setiap mata pelajaran yang diajarkan
	4	Sebaran SMA/SMK yang belum merata	1	Jumlah sekolah negeri lebih sedikit sekolah swasta
			2	Daya tampung sekolah negeri terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bersekolah di sekolah negeri
Kesehatan				
Derajat kesehatan masyarakat masih rendah	1	Pelayanan kesehatan belum optimal	1	Belum optimalnya sarana dan prasarana fasyankes sesuai standar
			2	Belum semua penduduk Jawa Barat memiliki BPJS Kesehatan
			3	Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum sesuai standar

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
	2	Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal	1	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku bersih dan sehat
	3	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal	1	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan deteksi dini penyakit
	4	Gizi Masyararakat belum optimal	1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pola makan dan gaya hidup sehat, serta gizi seimbang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang	1	Degradasi Sumber Daya Air	1	Meningkatnya sedimentasi sungai di wilayah sungai kewenangan Provinsi
			2	Belum maksimalnya bangunan air di wilayah sungai kewenangan Provinsi
	2	Pencemaran Air	1	Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan usaha/industri dalam membuang limbah
			2	Kurangnya pengawasan aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air
	3	Rendahnya kinerja irigasi	1	Kondisi Jaringan Irigasi mengalami kerusakan tidak berfungsi optimal
	4	Belum optimalnya pengelolaan drainase	1	Ketidakmampuan badan air penerima dalam menampung air limpasan dari permukiman.
			2	Tidak terbentuknya sistem drainase buatan.
			3	Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi
			5	Penyumbatan/tidak mengalirnya saluran.
			6	Belum optimalnya penanganan terhadap daerah rawan banjir.
			7	Belum kuatnya dukungan pengelolaan sistem drainase.
	5	Tingkat kemantapan jalan cenderung mengalami penurunan	1	Sebagian dari ruas jalan Provinsi berada pada jalur rawan bencana
			2	Pemanfaatan kapasitas jalan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang melintas
			3	Peralatan untuk pemeliharaan jalan belum memadai
			4	Muatan Lebih *Overdimention and Overload* (ODOL) Kendaraan
			5	Pertumbuhan kendaraan tidak diikuti dengan pertambahan jalan
	6	Belum optimalnya aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun /ditingkatkan	1	Masih terdapat daerah yang belum terlayani aksesibiltas yang memadai
	7	Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum	1	Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal.

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
			2	Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum.
			3	Keterbatasan pendanaan APBD dan masyarakat untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum.
			4	Kinerja kelembangaan belum menerapkan prinsip *good govermance* sehingga pengelolaan system tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat.
	8	Belum optimalnya cakupan pelayanan dan akses air limbah domestik	1	Masih tingginya angka BABS, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang PHBS, terutama menyangkut air limbah domestik.
			2	Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat, dan belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan limbah.
			3	Masih rendahnya pelayanan limbah terpusat, tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak terolah di IPAL dan/atau kebocoran tangka septik, dan masih terbatasnya regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten/kota.
			4	Terbatasnya pendanaan di tingkat kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur pengolahan limbah sistem terpusat.
			5	Rendahnya komitmen kepala daerah terhadap pengelolaan limbah.
	9	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	1	Perilaku masyarakat membuang sampah sembarang serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah (3R).
			2	Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir).
			3	Pengelolaan persampahan berorientasi 3R (dari hulu ke hilir) yang belum efektif dan terpadu.
			4	Masih rendahnya pembiayaan pengelolaan persampahan.
	10	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	1	Belum tersediannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena penyesuaian terhadap peraturan perundangan.
			2	Belum terpenuhinya jumlah ketersediaan perangkat pengendalian pemanfataan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang.

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
			3	Perkembangan kewilayahan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman yang masih rendah	1	Ketersediaan Air Minum belum mencukupi secara optimal	1	Jaringan dan sumber air minum belum tersedia
			2	Kebutuhan air bersih setiap individu tidak terpenuhi
	2	Air Limbah Domestik belum terkelola	1	Sarana Prasarana dan sistem pengelolaan air limbah domestik belum memenuhi persyaratan teknis
	3	Persampahan belum terkelola dengan baik	1	Sarana Prasarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan belum memenuhi persyaratan teknis
	4	Belum optimalnya drainase permukiman	1	Belum tersedianya drainase lingkungan
			2	Masih tingginya genangan air
			3	Kualitas konstruksi drainase lingkungan yang buruk
	5	Kondisi Jalan Lingkungan belum optimal	1	Kurangnya akses jalan lingkungan
			2	Kualitas jalan lingkungan yang buruk
	6	Ketidakteraturan Bangunan	1	Tingkat kepadatan bangunan tinggi
			2	Banyaknya bangunan yang tidak sesuai syarat ketentuan teknis bangunan
			3	Tidak tercukupinya kecukupan luas tempat tinggal (belum memenuhi luas lantai perkapita)
	7	Masih rendahnya sarana Proteksi Kebakaran	1	Belum tersedianya sarana proteksi kebakaran
	8	Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka di kawasan permukiman	1	Belum tersedianya sarana ruang terbuka hijau atau ruang terbuka non hijau
	9	Kurang optimalnya pembangunan rumah bagi korban bencana	1	Potensi Bencana di Jawa Barat yang meningkat
			2	Kurangnya pendataan rumah yang berada pada kawasan bencana dan rencana penanganannya
			3	Pembagian kewenangan dalam pengurusan kebencanaan masih belum jelas - Penyediaan anggaran belum optimal untuk melakukan pembangunan rumah akibat bencana
			4	Belum tersedianya jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan untuk relokasi
Pelayanan dan ketersediaan perumahan masih belum optimal	1	Masih terdapat backlog perumahan	1	Kurangnya ketersediaan rumah yang terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	2	Masih terdapat rumah tidak layak huni	1	Ketidakmampuan masyarakat untuk memperbaiki rumahnya
			2	SK Kumuh terbaru angka target menjadi lebih tinggi (SK kumuh terbaru membuat luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
				menjadi naik dari luasan sebelumnya)
	3	Perumahan yang tidak berkelanjutan	1	Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang tidak memenuhi standar
			2	Penyediaan Infrastruktur Permukiman masih rendah
			3	Akses infrastruktur dasar permukiman belum optimal
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat				
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	1	Penegakan perda dan perkada serta Penanganan Gangguan Tantribun masyarakat belum optimal	1	Belum optimalnya pelaksanaan cipta kondisi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan
			2	Belum optimalnya penindakan atas gangguan Trantibum
			3	Satgas Linmas kab/kota belum berfungsi optimal
			4	Masih kurangnya koordinasi penyelenggaraan Trantibumlinmas
			5	Anggota Satpol PP dan PPNS belum kompeten
			6	Belum terbentuknya Satgas Linmas Kab/Kota
			7	Masih kurangnya pemberdayaan Anggota Linmas dalam rangka Trantibum
			8	Belum optimalnya kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan
			9	Masih banyaknya Anggota Pol PP yang belum mengikuti diklatsar
			10	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana pemenuhan SPM
			11	Belum tersusunnya SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			12	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibum
			13	Minimnya sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur
			14	Masih kurangnya pengawasan atas kepatuhan terhadap Perda dan Pergub
			15	Belum optimalnya penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub
			16	Masih rendahnya kapasitas dan pengembangan karier PPNS
			17	Masih kurangnya kemampuan teknis PPNS tentang pemberkasan administrasi penyidikan
Masih ada risiko bencana dan kebakaran	1	Manajemen Pra Bencana belum optimal	1	Rencana Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
	2	Penanganan Keadaan darurat belum optimal	1	Komunikasi, Informasi dan edukasi pengurangan risiko bencana belum maksimal
	3	Penanganan Pasca bencana belum optimal	1	Pemahaman aparat terhadap penangangan keadaan darurat

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
				bencana belum sepenuhnya dipahami
	4	Manajemen Pra kebakaran belum optimal	1	Masih kurangnya dukungan SDM yang terampil
			2	Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penanganan kebakaran
			3	Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan sosialisasi kepada masyarakat
Sosial				
Masih tingginya kemiskinan	1	Kesejahteraan Sosial masyarakat miskin dan rentan masih rendah	1	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bidang sosial bagi masyarakat miskin dan rentan secara optimal
			2	Perlindungan Sosial bagi masyrakat miskin dan rentan belum optimal
			3	Masyarakat miskin dan rentan belum secara optimal memiliki peran sosial di masyarakat
Tenaga Kerja				
Masih rendahnya pencari kerja yang bekerja	1	Kurangnya akses kesempatan kerja	1	Kompetensi dan keahlian angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja
			2	Lulusan SMK mendominasi jumlah pengangguran sebagai akibat *missmatch* (tidak sesuai) antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri atau perusahaan
			3	Banyak tenaga kerja muda yang kesulitan melalui masa transisinya sehingga belum memiliki karir yang stabil, terutama dengan kemunculan industri 4.0 dan *society 5.0*
	2	Pemutusan Hubungan Kerja sektor Industri Padat Karya	1	Banyak industri yang padat karya dan berbahan baku impor yang melakukan PHK akibat perang Rusia-Ukraina
			2	Pandemi Covid-19 menyebabkan perusahaan terdampak merumahkan/mengurangi jam kerja/melakukan PHK pekerjanya
			3	Peluang untuk kembali bekerja sangat terbatas untuk korban PHK. Dalam beberapa tahun ini, model perekrutan calon pegawai yang dilaksanakan oleh perusahaan banyak mencari *fresh graduates*. Di satu sisi hal ini berdampak positif untuk penyerapan angkatan kerja baru, tetapi disisi lain mengurangi kesempatan bagi angkatan kerja yang terkena PHK.
			4	Turunnya pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebab beberapa negara penempatan membatasi penerimaan PMI.
	3		1	Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
		Pekerja Sektor Informal rentan kehilangan pekerjaan	2	Kurangnya lapangan kerja di sektor formal
			3	Kurangnya keterampilan dan daya saing yang dimiliki tenaga kerja untuk memasuki sektor formal
Produktivitas tenaga kerja masih rendah	1	Rendahnya Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja	1	Kualitas tenaga kerja masih rendah, tenaga kerja masih didominasi dengan lulusan SD dan bekerja sebagai pekerja kasar
			2	Kualitas keterampilan dan kompetensi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.
			3	Kurangnya kemampuan angkatan kerja untuk usaha mandiri
			4	Kurangnya kualitas pelatihan dan pengembangan SDM
			5	Fasilitas yang dimiliki oleh balai-balai pelatihan masih kurang memadai, begitu pula untuk tenaga pelatihnya
			6	Masih minimnya Balai Pelatihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
	2	Perlindungan ketenagakerjaan yang rendah	1	Masih rendahnya jumlah Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan
			2	Minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan
			3	Rendahnya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat
			4	Produktivitas tenaga kerja masih rendah
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Kesetaraan gender belum optimal	1	Pengarusutamaan gender belum optimal	1	Masih adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini salah satunya terlihat dari komponen IPG pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah Perempuan yaitu 8,48 lebih rendah daripada laki-laki 9,07. Disamping itu pengeluaran per kapita perempuan 8.235 lebih rendah dari laki-laki 15.933. Selain IPG, dari IDG juga bisa dilihat dari komponen keterlibatan perempuan dalam parlemen masih berada dibawah kuota 30% (di DPRD Provinsi baru mencapai 22,5%, sedangkan di Kab/Kota rata-rata baru mencapai 18,9%)
	2	Keberdayaan perempuan belum optimal	1	Pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan, dilihat dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Barat yang masih dibawah angka nasional. Salah satu dimensi kesenjangan yang terbesar adalah pendapatan perempuan yang terpaut hampir 50 persen lebih rendah daripada laki-laki.

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
				Rendahnya literasi finansial pada perempuan menjadi salah satu pemicu kesenjangan tersebut. Upaya pemberdayaan perempuan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perempuan sangat diperlukan. Selain dimensi ekonomi, upaya peningkatan pemahaman dan keterampilan perempuan pada dimensi hukum, sosial, dan politik juga sangat diperlukan agar perempuan menyadari adanya pilihan-pilihan hidup yang mereka miliki untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Pemenuhan hak dan perlindungan anak belum optimal	1	Pendidikan Anak belum Optimal	1	Akses layanan pendidik anak terbatas, Tingkat Kemiskinan penduduk tinggi, Budaya Permisif orang tua atau masyarakat terhadap perkawinan pada usia anak, Bias Gender pada layanan akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan terutama di desa-desa, Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, Tingkat pendidikan orang tua yang rendah, Penerapan regulasi wajib belajar yang belum konsisten, Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah belum optimal
	2	Layanan kesehatan untuk anak belum optimal	1	Sarana prasanana kesehatan yang terbatas terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau, Tenaga Medis dan Paramedis yang terbatas, Kesadaran Pola Hidup Sehat dan Lingkungan Sehat masyarakat terbatas, Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan yang belum optimal, Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah belum optimal
	3	Pengasuhan anak belum optimal	1	Tingkat Pendidikan Orang tua yang rendah, Kesadaran Orang tua dan masyrakat terhadap Pendidikan Keluarga yang belum optimal, banyaknya ibu yang bekerja terutama yang bekerja di luar negeri, belum optimalnya peran seorang ayah dalam proses pengasuhan, Penyelenggaraan Program PKK yang belum optimal, Penyelenggaraan Lembaga - lembaga alternatif pengasuhan anak di daerah yang sulit dijangkau belum optimal
	4	Pencegahan kekerasan belum optimal	1	Adanya kecenderungan peningkatan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak di masa pandemi, termasuk kekerasan dan eksploitasi online

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
			2	Koordinasi lintas sektor dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga keagamaan dalam upaya pencegahan kekerasan belum terjalin dengan efektif
			3	Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum seluruhnya terlaporkan sehingga menjadi tantangan bagi penyusunan intervensi dan kebijakan pencegahan kekerasan yang tepat
	5	Penegakan hukum kasus kekerasan belum optimal	1	Masih diperlukannya kesepakatan mengenai mekanisme koordinasi, sinkronisasi serta rencana aksi dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum yang berkeadilan gender dan peduli hak anak (memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak) antara lembaga terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah
			2	Masih perlunya peningkatan pengawasan oleh para stakeholder terhadap jalannya proses hukum yang berkeadilan gender pada kasus kekerasan
Pangan				
Akses pangan belum merata	1	Sistem Logistik belum tertata dengan baik	1	Biaya logistik pangan tinggi
			2	Rantai pasok pangan masih panjang
			3	Infrastruktur jalan belum semua dalam kondisi baik
			4	Pungutan di sepanjang jalur distribusi
	2	Keterjangkauan pangan rendah	1	Harga pangan tinggi
			2	Pendapatan Masyarakat yang rendah
	3	Masih terdapat daerah rentan rawan pangan	1	Pelayanan dasar belum merata (listrik, air bersih, rata-rata lama sekolah, angka kesakitan)
			2	Tingkat kemiskinan tinggi
Ketersediaan pangan belum optimal	1	Produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat	1	Jumlah penduduk terus meningkat
			2	Tingginya alih fungsi lahan pertanian
	2	Stok cadangan pangan daerah rendah	1	Tingginya mobilitas produk pangan pokok yang keluar dari Jawa Barat
Pemanfaatan pangan belum optimal	1	Diversifikasi konsumsi pangan rendah	1	Kesadaran masyarakat masih rendah tentang keberagaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)
			2	Kurangnya edukasi terhadap keanekaragaman pangan
	2	Belum optimalnya penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat	1	Kurangnya pengawasan peredaran pangan asal tumbuhan di masyarakat
			2	Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
Pertanahan				
Belum optimalnya pelayanan dan manajemen pertanahan	1	Belum optimalnya kualitas pelayanan verifikasi dokumen perencanaan pengandaan tanah untuk penetapan lokasi Gubernur	1	Belum optimalnya kualitas Sasaran prasarana verifikasi
			2	Belum optimalnya upaya penyederhanaan prosedur dan persyaratan verifikasi
			3	Belum optimalnya kompetensi petugasnya verifikasi
			4	Belum optimalnya kualitas penangangan penganduan verifikasi
	2	Belum optimalnya kualitas Layanan Informasi perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	Belum optimalnya kualitas Sasaran prasarana
			2	Belum optimalnya upaya penyederhanaan prosedur dan persyaratan
			3	Belum optimalnya kualitas petugas
			4	Belum optimalnya kualitas penanganan penganduan
Lingkungan Hidup				
Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca	1	Penurunan kualitas air (sungai dan laut)	1	Pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan
			2	Pencemaran dan kerusakan DAS Sungai Citarum
			3	Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem DAS Jawa Barat yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan produktif
			4	Peningkatan timbulan sampah medis (B3)
	2	Penurunan kualitas udara ambien	1	Tingkat konsentrasi pencemar udara meningkat
			2	Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan sektor industri tidak ramah lingkungan, dan penurunan jumlah vegetasi
			3	Emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik
	3	Sampah yang Belum Dikelola Menyebabkan Emisi	1	Belum beroperasinya TPPAS Regional
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana				
Tingginya kelahiran bedampak pada tidak terkendalinya penduduk secara optimal	1	Layanan KB belum optimal	1	Masih cukup tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan *unmetneed* antar wilayah
			2	Masih adanya Peserta KB yang putus pakai (*Drop Out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria
			3	Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
				pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana
			4	Kurang optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Advokasi, KIE, dan penggerakan lini lapangan
	2	Pemetaan perkiraan penduduk belum maksimal	1	Masih kurang optimalnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk dan belum optimalnya sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pengendalian kuantitas penduduk
			2	Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
			3	Masih belum maksimalnya sistem peringatan dini pengendalian penduduk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masih kurang
	3	Tingginya perkawinan anak	1	Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
			2	Masih terbatasnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga
			3	Masih terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
			4	Masih banyak keluarga dengan ekonomi yang lemah dan berada dalam garis kemiskinan
			5	Masih perlunya peningkatan literasi digital bagi masyarakat terutama pada usia anak dan remaja
			6	Belum optimalnya sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan perkawinan anak
			7	Masih adanya celah dispensasi kawin dalam regulasi perkawinan anak
			8	Belum optimalnya sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan perkawinan anak
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Belum optimalnya ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan desa	1	Pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal	1	Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa yakni belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kolaboratif dan inovatif
			2	Belum sinerginya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral.
			3	Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
				dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain: 1) belum seluruh desa memiliki BUMDes; 2) masih adanya desa blankspot; dan 3) belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk mendorong OVOC (*One Village One Company*)
			4	Masih rendahnya kerjasama pengembangan kapasitas produksi desa, dan akses pemasaran potensi desa
			5	BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa
			6	SDM yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes belum memahami pengelolaan BUMDes (pelaksana teknis hingga kepala desa).
			7	Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan *Crowdfunding* untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program[1]program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet.
			8	Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.
			9	Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.
			10	Masih rendahnya persentase posyandu Mandiri
			11	Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
			12	Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih terbatas
			13	Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.
			14	Keterbatasan jaringan jalan dan sarana penghubung lainnya serta jaringan telekomunikasi yang menghubungkan ke desa
			15	Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam hal teknis pemerintahan desa, pelayanan

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
				kepada masyarakat, maupun kerjasama antar desa
			16	Belum optimalnya keterlibatan swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat lokal dalam pembangunan desa
Perhubungan				
Wilayah Jawa Barat belum terkoneksi oleh layanan transportasi secara optimal	1	Belum optimalnya layanan angkutan penumpang umum dan barang	1	Belum lengkapnya regulasi/ kebijakan terkait penyediaan angkutan penumpang umum
			2	Sarana angkutan yang tersedia belum aman dan nyaman / pola pelayanan konvensional
			3	Data angkutan belum terintegrasi dan tidak *update*
			4	Tidak adanya data yang akurat untuk penentuan kebutuhan/ kuota cakupan layanan angkutan
			5	Tingginya Daya saing angkutan umum dengan *online* / ilegal
			6	Peremajaan sulit biaya/ dukungan keuangan
			7	Pembinaan pengusaha angkutan, merubah pola pelayanan dan pengelolaan bisnis
			8	Belum Tersedianya Desain angkutan Penumpang Umum
			9	Belum Optimalnya Perkuatan dukungan BRT
			10	Trayek yang dilayani belum mencakup seluruh wilayah di Jawa Barat
			11	Regulasi/kebijakan mengenai trayek belum dilakukan review dengan kondisi saat ini
			12	Belum optimalnya Pengaturan persaingan, Pengaturan segmen layanan angkutan dan Pengaturan tarif
			13	Kurangnya Kolaborasi layanan, *First Mike sd last mile*
			14	Belum optimalnya penataan rute, integrasi moda, feeder
			15	Fokus AKDP
			16	Kurangnya kenyamanan dan keamanan angkutan yang tersedia
			17	Lamanya waktu tempuh layanan angkutan umum
			18	Minat masyarakat menurun, angkutan umum tidak menarik
			19	Kendaraan Pribadi tinggi
			20	Fasilitas pendukung rendah
			21	Aset Terminal Type B belum semuanya diserahkan ke Provinsi
			22	Belum lengkapnya DED / Perencanaan Terminal
			23	Belum semua Terminal Type B dibangun / direhabilitasi untuk peningkatan pelayanan terminal
			24	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM untuk pelayanan Terminal

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
			25	Kurangnya Skema penyelesaian aset
			26	Belum optimalnya Perencanaan dan pembangunan
			27	Review kembali fungsi terminal, jejaring transportasi
			28	Belum optimalnya pemanfaatan aset
			29	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
			30	Belum optimalnya penyediaan angkutan barang
			31	Belum tersedianya data layanan angkutan barang
			32	Tingginya tingkat persaingan angkutan barang
			33	Belum adanya Lintasan Angkutan Barang
	2	Masih rendahnya pelayanan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan	1	Belum terintegrasinya Perencanaan
			2	Belum adanya pengukuran hasil MRLL
			3	Kurangnya Pengawasan dan pengendalian MRLL
			4	Belum tersedianya Laboratorium Transportasi
			5	Belum adanya penetapan kelas jalan
	3	Banyaknya pelanggaran lalu lintas di ruas jalan provinsi	1	Belum optimalnya evaluasi lokasi
			2	Belum optimalnya Kolaborasi penanganan kemacetan
			3	Belum adanya Integrasi data, penanganan, pengawasan
			4	Kurangnya Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi
			5	Kurangnya Pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum
	4	Belum Optimalnya layanan lalu lintas ASDP dan laut	1	Ketersediaan fasilitas dermaga sudah banyak yang rusak
			2	Belum optimalnya pelayanan bongkar muat barang di Dermaga
			3	Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan ASDP
			4	Rendahnya kualitas Fasilitas Naik Turun Penumpang
			5	Rendahnya kualitas Fasilitas Keselamatan Penumpang
			6	belum optimalnya Data dan Pembinaan Penyedia angkutan
			7	Belum adanya Penetapan alur
			8	Belum adanya Peta keselamatan alur
			9	Kurangnya Pengawasan
			10	alur pelayaran tidak teratur
			11	Data pelayanan ASDP belum terintegrasi
			12	Belum tersedianya Review fungsi dan layanan pelabuhan laut Jabar
			13	Kurangnya Kolaborasi dengan pelabuhan utama, pelabuhan khusus, nelayan, dll
			14	Belum tersedianya Rencana pengembangan: analisa, dukungan, kelayakan dll

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
	5	Belum optimalnya pelayanan perkeretaapian	1	Masih ada beberapa jalur untuk lanjutan maupun reaktivasi, seperti: Lanjutan LRT Bandung Raya, Lanjutan *Cable Car* Bandung Raya, Puncak, MRT ekstension EW s/d Kota Bekasi
			2	Belum optimalnya integrasi feeder dengan KA: Bodebek /LRT, dan stasiun-stasiun di Jabar
	6	Layanan Transportasi belum terintegrasi	1	Belum optimalnya pengelolaan Nusawiru
			2	Belum optimalnya penataan dan pengembangan bisnis plan Nusawiru
			3	Rendahnya kualitas prasarana Bandara Nusawiru
			4	Belum optimalnya pengembangan Bandara Cikembar
Komunikasi dan Informatika				
Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal	1	Kebijakan Internal tata kelola belum menyeluruh	1	Belum tersedianya rujukan untuk penyusunan kebijakan internal tata kelola secara lengkap
	2	Strategi dan perencanaan belum selaras dengan strategi nasional	1	Belum dilakukan reviu dokumen perencanaan strategis secara berkala
	3	Penerapan management SPBE belum dilaksakanan secara menyuluruh	1	Belum optimalnya penyelenggaraan Tim Koordinasi SPBE
	4	Pelaksaan Audit TIK belum melalui perencanaan dan pedoman yang standar	1	Belum tersedianya pedoman pelaksanaan audit TIK
	5	Layanan administrasi pemerintahan SPBE belum menyeluruh	1	Belum terintegrasinya layanan administrasi pemerintahan SPBE dalam satu kanal
Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	1	Konsistensi penyampaian informasi publik yang bersifat terbuka masih rendah	1	Belum dipahaminya kewajiban penyampaian informasi publik sesuai regulasi
	2	Akses satu badan publik terhadap informasi badan publik lainnya masih terbatas	1	Belum memiliki mekanisme agar data dapat dibagipakaikan (terintegrasi) antar aplikasi atau sistem di perangkat daerah
	3	Kepemilikan media daerah belum independent	1	Belum maksimalnya kerja sama dalam mekanisme penyampaian informasi publik
	4	Penyalahgunaan informasi oleh pemohon informasi	1	Belum tersedianya kebijakan yang menyeluruh terkait hak dan kewajiban publik atas informasi
	5	Belum ditegakannya sanksi untuk perusakan atau pembatasan hak publik atas informasi	1	Belum tersedianya kebijakan yang menyeluruh terkait hak dan kewajiban publik atas informasi

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah				
Belum optimalnya kualitas koperasi	1	Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi	1	Masih banyak koperasi tidak aktif
			2	Menurunnya pertumbuhan koperasi berkualitas akibat bertambahnya koperasi baru yang belum melakukan RAT
			3	Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip dan nilai koperasi
			4	Masih banyaknya koperasi yang bergantung pada bantuan pemerintah
	2	Rendahnya kualitas usaha koperasi	1	Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan dan layanan bagi anggota
			2	Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal koperasi dan memajukan usaha koperasi
			3	Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran
			4	Minimnya akses permodalan koperasi terhadap perbankan
			5	Belum seluruh produk koperasi memiliki SNI
	3	Rendahnya kapasitas SDM koperasi	1	Rendahnya kualitas SDM koperasi untuk mengakses ICT dan jaringan pemasaran
			2	Masih banyak anggota koperasi tidak paham koperasi
			3	Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian
Belum optimalnya daya saing UKM	1	Masih rendahnya manajemen pengelolaan UKM	1	Masih rendahnya legalitas usaha UKM
			2	Rendahnya kapasitas SDM UKM
	2	Rendahnya produktivitas UKM	1	Manajemen dan kualitas produksi masih rendah
			2	Diversifikasi produk UKM rendah
			3	Belum seluruh produk usaha kecil memiliki SNI
			4	Belum optimalnya branding dan kemasan produk UKM
			5	Akses pembiayaan UKM masih terbatas
	3	Rendahanya pemasaran produk UKM	1	Terbatasnya akses pemasaran dan promosi bagi produk UKM terutama disebabkan belum optimalnya kapasitas *digital literacy* bagi para pelaku usaha
			2	Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi UKM
Penanaman Modal				
Tuntutan kebutuhan peningkatan investasi	1	Beralihnya investor ke luar provinsi (terutama ke luar Jawa)	1	Upah Minimum Regional yang dinilai terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
	2	Masih Terbatasnya potensi peluang investasi *yang ready to offer*	1	Belum memiliki peta potensi dan peluang usaha investasi yang memadai untuk dipromosikan
	3	Pelayanan perizinan dan non perizinan belum terpadu dan terintegrasi	1	Masih tumpang-tindihnya peraturan sektoral antara Kemendagri dan BKPM dengan PP no. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
			2	Peraturan perundangan yang berubah-ubah dengan adanya NSPK dari Peraturan Kementerian terkait
			3	Aplikasi terpusat yang tidak sesuai dengan kondisi regional
Statistik				
Kesiapan penyelenggaraan satu data Indonesia belum optimal	1	Belum harmonisnya regulasi penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data	1	Belum dilaksanakannya reviu atas kebijakan/regulasi penyelenggaraan Satu Data secara berkala
	2	Tata kelola pemanfaatan data belum optimal	1	Belum tersedianya regulasi terkait tata kelola pemanfaatan data secara menyeluruh
	3	Belum optimalnya implementasi pembagian peran kelembagaan penyelenggaraan statistik	1	Belum dilaksanakannya regulasi terkait penyelenggara Statistik Sektoral secara maksimal
Persandian				
Belum optimalnya keamanan informasi	1	Kerangka kerja keamanan informasi belum maksimal	1	Kebijakan, strategi penerapan, dan prosedur pengelolaan keamanan informasi belum dilaksanakan secara maksimal
	2	Kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi belum diterapkan dengan baik	1	Belum optimalnya penerapan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SNI ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
			2	Belum semua pelaksana pengamanan informasi memiliki kompetensi sesuai standar yang dipersyaratkan
Kepemudaan dan Olahraga				
Rendahnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	1	Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat Masih Belum Optimal	1	Masih Rendahnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Kegiatan Kemasyarakatan
			2	Menurunnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Kegiatan Organisasi
			3	Masih Rendahnya Partisipasi Aktif Pemuda yang Memberikan Saran dalam Rapat
Rendahnya Partisipasi Masyarakat yang beolahraga	2	Minat Masyarakat Berolahraga Masih Rendah	1	Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Berolahraga
			2	Ketersediaan prasarana olahraga masih terbatas
Mempertahankan dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Jawa Barat	3	Mempertahankan Prestasi Olahraga Nasional yang telah diraih	1	Sentra Pembinaan Olahraga Belum Optimal
			2	Masih Rendahnya Prestasi dari Tenaga Keolahragaan

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
		Meningkatkan Prestasi Olahraga Nasional	3	Belum Optimalnya Kualifikasi Atlet
			4	Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berstandar Masih Terbatas
Kebudayaan				
Belum optimalnya pelindungan kebudayaan dan cagar budaya di Jawa Barat	1	Masih rendahnya pelindungan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Jawa Barat	1	Masih rendahnya apresiasi terhadap karya seni dan karya budaya Jawa Barat
			2	Menurunnya jumlah event/festival/pasanggiri/lomba/ sayembara karya seni
			3	Belum optimalnya penggunaan ruang publik sebagai ruang pelestarian dan pemajuan budaya lokal, ruang ekspresi seniman dan budayawan serta ruang interaksi pemanfaatan seni budaya.
			4	Kurang optimalnya promosi budaya tradisional Jawa Barat di dalam negeri dan mancanegara
			5	Kurangnya apresisasi masyarakat terhadap museum
			6	Masih adanya Warisan Budaya Tak Benda yang belum tercatat dan ditetapkan sebagai warisan budaya Jawa Barat oleh Pemerintah Pusat.
			7	Masih adanya aset tinggalan sejarah yang belum ditangani sehingga dikhawatirkan hilang atau musnah
			8	Adanya kecenderungan melemahnya penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Jawa Barat
			9	Rendahnya pembinaan terhadap SDM Kebudayaan dan lembaga adat di Jawa Barat.
			10	Belum optimalnya penggunaan ruang publik sebagai ruang pelestarian dan pemajuan budaya lokal, ruang ekspresi seniman dan budayawan serta ruang interaksi pemanfaatan seni budaya.
Perpustakaan				
Literasi Masyarakat masih rendah	1	Pemerataan Layanan Perpustakaan masih rendah	1	Jangkauan armada perpustakaan keliling yang terbatas
			2	Jumlah sumber daya manusia masih terbatas
			3	Belum optimalnya peran kelembagaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pelayanan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat
	2	Ketercukupan koleksi bahan pustaka masih rendah	1	Masih sedikit penerbit yang tiap tahunnya mengeluarkan buku cetak baru sedangkan kebutuhan membeli buku paling tua 3 tahun
			2	Kurang maksimalnya dalam pengajuan bahan perpustakaan
			3	Koleksi tidak *update*
	3	Ketercukupan tenaga perpustakaan masih	1	Masih sedikitnya pengelola perpustakaan yang bersertifikat kebanyakan pengelola perpustakaan

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
		rendah		terutama di sekolah adalah guru yang tidak berlatar belakang pendidikan perpustakaan tapi hanya untuk mengisi kekurangan jam mengajar
	4	Tingkat Kunjungan masyarakat per hari ke perpustakaan masih rendah	1	Fasilitas dan suasana yang perpustakaan monoton belum ada pembaharuan
	5	Perpustakaan yang memiliki standar nasional perpustakaan masih terbatas	1	Belum ada peraturan yang mewajibkan bahwa perpustakaan harus sesuai standar
	6	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih rendah	1	Kurangnya tenaga perpustakaan dalam mensosialisasikan kegiatan ke masyarakat
			2	Masyarakat masih menganggap perpustakaan hanya sarana untuk meminjam buku
	7	Keanggotaan perpustakaan masih rendah	1	Fasilitas pembuatan kartu anggota perpustakaan masih manual dan belum ada penambahan mesin pembuat kartu anggota
			2	Jumlah mesin pembuat kartu anggota masih menggunakan manual
Kearsipan				
Pengelolaan arsip belum tertib dan aman	1	Akses penggunaan arsip belum efektif	1	Perangkat daerah belum membuat daftar arsip aktif dan inaktif secara efektif
			2	Seluruh Perangkat Daerah belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan arsip dinamis kepada pihak eksternal maupun internal perangkat daerah
	2	Kurangnya sosialisasi PUSAKA (Perbaikan Khusus Arsip Korposrasi dan Keluarga)	1	Aplikasi PUSAKA baru di-launching tanggal 1 Maret 2023 pada saat Forum OPD, yang merupakan pengembangan dari aplikasi LAPARMAS (Layanan Perbaikan Arsip Masyarakat)
	3	Sarana dan Prasarana belum sesuai dengan Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis	1	Perangkat Daerah belum menyediakan sarana dan prasarana kearsipan pada TU bidang dan sekretariat maupun unit kearsipan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan
	4	Penelusuran arsip lembaga yang digabung/dihapus/ diubah status yang bernilai kesejarahan belum efektif	1	Lembaga Pencipta arsip yang digabung/dihapus/diubah status seringkali tidak menyimpan arsip yang autentik sehingga sulit untuk pelaksanaan akuisisi arsip-arsipnya
	5	Penelusuran arsip tokoh/perseorangan belum efektif	1	Tokoh/perseorangan belum menyimpan arsipnya masa kehidupannya secara tertib sehingga akuisisi arsipnya menjadi sulit, terlebih lagi jika tokoh/ perseorangannya sudah meninggal

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
	6	Penurunan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	1	Tumpulnya sanksi terhadap pimpinan yang tidak melaksanakan pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah sesuai dengan dalam UU Nomor 43/2009 tentang Kearsipan
	7	Menurunnya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	1	Kurangnya respon pimpinan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan-temuan pada audit kearsipan internal yang dilakukan sejak Tahun 2019-2022
			2	SDM kearsipan pada TU bidang/sekretariat merangkap dengan jabatan lain dan tugas kearsipan dijadikan tugas tambahan
	8	Pengelolaan arsip perangkat daerah atau pencipta arsip belum tertib	1	Ketersediaan SDM Kearsipan dan Sarana Prasarana yang belum disediakan oleh pimpinan Unit Kearsipan Perangkat Daerah
	9	Penurunan persentase penyelamatan arsip statis	1	Kurangnya pemahamanan tentang kriteria arsip statis sebagai arsip permanen dari perangkat daerah sehingga menjadikan terbatasnya arsip statis yang diserahkan
	10	Menurunnya persentase penyusutan kearsipan	1	Tidak tersedianya Panitia Penilai Penyusutan arsip yang terdiri atas arsiparis ahli pertama, ahli muda dan ahli madya pada perangkat daerah
	11	Menurunnya presentase penyelamatan arsip statis pada Tahun 2020	1	Pembatasan kegiatan dengan PSBB/PPKM sehingga tidak ada kegiatan keluar dinas
	12	Kurang sosialisasi kepada Perangkat Daerah tentang pentingnya akuisisi arsip/penyelamatan arsip	1	SDM kearsipan/jafung arsiparis di perangkat daerah masih belum ada di setiap perangkat daerah
	13	Kurangnya SDM (Arsiparis/Pengelola Arsip) pada setiap Perangkat Daerah yang memahami pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan berdasarkan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	1	Pembinan kearsipan level Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II belum berjalan efektif
			2	Banyaknya arsiparis yang merangkap jabatan (arsiparis sebagai Pengelola Keuangan)
Kelautan dan Perikanan				
Produksi perikanan tangkap dan budidaya belum optimal	1	Prasarana dan Sarana Perikanan belum tersedia dengan baik	1	Semakin menurunnya jumlah kapal perikanan yang beroperasional di Provinsi Jawa Barat;

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
	2	Masih adanya wilayah penangkapan ikan kewenangan pemprov yang belum tereksploitasi	1	Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tidak semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki *cold storage* untuk menyimpan produk perikanan; Berdasarkan jenis kapal, mayoritas nelayan yang ada di Provinsi Jawa Barat merupakan nelayan kecil dengan kepemilikan kalap kurang dari (<) 5 GT; Tingkat Sedimentasi di Pelabuhan Perikanan Sangat Tinggi Sehingga diperlukan pemeliharaan kolam labuh; Fasilitas Penunjang Pelayanan di Pelabuhan Perikanan Tidak Memadai
			2	Regenerasi nelayan di Provinsi Jawa Barat lambat sehingga jumlah nelayan dari tahun ke tahun semakin menurun
Pariwisata				
Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	1	Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata, promosi pariwisata, industri pariwisata dan ekonomi kreatif	1	Adanya kebijakan PPKM sebagai akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, 2021, dan 2022 yang membatasi aktivitas
			2	Belum optimalnya perencanaan dan pengembangan pariwisata, sistem pemasaran serta pemahaman terkait regulasi yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), badan promosi pariwisata daerah, usaha pariwisata dan masyarakat. Hal ini termasuk masih terdapat beberapa kab/kota yang belum menyusun RIPPDA
			3	Belum semua kabupaten/kota memiliki destinasi wisata unggulan yang dapat menarik kunjungan wisatawan
			4	Cenderung menurunnya jumlah event promosi pariwisata
			5	Belum tersosialisasikannya pariwisata halal atau pariwisata moslem friendly untuk mengakomodir wisatawan dari negara muslim
			6	Masih rendahnya kesadaran dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam pengembangan kegiatan pariwisata
			7	Belum optimalnya penggunaan creative centre kabupaten/kota
			8	Pengelolaan data profil usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif belum terpadu, termasuk dengan kabupaten/kota
			9	Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota
Length of Stay (LOS) wisatawan nusantara yang menjadi target	2	Belum optimalnya pengembangan atraksi	1	Kepuasan serta persepsi citra positif wisatawan terhadap destinasi wisata cenderung belum baik

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
pasar potensial pasca pandemi masih rendah dan dapat berimplikasi pada spending money wisatawan		dan aktifitas di destinasi wisata	2	Atraksi dan aktivitas wisata di destinasi wisata tidak dinamis.
			3	Kegiatan promosi pariwisata berdasarkan karakter wisatawan dan target wisatawan cenderung masih kurang
			4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, sumber daya manusia industri pariwisata dan ekonomi kreatif
			5	Belum optimalnya pelaksanaan standarisasi usaha dan kode etik pariwisata di berbagai usaha pariwisata
	3	Amenitas pariwisata belum tersedia dan dikelola secara optimal serta aksesibilitas pada beberapa wilayah menuju destinasi pariwisata masih terbatas	1	Jaringan transportasi yang belum terintegrasi di beberapa titik destinasi pariwisata (misal: transportasi dari Stasiun Banjar – Pangandaran)
			2	Belum terpadunya aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan daerah terutama DTW nggulan, contoh: Geopark Ciletuh, Jabar Selatan, dll.
			3	Belum optimalnya upaya penyebaran pola perjalanan wisatawan (misal: Bandung Raya terkonsentrasi pada KBB & Kota Bandung)
			4	Belum optimalnya pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata
Pertanian (Perkebunan)				
Rendahnya pendapatan pelaku usaha perkebunan	1	Rendahnya produksi dan produktivitas produk perkebunan	1	Petani kurang menguasai penerapan GAP
			2	Tingkat pemanfaatan ICT masih minim
			3	Masih banyak permasalahan OPT
			4	Banyak terjadi alih fungsi lahan
			5	Sering terjadi bencana alam
			6	Terbatasnya ketersediaan benih unggul dan bersertifikat
			7	Keterbatasan dan rusaknya prasarana perkebunan
			8	SDM perkebunan relatif masih rendah
			9	Akses petani terhadap permodalan masih rendah
	2	Rendahnya nilai tambah produk perkebunan	1	Petani belum menerapkan standard baku mutu produk perkebunan
			2	Masih sedikit petani yang mengolah produk perkebunannya
			3	Penanganan pasca panen belum optimal
	3	Rendahnya akses pasar produk perkebunan	1	Kemitraan antara petani dengan perusahaan besar perkebunan belum optimal
			2	Kegiatan promosi masih kurang

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
			3	Branding produk perkebunan masih lemah
			4	Belum ada sentra pasar produk perkebunan
			5	Sistem informasi harga dan ketersediaan produk perkebunan yang *up to date* belum optimal
			6	Petani tidak mempunyai posisi tawar terhadap pasar (terutama tengkulak)
			7	Belum ada sistem yang menyediakan informasi kecepatan dan ketepatan pengiriman produk
Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)				
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura belum optimal	1	Semakin tingginya alih fungsi lahan	1	Konversi lahan pertanian secara terus-menerus untuk penggunaan non pertanian dan pertanian lain
			2	Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk permukiman/perumahan terus meningkat
			3	Pertumbuhan industri menimbulkan permintaan akan lahan pertanian untuk dijadikan lahan industri meningkat
			4	Pembangunan jalan raya dan tol juga memerlukan lahan pertanian yang sangat luas
	2	Kecukupan air irigasi tersier yang semakin berkurang dalam menjamin produktivitas yang tinggi	1	banyak infrastruktur irigasi, seperti bendungan, saluran, dan pintu-pintu air yang rusak karena berbagai sebab sehingga tidak berfungsi secara baik. Penyebab kerusakan antara lain adalah gangguan alam seperti gempa bumi dan banjir, perbuatan manusia sendiri, konstruksi bangunan yang salah, dan kurangnya pemeliharaan oleh instansi pemerintah, provinsi maupun kabupaten/kota
	3	Penggunaan teknologi pertanian yang kurang ramah lingkungan	1	Praktek-praktek pemeliharaan tanaman padi dan sayuran masih menggunakan bahan kimia (pestisida) untuk mengendalikan hama/penyakit menimbulkan polusi terhadap air dan lingkungan
			2	Pola produksi padi juga belum mampu mengantisipasi dan mengadaptasi dampak perubahan iklim sehingga di wilayah-wilayah sentra produksi tertentu mengalami gagal panen karena kekeringan atau kebanjiran
			3	Upaya pemerintah untuk menghasilkan varietas-varietas padi yang tahan kekeringan atau tahan genangan air dengan pola tanam tertentu sudah ada, tetapi masyarakat petani masih belum

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
				sepenuhnya memahami dan mempraktekkannya
	4	Pada fase pasca panen, tingkat kehilangan hasil masih tinggi dan mutu hasil belum optimal	1	Pemanfaatan teknologi dalam menunjang pasca panen masih terbatas, karena alat yg masih mahal,
			2	Mesin/ alat pertanian pasca panen yang modern belum banyak tersedia secara lokal
			3	pengetahuan petani dalam menggunakan mesin/alat pasca panen masih kurang
	5	Berkurangnya SDM sektor pertanian	1	Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi
			2	lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani
			3	lemahnya akses petani terhadap modal, teknologi, sarana produksi dan informasi pasar dan rendahnya disiplin maupun etos kerja aparatur pertanian
Pertanian (Peternakan)				
Masih rendahnya capaian NTUP yang menggambarkan kondisi kesejahteraan peternak	1	Masih kurangnya indeks yang diterima peternak dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar peternak	1	Nilai tawar produksi peternakan yang masih rendah dan hasil produksi peternakan belum mengarah pada produk olahan
Masih kurangnya produksi daging, telur, dan susu dalam memenuhi pangan hewani	1	Rendahnya populasi ternak serta belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak	1	Masih rendahnya kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi ternaknya
			2	Aksesibilitas peternak terhadap sarana produksi, pemasaran, dan permodalan terbatas
			3	Rendahnya skala usaha peternakan rakyat
			4	Rendahnya penggunaan pakan yang berkualitas
			5	Rendahnya minat masyarakat untuk beternak terutama pada generasi muda
			6	Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
Belum optimalnya penjaminan mutu produk hewan	1	Masih ditemukan produk hewan yang belum memenuhi standar mutu	1	Kurangnya penerapan hygiene dan sanitasi pada unit usaha produk hewan
			2	Kurang optimalnya pengawasan peredaran produk hewan
Kehutanan				
Ekologi: Menurunnya luasan tutupan hutan dan tingkat degradasi hutan dan lahan masih tinggi terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS).	1	Rehabilitasi hutan dan lahan serta peningkatan daya dukung DAS masih belum optimal, penurunan fungsi DAS masih terjadi pada beberapa lokasi	1.	Degradasi hutan masih terus berlangsung baik pada kawasan hutan maupun pada lahan di luar kawasan hutan sehingga berakibat pada semakin kritisnya kondisi Daerah Aliran Sungai.
			2.	Perlindungan kawasan hutan sebagai ekosistem lestari berkelanjutan belum optimal
			3.	Rendahnya pengembangan teknologi dan budidaya di lahan kritis
			4.	Masih banyaknya lahan kritis diluar kawasan hutan, disebabkan pola

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
				budidaya yang merusak karena pemanfaatan teknologi di budidaya pertanian masih terbatas
	2	Menurunnya jumlah keanekaragaman hayati.	1.	Meningkatnya gangguan fungsi ekosistem.
Ekonomi: Belum optimalnya penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan	1	Produktivitas Hutan Rakyat belum optimal	1.	Masih terjadinya pencurian hasil hutan, *illegal logging* dan gangguan keamanan hutan lainnya
			2.	Pemanfaatan multifungsi hutan yang tidak hanya mengandalkan pada hasil hutan kayu, tetapi juga untuk bukan kayu dan jasa lingkungan belum optimal.
			3.	Rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan
			4.	Terbatasnya produksi hasil hutan bukan kayu.
	2	Jasa Lingkungan Hutan belum optimal	1.	Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDH
Sosial: Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan belum optimal	1	Rendahnya taraf hidup masyarakat sekitar hutan. Taraf hidup masyarakat petani yang sebagian besar berada di sekitar kawasan hutan masih belum sejahtera sehingga berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap keutuhan dan kelestarian hutan.	1.	Rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan daya beli masyarakat sekitar hutan
			2.	Terbatasnya kemampuan kelompok tani hutan.
			3	Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
			4.	Masih terbatasnya kapasitas penyuluh kehutanan dan kapabilitas kelompok tani masih belum optimal dalam baik dari segi kualitas maupun kuantitas
Kelembagaan: Pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan belum optimal	1	Peran kelembagaan pengelolaan kawasan hutan dan kawasan lindung belum optimal	1.	Masih lemahnya koordinasi dan sinergi kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan
Energi dan Sumber Daya Mineral				
Belum terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat miskin dan tidak mampu serta industri secara aman, andal dan ramah lingkungan	1	Belum optimalnya akses masyarakat miskin terhadap listrik	1	Sektor terkait sebagai driver factor maupun sebagai pendukung peningkatan konsumsi listrik per kapita belum memiliki pemahaman yang baik mengenai kepentingan perhitungan konsumsi listrik per kapita.
			2	Kualitas layanan pengusahaan ketenagalistrikan belum optimal
			3	Belum tersedianya peraturan dari Kementerian ESDM sebagai NSPK bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tingkat mutu pelayanan bagi pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) di Jawa Barat.
			4	Belum adanya NSP dari Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM terkait penetapan konsumsi listrik per kapita sebagai indikator pembangunan daerah, sehingga

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
				Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki referensi dalam pelaksanaan Perhitungan Konsumsi Perkapita.
			5	Belum semua pelanggan listrik non PLN menyampaikan laporan hasil penggunaan listriknya pada tahun 2020.
			6	Masih kurangnya kesadaran para pemilik instalasi tenaga listrik untuk melakukan proses Sertifikasi Laik Operasi (SLO).
			7	Standar Keselamatan Ketenagalistrikan belum optimal
			8	Terbatasnya SDM sektor ketenagalistrikan khususnya inspektur ketenagalistrikan sebagai pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan.
			9	Kondisi geografis sejumlah permukiman perdesaan menjadi kendala pelayanan
			10	Keterbatasan pembiayaan untuk perluasan jaringan
			11	Belum tersedianya sistem informasi ketenagalistrikan yang terpadu
			12	Sistem informasi dan pendataan elektrifikasi belum optimal
			13	Masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang kondisinya layak untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik namun belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
			14	Instalasi tenaga listrik belum terstandardisasi
Minimnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT)	1	Masih rendahnya transisi energi dari berbasis fosil menjadi Nol Karbon Pengelolaan pemanfaatan energi baru terbarukan yang belum optimal	1	Mahalnya teknologi pemanfaatan EBT (*starter* KIT maupun *maintenance*)
			2	Kurangnya dukungan regulasi pemanfaatan EBT
			3	Lemahnya regulasi terkait upaya efisiensi energi
			4	Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan
			5	Adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi menyebabkan tidak terlaksanakannya/ tertundanya pembangunan instalasi energi baru terbarukan
Usaha pertambangan belum seluruhnya menerapkan tertib administratif dan teknis	1	Kurangnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan	1	Ketidakseimbangan jumlah personil pengawas pertambangan dengan luas wilayah usaha pertambangan
			2	Adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan pengawasan usaha pertambangan tidak dapat berjalan secara optimal.
			3	Persyaratan *good mining practice* yang kurang melihat kondisi sehingga dianggap memberatkan bagi unit usaha pertambangan kecil

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
			4	Belum ada sistem pendataan yang baik terkait penyelenggaraan g*ood mining practice* dan kontrol pertambangan tanpa izin
Ancaman terhadap ketersediaan dan kualitas air tanah	1	Meningkatnya penggunaan air tanah terutama di wilayah perkotaan dan sekitar industri besar	1	Dinamika pembangunan yang membutuhkan lahan dan terjadinya pemanfaatan lahan di sekitar wilayah konservasi Cekungan Air Tanah (CAT)
	2	Belum optimalnya konservasi air tanah	1	Rendahnya kesadaran para pelaku pengambil air tanah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, seperti kewajiban untuk membuat sumur imbuhan, ataupun telah memiliki sumur imbuhan tetapi belum diregistrasi, dan belum memasang piezometer.
			2	Adanya kendala dalam masalah biaya dalam melakukan pengujian konstruksi sumur bor melalui *bore hole camera*.
			3	Masih ditemukan adanya meter air yang belum dikalibrasi (ditera) atau meter air yang kondisinya rusak.
			4	Keterbatasan kewenangan provinsi dalam menetapkan zona konservasi CAT dan penyelenggaraan pengelolaan air tanah
			5	Lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah dan pengendalian pemanfaatan lahan di sekitar kawasan konservasi CAT
Perdagangan				
Pertumbuhan sektor Perdagangan Belum Pulih	1	Masih Panjangnya Rantai pasok perdagangan	1	Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan
			2	Lemahnya rantai nilai yang utuh dan terintegrasi (belum terbentuknya sistem logistik yang terpadu)
			3	Panjangnya rantai pasok dan kerentanan produksi bahan pokok terhadap perubahan cuaca
	2	Harga bahan pokok dan barang penting fluktuatif	1	Perdagangan dalam negeri cenderung memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan luar negeri
			2	Kenaikan harga bahan pokok dan barang penting, hal ini disebabkan inflasi dan menyebabkan turun nya daya beli masyarakat
	3	Kurangnya penggunaan barang/ jasa produk dalam negeri	1	Produk dalam negeri dinilai belum memiliki kualitas yang memadai dan harga yang juga belum dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri
			2	Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan
	4	Promosi produk unggulan masih kurang maksimal	1	Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
	5	Belum optimalnya perlindungan konsumen	1	Penegakan hukum terkait perlindungan konsumen belum optimal
			2	Masih lemahnya fungsi lembaga terkait perlindungan konsumen
			3	Perangkat hukum perlindungan konsumen masih belum memadai dan masih banyak pelanggaran barang beredar
			4	Belum optimalnya pengujian sampel
			5	Belum optimal Pengawasan perdagangan *e-commerce*
	6	Menurunnya Ekspor Non Migas	1	Kurang memadainya infrastruktur perdagangan luar negeri
			2	Kegiatan ekspor komoditi yang berasal dari Jawa Barat sebagian besar dilakukan melalui pelabuhan di luar Jawa Barat terutama DKI Jakarta
			3	Masih rendahnya partisipasi UMKM dalam ekspor Jawa Barat
	7	Belum optimalnya perdagangan digital	1	Kurang memadainya kompetensi dalam mendapatkan peluang di pasar digital
			2	Kurang memadainya kompetensi dalam mendapatkan peluang di pasar digital
Perindustrian				
Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Belum Optimal	1	Tingkat produksi hasil industri masih belum optimal	1	Belum optimalnya perencanaan pengembangan di kawasan industri
			2	Masih adanya ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan bagian Timur
			3	Kualitas dan kuantitias bahan baku Jawa Barat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan industri
			4	Bahan baku industri mayoritas diimpor
			5	Belum adanya regulasi terkait rantai pasok (*supply chain*) bahan baku untuk kepentingan industri Jawa Barat
	2	Masih rendahnya daya saing industri	1	Pemanfaatan teknologi untuk pengembangan industri masih kurang dioptimalkan di era industri 4.0 terutama disebabkan oleh penguasaan teknologi masih rendah
			2	Produk industri di Jawa Barat belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk, baik dalam maupun luar negeri (SNI, HACCP, GMP, ISO, BPOM, dan Halal)
			3	Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi
			4	Belum terintegrasinya infrastruktur industri sebagai pendukung mulai dari kegiatan produksi sampai dengan distribusi hasil industri

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
			5	Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang mendorong industri untuk memanfaatkan infrastruktur pendukung yang telah di bangun
	3	Data industri belum dapat menggambarkan keadaan sebenarnya	1	Masih rendahnya kesadaran pelaku industri untuk melaporkan kegiatan industri melalu aplikasi SIINAS
Transmigrasi				
Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi	1	Manajemen penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah sulit diimplementasikan	1	Penetapan target penempatan masih menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
			2	Alokasi target penempatan calon transmigran yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi cenderung turun dari tahun ke tahun
	2	Ketidaksesuaian antara keterampilan dasar calon transmigran dengan kebutuhan daerah penempatan	1	Daerah penempatan transmigran saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sedangkan pelatihan calon transmigran dapat diselenggarakan oleh dinas yang membidangi ketransmigrasian
Sekretariat Daerah				
Belum optimalnya kinerja Sekretariat Daerah	1	Area perubahan Reformasi Birokrasi belum reform secara maksimal	1	Manajemen perubahan belum reform secara optimal
			2	Akuntabilitas kinerja belum optimal
			3	Kualitas ketatalaksanaan belum optimal
			4	Pelayanan publik belum optimal
			5	Penguatan organisasi belum optimal
			6	Deregulasi kebijakan belum optimal
	2	Kualitas kebijakan bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan belum optimal	1	Perencanaan Kebijakan belum optimal
			2	Evaluasi kemanfaatan kebijakan belum optimal
Sekretariat DPRD				
Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan Anggota DPRD	1	Semakin meningkatnya standar dan tuntutan pelayanan yang prima	1	Semakin tingginya tuntutan sarana dan prasarana
			2	Semakin tingginya tuntutan prosedur dan persyaratan
			3	Semakin tingginya tuntutan kompetensi petugas
			4	Semakin tingginya tuntutan penanganan pengaduan
Perencanaan				
Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat dan belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	1	Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang	1	Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia belum optimal

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
		berkesinambungan belum optimal		
	2	Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal	1	Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi belum optimal
	3	Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal	1	Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur belum optimal
Keuangan				
Kualitas pengelolaan keuangan aset dan daerah belum optimal	1	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	1	Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, pengelolaan pembendaharaan daerah, pelaksanaan akuntansi, serta pelaporan keungan daerah belum optimal
			2	Belum optimalnya pembinaan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pengelolaan keuangan daerah
	2	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	1	Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
			2	Pelaksanaan pemanfaatan aset dan pengamanan aset belum optimal
Kepegawaian				
Belum optimalnya profesionalisme dan integritas ASN serta belum sejahteranya ASN	1	Sistem Merit belum dilaksanakan sepenuhnya	1	Perencanaan Kebutuhan ASN belum sepenuhnya berbasis sistem merit
			2	Pengadaan ASN belum sepenuhnya berbasis sistem merit
			3	Pengembangan karir ASN belum sepenuhnya berbasis sistem merit
			4	Promosi dan Mutasi belum sepenuhnya berbasis sistem merit
			5	Manajemen kinerja belum sepenuhnya terintegrasi
			6	Tunjangan kinerja berdasarkan penilaian kinerja belum optimal, Penghargaan belum mendorong kinerja secara optimal dan belum optimalnya disiplin pegawai
			7	Perlindungan dan pelayanan ASN belum maksimal
Pendidikan dan Pelatihan				
Belum Optimalnya kompetensi ASN	1	Belum sesuainya program diklat dengan kebutuhan komptensi	1	Adanya penyederhanaan birokrasi
	2	Masih terdapat program diklat yang belum terakreditasi	1	Bertambahnya jabatan fungsional akibat penyederhaan birokrasi
			2	Adanya formasi dari PPPK
			3	Masih banyaknya program diklat yang belum terakreditasi

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
Penelitian dan Pengembangan				
Hasil Kelitbangan yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	Hasil Kelitbangan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah	1	Belum tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan
	2	Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	1	Perbandingan Jabatan Fungsional terkait Kelitbangan dengan total SDM ASN BP2D 13:50
			2	Perbandingan anggaran BP2D dibandingkan dengan anggaran APBD (0,06%)
Masih Rendahnya Indeks Inovasi Daerah	1	Belum optimalnya penyelenggaraan inovasi daerah	1	Belum adanya regulasi penyelenggaraan inovasi daerah
			2	Belum adanya Road Map Inovasi Daerah
			3	Belum adanya Tim Pengelola Inovasi Daerah di tingkat Provinsi
Pengelolaan Penghubung				
Pelayanan keprotokolan, hubungan antar lembaga dan promosi informasi belum optimal	1	Semakin meningkatnya standar dan tuntutan pelayanan yang prima	1	Sarana dan Prasarana keprotokolan, hubungan antar lembaga dan promosi informasi belum optimal
			2	Prosedur dan persyaratan keprotokolan, hubungan antar lembaga dan promosi informasi belum optimal
			3	Kompetensi Petugas keprotokolan, hubungan antar lembaga dan promosi informasi belum optimal
			4	Penanganan Pengaduan keprotokolan, hubungan antar lembaga dan promosi informasi belum optimal
			5	Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Pemerintahan Umum				
Adanya potensi konflik sosial antar lembaga/organisasi/golongan yang mengancam kewaspadaan daerah	1	Masih rendahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa	1	Menurunnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat
			2	Masih adanya intoleransi antar warga negara
			3	Masih perlunya peningkatan wawasan kebangsaan di generasi muda
			4	Kuatnya arus globalisasi negatif di generasi muda
			5	Masih tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkoba
	2	Adanya potensi Ormas Destruktif baik yang terdaftar maupun belum terdaftar	1	Belum optimalnya pendataan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam konteks fasilitasi kebijakan dan peningkatan kualitas SDM
			2	Belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
	3	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik	1	Belum optimalnya penanganan eksnapiter
			2	Belum optimalnya kerjasama intelijen

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN		AKAR PERMASALAHAN	
			3	Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait pendataan orang dan lembaga asing
			4	Masih tingginya penyebaran berita bohong (*hoax*)
Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	1	Belum optimalnya pembinaan budaya politik masyarakat	1	Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat
			2	Belum optimalnya pembinaan organisasi politik
			3	Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan pilkada dan pemilu

Sumber: hasil analisis, 2023

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Internasional

a. Hasil Pertemuan G20 Indonesia Tahun 2022

1) Kebijakan Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Perekonomian global mengalami berbagai guncangan dan tantangan. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan persisten, kondisi keuangan yang semakin ketat, perang Rusia melawan Ukraina, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dan ketidaksesuaian penawaran-permintaan semakin memperlambat prospek ekonomi global. Meningkatnya kekhawatiran tentang harga pangan dan energi mengakibatkan tekanan biaya hidup di banyak negara, yang ikut serta menambah tekanan inflasi. Selain itu, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim menimbulkan risiko penurunan terhadap prospek ekonomi global, dan kenaikan harga energi juga menghambat jalan menuju transisi hijau. Tantangan global yang berkepanjangan telah menyebabkan meningkatnya kerentanan utang dan menghambat jalan menuju pemulihan, yang selanjutnya berdampak pada kelompok rentan, terutama negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Dalam situasi ekonomi ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah berkumpul kembali untuk keempat kalinya tahun ini di Washington D.C., untuk mengambil tindakan nyata guna mengatasi tantangan ekonomi global.

Sejalan dengan tantangan ekonomi global saat ini, anggota G20 menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan dan untuk mengurangi efek luka pandemi untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan,

seimbang, dan inklusif. Seiring dengan tantangan yang semakin meningkat, G20 menekankan pentingnya menjaga respon kebijakan fiskal yang mampu bergerak cepat dan fleksibel, serta langkah-langkah pengendalian yang bersifat sementara dan tepat sasaran untuk menghindari tekanan inflasi yang tinggi. Dalam hal ini, G20 menegaskan kembali pentingnya kerja sama kebijakan makro untuk menjaga stabilitas keuangan, dan kebijakan fiskal jangka panjang yang berkelanjutan, serta melindungi risiko penurunan dan dampak *negative effect spillover*. G20 juga menegaskan kembali pentingnya kebijakan makroprudensial, kemajuan agenda pembangunan berkelanjutan, dan transisi berkelanjutan. Untuk mencapai stabilitas harga dan menghindari *spillover*, G20 juga berkomitmen untuk mengkalibrasi laju pengetatan kebijakan moneter secara tepat.

Sehubungan dengan meningkatnya risiko kerawanan pangan dan energi, G20 berkomitmen untuk mempertimbangkan semua alat yang diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan energi serta tekanan biaya hidup yang dialami di banyak negara. G20 menyoroti pentingnya kerja sama untuk memastikan respon global yang terkoordinasi untuk mengatasi kerawanan pangan. G20 akan terus mencatatkan kemajuannya melalui koordinasi strategis dengan Presidensi G20 India tahun depan.

Untuk mendukung dunia dalam menghadapi pandemi saat ini dan potensi pandemi di masa depan, G20 merevitalisasi arsitektur kesehatan global untuk meningkatkan tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi atau *Prevention, Preparedness and Respone* (PPR). Pada tahun 2022, G20 mengukir sejarah melalui pengumpulan *Financial Intermediary Fund* (FIF) yang diselenggarakan oleh Bank Dunia untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan untuk pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Total komitmen FIF dari donor penggagas adalah sebesar USD 1,4 miliar, dan anggota mendorong tambahan komitmen secara sukarela. G20 juga menyambut baik keanggotaan dan perwakilan inklusif PPR FIF dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor, di mana WHO memegang peran sentral.

Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya, G20 terus menyoroti pentingnya memperkuat arsitektur keuangan internasional. Terkait komitmen G20 untuk meningkatkan ketahanan keuangan global jangka panjang, G20 akan terus memantau risiko peningkatan volatilitas arus modal, *spill over* negatif, dan kondisi pasar tidak merata dengan adanya revisi *Institutional View* (IV) IMF mengenai *Liberalization and Capital Flow Management* dan BIS *Macro-Financial Stability Framework*, yang menuntut kemajuan leih lanjut dalam operasional *Integrated Policy Framework* dari IMF dan mempertahankan Jaring Pengaman Keuangan Global (GFSN) yang kuat. G20 terus mendukung alokasi penyaluran *Special Drawing Right* (SDR) untuk membantu golongan yang paling rentan serta meningkatkan kapasitas sumber daya *Multilateral Development Banks* melalui tinjauan kerangka kecukupan modal, dan di saat yang sama memastikan penerapan *Common Framework* pada *Debt Treatment* di luar DSSI.

Selama pandemi, lembaga keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan luar biasa untuk meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam mendukung perekonomian. Di saat dukungan kebijakan diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari pandemi, penerapan dukungan kebijakan yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Saat pemulihan pandemi sedang berlangsung, G20 menantikan laporan akhir *exit strategies* dan mitigasi *scarring effect* pada sektor keuangan, serta upaya untuk mengatasi kerentanan di Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI). Selain itu, G20 terus memperkuat sektor keuangan global melalui peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik penilaian FSB mengenai pengawasan dan regulasi "*stablecoin*" global, serta aktivitas pasar aset kripto dan menerima panduan akhir oleh BIS CPMI dan IOSCO yang menegaskan bahwa prinsip untuk infrastruktur pasar keuangan berlaku dalam pentingnya pengaturan *stablecoin* yang sistemastis.

G20 juga berkomitmen untuk terus mengeksplor implikasi keuangan makro dari Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) karena hal ini dapat dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil

menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional. G20 juga menyambut baik keberhasilan penyelesaian *Techsprint* G20 2022, inisiatif bersama antara Presidensi G20 Indonesia dengan BIS *Innovation Hub*, yang telah berkontribusi pada diskusi tentang solusi praktis dan layak untuk menerapkan CBDC. G20 telah mengumumkan pemenang untuk 3 (tiga) kategori dan menghadiahkan Rp770.000.000 bagi setiap pemenang pada G20 *Techsprint* 2022 *Award Ceremony* dan *Third* CBDC Seminar yang diadakan secara *back-to-back* dengan acara 2022 *Annual Meetings of the International Monetary Fund* dan *World Bank Group*.

G20 terus berkomitmen untuk memajukan impletasi Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara (CBP) untuk mencapai pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif karena hal ini akan memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi di seluruh dunia. Dalam hal ini, G20 menyabut eksplorasi lanjutan tentang bagaimana CBDC berpotensi dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas dan di saat yang sama menjaga stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan internasional. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik diskusi lanjutan tentang sistem pembayaran yang saling terkait dan opsi akses dan interoperabilitas CBDC untuk pembayaran lintas batas. Sebagai wujud implementasi regional dari Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara, bank sentral pada ASEAN-5 akan menandatangani Perjanjian Umum pada Konektivitas Pembayaran di antara Bank Sentral ASEAN-5 di sela-sela KTT *Leaders' Summit* pada November 2022.

Guna mendukung proses pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan berkelanjutan, negara-negara G20 telah berdiskusi untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses dan infrastruktur yang terjangkau. Para anggota mendukung secara sukarela dan tidak terikat G20/*Global Infrastructure* (GI) Hub *Framework* tentang cara terbaik dalam menjangkau partisipasi pihak swasta guna meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, yang mana akan mempertimbangkan situasi negara, serta akan menambahkan investasi dari sumber lain, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh *Multilateral Develoment Banks* (MDBs). Selebihnya, dalam mendukung infrastruktur G20 menyokong kebijakan perangkat G20-OECD dalam memobilisasi pendanaan dan

keuangan untuk investasi infrastruktur yang inklusif dan berkualitas di berbagai daerah dan kota. Untuk mendukung infrastruktur yang transformatif, G20 juga mendukung *InfraTracker* 2.0 dan Ringkasan Studi Kasus G20 dalam Infrastruktur Keuangan Digital: Masalah, Praktik dan Inovasi. Anggota G20 juga mendorong kualitas investasi infrastruktur dengan mendiskusikan pembangunan Indikator *Quality Infrastructure Investment* (QII). Sebagai tambahan, G20 juga mendiskusikan penataan masa depan infrastruktur global.

G20 menekankan pentingnya untuk kemajuan yang lebih lagi dalam agenda keuangan yang berkelanjutan dan mendukung transisi ekonomi hijau guna mencapai target bebas karbon. Dalam hal ini, G20 menitikberatkan peran penting dalam pencapaian agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan target Penjanjian Paris. Sebuah kemajuan dari peta jalan G20 untuk keuangan berkelanjutan yang dibangun di 2021, pada tahun ini Presidensi G20 Indonesia mendukung Laporan Ekonomi Berkelanjutan G20 yang mana mewujudkan 3 (tiga) agenda utama: (i) pembangunan kerangka transisi keuangan yang menyadari aktivitas transisi iklim, termasuk transisi energi, dan meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan, (ii) memperbesar keuangan berkelanjutan dengan berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan, dan (iii) mendiskusikan pengungkit kebijakan yang menginsentifkan keuangan dan investasi serta mendukung transisi.

Negara-negara G20 mendukung hasil kerja yang dibawa Presidensi dan Kerjasama Global untuk Keuangan Inklusif dalam memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak muda. Dalam topik keuangan berkelanjutan, negara-negara G20 berdiskusi akan implementasi dari FSB *Roadmap* yang menunjukan resiko keuangan dari perubahan iklim yang mana menambah Peta Jalan Keuangan Berkelenjutan G20, dan menyambut implementasi atas peta jalan sejauh ini. Sebagai tambahan, negara-negara G20 mendukung inisiatif dalam mempersempit perbedaan data dan mendukung program kerja atas *New Data Gap Initiatives* guna memastikan ketersediaan akan data yang penting untuk mendukung pembuatan keputusan yang berdasarkan

data. G20 meminta IMF, FSB dan IAG untuk mulai bekerja serta mendata perbedaan data dan laporan di baliknya yang berjalan selama setengah tahun berjalan di 2023, dengan catatan target yang ambisius dan penyampaian yang akan membutuhkan penghitungan kapasitas nasional secara terhitung, utama, dan situasi negara yang baik guna menghindari tumpang tindih dan duplikasi di tingkat internasional.

Melanjutkan komitmen untuk mendukung semua negara rentan untuk pulih bersama, pulih lebih kuat, G20 menyambut penyaluran sukarela *Special Drawing Rights* (SDR) sebesar USD 80,6 milyar dan menyambut kontribusi sukarela kepada IMF *Resilience and Sustainability Trust* (RST). Fasilitas RST diciptakan sebagai pilihan bagi anggota untuk secara sukarela mengalokasi bagian mereka dalam *Special Drawing Rights* (SDR) yang telah dibagikan untuk mendukung negara rentan dalam mengatasi permasalahan struktural jangka panjang yang memiliki risiko ekonomi makro, termasuk yang berasal dari pandemi dan perubahan iklim. Selanjutnya, G20 sepakat untuk memperkuat Global *Financial Safety Net* dan mendorong Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks*/MDB) untuk memperkuat pembiayaan pembangunan guna mendukung pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, G20 menyambut pembahasan awal dan mendorong MBD untuk melanjutkan pembahasan terkait opsi untuk menerapkan rekomendasi Kajian Independen tentang Kerangka Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Framework*/CAF) dari MDB dalam kerangka tata kelola mereka, dan menantikan laporan perkembangan di Musim Semi 2023. Untuk mengatasi kerentanan utang, khususnya pada negara berpendapatan rendah, G20 mendorong perkembangan lebih lanjut dari implementasi *Common Framework for Debt Treatment* di luar DSSI dalam cara yang terprediksi, tepat waktu, teratur, dan terkoordinasi, dan menyambut kemajuan yang tercapai, termasuk penyediaan penjaminan pembiayaan untuk Zambia serta menyambut perkembangan dari komite kreditur sejauh ini dan mendorong penyelesaian yang tepat waktu untuk penanganan utang bagi Chad dan Ethiopia.

Para anggota berkomitmen untuk mengimplementasi kesepakatan bersejarah terkait paket pajak internasional 2 (dua) pilar G20/OECD. Para anggota mendukung pekerjaan yang tengah berlangsung pada Pilar Satu dan menyambut penyelesaian dari *Global*

Anti-Base Erosion (GloBE) *Model Rules* pada Pilar Dua, yang membuka jalan bagi implementasi yang konsisten pada level dunia sebagai pendekatan umum, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBE. Para anggota menyerukan OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk merampungkan Pilar Satu, dan dengan menandatangani Konvensi Multilateral pada paruh pertama 2023, dan untuk menyelesaikan negosiasi Aturan Subjek Pajak (*Subject to Tax Rule*/STTR) dalam Pilar dua yang akan memungkinkan pembangunan Instrumen Multilateral untuk implementasinya. Para anggota juga menegaskan tujuan G20 untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sehubungan dengan G20 *Ministerial Symposium on Tax and Development* pada Juli 2022, dan memperhatikan G20/OECD *Roadmap on Developing Countries and International Tax*. Para anggota mendukung perkembangan yang dicapai dalam mengimplementasikan standar transparansi pajak yang disetujui secara internasional, termasuk upaya regional dan menyambut penandatanganan Deklarasi Bali terkait *Asia Initiative*.

2) Ketahanan Pangan

Presidensi G20 Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain. Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the UN *Global Crisis Response Group* (GCRG), *the G7 Global Alliance for Food Security* (GAFS), *the Global Agriculture and Food Security Program* (GAFSP), *International Finance Institutions Action Plan*, dan *Global Development Initiative*. Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta USD dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun turut

menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 *Agricultural Market Information System*.

Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memanfaatkan semua perangkat kebijakan (*policy tools*) dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk ketahanan pangan. Forum G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lainnya. Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan. Strategi ini diterapkan pada beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 (tujuh belas) Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Adapun 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan TPB/SDGs, meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil bagian secara aktif untuk menerapkan TPB. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya peraturan terkait TPB yang terakhir melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.2.2 Telaahan Kebijakan/Isu Strategis Nasional

a. Telaahan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Visi Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN Tahun 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

b. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi COVID-19. Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia pada tahun 2021 mengalami akselerasi dengan puncaknya mencapai lebih dari 50 ribu kasus per hari pada pertengahan Juli 2021 yang disebabkan oleh merebaknya varian Delta yang jauh lebih menular. Lonjakan kasus akibat varian Delta pada bulan Juli 2021 mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan penguatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diikuti dengan PPKM berdasarkan level keketatan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain melalui pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah juga mengimplementasikan program vaksinasi COVID-19 yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021 dengan target cakupan 208 juta penduduk. Pertambahan kasus COVID-19 terkendali seiring implementasi kebijakan penanggulangan pandemi. Memasuki bulan Agustus 2021, pertambahan kasus baru terus menunjukkan tren penurunan yang berlanjut yang diiringi dengan penurunan *positivity rate* dan *bed occupancy ratio*. Perkembangan positif tersebut memungkinkan Pemerintah untuk mengurangi intensitas kebijakan restriksi mobilitas sehingga aktivitas masyarakat kembali meningkat.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan mengadopsi kebijakan ekonomi untuk menahan dampaknya. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) dimensi utama di dalam stimulus penanganan COVID-19, yang pertama adalah untuk penanganan kesehatan dan pengendalian wabah sebagai sumber utama penyebab krisis. Dimensi kedua adalah penanganan krisis ekonomi sebagai efek domino dari krisis kesehatan, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan membaik dan akan tumbuh lebih tinggi lagi pada 2022, disertai dengan nilai tukar yang stabil dan inflasi yang terkendali. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat

sehubungan dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dan adanya akselerasi vaksinasi. Pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor juga menunjang prakiraan tersebut. Untuk itu, sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional perlu terus diperkuat untuk mendukung berlanjutnya proses pemulihan ekonomi ke depan.

c. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam penanganan permasalahan global, termasuk perubahan iklim dengan mengusung keseimbangan pilar-pilar berkelanjutan, yaitu dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komitmen ini terefleksi dalam Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI-*Low Carbon Development Indonesia*). *Platform* yang diperkenalkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2018 ini bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan/sosial, dan keberlanjutan lingkungan melalui kegiatan pembangunan beremisi gas rumah kaca rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca telah diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca yang menargetkan emisi gas rumah kaca turun sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen apabila mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2020. Kemudian, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyinkronkan berbagai kebijakan, intervensi, dan kebutuhan intervensi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada periode 2015-2019, isu perubahan iklim hanya menjadi salah satu isu yang melandasi pengaturan pada sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, serta kegiatan lainnya.

Posisi pembangunan rendah karbon dalam tatanan kebijakan pembangunan Indonesia semakin menguat pada RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen tersebut menjadi dokumen perencanaan hijau pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan model dinamika sistem pembangunan rendah karbon serta pelibatan berbagai mitra pembangunan, institusi riset, serta Kementerian/Lembaga terkait.

Kebijakan ini memberikan perspektif pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya diukur oleh PDB, tapi juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, serta keadilan sosial. Kemudian, setelah payung kebijakan di tingkat nasional telah tersusun, maka target selanjutnya adalah mengintegrasikan dengan tatanan kebijakan di tingkat daerah.

Komitmen untuk pembangunan rendah karbon pada beberapa tahun terakhir juga diikuti dengan pembangunan berketahanan iklim. Peningkatan ketahanan iklim di Indonesia difokuskan pada 4 (empat) sektor terdampak perubahan iklim yaitu Sektor Kelautan dan Pesisir pada potensi bahaya oleh peningkatan tinggi gelombang yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran dan peningkatan tinggi muka laut yang mengakibatkan penggenangan atau banjir di wilayah pesisir; Sektor Pertanian pada potensi penurunan produksi tanaman pangan padi; Sektor Air pada potensi peningkatan kejadian kekeringan dan penurunan ketersediaan air; dan Sektor Kesehatan pada peningkatan indikatif kejadian luar biasa penyakit DBD, malaria, dan pneumonia.

d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aparatur Sipil Negara atau ASN memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Lebih lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pasal 99 ayat (2) menjelaskan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peraturan Pemerintah tersebut disahkan pada tanggal 28 Nopember 2018. Berdasarkan hal tesebut, maka perlu ada penataan ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana pemberlakuan paling lama 5 (lima) tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 Nopember 2023.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pemetaan pegawai non-ASN dan mengikutsertakan pegawai tersebut apabila memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK serta menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kebijakan dengan mendata dan mengikutsertakan pegawai non-ASN dalam seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK. Data eksisting ASN Provinsi Jawa Barat berjumlah 43.921 orang yang terdiri dari PNS berjumlah 31.331 orang dan PPPK berjumlah 12.590 orang. Pada tahun 2023 jumlah PPPK Provinsi Jawa Barat bertambah sebanyak 662 orang untuk Tenaga Kesehatan (Nakes).

4.2.3 Telaahan Kebijakan Provinsi Jawa Barat

a. Telaahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

Penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 salah satunya dengan mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019. Pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V (2023-2025). Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V disusun dengan mempertimbangkan isu strategis dan merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

1) Isu Strategis

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

a) Kuantitas dan kualitas penduduk serta persebarannya;
b) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
c) Pengangguran dan ketenagakerjaan;
d) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
e) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
f) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
g) Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan

h) Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

2) Visi dan Misi

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah: "DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA".

Pernyataan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat diatas, memiliki makna:

1. **Iman dan Takwa** sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.
2. **Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia** dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut yaitu dalam 7 (tujuh) bidang yang sekaligus penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expection*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat, energi baru dan terbaharukan; kelima, industri manukfaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai Tahun 2025.

1. Misi Satu: **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing** adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung

nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

2. Misi Dua: **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah**; adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. Misi Tiga: **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;** adalah mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. Misi Empat: **Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik**; adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat; membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan efesiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
5. Misi Lima: **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;** adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

3) Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Daerah tahap kelima RPJPD (2023-2025) memberi arahan untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2025. Tahap kelima RPJPD yang merupakan tahap terakhir dari pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mencapai keunggulan Jawa Barat di segala bidang sehingga kesejahteraan masyarakat memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat. Secara lebih spesifik, keunggulan tersebut diindikasikan oleh 7 (tujuh) bidang yang sekaligus menjadi penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expection*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat, energi baru dan terbaharukan; kelima, industri manukfaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan; serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia. Pencapaian keunggulan tersebut memiliki makna bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki daya saing dan keberhasilan pembangunan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional juga relatif lebih tinggi daripada daerah lain.

Keberhasilan pencapaian pembangunan tahap kelima ditandai dengan indikator kinerja sebagai berikut: (a). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,23–76,01 (dengan metode baru); (b). Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,67%–6,09%; (c). Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,12%; (d). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 50,01-52,00; (e). Indeks Refomasi Birokrasi kategori A; (f). Persentase Penduduk Miskin sebesar 6,80%–6,27%; (g). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,45%-7,26%; dan (h). Indeks Gini sebesar 0,35-0,30.

Pencapaian target kinerja pembangunan untuk tahap akhir periode RPJPD Jawa Barat diatas dilakukan melalui berbagai prioritas pembangunan sebagai berikut:

Bidang Pendidikan. Prioritas Pembangunan pendidikan pada periode 2018-2023 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas

Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana, yang didukung dengan pola dan kultur belajar siswa yang dikembangkan ke arah pembentukan budaya kualitas melalui proses pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya.

Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar 15 (lima belas) tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional.

Pada periode juga ditempuh upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya. Mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multimedia yang telah diperoleh.

Sedangkan upaya pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Bidang Kesehatan. Prioritas pembangunan bidang kesehatan diupayakan melalui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan perbaikan dan pemenuhan kualitas gizi, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi), serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sangsi untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkualitas dengan memperhatikan pemerataan pelayanan kesehatan dan tetap membuka peluang bagi peran serta swasta khususnya dalam pengembangan pelayanan medik.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Prioritas pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan pada pemerataan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat, sehingga tidak terdapat lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa Barat telah menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini ditempuh dengan upaya-upaya penataan ruang telah dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Prioritas pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di arahkan pada Percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Prioritas pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diarahkan pada Memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari serta pengutan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia.

Bidang Sosial. Prioritas pembangunan bidang sosial diarahkan pada pemantapan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, penguatan peran dan fungsi PSKS dalam penanganan PMKS; dan peningkatan keberdayaan PMKS dengan mengefektifkan sistem perlindungan dan jaminan sosial; serta peningkatan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Bidang Tenaga kerja. Prioritas pembangunan bidang tenaga kerja diarahkan pada Peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui upaya-upaya peningkatan sarana, prasarana dan penerapan kurikulum yang

terkait dengan dunia kerja dan kewirausahaan pada pendidikan formal; Pembudayaan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Prioritas pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan; pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat akif di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat; serta upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Bidang Pangan. Prioritas pembangunan pangan diarahkan pada: peningkatan kualitas, keragaman dan keamanan pangan, melalui upaya-upaya peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat.

Bidang Pertanahan. Prioritas pembangunan bidang pertanahan diarahkan pada terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

Bidang Lingkungan Hidup. Prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan pada kemantapan daya dukung lingkungan Jawa Barat harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan, dilakukan melalui upaya-upaya perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, memelihara fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, sarana dan prasarana lingkungan yang terbangun.

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prioritas pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan pada: peningkatan pengelolaan kependudukan di Jawa Barat melalui upaya pemanfaatan data penduduk sebagai dasar pengambilan kebijakan serta mewujudkan Pengendalian penduduk.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Prioritas pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan modernisasi BUMDes menjadi sumber utama pendapatan desa.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Prioritas pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk Mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai dasar acuan pembangunan serta memantapkan persebaran penduduk yang mandiri dan berkualitas.

Bidang Perhubungan. Prioritas pembangunan bidang perhubungan diarahkan pada pemantapan infrastruktur wilayah yang telah terbangun, untuk mendukung pencapaian tujuan RPJPD berikutnya, dengan tetap memperhatikan kualitas kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat, sebagai *stakeholder* pembangunan. Pada tahap ini akan ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem transportasi massal (*Mass Rapid Transport*), mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, mantapnya pengendalian banjir dan kekeringan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Tersedianya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi dilakukan melalui penyelesaian pembangunan jalan tol yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya termasuk pada ruas Cileunyi-Nagreg-Ciamis sebagai jalan tol antar kota, peningkatan kualitas dan kemantapan jaringan jalan, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi laut dan jalan kereta api yang telah terbangun pada tahap sebelumnya. Sedangkan pada pengembangan infrastruktur transportasi udara, dilakukan penyelesaian pembangunan Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer Kertajati di Majalengka, penyelesaian pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier Kalijati di Subang, Bandar Udara Cibeureum di Tasikmalaya, serta Bandar Udara Atang Sanjaya di Bogor, serta pemantapan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi udara yang telah terbangun sebelumnya.

Bidang Komunikasi dan Informatika. Prioritas pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan pada peningkatan inovasi kualitas pelayanan informasi, melalui upaya-upaya peningkatan inovasi teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dan peningkatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Prioritas pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan pada pemantapan koperasi dan usaha kecil dengan peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil, pengembangan struktur ekonomi koperasi dan usaha kecil serta penyerapan tenaga kerja dan investasi.

Bidang Penanaman Modal. Prioritas pembangunan bidang penanaman modal diarahkan pada Penciptaan Jawa Barat sebagai daerah tujuan utama investasi skala nasional dan internasional.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Prioritas pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada mempertahankan kemandirian pemuda dan mendorong daya saing pemuda Jawa Barat di skala internasional baik di bidang politik, ekonomi, budaya serta IPTEK. Sedangkan pembangunan olahraga Jawa Barat diarahkan untuk tetap mempertahankan keunggulan olahraga Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional, serta menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat Jawa Barat.

Bidang Statistik. Prioritas pembangunan statistik diarahkan pada peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui upaya-upaya peningkatan akurasi, kecepatan pemenuhan Data Pembangunan.

Bidang Persandian. Prioritas pembangunan bidang persandian diarahkan pada pengamanan informasi, melalui upaya peningkatan kualitas keamanan informasi.

Bidang Kebudayaan. Prioritas pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada pemantapan ketahanan budaya jawa barat dalam kehidupan global, mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan menjadikan budaya Jawa Barat, termasuk nilai-nilai luhur yang dikandungnya, sebagai bagian dari interaksi sosial masyarakat Jawa Barat dalam pergaulan masyarakat berskala regional, nasional maupun internasional.

Bidang Perpustakaan. Prioritas pembangunan bidang perpustakaan diarahkan pada peningkatan kualitas perpustakaan di jawa Barat melalui upaya peningkatan peran perpustakaan guna menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis dan produktif.

Bidang Kearsipan. Prioritas pembangunan bidang kearsipan diarahkan pada peningkatan kualitas kinerja kearsipan daerah melalui upaya peningkatan kualitas sistem kearsipan.

Bidang Kelautan dan Perikanan. Prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada Pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan dan Pantai Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (*marine culture*), pengembangan kota-kota pantai (*coastal cities*), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi.

Bidang Pariwisata. Prioritas pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan baik sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pariwisata Jawa Barat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pariwisata yang terintegrasi dengan lingkungan, alam, budaya, dan manusia. Pengembangan pariwisata harus mendukung upaya konservasi/preservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dukungan spesifik daerah.

Bidang Pertanian. Prioritas pembangunan bidang pertanian diarahkan pada pemenangan persaingan, baik nasional maupun global melalui upaya-upaya penguatan keunggulan kompetitif; terpenuhinya konsumsi Provinsi Jawa Barat dan domestik; tingginya daya terima pasar internasional; dan nilai tambah ekspor yang tinggi. Kegiatan pertanian pada tahap ini dicirikan dengan komitmen yang tinggi terhadap tujuan memenangkan keunggulan kompetitif di pasaran ciri bisnis yang berorientasi pada efisiensi, kualitas, keamanan dan keberlanjutan.

Bidang Kehutanan. Prioritas Pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada peningkatan kualitas fungsi hutan melalui upaya peningkatan manfaat ekonomi hutan berwawasan lingkungan.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Prioritas pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral diarahkan pada peningkatan kemantapan sektor energi yang sudah tercapai terus terjaga dan ditingkatkan sehingga pada tahapan ini adalah masa pemeliharaan pasokan energi, mantapnya desa mandiri energi, mantapnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi.

Bidang Perdagangan. Prioritas pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.

Bidang Perindustrian. Prioritas pembangunan bidang perindustrian diarahkan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbarukan, penanganan industri ramah lingkungan, dan penguatan jaringan antarindustri, didukung oleh pengembangan SDM industri yang berdaya saing.

Bidang Transmigrasi. Prioritas Pembangunan bidang Transmigrasi diarahkan pada: Penataan persebaran penduduk baik didalam maupun keluar wilayah provinsi melalui upaya-upaya kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi, Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (*Resettlement*) dan warga sekitar.

Bidang Perencanaan. Prioritas Pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan diarahkan pada: Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui upaya-upaya Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, kualitas kebijakan perencanaan pembangunan berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan, serta kualitas proses perencanaan pembangunan dengan kerjasama multipihak.

Bidang Keuangan. Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada Penguatan kapasitas aparatur, sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Prioritas pembangunan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas sistem dan prosedur, pengimplementasian *Corporate University* serta standarisasi kualitas pelayanan serta pengembangan budaya organisasi yang solid.

Bidang Penelitian dan Pengembangan. Prioritas pembangunan bidang penelitian dan pengembangan diarahkan pada mempertahankan dan terus mengembangkan inovasi IPTEK serta pemantapan provinsi berbasis teknologi informasi sebagai rujukan nasional.

Fungsi lain. Prioritas pembangunan fungsi lain untuk bidang Keagamaan di Jawa Barat diarahkan pada peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama melalui upaya-upaya pengimplementasian dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyelesaian berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama, serta pengimplementasian dan pengaktualisasian pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Prioritas pembangunan Bidang Politik diarahkan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di jawa Barat serta penguatan kerjasama antar institusi.

Prioritas Pembangunan bidang Hukum dan HAM diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi. Peningkatan kualitas lembaga legislatif melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD.

4) Sasaran Pokok

Pada umumnya, sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat merupakan proses kontinum yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yaitu berupa indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir

periode tahun ke-20 dapat dicapai. Dalam mewujudkan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan sasaran pokok setiap tahapan pembangunan, yaitu:

a) Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Terpadu dan Dilaksanakan Secara Adil, Merata, dan Terjangkau.

   Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi pertama, Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahap pertama sebesar 71,12 dan tahap kedua sebesar 73,58 dengan menggunakan perhitungan metode lama. Adapun target Indeks Pembangunan Manusia antara 71,04 sampai dengan 71,54 pada tahap ketiga, lalu pada tahap keempat antara 74,10 sampai dengan 74,68 dan tahap kelima antara 75,23 sampai dengan 76,01.

b) Meningkatnya Perekonomian Daerah

   Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kedua, Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja yaitu Laju pertumbuhan ekonomi. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahap pertama sebesar 6,21 persen dan tahap kedua sebesar 6,33 persen. Adapun target Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 5,76 persen sampai dengan 5,81 persen pada tahap ketiga, lalu pada tahap keempat antara 5,67 persen sampai dengan 5,89 persen, dan tahap kelima antara 5,67 sampai dengan 6,09 persen.

c) Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Secara Alamiah Maupun Penduduk Migrasi

   Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi ketiga, Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri dan Lestari. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahap pertama sebesar 1,71 persen

dan tahap kedua sebesar 1,78 persen. Adapun target Laju Pertumbuhan Penduduk antara 1,78 persen sampai dengan 1,34 persen pada tahap ketiga, lalu tahap keempat antara 1,34 persen sampai dengan 1,12 persen, dan tahap kelima sebesar 1,12 persen.

d) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi ketiga, Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Asri dan Lestari. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahap kedua sebesar 47,61 persen. Adapun target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 47,80 persen pada tahap ketiga, lalu pada tahap keempat antara 48,00 persen sampai dengan 50,00 persen, dan tahap kelima antara 50,01 persen sampai dengan 52,00 persen.

e) Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Perolehan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahap ketiga kategori BB. Adapun target perolehan Indeks Reformasi Birokrasi kategori A pada tahap keempat dan kelima.

f) Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kelima, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin. Capaian Persentase Penduduk Miskin pada tahap pertama sebesar 12,74 persen dan tahap kedua sebesar 9,61 persen. Adapun target Persentase Penduduk Miskin pada tahap ketiga sebesar 7,17 persen, lalu pada tahap keempat antara 7,17 persen sampai dengan 6,80 persen, dan tahap kelima antara 6,80 persen sampai dengan 6,27 persen.

g) Menurunnya Tingkat Pengangguran

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Capain Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahap pertama sebesar 12,08 persen dan tahap kedua sebesar 9,16 persen. Adapun target Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahap ketiga sebesar 8,0 persen, lalu pada tahap keempat antara 8,0 persen sampai dengan 7,45 persen, dan tahap kelima antara 7,45 sampai dengan 7,26 persen.

h) Menurunnya Tingkat Ketimpangan

Sasaran pokok ini diarahkan untuk mencapai Misi kelima, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan. Perwujudan sasaran pokok diindikasikan oleh tercapainya target indikator kinerja Indeks Gini. Capaian Indeks gini pada tahap pertama sebesar 0,36 dan tahap kedua sebesar 0,41. Adapun target Indeks gini pada tahap ketiga sebesar 0,38, lalu pada tahap keempat antara 0,38 sampai dengan 0,35 dan tahap kelima antara 0,35 sampai dengan 0,30.

4.2.4 Telaahan RPJMD/RPD Daerah Sekitar

Penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 juga memperhatikan dokumen RPJMD/RPD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan Provinsi Jawa Barat dengan daerah sekitar. Daerah sekitar yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Barat adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten memiliki dokumen RPD Tahun 2023-2026 sedangkan Provinsi Jawa Tengah yang akan berakhir kepala daerahnya tahun depan sama dengan Provinsi Jawa Barat, juga sedang mempersiapkan Rancangan Awal RPD Tahun 2024-2026. Untuk itu, tidak dapat dilakukan identifikasi kebijakan terhadap RPD Jawa Tengah. Identifikasi kebijakan dari dokumen Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.2
Identifikasi RPD Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten

RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026		RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026	
I	**Isu Strategis**	**I**	**Isu Strategis**
1	Ketahanan Terhadap Bencana	1	Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	2	Daya Saing Perekonomian
3	Ketahanan Ekonomi Inklusif	3	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
4	Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas	4	Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik.
5	Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara		
6	Pemerataan Pembangunan		
II	**Tujuan dan Sasaran**	**II**	**Tujuan dan Sasaran**
1	**Terwujudnya Regenerasi Kota Yang Berketahanan Dan Berkelanjutan**	**1**	**Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia**
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1.1	Meningkatkan kualitas keluarga sejahtera
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1.2	Meningkatnya Pelayanan Sosial
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan daerah perbatasan
1.4	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	1.4	Meningatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2	**Terbangunnya Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak Dan Pemerataan Kesejahteraan**	1.5	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	1.6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1.7	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender
2.3	Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1.8	Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	**2**	**Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi**
3	**Tercapainya Pembangunan Manusia Madani Yang Berkesetaraan**	2.1	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	2.2	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	2.3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	2.4	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.4	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	2.5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan
4	**Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas**	2.6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	**3**	**Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan**
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Berkembangnya Ekosistem Kota Cerdas	3.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	3.2	Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	**4**	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa**

RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026		RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026	
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	4.1	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
		4.2	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten

Sumber: - Pergub DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
- Pergub Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026

4.2.5 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Berdasarkan penelaahan faktor internal berupa permasalahan pembangunan dan kebijakan Provinsi Jawa Barat, serta penelaahan faktor eksternal yang meliputi penelaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional, dan telaahan RPD daerah sekitar, maka dapat dirumuskan isu strategis daerah. Isu strategis merupakan hal-hal yang berdaya ungkit, bersifat penting untuk pembangunan jangka menengah, dan gambaran permasalahan atau tantangan yang akan ditangani atau dijawab, serta potensi dan peluang yang akan diambil atau dioptimalkan.

Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

1. **Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**
   a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.
   b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.
   c. Penurunan *stunting* dan penanganan AIDS, Tubercolosis, dan Malaria.
   d. Peningkatan standar hidup layak masyarakat.
   e. Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
   f. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.
   g. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.

2. **Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan**
   a. Penerapan *link and match* industri kecil-industri besar.
   b. Penerapan UMKM dan industri hijau.
   c. Percepatan digitalisasi ekonomi.
   d. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan

e. Pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM.
f. Penerapan pertanian ekologis.
g. Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan.
h. Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha
i. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan.

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

a. Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir.
b. Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat.
c. Pengembangan dan pembangunan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung.
d. Penyediaan transportasi massal perkotaan.
e. Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah.
f. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah.
g. Penyediaan hunian layak huni.
h. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
i. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
j. Penerapan *Cicular economy;*
k. Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana.
l. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan.

4. Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

a. Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
b. Penataan dan penguatan organisasi.
c. Deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum.

d. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional.
e. Penataan tata laksana proses bisnis, dan SOP serta keterbukaan informasi.
f. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.
g. Penguatan akuntabilitas.
h. Penguatan pengawasan.
i. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
j. Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Periode perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 akan segera berakhir, seiring dengan selesainya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Dokumen RPD Daerah Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan target capaian kinerja pembangunan pada level tertinggi yang bersifat strategis, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan daerah, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ditargetkan dapat tercapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan pembangunan daerah dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Sasaran pembangunan daerah menunjukkan fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (*outcome*) kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu “**Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia**”, melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

serta kualitas lingkungan hidup. Sasaran pokok pada RPJPD tahap kelima menjadi pedoman dalam penentuan isu strategis pembangunan yang selanjutnya dirumuskan dalam tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026. Keterkaitan antara RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dengan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 5.1.

Pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa target indikator kinerja sasaran pokok RPJPD pada akhir periode 2025 tidak seluruhnya sama persis dengan target akhir RPD pada tahun 2026, disebabkan adanya perubahan RPJMD periode 2018-2023 yang diakibatkan pandemi COVID-19. Penyusunan target indikator kinerja pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi capaian hingga tahun 2022 yang digunakan sebagai *baseline*. Penentuan target disusun secara realistis, namun diharapkan tetap mampu menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan peluang dan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat.

Tabel 5.1
Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 dengan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

RPJPD Tahap V (2023-2025)				RPD Tahun 2024-2026					
Sasaran Pokok		Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2025	Isu Strategis		Tujuan/Sasaran		Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2026
1		*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terpadu dan dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	75,23 -76,01	**1**	**Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**	**1**	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia (poin)**	**74,71**
				a	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,29
								Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,88
				b	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.	1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,29
				c	Penurunan stunting dan penanganan AIDS, Tubercolosis, dan Malaria.			Prevalensi *Stunting*	10,34
				d	Peningkatan standar hidup layak masyarakat	1.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	11.735
				e	Percepatan Penanggulangan kemiskinan			Persentase Penduduk Miskin (%)	7,00
				f	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.	1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	72,13
								Indeks Perlindungan Anak	66,50
								Indeks Pembangunan Pemuda	50,14
2	Terkendalinya pertumbuhan penduduk secara	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,12	g	Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk	1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,42

RPJPD Tahap V (2023-2025)				RPD Tahun 2024-2026							
Sasaran Pokok		Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2025	Isu Strategis		Tujuan/Sasaran		Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2026		
1		*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*		
	alamiah maupun penduduk migrasi										
3	Meningkatnya perekonomian daerah	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,67 – 6,09	**2**	**Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan**	**2**	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**5,97**		
4	Menurunnya tingkat ketimpangan	Indeks Gini	0,35-0,30					**Gini Ratio (poin)**	**0,370**		
				a	Penerapan *link and match* industri kecil-industri besar	2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	5,93		
				b	Penerapan UMKM dan industri hijau			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	5,23		
				c	Percepatan digitalisasi ekonomi						
				d	Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan	2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	94,3		
				e	Penerapan pertanian ekologis			Nilai Tukar Petani (NTP)	103,61		
				f	Pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM			Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	4,59		
				g	Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan	2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	13,43		
				h	Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha	2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	553,72		
								Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	24,52		
5	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,45-7,26	i	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,76		

RPJPD Tahap V (2023-2025)				RPD Tahun 2024-2026					
Sasaran Pokok		Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2025	Isu Strategis		Tujuan/Sasaran		Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2026
1		*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	50,01 – 52,00	**3**	**Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**	**3**	**Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**	**Indeks Williamson (Poin)**	**0,664**
				a	Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir	3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas (%)	63,00
				b	Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat				
				c	Pengembangan dan pembangunan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung				
				d	Penyediaan transportasi massal perkotaan	3.2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas infrastruktur	77,28
				e	Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah				
				f	Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah				
				g	Penyediaan hunian layak huni	3.3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak (%)	55,91
				h	Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,78

RPJPD Tahap V (2023-2025)				RPD Tahun 2024-2026					
Sasaran Pokok		Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2025	Isu Strategis		Tujuan/Sasaran		Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2026
1		*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*
				i	Penerapan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim	3.5	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Poin)	7,98
				j	Penerapan *Cicular economy*				
				k	Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana			Indeks Risiko Bencana (Poin)	127
				l	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	3.6	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,79
7	Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Refomasi Birokrasi	A	**4**	**Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah**	**4**	**Terciptanya demokrasi dan bikrokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah**	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat**	**83,79**
								Indeks Reformasi Birokrasi	**A**
				a	Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat**	**83,79**
				b	Penataan dan penguatan organisasi	4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	A
				c	Deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum				
				d	Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional				
				e	Penataan tata laksana proses bisnis, dan SOP serta keterbukaan informasi				

RPJPD Tahap V (2023-2025)			RPD Tahun 2024-2026					
Sasaran Pokok	Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2025	Isu Strategis		Tujuan/Sasaran		Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2026
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*
			f	Penataan sistem manajemen SDM aparatur				
			g	Penguatan akuntabilitas				
			h	Penguatan pengawasan				
			i	Peningkatan kualitas pelayanan publik				
			j	Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	70,65 (Sangat Inovatif)

Sumber: hasil analisis, 2023

Tujuan pertama RPD adalah **Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing** diarahkan untuk menjawab isu strategis kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) Pendidikan Inklusif; 2) Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan; 3) Percepatan Penurunan *Stunting*; 4) Kerukunan Umat Beragama; 5) Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial; 6) Pembangunan Budaya dan Karakter SDM; 7) Kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga; 8) Pembangunan pemuda dan Olahraga; dan 9) Pengendalian dan distribusi penduduk.

Tujuan tersebut memiliki 5 (lima) sasaran, meliputi: 1) Meningkatnya akses pendidikan masyarakat; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya taraf hidup masyarakat; 4) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda dan 5) Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan kedua RPD adalah **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan** merupakan respon atas isu strategis daerah pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) Peningkatan dan Pemerataan Nilai Investasi; 2) Hilirisasi Industri; 3) Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; 4) Pengembangan UMKM dan IKM yang berdaya saing; 5) Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berkelas Dunia; 6) Kualitas dan Aksesibilitas Lapangan Usaha dan Ketenagakerjaan; 7) Penyediaan Energi Baru terbarukan; 8) Penerapan pertanian dan perikanan yang presisi; dan 9) Pemantapan Ketahanan Pangan berkelanjutan.

Tujuan kedua dilaksanakan dengan 4 (empat) sasaran, yaitu: 1) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan; 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Ketahanan Pangan; 3) Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; dan 4) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja. Tujuan kedua RPD ini ditunjukkan dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Gini Ratio.

Tujuan ketiga RPD adalah **Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan** memiliki keterhubungan dengan isu strategis daerah pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas

dan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah; 2) Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan; 3) Pengembangan Transportasi Massal Perkotaan yang berkeselamatan; 4) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemenuhan Infrastruktur Dasar Lainnya; 5) Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 6) Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; 7) Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana; dan 8) Konservasi hutan, lahan kritis, wilayah laut dan pesisir.

Tujuan ketiga memiliki 6 (enam) sasaran strategis, yaitu 1) Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur; 2) Meningkatnya Kualitas infrastruktur; 3) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman; 4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; 5) Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana, dan 6) Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Tujuan ketiga RPD ini ditunjukan dengan indikator Indeks Williamson.

Tujuan RPD yang terakhir adalah **Terciptanya Demokrasi dan Birokrasi yang Berkualitas dan didukung oleh Inovasi Daerah,** yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis peningkatan demokrasi dan reformasi birokrasi. Tujuan ini memiliki fokus pada 1) Pengembangan Kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi; 2) Perwujudan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Melayani dan Inovatif; 3) Peningkatan Stabilitas dan Kondusivitas Politik, Hukum dan HAM, serta Keamanan; dan 4) Penataan Daerah Otonom.

Tujuan ini diturunkan kedalam 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu: 1) Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi; 2) Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dan 3) Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan. Tujuan RPD keempat ini ditujukan dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun penjabaran masing-masing tujuan ke dalam sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2026, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

ISU STRATEGIS		NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	Realisasi			Rata2 pertumbuhan	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021		Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	**Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**	**1**	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**72,03**	**72,09**	**72,45**	**0,29%**	**73,12**	**73,68**	**74,14**	**74,39**	**74,71**	**74,71**
a	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,37	8,55	8,61	1,43%	8,78	8,91	9,03	9,16	9,29	9,29
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,5	12,61	0,52%	12,62	12,69	12,75	12,82	12,88	12,88
b	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.	1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,85	73,04	73,23	0,26%	73,52	73,71	73,90	74,10	74,29	74,29
c	Penurunan stunting dan penanganan AIDS, Tubercolosis, dan Malaria.			Prevalensi *Stunting*	Persen	26,21	26,21	24,5	-3,26%	20,2	19,20	15,52	12,93	10,34	10,34
d	Peningkatan standar hidup layak masyarakat	1.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11.152	10.845	10.934	-0,97%	11.277	11.390	11.504	11.619	11.735	11.735
e	Percepatan Penanggulangan kemiskinan			Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	6,82	7,88	8,43	11,26%	7,98	7,41	7,34	7,13	7,00	7,00
e	Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.	1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	70,34	69,48	69,6	-0,52%	71,22	70,3	71,37	71,75	72,13	72,13
				Indeks Perlindungan Anak	Angka	67,33	68,32	63,5	-2,79%	63,5*	48,23	64,50	65,50	66,50	66,50
				Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	50	48,83	47	-3,04%	48,00	48,62	49,26	49,90	50,55	50,55
f	Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk	1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,48	1,11	1,41	1,01%	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

ISU STRATEGIS		NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	Realisasi			Rata2 pertumbuhan	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021		Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
2	**Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan**	**2**	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,07**	**-2,52**	**3,74**	**-199,06%**	**5,45**	**5,51**	**5,67**	**5,81**	**5,97**	**5,97**
				Gini Ratio	**Poin**	**0,398**	**0,398**	**0,406**	**1,01%**	**0,412**	**0,405**	**0,394**	**0,383**	**0,370**	**0,370**
a	Penerapan *link and match* industri kecil-industri besar	2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	3,95	-4,36	4,22	-202,23%	7,00	6,00	5,76	5,84	5,93	5,93
b	Penerapan UMKM dan industri hijau			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	7,51	-7,95	3,19	-172,99%	4,22	4,45	4,53	4,85	5,23	5,23
c	Percepatan digitalisasi ekonomi														
d	Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan	2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89	84,8	84,1	-2,77%	92,3	92,8	93,3	93,8	94,3	94,3
e	Penerapan pertanian ekologis			Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	101,33	101,41	97,84	-1,72%	99,74	100,71	101,67	102,64	103,61	103,61
f	Pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM			Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,80	2,30	1,31	-30,45%	4,41	4,45	4,50	4,54	4,59	4,59
g	Pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian dan perikanan	2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum	Laju Pertumbuhan Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	Persen	7,25	-0,56	-0,04	4,48%	11,27	11,77	12,30	12,85	13,43	13,43
h	Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha	2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	535,72	493,96	501,52	-3,13%	511,55	521,78	532,22	542,86	553,72	553,72
				Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21,1	19,41	21,67	1,82%	21,62	22,00	23,34	23,92	24,52	24,52
i	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,04	10,46	9,82	11,99%	8,31	8,13	8,01	7,88	7,76	7,76

ISU STRATEGIS		NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	Realisasi			Rata2 pertumbuhan	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021		Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
3	**Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**	**3**	**Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**	**Indeks Williamson**	**Poin**	**0,665**	**0,692**	**0,667**	**0,22%**	**0,670**	**0,669**	**0,667**	**0,666**	**0,664**	**0,664**
a	Pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir	3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Tingkat Konektivitas	Persen	46,13	39,06	43,51	-1,97%	N/A	N/A	57,00	60,00	63,00	63,00
b	Konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat														
c	Pengembangan dan pembangunan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekkarpur, dan Kawasan Cekungan Bandung														
d	Penyediaan transportasi massal perkotaan	3.2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	N/A	N/A	59,58		N/A	N/A	75,91	76,57	77,28	77,28
e	Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah														
f	Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah														
g	Penyediaan hunian layak huni	3.3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	N/A	52,28	53,14		53,37	53,90	54,47	55,24	55,91	55,91

ISU STRATEGIS		NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	Realisasi			Rata2 pertumbuhan	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021		Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
h	Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	52,12	61,59	62,69	9,98%	64,66	61,60	66,13	67,00	67,78	67,78
i	Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	3.5	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3,85	3,87	4,23	4,91%	5,86	5,22	7,11	7,72	7,98	7,98
j	Penerapan *circular economy*														
k	Mitigasi, adaptasi, dan penanggulangan bencana			Indeks Risiko Bencana	Poin	152,13	145,82	134,94	-5,80%	131,62	130	129	128	127	127
l	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	3.6	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,67	0,69	0,72	3,68%	0,75	0,72	0,77	0,78	0,79	0,79
4	**Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah**	**4**	**Terciptanya demokrasi dan bikrokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah**	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat**	**Poin**	**69,09**	**71,32**	**79,72**	**7,50%**	**80,52**	**81,32**	**82,14**	**82,96**	**83,79**	**83,79**
				Indeks Reformasi Birokrasi	**Poin**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
a	Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	69,09	71,32	79,72	7,50%	80,52	81,32	82,14	82,96	83,79	83,79
b	Penataan dan penguatan organisasi	4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A
c	Deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum														
d	Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional														

ISU STRATEGIS		NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	Realisasi			Rata2 pertumbuhan	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021		Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
e	Penataan tata laksana proses bisnis, dan SOP serta keterbukaan informasi														
f	Penataan sistem manajemen SDM aparatur														
g	Penguatan akuntabilitas														
h	Penguatan pengawasan														
i	Peningkatan kualitas pelayanan publik														
j	Penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Poin	59350	6.879	62,82		69,15 (Sangat Inovatif)	69,35 (Sangat Inovatif)	69,65 (Sangat Inovatif)	70,15 (Sangat Inovatif)	70,65 (Sangat Inovatif)	70,65 (Sangat Inovatif)

Sumber: hasil proyeksi, 2023

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran RPD yang telah diijelaskan pada bab sebelumnya akan dicapai melalui serangkaian strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran RPD. Strategi dijabarkan dalam arah kebijakan yang menjadi rujukan untuk penentuan program prioritas dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dalam konteks RPD Tahun 2024-2026, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, isu strategis dan arah kebijakan RPJPD pada tahap V (2023-2025).

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJPD Tahun 2005–2025 khususnya pada tahap V yaitu: **Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat di Segala Bidang**, yang dicirikan dengan kondisi sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan;
2) Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi;
3) Unggul dalam pengelolaan pertanian dan kelautan;
4) Terdepan dalam upaya energi baru dan terbarukan;
5) Unggul dalam industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif;
6) Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan; dan
7) Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing**					
1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Transformasi Sistem Pendidikan	1	Peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial, Dispusip, Dinas BMPR, Dishub,
			2	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah	Dinas Pendidikan	
			3	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar	Dinas Pendidikan	Disperkim
			4	Peningkatan minat baca dan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1	Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
			2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja	Dinas Kesehatan	DP3AKB
			3	Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif	Dinas Kesehatan	Disperkim
			4	Percepatan Penurunan *Stunting*	Dinas Kesehatan	DP3AKB, Disdik, Disperkim, DKPP, Dinsos, DKP, DPMD
			5	Pemenuhan tenaga kesehatan/SDMK	Dinas Kesehatan	
			6	Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif	Dinas Kesehatan	
			7	Penguatan Pembiayaan Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			8	Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Dinas Kesehatan	
1.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat	1	Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	Disnakertrans	Dinas KUK, Disperindag
			2	Peningkatan akses terhadap rumah layak huni	Disperkim	
			3	Pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD	
			4	Pemberdayaan Perempuan	DP3AKB	

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
		Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran	1	Perlindungan terhadap keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan	Dinsos	DP3AKB, Dinas Kesehatan dan Disnakertrans
			2	Pemberdayaan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru	Dinsos, DKPP	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas KUK, Disnakertrans, DP3AKB, dan DPMD
			3	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos	Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat), dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			4	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim	
1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	Pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi aktif pemuda	1	Peningkatan perlindungan perempuan	DP3AKB	
			2	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	DP3AKB	
			3	Pemenuhan hak dan perlindungan anak	DP3AKB	
			4	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup	DP3AKB	
			5	Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan daya saing pemuda	Dispora	DKUK, Disperindag
			6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Dispora	
1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Sinergi kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk	1	Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk	DP3AKB	Disdukcapil
2	**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**					
2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Peningkatan daya saing produk industri dan perdagangan	1	Penerapan *link and match* industri kecil-industri besar	Disperindag	Dinas KUK, Disdik
			2	Pengembangan IKM dan industri hijau	Disperindag	Dinas KUK dan Dinas LH
			3	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu	Disperindag	DBMPR, DESDM, DSDA

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			4	Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital	Disperindag	Diskominfo
			5	Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor	Disperindag	
			6	Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	Disperindag	
			7	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Disperindag	
2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan	DKP, DTPH	DKPP, dan Disbun
			2	Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian	DTPH	DKPP dan Disbun
			3	Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani	DTPH	DKPP, dan Disbun
			4	Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan	DKP	Dinas KUK
			5	Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	DKP	
			6	Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas	DTPH	DKPP, dan Disbun
			7	Peningkatan perhutanan sosial	Dishut	Disbun, DKUK
		Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan	1	Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan	DKPP	DKP, Disbun, DKPP, dan Dinas SDA
			2	Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal	DKPP	DKP, DTPH, Disbun
			3	Pengembangan *Smart Fishing* dan *Sustainable Aquaculture*	DKP	
2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum	Peningkatan daya saing dan kontribusi pariwisata	1	Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing	Disparbud	Dinas KUK, DBMPR, Dinas PMPTSP
			2	Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis	Disparbud	Dinas KUK dan Dinas PMPTSP

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			3	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Disparbud	Dinas KUK
			4	Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata	Disparbud	
2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal	1	Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi	DPMPTSP	
			2	Promosi dan peningkatan layanan investasi	DPMPTSP	Diskominfo, DKUK, Disperindag
			3	Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas	Dinas KUK	Diperindag
			4	Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global	Dinas KUK	Diskominfo, Disperindag
		Transformasi perluasan kesempatan kerja	1	Peningkatan keterampilan angkatan kerja	Disnakertrans	DKUK
			2	Pengembangan pelatihan dan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja	Disnakertrans	Disdik
			3	Pendampingan dan penguatan kewirausahaan	DKUK	Disnakertrasn dan Disperindag
			4	Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil	Dinas KUK	
3	**Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan**					
3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	Percepatan pembangunan infrastruktur berdasarkan arahan tata ruang	1	Pembangunan pusat kegiatan baru untuk membuka akses, distribusi penduduk, dan/atau peningkatan ekonomi	Disperkim	DBMPR, DESDM, Dishub, Dinas SDA
			2	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat	DBMPR	Dishub
			3	Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan, serta Kawasan Cekungan Bandung	DBMPR dan DSDA	DISPERKIM, DLH, DISHUT, DISHUB, DISPERINDAG.
			4	Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	DBPMPR	DISHUB, DPMD
			5	Pengendalian dan Pemanfaatan ruang yang efektif	DBMPR	

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			6	Pengembangan Sistem Transportasi yang berkeselamatan dan Transportasi Massal yang ramah lingkungan	Dinas Perhubungan	DBMPR
3.2	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Pemerataan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur	1	Pemenuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, dan industri	Dinas SDA	Disperkim, DESDM
			2	Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah	Dinas ESDM	
			3	Pemantapan jalan provinsi	DBMPR	
3.3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau	1	Peningkatan akses infrastuktur dasar permukiman	Disperkim	Dinkes, DLH, DSDA
			2	Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah	Disperkim	Dinsos, BPBD
			3	Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman	Disperkim	
			4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Disperkim	
			5	Peningkatan Pelayanan dan Ketersediaan Perumahan	Disperkim	Dinsos
			6	Peningkatan tatakelola pertanahan	Disperkim	Sekretariat Daerah
3.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	1	Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup	Dinas LH	DKUK, Disperindag
			2	Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Dinas LH	Dinas SDA, Disbun, Dishut
			3	Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis	Dinas Kehutanan	DLH dan Disbun
			4	Pengelolaan kelautan dan wilayah pesisir yang berkelanjutan	DKP	Dinas LH
3.5	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana	Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	1	Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian	DTPH, Disbun	
			2	Penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan	Dinas Kehutanan	
			3	Pengembangan potensi konservasi energi baru dan terbarukan	DESDM	DLH, Disperkim
			4	Penerapan *waste to energy dan circular economy* dalam pengelolaan persampahan, serta peningkatan pengendalian *food waste* dan *food loss*	Disperkim, DLH	DESDM, DKUK

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			5	Pencegahan dan penanganan penyakit akibat perubahan iklim secara terpadu dan cepat	Dinkes	BPBD
			6	Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana termasuk bencana hidrometeorologi	BPBD	DSDA, DLH
3.6	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Percepatan pembangunan desa	1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD	DKUK
			2	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan potensi desa	DPMD	Sekretariat Daerah
			3	Peningkatan infrastruktur desa	DPMD	DISPERKIM
4	**Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah**					
4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	Peningkatan kesatuan bangsa dengan budaya politik yang kondusif	1	Peningkatan kapasitas sektor-sektor atau kelompok untuk mandiri dan otonom.	Badan Kesbangpol dan Sekretariat DPRD	Disnakertrans
			2	Peningkatan kapasitas kelompok yang mengalami diskriminasi dan ekslusi untuk dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan	Badan Kesbangpol	Sekretariat DPRD, DP3AKB, Dinas Pendidikan, Disperkim, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinsos, Disnakertrans dan Diskominfo
			3	Peningkatan kinerja lembaga-lembaga demokrasi yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, dan penyelenggara pemilu dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan.	Badan Kesbangpol dan Sekretariat DPRD	Sekretariat Daerah, BPKAD, dan Dinas LH
4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemantapan Reformasi Birokrasi	1	Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance*) dalam mewujudkan *World Class Government*	Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
			2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah	
			3	Pengembangan *Smart Governance* yang unggul dalam rangka mewujudkan *Jabar Smart Province*.	Sekretariat Daerah dan Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			4	Penguatan dan Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
			5	Penerapan sistem merit secara konsisten	BKD	Seluruh Perangkat Daerah
			6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan *corporate university*	BPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			7	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
			8	Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi	Diskominfo, Sekretariat Daerah, DPMPTSP dan Disdukcapil	Seluruh Perangkat Daerah
4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	Peningkatan peran aktif pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi daerah	1	Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah	BP2D	Seluruh Perangkat Daerah

Sumber: hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dikemas kedalam tema pembangunan tahunan yang secara simultan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 adalah ”**Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat**”, yang dijabarkan kedalam tema tahunan mulai tahun 2024 sampai dengan 2026. Secara skematik, keterkaitan tema pembangunan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat 2024-2026 disajikan pada Gambar 6.1 berikut.

Gambar 6.1
Tema Pembangunan untuk Perwujudan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026



Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai 2026 mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya untuk penormalan pembangunan. Setelah melalui tahap pemulihan selama beberapa tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap terpuruknya kondisi sosial ekonomi, maka Provinsi Jawa Barat pada periode Tahun 2024-2026 memasuki tahap penormalan. Tiga tahun kedepan, diharapkan terwujud kondisi yang normal seperti sebelum pandemi. Penormalan ditandai dengan meningkatnya daya saing SDM, pembangunan ekonomi berkualitas, pemerataan pengembangan wilayah yang didukung infrastruktur yang berkualitas. Penjelasan lebih lanjut mengenai tema pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk melanjutkan kemandirian masyarakat Jawa Barat yang telah diupayakan sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun ini, pembangunan Jawa Barat diharapkan dapat memberdayakan potensi SDM Jawa Barat yang berdaya saing untuk menjawab tantangan perkembangan zaman di era industrialisasi dan perkembangan IPTEK dan teknologi informatika yang pesat. SDM yang berdaya saing diarahkan dapat memenuhi kualifikasi tenaga kerja pada lapangan usaha yang ada di Jawa Barat serta mengembangkan kewirausahaan. Penekanan pembangunan juga diarahkan untuk penyediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar yang layak dan memenuhi standar, dengan jangkauan ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Dukungan SDM dan infrastruktur diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha/bisnis. Capaian pembangunan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah di Jawa Barat.
b. Pembangunan tahun 2025 dengan tema pemerataan pembangunan untuk mendukung kemandirian masyarakat Jawa Barat diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal mendapatkan pelayanan dan yang memiliki nilai strategis tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan keunggulan masyarakat Jawa Barat.

Pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur dan jasa; pariwisata dan ekonomi kreatif; dan pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal, serta memberikan dampak ikutan bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya.

Berkembangnya perekonomian daerah yang dibarengi dengan meningkatnya produktivitas daerah terutama diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Kualitas dan jangkauan infrastruktur yang andal terus menjadi perhatian pemerintah pada tahun ini, dan diharapkan mendorong daya saing daerah dan berdampak positif bagi investasi daerah.

c. Pembangunan tahun 2026 difokuskan untuk mencapai target akhir RPD Tahun 2024-2026 yaitu menyiapkan keunggulan masyarakat Jawa Barat. Penekanan pembangunan masih diberikan pada pemantapan perekonomian berbasis sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan pemberdayaan SDM serta infrastruktur yang berdaya saing. Pembangunan pada akhir periode RPD diarahkan pada perwujudan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan untuk pertumbuhan namun juga pemerataan serta perluasan akses dan kesempatan.

6.2 Arah Kebijakan Kewilayahan

Pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah keniscayaan. Pembangunan daerah tidak hanya menggunakan pendekatan sektoral namun perlu disertai dengan pendekatan spasial sehingga dapat saling melengkapi untuk menghasilkan informasi yang terintegrasi. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 selain menggunakan arah kebijakan pembangunan sektoral dan lintas sektor (*crosscutting)*, juga dilengkapi dengan pendekatan kewilayahan. Arah kebijakan kewilayahan dalam dokumen RPD ini didasarkan pada RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022.

Arah kebijakan kewilayahan di Provinsi Jawa Barat dirumuskan berdasarkan pendekatan *top*-down maupun pendekatan *bottom-up.* Pendekatan *top*-down dilakukan dengan mengadaptasi kebijakan pembangunan kewilayahan untuk beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) dilingkup Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam 3 (tiga) peraturan presiden, sebagai berikut:

1) **Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung**; Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti terdiri dari: Kota Bandung dan Kota Cimahi.

   Adapun Kawasan Perkotaan disekitarnya terdiri dari:

   a) Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin di Kabupaten Bandung Barat;
   b) Kawasan Perkotaan Soreang-Kutawaringin-Katapang, Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih, Kawasan Perkotaan Majalaya-Ciparay, Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Kawasan Perkotaan Banjaran, Kawasan Perkotaan Cicalengka, dan Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek di Kabupaten Bandung; dan
   c) Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang.

2) **Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur**; Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terdiri atas:

a) Kawasan Perkotaan Bogor di Kota Bogor;
b) Kawasan Perkotaan Cibinong dan Kawasan Perkotaan Cileungsi di Kabupaten Bogor;
c) Kawasan Perkotaan Depok dan Kawasan Perkotaan Cinere di Kota Depok;
d) Kawasan Perkotaan Tangerang di Kota Tangerang;
e) Kawasan Perkotaan Balaraja dan Kawasan
f) Perkotaan Tigaraksa di Kabupaten Tangerang;
g) Kawasan Perkotaan Ciputat di Kota Tangeran Selatan;
h) Kawasan Perkotaan Bekasi di Kota Bekasi; dan
i) Kawasan Perkotaan Cikarang di Kabupaten Bekasi.

3) **Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**; Percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Adapun percepatan pembangunan di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan meliputi: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

   Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, yang menjadi bagian dari peraturan presiden tersebut.

Selanjutnya, pendekatan *bottom*-up dilakukan dengan mengadaptasi arahan pembangunan kewilayahan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan isu strategis daerah (kabupaten/kota). Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 mengamanatkan pembangunan wilayah berdasarkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:

1. WP Bodebekpunjur, sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan

di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur;

2. WP Purwasuka, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Purwasuka, meliputi Daerah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang;
3. WP Ciayumajakuning, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Ciayumajakuning yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian Wilayah di Kabupaten Sumedang;
4. WP Priangan Timur-Pangandaran, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Priangan TimurPangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Pacangsanak yaitu PangandaranKalipucang-Segara Anakan yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran;
5. WP Sukabumi dan sekitarnya, sebagai penjabaran dari kawasan andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan Wilayah perbatasan, meliputi Daerah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur; dan
6. WP Cekungan Bandung, meliputi Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.

Uraian lebih rinci mengenai keenam WP di Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Wilayah Pengembangan

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
WP Bodebekpunjur	Mengendalikan perkembangan fisik wilayah	Melengkapi fasilitas pendukung PKL Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata Investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, nonpolutif Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani)	1. Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi diarahkan sebagai kota terdepan ibukota Negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja; 2. Kabupaten Bogor dan Bekasi diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan di Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; dan 3. Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor - Cianjur diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur.	Agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata
WP Purwasuka	Mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia,	1. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland); 2. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam; 3. Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
		bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor	kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam; dan 4. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis kelautan, kegiatan agroindustri, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, serta kegiatan agroindustri.	
WP Ciayumajakuning	Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat	Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL Mengembangkan infrastruktur strategis Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku) Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggiran Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir	1. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi; 2. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, industri kreatif, bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; 3. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan KP2B, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri; 4. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, industri bahan bangunan, dan pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten; 5. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan 6. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan	Tanaman pangan dan hortikultura, Agroforestri, agribisnis, agroindustri, industri kreatif, perikanan, pertambangan, pariwisata

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
		Mengembangkan infrastruktur strategis Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsk Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi	prasarana, untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, industri, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta dan kegiatan pertambangan mineral.	
WP Priatim - Pangandaran	Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan Daerah bagian Selatan.	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL	1. Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa; 2. Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam; 3. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura dan agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKL Rancabuaya; 4. Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral non-logam; 5. Kota Banjar, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; 6. Kabupaten Pangandaran, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, serta sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.	Kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral
WP Sukabumi dsk	Mendorong perkembangan koridor Sukabumi Cianjur dan PKW Palabuhanratu,	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL Mengembangkan	1. Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat agroindustri, peternakan, agropolitan, wisata agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi;	Kehutanan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
	serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur	infrastruktur strategis Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus. Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global	2. Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut, serta pertambangan mineral logam dan non-logam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKW Palabuhanratu; dan 3. Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan agroindustri, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Cidaun, serta pertambangan mineral logam dan non-logam.	pengolahan dan bisnis kelautan, budidaya perikanan laut (lobster), serta pertambangan mineral
WP KK Cekungan Bandung	Mengendalikan pembangunan dengan mengop-timalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah	Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal	1. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata; 2. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan; 3. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi; 4. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan 5. Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimangung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan) diarahkan sebagai bagian dari PKN, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat	Pertanian horti-kultura, perikanan, agroforestri, industri non-polutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas Kab./ Kota yang se-cara kolektif berbagi peran membangun dan

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
			pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, serta industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya

Sumber: Perda Jawa Barat No 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

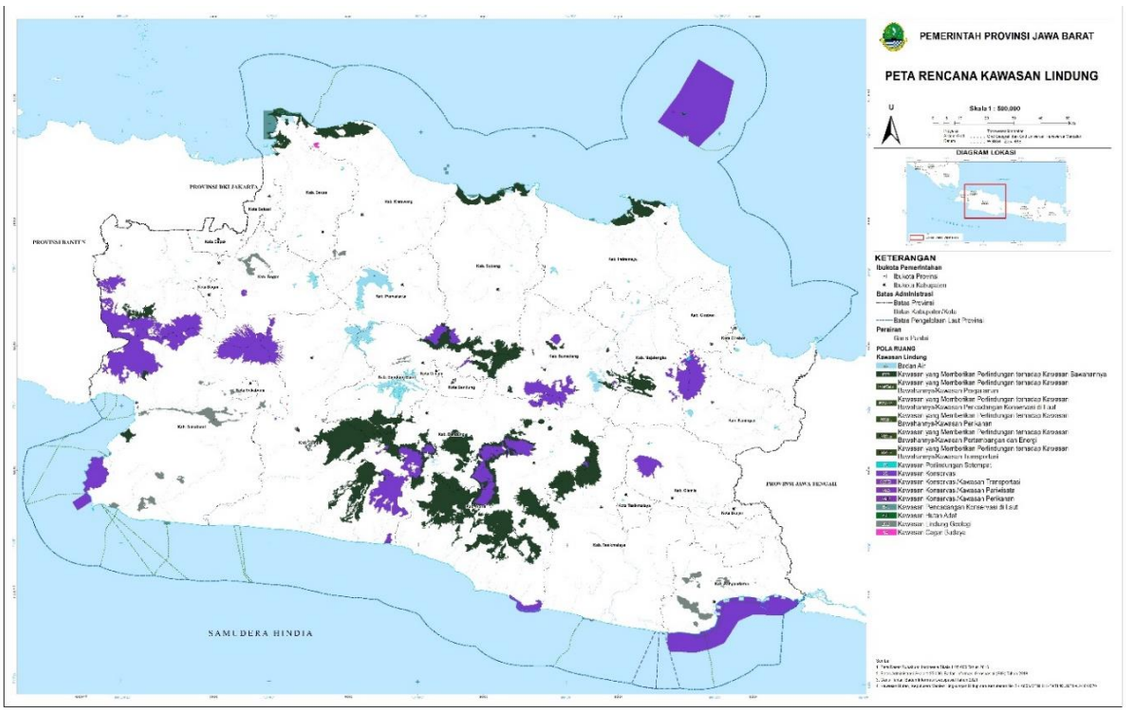
Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, penetapan Rencana Pola Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dimana berdasarkan kebijakan dan strategi terkait pola ruang dalam peraturan daerah tersebut adanya target tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari wilayah daerah provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042, sedangkan untuk kawasan budidaya relatif tidak mengalami perubahan secara kontekstual, karena pada dasarnya perubahan di dalam kawasan budidaya selama sesuai dengan karakteristik, daya dukung, dan daya tampung wilayahnya tetap dikembangkan.

a. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung provinsi adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana pola ruang kawasan peruntukan lindung provinsi meliputi upaya:

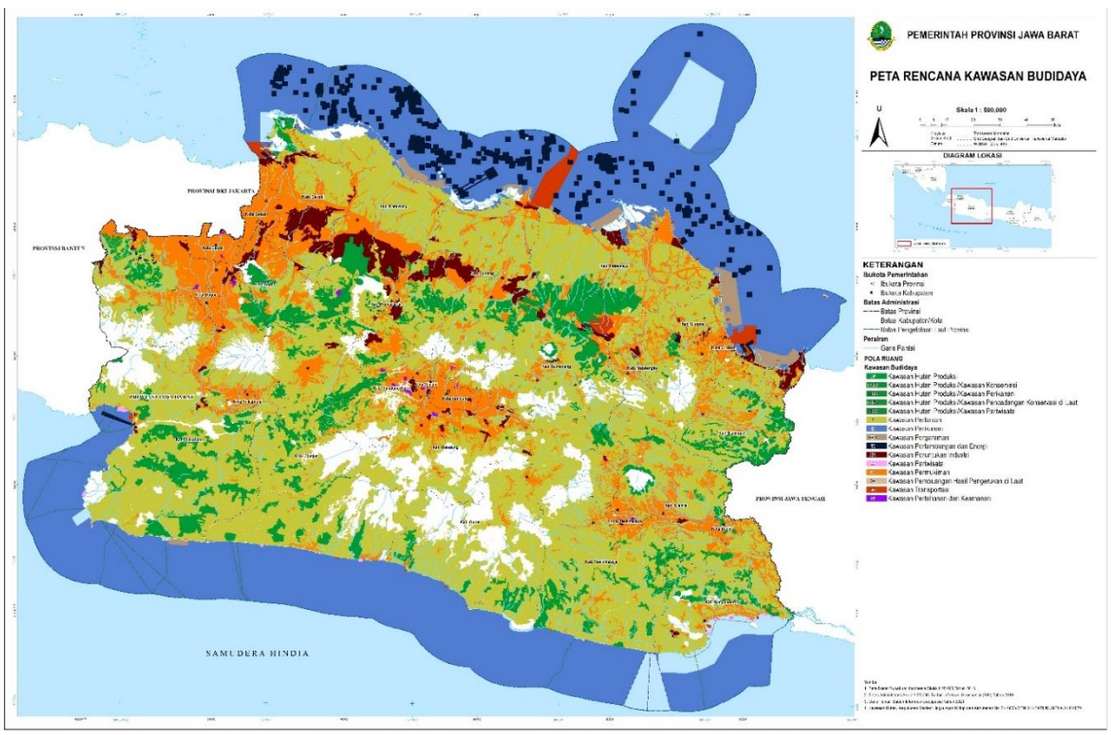
1) Menetapkan kawasan lindung provinsi meliputi kawasan lindung dalam kawasan hutan (terdiri atas hutan konservasi dan hutan lindung) serta kawasan lindung di luar kawasan hutan (terdiri atas kawasan yang menunjang fungsi lindung di wilayah darat);
2) Mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);
3) Mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
4) Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Gambar 6.2
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung
Provinsi Jawa Barat



Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. 2022

Gambar 6.3
Peta Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya Provinsi Jawa Barat



Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, 2022

b. Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Hasil evaluasi KSP di Provinsi Jawa Barat ditetapkan 5 (lima) KSP dari 24 KSP sebelumnya, maka rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat dalam revisi RTRWP Jawa Barat Tahun 2022-2042 terdiri dari beberapa sudut kepentingan. Tabel dan gambar berikut di bawah ini menyajikan Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Tabel 6.3
Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Kriteria
1	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	KSP Bandung Utara	▪ Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian ▪ Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro ▪ Memiliki pusat kegiatan pada Kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam
2	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Sukabumi Bagian Selatan dsk	▪ Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi ▪ Memiliki potensi ekspor ▪ Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah ▪ Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
3	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Aerocity-Kertajati	▪ Keberadaan BIJB sebagai bandar udara internasional; ▪ Potensi peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui kegiatan distribusi logistik; ▪ Potensi pengembangan kawasan tematik pendukung dan penghubung Aerocity; ▪ Keberadaan BUMD Provinsi Jawa Barat yang dapat diarahkan sebagai pengelola kawasan; ▪ Penetapan kawasan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam rencana struktur ruang (Bersama Kadipaten).
4	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Patimban	▪ Keberadaan Pelabuhan Utama Patimban yang merupakan Pelabuhan internasional; ▪ Potensi peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kegiatan ekspor-impor dan distribusi logistik;

No	Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi	Kriteria
			▪ Potensi pengembangan kawasan untuk mendukung kawasan industri di sekitarnya; ▪ Penetapan kawasan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam rencana struktur ruang;
5	Pertumbuhan Ekonomi	KSP Mundu - Losari	▪ Pengembangan kawasan yang dapat mendukung percepatan peningkatan daya saing ekonomi kawasan; ▪ Peningkatan konektivitas antarkawasan, terutama menuju simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; ▪ Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dalam rangka peningkatan pelayanan publik; ▪ Melindungi kawasan pesisir dan pantai serta kawasan lainnya yang berfungsi lindung; ▪ Menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; ▪ Peningkatan kerjasama antarwilayah (Provinsi Jabar dengan jateng)

Sumber: Perda RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Gambar 6.4
Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat



Sumber: Perda RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sinkronisasi program pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD (dalam hal ini RPD) dengan program pemanfaatan ruang dalam RTRW dilakukan melalui instrumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Dalam hal ini, SPPR perlu disusun

dengan mengacu pada program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil SPPR yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan program dalam RTRW Tahun 2022-2042 maka diperoleh klasifikasi program prioritas untuk program yang dilaksanakan tahun 2024 (tahunan), serta klasifikasi program dengan tingkat sinkronisasi tinggi sampai rendah untuk program jangka menengah.

Dalam kaitannya dengan dokumen RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini, program hasil SPPR dengan kategori **prioritas tinggi pada tahun 2024** dan **sinkronisasi tinggi pada tahun 2025 dan 2026** dipilih dan disandingkan dengan beberapa program perangkat daerah yang direncanakan dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Tabel persandingan yang menunjukkan sinkronisasi program RTRW dengan program RPD sebagaimana terdapat pada Tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6.4
Sinkronisasi Program Prioritas RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 Dengan Indikasi Program Perwujudan Struktur RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
			Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**		
			Sasaran 1.1: Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	**Rata-Rata Lama Sekolah**	**Tahun**		
				Harapan Lama Sekolah	**Tahun**		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			• Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi	Seluruh Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
				Persentase penurunan angka putus sekolah	Persen	• Pembangunan Ruang Kelas untuk jenjang PAUD, dasar, menengah, tinggi, dan vokasi	
				Nilai Rata-Rata Kompetensi Literasi	Nilai		
				Nilai Rata-Rata Kompetensi Numerasi	Nilai		
1	1	4	PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Refleksi Guru	Indeks		
			Sasaran 1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**		
				Prevalensi Stunting	**Persen**		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Persen	Perwujudan PKN: Pengembangan Rumah Sakit Tipe A	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan	Persen	Perwujudan PKW: Pembangunan Rumah Sakit Tipe B	Seluruh PKW
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Seksi Farmasi Kosalkes Mamin	Persen	Perwujudan PKL: · Pembangunan Rumah Sakit Tipe C · Pembanguna Puskesmas Poned	Seluruh PKL
			Sasaran 1.3: Meningkatnya taraf hidup masyarakat	**Pengeluaran per kapita**	**Rp.000**		
				Persentase Penduduk Miskin	**Persen**		
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	· Perwujudan Kawasan Permukiman: Penataan Kawasan/Permukiman Kumuh	Kab/Kota di Jawa Barat

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						· Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi, Tanah Negara yang dimohonkan dan pengadaan tanah	
						· Pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	
						· Peningkatan kualitas permukiman di kawasan perbatasan berupa kegiatan rancang bangun permukiman	
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	· Pengembangan hunian vertikal	Kab/Kota di Jawa Barat
						· Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	
						· Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi	
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa	Persen	· Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya	Kab/Kota di Jawa Barat
						· Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung	
						· Pelibatan masyarakat dalam pengendalian kawasan perlindungan setempat Kawasan sekitar mata air	
						· Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat	
						· Sosialisasi lokasi kawasan perikanan tangkap dan tata cara penangkapan perikanan kepada nelayan/ masyarakat	
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	Penanganan darurat daerah terdampak dan terancam bencana	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat
						Penanangan korban bencana, evakuasi dan pertolongan pengungsi	Seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat
			Sasaran 1.4: MeningkatnyaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pembangunan pemuda	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**Nilai**		
				Indeks Perlindungan Anak	**Angka**		
				Indeks Pembangunan Pemuda	**Poin**		
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Perwujudan PKN: Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya
				Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik	Persen	Perwujudan PKL: Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya (Lapangan Olahraga/Ruang Publik)	Seluruh PKL
				Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen		

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
				Persentase Medali Emas yang Diperoleh dalam Event Nasional			
				a. PON	Persen		
				b. PEPARNAS	Persen		
				c. POPNAS	Persen		
				d. PRAPOPNAS	Persen		
				e. PEPARPENAS	Persen		
			Sasaran 1.5: Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**Persen**		
			Tujuan 2: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**		
				Gini Ratio	**Poin**		
			Sasaran 2.1: Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	**Laju Pertumbuhan Sektor Industri**	**Persen**		
				Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	**Persen**		
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkat Kualitasnya	Persen	Pembangunan Pusat Distribusi Regional	Cirebon Raya
						Pembangunan pusat distribusi provinsi	PKW Kadipaten-Kertajati, PKW Cikampek – Cikopo, PKW Indramayu, PKW Sukabumi, dan PKW Tasikmalaya
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan barang pokok	Persen	Penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa skala regional	Seluruh PKW
						Pengembangan kawasan perdagangan	Kab/Kota di Jawa Barat
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna SKA	Milyar USD	Peningkatan Nilai tambah produk perkebunan	Kab/Kota di Jawa Barat
						Pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan di pelabuhan perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	WPPI 1, WPPI 2
						Pembangunan Pelabuhan Khusus Industri	Kab. Bekasi
						Pusat Industri Kelautan dan Perikanan: Sentra Industri Maritim	Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon
						Pusat Industri Kelautan dan Perikanan: Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						Pembangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri	Kab/Kota di Jawa Barat
						Pembangunan dan Pengembangan TPA pendukung industri	Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka,
						Pembangunan Rumah Susun Pekerja Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang	Manyingsal, Kec. Cipunagara, Kab. Subang
				Nilai produksi Industri Pengolahan	Triliun Rupiah	Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan untuk Kebutuhan Industri	20 Kab/Kota di Jawa Barat
				Pertambahan jumlah industri kecil menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam	Pelaku Usaha		
				Pertambahan jumlah industri kecil menengah baru yang dilayani Pada UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Pelaku Usaha		
			Sasaran 2.2: Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	**Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**Persen**		
				Nilai Tukar Petani (NTP)	**Poin**		
				Skor Pola Pangan Harapan	**Poin**		
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	Pengembangan Kawasan Perikanan: · Perikanan Tangkap Laut · Perikanan Tangkap Perairan Umum · Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap · Perikanan Budidaya Laut · Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya Laut	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	Pembangunan Galangan Kapal Perikanan	Kabupaten/Kota di Pesisir Jawa Barat
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	Persen	Zona Pelabuhan Perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Perwujudan Kawasan Pertanian (P): · Pengembangan kawasan tanaman pangan · Pengembangan kawasan hortikultura · Pengembangan Potensi Lahan Kering	Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						· Pengembangan kawasan perkebunan	
						· Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan	
						Pengembangan Agro *Techno Park* dan *Science Technopark*	Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon
						Pengembangan ruas jalan pendukung pariwisata dan sentra pertanian	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha		
				Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha		
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	%		
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan tingkat kelahiran ternak	Persen	Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Perwujudan Kawasan Lindung:	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Kawasan Taman Hutan Raya	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Depok, Kab. Sumedang
							Kabupaten Ciamis
						Kawasan Hutan Adat	
						Optimalisasi pengelolaan hutan rakyat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan ekosistem mangrove	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan	Persen	Rehabilitasi kawasan hutan, kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang	KSP Bandung Utara
				Persentase Penanganan Lahan Kritis	Persen	Rehabilitasi lahan kritis di kawasan perlindungan setempat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Reboisasi, Rehabilitasi lahan kritis, mangrove, dan tanaman pantai	Kawasan Hulu DAS, Kawasan Resapan Air, Kawasan gerakan tanah tinggi dan menengah, pesisir
						Rehabilitasi kawasan hutan, kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di	KSP Bandung Utara

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang	
				Persentase Gangguan dan Kerusakan Hutan	Persen		
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persen	Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan untuk Kebutuhan Industri	1. Kabupaten Bogor; 2. Kabupaten Sukabumi; 3. Kabupaten Cianjur; 4. Kabupaten Bandung Barat; 5. Kabupaten Bekasi; 6. Kabupaten Purwakarta; 7. Kabupaten Karawang; 8. Kabupaten Subang; 9. Kabupaten Indramayu; 10. Kabupaten Majalengka; 11. Kabupaten Cirebon; 12. Kabupaten Kuningan; 13. Kabupaten Bandung; 14. Kabupaten Garut; 15. Kabupaten Ciamis; 16. Kabupaten Pangandaran; 17. Kabupaten Sumedang; 18. Kabupaten Tasikmalaya; 19. Kota Tasikmalaya; dan 20. Kota Banjar.
				Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan	Persen	Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan lingkungan kawasan lindung	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Persentase Serapan Karbon	Persen		
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan	Persen	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	Pengembangan kawasan hortikultura	Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	%		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	Pengembangan kawasan hortikultura	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Indeks Pertanaman (IP)	%		
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	Persen	Pengembangan kawasan perkebunan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana pengolahan Perkebunan	Persen		
				Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi promosi produk Perkebunan	Persen		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	Persen		
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan tingkat kelahiran ternak	Persen	Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan: Sentra kegiatan perikanan budidaya	Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan	Persen	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
			Sasaran 2.3: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	**Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	**Persen**		
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	Pembangunan Pusat Kebudayaan	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	Pelindungan dan pengembangan fungsi Kawasan cagar budaya Pengembangan dan pengelolaan pemanfaatan kawasan cagar budaya	17 Kawasan Cagar Budaya

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						Pengembangan dan pengelolaan pemanfaatan kawasan cagar budaya	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lainnya, tersebar di kabupaten/ kota.
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	Perwujudan Kawasan Pariwisata (W)	Seluruh DPP Jawa Barat
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Seni Budaya dan Destinasi Pariwisata Yang Dipromosikan	Persen	Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional	KW Pangandaran, PKW Palabuhanratu
			Sasaran 2.4: Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB**	**Triliun Rupiah**		
				Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	**Persen**		
				Tingkat Pengangguran Terbuka	**Persen**		
			Tujuan 3: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung infrastruktur berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan	**Indeks Williamsons**	**Poin**		
			Sasaran 3.1: Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	**Tingkat Konektivitas**	**Persen**		
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Persentase pengguna Angkutan umum transportasi darat	Persen	Pengembangan sistem angkutan umum massal	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya
				Persentase kendaraan umum yang diawasi	Persen		
				Persentase perusahaan angkutan umum yang mempunyai sertifikat SMK	Persen		
				Persentase fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang terpasang	Persen		
				Persentase Terminal yang sesuai standar	Persen	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Cirebon Raya
						Pembangunan/Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B	Seluruh PKW
						Penyediaan Terminal	Seluruh PKL
						Penumpang Tipe C dan sarana angkutan umum	
						Peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Subang,

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.
						Peningkatan/rehabilitasi serta pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi (rencana), Kabupaten Bandung (rencana), Kabupaten Bandung Barat (rencana), Kabupaten Bogor (rencana), Kabupaten Ciamis (rencana), Kabupaten Garut (rencana), Kabupaten Sumedang (rencana), serta pembangunan terminal lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian.
				Presentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah I	Persen		
				Presentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah II	Persen		
				Presentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah III	Persen		
				Presentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah IV	Persen		
				Persentase pemanfaatkan ICT untuk peningkatan layanan LLAJ	Persen		
				Persentase Data dan Informasi LLAJ yang tersedia	Persen		
2	15	3	PROGRAM PELAYARAN			Pengembangan Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau	Cikarang – Bekasi – Laut Jawa
						Rencana alur pelayaran sungai di Cikarang – Bekasi – Laut Jawa sebagai bagian terintegrasi dengan sistem pelabuhan tanjung priok	Cikarang – Bekasi – Laut Jawa
						Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Citarum Hilir di Kab. Bekasi,
							2. Kabupaten Karawang, Kabupaten
							Subang,
							3. Kabupaten Purwakarta,

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							4. Kabupaten Indramayu,
							5. Kabupaten Cirebon,
							6. Kabupaten Kuningan,
							7. Kabupaten Sumedang,
							8. Kabupaten Garut,
							9. Kabupaten Ciamis,
							10. Kabupaten Pangandaran,
							11. Kota Banjar,
							12. Kabupaten Sukabumi,
							13. Kabupaten Cianjur
							14. Kabupaten Bandung Barat
						Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten Indramayu (Tirtamaya – Pulau Biawak)
						Pengembangan pelabuhan di Waduk	1. Waduk Cirata
							2. Waduk Jatiluhur 3. Waduk Saguling 4. Waduk Jatigede
						Pengembangan Pelabuhan Utama	Kabupaten Subang (Pelabuhan Patimban)
						Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Kota Cirebon (Pelabuhan Cirebon)
						Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	1. Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Ratu)
							2. Kabupaten Indramayu (Pelabuhan
							Indramayu/Losarang) (rencana)
							3. Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan
							Pangandaran)
						Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 Lokasi
						Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus	Perairan Kabupaten Sukabumi, Perairan Kabupaten Cianjur, Perairan Kabupaten Cirebon, Perairan Kabupaten Karawang, Perairan Kabupaten Bekasi, dan Perairan Kabupaten Indramayu
						Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Lainnya	Inland Waterways CBL Cikarang – Bekasi – Laut Jawa
				Persentase pengguna Angkutan Umum ASDP	Persen		

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
				Persentase rencana persiapan pengelolaan pelabuhan laut	Persen		
				Persentase angkutan penumpang ASDP yang sesuai standar keselamatan	Persen		
				Persentase prasarana pelabuhan yang sesuai standar	Persen		
				Persentase Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPP LLASDP	Persen		
				Persentase Data Pelayaran yang tersedia	Persen		
2	15	5	PROGRAM PERKERETAAPIAN			Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting antar kota	1. Jalur Ganda Jawa Selatan (eksisting);
							2. Cikampek – Surabaya (eksisting);
							3. Cikampek-Padalarang (eksisting);
							4. Cirebon – Kroya (eksisting)
							5. Angke – Merak (eksisting)
							6. Bogor – Sukabumi;
							7. Bandung – Sukabumi – Bogor;
							8. Bandung – Tasikmalaya – Banjar –
							Yogyakarta
						Pengembangan jaringan Jalur Kereta Api eksisting perkotaan	1. Bogor – Citayam – Depok – Manggarai (eksisting);
							2. Citayam-Nambo (eksisting)
							3. Kiaracondong – Cicalengka (eksisting)
						Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api antar kota	1. Rancaekek – Tanjungsari (rencana reaktivasi);
							2. Kota Cirebon – Kadipaten (rencana rekativasi);
							3. Jatibarang–karangampel(rencana reaktivasi);
							4. Terisi–losarang(rencanareaktivasi); 5. Dayeuhkolot–majalaya(rencana
							reaktivasi)
							6. Cijulang–Pangandaran–Banjar(rencana
							reaktivasi);
							7. Cikajang–Cibatu(rencanareaktivasi);
							8. Indramayu–Jatibarang(rencana

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							reaktivasi);
							9. Sukabumi–Cianjur–Padalarang (rencana reaktivasi);
							10.Cikudapateh – Ciwidey (rencana reaktivasi);
						Reaktivasi jaringan jalur Kereta Api perkotaan	1. Kiaracondong–Ciwidey(rencana reaktivasi);
							2. Indramayu–Jatibarang(rencana reaktivasi);
							3. Cijulang–Pangandaran–Banjar(rencana reaktivasi);
							4. Cikajang–Cibatu(rencanareaktivasi)
						Pembangunan jaringan jalur Kereta Api antar kota	1. Tanjungsari – Kertajati – Cirebon (rencana);
							2. Cileungsi – Jonggol – Cianjur (rencana);
							3. Jakarta – Bandung (Kereta api cepat)
							(rencana);
							4. Subang – Akses Pelabuhan Patimban
							(rencana);
							5. Cibungur - Tanjurasa (rencana);
							6. Sukabumi - Pelabuhan ratu (rencana);
							7. Rancabuaya - Pelabuhan ratu (rencana);
							8. Cijulang – rancabuaya (rencana);
							9. High Speed Railway Jakarta – Surabaya/
							Kereta Api Semi Cepat Jakarta –
							Surabaya (rencana);
							10. Kereta Api Cepat Bandung – Kertajati
							(rencana);
							11. Cibatu – Garut (rencana);
							12. Galunggung – Tasikmalaya (rencana);
							13. Ciwidey – Rancabuaya (rencana); dan
							14. Jaringan jalur kereta api antar kota
							lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						Pembangunan jaringan jalur Kereta Api perkotaan	18 ruas
						Pengembangan Stasiun Kereta Api	Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu
						Pengembangan Stasiun	Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi,Kabupaten Bekasi, dan stasiun Commuter Line lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian
						Commuter Line	
						Pengembangan stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel	Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya-Kertajati, dan stasiun penumpang angkutan masal berbasis rel lainnya sesuai kebijakan dan hasil kajian
						Pengembangan Stasiun Kereta Api berbasis Transit Oriented Development (TOD)	1. Stasiun Bogor Kota Bogor,
							2. Stasiun Baranangsiang, St Cibining
							Kabupaten Bogor,
							3. Stasiun Depok Baru Kota Depok,
							4. Stasiun Bekasi, St Bekasi Timur Kota
							Bekasi,
							5. Stasiun Cikarang Kabupaten Bekasi
							6. Stasiun Teluk Jambe Barat di Kabupaten
							Karawang
							7. Stasiun Walini di Kabupaten Bandung
							Barat
							8. Stasiun Padalarang di Kabupaten
							Bandung Barat
							9. Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							10. Stasiun Kertajati di Kabupaten Majalengka 11. Stasiun lainnya sesuai hasil kajian
				Persentase penumpang Kereta Api	Persen		
				Persentase dukungan kebijakan teknis penyelenggaraan perkeretaapian	Persen		
				Persentase Data Perkeretaapian dan Penerbangan yang tersedia	Persen		
			Sasaran 3.2: Meningkatnya kualitas infrastruktur	**Indeks Kualitas Infrastruktur**	**Persen**		
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase jaringan irigasi kewenangan Provinsi dalam kondisi baik	Persen	Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi lintas provinsi	DI Lintas Provinsi yaitu DI Manganti (Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran), DI Bantarheulang (Kab. Ciamis, Kota Banjar), DI Cisanggarung (Kab. Cirebon)
						Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi dengan luas layanan > 3000 ha	1. DI. Ciletuh Kab. Sukabumi 2. DI. Cikaranggeusan Kab. Sukabumi 3. DI. Cileuleuy Kab. Subang 4. DI. Leuwinangka Kab. Subang 5. DI. Cihea Kab. Cianjur 6. DI. Seuseupan Kab. Cirebon 7. DI. Cikeusik Kab. Cirebon 8. DI. Kamun Kab. Majalengka 9. DI. Cipanas II Kab. Indramayu 10. DI. Cipancuh Kab. Indramayu 11. DI. Cikunten I Kab. Tasikmalaya
						Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi lintas kab/kota	58 DI lintas kab/kota
						Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi DI dengan luas layanan 1.000 – 3.000 Ha	
						Operasi-pemeliharaan dan rehabilitasi Daerah Irigasi tambak	1. Daerah Irigasi Tambak Muara Gembong Kabupaten Bekasi 2. Daerah Irigasi Tambak Kapur Asem Kabupaten Karawang 3. Daerah Irigasi Tambak Muara Baru Kabupaten Karawang

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							4. Daerah Irigasi Tambak Bandeng Kabupaten Subang
							5. Daerah Irigasi Tambak Tanjung Tiga Kabupaten Subang
							6. Daerah Irigasi Tambak Blanakan Kabupaten Subang
						Pembangunan Daerah Irigasi baru dan peningkatan Daerah Irigasi eksisting pada waduk yang akan dibangun	1) Daerah Irigasi baru: DI. Sadawarna, DI. Cileuweung, DI. Jangkelok, DI. Cijurey, DI. Narogong;
							2) Peningkatan Daerah Irigasi: DI. Lakbok Utara, DI. Lakbok Selatan, DI. Cipanas 1, DI. Cipanas 2, DI. Rawaonom, DI. Panulisan, DI. Cijangkelok;
							3) Pembangunan Daerah Irigasi baru dan peningkatan Daerah Irigasi pada waduk lainnya yang akan dibangun.
						Pembangunan Irigasi Air Tanah (baru, konjungsi, IKK)	Seluruh kab/kota di Jawa Barat
						Modernisasi irigasi	DI di Provinsi Jawa Barat
						Pembangunan jaringan irigasi baru	1. Daerah Irigasi Rengrang di Kabupaten Sumedang;
							2. Daerah Irigasi Cileuweung di Kabupaten Kuningan;
							3. Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut;
							4. Daerah Irigasi Candragoyang di Kabupaten Garut;
							5. Daerah Irigasi Parigi di Kabupaten Pangandaran;
							6. Daerah Irigasi Cimerak di Kabupaten Pangandaran;
							7. Daerah Irigasi Cikalong di Kabupaten Tasikmalaya;
							8. Daerah Irigasi Caringin di Kabupaten Sukabumi;
							9. Daerah Irigasi Curugdengdeng di Kabupaten Cianjur
							10. Daerah Irigasi Jangkelok di Kabupaten Kuningan
							11. Daerah Irigasi Cimandiri di Kabupaten Sukabumi;
							12. Daerah Irigasi Parungbangkong di Kabupaten Cianjur;
							13. Daerah Irigasi Tanjong Panto di Kabupaten Cianjur;

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							14. Daerah Irigasi Cikaso di Kabupaten Sukabumi;
							15. Bendung Karet Di Kabupaten Indramayu;
							16. Bendung Karet di Kabupaten Cirebon;
							17. Bendung Daerah Irigasi Cimalagunung
							di Kabupaten Sumedang;
							18. Bendung Daerah Irigasi Cikelek di
							Kabupaten Sumedang;
							19. Bendung Leuwinangka di Kabupaten
							Subang; dan
							20. Bendung/Daerah Irigasi lainnya di Jawa
							Barat
						Peningkatan jaringan irigasi	Peningkatan Luas layanan Daerah Irigasi (DI.) yang berada pada Kawasan Cirebon Timur, Sukabumi selatan, Cianjur selatan, DI. Cimulu Kab. Tasikmalaya, Irigasi dan DI. Cihoe-Cikompeni Kabupaten Bogor, DI. Sasak Kabupaten Bogor, dan Daerah Irigasi lainnya di Jawa Barat
				Persentase SITU yang Terpelihara	Persen	Normalisasi dan revitalisasi situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya sebagai peningkatan kapasitas tampung dalam menahan air banjir	Seluruh situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya di Jawa Barat
						Pengamanan, konservasi, serta operasi dan	Seluruh situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya di Jawa Barat
						pemeliharaan situ	
						Penataan dan revitalisasi situ	Seluruh situ, embung, waduk, dan penampung air lainnya di Jawa Barat
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Persen	-	
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas	Persen	Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM	MA Gambung; MA Kertasari; Interbasin Sinumbra; Wd Harian Cikalong; Pompa Saguling, Cilembang; Wd Sadawarna; Pipa Intake SPAM Purwakarta
							Wd Santosa; Wd Cikapundung; Wd Cibeet; Balekambang Conjunctive; Wd

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
				yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota			Rancaekek/ Tegaluar; Wd Sukawana; Wd Cipanengah; Intake Nanjung; WTP Siphon Bekasi
							Wd Cimahi; Wd Cimeta; MA Ganjarsari, Pasirranji Cs, Cilame Cs, Pipa dari Wd jatiluhur Tahap II
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota)	Regional Jatiluhur, Regional Cirebon Raya/Jatigede, Regional Bandung Raya
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lainnya sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	Persen	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/kota di Jawa Barat	SPALD-T Regional Bandung Raya (IPAL Regional Lagadar) dan SPALD-T Regional Cirebon Raya (IPAL Regional Babadan)
						Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat di kabupaten/kota di Jawa Barat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						embangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan imbah yang berasal dari sumber domestik	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	Pembangunan TPPAS Regional	TPPAS Regional Lulut Nambo – Kab. Bogor
							TPPAS Regional Legoknangka – Kab. Bandung
							TPPAS Regional Ciwaringin – Kab. Cirebon
							TPPAS Regional Cidampa – Kab. Karawang
						Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Seluruh wilayah yang terlayani TPPAS Regional
						Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional	Eks TPA Leuwigajah
							Eks Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sarimukti

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							Eks TPA Bantar Gebang (Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional	Persen	Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Sukabumi, Kab/Kota Tasikmalaya
						Pengembangan TPST atau TPA Lokal	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pembangunan dan Pengembangan TPA	Pendukung industri di Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka,
							Pendukung perkotaan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut,
						Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pengolahan gas methana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas methana	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun	Persen	Pembangunan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)	1. Jalan Lingkar Pamanukan
							2. Jalan Akses Patimban
							3. Jalan Akses Bandara Kertajati (Akses
							BIJB);
							4. Jatitujuh – Kadipaten – Jatibarang -
							Pekandangan
						Pembangunan Jalan Kolektor	44 Ruas
						Pembangunan/peningkatan jalur jalan poros	1. Cirebon – Cikijing – Ciamis – Pangandaran (Akses menuju BIJB)
							2. Garut-Bungbulang-Cijayana
							3. Jalan utama kawasan Aerocity Kertajati
							4. Jalan Puncak II (Sentul – Sp. Sukamakmur – Kota Bunga – Cipanas) Cianjur
							5. Jalan akses kawasan Aerocity ke BIJB Kertajati
							6. Jalan Lingkar Selatan Bandung (sejajar Tol
							7. Jalan Lingkar Malangbong

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							8. Lingkar Timur Kuningan (SBSN)
						Pembangunan trase jalur tengah selatan Jawa Barat terpilih	Kabupaten Sukabumi – Kabupaten Pangandaran
						Pembangunan Simpang Susun Tidak Sebidang	55 Lokasi
						Rencana Pembangunan jalan tol baru	42 Ruas
				Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan	Persen	Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer	Jalan arteri primer di Provinsi Jawa Barat
						Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) di Provinsi Jawa Barat
						Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2)	Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2) di Provinsi Jawa Barat
						Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3)	Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3) di Provinsi Jawa Barat
						Pemeliharaan jalan tol	32 ruas
				Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	KM		
				Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	Persen	Peningkatan akses jalan	
						dari PKL ke kecamatan	
						sekitarnya	
1	3	11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Persen	Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU)	Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, Cirebon Raya
						Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			Pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh Wilayah	Jawa Barat
						Pengembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Deluruh kabupaten/
							Kota yang dilewati SUTT
						engembangan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Deluruh kabupaten/
							Kota yang dilewati SUTET
						Pengembangan Gardu Listrik	Jawa Barat
				Persentase pemenuhan Tingkat Mutu Pelayanan penyediaan tenaga listrik kewenangan Gubernur	Persen		
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada	Persen		

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
				instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur			
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen		
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen		
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen		
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen		
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen		
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen		
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat	Persen		
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen		
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan	Persen		

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
				Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor			
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen		
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen		
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen		
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen		
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen		
			Sasaran 3.3: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	**Persentase Rumah Tangga Hunian Layak**	**Persen**		
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Persen	Pembangunan dan pemanfaatan sumber air baku sebagai sumber air bersih untuk SPAM	MA Gambung; MA Kertasari; Interbasin Sinumbra; Wd Harian Cikalong; Pompa Saguling, Cilembang; Wd Sadawarna; Pipa Intake SPAM Purwakarta
							Wd Santosa; Wd Cikapundung; Wd Cibeet; Balekambang Conjunctive; Wd Rancaekek/ Tegaluar; Wd Sukawana; Wd Cipanengah; Intake Nanjung; WTP Siphon Bekasi
							Wd Cimahi; Wd Cimeta; MA Ganjarsari, Pasirranji Cs, Cilame Cs, Pipa dari Wd jatiluhur Tahap II
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional (lintas kabupaten/kota)	Regional Jatiluhur, Regional Cirebon Raya/Jatigede, Regional Bandung Raya

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) berbasis masyarakat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lainnya sesuai Rencana Induk SPAM (RISPAM)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	Persen	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/kota di Jawa Barat	SPALD-T Regional Bandung Raya (IPAL Regional Lagadar) dan SPALD-T Regional Cirebon Raya (IPAL Regional Babadan)
						Penyediaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat di kabupaten/kota di Jawa Barat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						embangunan SPAL Domestik terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penggunaan teknologi yang sesuai dan pengelolaan imbah yang berasal dari sumber domestik	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Penerapan regulasi kewajiban penyediaan limbah industri	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Persen	Pembangunan TPPAS Regional	TPPAS Regional Lulut Nambo – Kab. Bogor
							TPPAS Regional Legoknangka – Kab. Bandung
							TPPAS Regional Ciwaringin – Kab. Cirebon
							TPPAS Regional Cidampa – Kab. Karawang
						Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Seluruh wilayah yang terlayani TPPAS Regional
						Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional	Eks TPA Leuwigajah
							Eks Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sarimukti
							Eks TPA Bantar Gebang (Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional	Persen	Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Sukabumi, Kab/Kota Tasikmalaya
						Pengembangan TPST atau TPA Lokal	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pembangunan dan Pengembangan TPA	Pendukung industri di Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka,

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							Pendukung perkotaan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut,
						Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pengolahan gas methana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas methana	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
			Sasaran 3.4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**		
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Pengendalian pencemaran, kerusakan, dan erosi, serta penerapan teknologi untuk mencegah sampah ke laut pada seluruh DAS terutama DAS prioritas.	DAS Cilamaya, DAS Kali Bekasi
							(Perbukitan Struktural Jonggol Sumedang Cilacap, Pergunungan Vulkanik G.Halimun G. Salak G. Sawal, Dataran Fluvial Cilegon Indramayu Pekalongan, dan/atau Dataran Vulkanik Bantar Waru/Dataran Vulkanik Serang Tangerang Depok) dan DAS prioritas lainnya di Jawa Barat
						Pencegahan dan penanggulangan	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sukabumi
						pencemaran perairan	
						Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan / limpasan material	Perairan Kabupaten/Kota Cirebon
						peningkatan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan	Jawa Barat
				Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)			
				Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX			
				Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota			
				Persentase Peningkatan Kampung Iklim			
				Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi di Setiap Bahan/Produk yang Diuji			

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
				Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Lingkungan Hidup			
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3		pengembangan prasarana pengelolaan limbah B3	1. WPPI 1: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang
							2. WPPI 2: Kab. Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kab Majalengka
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan	Persen	Rehabilitasi kawasan hutan, kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang	KSP Bandung Utara
				Persentase Penanganan Lahan Kritis	Persen	Rehabilitasi lahan kritis di kawasan perlindungan setempat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Reboisasi, Rehabilitasi lahan kritis, mangrove, dan tanaman pantai	Kawasan Hulu DAS, Kawasan Resapan Air, Kawasan gerakan tanah tinggi dan menengah, pesisir
						Rehabilitasi kawasan hutan, kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang	KSP Bandung Utara
				Persentase Gangguan dan Kerusakan Hutan	Persen		
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persen	Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan untuk Kebutuhan Industri	1. Kabupaten Bogor;
							2. Kabupaten Sukabumi;
							3. Kabupaten Cianjur;
							4. Kabupaten Bandung Barat;
							5. Kabupaten Bekasi;
							6. Kabupaten Purwakarta;
							7. Kabupaten Karawang;
							8. Kabupaten Subang;
							9. Kabupaten Indramayu;
							10. Kabupaten Majalengka;
							11. Kabupaten Cirebon;
							12. Kabupaten Kuningan;
							13. Kabupaten Bandung;
							14. Kabupaten Garut;

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							15. Kabupaten Ciamis;
							16. Kabupaten Pangandaran; 17. Kabupaten Sumedang;
							18. Kabupaten Tasikmalaya;
							19. Kota Tasikmalaya; dan
							20. Kota Banjar.
				Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan	Persen	Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan lingkungan kawasan lindung	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Persentase Serapan Karbon	Persen		
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Peningkatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Ditangkarkan	Persen	Kawasan ekosistem esensial	1. Kawasan Hutan Mangrove Bulaksetra di Kabupaten Pangandaran;
							2. Pantai Barat Batu Hiu di Kabupaten Pangandaran; dan
							3. Karst Cukang Taneuh/ Green Canyon di Kabupaten Pangandaran
							4. Kawasan Ekosistem esensial lainnya sesuai peraturan penetapan kawasan
						Kawasan cagar biosfer	1. Cagar Biosfer Cibodas;
							2. Cagar Biosfer Gunung Pangrango
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL				
				Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan	Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Tempat Bertelur Penyu	1. Pantai Ciracap dan Ujung Genteng, terletak di Kabupaten Sukabumi;
							2. Pantai Legokjawa di Kabupaten Pangandaran; dan
							3. Pantai Sindangkerta di Kabupaten Tasikmalaya;
							4. Pantai Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya
						Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi – Alur migrasi penyu	erairan Kabupaten Sukabumi, Perairan Kabupaten Tasikmalaya, Perairan Kabupaten Cianjur, Perairan Kabupaten Pangandaran
						Rehabilitasi dan konservasi Kawasan terumbu karang	1. Pantai Cilamaya, terletak di Kabupaten Karawang;
							2. Pantai Bobos, terletak di Kabupaten Subang;
							3. Pantai Majakerta dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu;
							4. Pantai Karang Hawu, Cisolok, Citepus, Surade, Ciracap, dan Ciwaru, terletak di Kabupaten Sukabumi;

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
							5. Pantai Santolo, Cilauteureun sampai Cagar Alam Sancang, dan Cikelet, terletak di Kabupaten Garut;
							6. Pantai Cipatujah sampai Karangtawulan, terletak di Kabupaten Tasikmalaya; dan
							7. Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat
							Cagar Alam Pananjung, serta Pantai Karang Jaladri, terletak di Kabupaten Ciamis
				Jumlah Produksi Garam	Ton	Sentra Kegiatan usaha Pergaraman	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang
						Peningkatan Sentra Usaha Pergaraman	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang
						pengembangan kawasan ekonomi garam	Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Karawang
						Pembangunan dan pengembangan industri hulu agro (garam) dan industri petrokimia hulu	Kabupaten/Kota di Pesisir Jawa Barat
						Pengembanganindustri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman/pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan; dan pengolahan dan pengawetan lainnya)	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat
			Sasaran 3.5: Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	**Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**Persen**		
				Indeks Risiko Bencana	**Poin**		
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	Pengembangan kawasan hortikultura	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	%		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Pengembangan kawasan tanaman pangan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Luas Panen Tanaman Pangan	Ha		
				Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha		
				Indeks Pertanaman (IP)	%		

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Pengembangan kawasan perkebunan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	Persen		
				Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana pengolahan Perkebunan	Persen		
				Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi promosi produk Perkebunan	Persen		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	Persen	Pengembangan kawasan perkebunan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			Perwujudan Aksi Penanggulangan Bencana:	Jawa Barat
						Mitigasi Non Struktural; Mitigasi Struktural; Penanganan Keadaan darurat; dan Rehabilitasi dan rekonstruksi	
				Persentase Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	persen	Rehabilitasi lahan di kawasan rawan bencana	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Peningkatanpengamanan pantai dan kapasitas adaptasi terhadap bencana (rob, abrasi, gelombang ekstrem, tsunami, dan tanah longsor)	KabupatenBekasi,KabupatenKarawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut
				Peresentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	persen	Penanganan darurat pada saat bencana alam dan pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana	Seluruh infrastruktur sumber daya air yang ada di Provinsi Jawa Barat
				Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan pada saat keadaan Darurat Bencana)	persen	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional		Pembangunan TPPAS Regional	TPPAS Regional Lulut Nambo – Kab. Bogor
							TPPAS Regional Legoknangka – Kab. Bandung
							TPPAS Regional Ciwaringin – Kab. Cirebon
							TPPAS Regional Cidampa – Kab. Karawang
						Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Seluruh wilayah yang terlayani TPPAS Regional

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						Penataan dan Pengelolaan Persampahan Pasca Operasional	Eks TPA Leuwigajah
							Eks Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sarimukti
							Eks TPA Bantar Gebang (Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)
						Pengembangan TPA bersama Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Sukabumi, Kab/Kota Tasikmalaya
						Pengembangan TPST atau TPA Lokal	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pembangunan dan Pengembangan TPA	Pendukung industri di Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka,
							Pendukung perkotaan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut,
						Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pengolahan timbulan sampah (pemisahan sampah, pengomposan, penerapan 3R)	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pengolahan gas methana menjadi biogas di TPA dengan memanfaatkan sampah yang pada proses pembusukannya dapat menghasilkan gas methana	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			Pengembangan Energi di Laut - Pengembangan energi baru dan terbarukan	Jawa Barat
						Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, dan PLTS atap di Kawasan industri yang tersebar di kabupaten/kota
						Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM)	Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya
						Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Kabupaten Sukabumi (PLTB Palabuhanratu), Kabupaten Garut (PLTB Pameungpeuk), dan Kabupaten Cirebon
						Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bogor

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi
						Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung
						Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
				Persentase pemanfaatan EBT	Persen		
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen		
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen		
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen		
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen		
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen		
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen		
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen		
				Persentase komoditas EBT yang diuji atau dikembangkan	Persen		
			Sasaran 3.6: Meningkatnya Pemerataan pembangunan di Wilayah Pedesaan	**Indeks Desa Membangun**	**Poin**		
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang difasilitasi penataannya	**Persen**	Pengembangan Desa Mandiri benih tanaman pangan (Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP))	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pengembangan desa komoditas perkebunan organik	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pengembangan desa wisata	Seluruh DPP di Jawa Barat
						Peningkatan jalan strategis: Jembatan di perbatasan antar kabupaten/kota dan antar perbatasan Provinsi	Perbatasan lintas kabupaten/kota dan provinsi

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
						Peningkatan kualitas permukiman di kawasan perbatasan berupa kegiatan rancang bangun permukiman	Perbatasan lintas kabupaten/kota dan provinsi
			Tujuan 4: Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat**	**Poin**		
				Indeks Reformasi Birokrasi	**Poin**		
			Sasaran 4.1: Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat**	**Poin**		
			Sasaran 4.2: Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**		
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Peningkatan kualitas jaringan internet di destinasi wisata	Seluruh DPP Jawa Barat
						Penyusunan sistem informasi jaringan sumber daya air	Seluruh situ/ waduk/ embung/ daerah irigasi
						Pengembangan Sistem Informasi Perkebunan	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
						Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait lokasi penangkapan ikan	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut
						Penyediaan Sistem pendataan dan informasi perikanan tangkap	
						Pengembangan Sistem dan Jaringan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Penanggulangan Bencana	Jawa Barat
						Sistem Informasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1. KSNT Daerah Cadangan Karbon Biru di Kabupaten Indramayu; 2. Pulau Batu Kolotok di Kabupaten Tasikmalaya dan Pulau Nusamanuk di Kabupaten Tasikmalaya
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen		
				Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen		
				Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan	Persen		

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kesesuaian dengan RTRWP	Arahan Lokasi
				terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan			
			Sasaran 4.3: Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	**Indeks Inovasi Daerah**	**Poin**		
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Penelitian atau pengkajian pengembangan pelabuhan	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi
						Program penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya
				Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang siap untuk didiseminasikan	Persen		
				Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang siap untuk didiseminasikan	Persen		
				Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang siap untuk didiseminasikan	Persen		
				Persentase Hasil Kelitbangan yang didiseminasikan	Persen		
				Persentase Perlindungan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi	Persen		
				Prosentase Satuan Inovasi Daerah	Persen		
				Persentase pemenuhan hasil publikasi kelitbangan	Persen		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Strategi Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
   a) menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
   b) meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
   c) meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
   a) meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
   b) mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
   c) meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;

d) meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
e) menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
f) pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.

3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi, meliputi:
a) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya- Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
b) mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integerasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
c) mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
d) mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
e) mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
f) mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
g) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;

h) mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;

i) mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;

j) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan

k) meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.

4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:

a) meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;

b) membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;

c) meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;

d) mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;

e) mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

f) meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;

g) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;

h) mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;

i) meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;

j) meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
k) mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
l) mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
a) mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
b) mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
c) melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
d) merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
e) memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
f) meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
g) pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.

6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
a) merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;

b) mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
c) pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
d) mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
e) mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
   a) meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
   b) menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
   c) mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
   d) mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek- Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan, meliputi:
   a) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
   b) mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan

sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan

c) strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping ke 8 (delapan) strategi di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 telah ditetapkan kebijakan perairan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Strategi 12 mil perairan bertujuan untuk mengelola wilayah perairan disekitar pesisir atau pantai, untuk memastikan ekosistem perairan termasuk keseimbangan ekologi dan pengelolaan sumber daya perikanan, serta untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah perairan seperti pariwisata bahari, sumber energi minyak dan gas alam, dan transportasi laut.

Dalam rangka penjabaran strategi program 12 mil laut, maka ditetapkan indikasi program perairan yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 6.5
Indikasi Program Perairan Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
I.A.4	**Perwujudan Pusat Pertumbuhan Kelautan**										
	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan										
a	Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan										
1	Pelabuhan Perikanan	PPS Palabuhanratu, PPN Kejawanan, PPP Cilauteureun, PPP Bondet, PPP Eretan, PPP Ciparage, PPP Blanakan, PPP Muara Ciasem	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan							
2	Sentra Kegiatan usaha Pergaraman	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan							
3	Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan							
4	Sentra kegiatan perikanan budidaya	Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya									
5	Pengembangan energi	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi	BUMN, Swasta	Kemen. Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral							
	b. Pusat Industri Kelautan dan Perikanan										
1	Sentra Industri Maritim	Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan							
2	Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	Kabupaten Subang, Kabup	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan							
I.B.4	**Sistem Jaringan Transportasi Laut**										
a	Penelitian atau pengkajian pengembangan pelabuhan	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, KKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BUMN							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabum									
b	Pengerukan alur pelabuhan secara rutin	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, KKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BUMN							
c	Pembangunan fasilitas konstruksi dan pemeliharaan kapal	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, KKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BUMN							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
d	Pembangunan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar)	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, KKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, BUMN							
e	Pengembangan Pelabuhan Utama	Kabupaten Subang (Pelabuhan Patimban)	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, dan Badan Usaha Pelabuhan							
f	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Kota Cirebon (Pelabuhan Cirebon)	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan							
g	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	1. Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Ratu) 2. Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Indramayu/Losarang) (rencana) 3. Kabupaten Pangandaran (Pelabuhan Pangandaran	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
h	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1. Kabupaten Bekasi (Pelabuhan Tarumajaya dan Pelabuhan Muara Gembong), 2. Kabupaten Subang (Pelabuhan Pamanukan Blanakan, Pelabuhan Ciasem, Pelabuhan Mayangan, Pelabuhan Muara Tawar), 3. Kabupaten Cirebon (Pelabuhan Astanajapura, Pelabuhan Muara Gebang, Pelabuhan Bondet, Pelabuhan Gebang Mekar), 4. Kota Cirebon (Pelabuhan Kejawanan), 5. Kabupaten Indramayu (Pelabuhan Balongan, Pelabuhan Eretan, Pelabuhan Juntinyuat, Pelabuhan Karangsong, Pelabuhan Patrol, Pelabuhan Sukra, Pelabuhan Tirtamaya), 6. Kabupaten Pangandaran	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		(Pelabuhan Pangandaran, Pelabuhan Batu Karas, Pelabuhan Parigi, Pelabuhan Majingklak), 7. Kabupaten Tasikmalaya (Pelabuhan Cipatujah), 8. Kabupaten Garut (Pelabuhan Pameungpeuk, Pelabuhan Pakenjeng, Pelabuhan Caringin), 9. Kabupaten Cianjur (Pelabuhan Sindang Barang) dan 10.Kabupaten Sukabumi (Pelabuhan Teluk Palangpang/Ciwaru, Pelabuhan Ujung Genteng, Pelabuhan Cisolok									
i	Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus	Perairan Kabupaten Sukabumi, Perairan Kabupaten Cianjur, Perairan Kabupaten Cirebon, Perairan Kabupaten Karawang, Perairan Kabupaten Bekasi, dan Perairan Kabupaten Indramayu	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
j	Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Lainnya	Inland Waterways CBL Cikarang – Bekasi – Laut Jawa	APBN, APBD Provinsi, Badan Usaha	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Pelabuhan, Dinas Perhubungan							
k	Pembangunan Galangan Kapal Perikanan	Kabupaten/Kota di Pesisir Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan							
l	Pelabuhan Perikanan		APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Swasta							
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	a. PPN Kejawanan, PPN Palabuhanratu, b. PPP Eretan Wetan, PPP Bondet, PPP Cilauteureun, PPP Ciparage, PPP Blanakan, PPP Muara Ciasem, c. PPI tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Swasta							
2	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)	PPS Palabuhanratu	APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan, dan Perikanan							
3	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	PPP Eretan Wetan, PPP Bondet, PPP Cilauteureun, PPP Ciparage, PPP Blanakan, PPP Muara Ciasem	APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan, dan Perikanan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
4	Pengembangan dan Penataan Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	a. Kabupaten Bekasi : PPI Paljaya, PPI Muara Jaya, PPI Muara Bendera, PPI Muaragembong, b. Kabupaten Karawang : PPI Pakis Jaya, PPI Sedari, PPI Cemara, PPI Sungai Buntu, PPI Pasir Putih, dan PPI Tangkolak, c. Kabupaten Subang : PPI Rawameneng, PPI Mayangan, Terungtum, PPI Genteng, PPI Anggasari, PPI Cirewang, PPI Cilamaya Girang, PPI Muara, d. Kabupaten Indramayu: PPI Ujung Gebang, PPI Sukahaji, PPI Eretan Kulon, PPI Majakerta, PPI Lombang, PPI Glayem (Juntinyuat), PPI Limbangan, PPI Dadap, PPI Karangsong, PP Tegalagung, PPI Pabean Udik, e. Kabupaten Cirebon: PPI Mundu Pesisir, PPI Gebang	APBN, APBD Provinsi, Swasta	KKP, Dinas Kelautan, dan Perikanan, Swasta							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Mekar, PPI Ambulu, PP Bungko Lor, PP Karang reja, PP Selopenganten (PPI Bandengan), PP Ender, f. Kota Cirebon: PPI Pesisir, PPI Cangkol, PPI Kesenden, g. Kabupaten Sukabumi: PPI Cikembang, PPI Cibangban, PPI Cisolok, PPI Loji, PPI Ciwaru, PPI Kalapa Condong, PPI Ujung Genteng, PPI Mina Jaya, dan PPI Tegal Buleud, h. Kabupaten Cianjur: PPI Cikakap, PPI Jayanti i. Kabupaten Garut: PPI Rancabuaya, PPI Cimari Muara, PPI Cijeruk, j. Kabupaten Tasikmalaya: PPI Pamayangsari, PPI Nusa Cimanuk, k. Kabupaten Pangandaran: PPI Muara Gatah, PPI Legok Jawa, PPI Madasari, PPI Batukaras, PPI Nusawiru, PPI Bojongsalawe, PPI Cikidang, PPI									

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Plataragung, dan PP Majingklak									
m	alur pelayaran										
1	Alur - Pelayaran Umum dan Perlintasan										
-	Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional	Sepanjang perairan utara Jawa Barat menuju dan keluar Pelabuhan Patimban, Utara perairan Kabupaten Bekasi, Sepanjang perairan utara Kabupaten Bekasi hingga Kabupaten Karawang, Pelabuhan Tanjung Pakis, Karawang, Pelabuhan Kejawanan Kota Cirebon, Pelabuhan Palabuhanratu, Perairan Pangandaran, dan Pelabuhan Bojong Salawe	APBN, APBD Provinsi	a. Kementerian KP; b. Dinas Kelautan Perikanan c. Pemerintah Daerah							
-	Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.		APBN, APBD Provinsi	a. Kementerian KP; b. Dinas Kelautan Perikanan c. Pemerintah Daerah							
-	Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran perlintasan nasional		APBN, APBD Provinsi	a. Kementerian KP; b. Dinas Kelautan Perikanan c. Pemerintah Daerah							
2	Alur - Pelayaran Masuk Pelabuhan										
-	Penataan dan pengawasan kenavigasian jaringan pelayaran perlintasan regional	Perairan Bekasi, PPI Muara, Cilamaya Wetan, PPI Genteng Pusakanagara, Pelabuhan Karangsong, PPI Cangkol, Lemahwungkuk, Perairan Sukabumi, PPI Cikidang Pangandaran,	APBN, APBD Provinsi	a. Kementerian KP; b. Dinas Kelautan Perikanan c. Pemerintah Daerah							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Tersus PLTGU Jawa Satu Power									
I.C	**Sistem Jaringan Energi**										
I.C.1	**Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**										
i	Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi										
2	Jaringan pipa gas dan pipa bawah laut untuk minyak dan gas bumi	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Subang	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, PGN, BUMD							
3	Jaringan pipa gas di permukaan laut (FSRU)	Kabupaten Karawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, PGN, BUMD							
I.C.3	**Jaringan Energi di Laut**										
a	Pengembangan Energi di Laut										
1	Pengembangan energi baru dan terbarukan	Jawa Barat	APBN, Swasta	Kementerian ESDM							
2	Pengujian kualitas bahan tambang	Jawa Barat	APBN, Swasta	DESDM							
3	Penerapan usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Jawa Barat	APBN, Swasta	DESDM							
4	Pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang laik operasi	Jawa Barat	APBN, Swasta	DESDM							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
5	Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Jawa Barat	APBN, Swasta	Kementerian ESDM							
6	Pembangunan transmisi pipa gas (Ruas CirebonSemarang)	Kota Cirebon	APBN, Swasta	Kementerian ESDM							
7	Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Kabupaten Sukabumi	APBN, Swasta	Kementerian ESDM							
b	Pipa bawah laut minyak dan gas bumi										
1	Pengawasan periodik sebagai upaya pemenuhan keselamatan kerja	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon	APBN, Swasta	Kementerian ESDM dan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi							
2	Pelaksanaan penggelaran, pengoperasian, perbaikan, dan perawatan pipa penyalur		APBN, Swasta	Kementerian ESDM dan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi							
I.D.1	**Jaringan Tetap**										
c	pengembangan jaringan kabel bawah laut	Daerah Kabupaten Karawang (SKKL JASUKA di Tanjung Pakis ke arah Tanjung Pandan), Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Komuninfo, Dinas BMPR Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPTSP, Diskominfo Provinsi dan Kab/ Kota, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan							
I.D.3	**Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi**										
	Pelaksanaan penggelaran, pengoperasian, perbaikan, dan perawatan kabel bawah laut	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komuninfo, Dinas BMPR Provinsi dan Kab/ Kota, DPMPTSP, Dinas Perkim Provinsi							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				dan Kab/ Kota, Diskominfo Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan							
II.A.3	**Kawasan Perlindungan Setempat (PS)**										
a	Pemeliharaan kawasan perlindungan setempat										
1	Sempadan Pantai	1. Kabupaten Bekasi; 2. Kabupaten Subang; 3. Kabupaten Karawang; 4. Kabupaten Indramayu; 5. Kabupaten Cirebon; 6. Kota Cirebon; 7. Kabupaten Sukabumi; 8. Kabupaten Cianjur; 9. Kabupaten Garut; 10. Kabupaten Tasikmalaya; 11. Kabupaten Pangandaran	APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN	KKP, Kement. ATR/BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang							
c	Rehabilitasi dan konservasi ekosistem wilayah pesisir	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu,	APBD Kab/ Kota, APBD Provinsi	KLHK, Kemen PUPR, Kement. ATR/BPN, Kement KKP, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang,							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut		Dinas Lingkungan Hidup, Dishut, DTPH, Dinas Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan							
f	Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan ekosistem mangrove										
1	Pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KLHK, Kemen PUPR, Kement. ATR/BPN, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dishut, DTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan							
2	Konservasi dan reforestasi vegetasi mangrove dan hutan pantai dengan melibatkan masyarakat sekitar										
3	Rehabilitasi hutan mangrove yang rusak										
4	Monitoring dan evaluasi kondisi mangrove secara berkala										
5	penambahan area hutan mangrove secara kontinu										
6	Rehabilitasi mangrove, serta mangrove center untuk edukasi dan wisata.										
7	Integrasi data ekositem dalam bentuk database yang integratif										
8	Pengelolaan kawasan mangrove antar instansi										

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
II.A.4	**Kawasan Konservasi (KS)**										
8	Kawasan koridor bagi satwa yang dilindungi										
a	Tempat bertelur penyu	1. Pantai Ciracap dan Ujung Genteng, terletak di Kabupaten Sukabumi; 2. Pantai Legokjawa di Kabupaten Pangandaran; dan 3. Pantai Sindangkerta di Kabupaten Tasikmalaya; 4. Pantai Cipatujah di Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, KLHK, KKP, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, BKSDA							
b	Alur migrasi penyu	Perairan Kabupaten Sukabumi, Perairan Kabupaten Tasikmalaya, Perairan Kabupaten Cianjur, Perairan Kabupaten Pangandaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, KLHK, KKP, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, BKSDA							
9	Rehabilitasi dan konservasi Kawasan terumbu karang	1. Pantai Cilamaya, terletak di Kabupaten Karawang; 2. Pantai Bobos, terletak di Kabupaten Subang; 3. Pantai Majakerta dan Pulau Biawak, terletak di Kabupaten	APBN, APBD Provinsi	Kemen PUPR, KLHK, KKP, Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Indramayu; 4. Pantai Karang Hawu, Cisolok, Citepus, Surade, Ciracap, dan Ciwaru, terletak di Kabupaten Sukabumi; 5. Pantai Santolo, Cilauteureun sampai Cagar Alam Sancang, dan Cikelet, terletak di Kabupaten Garut; 6. Pantai Cipatujah sampai Karangtawulan, terletak di Kabupaten Tasikmalaya; dan 7. Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat Cagar Alam Pananjung, serta Pantai Karang Jaladri, terletak di Kabupaten Ciamis									
10	Kawasan ekosistem esensial	1. Kawasan Hutan Mangrove Bulaksetra di Kabupaten Pangandaran; 2. Pantai Barat Batu Hiu di Kabupaten Pangandaran; dan 3. Karst Cukang Taneuh/ Green Canyon di Kabupaten	APBN, APBD Provinsi								

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Pangandaran 4. Kawasan Ekosistem esensial lainnya sesuai peraturan penetapan kawasan									
II.A.5	**Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL)**										
a	Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil										
1	Pencadangan dan penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Lingkungan Hidup dan Konservasi							
2	Penyusunan zonasi rinci kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Lingkungan Hidup dan Konservasi							
3	Program perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				di Lingkungan Hidup dan Konservasi							
4	Program perlindungan situs budaya/adat tradisional		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Lingkungan Hidup dan Konservasi							
5	Program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Lingkungan Hidup dan Konservasi							
6	Program perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Lingkungan Hidup dan Konservasi							
7	Program penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Lingkungan Hidup dan Konservasi							
8	Identifikasi Potensi Kawasan Konservasi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Lingkungan Hidup dan Konservasi							
9	Pembangunan infrastruktur sarana prasarana		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Lingkungan Hidup dan Konservasi							
10	Program rehabilitasi ekosistem		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Lingkungan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				Hidup dan Konservasi							
b	Kawasan Konservasi Maritim (KKM)										
1	Program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan	Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan							
2	Program perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan							
3	Program perlindungan situs budaya/adat tradisional		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
4	Penyusunan zonasi rinci kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan							
5	Program penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan							
6	Program Pengelolaan Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan							
7	Program pasca eksplorasi dan eksploitasi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan							
c	Migrasi Biota Laut										
1	Program perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan	Migrasi Mamalia laut: Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu di perairan Pulau Biawak Migrasi Ikan tertentu: alur ikan sidat terdapat di perairan Sukabumi Migrasi Penyu : Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, Lembaga di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi.							
2	Program perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya										
3	Riset / Penelitian / Identifikas										
II.B.3	**Perwujudan Kawasan Perikanan (IK)**										
b	Perikanan Tangkap Laut										
1	Sosialisasi lokasi kawasan perikanan tangkap dan tata cara penangkapan perikanan kepada nelayan/ masyarakat	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten	APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
2	Edukasi dan pelatihan keterampilan nelayan lokal		APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
3	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terkait lokasi penangkapan ikan		APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
4	Kajian pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan	Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut	APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
5	Penggunaan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan-undangan		APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
6	Program menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu		APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
7	Program menangkap ikan ukuran layak tangkap		APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
8	Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung		APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
9	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan		APBN, APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
e	Perikanan Budidaya Laut										
1	Identifikasi dan inventarisasi lokasi unggulan budidaya laut yang feasible	Perairan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
2	Mapping lokasi budidaya unggulan yang feasible		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
3	Pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
4	Melakukan optimalisasi input dalam usaha budidaya laut		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
5	Pemanfaatan teknologi budidaya laut ramah lingkungan		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
6	Penerapan CBIB dan CPIB dalam budidaya laut	Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
7	Pelibatan partisipasi stakeholder dalam melestarikan lingkungan perairan laut		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
8	Penggunaan teknologi atau pendekatan inovatif untuk peningkatan produktivitas perikanan budidaya		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan							
f	Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya Laut										
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
2	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
3	Pelatihan Usaha Bagi Start Up Kelautan Dan Perikanan		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
4	Pengembangan Budi Daya Lobster dan Sidat		APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
5	Pembangunan Kawasan Pesisir Minapolitan Jawa Barat Selatan	Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi	APBN dan APBD Provinsi	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
II.B.4	**Pergaraman (KEG)**										

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
a	Peningkatan Sentra Pergaraman										
1	Peningkatan produksi garam	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang	APBN, dan APBD Provinsi	KKP, Kementerian PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan							
2	Penerapan teknologi dan inovasi pergaraman		APBN, dan APBD Provinsi	KKP, Kementerian PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan							
3	Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Melalui Peningkatan Kualitas Garam		APBN, dan APBD Provinsi	KKP, Kementerian PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan							
b	Pengembangan Zona Pergaraman										
1	Pemetaan lokasi intake air laut untuk budidaya garam	Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sukabumi	APBN, dan APBD Provinsi	KKP, Kementerian PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan							
2	Program perlindungan kawasan intake air laut untuk budidaya garam		APBN, dan APBD Provinsi	KKP, Kementerian PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan							
II.B.9	**Perwujudan Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA)**										
a	Melakukan kajian AMDAL dan penerapan RKL RPL	Perairan Kabupaten/Kota Cirebon	APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup							
b	Memastikan keselamatan alur pelayaran di area dumping dan sekitarnya		APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				Dinas Lingkungan Hidup							
c	Pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur kapal		APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup							
d	Bongkar muat material keruk		APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup							
e	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan / limpasan material		APBN, Swasta	Kementerian Perhubungan, KSOP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup							
II.B.10	**Perwujudan Kawasan Transportasi (TR)**										
e	Zona Pelabuhan Laut										
1	Kegiatan rutin penyelenggaraan pelabuhan	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
2	Kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi										
3	Program penelitian atau pengkajian pengembangan pelabuhan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
4	Program pengerukan alur pelabuhan secara rutin		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
5	Program pengembangan pelabuhan jangka panjang		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
6	Pembangunan fasilitas konstruksi dan pemeliharaan kapal		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
7	Program pembangunan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar)		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
8	Kegiatan rutin penyelenggaraan pelabuhan		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
f	Zona Pelabuhan Perikanan										
1	Pendaratan hasil tangkapan perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
2	Pelaksanaan operasional kapal perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
3	Tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
4	Penyediaan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
5	Kegiatan bongkar muat	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
6	Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman/pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan; dan pengolahan dan pengawetan lainnya)	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
7	Pembangunan dan pengembangan industri maritim (pengembangan kapal ikan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
8	Program uji coba kapal	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
9	Penyediaan ruang penempatan kapal mati	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
10	Pelaksanaan kegiatan pemasaran dan distribusi ikan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/Kota							
11	Pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan di pelabuhan perikanan	PPN, PPP, dan PPI di Jawa Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	KKP, Dinas Kelautan dan							

No	Strategi Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap Ke-1			Tahap Ke-2	Tahap Ke-3	Tahap Ke-4	Tahap Ke-5
					2022	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
				Perikanan, Kab/Kota							
g	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak	Kabupaten Pangandaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Perhubungan dan Daerah							
h	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Perhubungan dan Daerah							
i	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Palangpang	Kabupaten Sukabumi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian Perhubungan dan Daerah							
III	**Perwujudan Kawasan Strategis**										
III.A	**Kawasan Strategis Nasional**										
b	Kawasan Strategis Nasional Tertentu										
1	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil	1. KSNT Daerah Cadangan Karbon Biru di Kabupaten Indramayu; 2. Pulau Batu Kolotok di Kabupaten Tasikmalaya dan Pulau Nusamanuk di Kabupaten Tasikmalaya		DKP, DLH, LSM, PT							
2	Sistem Informasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil			DKP, DLH, LSM, PT							
3	Penyusunan Peraturan Gubernur			DKP, DLH, LSM, PT							
4	Fasilitasi Perizinan bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional			DKP, DLH, LSM, PT							

Sumber: Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
Keterangan: Jadwal pelaksanaan

6.3 Program Prioritas

Program prioritas adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD. Program prioritas dipilih dari program perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target sasaran RPD.

Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 3 (tiga) tahun kedepan, pembangunan Jawa Barat diprioritaskan pada:

1. Pertumbuhan **ekonomi berbasis inovasi**, penguatan sistem **ketahanan pangan berkelanjutan** serta pengembangan **pariwisata** (P1)
2. Reformasi **sistem pendidikan** dan pemajuan **kebudayaan** serta **pendidikan agama** (P2)
3. Penguatan sistem **kesehatan daerah** (P3)
4. Penguatan Sistem **Perlindungan Sosial** dan Kesiapsiagaan **Penanggulangan Risiko Bencana** (P4)
5. Pengembangan **Infrastruktur Konektivitas Wilayah** dan Pengelolaan **Lingkungan Hidup** serta **Gerakan Membangun Desa** (P5)
6. Inovasi **pelayanan publik** dan **penataan daerah** (P6)

Prioritas pembangunan merupakan *bridging* antara tujuan dan sasaran RPD dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, agar program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan urgensi dan kebutuhan daerah khususnya untuk jangka waktu tiga tahun ke depan. Penjelasan untuk setiap Prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata (P1)

Membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang mengingat goncangan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 berdampak

cukup parah terhadap kondisi sosial ekonomi, dimana pengangguran dan kemiskinan meningkat cukup signifikan. Dalam rangka penormalan ekonomi diperlukan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang didukung inovasi yang berbasis digital, upaya penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan dan berketahanan iklim, serta upaya pengembangan ekonomi sektor pariwisata.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi didukung oleh kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dengan cara meningkatkan produksi dan konsumsi produk-produk dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Penerapan kebijakan P3DN dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perlindungan Tarif

Pemerintah dapat memberlakukan tarif impor yang tinggi untuk produk-produk tertentu guna membuat harga produk impor lebih mahal dibandingkan dengan produk dalam negeri yang sejenis. Hal ini akan mendorong konsumen untuk lebih memilih produk dalam negeri.

b. Insentif Fiskal

Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pembebasan atau pengurangan pajak bagi produsen dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan mengurangi biaya produksi.

c. Standar Kualitas

Pemerintah dapat menerapkan standar kualitas yang ketat bagi produk impor. Dengan mewajibkan produk impor memenuhi standar yang sama dengan produk dalam negeri, diharapkan produk dalam negeri menjadi lebih menarik bagi konsumen.

d. Peningkatan Akses Pembiayaan

Pemerintah dapat memberikan dukungan dan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri dalam negeri.

e. Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah dapat menginvestasikan dana dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung industri dalam negeri, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk dalam negeri.

Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dapat memiliki dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan upaya untuk memastikan kualitas dan daya saing produk dalam negeri sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif.

Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata (P1) akan didukung oleh Program Juara: Ekonomi Juara, dan Pembiayaan Inovatif Juara.

2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama (P2)

Kualitas pendidikan yang masih belum memadai, namun masih terdapat banyak persoalan yang belum terpecahkan, seperti rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya aksesibilitas, dan tidak adanya kesetaraan dalam pendidikan. Sementara itu, Tuntutan dunia kerja semakin kompleks dan berkembang pesat dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia kerja agar lulusan dapat bersaing dalam pasar kerja yang semakin ketat.

Dilain pihak tuntutan masyarakat terhadap pendidikan semakin beragam, dari kebutuhan akan keterampilan teknis hingga kebutuhan akan keterampilan sosial dan kreatifitas. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat agar dapat memenuhi harapan mereka.

Adanya kesenjangan sosial. Sistem pendidikan juga perlu direformasi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok yang berbeda. Sistem pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk mendapatkan

pendidikan yang berkualitas. Dengan melakukan reformasi sistem pendidikan, diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan mampu mempersiapkan lulusan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Pemajuan kebudayaan dan pendidikan agama penting untuk memperkuat identitas bangsa, menghargai keragaman budaya, dan membangun karakter dan moral yang baik pada generasi muda. Kebudayaan merupakan aset penting bangsa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Jawa Barat. Pendidikan agama dapat membantu memperkenalkan nilai-nilai keagamaan dan moral yang baik pada generasi muda, sehingga dapat membentuk karakter dan kepribadian yang baik pada diri mereka.

Dengan memajukan kebudayaan dan pendidikan agama, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami keberagaman yang ada dan memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Hal ini juga dapat membantu masyarakat membangun hubungan sosial yang lebih harmonis, memperkaya pengalaman serta pengetahuan, serta membangun rasa saling menghargai dan toleransi antar sesama.

Prioritas pembangunan ini akan didukung oleh Program Juara: Pendidikan Juara, dan Keagamaan Juara.

3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah (P3)

Penguatan sistem kesehatan daerah perlu dilakukan karena kesehatan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, masih banyak tantangan dalam sistem kesehatan di daerah, seperti rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan yang terbatas, adanya ancaman penyakit menular (Polio, AIDS, TBC, dan Malaria), serta keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dengan penguatan sistem kesehatan daerah, diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah. Penguatan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat

dalam pelayanan kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya.

Selain itu, penguatan sistem kesehatan daerah juga perlu dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antar sektor dan institusi terkait, seperti antara dinas kesehatan dengan pemerintah daerah, serta antara fasilitas kesehatan di daerah dengan pusat rujukan di kota besar. Hal ini dapat membantu memperkuat sistem rujukan dan memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan terintegrasi.

Dengan penguatan sistem kesehatan daerah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta membantu mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah.

Prioritas pembangunan ini akan didukung oleh Program Juara: Kesehatan Juara.

4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana (P4)

Perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana perlu ditingkatkan karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat atau bencana. Perlindungan sosial diperlukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti orang miskin, tuna daksa, orang dengan disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana perlu ditingkatkan untuk mengurangi kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana.

Penguatan sistem perlindungan sosial dapat dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas program-program perlindungan sosial, seperti program bantuan sosial, jaminan sosial, dan jaminan kesehatan. Selain itu, perlu juga ditingkatkan kualitas data dan sistem informasi yang terkait dengan program-program perlindungan sosial agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

Sementara itu, penguatan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, seperti melalui pelatihan keterampilan bertahan hidup dan pertolongan pertama pada korban bencana. Selain itu, perlu juga ditingkatkan koordinasi dan sinergi

antara berbagai instansi dan pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana, seperti antara dinas penanggulangan bencana, kepolisian, dan TNI.

Dengan penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana, diharapkan dapat meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi situasi sulit, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun kembali kehidupannya pasca bencana.

Prioritas Pembangunan ini akan didukung oleh Program Juara: Kesejahteraan Juara, dan Tenaga Kerja Juara.

5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa (P5)

Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa perlu dilakukan karena infrastruktur, lingkungan hidup, dan desa merupakan 3 (tiga) hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah yang akan membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di Jawa Barat.

Sementara itu, pengelolaan lingkungan hidup yang baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca, pengelolaan sampah yang baik, dan pengembangan energi terbarukan.

Gerakan membangun desa diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, serta meningkatkan pengembangan potensi lokal seperti usaha mikro, kehutanan, dan pariwisata.

Dengan pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan gerakan membangun desa yang kuat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di Jawa Barat. Hal ini akan membantu meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Jawa Barat dalam era globalisasi.

Prioritas Pembangunan ini akan didukung oleh Program Juara: Infrastruktur Juara, Lingkungan Juara, dan Gerbang Desa Juara.

6. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (P6)

Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah perlu dilakukan karena keduanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di Jawa Barat.

Inovasi pelayanan publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik dapat berupa penyediaan layanan secara digital, pelaporan layanan yang lebih mudah dan cepat, serta pelayanan yang lebih responsif dan efektif. Dengan inovasi pelayanan publik yang baik, diharapkan masyarakat akan merasa lebih terlayani dengan baik, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, penataan daerah diperlukan untuk mengatur dan memanfaatkan ruang secara optimal, sehingga memungkinkan terciptanya kawasan yang ramah lingkungan, nyaman, dan produktif. Penataan daerah yang baik juga dapat meningkatkan daya saing suatu wilayah, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan mempermudah aksesibilitas antar wilayah.

Dengan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah yang baik, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Hal ini juga akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.Prioritas Pembangunan ini akan didukung oleh Program Juara: Pemerintahan Juara.

Upaya transformasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk menjawab keenam prioritas pembangunan tersebut dilakukan dengan melanjutkan Program Juara yaitu:

Tabel 6.6
Tabel Sandingan Prioritas Pembangunan dengan Program Juara

No.	Prioritas Pembangunan	Program Juara
1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	a. Ekonomi Juara b. Pembiayaan Inovatif Juara
2	Pembangunan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	a. Pendidikan Juara b. Keagamaan Juara
3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	a. Kesehatan Juara
4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Resiko Bencana	a. Kesejahteraan Juara b. Tenaga Kerja Juara
5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengembangan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	a. Infrastruktur Juara b. Lingkungan Juara c. Gerbang Desa Juara
6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	a. Pemerintahan Juara

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, hasil analisis, 2023

Program Juara tersebut akan dilaksanakan dengan Program Nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pada Tabel 6.7 dibawah.

Tabel 6.7
Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Pembangunan
Tahun 2024-2026

NO	KODE PD/PP	Prioritas Pembangunan Daerah/Program Prioritas
	P1	**Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata**
1	3.29.03	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
2	3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3	3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
4	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
5	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
6	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor
7	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
8	3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
9	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
10	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
11	3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
12	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
13	3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
14	3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
15	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian
16	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
17	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
18	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
19	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
20	3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	KODE PD/PP	Prioritas Pembangunan Daerah/Program Prioritas
21	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
22	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan
23	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan
24	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
25	2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
26	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
27	2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
28	2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
29	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
30	2.17.08	Program Pengembangan UMKM
31	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
32	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata
33	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
34	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
35	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
36	2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
37	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
38	4 01 06	Program Perekonomian Dan Pembangunan
39	2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi
40	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
41	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal
42	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
43	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
44	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
45	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
46	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
47	4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
48	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49	4.01.03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
50	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
51	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
	P2	**Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama**
1	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
2	1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum
3	1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4	1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5	1.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
6	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial
7	1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
8	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
9	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
10	1.06.06	Program Penanganan Bencana
11	1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
12	5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
13	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
14	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan
15	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
16	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
17	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
18	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak

NO	KODE PD/PP	Prioritas Pembangunan Daerah/Program Prioritas
19	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk
20	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
21	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
22	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
23	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
24	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
25	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
26	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja
27	2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
28	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja
29	2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
30	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
31	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa
32	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
33	3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
34	2.13.02	Program Penataan Desa
35	2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
36	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
37	8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
38	8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
39	2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
40	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan
41	2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
42	2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman
43	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana
44	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan
	P3	**Penguatan Sistem Kesehatan Daerah**
1	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan
6	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak
	P4	**Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana**
1	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana
2	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
4	3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
5	3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
6	4.01.06	Program Perekonomian Dan Pembangunan
7	4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
8	5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
9	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan
10	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
11	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial
12	1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

NO	KODE PD/PP	Prioritas Pembangunan Daerah/Program Prioritas
13	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial
14	1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
15	1.06.06	Program Penanganan Bencana
	P5	**Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa**
1	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran
3	2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian
4	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6	1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
7	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
9	1.03.07	Program Pengembangan Permukiman
10	1.03.08	Program Penataan Pembangunan Gedung
11	1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
12	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan
13	1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
14	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
15	2.13.02	Program Penataan desa
16	2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa
17	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa
18	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
19	2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
20	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
21	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung
22	1.04.03	Program Kawasan Permukiman
23	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
24	2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong
25	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah
26	2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
27	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran
28	2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian
29	3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
30	3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
31	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
32	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
33	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
34	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
35	2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
36	2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
37	2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
38	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
39	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
40	1.03.04	Program Pengelolaan Persampahan Regional
41	3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
42	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan
	P6	**Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah**
1	4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat
2	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

NO	KODE PD/PP	Prioritas Pembangunan Daerah/Program Prioritas
3	4.02.01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi
4	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
5	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
6	4.01.05	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
7	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan
8	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
9	4.01.02	Program Penataan Organisasi
10	4.01.03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
11	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip
12	2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
13	2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip
14	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
15	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
16	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
17	3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
18	3.30.06	Program Perizinan Usaha Pertanian
19	4.01.07	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
20	5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
21	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
22	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
23	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah
24	5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
26	5.07.02	Program Pelayanan Penghubung
27	6.01.02	Program Pernyelenggaraan Pengawasan
28	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal
29	2.18.05	Progran Pengendalian Pelaksanaan Penaman Modal
30	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penaman Moodal
31	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
32	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
33	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
34	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
35	5.01.02	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
36	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
37	2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
38	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
39	4.01.02	Program Penataan Organisasi
40	4.01.07	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
41	5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
42	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
43	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
44	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk
45	2.12.03	Program Pencatatan Sipil
46	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
47	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023, diolah

Selain program prioritas yang diturunkan dari tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, ditetapkan program prioritas daerah yang bersifat *crosscutting* yaitu: penanganan *stunting*, penanganan kemiskinan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan penyakit menular, pembangunan pemuda, pemberdayaan gender dan perlindungan anak, penanganan pengangguran terbuka, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum, sebagaimana berikut:

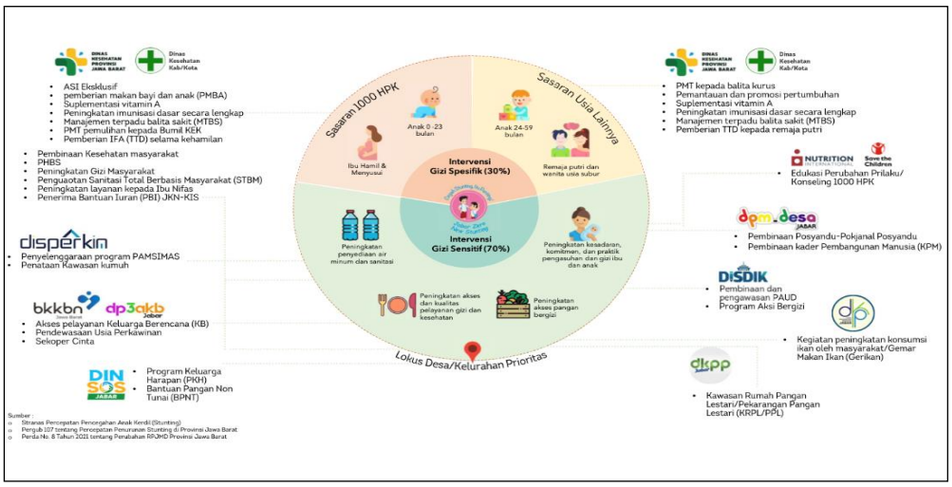
1. *Stunting*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020, Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Jawa Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu (1) konvergensi aksi penurunan *stunting* dan (2) intervensi prioritas pencegahan dan penanganan *stunting*. Konvergensi adalah upaya tata kelola untuk mewujudkan integrasi program dan kegiatan, lokasi, serta sasaran prioritas dalam percepatan penurunan *stunting*. Konvergensi dilaksanakan melalui:

a. Komitmen dan visi kepemimpinan daerah untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas dalam pembangunan daerah;
b. Kampanye dan promosi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat;
c. Konvergensi program pusat, daerah dan desa;
d. Ketahanan pangan dan gizi untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
e. Pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran

Upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya untuk memastikan dukungan program/kegiatan yang bersifat konvergensi. *Crosscutting* konvergensi peran antar perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 6.5
***Crosscutting* Peran Perangkat Daerah**
dalam Percepatan Penurunan *Stunting*



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah desa/kelurahan melakukan:

a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Upaya percepatan penurunan *stunting* di Daerah dilaksanakan melalui Aksi Konvergensi. Aksi Konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan intergrasi intervensi spesifik dan sensitif percepatan penurunan *stunting*. Aksi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat lebih efektif. Aksi konvergensi terdiri dari 8 (delapan) aksi yaitu :

a. Aksi 1 - Analisis Situasi;
b. Aksi 2 - Penyusunan Rencana Kegiatan;
c. Aksi 3 - Rembuk *Stunting;*
d. Aksi 4 - Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan *Stunting*;
e. Aksi 5 - Pembinaan Kader dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
f. Aksi 6 - Sistem Manajemen Data *Stunting;*
g. Aksi 7 - Pengukuran dan Publikasi *Stunting;*
h. Aksi 8 - Reviu Kinerja Tahunan.

2. Penanganan Kemiskinan

Program percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui peningkatan pendapatan, penurunan beban pengeluaran, dan minimalisasi wilayah kantong kemiskinan.

Peningkatan pendapatan dilakukan dengan memberdayakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), meningkatkan kapasitas Kredit Mesra, dan mengefektifkan Program Peningkatan Produksi Pertanian.

Penurunan Beban Pengeluaran dilakukan dengan meningkatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan APBD Provinsi, mengoptimalkan biaya operasional Pendidikan Daerah, memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal, memberikan bantuan pendidikan bagi siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), menyelenggarakan Operasi Pasar Murah (OPM), membantu pemasangan Instalasi Tenaga Listrik Rumah Sederhana, dan mengoptimalkan Belanja Bansos.

Upaya meminimalisasi wilayah kantong kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penataan kawasan permukiman kumuh, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan akses jalan, mengembangkan Kampung Caang, memberikan Subsidi Listrik, dan memperluas Pembangunan Jaringan Irigasi.

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pencapaian target TPB dilakukan melalui:

a. Pendampingan dan fasilitasi kepada Pemerintah kabupaten/kota, mulai dari perencanaan program/kegiatan sampai dengan monitoring dan evaluasinya.
b. Peningkatan keterlibatan masyarakat dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat yang kuat.
c. Peningkatan akses pada pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dan membuka akses pada pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi, serta memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan TPB.
d. Peningkatan akses pada teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor, dan dapat memberikan

solusi untuk tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini.

e. Penguatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pemerintah harus memperkuat kemitraan dengan semua pihak yang terlibat untuk mempromosikan implementasi TPB secara efektif dan terintegrasi. Penguatan kerjasama antarpemerintah maupun kabupaten/kota dengan Provinsi dalam pelaksanaan program/kegiatan.
f. Peningkatan akses pada keadilan sosial sebagai fokus utama dalam implementasi TPB, serta peningkatan akses yang setara pada sumber daya dan peluang bagi semua kelompok sosial, termasuk orang miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan minoritas.
g. Peningkatan peran Pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian target TPB sampai tingkat desa serta pengawalan pemanfaatan dana desa.

4. Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggulangan dan pencegahan penyakit AIDs, Tuberculosis dan Malaria serta Polio dilakukan dalam bentuk upaya yang konstruktif dan strategis untuk mengeliminasi penyakit dan *zero* penemuan kasus baru. Upaya tersebut dilakukan dengan koordinasi dan sinergitas yang melibatkan Perangkat Daerah terkait, Organisasi Profesi, Akademisi, Lintas Sektor/ Lintas Program dan pihak-pihak lain yang peduli pada percepatan eliminasi penyakit tersebut. Program penanggulangan penyakit menular Aids-Tuberculosis-Malaria (ATM) dilakukan melalui kinerja lintas sektor sebagaimana terlihat dalam Gambar 6.6 berikut ini :

Gambar 6.6
***Crosscutting* Penanggulangan Penyakit Menular AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM)**

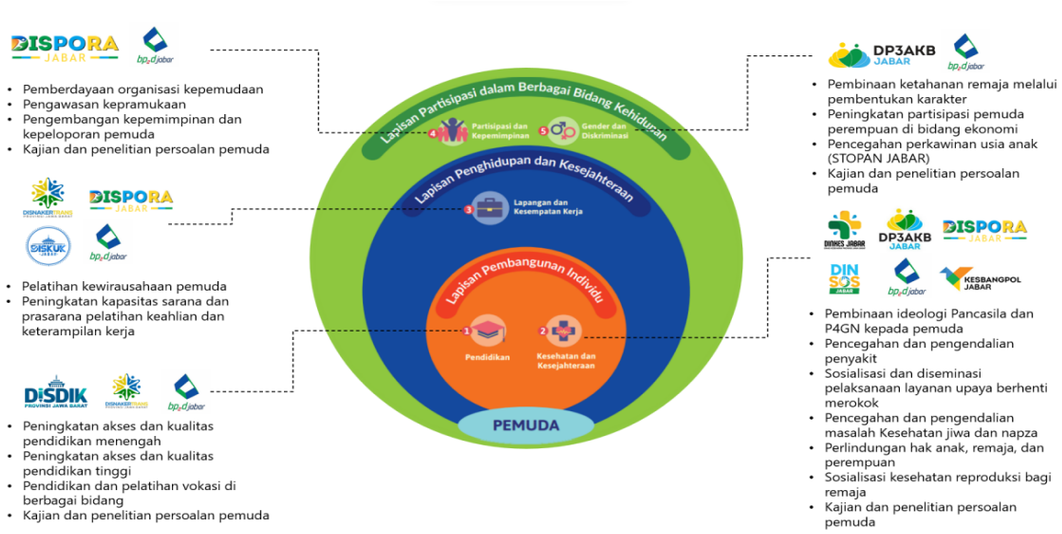


Sumber: Hasil pengolahan data dari Pemegang Sektor Urusan Kesehatan Bidang PPM Bappeda Jabar

5. Pembangunan Pemuda

Program pembangunan pemuda dilakukan melalui: a) penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; b) Penyusunan kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan c) Pelaksanaan kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Upaya peningkatan pembangunan pemuda dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya untuk memastikan dukungan program/kegiatan yang bersifat konvergensi. *Crosscutting* konvergensi peran antar perangkat daerah dapat dilihat pada Gambar 6.7 berikut ini.

Gambar 6.7
***Crosscutting* Peran Perangkat Daerah dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Pemuda**

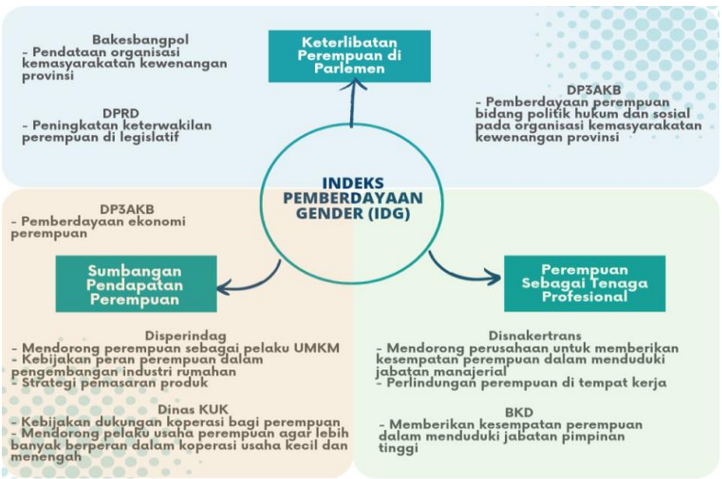


Sumber: Hasil pengolahan data dari Pemegang Sektor Urusan Pemuda dan Olahraga Bidang PPM Bappeda Jabar

6. Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak

Peningkatan pemberdayaan gender dilaksanakan melalui: a) Peningkatan keterlibatan perempuan di Parlemen; b) Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan; dan c) Peningkatan profesionalitas perempuan. Peningkatan pemberdayaan gender dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah sesuai kewenangannya untuk memastikan dukungan program/kegiatan yang bersifat konvergensi. *Crosscutting* konvergensi peran antar perangkat daerah dapat dilihat pada Gambar 6.8 berikut ini.

Gambar 6.8
***CrossCutting* Indeks Pemberdayaan Gender**



Sumber : Hasil pengolahan data dari Pemegang Sektor Urusan PPPA Bidang PPM Bappeda Jabar

Program perlindungan anak dilakukan melalui pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi Peningkatan Pemenuhan: a) Hak Sipil dan Kebebasan; b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; d) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan e) Perlindungan Khusus. Upaya tersebut dicapai melalui konvergensi yang melibatkan perangkat daerah sesuai kewenangannya. *Crosscutting* konvergensi peran antar perangkat daerah dapat dilihat pada Gambar 6.9 berikut ini.

Gambar 6.9
***CrossCutting* Indeks Perlindungan Anak**



Sumber: Hasil pengolahan data dari Pemegang Sektor Urusan PPPA Bidang PPM Bappeda Jabar

7. Penanganan Pengangguran Terbuka

Program penanganan pengangguran terbuka dilakukan melalui peningkatan investasi padat karya yang didukung tenaga kerja kompeten dan siap pakai dan peningkatan sektor ekonomi masyarakat dan usaha mandiri yang didukung oleh kompetensi pengusaha dan tenaga kerja lokal.

Peningkatan investasi padat karya yang didukung tenaga kerja kompeten dan siap pakai dilaksanakan dengan:

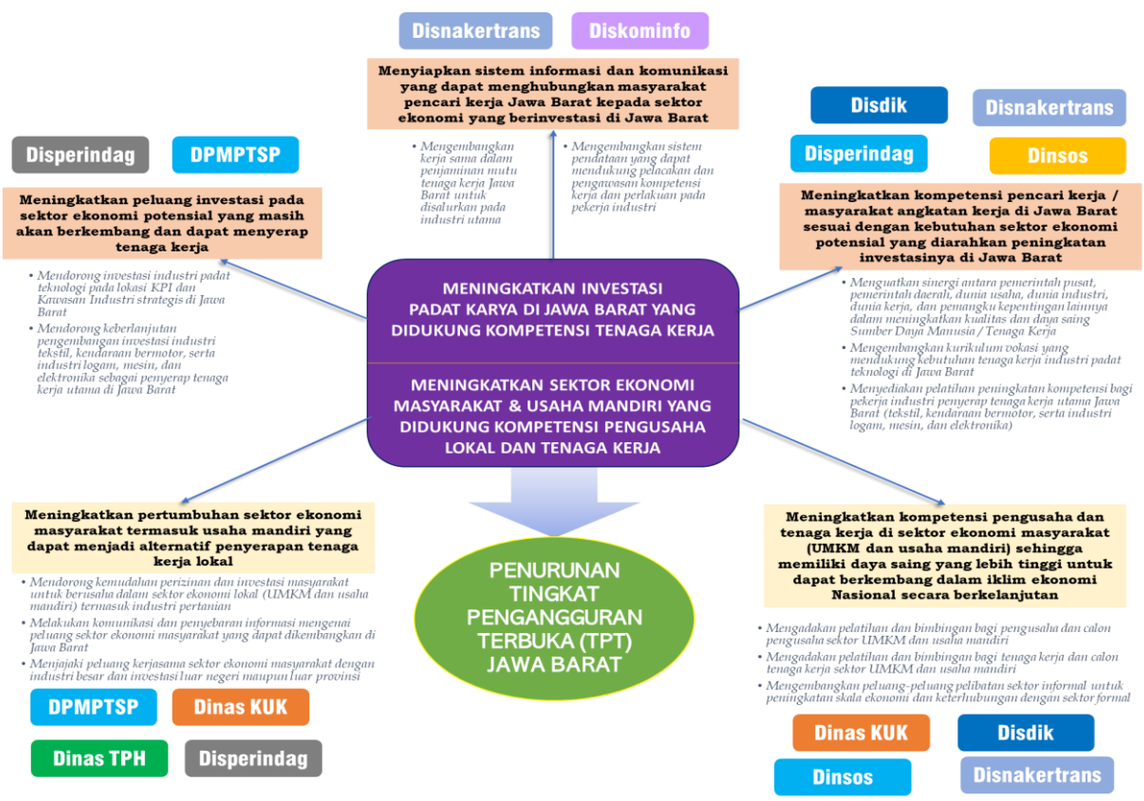
a. Meningkatkan peluang investasi pada sektor ekonomi potensial yang masih akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja, yaitu: 1) Mendorong investasi industri padat teknologi pada lokasi KPI dan Kawasan Industri strategis, dan 2) mendorong keberlanjutan pengembangan investasi industri tekstil, kendaraan bermotor, serta industri logam, mesin, dan elektronika sebagai penyerap tenaga kerja utama.
b. Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan masyarakat pencari kerja kepada sektor ekonomi yang berinvestasi, yaitu : 1) mengembangkan kerja sama dalam penjaminan mutu tenaga kerja untuk disalurkan pada industri utama dan 2) mengembangkan sistem pendataan yang dapat mendukung pelacakan dan pengawasan kompetensi kerja dan perlakuan pada pekerja industri
c. Meningkatkan kompetensi pencari kerja/masyarakat angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi potensial yang diarahkan peningkatan investasinya, yaitu: 1) menguatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja, 2) mengembangkan kurikulum vokasi yang mendukung kebutuhan tenaga kerja industri padat teknologi, dan 3) menyediakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pekerja industri penyerap tenaga kerja utama (tekstil, kendaraan bermotor, serta industri logam, mesin, dan elektronika)

Peningkatan sektor ekonomi masyarakat dan usaha mandiri yang didukung oleh kompetensi pengusaha dan tenaga kerja lokal dilaksanakan melalui:

a. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat termasuk usaha mandiri yang dapat menjadi alternatif penyerapan tenaga kerja lokal, yaitu: 1) mendorong kemudahan perizinan dan investasi masyarakat untuk berusaha dalam sektor ekonomi lokal (UMKM dan usaha mandiri) termasuk industri pertanian, 2) melakukan komunikasi dan penyebaran informasi mengenai peluang sektor ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan, 3) Menjajaki peluang kerjasama sektor ekonomi masyarakat dengan industri besar dan investasi luar negeri maupun luar provinsi.

b. Meningkatkan kompetensi pengusaha dan tenaga kerja di sektor ekonomi masyarakat (UMKM dan usaha mandiri) sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi untuk dapat berkembang dalam iklim ekonomi Nasional secara berkelanjutan, yaitu : 1) mengadakan pelatihan dan bimbingan bagi pengusaha dan calon pengusaha sektor UMKM dan usaha mandiri, 2) mengadakan pelatihan dan bimbingan bagi tenaga kerja dan calon tenaga kerja sektor UMKM dan usaha mandiri, 3) mengembangkan peluang-peluang pelibatan sektor informal untuk peningkatan skala ekonomi dan keterhubungan dengan sektor formal.

Gambar 6.10
Strategi *Crosscutting* TPT di Jawa Barat



Sumber: Pengolahan Roadmap TPT Jawa Barat 2023, Bappeda Jawa Barat

8. Ketahanan Pangan

Strategi dan arah kebijakan ketahanan pangan Jawa Barat diarahkan melalui ketersediaan pangan, penyediaan akses pangan, dan peningkatan pemanfaatan pangan. Pemenuhan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui penataan kawasan pertanian dan perikanan, konservasi wilayah perairan, optimalisasi lahan kritis, implementasi *smart farming*, regenerasi petani, penyediaan jaringan irigasi dan penguatan cadangan pangan, serta impor untuk pangan yang tidak dapat disediakan secara mandiri oleh Jawa Barat.

Akses pangan dilaksanakan melalui kebijakan stabilitas akses distribusi dan harga pangan dari tangan produsen sampai konsumen, selanjutnya diarahkan melalui peningkatan jaringan infrastruktur dalam distribusi pangan, penyediaan gudang penyimpanan, penyediaan jaringan irigasi, serta penyediaan sistem informasi yang berisi data produksi, data harga dan data mengenai kebutuhan pasar.

Peningkatan pemanfaatan pangan dilaksanakan melalui pemberian edukasi makanan sehat sejak dini, penganekaragaman konsumsi pangan, sosialisasi makanan sehat melalui pemberdayaan wanita, peningkatan konsumsi pangan berbahan baku lokal yang aman, sehat, bergizi dan seimbang sehingga terwujud penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan. *Crosscutting* konvergensi peran antar perangkat daerah dapat dilihat pada Gambar 6.11 berikut ini.

Gambar 6.11
Strategi *Crosscutting* Ketahanan Pangan di Jawa Barat



Sumber: Bappeda Jabar, 2023

9. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum

Program Citarum Harum didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Strategi penangan Citarum dilaksanakan melalui: Program yang dilaksanakan oleh Pokja: 1) Penanganan Lahan Kritis; 2) Penanganan Air Limbah Domestik; 3) Pengelolaan Limbah industri; 5) Pengelolaan Limbah Peternakan; 6) Riset dan Pengembangan; 7) Penanganan Keramba Jaring Apung; 8) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pariwisata;9) Pengendalian P{emanfaatan Ruang; 10) Penegakan Hukum; 11) Edikasi dan Pemnerdayaan Masyarakat; 12) Data informasi dan hubungan Masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa bahwa penyusunan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD (dalam hal ini RPD) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lebih lanjut, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyatakan bahwa penelaahan dokumen perencanaan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD (dalam hal ini RPD) mengandung makna mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara RPJPD dan RPJMD dengan RTRW.

Dengan demikian, program prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat yang dirumuskan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 ini juga perlu disesuaikan dengan amanat RTRW Provinsi Jawa Barat (Perda Nomor 9 Tahun 2022), utamanya dalam konteks spasial atau lokus programnya. Sinkronisasi antara program Prioritas RPD dengan indikasi program RTRWP utamanya perlu dipastikan untuk program-program spasial yang sifatnya mendukung perwujudan struktur ruang wilayah.

Program prioritas pembangunan disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD untuk periode Tahun 2024-2026 serta melalui penyelarasan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042 disajikan pada Tabel 6.8 di bawah ini.

Tabel 6.8
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
			Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**72,45**	**73,12**	**73,68**	**74,14**	**74,39**	**74,71**	**74,71**	
			Sasaran 1.1: Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	**Rata-Rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**8,61**	**8,78**	**8,91**	**9,03**	**9,16**	**9,29**	**9,29**	
				Harapan Lama Sekolah	**Tahun**	**12,61**	**12,62**	**12,69**	**12,75**	**12,82**	**12,88**	**12,88**	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase penurunan angka putus sekolah	Persen				0,11	0,11	0,11	0,11	Dinas Pendidikan
				Nilai Rata-Rata Kompetensi Literasi	Nilai				66,95	68,42	69,90	69,90	Dinas Pendidikan
				Nilai Rata-Rata Kompetensi Numerasi	Nilai				57,85	58,82	59,80	59,80	Dinas Pendidikan
1	1	4	PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Refleksi Guru	Indeks				63,5	65	66,5	66,5	Dinas Pendidikan
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	Poin		1,4899	1,4900	1,4901	1,4902	1,4903	1,4903	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				Pemerataan Tenaga Perpustakaan	Poin		0,0025	0,0026	0,0027	0,0028	0,0029	0,0029	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				Tingkat Kunjungan Pemustaka	Poin		0,4279	0,4280	0,4281	0,4282	0,4283	0,4283	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				Perpustakaan Berstandar Nasional Perpustakaan	Poin		2,1988	2,1989	2,1990	2,1991	2,1992	2,1992	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Sasaran 1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**	**73,23**	**73,52**	**73,71**	**73,90**	**74,10**	**74,29**	**74,29**	
				Prevalensi *Stunting*	**Persen**	**24,5**	**20,2**	**19,20**	**15,52**	**12,93**	**10,34**	**10,34**	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas kesehatan sesuai standar	Persen				67,24	73,50	79,77	79,77	Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi standar	Persen				55	55,1	55,2	55,2	Dinas Kesehatan

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				ketenagaan minimal di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah									
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai standar perizinan	Persen				92	93	94	94	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kab/kota dengan cakupan rumah tangga ber-PHBS >80%	Persen				70	75	80	80	Dinas Kesehatan
			Sasaran 1.3: Meningkatnya taraf hidup masyarakat	**Pengeluaran per kapita**	**Rp.000**	**10.934**	**11.277**	**11.390**	**11.504**	**11.619**	**11.735**	**11.735**	
				Persentase Penduduk Miskin	**Persen**	**8,43**	**7,98**	**7,41**	**7,34**	**7,13**	**7,00**	**7,00**	
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen				19,15	32,64	46,13	46,13	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen				100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa	Persen	99,28	99,58	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase penurunan jumlah perkawinan anak	Persen	100	100	100	5	5	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang berfungsi sosialnya kembali	Persen	117		100	90	92	94	94	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyaluran Bansos Bagi KPM	Persen	40		100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN KORBAN BENCANA	Persentase Korban Bencanayang Terpehuni Kebutuhan Dasar	Persen	100		100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	100		100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah mengikuti pelatihan min 24 JP	Persen				33,3	66,6	100	100	DKUK (UPTD P3W)
			Sasaran 1.4: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**Nilai**	**69,6**	**71,22**	**70,30**	**71,37**	**71,75**	**72,13**	**72,13**	
				Indeks Perlindungan Anak	**Angka**	**63,5**	**63,5***	**69,53**	**64,50**	**65,50**	**66,50**	**66,50**	
				Indeks Pembangunan Pemuda	**Poin**	**47,00**	**48,00**	**48,62**	**48,86**	**49,49**	**50,14**	**50,14**	
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	Persen	22,22	44,4	51,85	57,04	62,74	69,01	69,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Angka	4,54	5,23	1,88	6,77	6,7	6,63	6,63	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA									
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan penguatan untuk tahapan standarisasi di Jawa Barat	Persen				18,52	37,04	55,56	55,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Persen	66	74	100	79	84	89	89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi	Persen				100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	Angka	0,73	0,85	0,21	0,81	0,8	0,79	0,79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
				Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	31,97	17,93	17,93	18,11	18,20	18,29	18,29	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	Persen	40	72	57,86	72,72	73,09	73,45	73,45	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	2,69	3,1	3,1	3,84	4,27	4,75	4,75	
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	12,48	14,25	14,25	14,39	14,46	14,54	14,54	
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik	Persen	63	87		87,87	88,31	88,75	88,75	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	10	10		10	10	10	10	
				Persentase Medali Emas yang Diperoleh dalam Event Nasional	Persen	20	20	20	20	20	20	20	
			Sasaran 1.5: Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**Persen**	**1,41**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	**1,42**	
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	Persen	58,9	63	64,07	63,16	63,36	63,56	63,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase masyarakat yang terpapar program Kependudukan, Keluaga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen				75	80	85	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
			Tujuan 2: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**3,74**	**5,45**	**5,51**	**5,67**	**5,81**	**5,97**	**5,97**	
				Gini Ratio	**Poin**	**0,406**	**0,412**	**0,405**	**0,394**	**0,383**	**0,370**	**0,370**	
			Sasaran 2.1: Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	**Laju Pertumbuhan Sektor Industri**	**Persen**	**4,22**	**7,00**	**3,72**	**5,76**	**5,84**	**5,93**	**5,93**	
				Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	**Persen**	**3,19**	**4,22**	**4,45**	**4,53**	**4,85**	**5,23**	**5,23**	
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pertumbuhan Layanan SKA	Persen	4,39	1,52		2,83	2,75	2,68	2,68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perdagangan	Persen	8 (Pelaku Usaha)	16 (Pelaku Usaha)	N/A	100	100	100	100	
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkat Kualitasnya	Persen	1,73	3,45		5,19	5,75	6,25	6,25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan barang pokok	Persen	3,70	5,06		6,00	6,00	6,00	6,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna SKA	Milyar USD	12,46	13,56		10,45	10,50	10,54	10,54	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	88,53	93,11		90,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase barang beredar dan/atau jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	75,64	79,00		77,00	77,00	77,00	77,00	
				Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	81,58	72,47		73,00	73,00	73,00	73,00	
				Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon	Poin				4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	
				Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Agro Bandung	Poin				4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	
				Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap	Poin				4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Pelayanan UPTD BPSMB Logam Elektonika Karawang									
				Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Keramik, Tabung Gas Bogor	Poin				4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Nilai omset pelaku usaha yang terfasilitasi pemasaran produk dalam negeri	Persen	-	265.746.400 (Rupiah)	N/A	25	25	25	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai produksi Industri Pengolahan	Triliun Rupiah	-	1.076		1.120	1.164	1.211	1211	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pertambahan jumlah industri kecil menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam	Pelaku Usaha		35		30	35	40	40	
				Pertambahan jumlah industri kecil menengah baru yang dilayani Pada UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Pelaku Usaha	-170	597		100	110	120	120	
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Terhadap Izin Usaha Industri	Persen				>50	>50	>50	>50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan industri yang masuk SIINas	Persen				11,00	11,00	11,00	11,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Sasaran 2.2: Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	**Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**Persen**	**1,31**	**4,41**	**4,45**	**4,50**	**4,54**	**4,59**	**4,59**	
				Nilai Tukar Petani (NTP)	**Poin**	**97,84**	**99,75**	**104,52**	**101,67**	**102,64**	**103,61**	**103,61**	
				Skor Pola Pangan Harapan	**Poin**	**84,1**	**92,3**	**92,8**	**93,3**	**93,8**	**94,3**	**94,3**	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan	1	1		3	3	3	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Produksi Garam	Ton	79.361,90	65.554,34		66.000	67.000	68.000	68.000	
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	280.030	267.469		268.000	269.000	270.000	270.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.233.563,96	1.203.344,43		1.233.000	1.233.500	1.234.000	1.234.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	Persen	87,8	87,54		85	85	85	85	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah unit pengolahan ikan skala menengah dan besar	Unit	68	70		74	76	78	78	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	57,41	57,73		65,26	65,71	66,16	66,16	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	101,36	93,80		139,04	139,72	140,31	140,31	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	Persen	90,16	90,25		86,00	86,59	88,00	88	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	1.776.697	1.840.858		1.975.946	1.983.690	1.991.434	1.991.434	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	336.992	248.937		228.623	231.237	234.278	234.278	
				Indeks Pertanaman (IP)	Persen	2,1	2,07		2	2,01	2,02	2,02	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	Persen	29.4	31.84		25	25	25	25	Dinas Perkebunan
				Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi	Persen	29.4	31,84		10	15	20	20	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				sarana pengolahan Perkebunan									
				Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi promosi produk Perkebunan	Persen	29.4	31,84		10	15	20	20	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	Persen	20	133,33		20	20	20	20	Dinas Perkebunan
				Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana pascapanen dan pengolahan produk Perkebunan	Persen				10	10	10	10	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan tingkat kelahiran ternak	Persen				1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Penataan Prasarana Peternakan	Persen	26	29,47	90	33,3	66,7	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persen	31,46	31,45	30,00	5	5	5	5	Dinas Kehutanan
				Persentase Peningkatan Pengeloala Jasa Lingkungan Hutan yang produktif	Persen	- 11,20	85,21	10,00	5	5	5	5	
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitasnya	Persen				5	5	5	5	Dinas Kehutanan
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah mengikuti pelatihan min 24 JP	Persen				33,3	66,6	100	100	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (UPTD P3W)
				Persentase UMKM Yang Berpotensi Ekspor	Persen				11	22	30	30	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan	Persen	42,36	52,17	50	50	50	50	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Pangan yang Diintervensi	Persen	4	4	10	3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	Persen	26,84	26,91		25	25	25	25	Dinas Perkebunan
3	27	3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah petani yang menerapkan teknologi melalui pendampingan penyuluh	Orang	N/A	N/A		7.000	7.200	7.400	7.400	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
				Persentase Kelompok Tani yang dibina oleh Penyuluh	Persen	52,63	99,00		56,15	72,70	94,17	94,17	
				Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	Persen	20,73	45,72		18,18	36,37	45,47	45,47	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	89,27	89,55		89,60	89,70	89,80	89,80	
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.233.563.96	1.203.344.43		1.233.000	1.233.500	1.234.000	1.234.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	Persen	4,46	1,47		4,5	4,5	4,5	4,5	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan	Persen	N/A	100		100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Laju peningkatan area lahan perkebunan yang terfasilitasi penanganan	Persen	25	65		20	20	20	20	Dinas Perkebunan

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				dan pengendalian bencana perkebunan									
				Laju Peningkatan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Persen	25	65		25	25	25	25	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Perkebunan Besar Berizin Usaha yang Terbina dan Terawasi	Persen	50	66.67		20	25	30	20	Dinas Perkebunan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular	Persen	64	91,72	5	86	87	88	88	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pelaku usaha peternakan dengan produktivitas yang meningkat kinerjanya	Persen	25	25	25	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Sasaran 2.3: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	**Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	**Persen**	**-0,04**	**11,27**	**3,12**	**3,19**	**3,28**	**3,28**	**3,28**	
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengelolaan Warisan Budaya	Persen	18,47	56,65		28,98	33,47	37,55	37,55	Dinas Priwisata dan Kebudayaan
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Penanganan Cagar Budaya	Persen	19,13	27,23		33,33	33,33	33,33	33,33	Dinas Priwisata dan Kebudayaan
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	19,51	24,39		40	60	80	80	Dinas Priwisata dan Kebudayaan
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Nusantara	Persen	28,57	23,81		27,27	31,82	40,91	40,91	Dinas Priwisata dan Kebudayaan
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Persen	22,22	25,93		26,42	35,22	38,36	38,36	Dinas Priwisata dan Kebudayaan

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
			Sasaran 2.4: Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB**	**Triliun Rupiah**	**501,52**	**511,55**	**521,78**	**532,22**	**542,86**	**553,72**	**553,72**	
				Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	**Persen**	**21,67**	**21,62**	**22,00**	**23,34**	**23,92**	**24,52**	**24,52**	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	**Persen**	**9,82**	**8,31**	**8,13**	**8,01**	**7,88**	**7,76**	**7,76**	
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat untuk Investasi	Investor				12	12	12	12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Izin Yang Sesuai Standar	Persen	65	70		100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengaduan dan Permohonan Advokasi yang terlayani sesuai standar	Persen				100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal	Persen	58,86	14,73		15,5	16	16,5	16,5	
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	Persen				10	10	10	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan PMPTSP yang memanfaatkan Sistem Informasi	Persen				100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase dokumen data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	Persen	80	84		100	100	100	100	
				Persentase perubahan untuk mendukung implementasi RB,ZI, kinerja PPB dan MCP	Persen				100	100	100	100	
				Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Yang Sesuai Ketentuan	Persen				100	100	100	100	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah mengikuti pelatihan min 24 JP	Persen				33,3	66,6	100	100	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (UPTD P3W)
				Persentase UMKM Yang Berpotensi Ekspor	Persen				11	22	30	30	
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Unit Usaha Umkm Yang Difasilitasi Pemasaran	Persen				22	44	66	66	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri.	Persen	36,76	51,49	88,3	48,30	48,30	48,30	48,30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	91,93	86,25	90	90	91	92	92	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	22,92	20	20	20,15	20,2	20,25	20,25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	31,97	17,93	17,93	18,11	18,20	18,29	18,29	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	Persen	40	72	57,86	72,72	73,09	73,45	73,45	
				Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	2,69	3,1	3,1	3,84	4,27	4,75	4,75	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	12,48	14,25	14,25	14,39	14,46	14,54	14,54	
			Tujuan 3: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	**Indeks Williamson**	**Poin**	**0,667**	**0,670**	**0,669**	**0,667**	**0,666**	**0,664**	**0,664**	
			Sasaran 3.1: Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	**Tingkat Konektivitas***	**Persen**	**43,51**			**57,00**	**60,00**	**63,00**	**63,00**	
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pengguna Angkutan umum transportasi darat	Persen			3,00	6,00	9,00	12,00	12,00	Dinas Perhubungan
				Persentase kendaraan umum yang diawasi	Persen		60,00	60,50	61,00	62,00	63,50	63,50	
				Persentase perusahaan angkutan umum yang mempunyai sertifikat SMK	Persen		1,29	1,80	4,37	6,94	12,08	12,08	
				Persentase fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang terpasang	Persen		37,07	39	39,85	40,25	40,65	40,65	
				Persentase Terminal yang sesuai standar	Persen		7,14	7,14	14,29	21,43	28,57	28,57	
				Presentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah I	Persen		91,20	91,70	92,20	92,70	93,20	93,20	
				Presentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah II	Persen		89,20	89,70	90,20	90,70	91,20	91,20	
				Presentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah III	Persen		87,20	87,70	88,20	88,70	89,20	89,20	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Presentase Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah IV	Persen		92,80	93,30	93,80	94,30	94,80	94,80	
				Persentase pemanfaatkan ICT untuk peningkatan layanan LLAJ	Persen		9,00	9,00	18,00	18,00	27,00	27,00	
				Persentase Data dan Informasi LLAJ yang tersedia	Persen		28,57	28,57	42,86	57,14	71,43	71,43	
2	15	3	PROGRAM PELAYARAN	Persentase pengguna Angkutan Umum ASDP	Persen			3	6	9	12	12,00	Dinas Perhubungan
				Persentase rencana persiapan pengelolaan pelabuhan laut	Persen		40	50	60	80	100	100,00	
				Persentase angkutan penumpang ASDP yang sesuai standar keselamatan	Persen		2,52	10,06	24,25	34,31	44,37	44,37	
				Persentase prasarana pelabuhan yang sesuai standar	Persen			10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	
				Persentase Kepuasan Masyarakat pada UPTD PPP LLASDP	Persen		85,80	86,30	86,80	87,30	87,80	87,80	
				Persentase Data Pelayaran yang tersedia	Persen		25	25	37,5	50	62,50	62,50	
2	15	5	PROGRAM PERKERETAAPIAN	Persentase penumpang Kereta Api	Persen			2,56	4,06	5,53	7,00	7,00	Dinas Perhubungan
				Persentase dukungan kebijakan teknis penyelenggaraan perkeretaapian	Persen		33,33	65,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
				Persentase Data Perkeretaapian dan Penerbangan yang tersedia	Persen		80	80	80,00	80,00	100,00	100,00	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
			Sasaran 3.2: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	**Indeks Kualitas Infrastruktur***	**Persen**	**59,58**			**75,91**	**76,57**	**77,28**	**77,28**	
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	52,83	48,21	49,00	49,84	50,71	51,63	51,63	Dinas Sumber Daya Air
				Persentase SITU yang Terpelihara	Persen	11,19	11,43	10,95	11,43	11,67	11,79	11,79	
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat	Persen		10,25	11,79	13,56	15,59	17,93	17,93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas I Cianjur	Persen		12,46	14,33	16,48	18,96	21,80	21,80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas II Bogor	Persen		3,83	4,40	5,06	5,82	6,69	6,69	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas III Purwakarta	Persen		16,08	18,49	21,27	24,46	28,12	28,12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas IV Bandung	Persen		17,89	20,57	23,66	27,21	31,29	31,29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah	Persen		6,82	7,84	9,02	10,37	11,93	11,93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Cabang Dinas V Sumedang									
				Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen		1,02	1,17	1,35	1,55	1,79	1,79	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas VII Cirebon	Persen		13,66	15,70	18,06	20,77	23,88	23,88	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Meningkatnya Pengujian Kualitas Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat	Persen		52,50	55	57,50	60	62,50	62,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Persen	50	50	50	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan di Perkotaan	Persen				76	77	78	78	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola Di 3 TPA/TPST Regional	Persen	56,34	72,03	100	50	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
				Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	KM	1.939,216	1.954,3	1.979,18	2.137,77	2.158,09	2.175,57	2.175,57	
				Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	Persen	13,23	19,34	24,9	34,42	39,17	48,26	48,26	
1	3	11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan terfasilitasi PSU	Persen	71,83	77,58	49,63	53,26	56,88	60,50	60,50	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan bidang tata ruang	Persen				66,7	83,3	100	100	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
				Persentase sinkronisasi RTR kabupaten/kota	Persen				32	55	81	81	
				Persentase penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Persen				60	80	100	100	
				Presentase Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	Persen				70	85	100	100	
				Persentase kawasan yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang	Persen				70,40	85,20	100	100	
3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase pemenuhan Tingkat Mutu Pelayanan	Persen				60	80	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				penyediaan tenaga listrik kewenangan Provinsi									
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen				65	70	75	75	
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen				65	70	75	75	
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen				65	70	75	75	
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen				65	70	75	75	
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen				65	70	75	75	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen				65	70	75	75	
				Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen				65	70	75	75	
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat	Persen				33	66	100	100	
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen			1,09	33,00	66,00	100	100	
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen			0,13	33	66	100	100	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen			0,02	33	66	100	100	
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen			0,81	33	66	100	100	
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen			0,30	33	66	100	100	
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen			1,66	33	66	100	100	
				Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persen			0,37	33	66	100	100	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon									
			Sasaran 3.3: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	**Persentase rumah tangga hunian layak**	**Persen**	**53,14**	**53,37**	**53,90**	**54,47**	**55,24**	**55,91**	**55,91**	
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	Persen	50	50	50	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Akses Air Minum layak	Persen		93,04	98,37	94	95	96	96	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	Persen	0	0	0	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Akses Sanitasi layak	Persen	71,66	74,02	86,79	75	76	77	77	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	11	11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan di Perkotaan	Persen		~~74,03~~	~~79~~	76	77	78	78	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	3	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola Di 3 TPA/TPST Regional	Persen	56,34	72,03	100	50	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas genangan yang tertangani	Persen	50,31	65,77	77,00	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	Rasio	85,63	93,45	67,50	0,2	0,4	0,6	0,6	Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
			Sasaran 3.4: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**62,69**	**64,66**	**61,60**	**66,13**	**67,00**	**67,78**	**67,78**	
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Pembangunan yang Sudah terintegrasikan dengan rencana pembangunan lingkungan hidup	Persen	80	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Taman Kehati atau RTH Kehati yang dibina	Persen				100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	Persen	50	80	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai dan diawasi implementasinya	Persen	70	187,5	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan	Persen	72,70	100	100	100	100	100	100	Dinas Kehutanan
				Persentase Lahan Kritis yang ditangani	Persen	6,7	4,99	5,00	3,0	3,0	3,0	3,0	Dinas Kehutanan
				Persentase Gangguan dan Kerusakan Hutan di Jawa Barat yang ditangani	Persen	0,10	0,19	0,50	0,40	0,30	0,20	0,20	Dinas Kehutanan
				Persentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	2,5	1,59	-	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Kehutanan
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Peningkatan Tumbuhan dan Satwa Liar Non Appendix yang Ditangkarkan	Persen	3,75		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Dinas Kehutanan

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
3	28	6	PROGRAM PENGELOLAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Luas Wilayah Daerah Aliran Sungai yang sudah dipulihkan	Persen	49,09	49,09		53,1	57,1	61,1	61,1	Dinas Kehutanan
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan	1	1		3	3	3	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Produksi Garam	Ton	79.361,90	65.554,34		66.000	67.000	68.000	68.000	
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATU BARA	Persentase Usaha Pertambangan yang Menerapkan Aspek Teknis	Persen	48,33	48,33	48	53,50	56	58,50	58,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Usaha Pertambangan yang Menerapkan Aspek Pengusahaan	Persen	58,51	62,41	60	61	62	63	63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Usaha Pertambangan yang Menerapkan Aspek Pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	59,42	62,32	60	61	62	63	63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Usaha Pertambangan yang Menerapkan Aspek Pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	58,06	64,52	60	61	62	63	63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Usaha Pertambangan yang Menerapkan Aspek Pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	52,38	61,9	60	61	62	63	63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Usaha Pertambangan yang Menerapkan Aspek Pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas	Persen	62,73	60	60	61	62	63	63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				ESDM Wilayah IV Bandung									
				Persentase Usaha Pertambangan yang Menerapkan Aspek Pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	56,25	63,64	60	61	62	63	63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Usaha Pertambangan yang Menerapkan Aspek Pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	61,9	65	60	61	62	63	63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Usaha Pertambangan yang Menerapkan Aspek Pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	58	59,46	60	61	62	63	63	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase Kualitas Bahan Tambang	Persen	41,33	50,22	60	70	80	90	90	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Sasaran 3.5: Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	**Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**	**Persen**	**4,23**	**5,86**	**6,10**	**7,11**	**7,72**	**7,98**	**7,98**	
				Indeks Risiko Bencana	**Poin**	**134,94**	**131,69**	**130**	**129**	**128**	**127**	**127**	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	57,41	57,73	58,76	65,26	65,71	66,16	66,16	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	101,36	93,80	90,34	139,04	139,72	140,31	140,31	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	Persen	90,16	90,25	82,21	86,00	86,59	88,00	88	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	1.776.697	1.840.858	1.892.521	1.975.946	1.983.690	1.991.434	1.991.434	
				Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	336.992	248.937	199.271	228.623	231.237	234.278	234.278	
				Indeks Pertanaman (IP)	Persen	2,1	2,07	2	2	2,01	2,02	2,02	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										Dinas Perkebunan
				Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	Persen			-	25	25	25	25	
				Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana pengolahan Perkebunan	Persen			-	10	15	20	20	
				Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi promosi produk Perkebunan	Persen			-	10	15	20	20	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	Persen			-	20	20	20	20	Dinas Perkebunan
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	persen				100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Peresentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	persen				100	100	100	100	
				Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan pada saat keadaan Darurat Bencana	persen				100	100	100	100	
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Penurunan Parameter COD (mg/L)	Mg/L	23,49	25,13		24,87	24,74	24,61	24,61	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
			KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
				Penurunan konsentrasi parameter SO2	µg/m3	11,87	10,56		21,2	20,6	20	20	
				Parameter Pengujian Kualitas Air yang Terakreditasi	Persen	29	32		38	41	43	43	
				Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajemen Laboratorium	Persen	100	100		100	100	100	100	
				Parameter Pengujian Kualitas Udara Ambien yang Terakreditasi	Persen				44	88	100	100	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola Di 3 TPA/TPST Regional	Persen	56,34	72,03	100	50	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase pemanfaatan EBT	Persen				33	67	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen				33	67	100	100	
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen				33	67	100	100	
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen				33	67	100	100	
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen				33	67	100	100	
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen				33	67	100	100	
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja	Persen				33	67	100	100	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Cabang Dinas VI Tasikmalaya									
				Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen				33	67	100	100	
				Persentase komoditas EBT yang diuji atau dikembangkan	Persen				33	67	100	100	
			Sasaran 3.6: Meningkatnya pemerataan pembangunan di Wilayah Perdesaan	**Indeks Desa Membangun**	**Poin**	**0,72**	**0,7529**	**0,72**	**0,77**	**0,78**	**0,79**	**0,79**	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang difasilitasi penataannya	Persen	99	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama Antar Desa Kewenangan Provinsi yang Terfasilitasi	Persen	98,06	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mendapat fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	Persen	99,43	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa	Persen	98,06	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Tujuan 4: Terciptanya demokrasi dan bikrokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat**	**Poin**	**79,72**	**N/A**	**72,29**	**82,14**	**82,96**	**83,79**	**83,79**	
				Indeks Reformasi Birokrasi	**Poin**	**BB**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	
			Sasaran 4.1: Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat**	**Poin**	**79,72**	**N/A**	**81,32**	**82,14**	**82,96**	**83,79**	**83,79**	
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi Pancasila dan	Persen		0.0109		0,409	0,414	0,439	0,439	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				wawasan kebangsaan beragama									
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peserta (pemilih) yang mengikuti pendidikan politik	Persen		0,007		0,007	0,007	0,007	0,007	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen		44,16		46,42	47,78	49,83	49,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase Kerjasama Lembaga antar umat beragama	Persen		29,41		35,29	41,18	47,06	47,06	
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi	Persen		0,037		0,039	0,041	0,043	0,043	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase pencegahan pengguna narkotika bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen		5,165		5,422	5,678	5,934	5,934	
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen		100		100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyusunan Peraturan Daerah dan pelaksanaan publikasi	Persen				100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Persentase penyusunan persetujuan anggaran dan pengawasan APBD	Persen				100	100	100	100	
				Persentase penyusunan pembangunan berdasarkan penjaringan aspirasi	Persen				100	100	100	100	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
			Sasaran 4.2: Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**BB**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen				93	94	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Hasil Pengukuran Kinerja yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen				80	85	90	90	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persen				93	94	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3		Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen				80	85	90	90	
				Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persen				93	94	95	95	
				Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen	Persen				80	85	90	90	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				perencanaan perangkat daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam									
				Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persen				93	94	95	95	
				Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen				80	85	90	90	
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat beserta Pergub Penjabarannya	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Persen	100	100		100	100	100	100	
				Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Pajak yang tepat waktu	Status	N/A	N/A		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
				Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
				Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan Perubahan APBD	Persen	100	100		100	100	100	100	

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				yang dievaluasi/ disahkan									
				Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dievaluasi/disahkan tepat waktu	Persen	100	100		100	100	100	100	
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Persen	91		90	76,65	76,70	76,75	76,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Diskominfo	Persen		100		100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen		23,68		30	40	50	50	
				Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	Persen	36	50	60	70	75	80	80	
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	persen		100		100	100	100	100	Inspektorat, Biro Organisasi

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Nilai SAKIP komponen evaluasi internal	Nilai		8,56		9	9	10	10	
				Persentase kriteria LKPD yang terpenuhi sesuai ketentuan	persen		100		100	100	100	100	
				Penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	persen		65		68	70	75	75	
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti	persen		93		95	98	100	100	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Perangkat Daerah		38		38	38	38	38	Inspektorat
				Persentase nilai MCP	Persen		98,85		98,90	99	99,10	99,10	
5	02	2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen				4,83	-24,47	3,94	3,94	Badan Pendapatan Daerah
1	05	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	persen	73	87,2	90	96	98	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Pemberdayaan Satgas Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen				75	80	90	90	
				Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Peraturan Gubernur yang terselesaikan	persen				50	60	80	80	
				Persaentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang mendapatkan Pelatihan	persen				82	92	100	100	
5	03	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan	Poin	113	116.5	120	117,5	117,5	120	120	Badan Kepegawaian Daerah

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian									
				Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Poin	40	40	40	40	40	40	40	
				Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	102.5	120	110	120	120	120	120	
				Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	120	120	120	120	120	120	120	
				Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin	14,4	21,63		12,5	13	13,5	13,5	
				Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin	10,74	28		27,5	28	28,5	28,5	
				Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin	4,99	4,99		4,99	4,99	4,99	4,99	
5	04	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial	Persen				30	75	100	100	Badan Pengembangan Sumbed Daya Manusia
				Persentase peningkatan Kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional	Persen				30	75	100	100	
				Persentase implementasi CorPu yang di audit	persen				100	100	100	100	
5	07	2	Program Pelayanan Penghubung	Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol, Promosi dan Informasi yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penghubung
			Sasaran 4.3: Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	**Indeks Inovasi Daerah**	**Poin**	**62,82**	**69,15 (Sangat Inovatif)**	**69,35 (Sangat Inovatif)**	**69,65 (Sangat Inovatif)**	**70,15 (Sangat Inovatif)**	**70,65 (Sangat Inovatif)**	**70,65 (Sangat Inovatif)**	
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang siap untuk didiseminasikan	Persen				100	100	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
				Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang siap untuk didiseminasikan	Persen				100	100	100	100	
				Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang siap untuk didiseminasikan	Persen				100	100	100	100	
				Persentase Hasil Kelitbangan yang didiseminasikan	Persen				100	100	100	100	
				Persentase Perlindungan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi	Persen				100	100	100	100	
				Persentase Inovasi Daerah yang terverifikasi	Persen				100	100	100	100	
				Persentase publikasi kelitbangan	Persen				100	100	100	100	

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

6.4 Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Provinsi

Proyek Strategis Nasional (PSN) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk itu telah terbit Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Adapun PSN yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Jalan Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan.
2. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Provinsi Jawa Barat Padalarang.
3. Jalan Tol Serpong – Cinere.
4. Jalan Tol Cinere – Jagorawi.
5. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung.
6. Jalan Tol Cibitung – Cilincing.
7. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu.
8. Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan.
9. Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Provinsi Jawa Barat Bojonggede - Salabenda).
10. Jalan Tol Bogor *Ring Road* (termasuk Caringin - Provinsi Jawa Barat Salabenda).
11. Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap Provinsi Jawa Barat dan (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Provinsi Jawa Tengah Gedebage - Tasikmalaya).

12. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban.
13. Pembangunan Pelabuhan Patimban.
14. Kereta Api Jakarta – Surabaya.
15. *Double Track* Jawa Selatan.
16. *High Speed Railway* Jakarta – Bandung.
17. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ *Light Rail* Provinsi DKI Jakarta Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat Bogor, Depok, dan Bekasi.
18. *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta *East - West* Provinsi OKI Jakarta, Phase I.
19. Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya
20. Bendungan Kuningan.
21. Bendungan Ciawi.
22. Bendungan Sukamahi.
23. Bendungan Leuwikeris
24. Bendungan Cipanas
25. Bendungan Sadawarna.
26. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang
27. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Barat Jatigede.
28. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Barat Jatigede.
29. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Barat Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II
30. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Barat dan Jatiluhur.
31. Tanggul Pantai.
32. *Upgrading* Kilang Eksisting (ROMP) dan Industri Provinsi Jawa Barat Petrokimia Balongan.
33. Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Provinsi Jawa Barat - Cirebon - Semarang dan Ruas KEK Sei Provinsi Jawa Tengah Mangkei - Dumai).
34. Pembangunan Bahan Bakar Hijau (*Green Diesel* Provinsi Jawa Tengah, *Bio Refinery Revamping* dan Hidrogenasi CPO Provinsi Sumatera RU IV Cilacap, *Green Refinery* RU III Plaju, Selatan, dan Provinsi Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek).
35. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024-2026, ditetapkan beberapa proyek strategis. Proyek-proyek strategis ini pada dasarnya merupakan proyek-proyek yang memiliki nilai strategis dan berdaya ungkit, yang ditetapkan sebagai pengejawantahan dari tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan untuk membuat RPD lebih konkrit dalam menjawab isu-isu pembangunan, agar nantinya manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Proyek strategis di Provinsi Jawa Barat menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD, KPBU, dan swasta. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Barat mendorong keterlibatan berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, proyek strategis dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan *(readiness criteria)*. Hal ini untuk memastikan proyek dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Daftar proyek strategis beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.9
Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

NO	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				2024		2025		2026		KETERANGAN
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	
I	**PROYEK STRATEGIS NASIONAL**											
1.1	**Sektor Jalan dan Jembatan**											
1	Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (54km)	√		√		√	√	√	√			
2	Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang (28 km)	√		√	√							Belum ada Info kapan di mulai
3	Jalan Tol Ciranjang-Padalarang (33 km)			√	√							Belum ada Info kapan di mulai
4	Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok - Antasari (21,54km);				√	√	√					
5	Penambahan Lingkup Jalan Tol Bogor *Ring Road* (11km)	√		√	√	√	√					
6	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan (64km)			√	√	√	√					
7	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya-Cilacap	√				√	√	√	√	√	√	Target Operasi Tw II 2024 (segmen Gedebage - Tasikmalaya)
8	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	√				√	√					
9	Pembangunan Jalur Sarangpanjang - Cipeundeuy	√	√			√	√	√	√	√	√	Pembiayaan APBN melalui DAK
10	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan	√	√			√	√	√	√	√	√	Pembiayaan APBN melalui DAK
1.2	**Sektor Kereta**											
1	*Double Track* Jawa Selatan	√				√	√	√	√	√	√	
2	Kereta Api Jakarta-Surabaya	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ *Light Rail*				√	√	√	√	√	√	√	
4	*Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta *East West Phase* 1	√	√			√	√	√	√	√	√	
5	Reaktivasi Jalur KA. Cianjur-Padalarang	√	√			√	√	√	√	√	√	
6	Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut-Cikajang	√	√			√	√	√	√	√	√	
7	*Double Track* Bogor-Sukabumi	√			√	√	√	√	√	√	√	
8	*Double Track* lintas Padalarang-Bandung-Cicalengka	√				√	√	√	√	√	√	
1.3	**Sektor Perumahan**											
1	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	√	√			√	√	√	√	√	√	

NO	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				2024		2025		2026		KETERANGAN
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	
1.4	**Sektor Pelabuhan**											
1	*Inland Waterways* Cikarang – Bekasi Laut Jawa (CBL)				√	√	√	√	√	√	√	
2	Pelabuhan Patimban	√				√	√	√	√	√	√	
1.5	**Sektor Air Bersih dan Sanitasi**											
1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
2	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	SPAM Pangandaran (Pusat Pertumbuhan)	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
4	SPAM Perkotaan Palabuhanratu	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
5	SPAM Sadawarna	√	√	√				√	√	√	√	
1.6	**Sektor Bendungan dan Irigasi**											
1	Bendungan Cibeet	√				√	√	√	√	√	√	
2	Bendungan Cijurey	√				√	√	√	√	√	√	
1.7	**Sektor Tanggul Pantai**											
1	Tanggul Pantai	√				√	√	√	√	√	√	
1.8	**Infrastruktur Energi**											
1	Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	√			√	√	√	√	√	√	√	
2	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon-Semarang)	√			√	√	√	√	√	√	√	
3	Pembangunan Bahan Bakar Hijau Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	√			√	√	√	√	√	√	√	
1.9	**Sektor Teknologi**											
1	Percepatan Pembangunan *Technopark*	√				√	√	√	√	√	√	
2	Pengembangan Drone *Male* Kombatan (*Male Unmaned Combat Aerial Vaehicle)*	√				√	√	√	√	√	√	
3	Pengembangan Teknologi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang teritegrasi dengan Kebun Rakyat	√				√	√	√	√	√	√	
1.1	**Infrastruktur Pendidikan**											
1	Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	√				√	√	√	√	√	√	
2	Pembangunan Kampus II POLMAN Majalengka	√	√			√	√	√	√	√	√	
3	Pembangunan Kampus ITB Cirebon	√	√			√	√	√	√	√	√	

NO	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				2024		2025		2026		KETERANGAN
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	
II	**INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAERAH**											
2.1	**Jalan Tol**											
1	*Bandung Intra Urban Toll Road* (BIUTR) (27,3km)	√			√	√	√	√	√	√	√	
2.2	**Jalan Strategis**											
1	Jalan Lingkar Soreang - Ciwidey (11,69 km)	√				√	√	√	√	√	√	
2	Jalan Lingkar Kuningan (13,7km)	√				√	√	√	√	√	√	
3	Jalan khusus Tambang Parung Panjang (15 km)				√	√	√	√	√	√	√	
4	Pembangunan Jalan Pendukung Sentra Ekonomi		√		√	√	√	√	√	√	√	Sentra Ekonomi, Kawasan Industri, Sentra Wisata dengan Daya Ungkit Besar Bagi Pengembangan Daerah
	Pembangunan *Fly Over*:											
1	- *Fly over* Buah Batu- Kiaracondong Kota Bandung (1,96 km)	√				√	√	√	√	√	√	
2	Pembangunan Fly over/underpass pada lokasi titik kemacetan kronis di ruas jalan provinsi		√			√	√	√	√	√	√	
2.3	**Kereta Api**											
1	Reaktivasi Jalur KA Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari	√	√			√	√	√	√	√	√	
2.4	**Angkutan Umum Massal Perkotaan**											
1	Perkeretaapian Perkotaan Bandung Raya		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Proses Perencanaan
2	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan atau *Bus Rapid Transit* (BRT) Bandung Raya	√		√		√	√	√	√	√	√	
2.5	**Bandara Udara**											
1	Pengembangan Bandara Nusawiru Kab. Pangandaran	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
2.6	**Pelabuhan**											
1	Pengembangan Pelabuhan Cirebon (Kota Cirebon)			√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi)	√				√	√	√	√	√	√	
4	Pengembangan Pelabuhan Penyebrangan Majingklak (Kabupaten Pangandaran)	√				√	√	√	√	√	√	
5	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Penyeberangan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi	√				√	√	√	√	√	√	

NO	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				2024		2025		2026		KETERANGAN
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	
6	Pembangunan Pelabuhan Tarumajaya (Kabupaten Bekasi)				√	√	√	√	√	√	√	
7	Pembangunan Dermaga Kapal Wisata Palangpang di Kabupaten Sukabumi	√		√		√	√	√	√	√	√	
2.7	**Pembangunan Terminak Tipe B**											
1	Pembangunan Terminal Tipe B Cikarang Kabupaten Bekasi		√			√	√					
2	Pembangunan Terminal Tipe B Pameungpeuk		√					√	√	√	√	
3	Pembangunan Terminal Tipe B Palabuhanratu		√					√	√	√	√	
4	Pembangunan Terminal Tipe B Pangandaran		√					√	√	√	√	
2.8	**Infrastruktur Perumahan dan Permukiman**											
1	Penyediaan Perumahan bagi MBR (buruh industri) dan ASN: Purwakarta	√	√	√								
2	Penataan Ruang Terbuka Publik		√		√	√	√	√	√	√	√	
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
4	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
2.9	**Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman**											
1	Pengembangan Mesjid Raya Al Jabar		√		√	√	√	√	√	√	√	
2	Pembangunan Mesjid Monumental Jawa Barat*)		√		√	√	√	√	√	√	√	
2.10	**Persampahan**											
1	TPPAS Regional Cirebon Raya	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
2	TPPAS Regional Legok Nangka	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
3	TPPAS Regional Lulut Nambo	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
4	TPPAS Regional Bekarpur	√	√	√		√	√	√	√	√	√	Penyiapan Readiness Criteria di Tahun 2024 – 2026
5	Penataan TPK Sarimukti		√			√	√	√	√	√	√	
2.11	**Penyediaan Air Minum**											
	SPAM Regional Bandung Raya					√	√	√	√	√	√	
1	Cigondoang	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
2	Sinumbra	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
3	Cikalong (Tahap II-Pembangunan IPA)	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
2.12	**Sistem Air Limbah**											
1	SPALD-T (Regional Bojongsoang)	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
2	SPALD-T (Komunal-DAS Citarum)	√	√			√	√	√	√	√	√	

NO	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				2024		2025		2026		KETERANGAN
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	
3	SPALD-S (Jawa Barat Bagian Selatan)	√	√			√	√	√	√	√	√	
2.13	**Bendungan, Waduk, dan Jaringan Irigasi**											
1	DI. Caringin (Sukabumi)	√	√			√	√	√	√	√	√	
2	DI. Parigi	√	√			√	√	√	√	√	√	Penyiapan Readiness Criteria pada tahun 2024 – 2026
3	DI. Cikalong	√	√			√	√	√	√	√	√	Penyiapan Readiness Criteria pada tahun 2024 – 2026
4	DI. Curugdendeng	√				√	√	√	√	√	√	Penyiapan Readiness Criteria pada tahun 2024 – 2026
5	DI. Candragoyang	√				√	√	√	√	√	√	Penyiapan Readiness Criteria pada tahun 2024 – 2026
6	DI. Rengrang	√				√	√	√	√	√	√	
2.14	**Lingkungan**											
1	Operasionalisasi dan Pengembangan Pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup Berskala Internasional		√			√	√	√	√	√	√	
2.15	**Kehutanan**											
1	Penataan Taman Hutan Raya Ir. Juanda	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
2	Pengembangan Hasil Hutan (Kayu, Bukan Kayu, Jasa Lingkungan)	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
3	Penataan Hutan Rakyat	√	√		√	√	√	√	√	√	√	
2.16	**Pariwisata**											
1	KEK Lido, Kabupaten Bogor	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
2.17	**Perikanan Tangkap**											
1	PPI Karangsong	√	√			√	√	√	√	√	√	
2	PPI Cilauteureun	√	√			√	√	√	√	√	√	
3	PPI Batukaras	√	√			√	√	√	√	√	√	
2.18	**Kawasan Sains dan Teknologi**											
1	Kawasan Sains dan Teknologi Pusat Jawa Barat di Jatinangor Kabupaten Sumedang			√		√	√	√	√	√	√	
2	Kawasan Sains dan Teknologi Kopi Jawa Barat di Pangalengan Kabupaten Bandung			√		√	√	√	√	√	√	

NO	KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN				2024		2025		2026		KETERANGAN
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	SEM I	SEM II	
3	Kawasan Sains dan Teknologi Pertanian Terpadu dan Indigofera Jawa Barat di Cikadu Kabupaten Cianjur			√		√	√	√	√	√	√	
4	Kawasan Sains dan Teknologi Industri Kreatif Jawa Barat di Kota Cirebon			√		√	√	√	√	√	√	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Dengan memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta urgensi percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai strategis baik di level provinsi maupun nasional, Skema pendanaan program melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) didorong untuk beberapa program infrastruktur strategis. Berdasarkan progres yang terus berjalan hingga tahun 2023, diidentifikasi sebanyak 11 (sebelas) proyek KPBU yang berpotensi untuk dilanjutkan prosesnya pada periode RPD yaitu Tahun 2024-2026, sebagaimana dapat disimak pada tabel berikut ini.

Tabel 6.10
Proyek Strategis dengan Skema KPBU Tahun 2023

No.	Proyek Strategis	Perkembangan Tahun 2022	Jadwal KPBU Tahun 2024
1	Pembangunan RS Pendidikan UNPAD	Tahap Perencanaan (Studi Investasi dikerjakan oleh UNPAD)	Transaksi (Perjanjian KPBU dan *Financial Close*)
2	TPPAS Lulut Nambo	Tahap Penyiapan *Financial Close* oleh PT JBL (dengan mitra baru)	Operasional
3	TPPAS Legok Nangka	Tahap Transaksi (*Pre-Qualification*)	Pelaksanaan (konstruksi)
4	TPPAS Ciayumajakuning	Tahap Penyiapan FS dengan skema penugasan BUMD	Penyiapan (*Market Sounding* dan Perjanjian *Tipping fee)*
5	SPAM Regional Jatiluhur (tahap I)	Tahap Konstruksi (KPBU dilaksanakan oleh Kementerian PUPR)	Operasional
6	SPAM Regional Jatigede (Cirebon Raya)	Tahap Penyiapan (Penyusunan FBC bersama PT SMI)	Transaksi (Perjanjian KPBU dan *Financial Close*)
7	SPAM Regional Metro Bandung Wilayah Barat (Sinumbra)	Tahap Penyiapan (Persiapan lelang)	Transaksi (Perjanjian KPBU dan *Financial Close*)
8	SPAM Regional Juanda (Jatiluhur Tahap II)	Tahap Penyiapan (penyusunan FS oleh BUP) KPBU dilaksanakan oleh Kementerian PUPR	Transaksi (Perjanjian KPBU dan *Financial Close*)
9	Kertajati *Aerocity Railway Access Construction*	Tahap Penyiapan (Penyusunan OBC) KPBU dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan	Penyiapan (Penyusunan FBC)
10	Perkeretaapian Perkotaan Metropolitan Bandung	Tahap Penyiapan (Permohonan PDF ke Kementerian Keuangan)	Transaksi (*Request for Proposal*)
11	Pengembangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Provinsi	Tahap Perencanaan (Membuka peluang Badan Usaha mengajukan proposal*)*	Penyiapan (Penyusunan FS)

Sumber: Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat, 2022

6.5 Program dan Kegiatan Strategis

Beberapa program dalam periode RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 masih memerlukan keberlanjutan pada RPD Tahun 2024-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan, yaitu:

Tabel 6.11
Program dan Kegiatan Strategis Provinsi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN STRATEGIS
P1	**Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata**	
1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1. Pelatihan Kerja Berdasarkan Kompetensi 2. Pelayanan Antar Kerja Lintas Kabupaten/Kota 3. Padat Karya Insfrastruktur 4. *Job Fair* 5. Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI 6. Pengawasan Norma Kerja Dan K3 7. Monev Rencana Tenaga Kerja 8. Pengadaan Gedung Kantor 9. Revitalisasi UPTD pengawasan
2	Dinas Energi Dan Sumber Daya Energi	1. Program Rasio Elektrifikasi 100 persen (Lisdes) 2. Pemanfaatan sumber daya EBT, konservasi energi dan diversifikasi energi 3. Pembangunan Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur 4. Pembelian Gedung Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung 5. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi 6. Fasilitasi formalisasi pertambangan rakyat 7. Infrastruktur Sistem Informasi Air Tanah
3	Dinas Perkebunan	1. Petani Milenial 2. Pembangunan Dan Penetapan Kebun Sumber Benih/BPT-PIT 3. Pengembangan/ Keragaman 6 Varietas Tembakau 4. Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Komoditi Perkebunan 5. Pengembangan Koorporasi Kelapa 6. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Perkebunan
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	1. Petani Milenial 2. Penyediaan Cadangan Pangan 3. Pemulihan Dampak PMK 4. Agroeduwisata Cikole 5. Gelar Pangan Murah 6. Pembangunan Gedung BPPIBTSP Bunikasih Cianjur 7. Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan 8. Anggota Keluarga Sehat Pekarangan Lestari (Asri) 9. Mobil Pelayanan Keliling Veteriner 10. Revitalisasi UPTD
5	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1. Petani Milenial 2. Masterplan Tanaman Pangan & Hortikultura 3. Penerapan Teknologi Budidaya Mangga Dan Manggis Berkelanjutan 4. Asuransi Petani 5. BOP Penyuluh 6. Honor Dan Asuransi POPT 7. Korporasi Petani 8. Dukungan Kegiatan Stunting Dan RTM

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN STRATEGIS
		9. Revitalisasi UPTD
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Promosi Investasi 3. Pelayanan Penanaman Modal 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. MPP Digital Dan Pengembangan Aplikasi PMPTSP
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1. Petani Milenial 2. Sarpras Kelautan Dan Perikanan 3. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap 4. Penyediaan Induk Unggul dan Benih Bermutu Ikan Unggulan 5. Produksi Dan Industrialisasi Garam 6. Pengembangan Kawasan Konservasi 7. Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 8. Sarpras Dan Kajian Lobster Laut 9. *Smart Fishing* 10. Revitalisasi UPTD 11. Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan 12. Promosi Produk Hasil Perikanan 13. Penguatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
8	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 3. Pelestarian Kesenian Tradisional 4. Pengembangan Kemitraan Pariwisata 5. Ekonomi Kreatif 6. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	1. Pengembangan Usaha dan Pemasaran Produk *One Pesantren One Product* (OPOP) 2. UMKM Juara 3. Wirausaha Baru
10	Biro Perekonomian	1. Program Petani Milenial 2. Fasilitasi Dan Koordinasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3. Fasilitasi Dan Koordinasi Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat
11	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, Dan Administrasi Pembangunan	1. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD 2. Pengamanan Aset BUMD 3. Inisiasi Pembiayaan Untuk Percepatan Keberlanjutan Program Strategis 4. Inisiasi Dan Pelaksanaan Penerbitan Obligasi Daerah 5. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) BUMD
12	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1. Peningkatan Ekspor IKM 2. Pengembangan Kawasan Industri Terintegrasi 3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara Komprehensif 4. Transformasi Industri 5. Pengendalian Inflasi Daerah 6. Pemanfaatan Teknologi Digital 7. Perlindungan Konsumen 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
13	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1. Penguatan aksesibilitas menuju sentra pariwisata dan industri

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN STRATEGIS
		2. Rekonstruksi jalan menuju sentra pariwisata dan industri 3. Pemeliharaan berkala jalan menuju sentra pariwisata dan industri
P2	**Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama**	
1	Dinas Pendidikan	1. KETM 2. Implementasi Program Vokasi 3. Rehabilitasi Sekolah 4. USB SMA/SMK 5. JABAR MASAGI 6. Pembelian Gedung KCD 7. BLUD 35 SMK 8. Penambahan RKB 9. JFLS 10. Sarpras Sekolah 11. BPMU SMA/SMK/SLB 12. BOPD Dan GTK Non ASN
2	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	1. BPMU MA 2. Insentif Kyai 3. Beasiswa Santri 4. Literasi Digital Manuskrip Karya Ulama 5. Layanan Ibadah Di Masjid Raya Al-Jabbar 6. Bantuan Pesantren 7. Sarana Dan Prasarana Keagamaan 8. Sadesha
4	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1. Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar 2. Partisipasi Dalam Kejuaraan *Multi Event* dan *Single Event* (PRA POPNAS) 3. Penghargaan Olahraga 4. Pemeliharaan Sport Jabar Arcamanik 5. Jabar Run 10K 6. Tournament *E-SPORT* 7. Piala Gubernur 8 Cabor 8. *Cycling De* Jabar 9. POPWILDA 8 Cabor *10. Youth Innovation Summit* *11. Jabar Future Leader* *12. Jabar Innovation Fellowship*
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Implementasi *Corporate University*
6	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Pembangunan jembatan akses Al-Jabbar
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	Operasionalisasi dan pemeliharaan mesjid Al-Jabbar
P3	**Penguatan Sistem Kesehatan Daerah**	
1	Dinas Kesehatan	1. Kontribusi PBI – JK 2. SKTM 3. Layad Rawat 4. Revitalisasi Rumah Sakit 5. *Stunting* (Pengelolaan Gizi) 6. Vaksinasi 7. Penanganan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular, Obat-Obatan Dan Pemenuhan Spm 8. *Stunting* (Promosi Kesehatan Masyarakat)

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN STRATEGIS
		9. Akselerasi 9 Nakes Sesuai Standar
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. *Stunting* (Pusat Pembelajaran Keluarga {PUSPAGA}) 2. *Stunting* (Keluarga Berencana) 3. *Stunting* (Stopan Jabar)
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	1. Pengelolaan air minum, limbah domestik dan persampahan 2. Pengadaan lahan SPAM regional Sinumbra 3. Penataan kawasan kumuh 4. Perbaikan Rutilahu
P4	**Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana**	
1	Dinas Sosial	1. Pelayanan SPM Di Dalam Panti 2. Pembentukan Puskesos - SLRT Provinsi 3. Operasional Dan Pemenuhan Sarpras Panti ODGJ
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Penyediaan Dan Distribusi Logistik Kebencanaan 2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana 3. Operasional Pusdalops 4. Dokumen Kajian Perencanaan Penanggulangan Bencana
P5	**Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa**	
1	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1. Pembangunan Jembatan Akses Al-Jabbar 2. Jalan Khusus Tambang Parung Panjang (15 Km) 3. Penanganan Jalan Provinsi 4. Penanganan Jembatan Provinsi 5. Pembebasan lahan : b. *Fly Over* Buah Batu- Kiaracondong Kota Bandung (1,96 Km) c. *Fly Over* Gatot Subroto Cimahi d. Jembatan Cipamingkis 6. Pemenuhan SPM: Pemeliharaan rutin jalan provinsi
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	1. Dukungan KPBU SPAM Regional, Jakstrada Dan Fasilitasi SPAM Kab/Kota 2. Pengadaan Lahan SPAM Regional 3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem SPALD_T Regional 4. Perencanaan TPPAS Bekarpur 5. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Persampahan 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Program PBG & PBL 7. Kegiatan SPM Perumahan 8. Penyelenggaraan bangunan gedung
3	Dinas Sumber Daya Air	1. Penataan/Revitalisasi Situ Panjalu dan Situ Gede (lanjutan Tahap 2) 2. Pembangunan Daerah Irigasi Caringin (Lanjutan) 3. Pembangunan Embung 4. Penyediaan Air Baku TPPASR Legok Nangka 5. Rehabilitasi Daerah Irigasi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN STRATEGIS
		6. Pengendalian Banjir (Normalisasi Sungai Cilember/Melong, Normalisasi Sungai dan Pembangunan TPT di WS Provinsi)
4	Dinas Perhubungan	1. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan atau Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya 2. Pembangunan Terminal Tipe B (Cikarang Dan Pangandaran) 3. Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru 4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 5. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Provinsi 6. Pembangunan Perkeretaapiaan Perkotaan Bandung Raya 7. Revitalisasi Pelabuhan ASDP
5	Dinas Lingkungan Hidup	1. Optimalisasi TPK Sarimukti 2. Pembangunan Sarpras TPPAS Lulut Nambo 3. Pembangunan Sarpras TPPAS Cirebon Raya 4. Pengadaan Sarpras Laboratorium Lingkungan Hidup Berstandar Internasional 5. Penanganan Lahan Kritis 6. Penanganan Air Limbah Domestik 7. Pengelolaan Sampah 8. Pengelolaan Limbah Industri 9. Pengelolaan Limbah Peternakan 10. Riset Dan Pengembangan 11. Penanganan Keramba Jaring Apung (KJA) 12. Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pariwisata 13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 14. Penegakan Hukum 15. Edukasi Dan Pemberdayaan Masyarakat 16. Data Informasi Dan Hubungan Masyarakat
6	Dinas Kehutanan	1. Pembangunan Hutan Rakyat Pola Agroforestry 2. Penanaman Hutan Mangrove 3. Pembangunan Sipil Teknis Konservasi Tanah dan Air 4. Persemaian Semi Permanen 5. Pengolahan Hutan Bukan Kayu Hayati 6. Petani Milenial
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Patriot Desa 2. Pendamping Posyandu Juara (PPJ) 3. CEO BUMDes 4. SABISA (Kegiatan Pusat Distribusi & Ekonomi Sirkular) 5. MASKARA 6. AKSARA 7. SABISA (EKONOMI KREATIF) 8. Gerbang Desa (BANTUAN KEUANGAN) 9. Leuit Tapal Desa
P6	**Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Keamanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia**	
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. JABAR CEKAS 2. HOTLINE SAPA 3. SEKOPER CINTA 4. MOTEKAR 5. NGABASO 6. PROVILA
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. DUTA BELA NEGARA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN STRATEGIS
		2. JAMBORE ORMAS 3. DUKUNGAN PENCAPAIAN IDI DAN PROSES POLITIK DI JAWA BARAT
3	Badan Kepegawaian Daerah	1. BEASISWA PNS 2. Pembangunan Assessment Center
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Pemenuhan SPM Trantibum Provinsi
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1. KOLECER 2. CANDIL 3. GALERI COVID 4. LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING 5. KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN 6. ALIH MEDIA ARSIP 7. PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Jabar *Digital Service*: • Desa *Digital* • Jabar *Coding Camp* • Sapa Warga • *Integrated* Portal Jabar • Satu Data Jabar, Satu Peta Jabar, Open Data Jabar, *Citizen Dashboard*, *Executive Dashboard* • *Command Center* 2. Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra (Jaringan Internet dan Intra Pemerintah Daerah) 3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 4. *Jabar Quick Response* (JQR) 5. *Jabar Saber Hoax* (JSH) 6. Penyelenggaraan Jabar Satu Data dan Satu Peta 7. Pengamanan Informasi Pemprov Jabar (Elektronik dan Non Elektronik)
7	Badan Penghubung	1. Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Budaya 2. Belanja Kendaraan Operasional Berbasis Baterai (Anjungan Jawa Barat Di TMII) 3. Rehab/Pemeliharaan Anjungan Jawa Barat
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dukungan Pilpres Dan Pilkada Serentak
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kompetisi Inovasi Jawa Barat
10	Badan Pendapatan Daerah	1. Upgrading Sapras Dan Teknologi Informasi Layanan Samsat 2. Penelusuran Ktmdu 3. Operasi Khusus/Operasi Gabungan 4. Sosialisasi Kebijakan Pendapatan 5. Safari *Exhibition* Kendaraan Di Setiap Wilayah 6. Gathering/Jambore Pajak Daerah

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Provinsi Jawa Barat periode tahun 2024 sampai dengan 2026 ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah. Berbagai program dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam RPD Tahun 2024-2026. Setiap program dilengkapi dengan indikator dan target indikator yang disertai dengan pagu indikatif. Program tersebut dijabarkan ke kegiatan dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstras PD) Tahun 2024-2026. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proyeksi belanja daerah telah dilakukan dalam bentuk kerangka pendanaan. Belanja Daerah yang telah diproyeksikan pada Bab III dokumen ini dialokasikan untuk mendanai program perangkat daerah. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai target pembangunan nasional. Adapun kerangka pendanaan yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
4	**PENDAPATAN**	**35.507.798.068.534**	**30.139.548.525.621**	**31.069.337.991.759**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**24.877.856.360.126**	**19.367.979.017.912**	**20.151.850.943.759**
4.1.01	Pajak Daerah	22.990.203.335.926	17.349.644.918.341	18.035.136.337.048
4.1.02	Retribusi Daerah	56.079.554.200	56.359.951.971	56.641.751.731
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	536.690.000.000	563.500.000.000	591.675.000.000
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.294.883.470.000	1.398.474.147.600	1.468.397.854.980
4.2	**Pendapatan Transfer**	**10.600.713.040.047**	**10.741.902.409.322**	**10.887.374.943.137**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	10.600.713.040.047	10.741.902.409.322	10.887.374.943.137
4.2.01.01	Dana Perimbangan	10.551.193.343.797	10.680.002.789.010	10.810.000.417.747
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.137.469.337.138	2.180.218.723.881	2.223.823.098.358
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.331.957.890.080	3.365.277.468.980	3.398.930.243.670
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	5.081.766.116.579	5.134.506.596.149	5.187.247.075.719
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	49.519.696.250	61.899.620.312	77.374.525.390
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
4.2.02.01	Dana Penyesuaian			
4.2.03	Transfer Antar Daerah	-	-	-
4.2.03.01	Pendapatan bagi hasil			
4.2.03.02	Bantuan Keuangan			
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**29.228.668.361**	**29.667.098.387**	**30.112.104.863**
4.3.01	Hibah	29.228.668.361	29.667.098.387	30.112.104.863
4.3.02	Dana darurat	-	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.000.000.000.000**	**0**	**0**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	1.000.000.000.000	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
6.1.08	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
Total Penerimaan		**36.507.798.068.534**	**30.139.548.525.621**	**31.069.337.991.759**
5	**Belanja**	**35.783.536.342.173**	**29.415.286.799.260**	**30.345.076.265.398**
5.01.00	**Belanja Operasi**	**19.152.094.785.990**	**18.521.237.709.748**	**18.795.021.258.187**
5.01.01	Belanja Pegawai	7.424.999.490.018	7.610.624.477.268	7.800.890.089.200
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	7.506.721.037.381	7.157.103.062.237	7.107.485.087.092
5.01.03	Belanja Bunga			
5.01.04	Belanja Subsidi	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
5.01.05	Belanja Hibah	3.955.147.825.228	3.473.045.880.499	3.590.943.935.770
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	250.226.433.363	265.464.289.744	280.702.146.124
5.02.00	**Belanja Modal**	**2.758.444.496.581**	**2.619.186.697.449**	**2.857.189.783.689**
5.02.01	Belanja Modal	2.758.444.496.581	2.619.186.697.449	2.857.189.783.689
5.03.00	**Belanja Tidak Terduga**	**200.000.000.000**	**150.000.000.000**	**150.000.000.000**
5.03.01	Belanja tidak terduga	200.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
5.04.00	**Belanja Transfer**	**13.672.997.059.603**	**8.124.862.392.063**	**8.542.865.223.523**
5.04.01	Transfer Bagi Hasil Pajak	9.831.547.498.721	5.346.777.545.712	5.628.145.091.703
5.04.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemeritah Daerah Lainnya	3.841.449.560.882	2.778.084.846.351	2.914.720.131.820
5.04.03	Transer Bantuan Keuangan Ke Desa	0	0	0
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**724.261.726.361**	**724.261.726.361**	**724.261.726.361**
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	624.261.726.361	624.261.726.361	624.261.726.361
6.2.02	Penyertaan modal daerah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0
Total Pengeluaran		**36.507.798.068.534**	**30.139.548.525.621**	**31.069.337.991.759**

Sumber: Hasil Proyeksi. 2023

Penerimaan yang diproyeksikan pada tahun 2024 sampai dengan 2026 digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah, termasuk untuk belanja program perangkat daerah. Program perangkat daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Penjabaran program ke kegiatan dan sub kegiatan dimuat dalam Renstra PD. Sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Program perangkat daerah yang disertai dengan indikator. Target dan pagu indikatif tahun 2024 sampai dengan 2026 disajikan pada **LAMPIRAN**.

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Indikator Makro

Indikator makro merupakan kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Adapun indikator makro dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio, dan Pendapatan per Kapita.

Penetapan indikator makro Provinsi Jawa Barat dilengkapi dengan target indikator per tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya dan tantangan pembangunan kedepan serta kemampuan daerah. Pencapaian indikator makro sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian beberapa indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Indikator Makro
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,45	73,12	73,68	74,14	74,39	74,71	74,71
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,74	5,45	5,51	5,67	5,81	5,97	5,97
3	Persentase penduduk miskin	Persen	8,43	7,98	7,41	7,34	7,13	7,00	7,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,82	8,31	8,13	8,01	7,88	7,76	7,76
5	Gini Ratio	Poin	0,406	0,412	0,405	0,394	0,383	0,370	0,370
6	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	45,26	48,32	53,11	57,28	61,57	66,39	66,39

Sumber: hasil proyeksi, 2023

8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis RPD Tahun 2024-2026, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi tertinggi dan merupakan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome.* Pencapaian IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome*, yang pada umumnya merupakan hasil dari *crosscutting* beberapa urusan dalam bentuk program sebagaimana disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
I.	**INDIKATOR TUJUAN:**								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,45	73,12	73,68	74,14	74,39	74,71	74,71
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,74	5,45	5,51	5,67	5,81	5,97	5,97
3	Persentase penduduk miskin	Persen	8,43	7,98	7,41	7,34	7,13	7,00	7,00
4	Gini Ratio	Poin	0,406	0,412	0,405	0,394	0,383	0,370	0,370
5	Indeks Williamson	Poin	0,667	0,670	0,669	0,667	0,666	0,664	0,664
6	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	79,72	N/A	72,79	82,14	82,96	83,79	83,79
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	A	A	A	A	A	A
II.	**INDIKATOR SASARAN:**								
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,61	8,78	8,91	9,03	9,16	9,29	9,29
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,62	12,69	12,75	12,82	12,88	12,88
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,23	73,52	73,71	73,90	74,10	74,29	74,29
4	Prevalensi Stunting	Persen	24,5	20,2	19,20	15,52	12,93	10,34	10,34
5	Pengeluaran per kapita	Rp.000	10.934	11.277	11.390	11.504	11.619	11.735	11.735
6	Persentase penduduk miskin	Persen	8,43	7,98	7,41	7,34	7,13	7,00	7,00
7	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	69,60	71,22	70,30	71,37	71,75	72,13	72,13
8	Indeks Perlindungan Anak	Angka	63,50	63,5*	69,53	64,50	65,50	66,50	66,50
9	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	47	48,00	48,23	48,86	49,49	50,14	50,14
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,41	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
11	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	4,22	7,00	3,72	5,76	5,84	5,93	5,93
12	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3,19	4,22	4,45	4,53	4,85	5,23	5,23
13	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,31	4,41	4,45	4,50	4,54	4,59	4,59
14	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	97,84	99,74	100,71	101,67	102,64	103,61	103,61
15	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	84,1	92,30	92,8	93,3	93,8	94,3	94,3
16	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	-0,04	11,27	11,77	12,30	12,85	13,43	13,43

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	501,52	511,55	521,78	532,22	542,86	553,72	553,72
18	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21,67	21,62	22,00	23,34	23,92	24,52	24,52
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,82	8,31	8,13	8,01	7,88	7,76	7,76
20	Tingkat Konektivitas	Persen	43,51	N/A	N/A	57,00	60,00	63,00	63,00
21	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	59,58	N/A	N/A	75,91	76,57	77,28	77,28
22	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	53,14	53,37	53,90	54,47	55,24	55,91	55,91
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	62,69	64,66	61,60	66,13	67,00	67,78	67,78
24	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	4,23	5,86	5,22	7,11	7,72	7,98	7,98
25	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,94	131,62	130	129	128	127	127
26	Indeks Desa Membangun	Poin	0,72	0,75	0,72	0,77	0,78	0,79	0,79
27	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	79,72	N/A	72,79	82,14	82,96	83,79	83,79
28	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	A	A	A	A	A	A
29	Indeks Inovasi Daerah	Poin	62,82	69,15 (Sangat Inovatif)	69,35 (Sangat Inovatif)	69,65 (Sangat Inovatif)	70,15 (Sangat Inovatif)	70,65 (Sangat Inovatif)	70,65 (Sangat Inovatif)

Sumber: hasil proyeksi, 2023

8.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

IKD merupakan sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dicapai pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. IKD disajikan berdasarkan urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah, pengawasan, dan pemerintahan umum. Indikator-indikator yang tersebut merupakan gambaran ukuran kinerja urusan pemerintahan daerah yang dimuat dalam Renstra PD Tahun 2024-2026. Adapun target masing-masing indikator disajikan pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3
Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	**PENDIDIKAN**								
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,56	12,63	12,69	12,76	12,76	Dinas Pendidikan
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,73	8,91	9,03	9,16	9,29	9,29	Dinas Pendidikan
3	APM SMA/SMK/SLB	Persen	83,68	12,69	12,75	12,82	12,88	12,88	Dinas Pendidikan
4	Nilai rapot pendidikan	Nilai			66,92	67,98	70,54	70,54	Dinas Pendidikan
5	Persentase Penurunan Angka putus sekolah	Persen			0,11	0,11	0,11	0,11	Dinas Pendidikan
6	Nilai Rata-rata Kompetensi Literasi	Nilai			66,95	68,42	69,90	69,90	Dinas Pendidikan
7	Nilai Rata-rata Kompetensi Numerasi	Nilai			57,85	58,82	59,80	59,80	Dinas Pendidikan
8	Indeks Refleksi Guru	Indeks			63,50	65,00	66,50	66,50	Dinas Pendidikan
2	**KESEHATAN**								
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,52	73,11	73,30	73,49	73,68	73,68	Dinas Kesehatan
2	Persentase kab/kota dengan IKS> 60%	Persen			1,97	2,12	2,27	2,27	Dinas Kesehatan
3	Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas kesehatan sesuai standar	Poin			67,24	73,50	79,77	79,77	Dinas Kesehatan
4	Presentasi kab/kota yang menurun angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Persen			85,00	89,00	93,00	93,00	Dinas Kesehatan
5	Persentase Kab/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan	Persen			18,00	30,00	40,00	40,00	Dinas Kesehatan
6	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	Persen			96,00	96,20	96,50	96,50	Dinas Kesehatan
7	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan di Jawa Barat	Persen			100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
8	Persentase Kabupaten/ Kota memenuhi standar ketenagaan minimal di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah	Persen			55,00	55,10	55,20	55,20	Dinas Kesehatan
9	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai standar perizinan	Persen			92,00	93,00	94,00	94,00	Dinas Kesehatan
10	Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	Persen			92,59	96,29	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
11	Persentase kab/kota dengan cakupan rumah tangga ber-PHBS >80%	Persen			70,00	75,00	80,00	80,00	Dinas Kesehatan
12	Persentase Kerjasama/kemitraan tingkat daerah provinsi (evaluasi pelaksanaan dan implementasi PKS nya)	Persen			5,00	10,00	15,00	15,00	Dinas Kesehatan
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPELKES	Poin			88,50	88,70	89,00	89,00	Dinas Kesehatan (Unit Pelatihan Kesehatan)
14	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Sertifikat Diklat dengan SKP	Persen			100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan (Unit Pelatihan Kesehatan)
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPTD Labkes	Poin			92,50	92,70	92,90	92,90	Dinas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja	Poin			85,00	86,00	87,00	87,00	Dinas Kesehatan (RSUD Kesehatan Kerja)
17	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan pengetahuan	Persen			60,00	70,00	80,00	80,00	Dinas Kesehatan (RSUD Kesehatan Kerja)

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
18	Indikator Nasional Mutu di RSUD Al Ihsan	Persen			69,00	77,00	85,00	85,00	Dinas Kesehatan (RSUD Al-Ihsan)
19	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	Poin			97,10	97,15	97,20	97,20	Dinas Kesehatan (RSUD Al-Ihsan)
20	IKM atas pelayanan medik, keperawatan dan penunjang	poin			87,00	89,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan (RS Jiwa)
21	IKM pelayanan kepegawaian, pengembangan sdm, pendidikan, penelitian dan pengembangan	poin			87,00	89,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan (RS Jiwa)
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RS Paru	Poin			90,20	90,30	90,40	90,40	Dinas Kesehatan (RS Paru)
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	Poin			86,95	87,00	87,05	87,05	Dinas Kesehatan (RSUD Pamengpeuk)
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Jampangkulon	Poin			82,75	83,55	84,10	84,10	Dinas Kesehatan (RSUD Jampang Kulon)
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1	Tingkat Konektivitas	Persen			57,00	60,00	63,00	63,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
2	Indeks Kualitas Infrastruktur	Poin			75,91	76,57	77,28	77,28	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
3	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Persen			34,42	39,17	48,26	48,26	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
4	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,78	83,84	90,5	91,36	92,1	92,10	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur	Persen			17,08	34,82	53,20	53,20	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
6	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen			59,8	77,7	96,2	96,20	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
7	Persentase aksesibilitas menuju sentra-sentra ekonomi dan kawasan potensial	Persen			34,42	39,17	48,26	48,26	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
8	Persentase dokumen perencanaan teknis yang siap bangun	Persen			100	100	100	100,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
9	Persentase panjang jalan yang dilakukan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan	Persen			100	100	100	100,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
10	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Km			2137,77	2158,09	2175,57	2175,57	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
11	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli	Persen			20	40	60	60,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
12	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi jasa Konstruksi	Persen			100	100	100	100,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
13	Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persen			100	100	100	100,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
14	Persentase ketersediaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan bidang tata ruang	Persen			66,7	83,3	100	100,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
15	Persentase sinkronisasi RTR kabupaten/kota	Persen			32	55	81	81,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
16	Persentase penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Persen			60	80	100	100,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
17	Presentase Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	Persen			70	85	100	100,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
18	Persentase kawasan yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang	Persen			70,4	85,2	100	100,00	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
19	Indeks Penggunaan Air	Poin	1,878	1,1902	1,186	1,168	1,528	1,528	Dinas Sumber Daya Air
20	Persentase Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Dinas Sumber Daya Air
21	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	55,52	56,12	56,50	56,89	57,30	57,30	Dinas Sumber Daya Air
22	Persentase Situ yang Terpelihara	Persen			11,43	11,67	11,79	11,79	Dinas Sumber Daya Air

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
23	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen			100	100	100	100,00	Dinas Sumber Daya Air
24	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen			49,84	50,71	51,63	51,63	Dinas Sumber Daya Air
25	Persentase Infrastruktur SDA yang Sesuai Standar Tata Kelola Konstruksi	Persen			100	100	100	100,00	Dinas Sumber Daya Air
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	53,14	53,37	54,60	55,20	55,90	55,90	Dinas Perumahan Dan Permukiman
2	Akses Sanitasi layak	Persen	74,02	86,79	75	76	77	77,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
3	Akses Air Minum layak	Persen	93,04	98,37	94	95	96	96,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
4	Akses Penanganan Sampah di Perkotaan	Persen	74,03	79	76	77	78	78,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
5	Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen			87,10	88,10	89,10	89,10	Dinas Perumahan Dan Permukiman
6	Persentase Kumulatif Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Kawasan Tematik	Persen			20,00	40,00	60,00		Dinas Perumahan Dan Permukiman
7	Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	Persen	92,33	93,89	98	98,76	99,51	99,51	Dinas Perumahan Dan Permukiman
8	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Persen			100	100	100	100,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
9	Persentase Luas genangan yang tertangani	Persen	65,77	77	100	100	100	100,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
10	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap	Persen			100	100	100	100,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
	kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota								
11	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan di Perkotaan	Persen			76	77	78	78	Dinas Perumahan Dan Permukiman
12	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen			87,10	88,10	89,10	89,10	Dinas Perumahan Dan Permukiman
13	Rasio Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio			0,20	0,40	0,60	0,60	Dinas Perumahan Dan Permukiman
14	Persentase Warga Negara Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen			100	100	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
15	Persentase perumahan terfasilitasi PSU	Persen			53,26	56,88	60,50	60,50	Dinas Perumahan Dan Permukiman
16	Persentase pengembang tersertifikasi	Persen			6	14	24	24,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
17	Persentase Capaian Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	Persen			80,85	67,36	53,87	53,87	Dinas Perumahan Dan Permukiman
18	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani (10-15 Ha)	Persen			19,15	32,64	46,13	46,13	Dinas Perumahan Dan Permukiman
5	**TRANTIBUMLINMAS**								
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	87,5	75	89	91	95	95	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Penanganan Ganguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen			90	95	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Persentase penanganan penegakan perda dan peraturan gubernur yang terselesaikan	Persen			50	60	80	80	Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
4	Persentase Pemberdayaan Satgas Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen			75	80	90	90	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Persentase anggota satpol PP dan PPNS yang Mendapatkan pelatihan	persen			82	92	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Indeks Risiko Bencana	Poin	131,69	130	129	128	127	127	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Persentase Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persen			100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Persentase Layanan Pendampingan dan/atau Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persen			100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi Logistik dan Peralatan pada saat keadaan Darurat Bencana	Persen			100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Persentase Penanganan dan/atau Pendampingan Pasca Bencana	Persen			100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Persentase Pemetaan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen			50	70	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	**SOSIAL**								
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,98	7,41	7,34	7,13	7,00	7,00	Dinas Sosial
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	42,92	40,27	43,32	43,72	44,12	44,12	Dinas Sosial
3	Persentase PSKS yang Aktif	Persen			100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase PSKS yang mendapatkan bimbingan teknis	Persen			100	100	100	100	Dinas Sosial
5	Persentase Korban Bencana yang Terpehuni Kebutuhan Dasar	Persen			100	100	100	100	Dinas Sosial
6	Persentase Penyaluran Bansos Bagi KPM	Persen			100	100	100	100	Dinas Sosial

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
7	Persentase KPM yang Mendapatkan Bimbingan Kewirausahaan Sosial	Persen			100	100	100	100	Dinas Sosial
8	Persentase Kemandirian Ekonomi Bagi Masyarakat (KAMI BISA) yang Berhasil dalam Pengelolaan Usaha	Persen			40	45	50	50	Dinas Sosial
9	Persentase Anak yang Mendapat Orang Tua Angkat	Persen			70	75	80	80	Dinas Sosial
10	Persentase PPKS (Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan) yang Dipulangkan Ke Kab/Kota	Persen			100	100	100	100	Dinas Sosial
11	Persentase UPTD yang Menerapkan Pedoman Rehabilitasi Sosial sesuai Ketentuan	Persen			100	100	100	100	Dinas Sosial
12	Persentase PPKS yang berfungsi sosialnya kembali	Persen			90	92	94	94	Dinas Sosial
7	**TENAGA KERJA**								
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,31	8,13	8,01	7,88	7,76	7,76	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan	Persen			73,45	76,11	78,74	78,74	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen			100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen			100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Dan Luar Negeri	Persen			48,30	53,51	58,68	58,68	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
6	Persentase Transmigran Yang Di Tempatkan	Persen	84,09	90	48,09	48,52	48,95	48,95	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
7	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	Persen			34,12	34,36	34,60	34,60	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	Persen			90	91	92	92	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)								
9	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan	Persen			20,15	20,20	20,25	20,25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,8	90,02	90,07	90,31	90,55	90,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	71,22	70,3	71,37	71,75	72,13	72,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	63,5*	69,53	64,50	65,50	66,50	66,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
4	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender	Persen	92,59	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
5	Persentase Keberhasilan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
6	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan 5 kluster Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen			100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
7	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
8	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	Persen	44,4	51,85	57,04	62,74	69,01	69,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
9	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Persen	74	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
10	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Angka	5,23	1,88	6,77	6,70	6,63	6,63	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
11	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
12	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan penguatan untuk standarisasi di Jawa Barat	Persen			18,52	37,08	55,56	55,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
13	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	Persen			100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
14	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	Angka	0,85	0,21	0,81	0,80	0,79	0,79	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
15	Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
9	**PANGAN**								
1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Tk. Konsumsi	Poin			93,30	93,80	94,30	94,30	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Tk. Ketersediaan	Poin	94,02	93,4	95,36	95,83	96,31	96,31	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
3	Persentase peningkatan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai standar mutu dan keamanan pangan	Persen	19,61	12,67	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
4	Persentase Cadangan Pangan	Persen			50	50	50	50	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
5	Persentase desa rentan pangan yang dintervensi	Persen			3	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
6	Persentase peningkatan sertifikasi PSAT	Persen			2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
10	**PERTANAHAN**								
1	Tingkat Tertib Tata Kelola Pertanahan	Persen	72,88	88,37	100	100	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen			100	100	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang selesai tepat waktu	Persen			100	100	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
4	Persentase jumlah kabupaten/kota terfasilitasi redistribusi tanah dan penataan akses dibagi jumlah kabupaten/kota	Persen			100	100	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman
5	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen			20	40	60	60	Dinas Perumahan Dan Permukiman
6	Persentase Invetarisasi sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen			100	100	100	100	Dinas Perumahan Dan Permukiman

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
11	**LINGKUNGAN HIDUP**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,66	61,60	66,13	67,00	67,78	67,78	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	47,13	43,27	48,31	49,10	49,65	49,65	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	87,83	75,5	90,07	90,97	91,88	91,88	Dinas Lingkungan Hidup
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,31	80,11	82,04	83,04	84,02	84,02	Dinas Lingkungan Hidup
5	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	5,86	6,1	7,11	7,72	7,98	7,98	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah dan persampahan	Persen	3,83	6,1	6,07	7,35	8,85	8,85	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase Perencanaan Pembangunan yang Sudah terintegrasikan dengan rencana pembangunan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Penurunan Parameter COD (mg/L)	mg/L	25,13	25	24,87	24,74	24,61	24,61	Dinas Lingkungan Hidup
9	Parameter Pengujian Kualitas Air yang Terakreditasi	Persen	32	35	38	41	43	43	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis dan Manajemen Laboratorium	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase penanganan pengaduan lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
12	Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	Persen	72,31	73,82	77,17	78,67	80,18	80,18	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase Pembinaan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	66,43	71,44	76,46	80,73	84,27	84,27	Dinas Lingkungan Hidup
14	Persentase peningkatan Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisir di Kabupaten/Kota	Persen	62,5	67,5	75	87,50	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
15	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai implementasinya	Persen	187,5	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
16	Persentase pengawasan terhadap persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
17	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan dan/atau produk hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
18	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	Persen	80	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
19	Presentase kab/kota di wilayah pesisir yang dibina	Persen	0	0	33,33	66,67	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
20	Penurunan konsentrasi parameter SO2	µg/m3	10,56	21,8	21,2	20,6	20	20	Dinas Lingkungan Hidup
21	Parameter Pengujian Kualitas Udara Ambien yang Terakreditasi	Persen	0	0	44	88	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
22	Persentase Taman Kehati atau RTH Kehati yang dibina	Persen	82,76	86,21	89,66	93,1	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
23	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Sektor Limbah dan Persampahan	Persen	81,48	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
24	Persentase Kampung Iklim yang dibina	Persen	47,7	55	65	75	85	85	Dinas Lingkungan Hidup
25	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola Di 3 TPA/TPST Regional	Persen	72,03	100	50	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
1	Persentase Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Persen			88,55	89,05	89,55	89,55	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persen			97,89	98,39	98,89	98,89	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
3	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persen			99,00 (target nasional)	99,05	99,10	99,10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Data yang Dimanfaatkan	Persen			80.00 (target nasional)	83,78	86,49	86,49	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	Persen			100	100	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
1	Indeks Desa Membangun	Poin	0,7529	0,72	0,77	0,78	0,79	0,79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Persentase Desa Mandiri	Persen	21,27	10,11	33,13	35,03	36,91	36,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3	Persentase Desa Berkembang	Persen	31,46		22,04	12,63	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4	Persentase Desa yang difasilitasi Penataannya	persen	99,22	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5	Persentase Desa yang mendapat fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan Desa	persen	99,73	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
6	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan Desa	persen	99,58	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
7	Persentase Kerjasama Antar Desa Kewenangan Provinsi yang Terfasilitasi	persen	98,26	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,42	1,42	1,44	1,46	1,47	1,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
2	Angka Fertilitas Total (TFR)	Angka	2,1	2,07	2,07	2,05	2,03	2,03	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	Persen	63	64,07	64,59	64,79	64,99	64,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
4	Presentase masyarakat yang terpapar program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen			75	80	85	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
5	Persentase penurunan jumlah perkawinan anak	Persen			5	5	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
15	**PERHUBUNGAN**								
1	Tingkat konektivitas	Persen			57,00	60,00	63,00	63,00	Dinas Perhubungan
2	Persentase pengguna angkutan umum di Jawa Barat	Persen	N/A	2,6	4,15	5,7	7,23	7,23	Dinas Perhubungan
3	Perentase kendaraan umum yang sesuai standar keselamatan	Persen	3,8	15,66	32,42	46,33	61,53	61,53	Dinas Perhubungan
4	Persentase infrastruktur transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Persen	8,11	26,22	39,21	51,75	64,30	64,3	Dinas Perhubungan
5	Persentase Kepuasan Masyarakat Sektor Transportasi	Persen	90,2	90,70	92	92,40	92,80	92,8	Dinas Perhubungan
6	Persentase wilayah yang memanfaatkan ICT untuk peningkatan layanan transportasi	Persen	18,52	18,52	22,22	25,93	29,63	29,63	Dinas Perhubungan
7	Persentase data dan informasi layanan transportasi yang terintegrasi	Persen	40	40	53,45	62,38	77,98	77,98	Dinas Perhubungan
8	Persentase pengguna Angkutan umum transportasi darat	Persen	n/a	3	6	9	12	12	Dinas Perhubungan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
9	Persentase pengguna Angkutan Umum ASDP	Persen	n/a	3	6	9	12	12	Dinas Perhubungan
10	Persentase rencana persiapan pengelolaan pelabuhan laut	Persen	0,4	50	60	80	100	100	Dinas Perhubungan
11	Persentase penumpang Kereta Api	Persen	n/a	2,56	4,06	5,53	7	7	Dinas Perhubungan
12	Persentase kendaraan umum yang diawasi	Persen	60	60,5	61	62	63,50	63,5	Dinas Perhubungan
13	Persentase perusahaan angkutan umum yang mempunyai sertifikat SMK	Persen	1,29	1,80	4,37	6,94	12,08	12,08	Dinas Perhubungan
14	Persentase angkutan penumpang ASDP yang sesuai standar keselamatan	Persen	2,32	10,06	24,25	34,31	44,37	44,37	Dinas Perhubungan
15	Persentase fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi yang terpasang	Persen	37,07	39	39,85	40,24	40,65	40,65	Dinas Perhubungan
16	Persentase Terminal yang sesuai standar	Persen	7,14	7,14	14,29	21,43	28,57	28,57	Dinas Perhubungan
17	Persentase prasarana pelabuhan yang sesuai standar	Persen	n/a	10	15	20	25	25	Dinas Perhubungan
18	Persentase dukungan kebijakan teknis penyelenggaraan perkeretaapian	Persen	33,33	65	80	90	100	100	Dinas Perhubungan
19	Persentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah I	Persen	91,20	91,70	92,20	92,70	93,20	93,2	Dinas Perhubungan
20	Persentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah II	Persen	89,20	89,70	90,20	90,70	91,20	91,2	Dinas Perhubungan
21	Persentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah III	Persen	87,20	87,70	88,20	88,70	89,20	89,2	Dinas Perhubungan
22	Persentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLAJ Wilayah IV	Persen	92,80	93,30	93,80	94,30	94,80	94,8	Dinas Perhubungan
23	Persentase Kepuasan Masayarakat pada UPTD PPP LLASDP	Persen	85,80	86,30	86,80	87,30	87,80	87,8	Dinas Perhubungan
24	Persentase pemanfaatkan ICT untuk peningkatan layanan LLAJ	Persen	9	9	18	18	27	27	Dinas Perhubungan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
25	Persentase Data dan Informasi LLAJ yang tersedia	Persen	28,57	28,57	42,86	57,14	71,43	71,43	Dinas Perhubungan
26	Persentase Data Pelayaran yang tersedia	Persen	25	25	37,50	50,00	62,50	62,5	Dinas Perhubungan
27	Persentase Data Perkeretaapian dan Penerbangan yang tersedia	Persen	80	80	80	80	100	100	Dinas Perhubungan
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	81,93	90,55	84,45	84,47	84,49	84,49	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,37	3,7	3,42	3,47	3,50	3,50	Dinas Komunikasi Dan Informatika
~~3~~	~~Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE~~	~~Poin~~	-	-	~~3,10~~	~~3,30~~	~~3,50~~	~~3,50~~	~~Dinas Komunikasi Dan Informatika~~
~~4~~	~~Indeks Aspek Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi~~	~~Poin~~	-	-	~~3,10~~	~~3,30~~	~~3,50~~	~~3,50~~	~~Dinas Komunikasi Dan Informatika~~
5	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Persen			76,65	76,70	76,75	76,75	Dinas Komunikasi Dan Informatika
6	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persen			70	75	80	80	Dinas Komunikasi Dan Informatika
7	Persentase Perangkat Daerah dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Diskominfo	Persen			100	100	100	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
8	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen			30	40	50	50	Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
1	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21,62	22,00	23,34	23,92	24,52	24,52	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
2	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Persen			25	26	27	27	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
3	Persentaase UMKM yang naik kelas	Persen	8,38	7	22	27,50	33	33	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
4	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen			15	17	20	20	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
5	Persentase Persetujuan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi	Persen			8	9	10	10	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
6	Persentase Kepatuhan Koperasi	Persen			15	16	17	17	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
7	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen			25	30	35	35	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
8	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Yang Melaporkan RAT	Persen			7	8	9	9	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
9	Persentase Koperasi Yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 24 JP	Persen			26	51	77	77	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
10	Persentase Unit Usaha UMKM Yang Difasilitasi Pemasaran	Persen			22	44	66	66	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
11	Persentase UMKM Yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 24 JP	Persen			33,3	66,6	100	100	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
12	Persentase UMKM Yang Berpotensi Ekspor	Persen			11	22	30	30	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
18	**PENANAMAN MODAL**								
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	576,9	531,87	532,22	542,86	553,72	553,72	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
2	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	174,58	109,2	176,31	178,07	179,85	179,85	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	90,84	89	90	90,50	91	91	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Persentase peningkatan investor	Persen			10	10	10	10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jumlah Investor yang berminat untuk Investasi	Investor			12	12	12	12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai standar	Persen			100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal	Persen			15,50	16	16,50	16,50	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Persentase Pengaduan dan Permohonan Advokasi yang terlayani sesuai standar	Persen			100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Persentase Layanan PMPTSP yang memanfaatkan Sistem Informasi	Persen			100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Persentase dokumen data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	Persen			100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Persentase perubahan untuk mendukung implementasi RB,ZI, kinerja PPB dan MCP	Persen			100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Yang Sesuai Ketentuan	Persen			100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	48	48,62	48,86	49,49	50,14	50,14	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	36,67	46,67	36,67	36,67	36,67	36,67	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	60,72	58	61,33	61,64	61,94	61,94	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Besar	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	17,93	18	18,11	18,20	18,29	18,29	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	Persen	72	72	72,72	73,09	73,45	73,45	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	3,1	3	3,84	4,27	4,75	4,75	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	14,25	12	14,39	14,46	14,54	14,54	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Tingkat Partisipasi Pemuda Jawa Barat dalam Kepramukaan	Persen	16,8	17	16,97	17,05	17,14	17,14	Dinas Pemuda dan Olahraga
10	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik	Persen	87	N/A	87,87	88,31	88,75	88,75	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	10	N/A	10	10	10	10	Dinas Pemuda dan Olahraga
12	Persentase Medali Emas yang Diperoleh dalam Event Nasional	Persen	20	20	20	20	20	20	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	**STATISTIK**								
1	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	poin			2,70	2,8	2,90	2,90	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen			100	100	100	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam	Persen			100	100	100	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
	melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah								
21	**PERSANDIAN**								
1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	634	625	635	637	639	639	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	Persentase Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen			98,45	98,76	99,07	99,07	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	**KEBUDAYAAN**								
1	Persentase Pembangunan Kebudayaan Jawa Barat	Persen			32,64	33,21	34,15	34,15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	30,36	24,21	32,64	33,21	34,15	34,15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3	Persentase Pengelolaan Warisan Budaya	Persen	56,65	24,21	28,98	33,47	37,55	37,55	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
4	Persentase Penanganan Cagar Budaya	Persen	27,23	26,09	33,33	33,33	33,33	33,33	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
5	Persentase Benda Koleksi Museum yang Dilindungi	Persen	24,57	23,18	32,48	33,18	34,34	34,34	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
23	**PERPUSTAKAAN**								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	72,73	66,64	72,74	72,84	72,94	72,94	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	70,10	72	73	73,10	73,20	73,2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
3	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	Poin	1,4899	1,49	1,4901	1,4902	1,4903	1,4903	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
4	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	Poin	0,0025	0,0026	0,0027	0,0028	0,0029	0,0029	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
5	Tingkat Kunjungan Pemustaka	Persen	0,4279	0,428	0,4281	0,4282	0,4283	0,4283	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
6	Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Poin	2,1988	2,1989	2,1990	2,1991	2,1992	2,1992	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
7	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	23	23	25	27	29	29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
24	**KEARSIPAN**								
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik	Perangkat Daerah	28	30	36	37	38	38	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
2	Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis	Persen	68	65	68	69	70	70	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
3	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	85,83	90	91	92	93	93	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
4	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	67,07	70	71	72	73	73	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Ton	1.500.343,27	1.069.481,49	1.501.000,00	1.502.500,00	1.504.000,00	1.504.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/th			39,40	39,80	40,20	40,20	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Persen			85,50	86	86,50	86,50	Dinas Kelautan Dan Perikanan
4	Persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	60,14	65	65	65	65	65	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
5	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	267.469,47	186.558,07	268.000,00	269.000,00	270.000,00	270.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
6	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.232.873,80	882.923,42	1.233.000,00	1.233.500,00	1.234.000,00	1.234.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
7	Jumlah unit pengolahan ikan skala menengah dan besar	Unit			74	76	78	78	Dinas Kelautan Dan Perikanan
8	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan			3	3	3	3	Dinas Kelautan Dan Perikanan
9	Jumlah produksi Garam	Ton			66.000,00	67000	68.000,00	68.000,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
10	Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	persen	87,54	85	85	85	85	85	Dinas Kelautan Dan Perikanan
26	**PARIWISATA**								
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen			3,12	3,19	3,28	3,28	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat	Kunjungan	564.136	36300	741.133	850.138	975.662	975.662	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Jawa Barat	Kunjungan	73.013.573	39.600.000	93.287.373	102.685.268	113.032.607	113.032.607	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
4	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari			3,74	4,01	4,28	4,28	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
5	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari			1,5	1,52	1,54	1,54	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
6	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	24,39	29,27	40	60	80	80	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
7	Persentase Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Nusantara	Persen	23,81	28,57	27,27	31,82	40,91	40,91	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
8	Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Persen	25,93	22,22	26,42	35,22	38,36	38,36	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
27	**PERTANIAN**								

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	99,75	104,52	101,67	102,64	103,61	103,61	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2	Nilai Tukar Usaha Pertanian (sub sektor peternakan)	Persen	101,48	104	101,64	101,79	101,95	101,95	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	Produksi Peternakan								Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	- Daging	Ton	965.113	1.210.324	933.001	951.661	970.695	970.695	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	- Telur	Ton	866.863	671.183	906.311	926.703	947.553	947.553	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	- Susu	Ton	300.198	445.662	299.274	302.266	305.289	305.289	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
3	Persentase peningkatan mutu produk hewan	Persen	520	10	15	15	15	15	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
4	Persentase peningkatan tingkat kelahiran ternak	Persen			1,50	1,50	1,50	1,50	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
5	Tingkat pemenuhan penataan prasarana peternakan	Persen			33,30	66,70	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
6	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	Persen			86	87	88	88	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
7	Presentase pelaku usaha peternakan dengan produktivitas yang meningkat kinerjanya	Persen			100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
8	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	12.962.696	12.919.701	15.555.810	15.698.506	15.845.863	15.845.863	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
9	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	57,73	58,76	62,64	62,85	63,06	63,06	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
10	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	93,8	90,34	139,04	139,72	140,31	140,31	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
11	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	Persen	90,25	82,21	86	86,59	88	88	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
12	Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	1.840.858	1.892.521	1.975.946	1.983.690	1.991.434	1.991.434	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
13	Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	248.937	199.271	228.623	231.237	234.278	234.278	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
14	Indeks Pertanaman (IP)	Persen	2,07	2	2	2,01	2,02	2,02	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
15	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	Persen	1,47	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
16	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
17	Jumlah petani yang menerapkan teknologi melalui pendampingan penyuluh	Orang			7.000	7.200	7.400	7.400	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
18	Persentase Kelompok Tani yang dibina oleh Penyuluh	Persen	99	94,17	56,15	72,7	94,17	94,17	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
19	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	Persen	45,72	20,41	18,18	36,37	45,47	45,47	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
20	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	89,55	88,86	89,60	89,70	89,80	89,8	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
21	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	4,41	4,45	4,50	4,54	4,59	4,59	Dinas Perkebunan
22	Laju Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Persen	5,68	5	1,50	2,00	2,50	2,5	Dinas Perkebunan
23	Nilai Tambah Produk Perkebunan	Persen	0,11	0,1	50	50	50	50	Dinas Perkebunan
24	Laju Peningkatan Poktan yang Terfasilitasi Sarana Produksi Perkebunan	Persen	31.84	25	25	25	25	25	Dinas Perkebunan
25	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi sarana pengolahan Perkebunan	Persen	31.84	25	10	15	20	20	Dinas Perkebunan
26	Laju Peningkatan Petani yang terfasilitasi promosi produk Perkebunan	Persen	31.84	25	10	15	20	20	Dinas Perkebunan
27	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	Persen	133.33	20	20	20	20	20	Dinas Perkebunan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
28	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana pascapanen dan pengolahan produk Perkebunan	Persen	133.33	20	10	10	10	10	Dinas Perkebunan
29	Laju peningkatan area lahan perkebunan yang terfasilitasi penanganan dan pengendalian bencana perkebunan	Persen	65	25	20	20	20	20	Dinas Perkebunan
30	Laju Peningkatan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Persen	65	25	25	25	25	25	Dinas Perkebunan
31	Presentase Perkebunan Besar Berizin Usaha yang Terbina dan Terawasi	Persen	66.67	50	20	25	30	30	Dinas Perkebunan
32	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	Persen	26.91	25	25	25	25	25	Dinas Perkebunan
28	**KEHUTANAN**								
1	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	31,45	30	5	5	5	5	Dinas Kehutanan
2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen			19,05	20,55	22,04	22,04	Dinas Kehutanan
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (Poin)	Poin			42,64	43,28	43,93	43,93	Dinas Kehutanan
4	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persen			5	5	5	5	Dinas Kehutanan
5	Persentase Peningkatan Pengelola Jasa Lingkungan Hutan yang Produktif	Persen	85,21	10	5	5	5	5	Dinas Kehutanan
6	Persentase Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitasnya	Persen			5	5	5	5	Dinas Kehutanan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen			1,50	1,50	1,50	1,5	Dinas Kehutanan
8	Persentase Kebijakan Pengelolaan Hutan yang relevan dengan Isu Strategis Kehutanan	Persen			100	100	100	100	Dinas Kehutanan
9	Persentase Lahan Kritis yang ditangani	Persen	4,99	5	3	3	3	3	Dinas Kehutanan
10	Persentase Gangguan dan kerusakan hutan di Jawa Barat yang tertangani	Persen			0,4	0,3	0,2	0,2	Dinas Kehutanan
11	Persentase Luas Wilayah Daerah Aliran Sungai yang sudah Dipulihkan	Persen			53,09	57,09	61,09	61,09	Dinas Kehutanan
12	Persentase Peningkatan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix yang Ditangkarkan	Persen	21,88	5	5	5	5	5	Dinas Kehutanan
29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								
1	Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.337,16	1.466	1.508	1.535	1.535	1.535	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
2	Jumlah Konsumsi Listrik di Jawa Barat	GWh	65.230	56.896	75.786	78.758	80.939	80.939	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
3	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	2,46	5,13	7,59	7,68	7,87	7,87	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
4	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek teknis dan aspek pengusahaan	Persen	48,33	48,00	53,50	56,00	58,50	58,50	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
5	Persentase meningkatnya Konservasi pada cekungan air tanah di Jawa Barat	Persen			34,78	39,13	43,48	43,48	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
6	Persentase pemenuhan Peningkatan Mutu Pelayanan penyediaan tenaga listrik kewenangan Provinsi	Persen			60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
7	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen			65,00	70,00	75,00	75,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
8	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen			65,00	70,00	75,00	75,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
9	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen			65,00	70,00	75,00	75,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
10	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen			65,00	70,00	75,00	75,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
11	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen			65,00	70,00	75,00	75,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
12	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen			65,00	70,00	75,00	75,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
13	Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik kewenangan Gubernur di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen			65,00	70,00	75,00	75,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
14	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
15	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
16	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
17	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
18	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
19	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
20	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
21	Persentase Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
22	Persentase pemanfaatan EBT	Persen			33,00	67,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
23	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen			33,00	67,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
24	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen			33,00	67,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
25	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen			33,00	67,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
26	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen			33,00	67,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
27	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen			33,00	67,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
28	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen			33,00	67,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
29	Persentase pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen			33,00	67,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
30	Persentase komoditas EBT yang diuji atau dikembangkan	Persen			33,00	67,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
31	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek teknis	Persen	48,33	48,00	53,50	56,00	58,50	58,50	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
32	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan	Persen	62,41	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
33	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Persen	62,32	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
35	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Persen	64,52	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
36	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Persen	61,90	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
37	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Persen	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
38	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Persen	63,64	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
40	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Persen	65,00	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
41	Persentase Usaha Pertambangan yang menerapkan aspek pengusahaan di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Persen	59,46	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
42	Persentase pengujian kualitas bahan tambang	Persen	50,22	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
43	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat	Persen	10,25	11,79	13,56	15,59	17,93	17,93	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
44	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas I Cianjur	Persen	12,46	14,33	16,48	18,96	21,80	21,80	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
45	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas II Bogor	Persen	3,83	4,40	5,06	5,82	6,69	6,69	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
46	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	16,08	18,49	21,27	24,46	28,12	28,12	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
47	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas IV Bandung	Persen	17,89	20,57	23,66	27,21	31,29	31,29	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
48	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas V Sumedang	Persen	6,82	7,84	9,02	10,37	11,93	11,93	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
49	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	1,02	1,17	1,35	1,55	1,79	1,79	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
50	Persentase Meningkatnya Muka Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	13,66	15,70	18,06	20,77	23,88	23,88	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
51	Persentase penetapan NPA	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
52	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
53	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
54	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
55	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
56	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
57	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
58	Persentase penetapan NPA di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen			33,00	66,00	100,00	100,00	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
58	Persentase Meningkatnya Pengujian Kualitas Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Jawa Barat	Persen	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	62,50	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
30	**PERDAGANGAN**								
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,22	4,45	4,53	4,85	5,23	5,23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Triliun Rupiah	349	341,28	251,62	263,83	277,63	277,63	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	Laju pertumbuhan ekspor non migas	Persen	13.75	4,33	3,02	2,95	2,84	2,84	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4	Pertumbuhan Layanan SKA	Persen	1,52		2,83	2,75	2,68	2,68	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
5	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perdagangan	Persen	16 (pelaku usaha)		100	100	100	100	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	Peningkatan Nilai omset pelaku usaha yang terfasilitasi pemasaran produk dalam negeri	Persen	265.746.400 (rupiah)		25	25	25	25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
7	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Meningkat Kualitasnya	Persen	5,06		5,19	5,75	6,25	6,25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
8	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan barang pokok	Persen	5,06	5	6	6	6	6	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
9	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	93,11		90	90	90	90	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
10	Persentase barang beredar dan/atau jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	79		77	77	77	77	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
11	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	72,47		73	73	73	73	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
12	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Air Minum Dalam Kemasan Cirebon	Poin			4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
13	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Agro Bandung	Poin			4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
14	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Logam Elektonika Karawang	Poin			4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
15	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD BPSMB Keramik, Tabung Gas Bogor	Poin			4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16	Nilai Ekspor Non Migas Pelaku Usaha Pengguna SKA	Miliar USD	13,56		10,45	10,5	10,54	10,54	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
31	**PERINDUSTRIAN**								
1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	7,00	3,72	5,76	5,84	5,93	5,93	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Trilyun Rupiah	1.023,40	892,86	762,45	807,01	854,88	854,88	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	Nilai produksi Industri Pengolahan	Rupiah	1.076 Triliun		1.120 Triliun	1.164 Triliun	1.211 Triliun	1.211 Triliun	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4	Pertambahan jumlah industri kecil menengah baru yang dilayani pada UPTD Industri Logam	Pelaku Usaha			30	35	40	40	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5	Pertambahan jumlah industri kecil menengah baru yang dilayani Pada UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Pelaku Usaha			100	110	120	120	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Terhadap Izin Usaha Industri	Persen			> 50%	> 50%	> 50%	> 50%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
7	Persentase peningkatan industri yang masuk SIINas	Persen			11	11	11	11	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
32	**SEKRETARIAT DAERAH**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A	A	A	A	A	A	Sekretariat Daerah
2	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai			80,75	80,83	80,91	80,91	Sekretariat Daerah
3	Persentase Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Harmonis	Persen			85	87,12	87,99	87,99	Biro Hukum dan HAM
4	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Poin			50,15	50,2	50,25	50,25	Biro Kesejahteraan Rakyat
5	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin			50,15	50,2	50,25	50,25	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
6	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Poin			50,15	50,2	50,25	50,25	Biro Perekonomian
7	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD	Poin			50,15	50,2	50,25	50,25	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
8	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup Administrasi Pembangunan	Persen			100	100	100	100	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
9	Level Maturitas UKPBJ	Level	3	3	3	3	3	3	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
10	Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	Peringkat			3	4	5	5	Biro Organisasi
11	Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	Persen			80	85	90	90	Biro Organisasi
12	Nilai Pelaporan Kinerja	Poin			12,35	12,44	12,54	12,54	Biro Organisasi
13	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai budaya kerja minimal "Baik"	Persen			65,79	73,68	81,57	81,57	Biro Organisasi
14	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal kategori “B”	Persen			92	94	100	100	Biro Organisasi
15	Persentase Perangkat Daerah Yang menerapkan kebijakan sistem kerja Dinamis	Persen			100	100	100	100	Biro Organisasi
16	Nilai AKIP Setda	Poin			84,43	84,52	84,6	84,6	Biro Umum
17	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum dan HAM	Poin			86,51	87,37	88,25	88,25	Biro Hukum dan HAM
18	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Poin			90,44	91,34	92,25	92,25	Biro Kesejahteraan Rakyat
19	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin			85,5	86,35	87,21	87,21	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
20	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Perekonomian	Poin			95,2	95,29	95,39	95,39	Biro Perekonomian

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
21	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Poin			88,95	89,84	90,74	90,74	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
22	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pengadaaan Barang dan Jasa	Poin			96,82	96,91	97,01	97,01	Biro Pengadaaan Barang dan Jasa
23	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Organisasi	Poin			87,71	88,59	89,47	89,47	Biro Organisasi
24	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Administrasi Pimpinan	Poin			94,61	94,71	94,8	94,8	Biro Administrasi Pimpinan
25	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum	Poin			90,68	91,58	92,5	92,5	Biro Umum
33	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	4,7	4	4	4	4	4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Persentase penyusunan Peraturan Daerah dan pelaksanaan publikasi	Persen			100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Persentase penysunan persetujuan anggaran dan pengawasan APBD	Persen			100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	Persentase penyusunan pembangunan berdasarkan penjaringan aspirasi	Persen			100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan keuangan kesejahteraan, dan administrasi secara tepat waktu	Persen			100	100	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
34	**PERENCANAAN**								
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin	25,7	28	25,85	25,94	26,04	26,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Poin			26,13	26,22	26,32	26,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen			93	94	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Persentase Hasil Pengukuran Kinerja yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen			80	85	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persen			93	94	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen			80	85	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persen			93	94	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat	Persen			80	85	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
	daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam								
9	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Persen			93	94	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Tingkat pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen			80	85	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35	**KEUANGAN**								
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat beserta Pergub Penjabarannya	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4	Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi Pajak yang tepat waktu	Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
6	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi/disahkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
7	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi/disahkan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
8	Indeks Pengelolaan Aset	Poin			80	90	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
9	Persentase pendapatan pemanfaatan BMD terhadap total PAD	Persen			0,065	0,077	0,090	0,090324048	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
10	Jumlah terbit buku sertifikat tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Buku Sertifikat			150	150	150	150	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
11	Tingkat Capaian Target Pendapatan Daerah	Persen			100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
12	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen			70,06	64,26	64,86	64,86	Badan Pendapatan Daerah
13	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen			4,83	-24,47	3,94	3,94	Badan Pendapatan Daerah
36	**KEPEGAWAIAN**								
1	Indeks Sistem Merit	Poin	396,5	390	397,5	397,5	400	400	Badan Kepegawaian Daerah
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Poin			44,90	45,90	46,90	46,9	Badan Kepegawaian Daerah
3	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	116,50	120	117,50	117,50	120	120	Badan Kepegawaian Daerah
4	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Poin	40	40	40	40	40	40	Badan Kepegawaian Daerah
5	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	120	110	120	120	120	120	Badan Kepegawaian Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
6	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	120	120	120	120	120	120	Badan Kepegawaian Daerah
7	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin			12,50	13	13,50	13,5	Badan Kepegawaian Daerah
8	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin			27,50	28	28,50	28,5	Badan Kepegawaian Daerah
9	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin			4,99	4,99	4,99	4,99	Badan Kepegawaian Daerah
37	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Poin			30	31	32	32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Indeks Implementasi Corporate University	Kategori			C	B	A	A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase peningkatan kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial	Persen			30	75	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Persentase peningkatan Kompetensi ASN di Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional	Persen			30	75	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Persentase Implementasi CorPu yang Diaudit	persen			100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin			69,65	70,15	70,65	70,65	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen			100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
3	Presentase Kekayaan Intelektual yang terlindungi	Persen			100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
4	Persentase Kematangan Inovasi Daerah	Persen			63,171	63,834	64,500	64,5	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Persentase Informasi Publik Bidang Kelitbangan	Persen			100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
6	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang siap untuk didiseminasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
7	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang siap untuk didiseminasikan	Persen			100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
8	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang siap untuk didiseminasikan	Persen			100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
9	Persentase Hasil Kelitbangan yang didiseminasikan	Persen			100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10	Persentase Perlindungan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi	Persen			100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
11	Persentase Inovasi Daerah yang terverifikasi	Persen			100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
12	Persentase publikasi kelitbangan	Persen			100	100	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
39	**PENGHUBUNG**								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penghubung	Poin	96,33	85	96,50	96,75	97	97	Badan Penghubung
2	Tingkat Layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol, Promosi dan Informasi yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Penghubung
40	**PENGAWASAN**								
1	Peringkat Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	Peringkat			3	3	3	3	Inspektorat Daerah
2	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nlai	A	A	A	A	A	A	Inspektorat Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
3	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Daerah
4	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3	4	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
5	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Persen	98,23	100	98,90	99	99,10	99,10	Inspektorat Daerah
6	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	persen			100,00	100	100,00	100	Inspektorat Daerah
7	Nilai SAKIP komponen evaluasi internal	Nilai			9,00	9	10,00	10	Inspektorat Daerah
8	Persentase kriteria LKPD yang terpenuhi sesuai ketentuan	persen			100,00	100	100,00	100	Inspektorat Daerah
9	Penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	persen			75,00	78	80,00	80	Inspektorat Daerah
10	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti	persen			68,00	70	75,00	75	Inspektorat Daerah
11	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Perangkat Daerah			38,00	38	38,00	38	Inspektorat Daerah
12	Persentase nilai MCP	Persen			98,90	99	99,10	99,10	Inspektorat Daerah
41	**PEMERINTAHAN UMUM**								
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	N/A	72,79	82,14	82,96	83,79	83,79	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Nilai Aspek Kebebasan	Poin			91,11	92,91	93,71	93,71	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Nilai Aspek Kesetaraan	Poin			75,39	76,19	76,79	76,79	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Poin			80,33	81,13	81,93	81,93	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
			2022	2023	2024	2025	2026		
5	Persentase konflik sosial yang ditangani	Persen			100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6	Persentase pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan beragama	Persen			0,409	0,414	0,439	0,439	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen			46,42	47,78	49,83	49,829	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	Persentase Kerjasama Lembaga antar umat beragama	Persen			35,29	41,18	47,06	47,059	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
9	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi	Persen			0,039	0,041	0,043	0,043	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
10	Persentase pencegahan pengguna narkotika bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen			5,422	5,678	5,934	5,934	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
11	Persentase peserta (pemilih) yang mengikuti pendidikan politik	Persen			0,007	0,007	0,007	0,007	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber: hasil proyeksi, 2023
Keterangan: *) Data capaian tahun 2021
Indikator Baru untuk Tahun 2024-2026

8.4 Indikator Kinerja Makro Kabupaten/Kota

Subbab ini memuat proyeksi target 3 (tiga) indikator makro kabupaten/kota yaitu 1) Persentase Penduduk Miskin, 2) Tingkat Pengangguran Terbuka, dan 3) Laju Pertumbuhan Ekonomi. Ketiga indikator makro tersebut merupakan instrumen pengukuran kinerja daerah yang umum digunakan, dan secara khusus terkait dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat pada periode 2024-2026. Proyeksi ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi kabupaten/kota dalam rangka mendukung pencapaian target ketiga indikator tersebut di tingkat provinsi. Target yang dimuat dalam tabel di bawah bersifat indikatif dan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini masing-masing daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.4.

Tabel 8.4
Proyeksi Target Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

NO.	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN*(%)			TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)			LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Bogor	7,46	7,33	7,20	10,56	10,51	10,47	5,23	5,84	5,70
2	Sukabumi	7,12	7,02	6,91	7,71	7,68	7,65	5,11	5,35	5,22
3	Cianjur	10,28	10,14	10,01	8,28	8,21	8,14	5,34	5,59	5,45
4	Bandung	6,62	6,53	6,44	6,92	6,90	6,87	5,49	5,70	5,51
5	Garut	10,15	10,02	9,89	7,54	7,51	7,48	4,84	5,06	4,94
6	Tasikmalaya	10,60	10,54	10,47	4,10	4,07	4,04	5,13	5,37	5,24
7	Ciamis	7,57	7,50	7,43	3,69	3,66	3,63	5,31	5,56	5,42
8	Kuningan	12,60	12,51	12,43	9,73	9,69	9,65	6,22	5,47	5,34
9	Cirebon	11,75	11,62	11,49	7,98	7,92	7,85	4,89	5,12	4,99
10	Majalengka	11,77	11,69	11,61	4,09	4,06	4,03	5,72	5,98	5,84
11	Sumedang	10,03	9,98	9,92	7,66	7,63	7,60	5,38	5,64	5,50
12	Indramayu	12,48	12,33	12,19	6,39	6,34	6,29	2,41	2,52	2,46
13	Subang	9,45	9,30	9,16	7,65	7,59	7,52	4,04	4,23	4,13
14	Purwakarta	8,60	8,55	8,50	8,61	8,54	8,47	5,02	5,25	5,13
15	Karawang	7,82	7,52	7,24	9,79	9,75	9,71	5,02	5,25	5,12
16	Bekasi	4,95	4,92	4,89	10,15	10,07	9,98	5,37	5,62	5,48
17	Bandung Barat	10,61	10,51	10,41	9,55	9,52	9,48	5,37	5,63	5,49
18	Pangandaran	9,17	9,09	9,01	1,54	1,52	1,51	4,87	5,10	4,97
19	Kota Bogor	7,02	6,97	6,93	10,69	10,65	10,61	5,65	5,92	5,77
20	Kota Sukabumi	7,92	7,87	7,82	8,76	8,72	8,69	5,22	5,46	5,33
21	Kota Bandung	4,20	4,17	4,15	9,47	9,44	9,40	6,52	6,82	6,65
22	Kota Cirebon	9,70	9,64	9,59	8,29	8,22	8,15	5,62	5,88	5,74
23	Kota Bekasi	4,32	4,27	4,22	8,74	8,70	8,67	5,96	6,29	6,19
24	Kota Depok	2,50	2,48	2,47	7,76	7,73	7,70	6,42	6,72	6,55
25	Kota Cimahi	4,89	4,78	4,68	10,68	10,64	10,60	5,78	6,05	5,91
26	Kota Tasikmalaya	11,93	11,54	11,17	6,51	6,46	6,41	5,36	5,79	5,65
27	Kota Banjar	6,71	6,70	6,69	5,44	5,40	5,36	5,26	5,68	5,55
	Provinsi Jawa Barat	**7,34**	**7,13**	**7,00**	**8,01**	**7,88**	**7,76**	**5,67**	**5,81**	**5,97**

Sumber: Hasil proyeksi, 2023; Ket: * Data Maret 2017 s/d 2022

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024. RPD menjadi pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Gubernur. Penyusunan RPD yang disertai dengan Renstra Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. RPD Tahun 2024-2026 sebagai pelaksanaan RPJPD tahap akhir disusun dengan memedomani arah kebijakan dan sasaran pokok tahap V pada RPJPD guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPD sebagai berikut:

1. Pejabat (Pj) Gubernur mengarahkan pelaksanaan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
2. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi dan media.
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Penyusunan RPD kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sesuai

kewenangan masing-masing sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.

5. Dokumen RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
6. Pejabat (Pj) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi hasil RPD secara periodik, yang dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
7. Pemerintah Daerah melakukan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah setiap tahun dengan berpedoman pada RPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Pembangunan di Provinsi Jawa Barat melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah guna mencapai target pembangunan RPD sangat strategis sebab merupakan pelaksanaan dari tahap akhir RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah di Jawa Barat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing Jawa Barat.

Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan, maka dokumen RPD ini digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan disusunnya RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024. Pengaturan lebih lanjut mengenai transisi dari RPD Tahun 2024-2026 ke RPJMD periode berikutnya mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Jawa Barat

Jln. Ir. H. Djuanda Nomor 287, Dago, Kota Bandung